BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7069);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
6. Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di Kabupaten Takalar.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja-PD merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja anggaran PD Tahun 2025.

Pasal 3

Renja-PD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
b. hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran PD;

e. rencana kerja dan pendanaan PD; dan
f. penutup.

Pasal 4

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat Daerah;
d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Badan Pendapatan Daerah;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
k. Dinas Kesehatan;
l. RSUD Padjonga Dg. Ngalle;
m. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
n. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
p. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
s. Dinas Perhubungan;
t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
x. Dinas Perikanan;
y. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
z. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
aa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
bb. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
cc. Kecamatan Pattallassang;
dd. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
ee. Kecamatan Polongbangkeng Utara;
ff. Kecamatan Mangarabombang;
gg. Kecamatan Mappakasunggu;
hh. Kecamatan Sanrobone;
ii. Kecamatan Galesong Selatan;
jj. Kecamatan Galesong;
kk. Kecamatan Galesong Utara;
ll. Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
mm. Kecamatan Laikang;
nn. Kecamatan Polongbangkeng Timur.

Pasal 5

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 12 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD ASHASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAKALAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **I**

DAFTAR TABEL ..... **III**

DAFTAR GAMBAR ..... **IV**

BAB I PENDAHULUAN ..... **-2**

1.1 LATAR BELAKANG I-2
1.2 LANDASAN HUKUM I-8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN I-11
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN I-12

BAB II EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **II-1**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I .....
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL,PEMBERDYAAN MASYRAKAT DAN DESA .....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA **III-1**

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL III-1
3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan *III-2*
3.2 TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA III-3
1.1.1 Tujuan *III-3*
1.1.2 Sasaran *III-3*

BAB IV RENCANA PROGRAM,KEGITAN, DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA **IV-1**

4.1 DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....IV-1
4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL PEMBERDYAAN MASYRAKAT DAN DESA.....IV-5

BAB V PENUTUP V-1

1.2 CATATAN PENTING V-1
1.3 KAIDAH PELAKSANAAN V-1
1.4 RENCANA TINDAK LANJUT V-1

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ……...

TABEL II.2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025…….. ……

TABEL II.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan1 ……...,

TABEL II.4 Rekapitulasi Capaian Anggaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan……

TABEL II.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan……

TABEL II.6 Capaian Indikator Kinerja Utama 2024, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2026……...

TABEL II.8 Penetapan Target Indikator SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa…….. ……

TABEL III.1 Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025……..

TABEL IV.1 Daftar Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah……

TABEL IV.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa ……

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Keterkaitan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-4

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 tidak terlepas dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar 2025-2029. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Serta peningkatan perencanaan pembangunan dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2026 mendatang.

Takalar, Juni 2025

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Drs. ANDI RIJAL MUSTAMIN, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 197407131992111001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Gambar I-1
Keterkaitan Perubahan Renja Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

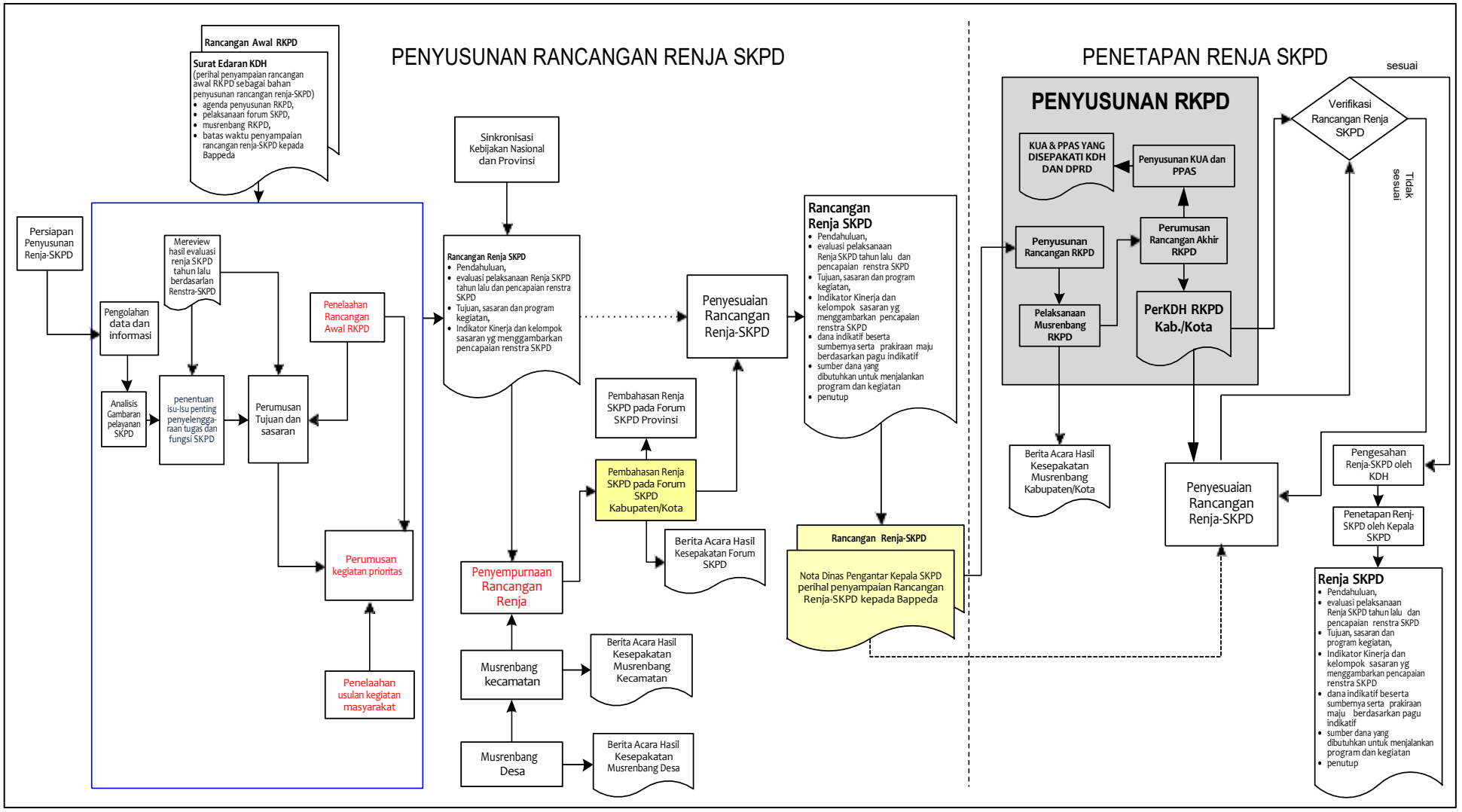

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar yang disusun ini juga telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada Renstra.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan pada Bulan Januari yang meliputi penetapan Tim Penyusun dan pengumpulan data teknis;
2. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 pada Bulan Januari dengan memperhatikan Rancangan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2026;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
5. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
6. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025;

7. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Renstra Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor- faktor keberhasilan, evaluasi Perubahan Renja tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar sangat penting bagi pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar secara khusus dan pemerintah daerah secara umum, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan forum Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani Renstra PD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renja memiliki nilai-nilai strategis, yaitu :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun;
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar;
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja tahunan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025;

5. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
6. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
7. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025;
8. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 299)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik IndonesiaNomor 9 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419).
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
20. Peraturan Bupati Takalar Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar.
21. Peraturan Bupati Takalar No. 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daearah Kabupaten Takalar tahun 2025.
22. Keputusan Bupati Takalar Nomor 608 Tahun 2021 Tentang kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedalam program/kegiatan tahunan
b. Menyiapkan acuan bagi Perubahan APBD
c. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Perubahan Renja PD) adalah agar terbangun

konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023. Pada Bab ini berisi empat hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar. Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025. Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penyajian Tabel rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025..

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampai dengan Triwulan I, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	8		24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
							DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
		1					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100%**	**5.788.105.763**		**-**	**16%**	**759.120.199**	**15,85%**	**13,12%**		
		1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**		**100%**	**4.568.105.763**		**-**	**29%**	**744.321.199**	**29,33%**	**16,29%**		
		1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**100%**	**3.988.105.763**	**0,00%**	**-**	**31,32%**	**730.024.199**	**31,32%**	**18,31%**	**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
		1	06	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	6.000.000	0%	-	50%	1.983.000	50,00%	33,05%		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	2	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1.000.000	-	-	1	991.500	100,00%	99,15%		

		1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.000.000	-	-	1	991.500	100,00%	99,15%		
		1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1	1.000.000	-	-	1	-	100,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**60,00%**	**39,66%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**R**	**SR**		
		1	06	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persantase penyusunan laporan Keuangan Perangkat Daerah**	100%	3.855.953.643	0,00%	-	14,94%	696.594.054	14,94%	18,07%		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	462	2.711.982.301	-	-	132	694.773.054	28,57%	25,62%		
								Jumlah ASN yang mendapatkan TPP	396	1.123.651.342	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
								Jumlah ASN yang menerima Objektifitas lainnya	24	10.320.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	06	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		

		1	06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut pemeriksaan	1	2.000.000	-	-	1	1.821.000	100,00%	91,05%		
		1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	2	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**16,07%**	**14,58%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
		1	06	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan Laporan Barang**	100%	2.870.730	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	06	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2	1.352.530	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang dan Milik Daerah pada SKPD	2	1.518.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
		1	06	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	37.252.130	0,00%	-	31,91%	12.803.000	31,91%	34,37%		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	7	2.252.130	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	35.000.000	-	-	15	12.803.000	37,50%	36,58%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**18,75%**	**18,29%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		

		1	06	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	4.554.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	4.554.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
		1	06	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	70.586.660	0,00%	-	47,37%	15.044.360	47,37%	21,31%		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang dibayarkan untuk penyediaan jasa Sumber Daya Air	12	7.790.000	-	-	2	3.047.700	16,67%	39,12%		
								Jumlah bulan yang dibayarkan untuk penyediaan Listrik	1	2.596.660	-	-	1	2.596.660	100,00%	100,00%		
		1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan umum kantor	6	60.200.000	-	-	6	9.400.000	100,00%	15,61%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**72,22%**	**51,58%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**S**	**R**		
		1	06	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	100%	10.888.600	0,00%	-	75,00%	3.599.785	75,00%	33,06%		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	8.586.000	-	-	6	3.599.785	85,71%	41,93%		
		1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	2.302.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**42,86%**	**20,96%**		

Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**29,99%**	**20,73%**		
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**		
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Adanya sub Kegiatan yang mencapai Kinerja 100% dikarenakan Sub Kegiatan tersebut telah selesai di Triwulan I																		
Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.																		
Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																		
		1	06	02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Peningkatan Kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)**	**100%**	**2.000.000**	**0%**	**-**	**50%**	**1.000.000**	**50,00%**	**50,00%**	**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
		1	06	02	20.3		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Takalar**	**Jumlah Potensi sumber kesejahteraan sosial yang dilatih**	100%	2.000.000	0,00%	-	50,00%	1.000.000	50,00%	50,00%		
	Meningkatnya Penanganan PMKS	1	06	02	20.3	01	Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	2	1.000.000	-	-	2	1.000.000	100,00%	100,00%		
		1	06	02	20.3	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya	2	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**50,00%**	**50,00%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**50,00%**	**50,00%**		
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**		
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Adanya sub Kegiatan yang mencapai Kinerja 100% dikarenakan Sub Kegiatan tersebut telah selesai di Triwulan I																		
Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.																		
Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																		

		1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis diluar panti**	**100%**	**267.000.000**	**0,00%**	**-**	**18,65%**	**1.741.000**	**18,65%**	**0,65%**	**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
		1	06	04	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial**	**Persentase Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis diluar panti**	100%	263.000.000	0,00%	-	24,80%	1.181.000	24,80%	0,45%		
	Meningkatnya Penanganan PMKS	1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	200	101.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan	2	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	4.500	161.000.000	-	-	1.166	1.181.000	25,91%	0,73%		SPM Rp.100.000.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**8,64%**	**0,24%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
		1	06	04	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang direhabilitasi**	100%	4.000.000	0,00%	-	12,50%	560.000	12,50%	14,00%		
	Meningkatnya Penanganan PMKS	1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kedaruratan	20	1.000.000	-	-	5	-	25,00%	0,00%		

		1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	10	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		SPM Rp.100.000.000
		1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan	10	2.000.000	-	-	-	560.000	0,00%	28,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**8,33%**	**9,33%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**8,49%**	**4,79%**		
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		1	06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase data DTKS Kab. Takalar**	**100%**	**106.000.000**	**0,00%**	**-**	**26,00%**	**-**	**26,00%**	**0%**	**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
		1	6	05	2.01		**Pemeliharaan Anak-anak terlantar**	**Persentase anak terlantar yang dipelihara**	100%	2.000.000	0,00%	-	52,00%	-	52,00%	0,00%		
	Meningkatnya Penanganan PMKS	1	6	05	201	02	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	200	2.000.000	-	-	104	-	52,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**52,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**R**	**SR**		
		1	06	05	2.02		**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota**	**Persentase Data Fakir Miskin dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi fakir miskin**	100%	104.000.000	0,00%	-	0%	-	0,00%	0,00%		

	Meningkatnya Penanganan PMKS	1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir miskin	Jumlah Fakir miskin	7.782	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		kEMISKINAN EXTRIM Rp.1.000.000
		1	06	05	2.02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota	jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	4.126	500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		kEMISKINAN EXTRIM Rp.2.000.000
		1	06	05	2.02	03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	jumlah masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	700	101.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		kEMISKINAN EXTRIM Rp.1.000.000
		1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	5	500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		kEMISKINAN EXTRIM Rp.1.000.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**26,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencanayang tertangani**	**100%**	**201.000.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**9.556.000**	**0,00%**	**5%**	**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
		1	06	06	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**Persentase korban bencana Alam dan Sosial yang tertangani**	100,00%	100.000.000	0,00%	-	0,00%	9.556.000	0,00%	9,56%		
	Meningkatnya Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial	1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang memperoleh bantuan makanan	200	100.000.000	-	-	-	9.556.000	0,00%	9,56%		SPM Rp.100.000.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**9,56%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		

		1	06	06	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Kesiapsiagaan bencana teratasi**	100%	101.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%		
		1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah peserta TAGANA yang dilatih	100	101.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**0,00%**	**4,78%**		
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		1	06	07			**PROGRAM PENGELOLAAN TMP**	**Persentase TMP yang terpelihara**	**100%**	**4.000.000**	**0,00%**	**-**	**50,00%**	**2.000.000**	**50,00%**	**50%**	**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
		1	06	07	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Taman Makan Nasional yang dipelihara**	100%	4.000.000	0,00%	-	50,00%	2.000.000	50,00%	50,00%		
	Meningkatnya Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial	1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota	4	2.000.000	-	-	4	2.000.000	100,00%	100,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**50,00%**	**50,00%**		

Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**50,00%**	**50,00%**		
Predikat Kinerja Program														**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
		2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		**100%**	**1.220.000.000**		**-**	**2%**	**14.799.000**	**2,36%**	**1,21%**		
		2	13	02			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Penataan Desa**	**######**	**2.000.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**630.000**	**0,00%**	**32%**	**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
		2	13	02	2.01		**Penyelanggaraan Penataan Desa**	**Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa**	100%	2.000.000	0,00%	-	0,00%	630.000	0,00%	31,50%		
	Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Ekologi di Desa	2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1	2.000.000	-	-	-	630.000	0,00%	31,50%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**31,50%**		
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**0,00%**	**31,50%**		
Predikat Kinerja Program														**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		2	13	04			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa**	**100%**	**108.000.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
		2	13	04	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa**	100%	108.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%		
	Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Ekologi di Desa	2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	86	4.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dala pengelolaan dan penatausahaan Keuangan dan Asset Desa	86	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang mengikuti pelatihan peningkatan aparatur Desa	10	101.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa	86	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**0,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		2	13	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang terdapat disemua desa dan kelurahan di kabupaten Takalar**	**100%**	**1.110.000.000**	**0,00%**	**-**	**7,09%**	**14.169.000**	**7,09%**	**1%**	**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
		2	13	05	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/ Kota**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang ada diKabupaten Takalar**	100%	1.110.000.000	0,00%	-	7,09%	14.169.000	7,09%	1,28%		
		2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Peningkatan Penataan pemberdayaan dan pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	4.000.000	-	-	2	698.000	40,00%	17,45%		
	Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Ekologi di Desa	2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang dibina dalam peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	86	500.000.000	-	-	6	12.339.000	6,98%	2,47%		
		2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah BUMDES yang dibina	91	603.000.000	-	-	5	879.000	5,49%	0,15%		
		2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tegnologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Desa yang menerapkan Tegnologi Tepat Guna (TTG)	86	3.000.000	-	-	6	253.000	6,98%	8,43%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**14,86%**	**7,12%**	

Predikat Kinerja Kegiatan	**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**14,86%**	**7,12%**
Predikat Kinerja Program	**SR**	**SR**

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**19,93%**	**18,77%**
Predikat Kinerja Program	**SR**	**SR**

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

1. sub kegiatan yang belum mencapai target kinerja dikarenakan sub kegiatan tersebut belum sesuai jadwal pelaksanaan program dan kegiatan serta rencana penarikan dana.

2.

33

4.

5.

Faktor penghambat:

1.Sub Kegiatan yang belum mencapai target Kinerja dikarenakan Sub Kegiatan tersebut belum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Sub Kegiatan yang tidak terealisasi Anggarannya, dikarenakan Sub Kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

3. Ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

4.

5.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

1.

2.

3.
4.
5.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):
1.
2.

Sumber : Monev TW I Tahun 2025

2.1.1 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Dinas Sosial, Pemberdyaan Masyarakat yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Dinas Sosial,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	18	46	9	18	49
TOTAL		**9**	**18**	**46**	**9**	**18**	**49**

Sumber data : Monev Renja TW I Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 9, jumlah kegiatan 18, dan jumlah sub kegiatan 46, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 9, jumlah indikator kegiatan sebanyak 18, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 49

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan. dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Kabupaten Takalar Tahun 2025
Hingga Triwulan I

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,788,105,763	759,120,199	15,85%	13,12%
TOTAL		**5,788,105,763**	**759,120,199**	**15,85%**	**13,12%**

Sumber data : Monev Renja TW I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp. 759,120,199,-. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 13,12 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 15,85 persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 sampai pada Triwulan I

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 20 persen.

Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 25 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 25 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Sebagai berikut:

1. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program**

   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program, anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 9 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah atau 60% (realisasinya 0-10 persen) sebanyak 5 program yaitu Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program atau 10 persen (realisasi >10-20 persen) yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 3 Program atau 40 persen (realisasi diatas 20 persen), yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota, Program Pemberdayaan Sosial,Program Pengeloaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Program Penataan Desa.

2. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan**

   Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dapat dijelaskan bahwa terdapat 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 9 kegiatan atau 50 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 2 kegiatan atau 15 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 7 kegiatan atau 35 persen. 24

3. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan**

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Sosial Pembeerdayaan Masyarakat dan Desa pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 46 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 33 sub kegiatan atau 70 persen yang capaian kinerja pendanaannya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 2 sub kegiatan atau 5 persen, dan 11 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau 25 persen sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 25 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I
Tahun 2025

No.Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian kinerja Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja Pendanaan		
		0 - 10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	9	5	1	3	18	9	2	7	46	33	2	11

Sumber data : Monev Renja TW I Tahun 2025

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025 sampai pada Triwulan I

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi Capaian Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi Kinerja lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi**

untuk realisasi kinerja diatas 20 persen.

Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 25 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi kinerja lebih dari 25 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi. Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Sebagai berikut:

4. **Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Program**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada level program, anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 9 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah atau 45 Persen (realisasinya 0-10 persen) sebanyak 4 program yaitu Program Penanganan Bencana, Program Penataan Desa dan Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program atau 10 persen (realisasi >10-20 persen)yaitu Program Rehabilitasi Sosial dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 4 program atau 45 persen (realisasi diatas 20 persen), yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota, Program Pemberdayaan sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,Program Pengeloaan Taman Makam Pahlawan (TMP), Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

5. **Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Kegiatan**

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 8 kegiatan atau 40 persen yang realisasi kinerjanya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 2 kegiatan atau 20 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 8 kegiatan atau 40 persen. 24

6. **Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Sub Kegiatan**

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Sosial Pembeerdayaan Masyarakat dan Desa pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 46 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 31 sub kegiatan atau 70 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 1 sub kegiatan atau 5 persen, dan 14 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau 25 persen sebab telah dapat mencapai realisasi

pendanaan lebih dari 25 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No.Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome		
		0 - 10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	9	4	1	4	18	8	2	8	46	31	1	14

Sumber data : Monev Renja TW I Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metedologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, yakni 1) Sederhana, 2) Partisipatif, 3). Akuntabel, 4) Berkelanjutan, 5) Transparansi dan 6) Keadilan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Takalar merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan dalam pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS),Rekomnedasi KIP, Rekomendasi Listrik dan lainnya. Agar sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar dapat tercapai , maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Ada beberapa indikator kinerja yang dapat diukur untuk melihat capaian pelayanan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci,.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Kepala Dinas. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Organisasi. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RENSTRA sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RENSTRA yang digariskan pada Tahun 2025. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Penetapan Target indikator kinerja utama sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini;

Tabel II-3

Capaian Indikator Kinerja Utama 2024, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pe Kabupaten Takalar Tahun 2026

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar pant	60	100	Persentase Peningkatan pelayanan PPKS kewenangan kabupaten	100	100	100		100	100	
2	Persentase Kepatuhan terhadap pelaksanaan Standar pelayanan di bidang sosial (indikator SPM)	60	100	Indeks Desa Membangun	>0,7072 s.d <0,8155	>0,7072 s.d <0,8155	>0,7072 s.d <0,8155		>0,7072 s.d <0,8155	>0,7072 s.d <0,8155	
3	Persentase pelayanan pencapaianpelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan KUBE	80	0	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100		100	100	
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	8.15%	100	Persentase Status Desa Mandiri	100	100	100		100	100	
5	Indeks Desa Membangun	>0,7072 s.d <0,8155	>0,4907s.d <0,8155	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB	BB	BB	B	BB	BB	

6	Jumlah Desa Mandiri	1	16	Nilai SAKIP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB	BB	BB	B (69,91)	BB	BB	
7	Jumlah Desa Maju	8	40								
8	Jumlah Desa Berkembang	67	25								
9	Jumlah Desa Tertinggal	0	5								
10	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	8								
11	Nilai SAKIP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B (60)	BB (75,05)								

Berdasarkan tabel II-6 di atas dapat di lihat bahwa capaian kinerja masing masing indikator beserta faktor pendukung dan penghambat pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar Panti pada Tahun 2024 yaitu : Tahun 2024 target 60% dengan realisasi 100% melebihi target dikarenakan semua PPKS dapat terlayani dengan penjelasan di narasi dibawah ini :
   - **Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti**, Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yaitu :
     - Tahun 2024 target 100% dengan realisasi 100% target sama dengan Realisasi dikarenakan Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dimana di targetkan 500 Orang dan yang dilayani 848 Orang
     - Tahun 2025 target 100% dengan realisasi 12% dimana target untuk Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dimana di targetkan 250 Orang dan Orang dan yang dilayani sampai dengan Triwulan I sebanyak 30 Orang.
   - **Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti**
     Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti:
     - Tahun 2024 target 100% dengan realisasi 100% target sama dengan Realisasi dikarenakan Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dimana di targetkan 10.000 Orang dan yang dilayani 15.853 Orang
     - Tahun 2025 target 100% dengan realisasi 52% dimana target Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dimana di targetkan 200 Orang dan yang dilayani sampai dengan Triwulan I sebanyak yang dilayani sebanyak 104 Orang.
   - **Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti**
     Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti:
     - Tahun 2024 target 100% dengan realisasi 100% target sama dengan Realisasi dikarenakan Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dimana di targetkan 5.000 Orang dan yang dilayani 7.699 Orang
     - Tahun 2025 target 100% dengan realisasi 81,6% dimana target Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar pant dimana di targetkan 250 Orang dan yang dilayani sampai dengan Triwulan I sebanyak 204 Orang.
   - **Rehabilitasi dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti**
     Jumlah warga negara khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti:
     - Tahun 2024 target 100% dengan realisasi 0% Realisasi nol persen dikarenakan Jumlah warga negara khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti tidak ada dimana targetkan 10 Orang dan yang dilayani 0 Orang.
     - Tahun 2025 target 100% dengan realisasi 0% dimana Jumlah warga negara khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial dimana di targetkan 10 Orang dan yang dilayani sampai dengan Triwulan I 0 Orang.

2. Persentase Kepatuhan terhadap pelaksanaan Standar pelayanan di bidang sosial (indikator SPM) pada Tahun 2024
    - Tahun 2024 target 60% dengan realisasi 100% melebihi target dikarenakan Kepatuhan Standar Pelayanan di bidang sosial sudah sangat memadai juga melayani dengan maksimal semua PPKS yang memerlukan Pelayanan
3. Persentase pelayanan pencapaian pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan KUBE pada tahun 2024
    - Tahun 2024 target 80% dengan realisasi 0% kurang dari target dikarenakan anggaran Bantuan Non Tunai tidak ada dan Bantuan KUBE sudah tidak ada lagi terakhir tahun 2019
4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
    - Tahun 2024 target 80% dengan realisasi 100% lebih dimana target tahun 2024 sebanyak 250 orang dan tertangani sebanyak 257 Orang
5. Indeks Desa Membangun pada tahun 2024
    - Tahun 2024 target > 0,7072 s.d < 0,8155 dengan realisasi > 0,4907 s.d < 0,8155
6, Jumlah Desa Mandiri pada tahun 2024
    - Tahun 2024 target 1 Desa Mandiri dengan realisasi 16 Desa Mandiri melebihi target dikarenakan adanya 15 Desa yang berdasarkan karakteristik,pengukuran dan Penilaian untuk menjadi Desa Mandiri
7. Jumlah Desa Maju pada tahun 2024
    - Tahun 2024 target 8 Desa Maju dengan realisasi 40 Desa Maju melebihi target dikarenakan adanya Desa 32 Desa yang berdasarkan karakteristik,pengukuran dan Penilaian untuk menjadi Desa Maju
8. Jumlah Desa Berkembang pada tahun 2024
    - Tahun 2024 target 67 Desa Berkembang dengan realisasi 25 Desa Berkembang Kurang dari target dikarenakan adanya beberapa Desa berkembang yang berdasarkan karakteristik,pengukuran dan Penilaian untuk menjadi Desa Maju dan Mandiri
9. Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2024
    - Tahun 2024 target 0 Desa Tertinggal dengan realisasi 5 Desa Tertinggal lebih dari target dikarenakan masih adanya beberapa Desa tertinggal yang berdasarkan karakteristik,pengukuran dan Penilaian belum memenuhi kriteria untuk menjadi Desa berkembang
10. Indeks Reformasi Birokrasi hanya dilakukan penilaian ditingkat kabupaten. dan diukur secara seragam oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) seperti evaluasi yang dilakukan di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

11. Nilai SAKIP pada Dinas, Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024-2025 dengan capaian, yaitu

    - Tahun 2024 target “B” dengan realisasi mendapat Penilaian “BB” atau terjadi Peningkatan hasil penilaian
    - Tahun 2025 target “B”dengan realisasi mendapat nilai “B” berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah Internal Inspektorat pada tanggal 20 Maret 2025

    Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dan Tahun 2025 Triwulan I adalah :

    Faktor Internal

1. **Sumber daya manusia (SDM):** Kualitas, kompetensi, dan motivasi pegawai kecamatan memainkan peran penting dalam mencapai IKU. Pelatihan yang tidak optimal dapat menghambat peningkatan kapasitas pegawai.
2. **Kepemimpinan seorang Kepala Dinas :** Gaya kepemimpinan yang efektif dapat memacu kinerja bawahan melalui pemberian semangat kerja, pelatihan, dan perhatian terhadap kebutuhan pegawai.
3. **Budaya kerja:** Budaya kerja yang positif, kolaboratif, dan disiplin sangat memengaruhi kinerja pegawai. Sebaliknya, budaya kerja yang kurang optimal dapat berdampak pada pencapaian program.
4. **Sarana dan prasarana:** Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana, seperti peralatan kantor, juga mempegaruhi kinerja.
5. **Manajemen kinerja:** Sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang terstruktur dan objektif berperan dalam mencapai target IKU.
6. **Koordinasi internal:** Komunikasi dan kerja sama yang baik antar bidang dan sub bagian di dalam didalam kantor serta dengan pemerintah desa dan kelurahan, dapat meningkatkan efektivitas kinerja.

Faktor Eksternal

1. **Dukungan kebijakan dan anggaran:** Kebijakan yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah kabupaten/kota sangat vital dalam menunjang kegiatan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. **Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan:** Perubahan isu sosial, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat memengaruhi cara Dinas, Sosial, merumuskan dan mencapai IKU.
4. **Sistem data:** Kurangnya sinkronisasi sistem data antara Dinas terkait, misalnya dalam hal administrasi kependudukan, dapat menghambat kinerja pelayanan

2.2.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial.

Adapun penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.4
Indikator Standar Pelayanan Minimal(SPM) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Triwulan I	
1	2	3	4	5	6	7	10
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti						
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	12	Dinas Sosial & PMD
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti						
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	52	Dinas Sosial & PMD
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti						
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	81,6	Dinas Sosial & PMD
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti						
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100	100	0	Dinas Sosial & PMD
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota						
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	80	100	100	12	Dinas Sosial & PMD

Berdasarkan tabel II-6 di atas dapat di lihat bahwa capaian kinerja masing masing indikator beserta faktor pendukung dan penghambat pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti**, Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yaitu :
    - Tahun 2024 target 100% dengan realisasi 100% target sama dengan Realisasi dikarenakan Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dimana di targetkan 500 Orang dan yang dilayani 848 Orang
    - Tahun 2025 target 100% dengan realisasi 12% dimana target untuk Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dimana di targetkan 250 Orang dan Orang dan yang dilayani sampai dengan Triwulan I sebanyak 30 Orang

2. **Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti**
   Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti:
    - Tahun 2024 target 100% dengan realisasi 100% target sama dengan Realisasi dikarenakan Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dimana di targetkan 10.000 Orang dan yang dilayani 15.853 Orang
    - Tahun 2025 target 100% dengan realisasi 52% dimana target Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dimana di targetkan 200 Orang dan yang dilayani sampai dengan Triwulan I sebanyak yang dilayani sebanyak 104 Orang

3. **Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti**
   Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti:
    - Tahun 2024 target 100% dengan realisasi 100% target sama dengan Realisasi dikarenakan Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dimana di targetkan 5.000 Orang dan yang dilayani 7.699 Orang
    - Tahun 2025 target 100% dengan realisasi 81,6% dimana target Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar pant dimana di targetkan 250 Orang dan yang dilayani sampai dengan Triwulan I sebanyak 204 Orang
    -

4. **Rehabilitasi dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti**
   Jumlah warga negara khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti:
    - Tahun 2024 target 100% dengan realisasi 0% Realisasi nol persen dikarenakan Jumlah warga negara khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti tidak ada dimana targetkan 10 Orang dan yang dilayani 0 Orang
    - Tahun 2025 target 100% dengan realisasi 0% dimana Jumlah warga negara khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial dimana di targetkan 10 Orang dan yang dilayani sampai dengan Triwulan I 0 Orang

5. **Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana**

   Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

   - Tahun 2024 target 80% dengan realisasi 100% target sama dengan Realisasi dikarenakan Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial yang dimana di targetkan 250 Orang dan yang dilayani 257 orang
   - Tahun 2025 target 100% dengan realisasi 11,5% dimana Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dimana di targetkan 260 Orang dan yang dilayani sampai dengan Triwulan I sebanyak 30 Orang

.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Tema Kebijakan Nasional dan RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.3. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

- PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak asasi Manusia (HAM).
- PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- PN 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi , kesetaraan

gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

- PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- PN 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

- Dari 8 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut di atas, maka terdapat 1 (satu) Prioritas yang di dukung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Tugas dan Fungsinya yakni :

- PN 8 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mendasari hasil evaluasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029, tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 mengalami perubahan setelah disesuikan dengan dinamika isu – isu nasional dan lokal yang tertuang di dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029. Olehnya itu Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Adapun perubahan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

Rumusan tujuan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya kesejahteraan Sosial yang Inklusif, dan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan.

3.2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap PPKS
2. Meningkatnya ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi di desa;
3. Meningkatnya tata kelola kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Tabel III-1

Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025 (Renstra 2023-2026)			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 (Renstra 2025-2029)		
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Tujuan 1: Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti	70	Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan Sosial yang Inklusif, dan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan	Persentase Peningkatan pelayanan PPKS kewenangan kabupaten	100
Sasaran 1.1 : Meningkatnya penangann PMKS	Persentase Kepatuhan terhadap pelaksanaan Standar pelayanan di bidang sosial (indikator SPM)	70		Indeks Desa Membangun	>0,7072 s.d <0.8155
	Persentase pelayanan pencapaianpelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	85	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap PPKS	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100

Sasaran 1.2 : Meningkatnya penanganan bencana alam dan bencana sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	9,30	Sasaran 2. Meningkatnya Ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi di Desa	Persentase Status Desa Mandiri	100
Tujuan 2: Meningkatkan Status Desa	Indeks Desa Membangun	>0,707 dan <0,815	Sasaran 3 Meningkatnya tata kelola kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB (71)
Sasaran 2.1: Meningkatnya Ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan	Jumlah Desa Mandiri	1		Tingkat Literasi Digital ASN Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa	100
	Jumlah Desa Maju	9			
	Jumlah Desa Berkembang	66			
	Jumlah Desa Tertinggal	0			
Tujuan 3: Meningkatkan tata kelola pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B			
Sasaran 3.1 : Meningkatnya tata kelola kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B			

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital**, **Prioritas Daerah -2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirisasi pertanian dan yang didukung peran, BUMdes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital, Prioritas -3 Memperkuat Pembangunan Sumber daya manusia melalui Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan Penyandang disabilitas berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya** dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Dari 5 (lima) Prioritas Pembanguan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka terdapat 3 (Tiga) Prioritas yang di dukung oleh Dinas Sosial,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

TABEL IV-1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.201.438.000,00
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp.99.681.000,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa		
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 1.334.953.320,00
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp. 1.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/ Kota		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 295.046.410,00
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp. 603.000.000,00

4.2 Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakar dan Desa Tahun 2025

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang mengacu kepada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029. Pemilihan kegiatan dan program tersebut berdasarkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (hasil antara / *intermediate outcome*) adalah sebuah hasil akumulasi dari output sub kegiatan yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, dan merupakan indikator hasil jangka panjang (outcome) dari program. Sedangkan sub kegiatan (*output* / keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu sub kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu sub kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data

capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk

setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Adapun Rencana Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebanyak 9 (sembilan) program yang dijabarkan melalui 18 (Delapan Belas) kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) sub kegiatan, dengan pagu pada Peruban Renja tahun 2025 sebesar **Rp. 6.947.482.007,-** ***(Enam milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh rupiah)***. Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

   Kegiatan dan sub kegiatannya yaitu:

   a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Takalar
      - Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti social
      - Penyediaan Sandang
      - Penyediaan alat bantu
      - Pemberian akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar
   b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
      - Pemberian Layanan kedaruratan
      - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
      - Pemberian layanan rujukan
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
   a. Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar
      - Rujukan anak -anak terlantar
   b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota
      - Pendataan Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
      - Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
      - Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
   a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
      - Penyediaan Makanan
   b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
      - Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
5. PROGRAM PENGELOLAAN TMP
   a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
      - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
      - PengamananTaman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENATAAN DESA
   a. Penyelanggaraan Penataan Desa
      - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
7. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
   a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
      - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
      - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
      - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
      - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
8. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
   a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/ Kota
      - Fasilitasi Peningkatan Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
      - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,

LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tegnologi Tepat Guna (TTG)

9. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan penilaian barang milik darah SKPD
      - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
      - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      - Pemelihraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel IV-2
Rencana Program,Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dan Pendanaan
Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab.Takalar
Tahun 2025



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (SPM)	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berjalan/Berkurang (13-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RAPBD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemeliharaan anak terlantar yang dipelihara				22 %	22 %	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	(0.000.000,00)				X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana	Masyarakat			7.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan/ Antarkangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	(0.000.000,00)	Kab. Takalar, Pelhelassang, Kelallenang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana			7.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.26	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Data Fakir Miskin dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi dan rutanti				100 %	100 %	0.000.000,00	194.000.000,00	201.400.100,00	200.400.100,00				X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.26.0003	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				60000 Orang	67500 Orang	0.000.000,00	0.000.000,00	201.400.000,00	700.000.000,00	Kab. Takalar, Pelhelassang, Kelallenang	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana yang Mendapatkan Pengelolaan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				4140 Kelurahan	4140 Kelurahan	1.000.000,00	000.000,00	000.000,00	000.000,00	Kab. Takalar, Pelhelassang, Kelallenang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kelembangan Kabupaten/Kota				30 Kelurahan	30 Kelurahan	1.000.000,00	151.000.000,00	99.861.000,00	99.861.000,00	Kab. Takalar, Pelhelassang, Kelallenang	HIBAH, PENGELOLAAN KEHUTANAN DAERAH YANG DIPERGUNAKAN UNTUK BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana			21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.20.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kelembangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	000.000,00	164.100,00	810.900,00	Kab. Takalar, Pelhelassang, Kelallenang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
A.	**1.06.05**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**				**85 %**	**85 %**	**151.000.000,00**	**251.000.000,00**	**175.740.000,00**	**24.000.000,00**							**121.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah korbana Alam dan Sosial yang ditangani				90 %	90 %	100.000.000,00	149.000.000,00	99.980.000,00	19.000.000,00				X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana			120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.21.0003	Penyaluran Makanan																		
			Jumlah Orang yang Menerapkan Pemahaman Hidup dalam Masa Tanggap Darurat (Penyelenggara) Kelembangan Kabupaten/Kota				5000 Orang	5000 Orang	100.000.000,00	199.000.000,00	99.980.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Pelhelassang, Kelallenang	PENGIRIPATAN BAGI HASIL DAN BAGI HASIL (DBH)		X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana			120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.26	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kelembangan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Kesejahteraan bencana tersebut				100 %	100 %	1.000.000,00	151.000.000,00	99.780.000,00	70.780.000,00				X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana	Masyarakat		0.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi Antarlembaga dan Pemerintah Terkait Bagi Bencana																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Koordinasi, Konsolidasi dan Pemberdayaan Tanggap Bagi Bencana Kelembangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	1.000.000,00	151.000.000,00	99.780.000,00	70.780.000,00	Kab. Takalar, Pelhelassang, Kelallenang	HIBAH, PENGELOLAAN KEHUTANAN DAERAH YANG DIPERGUNAKAN UNTUK BAGI HASIL (DBH)		X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana			0.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
A.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**persentase pengelolaan taman makam pahlawan**				**100 %**	**100 %**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**30.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	1.06.07.2.21	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara				100 %	100 %	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00				X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.07.2.21.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Mendapat Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				4 Makam	4 Makam	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pelhelassang, Kelallenang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.07.2.01.0002	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pelhelassang, Kelallenang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana X. Penunjuran Kesempangan Sosial Bencana			21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.722.588.225,00**	**5.216.349.273,00**	**5.288.259.957,00**	**1.563.900.647,00**							**6.857.783.332,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlanjut/Berkurang (15-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							4.722.886.029,00	5.216.346.673,00	5.386.029.887,00	1.363.386.887,00							6.067.703.323,00	
1.	1.00.01	PROGRAM PENGELOLA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perwujudan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota				100 %	100 %	5.782.886.029,00	5.086.346.673,00	6.043.029.277,00	760.083.382,00							4.462.703.323,00	
	1.00.01.2.01	Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penggenggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00				B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4000		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Galesong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.00.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA (APD)																		
			Jumlah Dokumen RKA (APD) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA (APD)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Galesong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.00.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DPA (SKPD)																		
			Jumlah Dokumen DPA (SKPD) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA (SKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Galesong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.00.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA (SKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA (SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA (SKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Galesong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.00.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (SKPD)																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Galesong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.486.175.029,00	3.986.193.950,00	3.979.893.845,00	353.895.653,00				B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4000		4.072.789.923,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.00.01.2.02.0001	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/Bulan	47 Orang/Bulan	3.486.175.029,00	3.986.193.950,00	4.845.893.845,00	357.795.023,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Galesong	NETRALISI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.204.989.868,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.00.01.2.02.0002	Penatausahaan Pembukuannya dan Pengujian Verifikasi Keuangan (SKPD)																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan (SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.411.000,00	588.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Galesong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.00.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penatausahaan Akuntansi (SKPD)																		
			Jumlah Dokumen Akuntansi dan Penatausahaan Akuntansi (SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	3.000.000,00	825.000,00	-1.275.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Galesong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.00.01.2.02.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	825.000,00	-1.275.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Galesong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.00.01.2.02.0005	Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Tunggakan Pemerintah(an)																		
			Jumlah Dokumen Bukan Tunggakan Pemerintah(an) dan Tidak Lunas Pemerintah(an)				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Galesong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik B. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran (SKPD)																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran (SKPD dan Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran (SKPD)				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	180.000,00	-1.820.000,00	Kab. Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tabalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik				0.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Laporan Barang				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	820.000,00				X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.03.0007	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	37.000,00	Kab. Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tabalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik				0.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.03.0008	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.238.000,00	1.218.000,00	1.018.000,00	-200.000,00	Kab. Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tabalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik				0.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah				98 %	98 %	13.700.000,00	17.053.130,00	26.365.130,00	12.675.230,00				X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0002	Pengelolaan Pendapat dan Pembinaan Korps																		
			Jumlah Pakaian Pendapat dan Pembinaan Korps yang Disediakan				7 Pakaian	7 Pakaian	5.750.000,00	2.033.130,00	2.250.130,00	-3.474.770,00	Kab. Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tabalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik				0.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	160 Laporan	10.000.000,00	55.000.000,00	24.101.000,00	14.101.000,00	Kab. Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tabalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik				150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang BMD Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	0,00				X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN			0.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tabalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik				0.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08	Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	155.000.000,00	70.000.000,00	61.000.000,00	-133.257.500,00				X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN			220.182.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0002	Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.057.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-94.713.500,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tabalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik				142.960.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0004	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	66.957.500,00	60.000.000,00	51.456.000,00	-9.543.500,00	Kab. Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tabalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik				77.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang BMD Daerah				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	80.000.784,00	70.000.784,00				X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik X. Pelayanan Tabalong Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0002	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dipergunakan Pejabat dan Pemerintah				12 Unit	12 Unit	8.398.000,00	8.398.000,00	8.398.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Pemerintahan Kelembang	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH / LAIN DANA BLOKIR DAU UMUM (DAU)		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	80.000.704,00	78.000.704,00	Kab. Tabalong, Pemerintahan Kelembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BLOKIR DAU UMUM (DAU)		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	2.13.02	**PROGRAM PEMBINAAN DESA**	**Persentase Kelembagaan Desa yang dibina sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Pemdesan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi dalam pemdesan desa				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00				6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Pemberdayaan, Pengingkatan, Penggalangan, dan Pendataan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Mendukung Pemberdayaan, Pengingkatan, Penggalangan, dan Pendataan Status Desa				1 Desa	1 Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Pemerintahan Kelembang	DANA BLOKIR DAU UMUM (DAU)		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemerintahan Desa**				**80 %**	**80 %**	**8.000.000,00**	**100.000.000,00**	**1.133.953.320,00**	**943.600.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa				80 %	80 %	8.000.000,00	100.000.000,00	1.045.953.320,00	937.953.320,00				6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah dokumen Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa				40 Dokumen	40 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Tabalong, Pemerintahan Kelembang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				40 Dokumen	40 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Tabalong, Pemerintahan Kelembang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				87 Orang	453 Orang	1.000.000,00	101.000.000,00	1.038.953.320,00	1.037.953.320,00	Kab. Tabalong, Pemerintahan Kelembang	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				40 Dokumen	40 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Pemerintahan Kelembang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan**				**99 Desa**	**99 Desa**	**1.013.000.000,00**	**1.110.000.000,00**	**605.046.410,00**	**-103.000.000,00**							**855.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pendampingan Masyarakat Hukum Adat yang Mengalami Pelanggar Hukum Adat yang Sama Oleh Oleh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan				90 Desa	90 Desa	1.013.000.000,00	1.110.000.000,00	605.046.410,00	-104.953.590,00				6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat			855.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Pendataan, Pembentukan dan Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM) dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																			
			Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi, Pembentukan dan Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM) dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				7 Dokumen	7 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.092.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Pemerintahan Kelembang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET RKPD PERVOID RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PROGRAM MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berombak/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	INFO 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat yang Difasilitasi Kapabilitasnya				8 Lembaga	8 Lembaga	1.000.000.000,00	500.000.000,00	250.000.412,00	-750.000.000,00	Kab. Tabalong, Pemerintahan Kelembang	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN/ TA BELANJA PENSEDIAAN		8. Pelayanan Tabalonos Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Pelayanan Tabalonos Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.12.04.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan dan Desa																		
			Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				64 Dokumen	64 Dokumen	3.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	-500.000.000,00	Kab. Tabalong, Pemerintahan Kelembang	DANA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG DITENTUKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8. Pelayanan Tabalonos Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Pelayanan Tabalonos Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.12.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				66 Laporan	66 Laporan	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Pemerintahan Kelembang	DANA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG DITENTUKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8. Pelayanan Tabalonos Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8. Pelayanan Tabalonos Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	JUMLAH								5.891.666.000,00	5.798.500.873,00	6.947.463.007,00	1.049.815.007,00							6.779.383.320,00	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025

TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Perhubungan dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan tahun 2025 menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Takalar, Juni 2025

Kepala Dinas,

ABDUL SALAM GAU, S.IP
NIP.19690927 199101 1 002

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025…… 12

TABEL II.2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025… …… 20

TABEL II.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan1…… 21

TABEL II.4 Rekapitulasi Capaian Anggaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan ……. 25

TABEL II.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan ……. 28

TABEL III.1 Kebijakan Nasional dan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkaan Tugas dan Fungsi ……. 32

TABEL III.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 ……. 35

TABEL III.3 Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025… ……. 36

TABEL IV.1 Daftar Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ……. 39

TABEL IV.2 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2025……. 42

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… 1

DAFTAR TABEL …… 2

DAFTAR ISI …… 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …… 4

1.2 Landasan Hukum …… 6

1.3 Maksud dan Tujuan …… 8

1.4 Sistematika Penulisan…… 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Sampai dengan Triwulan I…… ……. 10

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Perhubungan 2025 yang terakomodir di APBD 2025…….. 20

2.1.2 Evaluasi program kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan 2025…… 26

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional…….. 30

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025…… 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah…….. 38

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan …… 40

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Dinas

Perhubungan Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perhubungan Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar tahun 2025 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan RencanaKerjaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Bupati Takalar Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Takalar No. 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah :

- Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2025 yang karena adanya beberapa perubahan dari rencana kerja sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah akibat terjadinya efesiensi anggaran.
- Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan Perhubungan bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

b. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar tidak lain adalah:

- Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan Perhubungan sampai triwulan 1 dan dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
- Mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan kedalam suatu strategi program/kegiatan.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.

- Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Perubahan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Sampai Triwulan I Tahun 2025, pada Bab ini berisi Sub Bab tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan pada Triwulan I Tahun 2025

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan, Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.

BAB IV. **Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan,** Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan.

BAB V. Penutup, Bab ini berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Sampai Dengan Triwulan I

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan tahun 2025 sampai pada Triwulan I belum dapat menunjukkan capaian kinerja secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata hanya mencapai 20, 62% untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai 14, 82% untuk kinerja *output* dan *outcome* kegiatan.

Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Perhubungan dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi

pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sampai pada Triwulan I Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yangdievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*	
					DINAS PERHUBUNGAN									
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**		**100%**	**7.405.818.172**	**13,51%**	**914.948.565**	**14%**	**914.948.565**	**13,51%**	**12,35%**
2	15	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN**	**100%**	**4.248.075.598**	**23%**	**774.912.705**	**23%**	**774.912.705**	**23,17%**	**18,24%**
2	**15**	**1**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100,00 %	2.000.000	75%	1.500.000	75%	1.500.000	75,00%	75,00%
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	1	500.000	1	500.000	1	500.000	100,00%	100,00%

2	15	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1	500.000	1	500.000	1	500.000	100,00%	100,00%
2	15	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	500.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%
2	15	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	500.000	1	500.000	1	500.000	100,00%	100,00%
2	**15**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan**	100%	3.966.349.062	18%	728.742.270	18%	728.742.270	18,46%	18,37%
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	532	2.985.149.390	152	728.742.270	152	728.742.270	28,57%	24,41%
						Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan TPP	456	967.359.672	38	-	38	-	8,33%	0,00%

2	15	1	2	1	Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan	Jumlah ASN yang Menerima Honor	36	12.840.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	500.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%
2	15	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	4	500.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%
2	**15**	**1**	**2.06**		**Administrasi umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	63.409.160	0,28%	13.260.935	0,28%	13.260.935	0,28%	20,91%
2	15	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket	1	924.700	-	-	0	-	0,00%	0,00%
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	10	9.217.100	1	1.089.000	1	1.089.000	10,00%	11,81%

					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang di sediakan	1.000	1.483.360	-	-	0	-	0,00%	0,00%
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dalam Propinsi	55	51.784.000	2	12.171.935	2	12.171.935	3,64%	23,51%
2	**15**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	100%	171.287.376	22%	28.509.500	22%	28.509.500	22,12%	16,64%
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Rekening Air yang dibayarkan	12	3.287.376	2	509.500	2	509.500	16,67%	15,50%
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Jasa Administrasi Pelayanan umum kantor	192	134.400.000	36	22.400.000	36	22.400.000	18,75%	16,67%

						Jumlah Jasa cleaning service	2	16.800.000	4	2.800.000	4	2.800.000	200,00%	16,67%
						Jumlah Jasa Sopir	2	16.800.000	4	2.800.000	4	2.800.000	200,00%	16,67%
2	**15**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentasen Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	100%	45.030.000	0,00%	2.900.000	0,00%	2.900.000	0,00%	6,44%
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	1	45.030.000	-	2.900.000	0	2.900.000	0,00%	6,44%
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG DITETAPKAN**	**100%**	**3.157.742.574**	**4%**	**140.035.860**	**4%**	**140.035.860**	**3,85%**	**4,43%**

2	**15**	**2**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan**	100%	3.000.300	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk yang disusun	1	3.000.300	-	-	0	-	0,00%	0,00%
2	**15**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten / Kota**	**Persentase Perlengkapan Jalan DiJalan Kabupaten/Kota**	100%	3.084.238.274	23,08%	137.859.680	23,08%	137.859.680	23,08%	4,47%
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlegkapan Jalan dijalan Kabupaten/Kota yang disediakan	1	2.111.181.260	-	1.000.000	0	1.000.000	0,00%	0,05%
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan Jalan yang dipelihara	12	973.057.014	3	136.859.680	3	136.859.680	25,00%	14,06%

2	**15**	**2**	**2.04**		**Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan**	100%	6.515.000	0,00%	2.176.180	0,00%	2.176.180	0%	33%
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pebangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	1	6.515.000	-	2.176.180	0	2.176.180	0,00%	33,40%
2	**15**	**2**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji**	100%	47.024.000	0%	-	0%	-	0%	0%
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	6.344.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	25.000.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%

2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	7.000.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan (kali)	5	8.680.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%
2	**15**	**2**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Yang dilaksanakan**	100%	13.490.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksana Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Evektifitas Pelaksana Kebijakan yang dilakukan (bulan)	12	10.000.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%
2	15	2	2.06	'05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi	10	3.490.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%

2	15	2	2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Hasil Andalalin yang disetujui**	100%	3.475.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Singkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi yang dilakukan (kali)	3	3.475.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%

Sumber : Laporan Monev Renja Triwulan I tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa :

1. Program / Kegiatan yang belum mencapai 25 % pada Triwulan 1 yaitu :
    1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja 18, 46 % dan realisasi anggaran sebesar 18, 37 %
    2. Kegiatan Adminstrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 0, 28 % dan realisasi anggaran 20, 91 %
    3. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi anggaran kinerja sebesar 22,12% dan realisasi anggaran sebesar 16,64 %
    4. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan realisasi kinerja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar 6,44 %
    5. Kegiatan Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Kota belum ada realisasi
    6. Kegiatan Penyediaan perlangkapan jalan dijalan kabupaten/kota dengan reaisasi kinerja sebesar 23, 08 % dan realisasi anggaran sebesar 4,47 %
    7. Kegiatan pengujian berkala kendaraan berotor dengan realisasi 0 % (Belum ada)
    8. Kegiatan Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota belum ada realisasi
    9. Kegiatan Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten kota juga belum ada realisasi

2. Program / Kegiatan yang mencapai 25 % pada Triwulan 1 yaitu :

    1. Kegiatan Penertiban ijin penyelenggaraan dan pebangunan fasilitas parkir dengan realisasi kinerja 0 % dan realisasi anggaran sebesar 33 %.

3. Program / Kegiatan yang mencapai diatas 25 % pada Triwulan 1 yaitu :

    1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan realisasi kinerja 75% dan realisasi anggaran 75 %

Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja sampai Triwulan 1 Tahun 2025

- Faktor Pendorong
    1. Adanya komitmen pimpinan dan Koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
    2. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
    3. SDM pada Dinas Perhubungan memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.
- Faktor Penghambat
    1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 yang terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	Dinas Perhubungan	2	11	26	2	11	29

Sumber: Renja Pokok 2025 dan SIPD 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 2, jumlah kegiatan 11, dan jumlah sub kegiatan 26, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 2, jumlah indikator kegiatan sebanyak 11, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 29.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel II.3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2025 Sampai Triwulan I

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	*(Rp)*	*Fisik*	*Keu*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	4.248.075.598	774.912.705	23,17	18,24
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.157.742.274	140.035.860	3,85	4,43
	Total	**7.405.818.172**	**914.948.565**	**13,51**	**12,35**

Sumber : Laporan Monev Renja Dishub Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. **914.948.565**, anggaran tersebut digunakan dalam 2 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 13,51 % dengan capaian realisasi fisik sebesar 12,35 %. Kondisi ini menunjukkan rata-rata capaian realisasi fisik yang belum maksimal karena pelaksanaan kegiatan baru berjalan 3 bulan. Dari 2 program yang ada, terdapat 1 program yang telah mecapai realisasi kinerja di bawah 10% dapat dikategorikan memiliki kinerja kurang baik yaitu program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan hingga triwulan I dalam kategori sedang yaitu >13 %

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sampai pada Triwulan I

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Perhubungan. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Sebagai

berikut:

1. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program, anggaran pada Dinas Perhubungan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran pada Dinas Perhubungan terdapat 2 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah atau 0% (realisasinya 0-10 persen)

2. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan**

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 11 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 10 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang 1 kegiatan berada dikategori tinggi yaitu 75 persen.

3. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan**

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Perhubungan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 26 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 23 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan ada 3 sub kegiatan yang masuk dalam kategori kategori tinggi yaitu 100 persen.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

TABEL II.4
REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan		
		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	2	1	1	0	11	6	2	3	26	16	4	6

Sumber : *Laporan Realisasi Renja Dishub Tahun 2025 Triwulan I*

Keterangan:

0-10	Rendah
>10-20	Sedang
>20	Tinggi

Informasi tentang capaian Anggaran memberikan gambaran capaian anggaran realisasi target anggaran pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat Dinas Perhubungan. Capaian anggaran tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** untuk realisasi anggaran lebih besar dari 10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi anggaran lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Perhubungan serta pencapaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target anggaran program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Anggaran pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan anggaran pada level program dapat digambarkan sebagai berikut; untuk pencapaian target anggaran program pada Dinas Perhubungan dapat dijelaskan bahwa dari 2 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I, terdapat 1 Program atau 50% program yang masuk pada kategori rendah atau dibawah 10 persen yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, begitupun pencapaian anggaran dengan kategori sedang (diatas 10-20 persen) terdapat 1 program atau 20% yang masuk kategori sedang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota .

2. Evaluasi Capaian Anggaran pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target anggaran kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 11 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I terdapat 6

D

kegiatan yang capaian anggaran nya kategori masih rendah atau dibawah 10 persen, sedangkan yang capaian anggaran kategori sedang yaitu antara 10 sampai 20 persen sebanyak 2 kegiatan dan capaian kinerja kategori tinggi pencapaian lebih dari 20 persensebanyak 3 kegiatan yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Anggaran pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target anggaran sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 29 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian anggaran masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 16 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang terdapat 4 sub kegiatan, selebihnya yang capaian anggaran masuk dalam kategori tinggi sebanyak 6 sub kegiatan , yaitu pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut:

D

TABEL II.5
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No.	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome		
		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	2	1	0	1	11	7	1	3	29	19	2	5

Sumber : Laporan Monev Renja Dishub Triwulan I Tahun 2025

Keterangan:

0-10	Rendah
>10-20	Sedang
>20	Tinggi

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat Dinas Perhubungan. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** untuk realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Perhubungan serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. **Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program**

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut; untuk pencapaian target kinerja program pada Dinas Perhubungan dapat dijelaskan bahwa dari 2 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I, terdapat 1 Program atau 50% program yang masuk pada kategori rendah atau dibawah 10 persen yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, begitupun pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 10- 20 persen) terdapat 1 program atau 20% yang masuk kategori sedang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota .

2. **Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Kegiatan**

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 11 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I terdapat 7 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 10 persen, sedangkan yang

capaian kinerja kategori sedang yaitu antara 10 sampai 20 persen sebanyak 1 kegiatan dan capaian kinerja kategori tinggi pencapaian lebih dari 20 persensebanyak 3 kegiatan yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

3. **Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Sub Kegiatan**

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 29 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 19 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang terdapat 5 sub kegiatan, selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 5 sub kegiatan , yaitu pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan serta ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara pelayanan dalam urusan Lalulintas telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel. 2.6

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Triwulan II	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	% Kecamatan yang mempunyai lokasi sarana pengaman jalan	9	33,33	Rasio konektifitas	0,70%	0,72%	0,82%	N/A	0,72%	0,82%	
2	% Jalan Bermarka	328000 m	5,04	% peningkatan kendaraan umum dengan kondisi laik jalan	75%	77%	78%	71,56%	77%	78%	
3	Rasio ijin trayek	0,158	0,0003	% Keterpenuhan layanan transportasi laut	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	
4	% Pengujian kendaraan wajib uji	80%	33,06 %	V/C Ratio	0,40-0,59%	0,40-0,59%	0,20-0,39%	N/A	0,40-0,59%	0,20-0,39%	
5	% Desa yang dapat diakses kendaraan umum	100	100	% penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dalam tahun berjalan	9,3%	9,1%	9,0%	10,07,%	9,1%	9,0%	

D

6	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	BB	B	% Capaian PAD pada Dinas Perhubungan	85,03 %	90%	95%	54%	90%	95%	
7				% Peningkatan PAD pada Dinas Perhubungan	1,03%	1,50%	2%	2,5%	1,50%	2%	
8				Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Perhubunngan	B(67,33)	73(BB)	75(BB)	B(67,33)	73(BB)	75(BB)	
				Tingkat literasi digital ASN pada Dinas Perhubungan	70%	77%	80%	70%	77%	80%	

D

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa adanya perubahan nomenklatur Indikator Kinerja Utama (IKU)Dinas Perhubungan, hal ini disebabkan Karena menyesuaikan dengan perubahan atau penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar periode 2025-2029.

D

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Dinas Perhubungan yaitu **"Meningkatnya Sistem Transportasi",** untuk mewujudkan

D

tujuan tersebut dicapai melalui 3 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi.
2. Sasaran 2: Terciptanya ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas
3. Sasaran 3: Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) pada Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

D

Tabel III.1.

Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
T. Meningkatkan Sistem Transportasi	Rasio Konektivitas	0,77	T. Meningkatkan Sistem Transportasi	Rasio Konektivitas	0,77
S.1 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi	Persentase Kendaraan Umum Laik	75%	S.1 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi	Persentase peningkatan kendaraan umum dengan kondisi laik jalan	75%
	Persentase Keterpenuhan layanan transportasi laut	100 %		Persentase Keterpenuhan layanan transportasi laut	100 %
S.2 Terciptanya ketertiban kelancaran dan keselaatan berlalulintas	V/C Rasio	0,40 – 059 %	S.2 Terciptanya ketertiban kelancaran dan keselamatan berlalulintas	V/C Rasio	0,40 – 059 %
	Persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dala tahun	9,3%		Persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dala	9,3%

D

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
	berjalan			tahun berjalan	
S.3 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pehubungan	Persentase capaian PAD pada Dinas Perhubungan	104,4 %	S.3 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pehubungan	Persentase capaian PAD pada Dinas Perhubungan	85,03 %
	Persentase Peningkatan PAD pada Dinas Pehubungan	24,09%		Persentase Peningkatan PAD pada Dinas Pehubungan	1,03%
S.4 Meningkatnya Tata kelola kinerja pada Dinas Pehubungan	Hasll penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Perubungan	B(67,33)	S.4 Meningkatnya Tata kelola kinerja pada Dinas Pehubungan	Hasll penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Perubungan	B(67,33)
	Tingkat literasi digital ASN pada Dinas Pehubungan	70%		Tingkat literasi digital ASN pada Dinas Pehubungan	70%

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten / Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan Dijalan Kabupaten / Kota	2.693.349.574
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.051.793.314

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dengan total pagu Rp. 7.870.730.512 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL IV.2

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATENTAKALAR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**4,854,110,900.00**	**7,405,818,172.00**	**7,670,730,512.00**	**2,816,619,612.00**							**5,827,000,000.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4,854,110,900.00**	**7,405,818,172.00**	**7,670,730,512.00**	**2,816,619,612.00**							**5,827,000,000.00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4,854,110,900.00**	**7,405,818,172.00**	**7,670,730,512.00**	**2,816,619,612.00**							**5,827,000,000.00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4,160,992,410.00**	**4,248,075,598.00**	**4,303,641,938.00**	**717,007,590.00**							**4,878,000,000.00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4,106,730.00	2,000,000.00	848,800.00	-3,257,930.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.	-		15,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

																Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,106,800.00	500,000.00	0.00	-1,106,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	999,800.00	500,000.00	0.00	-999,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelaya			2,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

																nan Publik				
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	999,930.00	500,000.00	348,800.00	-651,130.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,200.00	500,000.00	500,000.00	-500,200.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelaya			2,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

																nan Publik				
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3,795,315,556.00	3,966,349,062.00	3,966,349,462.00	171,033,906.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4,508,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	3,791,315,846.00	3,965,349,062.00	3,965,349,462.00	174,033,616.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4,500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,999,860.00	500,000.00	500,000.00	-1,499,860.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,999,850.00	500,000.00	500,000.00	-1,499,850.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	53,995,000.00	63,409,160.00	36,876,300.00	-17,118,700.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		109,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	899,100.00	924,700.00	924,700.00	25,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,073,500.00	9,217,100.00	8,584,600.00	1,511,100.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,507,400.00	1,483,360.00	1,486,000.00	-21,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	44,515,000.00	51,784,000.00	25,881,000.00	-18,634,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	262,795,124.00	171,287,376.00	171,287,376.00	-91,507,748.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		175,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0.00	3,287,376.00	3,287,376.00	3,287,376.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbai			45,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

																kan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2	**ON URUSAN**							**4,854,110,900.00**	**7,405,818,172.00**	**7,670,730,512.00**	**2,816,619,612.00**							**5,827,000,000.00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4,854,110,900.00**	**7,405,818,172.00**	**7,670,730,512.00**	**2,816,619,612.00**							**5,827,000,000.00**	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4,854,110,900.00**	**7,405,818,172.00**	**7,670,730,512.00**	**2,816,619,612.00**							**5,827,000,000.00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4,854,110,900.00**	**7,405,818,172.00**	**7,670,730,512.00**	**2,816,619,612.00**							**5,827,000,000.00**	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				21 Laporan	21 Laporan	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemeri			130,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

																ntahan dan Pelayanan Publik					
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	44,780,000.00	45,030,000.00	128,280,000.00	83,500,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		70,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	44,780,000.00	45,030,000.00	45,030,000.00	250,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	0 Unit	0.00	0.00	83,250,000.00	83,250,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah 2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			0.00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**-**	**-**	**693,118,490.00**	**3,157,742,574.00**	**3,367,088,574.00**	**255,881,510.00**							**949,000,000.00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-				-	-	3,500,000.00	3,000,300.00	1,240,000.00	-2,260,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000.00	3,000,300.00	1,240,000.00	-2,260,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	615,000,000.00	3,084,238,274.00	3,308,349,574.00	2,693,349,574.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		735,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

BAB V
PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini menjadi instrumen utama bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan bidang perhubungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar tahun 2025 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Dinas Perhubungan dengan Bappelitbangda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Dinas Perhubungan.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemerintah Daerah dengan program dan kegiatan Dinas Perhubungan.

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar; Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Dinas Perhubungan dengan pemangku kepentingan; dan
2. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA Dinas Perhubungan dengan pemangku kepentingan

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar telah berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Takalar, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Perhubungan.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025

ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai**.**

Takalar, Juni 2025

Kepala Dinas,

ABDUL SALAM GAU, S.IP
Pangkat : Pembina TK.I
NIP.19690927 199101 1 002

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TAKALAR



PERUBAHAN RENCANA KERJA

2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Atas Rahmat danKarunia-Nya, Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Petangkat Daerah (RENJA- SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 ini merupakan tahapan proses perencanaan kegiatan tahunan yang mangacu pada kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebalumnya dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah kegiatan (RENSTR-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencan Kerja SekretariatDPRD dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Sekreatiat DPRD, Reviuw terhadap Rencana Awal RKPD, Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Petangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Takalar, Agustus 2025
Sekretaris DPRD Kabupaten Takalar

JAMALUDDIN HASAN, SE.MM.
Pangkat : Pembina Tingkat I.
NIP. : 19691012 199803 1 010

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 4
BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang 5
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun 2025. 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun 2025. 10

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 26

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 26
3.2 Tujuan dan Sasaran 27

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 29

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 29
4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 31

BAB V PENUTUP 41

5.1 Catatan Penting 41
5.2 Kaidah Pelaksanaan 41
5.3 Rencana Tindak Lanjut 42

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Takalar Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025..... 11
Tabel II. 2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam Renja SekretariatbDPRD Tahun 2025…….. 14
Tabel II. 3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Hingga Triwulan I Tahun 2025..... 15
Tabel II. 4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun 2025 17
Tabel II. 5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025..... 18
Tabel II. 6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar 19
Tabel II. 7 Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Takalar 21

Tabel III. 1 Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2025..... 28

Tabel IV. 1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah 30
Tabel IV. 2 Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dprd (RKPD) Kab. Takalar Tahun 2025..... 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewanm Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar disusun berpedoman berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra OPD, serta Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta berdasarkan kegiatan pada usulan masyarakat dan memuat perubahan seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. berpedoman pada:

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2025 melalui Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 361 ayat

(1), Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), terdiri atas:

a. Perumusan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b. Penyajian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024. Dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja tersebut, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar tahun 2021 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra OPD ke dalam program/kegiatan tahunan
b. Menyiapkan acuan bagi Rancangan Perubahan APBD
c. Menyiapkan kerangka evaluasi perubahan kinerja program/ kegiatan tahunan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.

- **Tujuan**

Tujuan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan dokumen Renja (Rencana Kerja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak dan upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai triwulan I.

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran, review terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, serta rencana program dan kegiatan perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB IV: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan dalam perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB V: PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun 2025.

Informasi tentang realisasi anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak realisasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Takalar
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					UNSUR PENDUKUNG													
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**			**111,026,653,856**		**54,621,344,129**	**100%**	**37,080,972,566**	**19.20%**	**6,036,335,536**	**19.20%**	**6,036,335,536**	**19%**	**16%**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah (%)**	**100%**	**88,582,045,856**	**50.06%**	**36,340,172,631**	**100%**	**24,517,302,916**	**31.72%**	**4,614,779,204**	**0**	**4,614,779,204**	**0**	**0**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perngkat daerah yang terlaksana**	**100%**	**275,000,000**	**43.18%**	**252,963,250**	**100%**	**203,280,380**	**100%**	**28,163,500**	**100.00%**	**28,163,500**	**100%**	**14%**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	~ Jumlah Renja yang disusun	8	35,000,000	4	42,406,200	2	51,142,380	-	-	-	-	0%	0%
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	40,000,000	2	42,138,700	1	32,599,000	-	-	-	-	0%	0%
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan PRKA-SKPD	4	40,000,000	2	42,009,150	1	29,095,500	-	-	-	-	0%	0%
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	40,000,000	2	42,317,300	1	28,686,100	-	1,947,600	-	1,947,600	0%	7%
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen DPPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPPA-SKPD	4	40,000,000	2	37,701,000	1	26,774,500	-	-	-	-	0%	0%
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4	40,000,000	3	42,225,500	1	27,707,900	1	26,215,900	1	26,215,900	100%	95%
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (Anjab), Analisisi Beban Kerja (AKB), dan Evaluasi Jabatan	16	40,000,000	4	4,165,400	4	7,275,000	-	-	-	-	0%	0%
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Peresentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**19,426,780,900**	**42.38%**	**7,608,767,637**	**100%**	**4,526,992,632**	**8.64%**	**922,193,551**	**8.64%**	**922,193,551**	**9%**	**20%**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	~ Jumlah ASN yg menerima gaji	2,400	15,091,568,256	1,135	5,543,811,321	504	3,256,881,848	84	853,793,051	84	853,793,051	17%	26%
						~ Jumlah ASN yg menerima TPP	2,400	4,015,212,644	894	1,898,920,916	504	1,113,003,384	-	-	-	-	0%	0%
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	2	22,828,900	-	-	-	-	0%	0%
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah penyusunan akuntansi dan pelapor	48	100,000,000	24	66,434,700	12	57,910,000	3	27,994,500	3	27,994,500	25%	48%
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	4	100,000,000	2	56,541,400	1	36,539,400	1	35,897,400	1	35,897,400	100%	98%
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaaan	8	40,000,000	4	5,882,800	2	3,704,500	-	-	-	-	0%	0%
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun	16	40,000,000	7	32,874,000	4	31,632,700	1	4,508,600	1	4,508,600	25%	14%
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Reslisasi Anggaran yang disusun	4	40,000,000	2	4,302,500	1	4,491,900	-	-	-	-	0%	0%
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Padminstrasi BMD yang disusun tepat waktu**	**100%**	**160,000,000**	**41.67%**	**25,286,200**	**100%**	**50,955,000**	**33.33%**	**23,684,100**	**33.33%**	**23,684,100**	**33%**	**46%**
3	27	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang SKPD (Dok)	8	60,000,000	3	7,694,200	2	26,210,600	1	20,497,000	1	20,497,000	50%	78%
3	27	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan penatausahaan barang SKPD (Dok)	4	100,000,000	2	17,592,000	1	24,744,400	-	3,187,100	-	3,187,100	0%	13%

4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**60,000,000**	**0.00%**	**12,437,300**	**100%**	**104,037,300**	**0%**	**2,324,000**	**0**	**2,324,000**	**-**	**0**
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegwaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumalah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	4	5,724,800	4	36,097,600	-	2,324,000	-	2,324,000	-	0
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	15	5,080,000	45	33,254,000	-	-	-	-	-	-
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	35	1,259,700	-	-	-	-	-	-
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tejnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	1,632,500	10	33,426,000	-	-	-	-	-	-
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**2,240,000,000**	**43.62%**	**1,235,020,850**	**153**	**683,647,800**	**11.76%**	**42,447,000**	**11.76%**	**42,447,000**	**0%**	**6%**
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	12	200,000,000	14	44,158,000	6	15,133,000	1	3,709,000	1	3,709,000	17%	25%
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia	16	300,000,000	7	697,480,200	5	330,247,100	-	-	-	-	0%	0%
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan rumah jabatan yang tersedia	48	600,000,000	13	36,276,750	12	20,320,800	1	5,641,300	1	5,641,300	8%	28%
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia dan Jumlah penggandaan yang tersedia	20	340,000,000	10	62,900,000	5	31,115,000	-	-	-	-	0%	0%
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia	220	280,000,000	109	180,325,000	55	112,365,000	8	19,725,000	8	19,725,000	15%	18%
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pelayanan tamu Pimpinan dan Komisi	200	460,000,000	94	210,280,900	50	86,868,000	8	13,371,700	8	13,371,700	16%	15%
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	60,000,000	13	3,600,000	20	87,598,900	-	-	-	-	0%	0%
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0%**	**-**	**47.34%**	**1,905,929,308**	**100%**	**34,151,370**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia	-	-	-	-	1	34,151,370	-	-	-	-	-	-
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**100%**	**4,143,868,800**	**86.25%**	**1,905,929,308**	**100%**	**719,542,300**	**16.67%**	**106,942,700**	**16.67%**	**106,942,700**	**17%**	**15%**
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan serat keluar	48	60,000,000	23	10,076,100	12	10,002,700	-	-	-	-	0%	0%
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	~ Jumlah Biaya Telepon yang terbayar	48	768,000,000	46	352,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
						~ Jumlah Biaya air yang terbayar	48	414,374,416	54	61,661,600	24	54,339,600	6	7,542,700	6	7,542,700	25%	14%
						~ Jumlah Biaya Listrik yang terbayar	48	624,234,384	60	316,691,608	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ter sedia	48	2,277,260,000	24	1,165,500,000	12	655,200,000	2	99,400,000	2	99,400,000	17%	15%
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**100%**	**4,256,920,000**	**47.34%**	**942,859,837**	**100%**	**1,425,807,000**	**12.68%**	**28,994,130**	**12.68%**	**28,994,130**	**13%**	**2%**
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penuyedian hasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	120	2,856,920,000	58	488,800,323	30	334,910,000	8	27,364,130	8	27,364,130	27%	8%
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	52	1,400,000,000	16	401,809,914	6	1,035,097,000	-	-	-	-	0%	0%
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	16	220,000,000	15	52,249,600	35	55,800,000	1	1,630,000	1	1,630,000	3%	3%
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Presentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terlaksana**	**100%**	**55,827,024,156**	**47.16%**	**23,613,333,389**	**100%**	**16,168,972,734**	**171%**	**3,384,508,242**	**170.73%**	**3,384,508,242**	**171%**	**21%**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah aministrasi keuangan yang terselenggara	1,440	53,746,064,156	735	22,207,518,389	420	15,683,547,734	70	3,384,508,242	70	3,384,508,242	17%	22%
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	24	1,840,960,000	12	1,405,815,000	6	381,825,000	-	-	-	-	0%	0%
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	120	240,000,000	-	-	35	103,600,000	-	-	-	-	0%	0%
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Presentase Layanan Administrasi DPRD yang tersedia**	**100%**	**2,192,452,000**	**48.91%**	**743,574,860**	**100%**	**599,916,400**	**22.58%**	**75,521,981**	**22.58%**	**75,521,981**	**23%**	**13%**
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fraksi yang difasilitasi	28	355,360,000	13	28,894,000	7	152,359,800	2	9,722,381	2	9,722,381	29%	6%
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Paripurna DPRD yang terlaksana	16	637,092,000	14	186,296,900	12	84,805,000	3	5,705,000	3	5,705,000	25%	7%
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga yang terpenuhi	48	1,200,000,000	18	528,383,960	12	362,751,600	2	60,094,600	2	60,094,600	17%	17%
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Presentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100%**	**22,444,608,000**	**203.07%**	**18,281,171,498**	**100%**	**12,563,669,650**	**6.68%**	**1,421,556,332**	**0**	**1,421,556,332**	**0**	**0**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Presentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terlaksana**	**100%**	**5,571,948,000**	**40.98%**	**2,303,388,180**	**100%**	**2,045,651,650**	**-**	**233,445,780**	**0.00%**	**233,445,780**	**0%**	**11%**
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	80	549,600,000	36	889,128,761	1	466,752,900	-	231,092,680	-	231,092,680	0%	50%
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	80	2,898,156,000	38	1,295,038,049	9	1,317,484,390	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan	20	524,192,000	5	39,910,470	5	15,783,100	-	1,383,500	-	1,383,500	0%	9%
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah fasilitas penyusunan naskah akademik	24	1,600,000,000	4	59,200,000	1	241,219,000	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib yang Disusun	-	-	1	20,110,900	1	4,412,260	-	969,600	-	969,600	0%	22%

4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Presentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana**	**100%**	**6,254,308,000**	**46.43%**	**310,459,450**	**100%**	**176,427,000**	**-**	**3,750,000**	**0.00%**	**3,750,000**	**0%**	**2%**
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang terlaksana	4	291,200,000	2	48,104,000	1	33,319,000	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang terlaksana	4	275,200,000	2	54,570,600	1	30,355,000	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD yang terlaksana	4	1,751,912,000	2	53,096,400	1	24,437,500	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan perubahan APBD yang terlaksana	4	1,279,796,000	2	53,359,600	1	30,922,500	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Pembahasan laporan Semester yang terlaksana	8	140,348,000	3	39,977,500	2	26,905,200	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan pertanggungjawaban yang terlaksana	4	2,515,852,000	2	61,351,350	1	30,487,800	-	3,750,000	-	3,750,000	0%	12%
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang terlaksana**	**100%**	**840,000,000**	**102.9%**	**2,802,563,200**	**100%**	**1,926,366,900**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**0%**
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	20	120,000,000	8	11,178,600	5	13,809,300	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur	20	120,000,000	5	7,725,000	5	13,851,000	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	20	120,000,000	5	5,546,000	5	13,794,900	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian	20	120,000,000	6	8,740,000	5	13,732,900	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	20	120,000,000	4	4,783,800	5	13,731,600	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20	120,000,000	3	3,527,000	5	13,682,100	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan Anggaran	20	120,000,000	111	2,756,262,800	140	1,829,786,000	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	-	2	4,800,000	5	13,979,100	-	-	-	-	0%	0%
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang tersedia**	**100%**	**1,220,800,000**	**44.98%**	**3,742,888,563**	**100%**	**2,075,463,500**	**8.51%**	**186,447,670**	**8.51%**	**186,447,670**	**9%**	**9%**
4	02	02	2.04	02	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	1	327,167,195	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD	-	-	11	1,243,642,918	140	1,246,910,000	18	87,201,670	18	87,201,670	0	7%
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi DPRD	1,740	600,000,000	773	1,682,810,250	453	412,728,800	23	85,750,000	23	85,750,000	5%	21%
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	12	360,000,000	6	131,000,000	3	60,000,000	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlahpenyedia Tenaga Ahli Fraksi	28	100,800,000	10	305,000,000	108	327,600,000	18	12,600,000	18	12,600,000	17%	4%
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Penyelenggara Hubungan Masyarakat	48	100,000,000	21	28,232,600	12	25,171,700	2	896,000	2	896,000	17%	4%
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	jumlah program kerja DPRD yang tersusun	4	60,000,000	2	25,035,600	1	3,053,000	-	-	-	-	0%	0%
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Presentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana**	**100%**	**5,768,700,000**	**425%**	**2,164,972,100**	**100%**	**1,993,619,800**	**0**	**602,758,300**	**28%**	**602,758,300**	**28%**	**30%**
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-	-	-	-	12	33,320,000	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Laporan pokok-pokok pikiran DPRD yang tersedia	4	48,000,000	1	6,505,300	1	2,043,200	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	12	5,720,700,000	67	2,158,466,800	105	1,958,256,600	33	602,758,300	33	602,758,300	31%	31%
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Presentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terlaksana**	**100%**	**40,000,000**	**25%**	**18,593,100**	**100%**	**4,365,800**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**	**0%**	**0%**
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	jumlah Kode Etik DPRD yang tersusun			1	18,155,100	1	2,303,800	-	-	-	-	0%	0%
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah Kode Etik DPRD yang terawasi	8	40,000,000	1	438,000	2	2,062,000	-	-	-	-	0%	0%
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Presentase Fungsi Tugas DPRD yang terlaksana**	**100%**	**2,748,852,000**	**736%**	**6,938,306,905**	**100%**	**4,341,775,000**	**10.29%**	**395,154,582**	**10%**	**395,154,582**	**10%**	**9%**
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas DPRD	80	2,748,852,000	589	6,938,306,905	350	4,341,775,000	36	395,154,582	36	395,154,582	10%	9%

(Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan I tahun 2025)

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam Renja SekretariatbDPRD Tahun 2025

APBD 2025							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	SEKRETARIAT DPRD	2	17	70	2	16	71
TOTAL		**2**	**17**	**70**	**2**	**16**	**71**

Sumber Data : Laporan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 2, jumlah kegiatan 17, dan jumlah sub kegiatan 70, sedangkan jumlah indikator program sebanyak 2, jumlah indikator kegiatan sebanyak 16, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 71.

2.1.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Data tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Hingga Triwulan I Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,517,302,916	4,614,779,204	31.72%	18.82%
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12,563,669,650	1,421,556,332	6.68%	11.31%
TOTAL		**37,080,972,566**	**6,036,335,536**	19.20%	16.28%

Sumber : Laporan Realisasi Renja Trw. I Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp. **37,080,972,566**,00. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar Rp **6,036,335,536**,00 atau 16.28 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 19.20 persen. Kondisi ini menunjukkan capaian fisik masih kurang yakni 5.80 persen dari target 25,00 persen yang diharapkan pada triwulan I.

Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD hingga triwulan I masih dalam kategori **Sangat Rendah** yaitu rata- rata >5 persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2025

Data tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Sangat Rendah** untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan realisasi masih di bawah 20%.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menggunakan kategori tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa semua program yang dilaksanakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebanyak 2 (Dua) program realisasinya masih tergolong kategori **Sedang**, yakni di >10-20% disebabkan Terdapat Program yang belum terlaksana karna disesuai kelender perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan kegiatannya di jadwalkan pada triwulan II, III dan IV tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 17 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 9 kegiatan yang realisasi termasuk kategori ***Rendah*** pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori sangat rendah yaitu 0-10% persen, sedang yang berada dalam kategori ***sedang*** sebanyak 4 kegiatan atau >10%-20% persen, dan 4 kegiatan ada pada kategori tinggi dengan capaian realisasi di atas >20% persen

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masing perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 70 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 51 sub kegiatan atau 72,8% yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 7 sub kegiatan atau 10% dan 12 sub kegiatan atau 17,14% dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	SEKRETARIAT DPRD	2	0	2	0	17	9	4	4	70	51	7	12
TOTAL		2	0	2	0	17	9	4	4	70	51	7	12

Sumber : Laporan Realisasi Renja Trw. I Set DPRD Tahun 2025

2.1.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Sekretariat DPRD. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi 0-10 persen, Kategori **Sedang** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi kinerja antara 10-20 persen dan kategori **Tinggi** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi kinerja di atas 20 persen.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada tiap-tiap perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 2 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua, terdapat 1 program yang masih masuk pada kategori **Rendah** atau di bawah 20 persen, dan 1 program yang termasuk kategori ***Tinggi.***

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 17 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama terdapat 9 kegiatan (52,94%) yang capaian kinerjanya kategori masih **Rendah** atau di bawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori

Sedang terdapat 4 kegiatan (23,53%), dan 4 kegiatan (23,53%) yang mencapai kategori **Tinggi** pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 70 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih ***Rendah*** atau di bawah 20 persen terdapat 51 sub kegiatan (72,86%), sedangkan yang capaian kinerja ***Sedang*** sebanyak 10 sub kegiatan (14,29%), selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori ***tinggi*** sebanyak 9 sub kegiatan atau 12,86% realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II. 5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	SEKRETARIAT DPRD	2	1	0	1	17	9	4	4	70	51	10	9
TOTAL		2	1	0	1	17	9	4	4	70	51	10	9

Sumber : Laporan Realisasi Renja Trw. I Sekretariat DPRD Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun 2025.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah adalah proses evaluasi dan kajian terhadap capaian pelayanan publik oleh suatu instansi pemerintah daerah terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memahami keberhasilan, mengidentifikasi masalah, serta merancang perbaikan berkelanjutan agar pelayanan masyarakat menjadi lebih optimal, efisien, dan efektif. Dapat dilihat pada tabel IKU berikut:

Tabel II. 6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda.	100%	69%	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (%)	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2	Persentase Aspirasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3	Persentase KUA PPAS dengan RKPD dalm APBD yang ditetapkan secara tepat waktu	100%	100%	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (%)	30%	30%	30%	31%	30%	30%	
4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan DPRD yang ditindak lanjuti PD	100%	92 %	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti oleh OPD (%)	100%	100%	100%	-	100%	100%	
5	Nilai Sakip pada Sekretariat DPRD	71.00	69.83	Jumlah Peraturan Daerah yang Merupakan Inisiatif DPRD (Perda/Perkada)	2	2	2	-	2	2	
6				Nilai Sakip pada Sekretariat DPRD (Angka)	71	71	71	-	71	71	
7				Tingkat Literasi Digital ASN pada Sekretariat DPRD (%)	100%	100%	100%	-	100%	100%	

(Sumber : Renstra 2023-2026, Laporan LKJ Sekretariat DPRD Tahun 2024, Renstra 2025-2029)

Berdasarkan Tabel Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar di atas dijelaskan bahwa target Renstra tahun 2024 pada indicator pertama Persentase Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda adalah 100% (13 buah) Rencana Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebanyak 69% (9 buah) hal ini disebabkan pihak antara Legislatif dan Eksekutif yang belum ada kesepakatan dalam proses penetapan peraturan daerah tersebut yang mengakibatkan adanya penundaan jadwal

penetapan. Pada Indikator Kedua Persentase Aspirasi yang ditindaklanjuti di targetkan 100 % dan realisasi mencapai 100% karena terlaksananya penjaringan Aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses dan ditindaklanjuti melelui rapat kerja. Pada indikator ketiga Persentase KUA PPAS dengan RKPD dalam APBD yang ditetapkan secara tepat waktu terealisasi 100 % dan tepat waktu yang didukung kerjasama antara pihak legislatif dan Eksekutif yang baik. Pada indicator keempat Persentase rekomendasi hasil pengawasan DPRD yang ditindak lanjuti terealisasi 92 % hal ini di karnakan adanya Anggota DPRD yang tidak melaksanakan Pengawasan Anggaran karena Penggati Antar Waktu. Pada Indikator Kelima Nilai Sakip pada Sekretariat DPRD nilai yang ditargetkan seberas 71.00 yakni realisasi 69.83 dikarenakan kurang kerjasamanya SDM Sekretariat DPRD dalam pengolahan data sehinggaa terjadi keterlambatan dalam pengumpulan laporan Sakip yang tidak tepat waktu.

Setelah Pemilihan Kepala Daerah terdapat perbedaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menyebabkan adanya perbedaan Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategi tahun 2023 – 2026 dan Rencana Strategi Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2025 terdapat 7 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun realisasi sampai triwulan I tahun 2025 yakni indicator ketiga Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 30 % atau (11 orang dari 35 orang total Anggota DPRD Kabupaten Takalar)

Tabel II. 7
Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Takalar

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	8		12		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
							UNSUR PENDUKUNG											
		4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**			**37,080,972,566**	**19%**	**6,036,335,536**		**6,036,335,536**	19.20%	16.28%		
	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan keuangan	**4**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah (%)**	**100%**	**24,517,302,916**	**32%**	**4,614,779,204**	**32%**	**4,614,779,204**	**31.72%**	**18.82%**	**Sekretariat DPRD**	
		4	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perngkat daerah yang terlaksana**	100.00%	203,280,380	9.09%	28,163,500	9.09%	28,163,500	9.09%	13.85%		
	Terpenuhinya Dukungan Administrasi, sarana dan prasarana, Pelaporan Capaian Kinerja, Kedisiplinan serta Peningkatan SDM Sekretariat DPRD	4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	~ Jumlah Renja yang disusun	2	51,142,380	-	-	-	-	0%	0.00%		
		4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	32,599,000	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan PRKA-SKPD	1	29,095,500	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	28,686,100	-	1,947,600	-	1,947,600	0%	7%		
		4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen DPPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPPA-SKPD	1	26,774,500	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang	1	27,707,900	1	26,215,900	1	26,215,900	100%	95%		
		4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (Anjab), Analisisi Beban Kerja (AKB), dan Evaluasi Jabatan	4	7,275,000	-	-	-	-	0%	0%		
								Rata - Rata Capaian Kinerja (%)							**14.29%**	**14.49%**		
								Predikat Kinerja							**SR**	**SR**		
2		4	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Peresentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	100%	4,526,992,632	8.64%	922,193,551	8.64%	922,193,551	8.64%	20.37%	Sekretariat DPRD	
2.1		4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	~ Jumlah ASN yg menerima gaji	504	3,256,881,848	84	853,793,051	84	853,793,051	17%	26%		
								~ Jumlah ASN yg menerima TPP	504	1,113,003,384	-	-	-	-	0%	0%		
		4	2	1	2.01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	22,828,900	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah penyusunan akuntansi dan pelapor	12	57,910,000	3	27,994,500	3	27,994,500	25%	48%		
		4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1	36,539,400	1	35,897,400	1	35,897,400	100%	98%		
		4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaaan	2	3,704,500	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun	4	31,632,700	1	4,508,600	1	4,508,600	25%	14%		
		4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Reslisasi Anggaran yang disusun	1	4,491,900	-	-	-	-	0%	0%		
								Rata - Rata Capaian Kinerja (%)							**20.83%**	**23.38%**		
								Predikat Kinerja							**SR**	**SR**		

		4	02	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Padminstrasi BMD yang disusun tepat waktu**	100%	50,955,000	33.33%	23,684,100	33.33%	23,684,100	33.33%	46.48%	SEKRETARIAT	
		3	27	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang SKPD (Dok)	2	26,210,600	1	20,497,000	1.00	20,497,000	50.00%	78.20%		
		3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan penatausahaan barang SKPD (Dok)	1	24,744,400	-	3,187,100	-	3,187,100	0.00%	12.88%		
															25.00%	**45.54%**		
															SR	**SR**		
3		4	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	100%	104,037,300	0.00%	2,324,000	0%	2,324,000	0.00%	2.23%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumalah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	36,097,600	-	2,324,000	-	2,324,000	0%	6%		
		4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45	33,254,000	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	1,259,700	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tejnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	33,426,000	-	-	-	-	0%	0%		
															0.00%	**1.61%**		
															SR	**SR**		
4		4	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	100%	683,647,800	11.76%	42,447,000	11.76%	42,447,000	11.76%	6.21%	Sekretariat DPRD	
4.1		4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	6	15,133,000	1	3,709,000	1	3,709,000	17%	25%		
		4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia	5	330,247,100	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan rumah jabatan yang tersedia	12	20,320,800	1	5,641,300	1	5,641,300	8%	28%		
		4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia dan Jumlah penggandaan yang tersedia	5	31,115,000	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia	55	112,365,000	8	19,725,000	8	19,725,000	15%	18%		
		4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pelayanan tamu Pimpinan dan Komisi	50	86,868,000	8	13,371,700	8	13,371,700	16%	15%		
		4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	87,598,900	-	-	-	-	0%	0%		
															7.94%	**12.17%**		
															SR	**SR**		
7		4	2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	34,151,370	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Sekretariat DPRD	
7.1		4	2	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia	1	34,151,370	-	-	-	-	0%	0%		
		4	2	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang tersedia	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
															0.00%	**0.00%**		
															SR	**SR**		
6		4	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	100%	719,542,300	16.67%	106,942,700	16.67%	106,942,700	16.67%	14.86%	Sekretariat DPRD	
6.1		4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan serat keluar	12	10,002,700	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	~ Jumlah Biaya Telepon yang terbayar	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
								~ Jumlah Biaya air yang terbayar	24	54,339,600	6	7,542,700	6	7,542,700	25%	14%		
								~ Jumlah Biaya Listrik yang terbayar	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ter sedia	12	655,200,000	2	99,400,000	2	99,400,000	17%	15%		
															8.33%	**5.81%**		
															SR	**SR**		

		4	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	100%	1,425,807,000	13%	28,994,130	12.68%	28,994,130	12.68%	2.03%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penuyedian hasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	30	334,910,000	8	27,364,130	8	27,364,130	27%	8%		
		4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6	1,035,097,000	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	35	55,800,000	1	1,630,000	1	1,630,000	3%	3%		
															9.84%	**3.70%**		
															SR	**SR**		
		4	02	01	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Presentase layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terlaksana**	100%	16,168,972,734	171%	3,384,508,242	170.73%	3,384,508,242	170.73%	20.93%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah aministrasi keuangan yang terselenggara	35/12	15,683,547,734	70	3,384,508,242	70	3,384,508,242	0%	22%		
		4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	6	381,825,000	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	35	103,600,000	-	-	-	-	0%	0%		
															0.00%	**7.19%**		
															SR	**SR**		
6		4	02	01	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	**Presentase Layanan Administrasi DPRD yang tersedia**	100%	599,916,400	23%	75,521,981	22.58%	75,521,981	22.58%	12.59%	Sekretariat DPRD	
	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fraksi yang difasilitasi	7	152,359,800	2	9,722,381	2	9,722,381	29%	6%		
		4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Paripurna DPRD yang terlaksana	12	84,805,000	3	5,705,000	3	5,705,000	25%	7%		
		4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga yang terpenuhi	12	362,751,600	2	60,094,600	2	60,094,600	17%	17%		
															23.41%	**9.89%**		
															SR	**SR**		
															12.18%	**13.75%**		
															SR	**SR**		
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Perencanaan Program dan Kegiatan yang Efektif																		
Faktor penghambat: : Kinerja SDM yang belum efektif																		
Faktor penghambat: Pengelolaan keuangan (anggaran kas) yang belum efektif																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																		
6	**Meningkatnya efektifitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD**	**4**	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Presentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100%**	**12,563,669,650**	**6.68%**	**1,421,556,332**	**6.68%**	**1,421,556,332**	**6.68%**	**11.31%**		
6.1		4	02	02	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Presentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terlaksana**	100%	2,045,651,650	0%	233,445,780	0%	233,445,780	0.00%	11.41%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	1	466,752,900	-	231,092,680	-	231,092,680	0%	50%		
		4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	9	1,317,484,390	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan	5	15,783,100	-	1,383,500	-	1,383,500	0%	9%		
		4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah fasilitas penyusunan naskah akademik	1	241,219,000	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib yang Disusun	1	4,412,260	-	969,600	-	969,600	0%	22%		
															0.00%	**16.05%**		
															SR	**SR**		

6		4	02	02	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Presentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana**	100%	176,427,000	0.00%	3,750,000	0.00%	3,750,000	0.00%	2.13%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang terlaksana	1	33,319,000	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang terlaksana	1	30,355,000	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD yang terlaksana	1	24,437,500	-	-	-	-	0%	0.00%		
		4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan perubahan APBD yang terlaksana	1	30,922,500	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Pembahasan laporan Semester yang terlaksana	2	26,905,200	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan pertanggungjawaban yang terlaksana	1	30,487,800	-	3,750,000	-	3,750,000	0%	12%		
										Rata - Rata Capaian Kinerja (%)					**0.00%**	**2.05%**		
										Predikat Kinerja					**SR**	**SR**		
6		4	02	02	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang terlaksana**	100%	1,926,366,900	0%	-	0%	-	0.00%	0.00%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	5	13,809,300	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur	5	13,851,000	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	5	13,794,900	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian	5	13,732,900	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	5	13,731,600	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5	13,682,100	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan Anggaran	140	1,829,786,000	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	13,979,100	-	-	-	-	0%	0%		
										Rata - Rata Capaian Kinerja (%)					**0.00%**	**0.00%**		
										Predikat Kinerja					**SR**	**SR**		
6		4	02	02	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang tersedia**	100%	2,075,463,500	9%	186,447,670	9%	186,447,670	8.51%	8.98%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumentasi Hasil Pendalaman Tugas DPRD	140	1,246,910,000	18	87,201,670	18	87,201,670	13%	7%		
		4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi DPRD	453	412,728,800	23	85,750,000	23	85,750,000	5%	21%		
		4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	3	60,000,000	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlahpenyedia Tenaga Ahli Fraksi	108	327,600,000	18	12,600,000	18	12,600,000	17%	4%		
		4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Penyelenggara Hubungan Masyarakat	12	25,171,700	2	896,000	2	896,000	17%	4%		
		4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	jumlah program kerja DPRD yang tersusun	1	3,053,000	-	-	-	-	0%	0%		
										Rata - Rata Capaian Kinerja (%)					**7.32%**	**5.03%**		
										Predikat Kinerja					**SR**	**SR**		

		4	02	02	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Presentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana**	100%	1,993,619,800	28%	602,758,300	27.97%	602,758,300	27.97%	30.23%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	33,320,000	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Laporan pokok-pokok pikiran DPRD yang tersedia	1	2,043,200	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	105	1,958,256,600	33	602,758,300	33	602,758,300	31%	31%		
															10.48%	**10.26%**		
															SR	SR		
		4	02	02	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Presentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terlaksana**	100%	4,365,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	2,303,800	-	-	-	-	0%	0%		
		4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah Kode Etik DPRD yang terawasi	2	2,062,000	-	-	-	-	0%	0%		
															0.00%	**0.00%**		
															SR	SR		
		4	02	02	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Presentase Fungsi Tugas DPRD yang terlaksana**	100%	4,341,775,000	10.29%	395,154,582	10.29%	395,154,582	10.29%	9.10%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas DPRD	350	4,341,775,000	36	395,154,582	36	395,154,582	10%	9%		
															10.29%	**9.10%**		
															SR	SR		
															4.01%	**6.07%**		
															SR	SR		
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																		
Faktor penghambat: :																		
Faktor penghambat:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																		
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**8.10%**	**9.91%**		
Predikat Kinerja Program															SR	SR		

(Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan I tahun 2025)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

- PN 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN 2 : Menantapkan Sistem pertahanan keamanan negara yang mendorong kemandirianbangsa melalui swasembada pangan, energi,air,ekonomi Syariah, ekonomi digital,ekonomi hijauh dan ekonomi biru.
- PN 3 : Melanjutkan pengembangan infastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkwalitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan Agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktifkoperasi.
- PN 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan

gender, serta penguatan peran perempuan, pemudan dan penyandang disabilitas.

- PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- PN 6 : Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasa komiskinan.
- PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, hokum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- PN 8 : Memperkuat Penyelarasan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingakungan, alam dan budaya, serta peningklatan toleransi antarummat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil Makmur.

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu **"Meningkatnya Kinerja Anggota DPRD",** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 3 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD.
2. Sasaran 2: Meningkatnya tata kelola kinerja Sekretariat DPRD

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III. 1
Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			RENJA POKOK TAHUN 2025		
TUJUAN / SASARAN	**INDIKATOR**	**TERGET**	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR**	**TERGET**
1	*2*	*3*	*1*	*2*	*3*
Meningkatnya Kinerja Anggota DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (%)	100	Meningkatnya Kinerja Anggota DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (%)	100
S1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	100	S1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	100
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (%)	30		Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (%)	30
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti oleh OPD (%)	100		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti oleh OPD (%)	100
	Jumlah Peraturan Daerah yang Merupakan Inisiatif DPRD (Perda/Perkada)	2		Jumlah Peraturan Daerah yang Merupakan Inisiatif DPRD (Perda/Perkada)	2
S.2. Meningkatnya tata kelola kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Sakip pada Sekretariat DPRD (Angka)	B	S.2. Meningkatnya tata kelola kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Sakip pada Sekretariat DPRD (Angka)	B
	Tingkat Literasi Digital ASN pada Sekretariat DPRD (%)	100		Tingkat Literasi Digital ASN pada Sekretariat DPRD (%)	100

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenm Takalar yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp
1	2	3	4	5
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**8,845,755,150**
2.1		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		1,285,664,250
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	344,985,000
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	679,633,390
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	15,414,600
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	241,219,000
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	4,412,260
2.2		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		168,252,000
			Pembahasan KUA dan PPAS	33,319,000
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	30,355,000
			Pembahasan APBD	24,437,500
			Pembahasan APBD Perubahan	30,922,500
			Pembahasan Laporan Semester	18,730,200
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	30,487,800
2.3		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		1,558,685,800
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	9,754,300
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	8,751,000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	8,694,900
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8,632,900
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	8,631,600
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	13,682,100
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	1,486,559,900
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	13,979,100
2.4		**Peningkatan Kapasitas DPRD**		1,858,983,500
			Pendalaman Tugas DPRD	1,030,430,000
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	412,728,800
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60,000,000
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	327,600,000
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25,171,700
			Penyusunan Program Kerja DPRD	3,053,000
2.5		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		1,976,959,800
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	16,660,000
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2,043,200
			Pelaksanaan Reses	1,958,256,600
2.6		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		4,365,800
			Penyusunan Kode Etik DPRD	2,303,800
			Pengawasan Kode Etik DPRD	2,062,000
2.7		**Fasilitasi Tugas DPRD**		1,992,844,000
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1,992,844,000

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan total pagu Rp. 33.659.142.366 (Tiga puluh tiga milyard eman ratus lima puluh Sembilan juta serratus empat puluh dua ribu tigha ratus enam puluh enam ru[piah) dapat dilihat pada tabel IV.2 dibawah ini :

Tabel IV. 2
Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dprd (RKPD)
Kab. Takalar Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							**25,899,451,079.00**	**37,080,972,566.00**	**36,940,500,236.00**	**11,041,049,157.00**							**16,677,218,500.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25,899,451,079.00**	**37,080,972,566.00**	**36,940,500,236.00**	**11,041,049,157.00**							**16,677,218,500.00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**25,899,451,079.00**	**37,080,972,566.00**	**36,940,500,236.00**	**11,041,049,157.00**							**16,677,218,500.00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**22,311,695,479.00**	**24,517,302,916.00**	**24,746,011,696.00**	**-12,169,478,979.00**							**10,142,216,500.00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	43,506,630.00	203,280,380.00	181,021,120.00	137,514,490.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		70,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9,995,000.00	51,142,380.00	50,988,040.00	40,993,040.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,247,500.00	32,599,000.00	27,168,000.00	20,920,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	4,998,600.00	29,095,500.00	24,944,000.00	19,945,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,215,590.00	28,686,100.00	24,813,670.00	17,598,080.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,998,900.00	26,774,500.00	22,158,000.00	17,159,100.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,999,840.00	27,707,900.00	27,707,900.00	22,708,060.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5,051,200.00	7,275,000.00	3,241,510.00	-1,809,690.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3,978,504,080.00	4,526,992,632.00	4,516,526,382.00	538,022,302.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5,384,666,300.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	3,946,422,100.00	4,369,885,232.00	4,369,885,232.00	423,463,132.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,294,666,300.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4,999,740.00	22,828,900.00	20,289,040.00	15,289,300.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5,659,890.00	57,910,000.00	58,218,680.00	52,558,790.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,993,400.00	36,539,400.00	36,384,730.00	31,391,330.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,050.00	3,704,500.00	3,544,120.00	-1,455,930.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	6,937,000.00	31,632,700.00	27,684,580.00	20,747,580.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4,491,900.00	4,491,900.00	520,000.00	-3,971,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	9,928,700.00	50,955,000.00	46,881,360.00	36,952,660.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		40,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,981,900.00	26,210,600.00	23,720,240.00	18,738,340.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,946,800.00	24,744,400.00	23,161,120.00	18,214,320.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	16,102,700.00	104,037,300.00	101,132,610.00	85,029,910.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		779,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	4,984,000.00	36,097,600.00	34,452,610.00	29,468,610.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	4,960,000.00	33,254,000.00	33,254,000.00	28,294,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			375,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	1,160,700.00	1,259,700.00	0.00	-1,160,700.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			354,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	4,998,000.00	33,426,000.00	33,426,000.00	28,428,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	241,962,790.00	683,647,800.00	964,232,780.00	722,269,990.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		560,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	14,883,000.00	15,133,000.00	15,133,000.00	250,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	32,553,690.00	330,247,100.00	637,547,100.00	604,993,410.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,243,600.00	20,320,800.00	30,976,800.00	15,733,200.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15,325,000.00	31,115,000.00	0.00	-15,325,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				55 Dokumen	55 Dokumen	72,000,000.00	112,365,000.00	106,800,000.00	34,800,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	76,800,000.00	86,868,000.00	86,868,000.00	10,068,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			115,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	15,157,500.00	87,598,900.00	86,907,880.00	71,750,380.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0.00	34,151,370.00	34,151,370.00	34,151,370.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		85,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0.00	34,151,370.00	34,151,370.00	34,151,370.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1,082,310,800.00	719,542,300.00	716,634,340.00	-365,676,460.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1,035,967,200.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5,217,200.00	10,002,700.00	7,094,740.00	1,877,540.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	12 Laporan	463,893,600.00	54,339,600.00	54,339,600.00	-409,554,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			451,652,200.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	613,200,000.00	655,200,000.00	655,200,000.00	42,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			569,315,000.00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	400,770,000.00	1,425,807,000.00	1,425,807,000.00	1,025,037,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1,119,230,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	313,820,000.00	334,910,000.00	334,910,000.00	21,090,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			714,230,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	6 Unit	49,400,000.00	1,035,097,000.00	1,035,097,000.00	985,697,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	35 Unit	37,550,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	18,250,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	16,164,135,379.00	16,168,972,734.00	16,168,972,734.00	4,837,355.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		520,240,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																				
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/B ulan	35 Orang/B ulan	15,675,935,379.00	15,683,547,734.00	15,683,547,734.00	7,612,355.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	384,600,000.00	381,825,000.00	381,825,000.00	-2,775,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			460,240,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	103,600,000.00	103,600,000.00	103,600,000.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	374,474,400.00	599,916,400.00	590,652,000.00	216,177,600.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		548,113,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan	7 Laporan	34,459,200.00	152,359,800.00	143,408,600.00	108,949,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			88,840,000.00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	40,200,900.00	84,805,000.00	84,491,800.00	44,290,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			159,273,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	299,814,300.00	362,751,600.00	362,751,600.00	62,937,300.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	-				-	-	**3,587,755,600.00**	**12,563,669,650.00**	**12,194,488,540.00**	**2,947,246,400.00**						**6,535,002,000.00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	433,862,490.00	2,045,651,650.00	2,029,241,860.00	1,595,379,370.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1,330,948,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	155,372,300.00	466,752,900.00	464,917,270.00	309,544,970.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			137,400,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20 Dokumen	9 Dokumen	169,116,900.00	1,317,484,390.00	1,313,025,020.00	1,143,908,120.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			657,500,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	5 Dokumen	14,195,590.00	15,783,100.00	13,944,810.00	-250,780.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			131,048,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	90,096,200.00	241,219,000.00	236,132,000.00	146,035,800.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,081,500.00	4,412,260.00	1,222,760.00	-3,858,740.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	212,591,110.00	176,427,000.00	148,937,680.00	-63,653,430.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1,563,577,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	35,251,500.00	33,319,000.00	27,720,000.00	-7,531,500.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			72,800,000.00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	30,016,500.00	30,355,000.00	26,408,000.00	-3,608,500.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			68,800,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	45,827,000.00	24,437,500.00	21,837,000.00	-23,990,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			437,978,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,110.00	30,922,500.00	27,683,000.00	-7,317,110.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			319,949,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	23,848,200.00	26,905,200.00	16,766,000.00	-7,082,200.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35,087,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	42,647,800.00	30,487,800.00	28,523,680.00	-14,124,120.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			628,963,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	51,022,300.00	1,926,366,900.00	1,761,283,680.00	1,710,261,380.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		240,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				5 Laporan	5 Laporan	5,686,100.00	13,809,300.00	13,320,500.00	7,634,400.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	5,686,100.00	13,851,000.00	12,750,000.00	7,063,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				5 Laporan	5 Laporan	5,686,100.00	13,794,900.00	12,750,000.00	7,063,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	5,653,100.00	13,732,900.00	12,750,000.00	7,096,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				5 Laporan	5 Laporan	5,405,700.00	13,731,600.00	13,507,600.00	8,101,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				5 Dokumen	5 Dokumen	5,550,800.00	13,682,100.00	12,750,000.00	7,199,200.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				5 Dokumen	4 Dokumen	11,905,900.00	1,829,786,000.00	1,669,913,000.00	1,658,007,100.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggunglawaban Kepala Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5,448,500.00	13,979,100.00	13,542,580.00	8,094,080.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	862,898,300.00	2,075,463,500.00	1,940,756,190.00	1,077,857,890.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1,180,700,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	451,380,000.00	1,246,910,000.00	1,119,822,000.00	668,442,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			875,500,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	3 Orang	90,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	9 Orang	252,000,000.00	327,600,000.00	327,600,000.00	75,600,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25,200,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	5,010,600.00	25,171,700.00	20,053,020.00	15,042,420.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,007,700.00	3,053,000.00	1,481,170.00	-13,526,530.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																				
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				453 Dokumen	453 Dokumen	49,500,000.00	412,728,800.00	411,800,000.00	362,300,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	1,527,610,800.00	1,993,619,800.00	1,970,762,130.00	443,151,330.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1,492,175,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	11,500,000.00	33,320,000.00	27,200,000.00	15,700,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																				
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,979,200.00	2,043,200.00	1,377,130.00	-10,602,070.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																				
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1,504,131,600.00	1,958,256,600.00	1,942,185,000.00	438,053,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,430,175,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	8,631,600.00	4,365,800.00	832,000.00	-7,799,600.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		39,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																				
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 0	1 0	4,285,300.00	2,303,800.00	416,000.00	-3,869,300.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	2 Laporan	4,346,300.00	2,062,000.00	416,000.00	-3,930,300.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	491,139,000.00	4,341,775,000.00	4,342,675,000.00	3,851,536,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		688,602,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				20 Dokumen	50 Dokumen	491,139,000.00	4,341,775,000.00	4,342,675,000.00	3,851,536,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			688,602,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								**25,899,451,079.00**	**37,080,972,566.00**	**36,940,500,236.00**	**-20,817,255,718.00**							**16,677,218,500.00**	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dengan adanya pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 terdapat ketidak sesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut

5.2.1 Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :

a. Melaksnakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

5.2.2 Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Takalar, 2025
Sekretaris DPRD Kabupaten Takalar

JAMALUDDIN HASAN, SE.MM.
Pangkat : Pembina Tingkat I.
NIP. : 19691012 199803 1 010

PEMERINTAH
KABUPATEN TAKALAR

PERUBAHAN RENJA
TAHUN 2025
KECAMATAN GALESONG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan. Renja Perubahan ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Perubahan Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing–masing Bagian/Seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan.

Kami menyadari, Perubahan Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Perubahan Renja ini, semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen, serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dalam melaksanakan Tugas Sebagai Abdi Negara.

Takalar, 11 Juni 2025

Camat Galesong

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN GALESONG
TAKALAR

MUH. IKHSAN LARIGAU, SE
Pangkat : Pembina
Nip. 196911152007011028

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL V

DAFTAR GAMBAR VI

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-3

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.3.1 Maksud I-4

1.3.2 Tujuan I-4

1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GALESONG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-1

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Kecamatan Galesong 2025 yang Terakomodir di APBD 2025 ..... II-10

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025 ..... II-10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Galesong II-15

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) II-16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GALESONG III-1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025 ..... III-1

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025 ..... III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran III-2

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GALESONG IV-1

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-1

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja IV-3

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Periode Pelaksanaan : Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-2
Tabel II-2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025 .....II-10
Tabel II-3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Hingga Triwulan I Tahun 2025 .....II-11
Tabel II-4 Rekapitulasi Capaian Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kec. Galesong Kab. Takalar Triwulan I Tahun 2025 .....II-12
Tabel II-5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kec. Galesong Kab. Takalar Triwulan I Tahun 2025 .....II-14
Tabel II-6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar II-17
Table III-1 Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025 .....III-4
Table IV-1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah IV-1
Table IV-2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kab. Takalar IV-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Renja Kecamatan Galesong dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Galesong disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Galesong Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Galesong Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Galesong dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Galesong Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Gambar I-1
Hubungan Renja Kecamatan Galesong dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

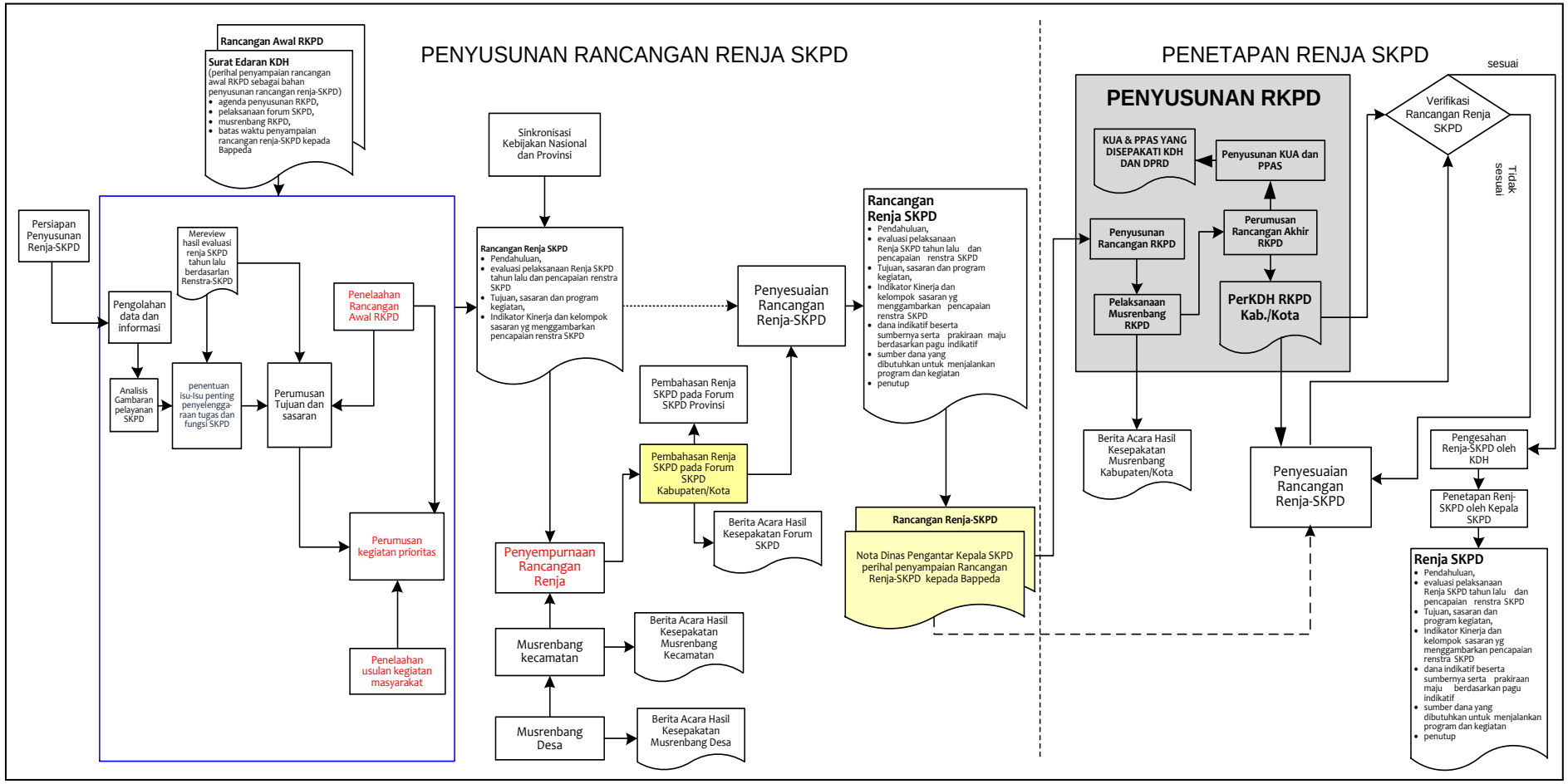

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Galesong adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra kantor Kecamatan Galesong ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi Perubahan APBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Kantor Kecamatan Galesong.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Galesong adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Galesong.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Sampai Triwulan I Tahun 2025, memuat tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan I (Tahun 2025) sesuai dengan renstra dan tupoksi OPD, dan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Galesong, memuat tentang tujuan, sasaran program dan kegiatan berdasarkan renstra dan tupoksi Kecamatan Galesong khusus untuk tahun 2025.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Galesong, berisi tentang daftar program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dan dan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan perubahan renja Kecamatan Galesong.

BAB V Penutup, Bab ini berisikan bahasan tentang ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GALESONG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Kecamatan Galesong dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Periode Pelaksanaan 2025.

Tabel II-1
FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
PERIODE PELAKSANAAN : SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10	11
		7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
		7	**01**				**KECAMATAN GALESONG**			**1,917,260,543**	**12.34%**	**302,389,696**		**302,389,696**	12.34%	15.77%		
		7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah**	**100%**	**1,890,874,543**	**12%**	**296,128,296**	**12%**	**296,128,296**	**11.70%**	**15.66%**	**Kecamatan Galesong**	
	S6 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong	**7**	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	100.00%	8,085,000	12.50%	1,494,000	12.50%	1,494,000	12.50%	18.48%		
		7	01	01	20.1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1,626,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		7	01	01	20.1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1,372,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		7	01	01	20.1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1,356,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		7	01	01	20.1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1,160,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		

		7	01	01	20.1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1,077,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		7	01	01	20.1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1,494,000	1	1,494,000	1	1,494,000	100.00%	100.00%		
Rata-rata capaian kinerja (%)															**16.67%**	**16.67%**		
Predikat kinerja															**SR**	**SR**		
	S6 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong	7	01	01	20.2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100.00%	1,769,068,343	13.88%	283,887,896	13.88%	283,887,896	13.88%	16.05%	Kecamatan Galesong	
		7	01	01	20.2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196	1,289,234,452	53	283,399,896	53	283,399,896	27.04%	21.98%		
								Jumlah ASN yang Menerima TPP	168	470,488,891	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
								Jumlah ASN yang menerima Objektifitas lainnya	24	8,040,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		7	01	01	20.2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1,305,000	1	488,000	1	488,000	100.00%	37.39%		
Rata-rata capaian kinerja (%)															**31.76%**	**14.84%**		
Predikat kinerja															**SR**	**SR**		
	S6 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong	7	01	01	20.3		**Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah**	100.00%	1,353,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Kecamatan Galesong	
		7	01	01	20.3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1,353,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0.00%**	**0.00%**		

								Predikat kinerja							**SR**	**SR**		
	S6 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong	7	01	01	20.6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	100.00%	26,173,200	17.44%	1,778,400	17.44%	1,778,400	17.44%	6.79%	Kecamatan Galesong	
		7	01	01	20.6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80	5,614,400	20	903,400	20	903,400	25.00%	16.09%		
		7	01	01	20.6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,000	2,419,800	700	350,000	700	350,000	17.50%	14.46%		
		7	01	01	20.6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	684,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		7	01	01	20.6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Daerah	158	17,455,000	20	525,000	20	525,000	12.66%	3.01%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							**13.79%**	**8.39%**		
								Predikat kinerja							**SR**	**SR**		
	S6 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong	7	01	01	20.7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan**	100.00%	32,135,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Kecamatan Galesong	
		7	01	01	20.7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	32,135,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**SR**	**SR**		
	S6 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong	7	01	01	20.8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	100.00%	29,214,000	18.06%	5,418,000	18.06%	5,418,000	18.06%	18.55%	Kecamatan Galesong	

		7	01	01	20.8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayar	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
								Jumlah rekening Wifi Internet yang di bayar	12	5,214,000	3	1,418,000	3	1,418,000	25.00%	27.20%		
		7	01	01	20.8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	24,000,000	10	4,000,000	10	4,000,000	16.67%	16.67%		
Rata-rata capaian kinerja (%)															**13.89%**	**14.62%**		
Predikat kinerja															**SR**	**SR**		
	S6 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong	7	01	01	20.9		**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.**	**Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100.00%	24,846,000	20.00%	3,550,000	20.00%	3,550,000	20.00%	14.29%	Kecamatan Galesong	
		7	01	01	20.9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional beserta pajaknya	2	22,856,000	1	3,550,000	1	3,550,000	50.00%	15.53%		
		7	01	01	20.9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	1,990,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		7	01	01	20.9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
Rata-rata capaian kinerja (%)															**16.67%**	**5.18%**		
Predikat kinerja															**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**13.25%**	**8.53%**		
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja: Adanya sub Kegiatan yang mencapai Kinerja 100% dikarenakan Sub Kegiatan tersebut telah selesai di Triwulan I untuk mendukung proses kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Galesong

Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik Oleh Pemerintah**	**100%**	**2,940,000**	**12.50%**	**550,000**	**12.50%**	**550,000**	**12.50%**	**18.71%**	**Kecamatan Galesong**	
	S1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kecamatan	7	01	02	20.2		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan**	100.00%	1,795,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%		
		7	01	02	20.2	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	1,795,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**SR**	**SR**		
	S2 : Meningkatkan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	7	01	02	20.3		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Pencapaian Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	100.00%	1,145,000	25.00%	550,000	25.00%	550,000	25.00%	48.03%		
		7	01	02	20.3	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	1,145,000	1	550,000	1	550,000	25.00%	48.03%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							**25.00%**	**48.03%**		
								Predikat kinerja							**SR**	**SR**		
								Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)							**12.50%**	**24.02%**		
								Predikat Kinerja Program							**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan**	**100.00%**	**17,907,500**	**37.50%**	**5,711,400**	**37.50%**	**5,711,400**	**37.50%**	**31.89%**	**Kecamatan Galesong**	
	S5 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan	7	01	03	20.1		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	100.00%	4,628,000	50.00%	3,621,500	50.00%	3,621,500	50.00%	78.25%		
		7	01	03	20.1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	4,628,000	3	3,621,500	3	3,621,500	50.00%	78.25%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							**50.00%**	**78.25%**		
								Predikat kinerja							**SR**	**T**		

	S5 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan	7	01	03	20.3		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	100.00%	13,279,500	25.00%	2,089,900	25.00%	2,089,900	25.00%	15.74%	Kecamatan Galeosng	
		7	01	03	20.3	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	12,008,500	2	1,747,000	2	1,747,000	33.33%	14.55%		
		7	01	03	20.3	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	1,271,000	1	342,900	1	342,900	25.00%	26.98%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							**25.00%**	**26.98%**		
								Predikat kinerja							**SR**	**SR**		
								Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)							**37.50%**	**52.62%**		
								Predikat Kinerja Program							**SR**	**R**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa / Kelurahan**	**100.00%**	**2,012,500**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**Kecamatan Galesong**	
	S3 : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	01	04	20.1		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase sinergitas kepolisian,TNI dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan**	100.00%	2,012,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%		
		7	01	04	20.1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	1,003,500	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		7	01	04	20.1	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	1,009,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)			0.00%	-			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu**	**100.00%**	**3,526,000**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**Kecamatan Galesong**	

	S4 : Meningkatnya Status Desa	7	01	06	20.1		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100.00%	3,526,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%		
		7	01	06	20.1	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		7	01	06	20.1	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17	1,023,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		7	01	06	20.1	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	1,503,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)			0.00%	-			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**12.65%**	**17.03%**
Predikat Kinerja Program	**SR**	**SR**

Sumber : Laporan Monev Renja Kec. Galesong Triwulan I Tahun 2025

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Kecamatan Galesong 2025 yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaranseberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabelsebagai berikut :

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2024							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kecamatan Galesong	5	13	28	5	13	30
TOTAL		**5**	**13**	**28**	**5**	**13**	**30**

Sumber : Laporan Monev Renja Triwulan I Tahun 2025, diolah Kecamatan Galesong

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 5, jumlah kegiatan 13, dan jumlah sub kegiatan 28, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 5, jumlah indikator kegiatan sebanyak 13, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 30.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar
Hingga Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
1	Kecamatan Galesong	1.917.260.543	302.389.696	12,34%	15,77%
TOTAL		**1.917.260.543**	**302.389.696**	**12,34%**	**15,77%**

Sumber : Laporan Monev Renja Triwulan I Tahun 2025, diolah Kecamatan Galesong

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 302.389.696,-. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 15,77 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 12,34 persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Galesong. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Kecamatan Galesong dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Galesong sebanyak 5 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 2 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 2 program (realisasi >10-20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 1 program (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Kecamatan Galesong dapat dijelaskan bahwa terdapat 13 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 6 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 5 kegiatan (realisasi >10-20 persen), dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 2 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Kecamatan Galesong pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 28 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 16 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 5 sub kegiatan, dan 7 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kec. Galesong Kab. Takalar

Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kecamatan Galesong	5	2	2	1	13	6	5	2	28	16	5	7
TOTAL		**5**	**2**	**2**	**1**	**13**	**6**	**5**	**2**	**28**	**16**	**5**	**7**

Sumber : Laporan Monev Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Galesong

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Galesong. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja >10 – 20% dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 20%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Kantor Kecamatan Galesong dapat dijelaskan bahwa dari 5 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 10 persen adalah 2 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 10-20 persen) terdapat 2 program, selebihnya sebanyak 1 program yang capaian kinerja masuk dalam

kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 20 persen pada triwulan I Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 13 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I, terdapat 5 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 10 persen, dan terdapat 5 kegiatan yang capaian kinerja kategori sedang, sedangkan terdapat 3 kegiatan yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 28 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan satu dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja yang masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 15 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 3 sub kegiatan, selebihnya capaian kinerja yang masuk dalam kategori tinggi sebanyak 10 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program,

Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kec. Galesong Kab. Takalar
Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kecamatan Galesong	5	2	2	1	13	5	5	3	28	15	3	10
TOTAL		**5**	**2**	**2**	**1**	**13**	**5**	**5**	**3**	**28**	**15**	**3**	**10**

Sumber : Laporan Monev Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Galesong

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Galesong

Kantor Kecamatan Galesong mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliput pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan di Desa.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain pengantar KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong tahun 2025 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Galesong, harus dilakukan survey IKM. Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Galesong. Kinerja pelayanan didukung oleh sistem yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Galesong yang mengacu pada RPJMD Kabupaten dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Galesong dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Triwulan I	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan	80	84,07	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan	88	90	93	Survey belum selesai	90	93	
2	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban	83%	22%	Persentase Pelayanan Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	94%	35%	92%	94%	
3	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)	90%	87%	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	90%	92%	94%	29%	92%	94%	
4	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Non Standart Pelayanan Minimal (Non SPM)	90%	85%	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Galesong	BB (71,10)	BB (71,10)	BB (71,15)	Belum dilakukan evaluasi penilaian	BB (71,10)	BB (71,15)	
5	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kondisi Baik	85%	83%	Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Galesong	92%	92%	83%	92%	92%	92%	
6	Angka Kriminalitas	45	43								
7	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,697	0,7033								
8	Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju	70%	37,5%								
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	85%	75%								
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Belum dilakukan evaluasi penilaian								
11	Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong	B	BB (70,75)								

Sumber : Renstra Kec. Galesong Tahun 2023-2026 dan Rensta Tahun 2025-2029

Perubahan indikator kinerja perangkat daerah dipengaruhi oleh adanya perbedaan visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. Pada periode sebelumnya melalui Renstra 2023–2026, arah pembangunan Kecamatan Galesong lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan desa, serta peningkatan pelayanan publik yang bersifat fundamental. Sehingga, indikator tahun 2024 masih berfokus pada capaian dasar seperti kepuasan masyarakat, ketertiban umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan pembangunan desa. Namun, memasuki periode Renstra 2025–2029, arah kebijakan berubah mengikuti visi Bupati terpilih yaitu "Takalar Maju Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital". Visi ini mendorong transformasi pembangunan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis digital, dengan orientasi pada peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja tahun 2025 disusun lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi, seperti peningkatan kepuasan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan, penanganan aduan masyarakat, literasi digital ASN, serta penguatan akuntabilitas kinerja (SAKIP).

Dengan demikian, perubahan indikator dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran fokus pembangunan, dari orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas layanan publik, menuju pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Berdasarkan tabel II-6 diatas, pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Adapun penjelasannya yaitu :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan**

   Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian berada pada angka 84,07 poin dari target yang ditetapkan sebesar 80 poin. Capaian ini menggambarkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan sudah berjalan baik dan telah melebihi target yang ditentukan. Penilaian ini diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat yang melibatkan responden dari berbagai kelompok pengguna layanan, sehingga hasilnya mencerminkan persepsi masyarakat secara langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Meskipun secara umum sudah baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya pada aspek kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat dan kecepatan pelayanan. Perbaikan pada kedua aspek tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kepuasan masyarakat sehingga target IKM pada periode berikutnya dapat tercapai atau bahkan terlampaui.

2. **Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban**
   Berdasarkan data perbandingan angka kriminal di Kecamatan Galesong, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 235 kasus dan pada tahun 2024 menurun menjadi 183 kasus, atau terjadi penurunan sebesar 52 kasus. Jika dihitung dalam persentase, maka realisasi penurunan kriminalitas hanya mencapai sekitar 22%. Sementara itu, target penurunan kasus kriminal tahun 2024 ditetapkan sebesar 83%, sehingga capaian tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren positif berupa penurunan kasus, namun hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap strategi pencegahan dan penanganan tindak kriminal yang selama ini dijalankan. Upaya sinergis antara aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, dan partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat agar di tahun mendatang penurunan angka kriminalitas dapat lebih signifikan dan mendekati target yang ditetapkan.
3. **Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)**
   Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 87% dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%. Hal ini menandakan bahwa pelayanan dasar publik di Kecamatan Galesong telah pada dasarnya sudah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku. Layanan kesehatan mencapai 90%, Layanan pendidikan 89%, Layanan Perumahan Rakyat 85%, Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 80%, Layanan Sosial 86% dan Layanan Pekerjaan Umum 86%. Dari total 788 permohonan pelayanan, sebanyak 686 telah dilaksanakan sesuai SPM, sehingga menghasilkan capaian rata-rata 87%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik, baik dalam hal ketepatan waktu, prosedur yang jelas, maupun kesesuaian hasil layanan dengan standar. Meski demikian, Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat masih dibawah 85%, sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan pada periode berikutnya.
4. **Persentase Pelayanan sesuai Non Standar Pelayanan Minimal (Non SPM)**
   Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Non SPM sebesar 85%, dan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 90%. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang cukup memadai. Berdasarkan data perhitungan, dari total 397 layanan yang diterima, sebanyak 338 layanan berhasil diselesaikan sesuai Non SPM, sehingga capaian rata-rata adalah 85%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Non SPM di Kecamatan Galesong telah terlaksana dengan baik, namun masih

memerlukan optimalisasi sistem pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana pendukung agar capaian di tahun berikutnya bisa memenuhi atau melampaui target.

5. **Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kondisi Baik**

   Pada tahun 2024, capaian persentase sarana dan prasarana pelayanan umum dalam kondisi baik di Kecamatan Galesong mencapai 83%, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 85%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana prasarana sudah tersedia dan berfungsi dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan untuk mencapai standar optimal. Berdasarkan tabel perhitungan, dari total 94 sarana prasarana yang tersedia, terdapat 78 dalam kondisi baik. Hampir seluruh jenis prasarana seperti kantor, puskesmas, sekolah (SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA), dan pasar telah memenuhi standar ketersediaan. Namun, pada kategori kondisi kantor pelayanan hanya terdapat 14 dari 18 dengan kondisi baik atau sekitar 78%. Kekurangan ini menjadi faktor utama penyebab belum tercapainya target 85%. Dengan demikian, meskipun capaian 83% menunjukkan pelayanan publik sudah ditunjang sarana prasarana yang cukup memadai, tetap diperlukan penambahan dan perbaikan kantor pelayanan agar kualitas layanan masyarakat dapat lebih optimal dan sesuai dengan target.

6. **Angka Kriminalitas**

   Pada tahun 2024, angka kriminalitas di Kecamatan Galesong tercatat sebesar 43 kasus per 10.000 penduduk, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 45 kasus per 10.000 penduduk. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di wilayah Kecamatan Galesong relative terkendali dan kondisi keamanan masyarakat tergolong cukup kondusif. Berdasarkan data tabel tindak kriminal, jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2024 sebanyak 193 kasus dengan jumlah penduduk sebesar 45.047 jiwa, sehingga hasil perhitungan angka kriminalitas adalah:

   193 /45.047 X 10.000 = 43 kasus per tahun

   Hasil ini membuktikan bahwa meskipun masih terdapat berbagai bentuk tindak kriminal, intensitasnya lebih rendah dibandingkan target, yang berarti efektivitas upaya aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan cukup baik. Namun demikian, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan patrol keamanan, penguatan koordinasi aparat, serta program pembinaan masyarakat untuk menekan angka kriminalitas lebih rendah lagi di tahun-tahun mendatang.

7. **Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan**
   Pada tahun 2024, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Galesong mencapai 0,7033 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 0,697. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian desa di wilayah Kecamatan Galesong yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Indeks Desa Membangun merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa melalui tiga dimensi utama, yaitu Indeks Sosial (pendidikan, kesehatan, dan modal sosial), Indeks Ekonomi (keragaman produksi desa, akses ke pusat perdagangan, serta keterhubungan infrastruktur), dan Indeks Ekologi/Lingkungan (kualitas lingkungan dan mitigasi bencana). Capaian 0,7033 menunjukkan IDM Kecamatan Galesong dengan status berkembang. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses infrastruktur dasar, serta dukungan pemerintah dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pembangunan desa Di Kecamatan Galesong berjalan efektif dan mampu meningkatkan kemandirian desa di atas target yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan langkah berkelanjutan berupa penguatan perekonomian lokal, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar seluruh desa dapat mencapai status desa mandiri secara menyeluruh.
8. **Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju**
   Pada tahun 2024, persentase desa status berkembang menuju status desa maju di Kecamatan Galesong belum mencapai target. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang mengalami peningkatan menjadi desa maju sebanyak 3 desa dari 8 desa yang sebelumnya berstatus berkembang. Dengan semakin banyaknya desa berkembang yang naik kelas menuju desa maju, maka kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Galesong juga akan semakin meningkat, baik dari sisi akses layanan dasar, peluang ekonomi lokal, maupun pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga konsistensi pembinaan, memperkuat kelembagaan desa, serta meningkatkan sinergi antar-pemangku kepentingan agar seluruh desa dapat mencapai status desa maju bahkan desa mandiri.
9. **Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat**
   Pada tahun 2024, persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Galesong mencapai 75%, dan belum mencapai target yang ditetapkan karena masih terdapat beberapa lembaga seperti Bumdes, Karang Taruna dan Kelompok Tani yang tingkat keaktifannya relative rendah

dibandingkan lembaga lain. Jumlah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Galesong tahun 2024 sebanyak 116 lembaga, dengan 87 lembaga yang aktif. Perhitungannya yaitu:

87/116 x 100% = 75%

Capaian ini menandakan peran lembaga kemasyarakatan cukup konsisten dalam pemberdayaan masyarakat. Tingkat keaktifan tertinggi ditunjukkan oleh LPM, BPD, dan PKK yang mencapai 100%.

10. **Indeks Reformasi Birokrasi**

    Target yang ditetapkan adalah predikat B, namun pada tahun 2024 belum ada realisasi karena belum dilakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan dalam proses penilaian agar capaian reformasi birokrasi dapat terukur dengan jelas. Evaluasi yang tepat waktu penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Galesong.

11. **Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong**

    Target nilai B dan realisasi mencapai BB (70,75). Capaian ini berhasil melampaui target yang ditetapkan, menandakan adanya peningkatan kualitas dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja di Kecamatan Galesong. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar, yang sekaligus menunjukkan komitmen kecamatan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan**

   Pada tahun 2025 ditetapkan target IKM sebesar 88. Namun, pada Triwulan I, realisasi capaian belum tersedia karena proses survei kepuasan masyarakat masih berlangsung. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian survei agar dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas layanan.

2. **Persentase Pelayanan Masyarakat yang Selesai Tepat Waktu**

   Target pelayanan tepat waktu pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 90%, sementara hasil realisasi pada triwulan I sudah mencapai 35% dengan jumlah layanan yang masuk sebanyak 450 Layanan dan yang sudah diselesaikan tepat waktu sebanyak 158 Layanan. Pencapaian ini terjadi karena adanya kesadaran dan kompetensi petugas serta dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

3. **Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**
   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 90%, sementara realisasi triwulan I sudah mencapai 29% dengan target aduan dalam setahun sebanyak 24 aduan dan sudah diselesaikan sebanyak 6 aduan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan kecamatan semakin meningkat, karena mayoritas aduan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Meski demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, agar capaian di masa mendatang semakin optimal.
4. **Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Galesong**
   Target yang ditetapkan adalah memperoleh nilai B (71,10). Pada Triwulan I tahun 2025, penilaian SAKIP oleh Inspektorat belum dilaksanakan sehingga belum terdapat data realisasi. Oleh karena itu, Kecamatan perlu mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar saat penilaian dilakukan hasilnya dapat sesuai target.
5. **Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Galesong**
   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 92%, dan realisasi pada triwulan I juga telah mencapai 83%, sehingga capaian ini hamper memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, dari 12 ASN di Kecamatan Galesong, sebanyak 10 ASN mampu mengoperasikan komputer, sehingga menghasilkan tingkat literasi digital sebesar 83%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital sudah cukup baik untuk mendukung tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Namun, peningkatan kapasitas masih tetap diperlukan agar literasi digital ASN semakin optimal dalam menunjang efektivitas, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GALESONG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut :

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. Untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Kecamatan Galesong yaitu **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan",** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Galesong dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Kecamatan Galesong Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini :

Table III-1

Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025 (Renstra PD 2023-2026)			PERUBAHAN RENJA POKOK 2025 (Renstra PD 2025-2029)		
TUJUAN / SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
T.1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan	90	T.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan	88
	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban	85%	S1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Pelayanan Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	90%
S.1.1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)	92%		Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	90%
	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Non Standart Pelayanan Minimal (Non SPM)	92%	S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Galesong	BB (71,10)
S.1.2. Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Umum	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kondisi Baik	90%		Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Galesong	92%
S.1.3. Meningkatnya ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	40			

T.2. Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,735			
S.2.1. Meningkatnya Status Desa	Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju	75%			
S.2.2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	87%			
T.3. Meningkatkan tata kelola pada Kantor Kecamatan Galesong	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,20)			
S.3.1. Meningkatnya Tata kelola kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong	Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong	BB (71,30)			

Sumber : Renstra Kec. Galesong Tahun 2023-2025 dan Renstra 2025-2029; diolah

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GALESONG

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Galesong Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Galesong yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table IV-1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1,775,900**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**987,900**
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	987,900
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**788,000**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	788,000

2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13,498,700**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**4,628,000**
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4,628,000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**8,870,700**
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	8,527,800
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	342,900
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1,006,600**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**1,006,600**
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	309,600
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	697,000
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1,782,300**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**1,782,300**
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-

			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	387,900
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,394,400

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Galesong Tahun 2025 dengan total pagu Rp 1.897.201.043,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Seribu Empat Puluh Tiga Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table IV-2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TAKALAR
TAHUN 2025

KABUPATEN : TAKALAR
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GALESONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN GALESONG							**1,717,186,620.00**	**1,929,275,716.00**	**1,897,201,043.00**	**180,014,423.00**							**2,004,600,798.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1,717,186,620.00**	**1,929,275,716.00**	**1,897,201,043.00**	**180,014,423.00**							**2,004,600,798.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1,717,186,620.00**	**1,929,275,716.00**	**1,897,201,043.00**	**180,014,423.00**							**2,004,600,798.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**1,686,900,120.00**	**1,902,889,716.00**	**1,879,137,543.00**	**288,200,678.00**							**1,975,100,798.00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	8,056,500.00	8,085,000.00	1,872,000.00	-6,184,500.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		10,700,000.00	KECAMATAN GALESONG

	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,597,500.00	1,626,000.00	104,000.00	-1,493,500.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,372,000.00	1,372,000.00	112,000.00	-1,260,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,356,000.00	1,356,000.00	99,000.00	-1,257,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,200,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,160,000.00	1,160,000.00	63,000.00	-1,097,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,077,000.00	1,077,000.00	0.00	-1,077,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,500,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,494,000.00	1,494,000.00	1,494,000.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1,558,719,120.00	1,781,083,516.00	1,768,760,343.00	210,041,223.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		1,840,930,798.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,557,414,120.00	1,779,778,516.00	1,767,763,343.00	210,349,223.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,838,430,798.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,305,000.00	1,305,000.00	997,000.00	-308,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,500,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Barang milik Daerah*				100 %	100 %	1,353,000.00	1,353,000.00	1,164,000.00	-189,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		2,200,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,353,000.00	1,353,000.00	1,164,000.00	-189,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,200,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	28,018,000.00	26,173,200.00	17,243,800.00	-10,774,200.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		34,200,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,945,000.00	5,614,400.00	8,016,200.00	4,071,200.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,319,000.00	2,419,800.00	897,600.00	-1,421,400.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	684,000.00	684,000.00	0.00	-684,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,200,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21,070,000.00	17,455,000.00	8,330,000.00	-12,740,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*				100 %	100 %	25,843,000.00	32,135,000.00	32,135,000.00	6,292,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		20,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25,843,000.00	32,135,000.00	32,135,000.00	6,292,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah*				100 %	100 %	39,772,500.00	29,214,000.00	29,214,000.00	-10,558,500.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		40,000,000.00	KECAMATAN GALESONG

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	15,772,500.00	5,214,000.00	5,214,000.00	-10,558,500.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	25,138,000.00	24,846,000.00	28,748,400.00	3,610,400.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		27,070,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	22,856,000.00	22,856,000.00	25,378,400.00	2,522,400.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	610,000.00	1,990,000.00	3,370,000.00	2,760,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,070,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1,672,000.00	0.00	0.00	-1,672,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0.00	KECAMATAN GALESONG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik oleh Pemerintah**				**100 %**	**100 %**	**2,940,000.00**	**2,940,000.00**	**1,775,900.00**	**1,060,000.00**							**4,000,000.00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan*				100 %	100 %	1,795,000.00	1,795,000.00	987,900.00	-807,100.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Galesong		2,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	1,795,000.00	1,795,000.00	987,900.00	-807,100.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,000,000.00	KECAMATAN GALESONG

	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik*				100 %	100 %	1,145,000.00	1,145,000.00	788,000.00	-357,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Galesong		2,000,000.00	KECAMATANGALESONG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	1,145,000.00	1,145,000.00	788,000.00	-357,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,000,000.00	KECAMATANGALESONG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan**				**100 %**	**100 %**	**21,808,000.00**	**17,907,500.00**	**13,498,700.00**	**-3,308,000.00**							**18,500,000.00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	4,628,000.00	4,628,000.00	4,628,000.00	0.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Galesong		5,000,000.00	KECAMATANGALESONG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4,628,000.00	4,628,000.00	4,628,000.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	KECAMATANGALESONG

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	17,180,000.00	13,279,500.00	8,870,700.00	-8,309,300.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Galesong		13,500,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	15,909,000.00	12,008,500.00	8,527,800.00	-7,381,200.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	1,271,000.00	1,271,000.00	342,900.00	-928,100.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,500,000.00	KECAMATAN GALESONG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa/ Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**2,012,500.00**	**2,012,500.00**	**1,006,600.00**	**1,987,500.00**							**4,000,000.00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*persentase sinergitas kepolisian,TNI dan instansi vertikal dikecamatan*				100 %	100 %	2,012,500.00	2,012,500.00	1,006,600.00	-1,005,900.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Galesong		4,000,000.00	KECAMATAN GALESONG

	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	1,003,500.00	1,003,500.00	309,600.00	-693,900.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	1,009,000.00	1,009,000.00	697,000.00	-312,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa Yang Selesai Tepat Waktu**				**100 %**	**100 %**	**3,526,000.00**	**3,526,000.00**	**1,782,300.00**	**-526,000.00**							**3,000,000.00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa*				100 %	100 %	3,526,000.00	3,526,000.00	1,782,300.00	-1,743,700.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Galesong		3,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000.00	KECAMATAN GALESONG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	1,023,000.00	1,023,000.00	387,900.00	-635,100.00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000.00	KECAMATANGALESONG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	1,503,000.00	1,503,000.00	1,394,400.00	-108,600.00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000.00	KECAMATANGALESONG
	J U M L A H								**1,717,186,620.00**	**1,929,275,716.00**	**1,897,201,043.00**	**-20,817,255,718.00**							**2,004,600,798.00**	

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id

BAB V
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Renja Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompokpemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Perubahan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
4. Perubahan Renja Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renja Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Takalar, 11 Juni 2025

Camat Galesong

MUH. IKHSAN LARIGAU, SE
Pangkat : Pembina
Nip. 196911152007011028

GALESONG
UTARA

2025
PERUBAHAN RENJA



Prepared By :
Herlina, S.E.

Presented To:
Pemerintah
Kab. Takalar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing–masing seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan.

Kami menyadari, Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dalam melaksanakan Tugas Sebagai Abdi Negara.

Takalar, 10 Juni 2025

Camat Galesong Utara,

SUMARLIN, S.Pd, M.Si
Pembina
Nip. 19880622 201101 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GALESONG UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara Sampai dengan Triwulan I 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Galesong Utara 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GALESONG UTARA 26

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....26

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Galesong Utara.....28

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GALESONG UTARA.....31

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....31

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025.....33

BAB V PENUTUP.....61

DAFTAR TABEL

TABEL II-1 Formulir Evaluasi Hasil Renja Kabupaten Takalar 8

TABEL II-2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025..... 17

TABEL II-3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I.....18

TABEL II-4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 20

TABEL II-5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 22

TABEL II-6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.....24

TABEL III-1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Galesong Utara.....29

TABEL IV-1 Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara.....35

TABEL IV-2 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Tahun 2025.....51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor ……. Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Galesong

Utara Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Galesong Utara dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

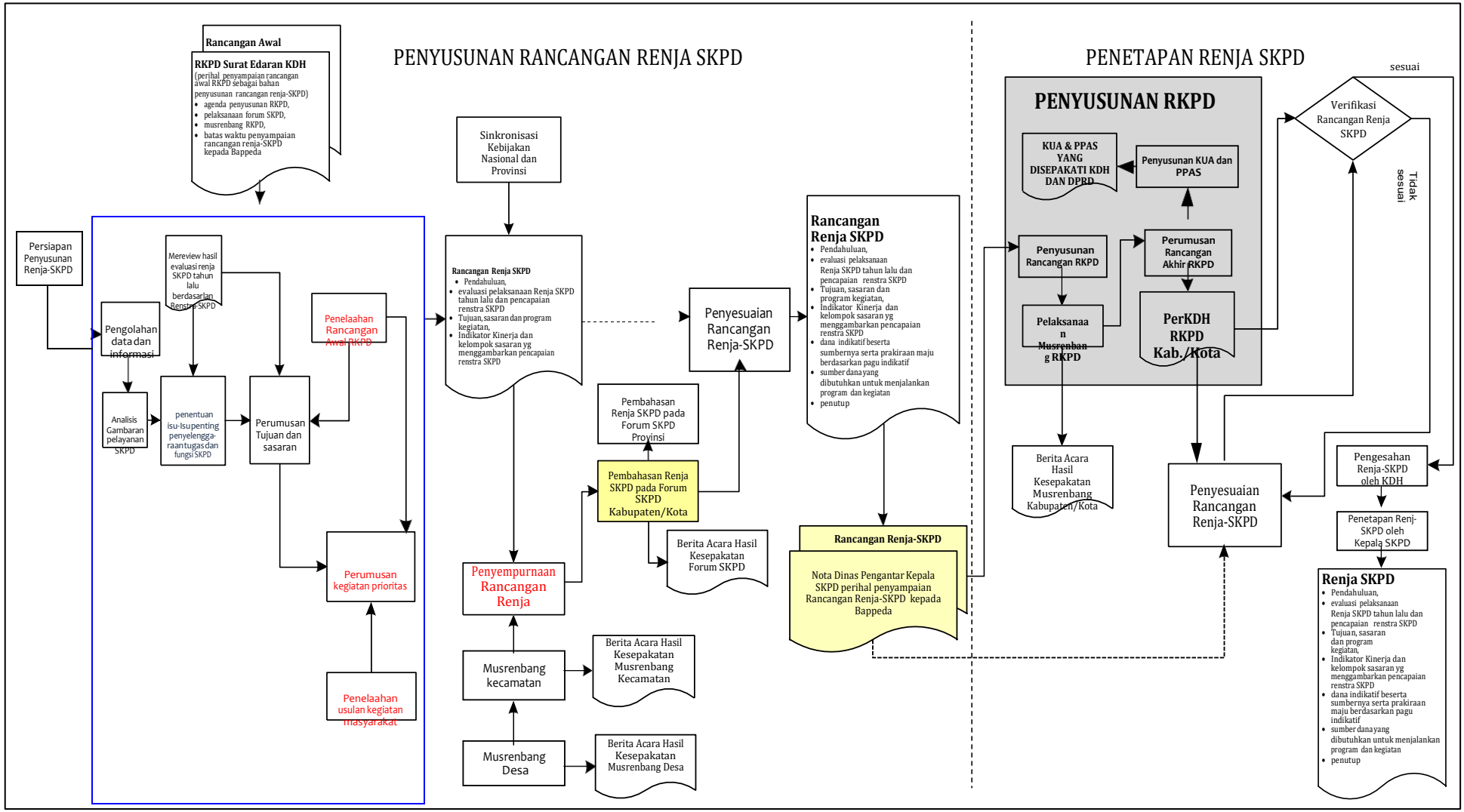
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Awal
RKPD Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)
agenda penyusunan RKPD,
pelaksanaan forum SKPD,
musrenbang RKPD,
batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-isupenting penyelengga-raantugas dan fungsi SKPD
Perumusan Tujuan dan sasaran
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
sesuai
Tidak sesuai
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
Penetapan Renj-SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang sesuai dengan Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan perundangan lainnya yang mengatur Standar Operasional Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang diacu dalam perencanaan dan penganggaran di Badan/Dinas/Kecamatan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan,Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2029;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025- 2029;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Galesong Utara adalah sebagai berikut

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra kantor Kecamatan Galesong Utara ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi PerubahanAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi kantor Kecamatan Galesong Utara

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) kantor Kecamatan Galesong Utara adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan kantor Kecamatan Galesong Utara

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematik Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I Tahun 2025, memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan

Triwulan I (Tahun 2025) sesuai dengan renstra dan tupoksi OPD dan Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Galesong Utara.

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Galesong Utara, memuat tentang Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Galesong Utara.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATANDALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GALESONG UTARA, Memuat tentang Daftar Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Galesong Utara.

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GALESONG UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara Sampai dengan Triwulan I

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Kecamatan Galesong Utara dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Periode Pelaksanaan 2025.

TABEL II-I

EVALUASI HASIL RENJA KABUPATEN TAKALAR
PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		12		25		26 = 25/8 x 100%	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN GALESONG UTARA**			**16,192,997,900**		**2,985,286,737**		**3,181,114,352**	**19.83%**	**548,425,618**		**548,425,618**	**19.83%**	**17.24%**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan dukungan penyelenggaraan administrasi perkantoran**	**100 %**	**15,267,997,900**	**1.28 %**	**2,659,096,937**	**100 %**	**2,862,230,052**	**15%**	**541,230,093**	**15.34 %**	**541,230,093**	**15.34%**	**18.91%**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	98	42,000,000	25.00 %	8,506,400	100.00 %	6,000,000	12.50%	1,000,000	12.50 %	1,000,000	12.50%	16.67%
7	01	01	2:01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang di susun	8	7,000,000	2	2,125,000	2	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%

7	01	01	2:01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	4	7,000,000	1	1,119,200	1	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7	01	01	2:01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	4	7,000,000	1	1,735,000	1	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7	01	01	2:01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	4	7,000,000	1	457,600	1	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7	01	01	2:01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	4	7,000,000	1	334,600	1	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7	01	01	2:01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (Lakip) yang disusun	8	7,000,000	2	2,735,000	2	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	50.00%	100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																	**8.33%**	**16.67%**
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 %	14,268,965,900	21.26 %	2,431,250,541	100 %	2,634,176,052	12.39%	504,845,893	12.39 %	504,845,893	12.39%	19.17%
7	01	01	2:02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji	1904	11,158,965,900	476	1,872,369,622	1,040	2,026,825,981	260	503,845,893	260	503,845,893	25.00%	24.86%
						Jumlah ASN yang menerima tunjangan (TPP)	1632	2,720,000,000	408	555,280,919	1,040	596,110,071	-	-	-	-	0.00%	0.00%
						Jumlah ASN yang menrima Objektifitas lainnya	624	376,000,000	0	-	24	9,240,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7	01	01	2:02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4	7,000,000	1	2,600,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00 %	100.00%

7	01	01	2:02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Semesteran yang disusun	4	7,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																	**25.00%**	**24.97%**
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		100 %	8,000,000	25.00 %	2,283,500	100 %	2,000,000	0.00 %	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	4,000,000	1	985,600	1	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4,000,000	1	1,297,900	1	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																	**0.00%**	**0.00%**
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 %	273,720,000	19.00 %	38,685,400	100 %	53,050,000	16.80%	8,153,200	16.80 %	8,153,200	16.80%	15.37%
7	01	01	2:06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	240	22,000,000	80	8,527,900	100	9,399,000	16	1,747,200	16	1,747,200	16.00%	18.59%
						Jumlah Materai yang dipakai	400	7,440,000	60	656,800	60	756,000	10	126,000	10	126,000	16.67%	16.67%
7	01	01	2:06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan	8000	2,280,000	1420	875,700	2,000	990,000	332	165,000	332	165,000	16.60%	16.67%
7	01	01	2:06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi	1360	242,000,000	340	28,625,000	340	41,905,000	62	6,115,000	62	6,115,000	18.24%	14.59%

																16.88%	**16.63%**
7	01	01			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100 %	4,000,000	0.00 %	-	100 %	14,488,000	0.00 %	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
7	01	01	02	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	4	4,000,000	0	-	1	14,488,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
																0.00%	**0.00%**
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	530,832,000	26.12 %	157,037,456	100 %	130,554,000	16.99%	22,074,600	16.99 %	22,074,600	16.99%	16.91%
7	01	01	2:08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon/wifi yang dibayarkan	48	36,432,000	24	31,037,456	12	4,554,000	3	1,074,600	3	1,074,600	25.00%	23.60%
7	01	01	2:08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kepala Lingkungan yang dibayarkan(orang)	384	192,000,000	96	48,000,000	96	48,000,000	16	8,000,000	16	8,000,000	16.67%	16.67%
						Jumlah Imam Lingkungan yang dibayarkan(orang)	384	115,200,000	98	28,800,000	96	28,800,000	16	4,800,000	16	4,800,000	16.67%	16.67%
						Jumlah tenaga administrasi	336	174,000,000	84	42,000,000	84	42,000,000	14	7,000,000	14	7,000,000	16.67%	16.67%
						Jumlah tenaga kebersihan kantor	96	13,200,000	24	7,200,000	24	7,200,000	4	1,200,000	4	1,200,000	16.67%	16.67%
																18.33%	**18.05%**

7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	144,480,000	15.38 %	21,333,640	100 %	21,962,000	33.33%	5,156,400	33.33 %	5,156,400	33.33%	23.48%
7	01	01	2:09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara	4	112,560,000	1	19,554,040	1	19,648,000	1	4,653,000	1	4,653,000	100.00 %	23.68%
7	01	01	2:09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	15	29,000,000	3	1,049,600	3	974,000	2	503,400	2	503,400	66.67%	51.68%
7	01	01	2:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	20	2,920,000	2	730,000	5	1,340,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
													Rata-rata capaian kinerja (%)				**55.56%**	**25.12%**
													Predikat kinerja				**R**	**SR**
													Rata-rata capaian kinerja Program(%)				**17.73%**	**14.49%**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan publik oleh Pemerintah**		**14,000,000**	**1.04 %**	**1,331,800**	**100 %**	**2,000,000**	**0.00 %**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan**		7,000,000	25.00 %	334,600	100.00 %	1,000,000	0.00 %	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

7	01	02	2.01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Frekwensi Pertemuan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan forum Kecamatan Sehat	48	7,000,000	12	334,600	12	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																	**0.00%**	**0.00%**
Predikat kinerja																	**SR**	**SR**
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		7,000,000	25.00 %	997,200	100.00 %	1,000,000	0.00 %	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
7	01	02	2:02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	48	7,000,000	12	997,200	12	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																	**0.00%**	**0.00%**
Predikat kinerja																	**SR**	**SR**
Rata-rata capaian kinerja Program(%)																	**0.00%**	**0.00%**
Predikat kinerja																	**SR**	**SR**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat desa/ Kelurahan yang di berdayakan**	**100 %**	**883,000,000**	**37.5 %**	**320,858,000**	**100 %**	**312,884,300**	**53.05%**	**6,382,525**	**53.05 %**	**6,382,525**	**53.05%**	**34.45%**
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan**	**Persentase Koordinasi**	100 %	14,000,000	25.00 %	3,500,000	100 %	3,500,000	100.00%	3,500,000	100.00 %	3,500,000	100.00 %	100.00%

					Pemberdayaan Desa	**Kegiatan Pemberdayaan Desa**												
7	01	03	2:01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Frekwensi Pertemuan Musyawarah Perencanaan Desa	108	14,000,000	27	3,500,000	27	3,500,000	27	3,500,000	27	3,500,000	100.00 %	100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																	**100%**	**100%**
Predikat kinerja																	**ST**	**ST**
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	100 %	808,000,000	25.00 %	305,060,200	100 %	298,384,300	0.33 %	2,611,525	0.33%	2,611,525	0.33%	0.88%
7	01	03	2:02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	8,000,000	2	1,209,000	2	33,000,000	1	2,155,125	1	2,155,125	50.00%	6.53%
7	01	03	2:02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang di bangun	1200	359,520,000	300	111,780,000	300	128,652,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7	01	03	2:02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Frekwensi Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	440,480,000	5	192,071,200	5	136,732,300	-	456,400	-	456,400	0.00%	0.33%
Rata-rata capaian kinerja (%)																	**16.67%**	**2.29%**
Predikat kinerja																	**SR**	**SR**

7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		61,000,000	25.00 %	12,297,800	100.00 %	11,000,000	58.82%	271,000	58.82 %	271,000	58.82%	2.46%
7	01	03	2:03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Frekwensi Pertemuan Tim Penggerak PKK	4	54,000,000	1	11,297,800	1	10,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7	01	03	2:03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	200	7,000,000	50	1,000,000	50	1,000,000	30	271,000	30	271,000	60.00%	27.10%
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																	**30.00%**	**13.55%**
Predikat kinerja																	**SR**	**SR**
Rata-rata capaian kinerja Program(%)																	**48.89%**	**38.61%**
Predikat kinerja																	**SR**	**SR**
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Desa dan kelurahan**	**100 %**	**7,000,000**	**###**	**1,000,000**	**100 %**	**1,000,000**	**0.00 %**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	100 %	7,000,000	25.00 %	1,000,000	100 %	1,000,000	0.00 %	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian,TNI dan instansi vertikal di wil Kecamatan	Jumlah Rapat/Pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48	7,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%

																0.00%	**0.00%**
																SR	**SR**
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang di bina**	**100 %**	**21,000,000**	**25%**	**3,000,000**	**100 %**	**3,000,000**	**30.77%**	**813,000**	**30.77 %**	**813,000**	**30.77%**	**27.10%**
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100 %	21,000,000	25.00 %	3,000,000	100 %	3,000,000	30.77%	813,000	30.77 %	813,000	30.77%	27.10%
7	01	06	2:01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Frekwensi Rapat RanPerDes APBDesa	52	7,000,000	13	1,000,000	13	1,000,000	4	271,000	4	271,000	30.77%	27.10%
7	01	06	2:01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Frekwensi Pertemuan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	52	7,000,000	13	1,000,000	13	1,000,000	4	271,000	4	271,000	30.77%	27.10%
7	01	06	2:01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Desa yang menggunakan dana desa yang efisien dan Akuntabel	52	7,000,000	13	1,000,000	13	1,000,000	4	271,000	4	271,000	30.77%	27.10%
																30.77%	**27.10%**
																SR	**SR**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Galesong Utara

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Kecamatan Galesong Utara 2025 yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kecamatan Galesong Utara	5	14	32	5	14	38
TOTAL		**5**	**14**	**32**	**5**	**14**	**38**

Sumber : RKPD Pokok 2025, dan Monev 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 5, jumlah kegiatan 14, dan jumlah sub kegiatan 32, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 5, jumlah indikator kegiatan sebanyak 14, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 32.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan

dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Kabupaten Takalar Tahun 2025
Hingga Triwulan I

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
1	Kecamatan Galesong Utara	3,181,114,352	548,425,618	19,83%	17,24%
TOTAL		**3,181,114,352**	**548,425,618**	**19,83%**	**17,24%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Galesong Utara

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp. 548,425,598,-. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 17,24 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 19,83 persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada

Kantor Kecamatan Galesong Utara. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Kecamatan Galesong Utara dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Galesong Utara sebanyak 5 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 2 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program (realisasi >10-20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 2 program (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Kecamatan Galesong Utara dapat dijelaskan bahwa terdapat 14 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 7 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu (0 – 10) persen, sedang yang berada dalam kategori sedang (>10-20) Persen sebanyak 4 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 3 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Kecamatan Galesong Utara pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 32 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 17 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah yaitu (0 – 10) persen, sedangkan

yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 4 sub kegiatan yaitu (10 – 20) persen, dan 11 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10-20%	>20 %		0 - 10%	>10-20%	>20 %		0 - 10 %	>10-20%	>20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kecamatan Galesong Utara	5	2	1	2	14	7	4	3	32	17	4	11
TOTAL		**5**	**2**	**1**	**2**	**14**	**6**	**4**	**4**	**32**	**16**	**4**	**12**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Galesong Utara

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara 2025

Informasi tentang capaian Kinerja memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi Target Kinerja pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Galesong Utara. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk

perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian Kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada level program untuk Kecamatan Galesong Utara dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Galesong Utara sebanyak 5 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 2 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program (realisasi >10-20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 2 program (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Kecamatan Galesong Utara dapat dijelaskan bahwa terdapat 14 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 6 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu (0 – 10) persen, sedang yang berada dalam kategori sedang (>10-20) Persen sebanyak 4 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 4 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Kecamatan Galesong Utara pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 32 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 16 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah yaitu (0 – 10) persen, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 4 sub kegiatan yaitu (10 – 20) persen, dan 12 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang

diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10%	>10-20%	>20 %		0 - 10%	>10 - 20 %	>20 %		0 - 10%	>10-20%	>20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kecamatan Galesong Utara	5	2	1	2	14	6	4	4	32	16	4	12
TOTAL		**5**	**2**	**1**	**2**	**14**	**6**	**4**	**4**	**32**	**16**	**4**	**12**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Galesong Utara

Kantor Kecamatan Galesong Utara mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliput pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kelurahan, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain pengantar KTP, KK dan Surat

Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Utara tahun 2025 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Galesong Utara, harus dilakukan survey IKM. Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Galesong Utara. Kinerja pelayanan didukung oleh sistem yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Galesong Utara yang mengacu pada RPJMD Kabupaten dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada kantor Kecamatan Galesong Utara dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Triw.I	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	85	84	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	85	85	88	survey belum selesai	85	88	
2	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	80%	18%	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu	95%	95%	95%	94%	95%	95%	

3	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SPM)	85%	90%	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	85%	85%	85%	85%	85%	
4	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal (Non SPM)	100%	95%	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan	B (65,01)	B (65,01)	B (65,01)	Belum Dilakukan Penilaian	B (65,01)	B (65,01)	
5	Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%	90%	Tingkat literasi Digital ASN	80%	80%	85%	80%	80%	85%	
6	Angka Kriminalitas	50	45								
7	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,707	0,766								
8	Persentasi desa status berkembang menuju status desa maju	70%	90%								
9	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	80%	80%								

10	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Belum dilakukan Evaluasi Penilaian								
11	Nilai SAKIP pada kantor Kecamatan Galesong Utara	BB (70,01)	BB (70,30)								

Perubahan indikator kinerja perangkat daerah dipengaruhi oleh adanya perbedaan visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. Pada periode sebelumnya melalui Renstra 2023–2026, arah pembangunan Kecamatan Galesong Utara lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan desa, serta peningkatan pelayanan publik yang bersifat fundamental. Sehingga, indikator tahun 2024 masih berfokus pada capaian dasar seperti kepuasan masyarakat, ketertiban umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan pembangunan desa.

Namun, memasuki periode Renstra 2025–2029, arah kebijakan berubah mengikuti visi Bupati terpilih yaitu "Takalar Maju Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital". Visi ini mendorong transformasi pembangunan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis digital, dengan orientasi pada peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja tahun 2025 disusun lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi, seperti peningkatan kepuasan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan, penanganan aduan masyarakat, literasi digital ASN, serta penguatan akuntabilitas kinerja (SAKIP).

Dengan demikian, perubahan indikator dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran fokus pembangunan, dari orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas layanan publik, menuju pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Berdasarkan Tabel Pencapaian kinerja Kecamatan Galesong Utara pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Adapun penjelasannya yaitu :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan**

   Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian berada pada angka 84 poin dari target yang ditetapkan sebesar 85 poin. Capaian ini menggambarkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan sudah berjalan baik dan hampir mendekati target yang ditentukan. Penilaian ini diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat yang

melibatkan responden dari berbagai kelompok pengguna layanan, sehingga hasilnya mencerminkan persepsi masyarakat secara langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Meskipun secara umum sudah baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya pada aspek kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat dan kecepatan pelayanan. Perbaikan pada kedua aspek tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kepuasan masyarakat sehingga target IKM pada periode berikutnya dapat tercapai atau bahkan terlampaui

2. **Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban**

   Berdasarkan data perbandingan angka kriminal di Kecamatan Galesong Utara, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 233 kasus dan pada tahun 2024 menurun menjadi 192 kasus, atau terjadi penurunan sebesar 41 kasus. Jika dihitung dalam persentase, maka realisasi penurunan kriminalitas hanya mencapai sekitar 18%. Sementara itu, target penurunan kasus kriminal tahun 2024 ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaian tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren positif berupa penurunan kasus, namun hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap strategi pencegahan dan penanganan tindak kriminal yang selama ini dijalankan. Upaya sinergis antara aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, dan partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat agar di tahun mendatang penurunan angka kriminalitas dapat lebih signifikan dan mendekati target yang ditetapkan. Secara lebih rinci, hampir semua jenis kejahatan mengalami penurunan, dengan kasus KDRT dan tawuran menurun paling tajam, sementara pencurian meski masih mendominasi juga sedikit berkurang. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Galesong Utara. Meski demikian, perhatian khusus tetap diperlukan terhadap kasus pencurian yang masih menjadi tindak kriminal tertinggi.

3. .**Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

   Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 90%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85%.

Hal ini menandakan bahwa pelayanan dasar publik di Kecamatan Galesong Utara telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan tabel perhitungan, terlihat bahwa hampir seluruh jenis pelayanan telah mencapai tingkat kesesuaian tinggi dengan SPM. Pelayanan kesehatan mencapai 91%, pelayanan pendidikan 85%, pelayanan kependudukan 100%, pelayanan infrastruktur 90%, serta pelayanan sosial 84%. Dari total 639 permohonan pelayanan, sebanyak 568 telah dilaksanakan sesuai SPM, sehingga menghasilkan capaian rata-rata 90%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik, baik dalam hal ketepatan waktu, prosedur yang jelas, maupun kesesuaian hasil layanan dengan standar. Meski demikian, terdapat beberapa aspek seperti pelayanan sosial dan pendidikan yang masih berada sedikit di bawah 90%, sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan pada periode berikutnya.

4. **Persentase Pelayanan Sesuai Non Standar Pelayanan Minimal (Non SPM)**

   Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Non SPM sebesar 95%, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelayanan non standar telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat deviasi kecil akibat keterbatasan sarana maupun sumber daya. Berdasarkan data perhitungan, dari total 460 layanan yang ditindaklanjuti, sebanyak 438 layanan berhasil diselesaikan sesuai Non SPM, sehingga capaian rata-rata adalah 95%. Jenis layanan yang mencapai tingkat penyelesaian 100% meliputi Surat Keterangan Dispensasi Nikah, Surat Izin Penelitian, Surat Rekomendasi Subsidi Listrik, dan Surat Pengantar Keterangan Pindah. Sementara itu, terdapat layanan dengan persentase lebih rendah, yaitu Surat Keterangan Permohonan Kredit Bank (94%), Surat Pengantar SPPT (93%), serta Surat Rekomendasi Izin Kapal (96%). Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Non SPM di Kecamatan Galesong Utara telah terlaksana dengan baik, namun masih memerlukan optimalisasi sistem pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana pendukung agar deviasi kecil tersebut dapat diminimalisir, sehingga target 100% dapat tercapai di tahun berikutnya.

5. .**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik**

Pada tahun 2024, capaian persentase sarana dan prasarana pelayanan umum dalam kondisi baik di Kecamatan Galesong Utara mencapai 90%, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana prasarana sudah tersedia dan berfungsi dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan untuk mencapai standar optimal. Berdasarkan tabel perhitungan, dari total 59 sarana prasarana yang dibutuhkan, terdapat 53 yang tersedia. Hampir seluruh jenis prasarana seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah (SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA), dan pasar telah memenuhi standar ketersediaan sebesar 100%. Namun, pada kategori kantor pelayanan hanya tersedia 8 dari 14 unit ideal, sehingga capaian persentasenya baru 73%. Kekurangan ini menjadi faktor utama penyebab belum tercapainya target 100%. Dengan demikian, meskipun capaian 90% menunjukkan pelayanan publik sudah ditunjang sarana prasarana yang cukup memadai, tetap diperlukan penambahan dan perbaikan kantor pelayanan agar kualitas layanan masyarakat dapat lebih optimal dan sesuai dengan target.

6. **Angka Kriminalitas**

Pada tahun 2024, angka kriminalitas di Kecamatan Galesong Utara tercatat sebesar 45 kasus per 10.000 penduduk, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 50 kasus per 10.000 penduduk. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di wilayah Kecamatan Galesong Utara relatif terkendali dan kondisi keamanan masyarakat tergolong cukup kondusif. Berdasarkan data tabel tindak kriminal, jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2024 sebanyak 192 kasus dengan rincian: pencurian (76 kasus), perampokan (18 kasus), penganiayaan (32 kasus), narkotika (25 kasus), kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (14 kasus), tawuran (6 kasus), dan penipuan (21 kasus). Dengan jumlah penduduk sebesar 42.271 jiwa, hasil perhitungan angka kriminalitas adalah:

192 /42.271 X 10.000=45 kasus per tahun

Hasil ini membuktikan bahwa meskipun masih terdapat berbagai bentuk tindak kriminal, intensitasnya lebih rendah dibandingkan target, yang berarti efektivitas upaya aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan cukup baik.

Namun demikian, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan patroli keamanan, penguatan koordinasi aparat, serta program pembinaan masyarakat untuk menekan angka kriminalitas lebih rendah lagi di tahun-tahun mendatang.

7. Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan (IDM)

Pada tahun 2024, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Galesong Utara mencapai 0,766, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 0,707. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian desa di wilayah Kecamatan Galesong Utara yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Indeks Desa Membangun merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa melalui tiga dimensi utama, yaitu Indeks Sosial (pendidikan, kesehatan, dan modal sosial), Indeks Ekonomi (keragaman produksi desa, akses ke pusat perdagangan, serta keterhubungan infrastruktur), dan Indeks Ekologi/Lingkungan (kualitas lingkungan dan mitigasi bencana). Capaian 0,766 mengindikasikan bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Galesong Utara telah bergerak menuju kategori desa maju bahkan mendekati desa mandiri. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses infrastruktur dasar, serta dukungan pemerintah dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pembangunan desa di Kecamatan Galesong Utara berjalan efektif dan mampu meningkatkan kemandirian desa di atas target yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan langkah berkelanjutan berupa penguatan perekonomian lokal, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar seluruh desa dapat mencapai status desa mandiri secara menyeluruh.

8. Persentase Desa Berkembang Menuju Desa Maju

Pada tahun 2024, persentase desa berkembang yang berhasil meningkat statusnya menjadi desa maju di Kecamatan Galesong Utara mencapai 90%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Capaian ini menunjukkan bahwa program pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas desa berjalan efektif sehingga mampu mempercepat proses peningkatan status desa. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan yang berbasis pada Indeks Desa Membangun (IDM), yang menilai desa dari tiga

dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Dengan semakin banyaknya desa berkembang yang naik kelas menuju desa maju, maka kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Galesong Utara juga semakin meningkat, baik dari sisi akses layanan dasar, peluang ekonomi lokal, maupun pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hasil ini mencerminkan bahwa arah kebijakan pembangunan desa di Kecamatan Galesong Utara sudah tepat sasaran dan berhasil mendorong desa menjadi lebih mandiri. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga konsistensi pembinaan, memperkuat kelembagaan desa, serta meningkatkan sinergi antar-pemangku kepentingan agar seluruh desa dapat mencapai status desa maju bahkan desa mandiri.

9. **Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat**

   Pada tahun 2024, persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Galesong Utara mencapai 80%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan stabilitas dan konsistensi peran lembaga masyarakat dalam mendukung kegiatan pemberdayaan, meskipun masih terdapat beberapa lembaga seperti Bumdes dan Forum Pemuda yang tingkat keaktifannya relatif rendah dibandingkan lembaga lain. Berdasarkan tabel, jumlah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Galesong Utara tahun 2024 sebanyak 111 lembaga, dengan 89 lembaga yang aktif. Perhitungannya yaitu:

   89/111x100% = 80%

   Capaian ini sesuai dengan target 80%, menandakan peran lembaga kemasyarakatan cukup konsisten dalam pemberdayaan masyarakat. Tingkat keaktifan tertinggi ditunjukkan oleh LPM, BPD, dan PKK yang mencapai 100%, sementara yang terendah terdapat pada Bumdes (38%) dan Forum Pemuda (63%).

10. **Indeks Reformasi Birokrasi**

    Target yang ditetapkan adalah predikat BB, namun pada tahun 2024 realisasi belum dilakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan dalam proses penilaian agar capaian reformasi birokrasi dapat terukur dengan jelas. Evaluasi yang tepat waktu penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola

pemerintahan di Kecamatan Galesong Utara.

11. Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong Utara

Target nilai BB (70,01) dan realisasi mencapai BB (70,30). Capaian ini berhasil melampaui target yang ditetapkan, menandakan adanya peningkatan kualitas dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja di Kecamatan Galesong Utara. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar, yang sekaligus menunjukkan komitmen kecamatan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 (Triwulan I) di atas, maka dapat di jelaskan bahwa :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan**

   Pada tahun 2025 ditetapkan target IKM sebesar 85. Namun, pada Triwulan I, realisasi capaian belum tersedia karena proses survei kepuasan masyarakat masih berlangsung. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian survei agar dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas layanan.

2. **Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Selesai Tepat Waktu.**

   Target pelayanan tepat waktu pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 95%, sementara hasil realisasi pada triwulan I mencapai 94%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Galesong Utara telah berjalan cukup baik dan hampir memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan tabel pelayanan non-standar pelayanan minimal (Non SPM) tahun 2024, dari 189 layanan yang diterima, terdapat 177 layanan yang berhasil ditindaklanjuti sesuai waktu penyelesaian, sehingga persentasenya mencapai 94%. Beberapa layanan telah mencapai tingkat ketepatan waktu maksimal, seperti Surat Keterangan Dispensasi Nikah, Surat Pengantar SPPT, Surat Izin Penelitian, dan Surat Pengantar Keterangan Pindah yang seluruhnya selesai tepat waktu (100%). Namun, terdapat layanan yang masih di bawah target, seperti Surat Keterangan Permohonan Kredit Bank (40%) dan Surat Rekomendasi Izin Kapal (50%), serta layanan Kewarisan (92%) yang meskipun tinggi, tetap belum mencapai standar penuh.

3. **Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**

   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%, sementara realisasi triwulan I mencapai 85%. Capaian ini melampaui target yang ditentukan, menandakan adanya peningkatan responsivitas aparat Kepolisian di kecamatan dalam menangani aduan masyarakat. Berdasarkan data tindak lanjut aduan kriminal di Kecamatan Galesong Utara tahun 2024, dari 46 aduan yang diterima, sebanyak 39 aduan berhasil ditindaklanjuti, dengan tingkat penyelesaian sebesar 85%. Beberapa jenis aduan bahkan mencapai tindak lanjut penuh (100%), seperti kasus perampokan, penganiayaan, narkotika, tawuran, dan penipuan. Sementara itu, aduan kasus pencurian (67%) dan KDRT (80%) masih menunjukkan adanya kendala dalam penanganan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan kecamatan semakin meningkat, karena mayoritas aduan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Meski demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penanganan aduan pencurian dan KDRT, agar capaian di masa mendatang semakin optimal.

4. **Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan**

   Target yang ditetapkan adalah memperoleh nilai B (65,01). Pada Triwulan I tahun 2025, penilaian SAKIP oleh Inspektorat belum dilaksanakan sehingga belum terdapat data realisasi. Oleh karena itu, Kecamatan perlu mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar saat penilaian dilakukan hasilnya dapat sesuai target minimal predikat B.

5. **Tingkat Literasi Digital ASN**

   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%, dan realisasi pada triwulan I juga telah mencapai 80%, sehingga capaian ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, dari 25 ASN di Kecamatan Galesong Utara, sebanyak 20 ASN mampu mengoperasikan komputer, menghasilkan tingkat literasi digital sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik. Namun, peningkatan kapasitas masih tetap diperlukan agar literasi digital ASN semakin optimal dalam menunjang

efektivitas, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GALESONG UTARA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.3 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

- **Prioritas Nasional Tahun 2025**



3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara

3.2.1 Tujuan

Rumusan tujuan Renja Kecamatan Galesong Utara, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah : “Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan”.

3.2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara;

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja, Isu Strategis dan Rancangan Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029, maka Tujuan dan Sasaran Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III-1

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Galesong Utara 2005-2029

RENJA POKOK TAHUN 2025 (RENSTRA 2023-2026)			PERUBAHAN RENJA POKOK TAHUN 2025 (RENSTRA 2025-2029)		
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	90	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	85
	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	75%	S1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S1.1. Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu	85%
Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM)	90%		S1.2. Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	80%
	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal (Non SPM	100%	S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	S2.1. Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan	B (65,01)

Sasaran 1.2 : Meningkatnya koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%		S2.2. Tingkat literasi Digital ASN	80%
Sasaran 1.3 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	40			
Tujuan 2: Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,707			
Sasaran 2.1 : Meningkatnya status desa	Persentasi desa status berkembang menuju status desa maju	100%			
Sasaran 2.2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	90%			
Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelolah pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,50)			

Sasaran 3.1 : Meningkatnya tata kelolah kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	BB (71,50)			

Sumber : Renstra Kec. Galut Tahun 2023-2026 dan Renstra Kec. Galut Tahun 2025-2029; diolah

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GALESONG UTARA

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Galesong Utara yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
	KECAMATAN			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**2,838,254,752**
		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**2,579,300**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	579,300

			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	0
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA –SKPD	0
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**2,633,176,052**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,632,176,052
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	0
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**271,000**
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	271,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**35,224,400**

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,079,400
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	990,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24,155,000.00
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**14,488,000**
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,488,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**130,554,000**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0
				4,554,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126,000,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**21,962,000**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19,648,000.00
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	974,000

			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	1,340,000
2	**PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**271,000**
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**271,000**
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	271,000
		Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		-
			Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**290,642,400**
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**3,500,000**

			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3,500,000
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**281,041,700**
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15,588,100
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	145,880,400.00
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119,573,200.00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**6,100,700**
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5,829,700
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	271,000
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**271,000**
		Kegatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**271,000**

			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	271,000
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PNGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1,048,000**
		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**1,048,000**
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	506,000
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	271,000
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	271,000
				3,130,487,152

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 dengan total pagu **Rp3.130.487.152 (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dwlapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah)** dapat dilihat pada tabel dibawah in

TABEL IV-1

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TAKALAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KEC. GALESONG UTARA							**3,115,859,602.00**	**3,157,625,585.00**	**3,130,487,152.00**	**14,627,550.00**							**4,264,002,900.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3,115,859,602.00**	**3,157,625,585.00**	**3,130,487,152.00**	**14,627,550.00**							**4,264,002,900.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3,115,859,602.00**	**3,157,625,585.00**	**3,130,487,152.00**	**14,627,550.00**							**4,264,002,900.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**2,804,262,202.00**	**2,838,741,285.00**	**2,838,254,752.00**	**1,233,240,698.00**							**4,037,502,900.00**	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	6,000,000.00	6,000,000.00	2,579,300.00	-3,420,700.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Staf Kantor KEC. GALESONG UTARA		6,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Bontoleband	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA

															Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	579,300.00	-420,700.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara,	DANA ALOKASI UMU	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA

			Perubahan RKA-SKPD										Semua Kel/ Desa	M (DAU)		Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA LOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA

															Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik*				100 %	100 %	2,548,834,202.00	2,610,687,285.00	2,633,176,052.00	84,341,850.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Staf Kantor KEC. GALESONG UTARA		3,761,674,900.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				476 Orang/ bulan	476 Orang/ bulan	2,546,834,202.00	2,608,687,285.00	2,632,176,052.00	85,341,850.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/ Des	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA AL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3,759,674,900.00	KEC. GALESONG UTARA

												a	OKASIUMUM (DAU)		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase administrasi barang milik daerah yang baik*				100 %	100 %	2,000,000.00	2,000,000.00	271,000.00	-1,729,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Staf Kantor KEC. GALESONG UTARA		2,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA

	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	1,000,000.00	271,000.00	-729,000.00	Kab. Takalar, Galeso	DANA ALOKASI UM	-	6. Perbaikan Tatakelola			1,000,000.00	KECAMATAN GALESON

			Laporan *Barang Milik Daerah pada* *SKPD*										ng Utara, Semua Kel/ Desa	UM (DAU)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				G UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan* *administrasi umum perangkat* *daerah*				100 %	100 %	51,069,000.00	53,050,000.00	35,224,400.00	-15,844,600.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.	Seluruh Staf Kantor Kecamatan Galesong Utara		68,430,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA

																Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				160 Paket	160 Paket	10,079,000.00	10,155,000.00	10,079,400.00	400.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7,360,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang *Cetakan dan Penggandaan* *yang Disediakan*				3000 Paket	3000 Paket	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			570,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan *Penyelenggaraan Rapat*				340 Laporan	340 Laporan	40,000,000.00	41,905,000.00	24,155,000.00	-15,845,000.00	Kab. Takalar, Galeso	DANA ALOKASI UM	-	6. Perbaikan Tatakelola			60,500,000.00	KECAMATAN GALESON

			Koordinasi dan Konsultasi *SKPD*										ng Utara, Semua Kel/ Desa	UM (DAU)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				G UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan* *barang milik daerah* *penunjang urusan* *pemerintah daerah*				100 %	100 %	16,469,000.00	14,488,000.00	14,488,000.00	-1,981,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.	Seluruh Staf Kantor Kecamatan Galesong Utara		10,000,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA

																Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16,469,000.00	14,488,000.00	14,488,000.00	-1,981,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang* *urusan pemerintahan daerah* *yang disediakan*				100 %	100 %	157,928,000.00	130,554,000.00	130,554,000.00	-27,374,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Staf Kantor Kecamatan Galesong Utara		155,528,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan *Jasa Komunikasi, Sumber*				24 Laporan	24 Laporan	31,928,000.00	4,554,000.00	4,554,000.00	-27,374,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara,	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	6. Perbaikan Tatakelola			31,928,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA

			Daya Air dan Listrik yang *Disediakan*										Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan *Jasa Pelayanan Umum* *Kantor yang Disediakan*				25 Laporan	25 Laporan	126,000,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			123,600,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA

														DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik* *daerah penunjang urusan* *pemerintahan daerah yang* *dipelihara*				100 %	100 %	21,962,000.00	21,962,000.00	21,962,000.00	0.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan	Seluruh Staf Kantor Kecamatan Galeson g Utara		33,870,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA	

															dan Pelayanan Publik					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	19,648,000.00	19,648,000.00	19,648,000.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			28,140,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan				3 Unit	3 Unit	974,000.00	974,000.00	974,000.00	0.00	Kab. Tak	DANA AL	-	6. Perbaikan			5,000,000.00	KECAMATAN

			Bangunan Lainnya yang *Dipelihara/Direhabilitasi*									alar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	OKASI UMUM (DAU)		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				GALESONG UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan *Prasarana Gedung Kantor* *atau Bangunan*				5 Unit	5 Unit	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerinta			730,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA

			Lainnya yang *Dipelihara/Direhabilitasi*										Kel/Desa			handan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik oleh Pemerintah**				**100 %**	**100 %**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**271,000.00**	**0.00**							**2,000,000.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase efektifitas* *kegiatan pemerintahan di* *tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1,000,000.00	1,000,000.00	271,000.00	-729,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pem	asyarakat		1,000,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA

															erintahan dan Pelayanan Publik					
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen *Peningkatan Efektifitas* *Kegiatan Pemerintahan di* *Tingkat Kecamatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	271,000.00	-729,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan	*Cakupan fasilitasi*				95 %	95 %	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00			-	6. Perbaikan	asyarakat		1,000,000.00	KECAMATAN

		Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*pencapaian standar* *pelayanan (SPM) di* *Kecamatan*													Tatak elola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				GALESONG UTARA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi *Percepatan Pencapaian* *Standar Pelayanan Minimal* *di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publi			1,000,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA

																k 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan**				**95 %**	**95 %**	**305,597,400.00**	**312,884,300.00**	**290,642,400.00**	**-85,097,400.00**							**220,500,000.00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persemtase keterlibatan* *masyarakat dalam proses* *perencanaan di desa*				100 %	100 %	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publi	asyarakat		3,500,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA

																k				
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				27 Lembaga Kemasyarakatan	27 Lembaga Kemasyarakatan	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA LOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3,500,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan*				100 %	100 %	291,097,400.00	298,384,300.00	281,041,700.00	-10,055,700.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pem	as yarakat		202,000,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA

																erintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	33,000,000.00	33,000,000.00	15,588,100.00	-17,411,900.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Bontoleband	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pem			2,000,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA

															erintahan dan Pelayanan Publik				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			300 Unit	2 Unit	111,780,000.00	128,652,000.00	145,880,400.00	34,100,400.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Bontolebang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			89,880,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan				5 Pok	5 Pok	146,317,400.00	136,732,300.00	119,573,200.00	-26,744,200.00	Kab.	DAU	-	6. Perb			110,120,000.00	KECAMA

			Ormas *yang Melaksanakan* *Pemberdayaan Masyarakat* *di Kelurahan*				mas / Ormas	mas / Ormas					Takalar, Galesong Utara, Bontolebang	TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		aikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				TAN GALESONG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang*				90 %	90 %	11,000,000.00	11,000,000.00	6,100,700.00	-4,899,300.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerinta	asyarakat		15,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA

																han dan Pelayanan Publik				
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000.00	10,000,000.00	5,829,700.00	-4,170,300.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				50 Laporan	50 Laporan	1,000,000.00	1,000,000.00	271,000.00	-729,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara,	DANA BAGI HASIL (DBH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA

												Semua Kel/ Desa	) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa dan Kelurahan Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan**				**85 40 % Kasus**	**85 40 % Kasus**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**271,000.00**	**0.00**							**1,000,000.00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Sinergitas Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan*				100 %	100 %	1,000,000.00	1,000,000.00	271,000.00	-729,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelay	asyarakat		1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA

																anan Publik				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1,000,000.00	1,000,000.00	271,000.00	-729,000.00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**1,048,000.00**	**0.00**							**3,000,000.00**	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*				100 %	100 %	3,000,000.00	3,000,000.00	1,048,000.00	-1,952,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	asyarakat		3,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	506,000.00	-494,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA

															Pelayanan Publik				
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	271,000.00	-729,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna				13 Dokumen	13 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	271,000.00	-729,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara,	DANA ALOKASI UMU	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA

			an Aset Desa										Semua Kel/ Desa	M (DAU)		Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	J U M L A H							**3,115,859,602.00**	**3,157,625,585.00**	**3,130,487,152.00**	**-20,817,255,718.00**							**4,264,002,900.00**	

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
4. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;

5. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Takalar, 10 Juni 2025

Camat Galesong Utara,

SUMARLIN, S.Pd.,M.Pd
Pembina
19880622 201101 1 009



2025

PERUBAHAN RENJA

KECAMATAN
POLONGBANGKENG SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing–masing seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan.

Kami menyadari, Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dalam melaksanakan Tugas Sebagai Abdi Negara.

Takalar, 12 Juni 2025

Camat Polongbangkeng Selatan,

SYARIEF H, SE. M. AP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19800318 200604 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-4

1.3. MaksuddanTujuan I-5

1.4. SistematikaPenulisan I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC. POLONGBANGKENG SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **II-7**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Polongbangkeng Selatan Sampai dengan Triwulan I II-7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kec. Polongbangkeng Selatan II-22

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEC.POLONGBANGKENG SELATAN....III-30

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional……..... III-30

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja KecamatanPolongbangkeng Selatan…… III-

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KEC. POLONGBANGKENG SELATAN……IV-37

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program PrioritasPembangunan Daerah……IV-38

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kec. Polongbangkeng Selatan Tahun 2025..... IV-39

BAB V PENUTUP..... V-51

5.1 Catatan Penting ……IV-38

5.2 Kaidah Pelaksanaan..... IV-38

5.3 Rencana Tindak Lanjut..... IV-38

DAFTAR TABEL

TABEL II-1 Formulir Evaluasi Hasil Renja Kabupaten Takalar..... I-8

TABEL II-2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025..... II-17

TABEL II-3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I..... II-18

TABEL II-4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 ..... II-20

TABEL II-5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 ..... II-22

TABEL II-6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kec. Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar..... II-24

TABEL III-1 Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Takalar 2025..... III-30

TABEL III-2 Tujuan dan Sasaran Renja Kec. Polongbangkeng Selatan..... III-32

TABEL III-3 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Kec.Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025..... III-37

TABEL III-4 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Tahun 2025..... III-45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Polongbangkeng Selatan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Polongbangkeng Selatan Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Polongbangkeng Selatan Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya

Perubahan Renja Kecamatan Polongbangkeng Selatan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

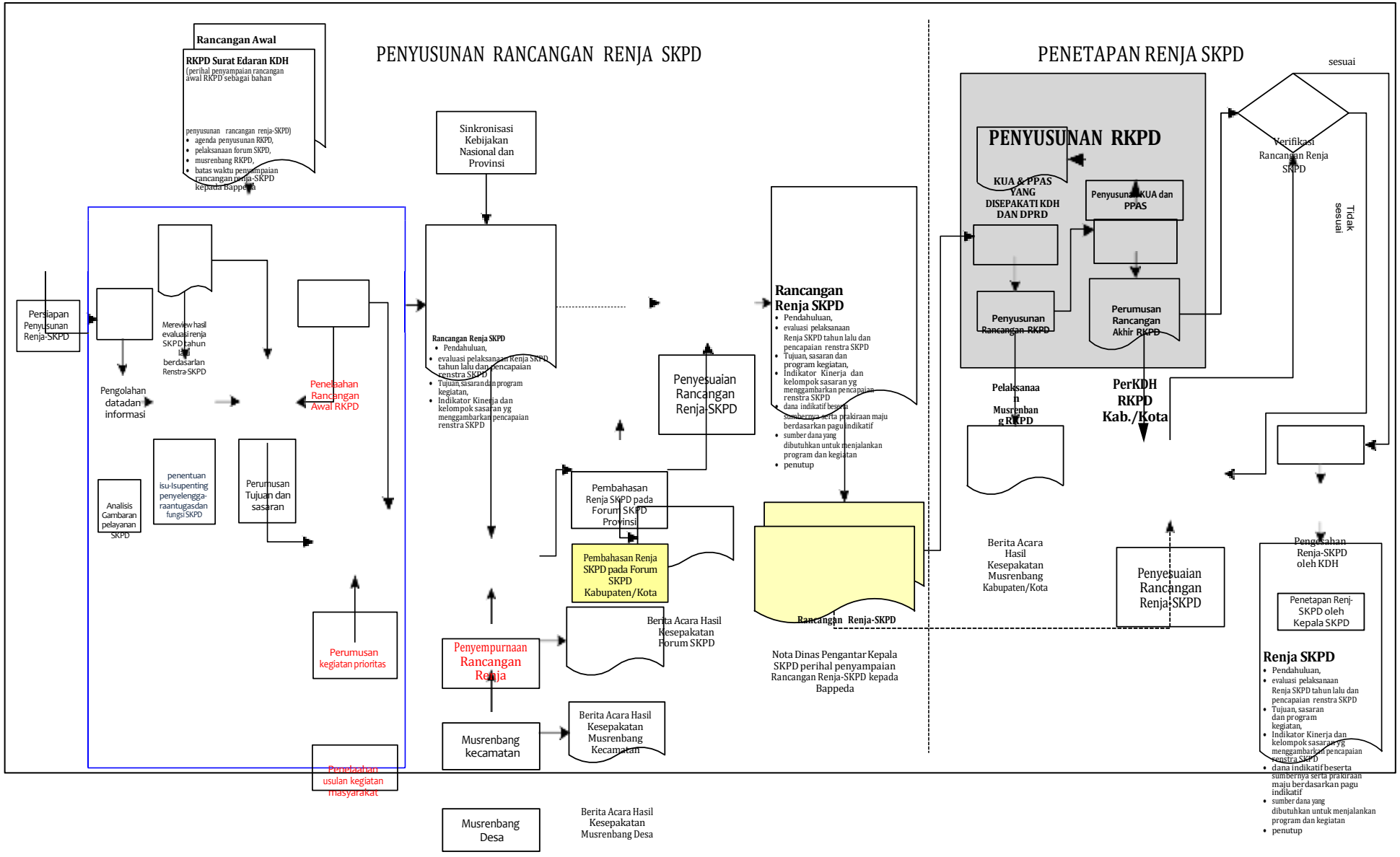
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Awal
RKPD Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan
penyusunan rancangan renja-SKPD)
agenda penyusunan RKPD,
pelaksanaan forum SKPD,
musrenbang RKPD,
batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD
Pengolahan datadan informasi
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-Isupenting penyelengga-raantugasdan fungsi SKPD
Perumusan Tujuan dan sasaran
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasarandan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Penyempurnaan Rancangan Renja
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
sesuai
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
Tidak sesuai
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
Penetapan Renj-SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang sesuai dengan Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan perundangan lainnya yang mengatur Standar Operasional Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang diacu dalam perencanaan dan penganggaran di Badan/Dinas/Kecamatan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentangKecamatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan,Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

- Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah sebagai berikut

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi Perubahan APBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

- Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematik Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I Tahun 2025, memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I (Tahun 2025) sesuai dengan renstra dan tupoksi OPD dan Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Polongbangkeng Selatan, memuat tentang Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Memuat tentang Daftar Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN S/D TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Polongbangkeng Selatan Sampai dengan Triwulan I

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Kecamatan Polongbangkeng Selatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Polongbangkeng Selatan sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Periode Pelaksanaan 2025.

TABEL II-I
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6		7		9		10 = 9/6 x 100%		11	12
		7					UNSUR KEWILAYAHAN											
		7	01				KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN		100,0%	6.922.588.783	23,97%	1.128.331.164	24,0%	1.128.331.164	23,97%	16,30%		
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100,00%	5.711.030.230	19,83%	1.127.841.164	19,83%	1.127.841.164	19,83%	19,75%	Kec. Polongbangkeng Selatan	
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	100,00%	8.219.000	40,00%	1.584.000	40,00%	1.584.000	40,00%	19,27%		
	3.6. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang disusun	3	1.584.000	1	1.584.000	1	1.584.000	33,33%	100,00%		
		7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.500.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%		
		7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Pokok Perangkat Daerah yang disusun	1	1.000.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%		
		7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan/Parsial Perangkat Daerah yang disusun	1	500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1.135.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%		
		7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monev Triwulanan Yang disusun	2	1.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							47,62%	14,29%		
								Predikat kinerja							SB	SB		
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	100,00%	4.863.879.430	14,99%	966.161.164	14,99%	966.161.164	14,99%	19,86%		
	3.6. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji (54 orang)	700	3.670.904.438	196	966.161.164	196	966.161.164	28,00%	26,32%		
								Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	600	1.179.237.492	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
								Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan obyektif lainnya (18 orang)	24	10.320.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dan Jenis Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12	941.100	3	-	3	-	25,00%	0,00%		
		7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Akuntasi SKPD	4	800.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%		
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun/Neraca Perangkat Daerah yang disusun	1	1.676.400	1	-	1	-	100,00%	0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							29,67%	4,39%		
								Predikat kinerja							SB	SB		

		7	01	01	02.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	100%	1.443.800	0,00%	-	0%	-	0,00%	0,00%	
	3.6. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Polonghangkeng Selatan	7	01	01	02.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (RKBMD)	1	786.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		7	01	01	02.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah	4	657.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
										Rata-rata capaian kinerja (%)					**0,00%**	**0,00%**	
										Predikat kinerja					SB	SB	
		7	01	01	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	1.515.000	25,00%	100.000	25%	100.000	25,00%	6,60%	
	3.6. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Polonghangkeng Selatan	7	01	01	02.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	12	1.515.000	3	100.000	3	100.000	25,00%	6,60%	
										Rata-rata capaian kinerja (%)					**25,00%**	**6,60%**	
										Predikat kinerja					SB	SB	
		7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	100%	253.073.000	13,64%	37.226.000	13,64%	37.226.000	13,64%	14,71%	
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6	71.573.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	3.6. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Polonghangkeng Selatan	7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	12	143.643.000	2	29.626.000	2	29.626.000	16,67%	20,62%	
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	37.857.000	1	7.600.000	1	7.600.000	25,00%	20,08%	
										Rata-rata capaian kinerja (%)					**13,89%**	**13,57%**	
										Predikat kinerja					SB	SB	
		7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**	100%	546.970.000	17%	113.800.000	17%	113.800.000	17%	21%	
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan	12	15.920.000	3	600.000	3	600.000	25,00%	3,77%	
	3.6. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Polonghangkeng Selatan	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendidikan	420	118.800.000	70	21.000.000	70	21.000.000	16,67%	17,68%	
								Jumlah Tenaga Administrasi	1.008	377.600.000	168	83.000.000	168	83.000.000	16,67%	21,98%	
								Jumlah Tenaga Kebersihan	84	13.650.000	14	3.600.000	14	3.600.000	16,67%	26,37%	
								Jasa Tenaga Keamanan dan Supir	96	21.000.000	14	5.600.000	14	5.600.000	14,58%	26,67%	
										Rata-rata capaian kinerja (%)					**17,92%**	**19,29%**	
										Predikat kinerja					SB	SB	
		7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah**	100%	35.930.000	28,57%	8.970.000	29%	8.970.000	28,57%	24,97%	
	3.6. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Polonghangkeng Selatan	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	35.930.000	2	8.970.000	2	8.970.000	28,57%	24,97%	
										Rata-rata capaian kinerja (%)					**28,57%**	**24,97%**	
										Predikat kinerja					SB	SB	
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)					**23,24%**	**11,07%**	
										Predikat Kinerja Program					SB	SB	

Faktor pendorong pencapaian kinerja: Adanya Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran, serta Komunikasi yang efektif dan transparan antar stakeholder.

Faktor penghambat: : Faktor penghambat pencapaian kinerja dapat berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal.

Faktor penghambat: Lambatnya serapan Anggaran karena dibatasi oleh Angkas.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang di berdayakan**	**100%**	**1.208.214.553**	**50%**	-	**50%**	-	**50,00%**	**0,00%**	**Kec. Polongbangkeng Selatan**	
		7	01	03	02.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan Desa**	100%	1.167.700	100,00%	-	100%	-	100%	0%		
	2.5. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan	7	01	03	02.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Frekwensi Pertemuan Musyawarah Perencanaan Desa	1	880.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%		
		7	01	03	02.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	287.700	1	-	1	-	100,00%	0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							**100,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							ST	SR		
		7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan**	100%	1.207.046.853	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
	2.5. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah kecamatan dan kelurahan	1	990.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang telah dibangun	6	798.206.853	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Poknas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	407.850.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							SR	SR		
								Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)							**50,00%**	**0,00%**		
								Predikat Kinerja Program							SR	SR		
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Adanya Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran, serta Komunikasi yang efektif dan transparan antar stakeholder.																		
Faktor penghambat: : Faktor penghambat pencapaian kinerja dapat berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal.																		
Faktor penghambat: Lambatnya serapan Anggaran karena dibatasi oleh Angkas																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																		
		7	**01**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Angka kriminalitas**	**100%**	**1.019.000**	**25,00%**	-	**25%**	-	**25%**	**0%**	**Kec. Polongbangkeng Selatan**	
		7	01	4	02.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase sinergisitas kepolisian negara , Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di kecamatan**	100%	1.019.000	25,00%	-	25%	-	25%	0%		
	1.3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	7	01	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Frekwensi rapat/ pertemuan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4	544.900	1	-	1	-	25,00%	0,00%		
		7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	4	474.100	1	-	1	-	25,00%	0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							**25,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							SR	SR		
								Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)							**25,00%**	**0,00%**		
								Predikat Kinerja Program							SR	SR		
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Adanya Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran, serta Komunikasi yang efektif dan transparan antar stakeholder.																		
Faktor penghambat: : Faktor penghambat pencapaian kinerja dapat berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal.																		
Faktor penghambat: Lambatnya serapan Anggaran karena dibatasi oleh Angkas																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																		

		7	1	5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**825.000**	**0,00%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**0%**	**Kec. Polonghangkeng Selatan**	
		7	1	5	02.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100%	825.000	0,00%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
	1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	7	1	5	02.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20	825.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja										
								Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)							**12,50%**	**0,00%**		
								Predikat Kinerja Program										
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Adanya Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran, serta Komunikasi yang efektif dan transparan antar stakeholder.																		
Faktor penghambat: : Faktor penghambat pencapaian kinerja dapat berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal.																		
Faktor penghambat: Lambatnya serapan Anggaran karena dibatasi oleh Angkas.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																		
		7	**1**	**6**			**ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase sistem pemerintahan desa yang baik**	**100%**	**1.500.000**	**25,00%**	**490.000**	**25%**	**490.000**	**25%**	**33%**	**Kec. Polonghangkeng Selatan**	
		7	1	6	02.01		**Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persentase administarsi tata pemerintahan desa yang sesuai standar**	100%	1.500.000	25,00%	490.000	25,00%	490.000	25,00%	32,67%		
	2.4. Meningkatnya Status Desa	7	1	6	02.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Frekwensi rapat penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	500.000	1	390.000	1	390.000	25,00%	78,00%		
		7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Frekwensi pertemuan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	4	500.000	1	100.000	1	100.000	25,00%	20,00%		
		7	1	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	500.000	0	-	0	-	25,00%	0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)							**25,00%**	**32,67%**		
								Predikat kinerja										
								Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)							**25,00%**	**32,67%**		
								Predikat Kinerja Program										
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Adanya Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran, serta Komunikasi yang efektif dan transparan antar stakeholder.																		
Faktor penghambat: : Faktor penghambat pencapaian kinerja dapat berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal.																		
Faktor penghambat: Lambatnya serapan Anggaran karena dibatasi oleh Angkas.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																		
								Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)							**27,15%**	**8,91%**		
								Predikat Kinerja Program										

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Polongbangkeng Selatan

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Kec. Polongbangkeng Selatan 2025 yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kgiatan yang tertuang dalam APBD 2025.

APBD 2025							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Prog.	Jumlah Keg	Jumlah Sub Keg.	Jumlah Indikator		
					Prog.	Keg.	Sub Keg.
1	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	5	12	31	5	12	36
TOTAL		**5**	**12**	**31**	**5**	**12**	**36**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Polongbangkeng Selatan

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Program sebanyak 5, jumlah kegiatan 12, dan jumlah sub kegiatan 31, Sedangkan jumlah Indikator program sebanyak 5, jumlah indikator kegiatan sebanyak 12, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 36Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD hingga Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Kinerja	Keu
1	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	6.922.588.783,-	1.128.331.164,-	23,97%	16,30%
TOTAL		**6.922.588.783,-**	**1.128.331.164,-**	**23,97%**	**16,30%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Polongbangkeng Selatan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I sebesar **Rp. 1.128.331.164,-**. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar **16,30%** dengan capaian Kinerja sebesar **23,97%**.

2.1.1.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Polongbangkeng Selatan Tahun 2025.

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0%–10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari 10%-20% dan

kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20% didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 25%, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 25% dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pendanaan pada level program untuk Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan sebanyak 5 (Lima) Program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 4 Program (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 Program (realisasi >20-43 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 0 Program (realisasi diatas 43 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 (Dua Belas) Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 9 Kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu (0 – 10) persen, sedang yang berada dalam kategori sedang (10-20) Persen sebanyak 3 Kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 25 persen sebanyak 0 Kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian pendanaan pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 23 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 6 sub kegiatan, dan 2 Sub Kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi

pendanaan lebih dari 25 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Keg. berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20 %		0 - 10 %	>10 – 20 %	> 20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	Kec. Polsel	5	3	1	1	12	6	3	3	31	23	2	6
TOTAL		**5**	**3**	**1**	**1**	**12**	**6**	**3**	**3**	**31**	**23**	**2**	**6**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Polongbangkeng Selatan

4. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pendanaan pada level program untuk Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan sebanyak 5 (Lima) Program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 3 Program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 Program (realisasi >10-20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 1 Program (realisasi diatas 20 persen).

5. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian Kinerja pada level kegiatan pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 (Dua Belas) Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada

Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 6 Kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu (0 – 10) persen, sedang yang berada dalam kategori sedang (10-20) Persen sebanyak 3 Kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 3 Kegiatan.

6. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian pendanaan pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 10 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 2 sub kegiatan, dan 19 Sub Kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Keg. berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20 %		0 - 10 %	>10 – 20 %	> 20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	Kec. Polsel	5	1	1	3	12	3	3	6	31	10	2	19
TOTAL		**5**	**1**	**1**	**3**	**12**	**3**	**3**	**6**	**31**	**10**	**2**	**19**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Polongbangkeng Selatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Polongbangkeng Selatan

Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliput pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kelurahan, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain pengantar KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan tahun 2025 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan, harus dilakukan survey IKM. Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Kinerja pelayanan didukung oleh sistem yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Selatan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR		Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	70	88.8	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM	88.25	88.26	88.50	88.25	88,26	88.50	
2.	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	90%	72.73%								
3.	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM)	100%	100%	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu (%)	80%	85%	90%	80%	85%	90%	
4.	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan Non SPM	100%	100%	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	80%	80%	85%	80%	80%	85%	
5.	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan baik	80%	89.38%	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan (Angka)	74,65	74,65	-		-	-	
6.	Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk	8,49%	8,49%	Tingkat Literasi Dijital ASN Kantor kecamatan (nilai)	75	75	75	75	75	75	

	Jumlah Desa Status Berkembang Menuju Status Desa Maju	3 Desa Maju	9 Desa Maju									
	Persentase Lembaga Kemasyararakatan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	28,20%	28,20%									
	Indeks Repormasi Birokrasi	B	B									
	Nilai Sakip Kecamatan Polongbangkeng Selatan	69	70									

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2024 dan 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Polongbangkeng Selatan

Berdasarkan tabel II-6 di atas dapat di lihat bahwa capaian kinerja masing masing indikator beserta faktor pendukung dan penghambat pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Hasil Pengukuran Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) pada tahun2024 menunjukkan bahwa capaian berada pada angka 88.8 poin dari target yang ditetapkan sebesar 70 poin. Capaian ini menggambarkan bahwa pelayanan public di kecamatan sudah berjalan dengan baik dan telah melebihi target yang di tentukan. Penilaian ini diperoleh melalui servei kepuasan Masyarakat yang melibatkan responden dari berbagai kelompok pengguna layanan sehingga mencerminkan persepsi masyaraat terhadap pelayanan yang diberikan. Secara umum pelayanan public pada kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan menunjukka adanya peningkatan pelayan,dan semoga kedepan Indeks Kepuasan Mayarakat mengalami fluktuasi kedepan nya dengan dukungan stakeholder yang ada.

2.1.2 Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban

Berdasarkan data perbandingan Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat kita lihat dengan perhitungan persentase jumlah kasus pada tahun 2023 dengan jumlah kasus pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 terjadi 30 Kasus dan tahun 2024 terjadi 25 kasus, artinya ada penurunan kasus ketentraman dan ketertiban. Melihat dari turunnya angka kriminalitas menjadi 16,6%, angka ini membuktikan bahwa peran serta pemerintah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban cukup aktif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, hanya saja masi perlu evaluasi lebih mendalam terhadap sinergi pencegahan dan penanganan tindak criminal yang selama ini dijalankan. Upaya sinergis antara aparat penegak hukum,pemerintah kecamatan, dan partisifasi Masyarakat perlu diperkuat agar ditahun mendatang penurunan angka kriminalitas dapat lebih siknifikan dan mendekati target yang ditetapkan.

2.1.3 Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Berdasarkan data Perbandingan persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan pada tahun 2024 telah mencapai standar pelayanan sebanyak 100% sesuai dengan target capain yag dinginkan ,pencapaian ini didukung oleh tersedianya standar pelayanan yang prima sesuai SOP,serta tidak lepas dari peran serta stakeholder yang menjunjung nilai-nilai pelayanan yang beretika serta sopan dan santun dalam memberikan

pelayanan. Pada tahun 2024 capaian telah mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan, semoga kedepan bisa di pertahannkan capaian tersebut.

2.1.4 Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (Non Standar Pelayanan Minimal).

Berdasarkan data Perbandingan persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (Non Standar Pelayanan Minimal) pada tahun 2024 telah mencapai standar pelayanan sebanyak 100% sesuai dengan target capain yag dinginkan ,pencapaian ini didukung oleh tersedianya standar pelayanan yang prima sesuai SOP,serta tidak lepas dari peran serta stakeholder yang menjunjung nilai-nilai pelayanan yang beretika serta sopan dan santun dalam memberikan pelayanan. Pada tahun 2024 capaian telah mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan, semoga kedepan bisa di pertahannkan capaian tersebut, Indikator ini sama dengan Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuia standar pelayanan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

2.1.5 Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik

Pada Tahun 2024 , capaian persentase sarana dan prasarana pelayanan umum dalam kondisi baik di Kecamatan Polongbangkeng Selatan mencapai 89,38% cukup mengalami fluktuasi dengan target yang ditetapka pada tahun 2024 dengan poin 80%, Sebanyak 186 sarana dan prasarana yang ada masih dalam kondisi baik. Kondisi Ini cukup terlihat dengan adanya anggaran yang di keuarakan ke desa dana kelurahan untuk memperbaiki sarana dan prasarana umum,meskipun demikian penambahan anggaran masih sangat diperlukan untuk membatu wilayah kecamatan polongbangkeng selatan dalam memelihara sarana dan prasarana yang telah ada baik itu sekolah,pasar, maupun tempat -tempat lainnya atau fasilitas lainnya

2.1.6 Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk

Pada Tahun 2024 ,angka kriminalitas di kecamatan polongbangkeng Selatan tercatat sebesar 25 kasus per 10000 peduduk . Capaian ini menunjukkan bahwa Tingkat kriminalitas diwilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan relative terkendali dan kondisi keamanan Masyarakat tergolong cukup kondusif berdasarkan data table tindak criminal, Jumlah kasus yangterjadi selama tahun 2024 sebanayak 25 kasus dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 senayak 29.424 jiwa Hasil perhitungan angka criminal Adalah :

25/29.424 X 10.000 = 8,49%

Hasil ini membuktikan bahwa meskipun masih terdapat berbagai, bentuk tindak criminal, intensitasnya lebih rendah dibandingkan target, yang berarti efektifitasnya Upaya apparat dan Masyarakat dalam menjaga keamanan cukup baik.

2.1.7 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat

Terdapat 11 lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, kesebelas Lembaga ini terdiri dari 5 lembaga kemasyarakatan desa yaitu BPD dan Enam Lembaga KSM DI Kelurahan. masing-masing desa dan kelurahan memiliki satu Lembaga kemasyarakatan. Persentase Jumlah Lembaga yang aktif dapat dirumuskan dengan jumlah Lembaga yang aktif dibagi jumlah Lembaga keseluruhan dikali seratus

Jumlah Lembaga aktif / Jumlah Lembaga keseluruhan X 100=11/39X100= 28,20%

Terdapat jumlah sebanyak 39 lembaga yaitu LPM sebanyak 6 lembaga, pemuda 18 lembaga, P2A sebanyak 10 lembaga, dan BPD sebanyak 5 lembaga.

2.1.8 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Repormasi Birokras yang dicapai selama periode 2023 sampai 2026 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 mencapai predikat B dari yang ditargetkan predikat B.

2.1.9 Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan

Nilai sakip pada kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan yang dicapai selama periode 2023 sampai 2026 mengalami fluktuasi. Pada tahun:2023 mencapai target yaitu predikat B dari yang ditargetkan predikat B. 2024 mencapai target yaitu predikat B dari yang ditargetkan predikat B.

2.2. Pencapaian Kinerja Kecamatan Polongbangkeng Selatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025

Pada Indikator capaian kinerja triwulan I tahun 2025 terdapat enam indikator berikut indikator dibawah ini

2.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2025 ditetapkan target IKM 88,25% ,melihat capaian IKM maka dapat kita simpulkan bahwa ikm di tahun 2025 pada tiwulan I telah mencapai target lebih tinngi dari target sebelummya yaitu pada poin 88,08 %,melihat angka target dengan realisasi dapat di simpulkan adanya peningkatan capaian.

2.2.2 Persentase Peningkatan Pelayanan Sesuai Standar

Pada Tahun 2025 ditetapkan target dengan poin 80% melihat capaian yang realisasi di triwulan I pada tahun 2025 mencapai kesesuaian antara target dengan capaian yaitu 80%.

2.2.3 Persentase pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu

Target pelayanan yang tepat waktu pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 80% sementara hasil realisasi sampai triwulan I sudah sesuai capaian 80%.

2.2.4 Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti

Target persentase peningkatan aduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada tahun 2025 sebanayak 80% nilai telah sesuai dengan target pada tahun 2025 yaitu 80%.

2.2.5 Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan

Target hasil Penilaian sakip berada pada nilai 74,65 yang artinya sama dengan capaian pada tahun 2025 .

2.2.6 Tingkat literasi digital ASN kantor Kecamatan

Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 75 % dan realisasi pada triwulan I telah mencapai target sesuai target yaitu 75%.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Kecamatan Polongbangkeng yaitu ***Meningkatkanya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan",*** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik

Sasaran 2: Meningkatnya tata kelola kinerja pada kantor kecamatan

Tujuan dan sasaran Kecamatan Polongbangkeng Selatan dalam Perubahan Renja

Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Kecamatan Polongbangkeng Selatan Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.1.
Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Kecamatan Polongbangkeng Selatan
Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	81,25	T. Meningkatkanya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan Polongangkeng Selatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	90,4
	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	90%		Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar (%)	80
Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM)	100%	Sasaran 1. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu (%)	
	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan Non SPM	100%		Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	
Sasaran 1.2 : Meningkatnya koordinasi	Persentase prasarana dan sarana	80%	Sasaran 2. Meningkatnya tata kelola kinerja pada	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	65

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	pelayanan umum dengan kondisi baik		kantor kecamatan Polongbangkeng Selatan	pada Kantor Kecamatan (Angka	
Sasaran 1.3 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas per 100.000 Penduduk	0.27%		Tingkat Literasi Digital ASN Kantor Kecamatan (Nilai)	75
Tujuan 2: Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa status berkembang menuju status Desa maju	0%			
Sasaran 2.1: Meningkatnya status desa	Jumlah desa status berkembang menuju Desa maju	9 Desa Maju			
Sasaran 2.2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	83%			
Tujuan 3: Meningkatkan tata kelola pada kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan	Indeks Reformasi Birokrasi	B			
	Nilai Sakip Kecamatan Polongbangkeng Selatan	69			

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Polongbangkeng Selatan mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENYELENGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			825.000
		Penyelengaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Fasilitasi Koordinasi (Bimtek,soialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	825.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.207.926.853,00
		Koordinasi Kegiatan		1.167.700

		Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi masyaratakat dalam Forum Musyawaran Perencanan di Desa	880.000
			Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang dilakukan ole pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	0
		Kegiatan Pemberdayaan Keluraan		1.207.046.853
			Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan pembagunan di kelurahan	990.000
			Pembagunan sarana dan prasaran Kelurahan	847.621.223
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	358.435.630
	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0
		Koordinasi Upaya penyelengaraan ketentraman dan keteriban umum		1.019.000
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indinesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	825.000
			Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	825.000
	PROGRAM PEMBINAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			500.000

		Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1.500.000
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa	0
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	500.000
			Fasilitasi SingkronisasI Perencanaan Pembagunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 dengan total pagu Rp **6.878.679.200** (Enam milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus dua rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Polongbangkeng Selatan Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Polongbangkeng Selatan							6.857.728.861,00	6.922.588.783,00	6.878.679.202,96							7.572.044.820,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							6.857.728.861,00	6.922.588.783,00	6.878.679.202,96							7.572.044.820,00	
	7	01				KECAMATAN							6.857.728.861,00	6.922.588.783,00	6.878.679.202,96							7.572.044.820,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG	Persentase Pemenuhan				100 %	100 %	5.559.967.290,00	5.711.030.230,00	5.669.427.349,96							6.368.044.820,00	

						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Perangkat Daerah															
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	indeks reformasi birokrasi Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 % 90 % B PREDIKAT	100 % 90 % B PREDIKAT	17.900.000,00	8.219.000,00	8.219.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		42.900.000,00	KECAMATAN POLONG BANGKENG SELATAN

	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

							SKPD															
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar,	Dana Alok	-	6. Perbaikan			3.000.000,00	KECAMATAN POLONG

							SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	asi Umum (DAU)		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				BANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.135.000,00	750.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2 Laporan	4.900.000,00	1.500.000,00	900.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.900.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase pemenuhan administrasi keuangan perangk	-			100 %	100 %	4.728.304.830,00	4.863.879.430,00	4.863.879.430,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.473.827.860,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

							at daerah															
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				144 Orang/ bulan	700 Orang/ bulan	4.721.309.330,00	4.860.461.930,00	4.860.462.169,20	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.467.827.860,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen				10 Dokumen	10 Dokumen	2.000.000,00	941.100,00	0,00	Kab. Takalar,	Dana Alok	-	6. Perbaikan			2.000.000,00	KECAMATAN POLONG

							Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	asi Umum (DAU)		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				BANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.995.500,00	1.676.400,00	500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase barang milik daerah pada perangkat daerah Persentase sarana prasarana kecamat	-			100 %	100 %	6.473.000,00	1.443.800,00	1.443.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

							an dan keluraha n dalam kondisi baik																		
	7	0 1	0 1	2. 0 3	0 0 0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
							Jumlah Rencana Kebutuh an Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokum en	1 Dokum en	3.000.0 00,00	786.10 0,00	250.00 0,00	Kab. Takalar , Polom bangke ng Selata n, Semua Kel/De sa	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	6. Perbai kan Tatak elola Peme rintah an dan Pelay anan Publik			2.000.0 00,00	KECAMA TAN POLONG BANGKE NG SELATAN
	7	0 1	0 1	2. 0 3	0 0 0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
							Jumlah Laporan Rekonsili asi dan Penyusu nan Laporan				1 Lapora n	1 Lapora n	3.473.0 00,00	657.70 0,00	0,00	Kab. Takalar , Polom bangke ng	Dan a Alok asi Umu m (DA	-	6. Perbai kan Tatak elola Peme rintah			2.000.0 00,00	KECAMA TAN POLONG BANGKE NG SELATAN

						Barang Milik Daerah pada SKPD									Selatan, Semua Kel/Desa	U)		an dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase sarana dan prasarana kecamatan dan keluraha n dalam kondisi baik	-			100 %	100 %	6.000.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.000.000,00	KECAMATAN POLONG BANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	1.515.000,00	1.263.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi Umum perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	235.819.000,00	253.073.000,00	253.073.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		263.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

		1	1	06	002																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	15.292.000,00	71.573.000,00	71.573.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	30 Paket	198.000.000,00	143.643.000,00	125.948.180,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			198.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																(DAU)						
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	22.527.000,00	37.857.000,00	18.497.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	538.316.960,00	546.970.000,00	546.970.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		538.316.960,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																			Publik				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	7.266.960,00	15.920.000,00	15.920.000,76	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.266.960,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250 Laporan	36 Laporan	531.050.000,00	531.050.000,00	531.050.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng	Dana Bagi Hasil (DBH) Dan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintah			531.050.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

							yang Disediakan									Selatan, Semua Kel/Desa	a Alokasi Umum (DAU)		an dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	27.153.500,00	35.930.000,00	35.930.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau				7 Unit	7 Unit	27.153.500,00	35.930.000,00	35.930.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng	Dana Alokasi Umum (DA	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintah			40.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

							Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharaa dan dibayarkan Pajaknya								Selatan, Semua Kel/Desa	U)		an dan Pelayanan Publik				
2	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan				95 %	95 %	1.288.761.571,00	1.208.214.553,00	1.207.926.853,00							1.176.500.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di Desa	-			100 %	100 %	5.500.000,00	1.167.700,00	1.167.700,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.500.000,00	KECAMATAN POLONG BANGKENG SELATAN
	7	01	03	2.0	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	

				1	0 1																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	880.000,00	880.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	0 1	0 3	2. 0 1	0 0 0 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan				11 Dokumen	11 Dokumen	2.500.000,00	287.700,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/De	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			2.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

							Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									sa			Publik				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di kelurahan	-			100 %	100 %	1.283.261.571,00	1.207.046.853,00	1.207.046.853,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.172.000.000,00	KECAMATAN POLONG BANGKENG SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang				12 Lembaga Kemasyarakat	12 Lembaga Kemasyarakat	3.159.000,00	990.000,00	990.000,00	Kab. Takalar, Polombangke	Dana Alokasi Umu	-	6. Perbaikan Tatakelola			2.000.000,00	KECAMATAN POLONG BANGKENG

							Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				an	an				ng Selatan, Semua Kel/Desa	m (DAU)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	872.360.000,00	798.206.853,00	847.621.223,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			810.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	407.742.571,00	407.850.000,00	358.435.630,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			360.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
3	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan				1 Kasus	1 Kasus	3.000.000,00	1.019.000,00	0,00							7.500.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di desa/ kelurahan	-			100 %	100 %	3.000.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelay	-		7.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																			anan Publik					
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	544.900,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	474.100,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan				90 %	90 %	1.500.000,00	825.000,00	825.000,00							10.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugas	Persentase kelancaran pelaksanaan urusan pemerin	-			100 %	100 %	1.500.000,00	825.000,00	825.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

						an Kepala Daerah	tahan umum di kecamatan													dan Pelayanan Publik				
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	30 Orang	1.500.000,00	825.000,00	825.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu				100 %	100 %	4.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00							10.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah status desa berkembang menuju desa maju dan mandiri Persentase administarsi tata pemerintahan desa yang sesuai standar prersentase ketertiba	-			100 % 5 Desa 83 %	100 % 5 Desa 83 %	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KECAMATAN POLONG BANGKENG SELATAN

							n masyarakat dalam proses perencanaan di desa Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat presentase peraturan desa dan peraturan ke[ala desa yang di susun																	
	7	01	06	2.01	000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																			

					1																			
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				9 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	0	0	2.	0	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		

		1	6	0 1	0 0 9																		
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	J U M L A H												**6.857.728.861,00**	**6.922.588.783,00**	**6.878.679.202,96**							**7.572.044.820,00**	

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar;
4. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;

5. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Takalar, 12 Juni 2025

Camat Polongbangkeng Selatan,



SYARIEF H, SE. M. AP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19800318 200604 1 016

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PUTRPKP
TAHUN 2025







DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ridha dan maghfirahnya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar tahun 2025 dapat disusun. Salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada Rasullullah Muhammad SAW, yang telah mengamanatkan ummatnya untuk senantiasa menuntut ilmu pengetahuan dari buaian sampai ke liang lahat.

Kami sadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar ini di susun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan program kegiatan tahun yang akan datang. Perubahan Rencana Kerja (Renja) dinas PUTRPKP kabupaten Takalar ini disusun dari berdasarkan perpaduan lima (5) pendekatan perencanaan yaitu top down, bottom-up, teknokratik, politis dan pendekatan partisipatif. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk penyusunan Perubahan Renja di masa-masa yang akan datang. Demikian pula ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua komponen yang terlibat dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar tahun 2025, sehingga dapat disusun dan semoga apa yang kita lakukan dapat menjadi pahala di sisiNya. Aamiin..

Dan akhirnya seluruh aktivitas kami serahkan kepada yang kuasa, mudah-mudahan dapat dinilai-Nya sebagai amal jariyah. Aamiin Takalar, Juni 2025

Kepala Dinas,

BUDIAR ROSAL SALEH, S.STP.,M.Adm.Pemb.
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c NIP.
19800520 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I 5

PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja 8

BAB I : PENDAHULUAN 8

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PUTRPKP TRIWULAN I 8

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PUTRPKP 8

BAB IV : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PUTRPKP 9

BAB V : PENUTUP 9

BAB II 10

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PUTRPKP TRIWULAN I 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar sampai dengan Triwulan I 10

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas PUTRKP Kab. Takalar 2025 yang terakomodir di APBD 2025 20

2.1.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan 21

2.1.2.1. Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2025 21

2.1.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2025 22

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (IKU dan SPM) 23

2.2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (IKU) 23

2.2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (SPM) 27

BAB III 30

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PUTRPKP 30

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 30

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional Pada RKP 2025 30

3.1.2 Sasaran Pembangunan Pada RKP tahun 2025 30

3.1.2.1 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 31

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas PUTRPKP Tahun 2025 31

3.2.1 Tujuan 31

3.2.2 Sasaran 31

BAB IV 35

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PUTRPKP TAHUN 2025 35

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung 35

Program 35
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja 36
Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2025 36
BAB V 50
PENUTUP 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Dinas PUTRPKP Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 71Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 –2029 dan Rancangan Awal Renstra Dinas PUTRPKP Tahun 2025 –2029. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas PUTRPKP dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas PUTRPKP Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025.

Oleh karena itu, Perubahan Rencana Kerja Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang urusan pekerjaan umum dan perumahan yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Disamping itu, dalam rangka mendukung prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025, substansi Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 mengikuti tahapan dan proses perencanaan serta terbuka bagi usulan-usulan masyarakat yang diajukan melalui pendekatan partisipatif dan politis yang disinergikan dengan perencanaan teknokratik lingkup ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pada Pasal 343 ayat (1) mengamanahkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD berkenaan; dan/atau
b Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan :

a Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b Target sasaran pembangunan Daerah;
c Prioritas pembangunan Daerah;
d Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 3 indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 13. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2024-2043;
13) Peraturan Bupati Takalar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 27);
14) Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini adalah :

1) Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra OPD kedalam program/kegiatan tahunan.
2) Untuk menyiapkan acuan bagi RAPBD.
3) Untuk menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi OPD).
4) Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
5) Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar adalah:

1) Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan

OPD.

2) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah
3) Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan Tahun 2025
4) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
5) Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, kedudukan Renja OPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Renja OPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja OPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Renja OPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renja OPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen Renja OPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen Renja OPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PUTRPKP TRIWULAN I

Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman, bina konstruksi dan tata ruang) yang meliputi : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PUTRPKP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah untuk

memberikan arahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan pembangunan sarana, prasarana dan ultilitas publik di Kabupaten Takalar, sehingga akan didapat kejelasan, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Takalar yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, mendorong swadaya dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan bertanggungjawab.

BAB IV : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PUTRPKP

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan demi mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaen Takalar yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas PUTRPKP

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian berupa: (i) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, (ii) Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan (iii) Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PUTRPKP TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar sampai dengan Triwulan I

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Periode Pelaksanaan 2025 sebagai berikut :

.

Tabel II - 1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Takalar
Renja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar
Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2025

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	5		6		7		8		9	
						DINAS PUPRPKP											
	1					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN**			**124.766.328.925**		**-**	**100%**	**66.939.646.766**	**5%**	**2.698.459.671**	**4,93%**	**4,03%**
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN**			**120.151.328.925**		**-**	**100%**	**55.653.799.766**	**6%**	**1.666.197.171**	**5,69%**	**2,99%**
	1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**36.994.963.119**	**0,00%**	**-**	**100%**	**7.177.248.032**	**23,57%**	**1.419.146.581**	**23,57%**	**19,77%**
	1	03	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	863.395.528	0,00%	-	100%	56.954.000	23,08%	6.441.390	23,08%	11,31%
	1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok)	9	309.000.000			2	18.614.000	1	3.441.390	50%	18%
	1	03	01	2.01	02	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	4	84.395.528			1	5.000.000	-	-	0%	0%
	1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dok)	4	108.000.000			1	8.340.000	-	-	0%	0%
	1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dok)	4	95.000.000			4	5.000.000	-	-	0%	0%
	1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)	4	67.000.000			1	3.000.000	1	3.000.000	100%	100%
	1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	16	200.000.000			4	17.000.000	1	-	25%	0%
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									**29,17%**	**19,75%**
							Predikat Kinerja Kegiatan									**SR**	**SR**
	1	03	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	32.916.567.591	0,00%	-	100%	6.695.290.632	22,89%	1.321.294.791	22,89%	19,73%
	1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji (66 Orang selama 14 bulan)	3.234	21.816.026.676			924	4.819.562.049	198	1.309.206.291	21%	27%
							Jumlah ASN yang menerima TPP (66 Orang selama 12 bulan)	2.772	9.892.540.915			792	1.847.259.583	198	-	25%	0%

	1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dok)	12	1.000.000.000			12	10.769.000	1	8.251.000	8%	77%
	1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Lap)	1	80.000.000			1	7.700.000	-	-	0%	0%
	1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Lap)	12	56.000.000			12	5.000.000	1	2.498.500	8%	50%
	1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dok)	4	72.000.000			2	5.000.000	1	1.339.000	50%	27%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**18,85%**	**30,09%**
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**
	1	03	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100%	383.000.000	0%	-	100%	20.524.300	22%	7.691.600	22,22%	37,48%
	1	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dok)	8	58.000.000			1	6.324.300	-	3.663.600	0%	58%
	1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Lap)	4	150.000.000			4	8.500.000	1	1.173.000	25%	14%
	1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Lap)	3	175.000.000			4	5.700.000	1	2.855.000	25%	50%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**16,67%**	**40,61%**
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**
	1	03	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	36.000.000	0%	-	100%	2.600.000	0%	650.000	0,00%	25,00%
	1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dok)	4	36.000.000			1	2.600.000	-	650.000	0%	25%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**0,00%**	**25,00%**
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**
	1	03	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	2.376.000.000	0,00%	-	100%	86.592.800	67,60%	22.595.000	67,60%	26,09%
	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	80.000.000			2	994.800	-	-	0%	0%
	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dok)	5	107.000.000			12	6.100.000	1	1.250.000	8%	20%
	1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	36	104.000.000			4	2.200.000	-	-	0%	0%
	1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	983	1.850.000.000			302	76.298.000	216	21.345.000	72%	28%
	1	03	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dok)	1	235.000.000			1	1.000.000	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**15,97%**	**9,69%**

Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**
	1	03	01	2.08		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	225.000.000	0,00%	-	100%	264.871.500	25,00%	57.591.800	25,00%	21,74%
	1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Lap)	3	60.000.000			12	37.471.500	3	5.471.800	25%	15%
	1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Lap)	1	165.000.000			12	227.400.000	3	52.120.000	25%	23%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**25,00%**	**18,76%**
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**
	1	03	01	2.09		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	195.000.000	0,00%	-	100%	50.414.800	4,17%	2.882.000	4,17%	5,72%
	1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)					37	33.000.000	3	2.882.000	8%	9%
	1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	195.000.000			35	17.414.800	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**4,05%**	**4,37%**
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**15,67%**	**21,18%**
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Progres kegiatan masih rendah karena keterbatasan pencairan anggaran, dan ada beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya pada triwulan berikutnya

Faktor penghambat:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

	1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Rasio jaringan irigasi, Persenatse pengembangan, pengelolaan, dan konservasi**	**90%**	**400.000.000**	**0,00%**	**-**	**100%**	**4.605.854.000**	**0%**	**1.050.000**	**0,00%**	**0,02%**
	1	03	02	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**						100%	70.000.000	0%	-	0,00%	0,00%
	1	03	02	2.01	117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)					0,30	70.000.000	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,00%**
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**
	1	03	02	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	100%	400.000.000	0,00%	-	100%	4.535.854.000	0,00%	1.050.000	0,00%	0,02%
	1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)					0,25	200.000.000	-	1.050.000	0%	1%

	1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	800	400.000.000			2	4.335.854.000	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**0,00%**	**0,26%**
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																**0,00%**	**0,13%**
Predikat Kinerja Program																**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																	
Faktor penghambat: : Adanya informasi terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan, menunggu penetapan anggaran selanjutnya																	
Faktor penghambat:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																	

	1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**100%**	**5.329.500.000**	**0,00%**	**-**	**100%**	**555.926.800**	**0,00%**	**7.590.000**	**0,00%**	**1,37%**
	1	03	03	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	100%	5.329.500.000	0,00%	-	100%	555.926.800	0,00%	7.590.000	0,00%	1,37%
	1	03	03	2.01	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)					11	549.988.800	-	7.590.000	0%	1,38%
	1	03	03	2.01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	365	5.329.500.000			1	5.938.000	-	-	0%	0,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**0,00%**	**0,69%**
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																**0,00%**	**0,69%**
Predikat Kinerja Program																**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																	
Faktor penghambat: : Adanya informasi terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan, menunggu penetapan anggaran selanjutnya																	
Faktor penghambat:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																	

	1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**100%**	**4.397.140.000**	**0,00%**	**4.420.000**	**0,00%**	**0,10%**
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota						100%	4.397.140.000	0%	4.420.000	0,00%	0,10%
	1	03	05	2.01	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)					1	100.000.000	-	1.920.000	0%	2%
	1	03	05	2.01	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)					243	4.147.140.000	-	2.500.000	0%	0%
	1	03	05	2.01	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dok)					1	150.000.000	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**0,00%**	**0,66%**
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																**0,00%**	**0,66%**
Predikat Kinerja Program																**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																	

Faktor penghambat: : Adanya informasi terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan, menunggu penetapan anggaran selanjutnya																
Faktor penghambat:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																
	1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)**	**100%**	**4.050.000.000**	**0,00%**	**-**	**100%**	**1.300.000.000**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
	1	03	06	2.01		**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	100%	4.050.000.000	0%	-	100%	1.300.000.000	0%	-	0,00%	0,00%
	1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (m)	5.800	3.300.000.000			1.150	1.250.000.000	-	-	0%	0%
	1	03	06	2.01	21	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	1.500	750.000.000			1	50.000.000	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**0,00%**	**0,00%**
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																**0,00%**	**0,00%**
Predikat Kinerja Program																**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																
Faktor penghambat: : Adanya informasi terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan, menunggu penetapan anggaran selanjutnya																
Faktor penghambat:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																
	1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB**	**100%**	**2.400.000.000**	**0,00%**	**-**	**100%**	**125.219.000**	**33%**	**34.803.000**	**33,33%**	**27,79%**
	1	03	08	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	100%	2.400.000.000	0%	-	100%	125.219.000	33%	34.803.000	33,33%	27,79%
	1	03	08	2.01	22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Org)	1.714	1.600.000.000			50	5.000.000	17	1.737.000	34%	35%
	1	03	08	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dok)	2.800	800.000.000			1	120.219.000	-	33.066.000	0%	28%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**17,00%**	**31,12%**
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																**17,00%**	**31,12%**

Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																
Faktor penghambat: : Adanya informasi terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan, menunggu penetapan anggaran selanjutnya																
Faktor penghambat:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																

	1	03	09			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**100%**	**1.850.000.000**	**0,00%**	**-**	**100%**	**22.102.525.434**	**0%**	**163.777.400**	**0,00%**	**0,74%**
	1	03	09	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	100%	1.850.000.000	0%	-	100%	22.102.525.434	0%	163.777.400	0,00%	0,74%
	1	03	09	2.01	08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	592,607	1.850.000.000			1	22.102.525.434	-	163.777.400	0%	1%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,74%**
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**0,00%**	**0,74%**
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																
Faktor penghambat: : Adanya informasi terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan, menunggu penetapan anggaran selanjutnya																
Faktor penghambat:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																

	1	03	10			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Persentase rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, rasio panjang jalan dan jembatan**	**100%**	**68.166.865.806**	**0,00%**	**-**	**100%**	**15.271.887.500**	**0%**	**15.550.000**	**0,00%**	**0,10%**
	1	03	10	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	100%	68.166.865.806	0,00%	-	100%	15.271.887.500	0%	15.550.000	0,00%	0,10%
	1	03	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dok)	12	723.868.000			1	19.500.000	-	4.271.000	0,00%	21,90%
	1	03	10	2.01	32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	499,12	66.542.997.806			8	13.402.887.500	-	-	0,00%	0,00%
	1	03	10	2.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)	5	900.000.000			2	1.150.000.000	-	2.500.000	0,00%	0,22%
	1	03	10	2.01	40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	8				1	699.500.000	-	8.779.000	0,00%	1,26%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**5,84%**
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**0,00%**	**5,84%**
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																
Faktor penghambat: : Adanya informasi terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan, menunggu penetapan anggaran selanjutnya																
Faktor penghambat:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

	1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**100,00%**	**560.000.000**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**25.999.000**	**0,00%**	**4.860.190**	**0,00%**	**18,69%**
	1	03	11	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	100%	100.000.000	0%	-	100%	10.017.000	0%	2.875.190	0,00%	28,70%
	1	03	11	2.01	15	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dok)	4	100.000.000			1	10.017.000	-	2.875.190	0%	29%
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									**0,00%**	**28,70%**
							Predikat Kinerja Kegiatan									**SR**	**SR**
	1	03	11	2.04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	100%	460.000.000	0%	-	100%	15.982.000	0%	1.985.000	0,00%	12,42%
	1	03	11	2.04	04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Kelembagaan Jasa Konstruksi (kegiatan)	32	460.000.000			30	15.982.000	-	1.985.000	0%	12%
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									**0,00%**	**12,42%**
							Predikat Kinerja Kegiatan									**SR**	**SR**
							Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)									**0,00%**	**20,56%**
							Predikat Kinerja Program									**SR**	**SR**

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Adanya informasi terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan, menunggu penetapan anggaran selanjutnya

Faktor penghambat:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

	1	03	12			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**100%**	**400.000.000**	**0,00%**	**-**	**100%**	**92.000.000**	**0%**	**15.000.000**	**0,00%**	**16,30%**
	1	03	12	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	100%	400.000.000	0%	-	100%	92.000.000	0%	15.000.000	0,00%	16,30%
	1	03	12	2.03	06	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	4	400.000.000			1	92.000.000	-	15.000.000	0%	16%
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									**0,00%**	**16,30%**
							Predikat Kinerja Kegiatan									**SR**	**SR**
							Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)									**0,00%**	**16,30%**
							Predikat Kinerja Program									**SR**	**SR**

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Adanya informasi terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan, menunggu penetapan anggaran selanjutnya

Faktor penghambat:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

						URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN**			**4.615.000.000**		**-**	**100%**	**11.285.847.000**	**4%**	**1.032.262.500**	**4,17%**	**9,15%**

	1	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**#REF!**	**1.295.000.000**	**#REF!**	-	**100%**	**366.572.900**	**13%**	**208.861.400**	**12,50%**	**56,98%**
	1	04	02	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/kota**	#REF!	300.000.000	#REF!	-	100%	80.004.000	0%	16.983.100	0,00%	21,23%
	1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dok)	1	140.000.000			1	40.002.000	-	6.751.200	0%	17%
	1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dok)	1	160.000.000			1	40.002.000	-	10.231.900	0%	26%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**0,00%**	**21,23%**
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**
	1	04	02	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase terfasilitasinya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota**	100%	995.000.000	0%	-	100%	286.568.900	25%	191.878.300	25,00%	66,96%
	1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	33	995.000.000			3	274.068.900	-	179.378.300	0,00%	65,45%
	1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	37	1.480.000.000			1	12.500.000	1	12.500.000	100,00%	100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**50,00%**	**82,73%**
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**T**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																**25,00%**	**51,98%**
Predikat Kinerja Program																**SR**	**R**
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Real anggaran tinggi dikarenakan pembayaran utang																	
Faktor penghambat: : Adanya informasi terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan, menunggu penetapan anggaran selanjutnya																	
Faktor penghambat:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																	

	1	04	03			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**PERSENTASE KAWASAN PERMUKIMAN**	**#DIV/0!**	**-**	**#REF!**	-	**100%**	**8.416.881.000**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
	1	04	03	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	#DIV/0!	-	#REF!	-	100%	200.000.000	0%	-	0,00%	0,00%
	1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yangTersusun/ Tereview/Terlegalisasi (Dok)	-	-			1	200.000.000	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**0,00%**	**0,00%**
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**
	1	04	03	2.03		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						100%	8.216.881.000	0%	-	0,00%	0,00%
	1	04	03	2.03		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)					375	8.216.881.000,00	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**0,00%**	**0,00%**
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**

Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**0,00%**	**0,00%**
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																
Faktor penghambat: : Adanya informasi terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan, menunggu penetapan anggaran selanjutnya																
Faktor penghambat:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																
	1	04	05			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU**	**100%**	**3.320.000.000**	**0,00%**	**-**	**100%**	**2.502.393.100**	**0%**	**823.401.100**	**0,00%**	**32,90%**
	1	04	05	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	100%	3.320.000.000	0,00%	-	100%	2.502.393.100	0%	823.401.100	0,00%	32,90%
	1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	umlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	1	3.320.000.000			10	2.502.393.100	-	823.401.100	0%	33%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**32,90%**
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**0,00%**	**32,90%**
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																
Faktor penghambat: : Adanya informasi terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan, menunggu penetapan anggaran selanjutnya																
Faktor penghambat:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																
															7,68%	**16,60%**
															SR	**SR**
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**4,44%**	**14,01%**
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**

Sumber Data : Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 untuk triwulan I baik dari segi kinerja dan serapan anggarannya, dari 13 (tigabelas) Program yang diampu Dinas PUTRPKP Kab. Takalar di mana Program yang mencapai/mendekati Kinerja dan Keuangan 25% hanya ada 2(dua) Program sedangkan 11(sebelas) Program lainnya cenderung stagnan, Sebagai gambaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program yang capaian kinerja dibawah 25 % adalah
   a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air dinilai 0%
   b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dinilai 1,37%
   c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dinilai 0,10%
   d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dinilai 0%
   e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dinilai 0,74%
   f. Program Penyelenggaraan Jalan dinilai 0,10%
   g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dinilai 18,69%
   h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dinilai 16,30%
   i. Program Pengembangan Perumahan dinilai 12,50%
   j. Program Kawasan Permukiman dinilai 0%
   k. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Utilitas Umum (PSU) dinilai 0%

   hal ini dikarenakan belum teridentifikasinya kegiatan-kegiatan diawal tahun dan keterlambatan penerbitan pedoman/petunjuk teknis kegiatan atau adanya penundaan kegiatan akibat berbagai alasan yang juga bisa menghambat realisasi
2. Program yang capaian kinerja mendekati 25% adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu capaiannya sebesar 23,57% di mana didalamnya terdapat Belanja rutin pegawai seperti Gaji dan Tunjangan
3. Program yang capaian realisasi capaian pendanaannya diatas 25% adalah Program Penataan Bangunan Gedung dengan nilai pencapaian sebesar 33,33%, ada beberapa kegiatan di dalamnya yang sementara berjalan antara lain: Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Penerbitan PBG, SLF, SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Gedung(RTB), TPA,TPT, Penilik dan Pendataan Bangunan melalui SIMBG

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas PUTRKP Kab. Takalar 2025 yang terakomodir di APBD 2025.

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada table berikut

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	INDIKATOR		
				JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
DINAS PUTRPKP	13	23	51	13	23	52

Sumber Data : Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Triwulan I Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 13, jumlah kegiatan 23, dan jumlah sub kegiatan 51, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 13, jumlah indikator kegiatan sebanyak 23, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 51. Hal ini disebabkan karena ada 1 (Satu) sub kegiatan yang memiliki 2 (Dua) indikator.

2.1.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada table berikut

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBDKabupaten Takalar Tahun 2025 hingga Triwulan I

PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD (Rp)	REAL S.D. TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE	
			FIISK	KEUANGAN
DINAS PUTRPKP	66.939.646.766,-	2.698.459.671,-	4,97%	4,03%

Sumber Data : Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD sampai dengan Triwulan I untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp. 2.698.459.671,- Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 4,03% dengan capaian realisasi fisik sebesar 4,97%.

2.1.2.1. Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel II-4.

Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 1–0%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi dengan realisasi >10 ~~2~~0%, dan kategori

Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran >20%.

Tabel II-4

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	DPUTRPKP	13	7	3	3	23	10	4	9	51	26	6	19
TOTAL		13	7	3	3	23	10	4	9	51	26	6	19

Sumber Data : Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Triwulan I Tahun 2025

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program, dari 13 program yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar (PUTRPKP), terdapat 7 program yang realisasi pendanaannya masuk kategori rendah atau sekitar 53,85 persen dari jumlah program.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

   Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan dapat dijelaskan bahwa terdapat 23 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut realisasi pendanaan hingga triwuan I masih dalam kategori rendah, sebesar 43,48 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

   Evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 51 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, terdapat 26 sub kegiatan atau 50,98 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah

2.1.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 –10%, Kategori **Sedang** Untuk Organisasi perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar

dari >10 2-0%, dan kategori **Tinggi** untuk Organisasi perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas >20%..

Tabel II-5

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD
Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	DPUTRPKP	13	10	1	2	23	16	0	7	51	39	0	12
TOTAL		**13**	**10**	**1**	**2**	**23**	**16**	**0**	**7**	**51**	**39**	**0**	**12**

Sumber Data : Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Triwulan I Tahun 2025

1. Evaluasi Capaian Kinerja pada Level Program

   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada level program, dari 13 program yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar (PUTRPKP), terdapat 10 program yang realisasi kinerjanya masuk kategori rendah atau sekitar 76,92 persen dari jumlah program.

4. Evaluasi Capaian Kinerja pada Level Kegiatan

   Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pada level kegiatan dapat dijelaskan bahwa terdapat 23 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut realisasi kinerja hingga triwuan I masih dalam kategori rendah, sebesar 69,57 persen.

5. Evaluasi Capaian Kinerja pada Level sub Kegiatan

   Evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 51 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, terdapat 39 sub kegiatan atau 76,47 persen yang capaian kinerjanya masih rendah.

Dari Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025, rata-rata pada kategori Program-Kegiatan-Sub Kegiatan, evaluasinya masih rendah, disebabkan lambatnya penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang sudah diajukan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (IKU dan SPM)

2.2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah jenis indikator untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah dalam penyelenggaran yang menjadi mandatnya. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-6
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	100,00%	98,30%	Indeks Kualitas Layanan Infrastukur	79,90	80,63	80,53	-	80,63	80,53	Kegiatan masih dalam tahap perencanaan
2	Persentase Peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten	71,20%	63,46%	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	23,00	24,00	25,00		24,00	25,00	Kegiatan masih dalam tahap perencanaan
3	Persentase Luas Persawahan yang terlayani Irigasi tersier Kewenangan Kabupaten	85,00%	74,22%	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	96,00	96,50	97,00		96,50	97,00	Kegiatan masih dalam tahap perencanaan
4	Rasio kepatuhan PBG kab/kota	100,00%	100,00%	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	7,00	8,00	10,00	-	8,00	10,00	Kegiatan masih dalam tahap perencanaan
5	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	45,00%	0,00%	Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	100,00	100,00	100,00	56,29	100,00	100,00	Kerjasama yang baik antar stakeholder, sehingga pencapaian TW1 bisa terlaksana
6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	100,00%	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat (Nilai)	75,00	77,00	80,00	-	77,00	80,00	Kegiatan masih dalam tahap perencanaan
7	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan Perumahan	100,00%	0,03%	Tingkat literasi Digital ASN pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (%)	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	Kerjasama yang baik antar stakeholder, sehingga pencapaian TW1 bisa terlaksana
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00%	2,11%	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	Kerjasama yang baik antar stakeholder, sehingga pencapaian TW1 bisa terlaksana
9	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten	92,86%	92,19%								
10	Nilai SAKIP Dinas PUTRPKP	70,00%	70,00%								

Adanya perubahan IKU Tahun 2023-2026 ke IKU Tahun 2025-2029 didasari oleh adanya Visi Misi terbaru dari Bupati - Wakil Bupati Takalar periode 2025-2029, Visi: Takalar Maju dan berdaya saing melalui Ekonomi Digital sedangkan Misi ada 7(tujuh), yakni :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
3. Membangun dan mengembangkan kemudahan akses Infrastruktur;
4. Memaksimalkan Sumber Daya Alam dan kelestarian lingkungan hidup;
5. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kreatif dan Inovatif;
6. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan,Olahraga, Pariwisata, seni dan Budaya;
7. Penguatan Sistem Jaminan dan Perlindungan Sosial;

Dari hasil penjabaran Visi Misi Bupati diatas, di lingkup dan kewenangan Dinas PUTRPKP kami turunkan Indikator Kinerja Utama(IKU) untuk periode Tahun. 2025-2029 sebanyak 8(delapan) Indikator sedangkan di Dokumen Renstra Transisi Dinas PUTRPKP periode Tahun 2023-2026 IKU sebanyak 10(sepuluh) Indikator.

Dari Penjabaran IKU tersebut, terdapat kesamaan Indikator di Periode 2023-2026 dengan Periode 2025-2029 yaitu: 1. Indeks kualitas layanan Infrastruktur identik dengan Indikator Kondisi kemantapan Jalan Kabupaten dan Luas Persawahan yang terlayani Irigasi serta Indeks Kepatuhan terhadap SPM Bidang Pekerjaan Umum; 2. Indikator Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan identik dengan Indikator Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten; 3. Nilai SAKIP Dinas PUTRPKP; sedangkan ada 3(tiga) Jenis Indikator IKU yang ditambahkan di Renstra 2025-2029 untuk mempertajam Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati Takalar yaitu :

1. Tingkat Literasi Digital ASN pada Setda, Penajaman Misi 1. "Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Unggul";
2. Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas PUTRPKP, Penajaman Misi 5 "Memperkuat pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Inovatif";
3. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas PUTRPKP,Penajaman Misi 5 "Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Inovatif";

Dari Tabel IKU Dinas PUTRPKP di atas menggambarkan kondisi kinerja Dinas sebagai berikut:

Untuk Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, *Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten* dari target kinerja sebesar 71,20% dan terealisasi sebesar 63,46%, dimana Panjang Jalan Kabupaten sebesar 754,49 KM yang terdiri dari 348 ruas jalan, Kondisi Jalan Baik sebesar 335,13 KM atau 44,42%; Kondisi Jalan sedang sebesar 94,65 KM atau 12,54%; Kondisi Jalan rusak ringan sebesar 95,54 KM atau 12,66%; Kondisi Jalan Rusak Berat sebesar 229,17 KM atau 30,37%; Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2025 ini terukur *cenderung turun* dengan berbagai sebab antara lain yang sudah dirasakan saat ini adalah Pendanaan dari Dana Alokasi Khusus untuk Jalan di tahun ini mengalami refocusing Anggaran dari pusat, hal ini berarti Pembangunan jalan dan Perbaikan Jalan dari Dana DAK di Tahun 2025 Nihil, kondisi yang sama juga dengan sumber dana APBD/DAU Kabupaten karena adanya efisiensi Anggaran

Untuk Pengelolaan Sumber daya Air, Indikator "*Persentase luas Persawahan yang terlayani Irigasi tersier kewenangan Kabupaten"* dengan capaian 74,22% dari target sebesar 85%; Capaian 74,22% atau luas cakupan yang dilayani sebesar 18.400 M didukung oleh 11 (sebelas) D.I ; menurut data yang terbaca di e-paksi ada 11(sebelas) Daerah Irigasi beserta rincian luasan Cakupannya untuk saluran Primer dan Sekunder yaitu:

- DI. Bontorea dengan Luas Cakupan 1.290 M

- DI. Ngai-ngai dengan Luas Cakupan 850 M
- DI. Barugaya dengan Luas Cakupan 1.250 M
- DI. Batang lappo dengan Luas Cakupan 820 M
- DI. Je'ne Maeja dengan Luas Cakupan 3.090 M
- DI. Kampong Bugisi dengan Luas Cakupan 1.260 M
- DI. Katonokang dengan Luas Cakupan 1.020 M
- DI. Lembang loe dengan Luas Cakupan 1.070 M
- DI. Je'ne Tallasa dengan Luas Cakupan 2.790 M
- DI. Balang Tanaya denga Luas Cakupan 3.820 M
- DI. Palilangi dengan Luas Cakupan 1.140 M

Data dukung lainnya, Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten saat ini totalnya 29.270 M yang terkoneksi dengan saluran Primer dan Sekunder, dari 29.270 M itu melayani Area Pertanian di Kab. Takalar seluas 2.108 Ha berbanding dengan Total area Irigasi Kabupaten seluas 2.852 Ha atau pencapaiannnya sebesar 73,91%. Pengelolaan Irigasi untuk pertanian rakyat Takalar butuh sentuhan pendanaan yang optimal untuk memajukan sektor pertanian di kabupaten di masa masa yang akan datang, semoga sector irigasi bisa menjadi salah satu prioritas pendanaan untuk tahun tahun berikutnya mengingat Irigasi masuk juga dalam pencapaian Indikator infrastruktur Kabupaten.

"Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota" yang juga merupakan Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, di akhir Tahun 2024 capaiannya sebesar 2,11% dari Target Kinerja 100%, untuk Tahun 2024 ini ada 3 Rumah terfasilitasi dari 142 Rumah terdampak bencana, sedangkan di Tahun 2025 pada Triwulan I ada 3 Rumah terfasilitasi dari 56 Rumah terdampak Bencana, dari Data yang kami terima jenis bencana yang menimpa adalah Sebagian Bencana angin kencang, berikut Data Rumah Korban Bencana di Tahun 2025 untuk setiap Kecamatan sebagai berikut:

- Kec. Mangarabombang : 3 Unit Rumah
- Kec. Pattallassang : 2 Unit Rumah
- Kec. Galesong Utara : 4 Unit Rumah
- Kec. Polongbangkeng Selatan : 5 Unit Rumah
- Kec. Kepulauan Tanakeke : 12 Unit Rumah
- Kec. Polongbangkeng Timur : 1 Unit Rumah
- Kec. Polongbangkeng Utara : 1 Unit Rumah
- Kec. Sanrobone : 1 Unit Rumah
- Kec. Galesong Selatan : 19 Unit Rumah
- Kec. Galesong : 7 Unit Rumah

Faktor yang mendasar minimnya capaian Indikator ini adalah alokasi anggaran yang kurang mendukung program tersebut, dimana kondisi kabupaten mengalami efisiensi anggaran.

Untuk Indikator "Persentase Rumah Layak Huni kabupaten", capaian di Tahun 2024 sebesar 92,19% dari besaran target tahunan sebesar 92,86%, dari

capaian tersebut masuk di kategori *sangat tinggi.* Data tambahannya bahwa Jumlah Unit Rumah di Kabupaten sebesar 72.297 Unit Rumah sedangkan Data Tahun 2025 per TW I, Rumah tidak layak huni sebesar 5.330 Unit Rumah dan Rumah layak huni sebesar 66.967 Unit rumah atau pencapaian sebesar 92,627% di tingkat Kabupaten atau terjadi peningkatan persentase rumah layak huni sebesar 0,437 %; dengan berharap dukungan pendanaan yang layak semoga Dinas PUTRPKP dapat melampaui target kinerja Tahun 2025 sebesar 96% untuk Indikator dimaksud.

Untuk Indikator "Persentase Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman", Kategori layak dan aman untuk sanitasi menggambarkan ketersediaan dan penggunaaan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar Kesehatan, di mana limbah buangan manusia ditangani secara aman untuk mencegah penyakit dan dampak lingkungan, Penanganan secara aman maksudnya fasilitas sanitasi yang hanya digunakan oleh rumah tangga sendiri; dilengkapi dengan kloset leher angsa; memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa tangka septic atau system pengolahan air limbah (IPAL/SPAL); tangka septic harus disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun dan lumpurnya diolah di IPLT dan disambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat(SPALD-T).

Data capaian per akhir Tahun 2024 menunjukkan bahwa target SDGs sebesar 2% sedangkan capaiannya baru 1,7%; di Tahun 2025 ini ternyata indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUTRPKP dengan Target di Tahun I Renstra Dinas atau Target Tahun 2025 sebesar 7%, hal ini menjadi motivasi tambahan Dinas PUTRPKP di mana terjadi peningkatan target yang signifikan sebesar 5% (dari 2% menjadi 7%). Keberadaan terbentuknya UPT. PALD (Pengelolaan Air Lombah Domestik) di Kab. Takalar menjadi harapan Besar Target Kinerja IKU Dinas PUTRPKP ini bisa tercapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) *Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)* adalah Indikator baru dimunculkan di Renstra Periode Tahun 2025-2029 selaras dengan Misi Bupati - Wakil Bupati Takalar 5 Tahun kedepan untuk Peningkatan PAD di Kabupaten Takalar, kilas balik Realisasi PAD di Dinas PUTRPKP Tahun 2024 ada 2 Jenis Retribusi yang dikelola Dinas PUTRPKP yaitu : Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Penyewaan Alat Berat), Target PAD untuk kedua Retribusi tersebut di Tahun 2024 adalah Rp 530.000.000,- sedangkan Capaian Realisasinya sebesar Rp 623.892.565,- atau 117,72%

Di Tahun 2025, Dinas PUTRPKP mengelola 3(tiga) Jenis Retribusi yaitu Retribusi PBG dengan target PAD sebesar Rp 500.000.000,-; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Penyewaan Alat Berat) dengan target PAD sebesar Rp 30.000.000,- dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Retribusi Pengolahan Lumpur Tinja) dengan target PAD : Rp 15.000.000,- untuk Triwulan I 2025 ini Realisasi Rp 281.462.206,- atau 56,29% dari Target PAD Tahun 2025 dan diprediksi Optimis Target bisa tercapai di triwulan II Tahun 2025

2.2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (SPM)

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dinas PUTRPKP Kab. Takalar dalam Urusan Pelayanan Dasar mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mengemban 4(empat) indicator SPM sesuai regulasi yang dimaksud, yaitu (a). Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari; (b). Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik; (c). Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; (d). Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni; berikut ini data capaian SPM Dinas PUTRPKP per Triwulan I Tahun 2025:

Tabel II-7
Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TW.I TA. 2025	CATATAN ANALISA
1	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	98,13%	100,00%	-	Kegiatan masih tahap Perencanaan
2	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,47%	100,00%	-	Kegiatan masih tahap Perencanaan
3	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0,03%	100,00%	0%	TW I masih dalam Tahap Verifikasi di lapangan

4	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0,00%	100,00%	0%	Tidak ada Relokasi dari dampak Program Pemerintah ke Masyarakat

Dari Tabel Pencapaian SPM di atas menggambarkan bahwa capaian di triwulan I Tahun 2025 ini masih minim disebabkan oleh beberapa hal antara lain: Kegiatan yang dilakukan sampai bulan Maret 2025 ini masih dalam tahapan melakukan verifikasi di lapangan terkait objek rumah korban pasca bencana di tahun sebelumnya yang belum mendapatkan intervensi dari Pemerintah; hal lain faktor minimnya pencapaian Persentase Warga yang terkena relokasi dampak Program Pemerintah adalah karena Pemerintah kita tidak melakukan kebijakan yang mengakibatkan warga negaranya harus merasakan relokasi; factor lainnya bersifat umum seperti belum Juknis terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berkenaan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PUTRPKP

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar dengan Perda Pembentukan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah yang masih dipedomani sampai saat ini.

Untuk Kelompok tugas sub substansi dan Nomenklatur sub koordinator pada pelaksanaan tugas sub koordinator pada Dinas PUTRPKP maka sekarang kita memedomani Keputusan Bupati Takalar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. yaitu dalam melaksanakan Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar

Telaahan terhadap kebijakan nasional menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui misi dan program yang terencana, diharapkan indonesia dapat mencapai visi yang telah ditetapkan dan menghadapi tantangan di masa depan. Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional Pada RKP 2025

Tema Pembangunan Nasional pada RKP tahun 2025 adalah " ***Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***" Tema ini difokuskan pada penguatan fondasi transformasi dan menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan diseluruh Indonesia. RKP 2025 juga menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun Rencana Kerja Kementrian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3.1.2 Sasaran Pembangunan Pada RKP tahun 2025

Sasaran pembangunan pada RKP tahun 2025 mencakup berbagai indikator yang berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa sasaran pembangunan yang diharapkan tercapai pada tahun 2025 adalah pertumbuhan ekonomi, menunrunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, Indeks Modal Manusia, dan penurunan intesitas emisi gas rumah kaca.

3.1.2.1 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Pada RKP tahun 2025 prioritas Nasional menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang berkualitas, dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Prioritas nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita. Dan Asta Cita yang terkait dengan urusan pemerintahan adalah Asta Cita 2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enenrgi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru, Asta Cita 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, Asta Cita 8 yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkunga, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas PUTRPKP Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah untuk memberikan arahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan pembangunan sarana, prasarana dan ultilitas publik di Kabupaten Takalar, sehingga akan didapat kejelasan, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Takalar yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, mendorong swadaya dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan bertanggungjawab.

Perubahan Rencana Kerja(Renja) Dinas PUTRPKP Tahun 2025 ini tidak lagi mengacu ke Dokumen Renstra transisi 2023-2026 melainkan sudah mengacu ke Dokumen Renstra periode 2025-2029 sehingga terjadi perubahan pengukuran kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas

3.2.1 Tujuan

Penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi dasar dalam perumusan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Adapun Tujuan Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 adalah "**Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Dasar Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang yang berkelanjutan"**.

3.2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP)

Kabupaten Takalar tahun 2025 adalah untuk mewujudkan Tujuan Strategis tersebut dicapai melalui 4 (empat) Sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur

Sasaran 2: Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran 4: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar,dapat dilihat pada table berikut :

Tabel III- 1
Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas PUTRPKP
Kabupaten Takalar Tahun 2025

NO	RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA 2025		
	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target
1.	Tujuan 1 : Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur Jalan dan Perumahan	Index Daya Saing Infrastruktur Jalan dan Perumahan	76,03%	Tujuan 1: Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Dasar Perumahan, Permukiman Dan Penataan Ruang	1.Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	79,90%
				Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	2. Akses rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	23%
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Layanan KePU-an yang Berbasis Standar Pelayanan Minimal	Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	40%		3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman(%)	7,00%
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Fungsi Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	72,20%			
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten	Persentase Luas Persawahan yang Terlayani Irigasi tersier Kewenangan Kabupaten	85%	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur	4 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,Terjangkau dan	96%

	Sasaran 1.4 : Meningkatny a Kualitas Penyelenggaraan Penataa Ruang			Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Berkelanjutan(%)	
		Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	100%			
	Sasaran 1.5 : Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	45%	Sasaran 1.3 : Meningkatnya Tata Kelola Konerja Pada Dinas PUTRPKP	5. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat(%)	75,00
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%		6. Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman(%)	100%
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Kawasan Perumahan Permukiman yang berkualitas	Persentase peningkatan Pelayanan Infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living		Sasaran 1.4 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Dinas PUTRPKP	7. Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman(%)	100%
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya layanan Perumahan yang berbasis standar Pelayanan Minimal	Indeks kepatuhan terhadap standar Pelayanan Perumahan	100%		8. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman(%)	100%
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%			
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Rumah layak huni Kabupaten	92,86%			
3	Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi pada Dinas PUTRPKP	Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas PUTRPKP	B(60-70)			

	Sasaran 3.1 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas PUTRPKP	Nilai SAKIP Dinas PUTRPKP	70			

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PUTRPKP TAHUN 2025

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2025 berpedoman pada prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Selatan dan program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Takalar dengan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah Kabupaen Takalar yang tertuang dalam RPJMD. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (Pagu Indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan masing Perangkat Daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025- 2029, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan disertai pagunya. Dinas PUTRPKP diharapkan mampu berkontribusi dalam pencapaian misi ke-2 RPJMD periode 2025-2029 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik; pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital dan misi ke-6 yaitu Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, dan pemajuan kebudayaan. Selain itu Dinas PUTRPKP juga menjadi salah SKPD yang berperan dalam pencapaian misi Ke-5 yaitu Memperkuat pertumbuhan ekonomi kreatif dan Inovatif

berbasis digital;

Dinas PUTRPKP diharapkan mampu mengelola 3(tiga) Jenis Retribusi dengan baik dan akuntabel, sehingga mampu berkontribusi untuk peningkatan PAD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel IV-1.

Tabel IV-1
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas PUTRPKP yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan	Rp 8.914.800,-
2	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat laik fungsi bangunan Gedung	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rp 2.481.600
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi(SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung(RTB), Tim Profesi Ahli(TPA), Tim Penilai Teknis(TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp 97.440.250,-
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rp 100.000.000,-
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik(SPALD) setempat	Rp 4.140.067.300,-
			Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik(SPALD)	Rp 150.000.000,-
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rp 0
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan TeknisPenyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 12.553.000,-
			Pembangunan Jalan	Rp 8.034.416.700,-
			Pemeliharaan berkala Jalan	Rp 4.346.374.500,-
			Pembangunan Jembatan	Rp 699.500.000,-
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai(WS) dalam 1(satu) Daerah Kab/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	Rp 2.100.000,-
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnyadi bawah 1000 Ha dalam 1(satu) daerah kab/Kota	Pembangunan Jaringan irigasi Permukaan	Rp 266.950.000,-
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 189.556.000,-

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2025

Program dan kegiatan Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar tahun 2025 adalah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi, Sararan dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Takalar yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, e) Administrasi Umum Perangkat Daerah, f) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, g) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, b) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Penataan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penyelenggaraan Jalan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, b) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

11. Program Pengembangan Perumahan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi

Program Kabupaten/Kota, b) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

12. Program Kawasan Permukiman. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, b) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Tabel IV-2

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.
TAKALAR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**71.975.083.332,00**	**62.732.230.883,00**	**61.135.781.496,00**	**-10.839.301.836,00**							**90.655.864.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**71.975.083.332,00**	**62.732.230.883,00**	**61.135.781.496,00**	**-10.839.301.836,00**							**90.655.864.560,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**68.393.560.332,00**	**52.478.415.283,00**	**53.150.406.396,00**	**-15.243.153.936,00**							**87.615.364.560,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**7.881.424.332,00**	**7.177.121.689,00**	**7.115.597.722,00**	**-493.059.772,00**							**7.388.364.560,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	56.954.000,00	41.787.260,00	11.787.260,00			-	- -	-		339.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	18.614.000,00	18.374.910,00	12.374.910,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	1.108.200,00	-3.891.800,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	8.340.000,00	1.662.300,00	-337.700,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00	2.503.600,00	-496.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	17.000.000,00	15.138.250,00	5.138.250,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.307.045.340,00	6.695.164.289,00	6.719.803.202,00	412.757.862,00			-	- -	-		6.627.464.560,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	6.277.045.340,00	6.666.695.289,00	6.666.821.912,00	389.776.572,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.603.964.560,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.769.000,00	10.768.670,00	768.670,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	7.700.000,00	4.057.600,00	-942.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	4.573.190,00	-5.426.810,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	33.581.830,00	28.581.830,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	20.524.300,00	18.749.760,00	8.749.760,00			-	- -	-		9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	6.324.300,00	6.293.600,00	4.293.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	8.500.000,00	7.422.100,00	6.422.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	5.700.000,00	5.034.060,00	-1.965.940,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	2.600.000,00	1.896.200,00	896.200,00			-	- -	-		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.600.000,00	1.896.200,00	896.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	86.592.800,00	40.075.000,00	35.075.000,00			-	- -	-		42.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	994.800,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	6.100.000,00	4.100.000,00	3.100.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	2.200.000,00	7.040.000,00	6.040.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	76.298.000,00	27.935.000,00	26.935.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			4.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	490.378.992,00	264.871.500,00	264.871.500,00	-225.507.492,00			-	- -	-		345.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	265.678.992,00	37.471.500,00	37.471.500,00	-228.207.492,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Bajeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			295.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	224.700.000,00	227.400.000,00	227.400.000,00	2.700.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Bajeng	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.038.000.000,00	50.414.800,00	28.414.800,00	-1.009.585.200,00			-	- -	-		22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				31 Unit	31 Unit	4.000.000,00	33.000.000,00	19.500.000,00	15.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	1.033.500.000,00	17.414.800,00	8.914.800,00	-1.024.585.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-				-	-	**7.920.379.000,00**	**4.605.854.000,00**	**691.156.000,00**	**904.621.000,00**							**8.825.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.135.000.000,00	70.000.000,00	234.650.000,00	-900.350.000,00			-	- -	-		2.525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				5 KM	5 KM	1.035.000.000,00	0,00	0,00	-1.035.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				5 KM	5 KM	50.000.000,00	0,00	232.550.000,00	182.550.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				5 KM	5 KM	50.000.000,00	70.000.000,00	2.100.000,00	-47.900.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH BANTUAN KEUANGAN	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	6.785.379.000,00	4.535.854.000,00	456.506.000,00	-6.328.873.000,00			-	- -	-		6.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	1 KM	1.050.000.000,00	200.000.000,00	266.950.000,00	-783.050.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	5.720.379.000,00	4.335.854.000,00	189.556.000,00	-5.530.823.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	- -			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																		

			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				1 Lembaga	1 Lembaga	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**2.355.000.000,00**	**549.988.800,00**	**1.794.268.400,00**	**5.245.000.000,00**							**7.600.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.355.000.000,00	549.988.800,00	1.794.268.400,00	-560.731.600,00			-	- -	-		7.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				350 Unit	350 Unit	45.000.000,00	549.988.800,00	520.463.800,00	475.463.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa																		
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1 Desa	1 Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	245.000.000,00	0,00	5.938.000,00	-239.062.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				50 SR	50 SR	2.045.000.000,00	0,00	1.267.866.600,00	-777.133.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**885.000.000,00**							**900.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	-		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	1 Ton/hari	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				1 Ton/hari	1 Ton/hari	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**795.900.000,00**	**4.397.140.000,00**	**4.390.067.300,00**	**404.100.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	795.900.000,00	4.397.140.000,00	4.390.067.300,00	3.594.167.300,00			-	- -	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		

			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	100.900.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-900.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi				1 M³/Hari	1 M³/Hari	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan				1 M³/Hari	1 M³/Hari	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				1 M³/Hari	1 M³/Hari	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa																		
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1 Desa	1 Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				1 Penyelenggara	1 Penyelenggara	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	500.000.000,00	4.147.140.000,00	4.140.067.300,00	3.640.067.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				30 Orang	30 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**285.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**1.301.256.140,00**	**2.065.000.000,00**							**2.350.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	285.000.000,00	1.300.000.000,00	1.301.256.140,00	1.016.256.140,00			-	- -	-		2.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				5000 M	5000 M	255.000.000,00	1.250.000.000,00	1.251.256.140,00	996.256.140,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				3000 Meter	3000 Meter	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																		

			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkungan	5.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	-				-	-	**155.000.000,00**	**15.245.000,00**	**99.921.850,00**	**-148.000.000,00**							**7.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	155.000.000,00	15.245.000,00	99.921.850,00	-55.078.150,00			-	- -	-		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				50 Orang	50 Orang	15.000.000,00	5.000.000,00	2.481.600,00	-12.518.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	10.245.000,00	97.440.250,00	-42.559.750,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	-				-	-	**11.650.000.000,00**	**21.665.179.294,00**	**24.319.011.524,00**	**6.550.000.000,00**							**18.200.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	11.650.000.000,00	21.665.179.294,00	24.319.011.524,00	12.669.011.524,00			-	- -	-		18.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	1 Kawasan	11.650.000.000,00	21.665.179.294,00	24.319.011.524,00	12.669.011.524,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			18.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	-				-	-	**37.090.857.000,00**	**12.739.887.500,00**	**13.092.844.200,00**	**4.039.143.000,00**							**41.130.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	37.090.857.000,00	12.739.887.500,00	13.092.844.200,00	-23.998.012.800,00			-	- -	-		41.130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.500.000,00	12.553.000,00	-7.447.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		

			Panjang Jalan yang Dibangun				8,05 KM	8,05 KM	34.194.161.000,00	10.870.887.500,00	8.034.416.700,00	-26.159.744.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	-	- -			40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	2 KM	500.000.000,00	1.150.000.000,00	4.346.374.500,00	3.846.374.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	1.876.696.000,00	699.500.000,00	699.500.000,00	-1.177.196.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	1 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				-	-	**100.000.000,00**	**25.999.000,00**	**20.095.860,00**	**-88.000.000,00**							**12.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	73.000.000,00	10.017.000,00	8.516.860,00	-64.483.140,00			-	- -	-		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.250.000,00	10.017.000,00	8.516.860,00	-15.733.140,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	50 Orang	48.750.000,00	0,00	0,00	-48.750.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	27.000.000,00	15.982.000,00	11.579.000,00	-15.421.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				8 Paket Pekerjaan	8 Paket Pekerjaan	27.000.000,00	15.982.000,00	11.579.000,00	-15.421.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				-	-	**145.000.000,00**	**2.000.000,00**	**326.187.400,00**	**-142.000.000,00**							**3.000.000,00**	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	145.000.000,00	2.000.000,00	326.187.400,00	181.187.400,00			-	- -	-		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	145.000.000,00	2.000.000,00	326.187.400,00	181.187.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**3.581.523.000,00**	**10.253.815.600,00**	**7.985.375.100,00**	**4.403.852.100,00**							**3.040.500.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**250.750.000,00**	**175.934.600,00**	**344.943.500,00**	**689.750.000,00**							**940.500.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	105.000.000,00	80.004.000,00	60.349.400,00	-44.650.600,00			-	- -	-		77.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			13.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		

			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.002.000,00	26.580.700,00	-13.419.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			18.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.002.000,00	33.768.700,00	-6.231.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			36.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	140.750.000,00	95.930.600,00	284.594.100,00	143.844.100,00			-	- -	-		723.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				8 Unit Rumah	8 Unit Rumah	95.750.000,00	95.930.600,00	272.094.100,00	176.344.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			440.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				7 Unit Rumah	1 Unit Rumah	45.000.000,00	0,00	12.500.000,00	-32.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			282.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		140.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			140.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	-				-	-	**1.224.000.000,00**	**8.416.881.000,00**	**5.177.530.500,00**	**-624.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	10.000.000,00	200.000.000,00	199.752.000,00	189.752.000,00			-	- -	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	200.000.000,00	199.752.000,00	194.752.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	1.214.000.000,00	8.216.881.000,00	4.977.778.500,00	3.763.778.500,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	1.214.000.000,00	8.216.881.000,00	4.977.778.500,00	3.763.778.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH BANTUAN KEUANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	-				-	-	**1.273.000,00**	**0,00**	**0,00**	**398.727.000,00**							**400.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.273.000,00	0,00	0,00	-1.273.000,00			-	- -	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				2 Unit	2 Unit	1.273.000,00	0,00	0,00	-1.273.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**2.105.500.000,00**	**1.661.000.000,00**	**2.462.901.100,00**	**-1.005.500.000,00**						**1.100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	2.105.500.000,00	1.661.000.000,00	2.462.901.100,00	357.401.100,00			- -		-		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				20 Lokasi	20 Lokasi	2.105.500.000,00	1.661.000.000,00	2.462.901.100,00	357.401.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	- -	- -			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H								**71.975.083.332,00**	**62.732.230.883,00**	**61.135.781.496,00**	**-10.839.301.836,00**							**90.655.864.560,00**	

Takalar, 12 Juni 2025,

Mengetahui,

Kepala Dinas PUTRPKP Kab. Takalar,

Kepala Dinas PUTRPKP Kab. Takalar

DRS. ACHMAD RIVAI, M.SI
NIP. 196810121989081001

BUDIAR ROSAL SALEH, S.STP.,M.Adm.Pemb
NIP. 19800520 199810 1 001

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Pagu RKPD Pokok 2025 mengalami penurunan Pagu indikatif ke RKPD Perubahan 2025 yaitu dari Rp 71.975.083.332,- menjadi Rp 61.135.781.496,- atau penurunan pagu sebesar (Rp. 10.839.301.836,-), Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pada RKPD adalah sebagai berikut :

1. Program yang mengalami perubahan anggaran RKPD sbb:
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota dari Rp 7.881.424.332,- menjadi Rp 7.115.597.722,-
   b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dari Rp 7.920.379.000,- menjadi Rp 691.156.000,-
   c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dari Rp 2.355.000.000,- menjadi Rp 1.794.268.400,-
   d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dari Rp 795.000.000,- menjadi Rp 4.390.067.300,-
   e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan Regional, dari. Rp 15.000.000,- menjadi Rp 0
   f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dari Rp 285.000.000,- menjadi Rp 1.301.256.140,-
   g. Program Penataan Bangunan Gedung, dari Rp 155.000.000,- menjadi Rp 99.921.850,-
   h. Program Penataan Bangunan dan lingkungannya, dari Rp 11.650.000.000,- menjadi Rp 24.319.011.524,-
   i. Program Penyelenggaraan Jalan, dari Rp 37.090.857.000,- menjadi Rp 12.739.887.500,-
   j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dari Rp 100.000.000,- menjadi Rp 20.095.860,-
   k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dari Rp 145.000.000,- menjadi Rp 326.187.400,-
   l. Program Pengembangan Perumahan, dari Rp 250.750.000,- menjadi Rp 344.943.500,-
   m. Program Kawasan Permukiman, dari Rp 1.224.000.000,- menjadi Rp 5.177.530.500,-
   n. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dari Rp 1.273.000,- menjadi Rp 0
   o. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dari Rp 2.105.500.000,- menjadi Rp 2.462.901.100,-

Dari Data diatas, Ada 7 Program yang mengalami penurunan Pagu Indikatif yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan Regional
4. Program Penataan Bangunan Gedung

5. Program Penyelenggaraan Jalan
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Sedangkan ada 8 Program yang mengalami Penambahan Pagu Indikatif, yaitu :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penataan Bangunan dan lingkungannya
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2025. Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2025 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun 2025. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas PUTRPKP dapat mempedomani isi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Rencana Kerja Dinas PUTRPKP tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

DINAS KOPERASI,USAHA KECIL MENENGAH,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

RENJA PERUBAHAN 2025



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 tidak terlepas dari Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Serta peningkatan perencanaan pembangunan dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun2025.

Takalar, Juni 2025

KEPALA DINAS

SITTI NI'MAH, SE
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP. 19650831 199203 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang.... 4
1.2 Landasan Hukum.... 5
1.3 Maksud dan Tujuan.... 6
1.3.1 Maksud.... 6
1.3.2 Tujuan.... 7
1.4 Sistematika Penulisan.... 7

BAB II EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TRIWULAN I 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sampai dengan Triwulan I.... 9
2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Terakomodir di APBD 2025.... 16
2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025.... 16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30

3.1 Telaahan Terhadap RPJMN.... 30
3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025.... 30
3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025.... 30
3.1.3 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025.... 30
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025.... 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 36

5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 35
5.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.... 36
5.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.... 41

BAB V 84

PENUTUP 84

A . Catatan Penting.... 84
B. Kaidah Pelaksanaan.... 84
C. Rencana Tindak Lanjut.... 84

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Diskopukmnakertrans Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Diskopkmnakertrans Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Diskopukmnakertrans dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Diskopkmnakertrans Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P)

melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahn Deerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Takalar Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah selaras dengan maksud dan tujuan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan TransmigrasiTahun 2023-2026 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program/kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

a) Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024;
b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP) Tahun 2024;
c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan danberkelanjutan;

Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTakalar..

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sampai dengan Triwulan I
2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Terakomodir di APBD 2025
2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI

3.1 Telaahan Terhadap RPJMN
3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025
3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025
3.1.3 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 35

5.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

5.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan

BAB V

PENUTUP

A . Catatan Penting

B. Kaidah Pelaksanaan

C. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sampai dengan Triwulan I

Dinas koperasi,Usaha Kecil Menengah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan SKPD hasil dari perubahan SKPD sesuai Perbup. Nomor 32 Tahun 2023 dimana sebelumnya merupakan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan,Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 3 urusan,yaitu urusan Koperasi dan UKM,urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,Tahun Anggaran 2025 Dinas koperasi,Usaha Kecil Menengah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar merencanakan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu urusan Penunjang terdiri dari 1 Program,6 Kegiatan,17 Sub Kegiatan.Unsur Perkoperasian dan UKM terdiri dari 3 Program,3 Kegiatan,6 Sub Kegiatan,Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 2 Program,2 Kegiatan,2 Sub Kegiatan,Urusan Transmigrasi terdiri dari 1 Program,1 Kegiatan,1 Sub Kegiatan,dengan alokasi anggaran sebesarRp. 7.227.438.068,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah) atau meningkat dari Rp. 7.145.906.015,00 (Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Belas rupiah)

Secara Keseluruhan Capaian fisik Program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten takalar mencapai 3,31% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 16,28% .Capaian realisasi keuangan tersebut termasuk Kategori Sedang dari target capaian pada akhir triwulan I 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan masih belum mencapai target,dikarenakan sebagian besar anggaran kas untuk belanja langsung direncanakan realisasi mulai triwulan II. Hal ini mengakibatkan adanya program dan kegiatan belum dilaksanakan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja PD Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) sesuai urusan PD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel II-1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Periode Pelaksanaan: s/d Triwulan I Tahun 2025

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun2025) yang Dievaluasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
02	17				Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Tenaga Kerja dan Transmigrasi				7,227,438,068		1,176,328,411		
02	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	6,337,438,068	17	2,764,210,354	15,73	18.50
02	07	01	2.01		Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	25.526.720	25	6.886.100	25	26,98

02	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.006.500	1	3.992.500	33,33	99,65
02	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.073,620	0	0	0	0
02	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.998.000	0	0	0	0
02	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.300	0	0	0	0
02	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.990.300	0	0	0	0
02	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	2.998.000	1	2.893.600	100	96,52
02	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	3.460.000	1	0	25	0
02	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	**6,179.822.348**	12,15	**1.152.413.811**	12,15	18,65
02	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Dokumen	1692	6.159.338.068	208	1.146.228.191	25	26
02	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	18.484.280	3	4.186.800	25	23
02	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	1.998.820	100	100
02	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0
02	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	**7.025.000**	50	**2,240,000**	50	6

02	07	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.025.000	1	397.500	50	6
02	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	**39.531.000**	11,76	**4.014.600**	11,76	10,16
02	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	2	3.664.000	1	1.134.600	50	31
02	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	32	35.887.000	3	2.880.000	9	8
02	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	Persen	100	**9.525.000**	0	**0**	0	0
02	07	01	2.06	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	10	9.525.000	0	0	0	0
02	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	**53.100.000**	4,17	**8.400.000**	4,17	15,82
02	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	60	2.700.000	0	0	0	0
02	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	60	50,400,000	3	8.400.000	5	17
02	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	**22.908.000**	0	**0**	0	0
02	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	20.958.000	0	0	0	0
02	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dokumen	4	1.950.000	0	0	0	0
02	07	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Wilayah Kab./Kota	Persen	100	**15.000.000**	25	**4.214.400**	25	28

02	07	03	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan bagi Pengelola Koperasi	Persen	100	**15.000.000**	25	**4.214.400**	25	28
02	07	03	2.01	04	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	100	15.000.000	25	4.214.400	25	28
02	07	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Persen	100	**111.500.000**	0	**0**	0	0
02	07	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persen	100	**111.500.000**	**0**	**0**	0	0
02	07	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif,Bernilai Tambah,Memiliki Akses Pasar,Akses Pembiayaan,Penguatan Kelembagaan,Penataan Manajemen,Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	UKM	18.250	7.500.000	0	0	0	0
02	07	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	UKM	100	104.000.000	0	0	0	0
02	07	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang diundang dalam Pertemuan dalam rangka Peningkatan Kapasitas UMKM	Persen	100	**566.000.000**	0	**0**	0	0
02	07	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persen	100	**566.000.000**	0	**0**	0	0
02	07	08	2.01	02	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Skala Usahanya	UKM	100	200.000.000	0	0	0	0

02	07	08	2.01	03	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Skala Usahanya	UKM	50	266,000,000	0	0	0	0
02	07	08	2.01	06	Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	UKM	100	100.000.000	0	0	0	0
03	07	03			Program Pelatihan Kerja dan ProduktItas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Berkualitas dan Terampil	Persen	100	**57.500.000**	0	**0**	0	0
03	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persen	100	**57.500.000**	0	**0**	0	0
03	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat PelatihanBerbasis Klaster Kompetensi	Paket	6	57.500.000	0	0	0	0
03	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen	100	**125.000.000**	0	0	0	0
03	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daearah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang Dilayani	Persen	100	**125.000.000**	0	0	0	0
03	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilayani	Dokumen	4	125.000.000	0	0	0	0
03	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	Persen	100	**15.000.000**	0	**0**	0	0
03	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persen	100	**15.000.000**	0	**0**	0	0
03	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi dan Kelembagaannya	Paket	1	15.000.000	0	0	0	0

Sumber Data : Data Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar adalah Penjabaran Rencana Kerja Tahunan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Pelaksana Teknis Urusan Perkoperasian,UKM,Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Terkait dengan hal tersebut,Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar pada Tahun 2025

Anggaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp.7.227.438.068 dengan capaian realisasi fisik sebesar 3,31 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.176.326.411,- atau 16,28 %

Pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 capaian kinerja secara kumulatif sebesar 3,31%,dimana capaian kinerja masih belum mencapai target.

Untuk tahun 2025,berdasarkan progress hingga akhir triwulan I 2025,Capaian Kinerja tercapai 3,31%,Capaian anggaran tercapai 16,28%,yang didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan ASN.

Pencapaian target kinerja akan ditunjang oleh Perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran kas serta kesiapan sumberdaya manusia dalam pelaksanaannya,akan tetapi di sisi lain kegiatan tidak mencapai target,hal ini disebabkan karena adanya mayoritas Kegiatan belum dilaksanakan karena belum ada kesesuaian dengan anggaran kas yang telah ditetapkan sebelumnya/jadwal pencairan belum tercapai

Implikasi yang timbul dari capaian realisasi renja terhadap capaian renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah terwujudnya progres yang sesuai dengan target tahunan yang direncanakan dalam renstra.

Walaupun secara kumulatif,capaian belum sesuai target,diharapkan pad akhir tahun anggaran akan mencapai target yang telah ditetapkan,walau pun demikian tetap diperlukan perencanaan anggaran serta penyiapan sumberdaya yang kompeten.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi .Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja dan pencapaian renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan tahun berjalan .

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	13	27	7	13	29
TOTAL		**7**	**13**	**27**	**7**	**13**	**29**

Sumber data : Monev TW I Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan Informasi tentang Jumlah Program,Kegiatan,SubKegiatan pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2025,dimana terdapat 7 Program,13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan Jumlah Indikator yang terdiri dari 8 Indikator Program,13 Indikator Kegiatan,serta 29 Indikator Sub Kegiatan.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7,227,438,068	1,176,328,411	3,31	16,28
TOTAL		**7,227,438,068**	**1,176,328,411**	**3,31**	**16,28**

Sumbe data : Monev TW I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada tahun anggaran 2025, pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi kab.Takalar dianggarkan sebesar Rp. 7,227,438,068,hingga akhir Triwulan I terealisasi sebesar Rp. 1,176,328,411 dengan capaian Kinerja 3,31 Persen serta capaian anggaran 16,28 persen,realisasi anggaran mayoritas dari belanja pegawai,berupa gaji dan tunjangan

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hingga akhir Triwulan I,dari total anggaran sebesar Rp. 7,227,438,068,terealisasi sebesar Rp. 1,176,328,411 atau 16,28 persen serta capaian kinerja sebesar 3,31 persen,atau dapat dikatakan bahwa pada akhir Triwulan I,capaian kinerja pendanaan tergolong **sedang** (≤20%) Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan menggunakan

kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 7 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 5 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program (realisasi >10 - 20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 1 program (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dijelaskan bahwa terdapat 13 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 8 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwulan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang (>10 – 20) yang berada dalam kategori sedang sebanyak 2 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 3 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 27 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 19 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori sedang,terdapat 1 sub kegiatan, dan 7 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	5	1	1	13	8	2	3	27	19	1	7
TOTAL		**7**	**5**	**1**	**1**	**13**	8	2	3	**27**	**19**	**1**	**7**

Sumber Data : Capaian Monev. Triwulan I 2025

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hingga akhir Triwulan I,dari total anggaran sebesar Rp. 7,227,438,068,terealisasi sebesar Rp. 1,176,328,411 atau 16,28 persen serta capaian kinerja sebesar 3,31 persen,atau dapat dikatakan bahwa pada akhir Triwulan I,capaian kinerja pendanaan tergolong **rendah** (≤10%) Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi kinerja pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada level program pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 7 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 5 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program (realisasi >10 - 20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 1 program (realisasi diatas 20 persen).

1. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pada level kegiatan pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dijelaskan bahwa terdapat 13 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 8 kegiatan yang realisasi kinerja hingga triwulan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang (>10 – 20) yang berada dalam kategori sedang sebanyak 2 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 3 kegiatan.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 27 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 19 sub kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori sedang, tidak terdapat sub kegiatan dan 8 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi kinerjanya tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi kinerja lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Uraian capaian kinerja dapat dilihat pada table II-5 berikut :

Tabel II-5

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	5	1	1	13	8	2	3	27	19	0	8
TOTAL		**7**	**5**	**1**	**1**	**13**	**8**	**2**	**3**	**27**	**19**	**0**	**8**

Sumber Data : Capaian Monev. Triwulan I 202

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD (IKU)

2.2.1. **Indikator Kinerja Utama**

Tabel II-6

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Tw. I	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase koperasi Aktif	75%	11,91 %	Persentase koperasi yang berkualitas	*20,38 %*	*22,42 %*	*24,66 %*	-	*22,42 %*	*24,66 %*	
2	Jumlah Usaha Mikro yang mencapai Peningkatan Volume dan Aset Usaha	37.405	3.233	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	25%	50%	75%		50%	75%	
3	Jumlah Usaha Mikro Baru	37.405	1.163	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja	*65%*	*70%*	*70%*		*70%*	*70%*	
4	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	50.326.914	50.326.914	Persentase Peningkatan UMKM dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	3,14 %	3,24 %	3,34 %		3,24 %	3,34 %	
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100%	0,09%	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	22,42%	24,66%	27,12%		24,66%	27,12%	
6	Persentase Tenaga Kerja Ditempatkan	80%	4,24%	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	52.975.699	55.623.433	58.404.605		55.623.433	58.404.605	
7	Persentase Masyarakat	48,2	48,2								

	Transmigran yang Hidup Mandiri	%	%									
8	Nilai Sakip Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BB	BB	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	*70,1(BB)*	*70,5(BB)*	*71(BB)*		*70,5(BB)*	*71(BB)*		
				Persentase literasi digital pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	*100 %*	*100 %*	*100 %*		*100 %*	*100 %*		

Sumber Data : Capaian Monev. Tw I 2025

Berdasarkan table II-6 diatas,dapat diuraikan sebagaiberikut :

A. Target dan Capaian masing-masing Indikator Tahun 2024 :

1. Persentase Koperasi Aktif

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 75%,dari target tersebut hingga akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 11%,besaran capaian ini merupakan jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan untuk tahun buku 2024,yaitu sebanyak 28 Koperasi dari jumlah keseluruhan koperasi di lingkup Kabupaten Takalar sebanyak 257 unit Koperasi,adapun target tidak tercapai karena tingkat kesadaran berkoperasi masyarakat yang masih harus ditingkatkan,selain factor ekonomi secara makro yang kurang kondusif,dari kondisi capaian yang masih rendah,akan diupayakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesadaran kesadaran berkoperasi.

2. Jumlah Usaha Mikro yang mencapai Peningkatan Volume dan Aset Usaha

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 37.405 UKM atau 100%,dari target tersebut hingga akhir tahun 2024 terealisasi sebanyak 3233 atau 8,43%,besaran capaian ini merupakan jumlah UKM skala Mikro yang meningkat jumlah asset dan usaha terealisasi dari jumlah keseluruhan sebanyak 37.405 UKM kurangnya pencapaian target tersebut disebabkan situasi perekonomian yang kurang kondusif.

3. Jumlah Usaha Mikro Baru

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%,dari target tersebut hingga akhir tahun 2024 terealisasi sebanyak 1163 usaha mikro atau 3,11%,besaran capaian ini merupakan jumlah UKM skala Mikro yang memiliki legalitas berupa Nomor Induk Berusaha sebanyak 1163 UKM atau 3,11% yang merupakan realisasi dari jumlah keseluruhan sebanyak 37.405 UKM,kurangnya pencapaian target tersebut disebabkan situasi perekonomian yang kurang kondusif.

4. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%,dari target tersebut hingga akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 0,09%,besaran capaian ini merupakan jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2024 sebanyak 135 orang dari jumlah keseluruhan tenaga kerja

sebanyak 147.857 orang,masih rendahnya pencapaian target tersebut disebabkan kurangnya dukungan anggaran pelaksanaan pada tahun anggaran 2024,olehnya pada tahun anggaran berikutnya akan diupayakan kecukupan anggaran.

5. Persentase Tenaga Kerja Ditempatkan

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%,dari target tersebut hingga akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 4,24%,besaran capaian ini merupakan jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2024 sebanyak 15 orang dari jumlah keseluruhan tenaga kerja sebanyak 354 yang terdaftar,masih rendahnya pencapaian target tersebut disebabkan kurangnya daya serap dunia usaha terkait kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi baik pencari kerja maupun tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan,olehnya pada tahun anggaran berikutnya akan diupayakan kecukupan anggaran pelatihan berbasis kompetensi pada lingkup Dinas maupun upaya kerjasama dengan lembaga pelatihan lainnya serta upaya keikutsertaan pada kegiatan-kegiatan terkait peluang kerja,misalnya job fair.

6. Persentase Transmigran Kelembagaan untuk Hidup Mandiri

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 48,2%,dari target tersebut hingga akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 48,2% atau 100% dari target,besaran capaian ini merupakan jumlah transmigran yang dibina pada 1 Satuan Permukiman transmigrasi yang berlokasi di UPT. Tanakeke

7. Nilai Sakip Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2024 adalah predikat BB,dari target tersebut pada tahun 2024 Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapatkan predikat BB atau 100% dari target.

B. Target dan Capaian masing-masing Indikator Tahun 2025 :

1. Persentase Koperasi yang Berkualitas

   Kualitas koperasi salah satunya diukur dari pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi. Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 20,30%. Namun, hingga triwulan I Tahun 2025, capaian indicator ini masih belum dapat diukur, karena belum ada koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

2. Persentase UMKM yang Terdigitalisasi

   Perkembangan teknologi informasi yang begitu massif saat ini, menjadikan hal tersebut sebagai kebutuhan dan tolak ukur kemajuan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek diharapkan dapat mempermudah aktivitas dengan biaya yang relative murah. Begitu pula pemanfaatannya pada sector Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dimana digitalisasi dapat dilakukan pada setiap transaksi jual beli dan aktivitas pemasaran misalnya melalui marketplace. Sehingga untuk mengukur seberapa maju UMKM, dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi (digitalisasi) dalam setiap aktivitas UMKM tersebut. Untuk indicator ini, target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 25% atau sebanyak 9.351 UMKM dari total 37.405 UMKM yang terdaftar hingga akhir tahun 2024.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

   Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPD) Takalar pada Buku Takalar Dalam Angka Tahun 2025, bahwa pada tahun 2024, dari 238.637 jiwa penduduk usia kerja di Kabupaten Takalar, 153.763 jiwa merupakan angkatan kerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Takalar sebesar 64,43 persen, dengan rincian 147.857 jiwa (96,16 persen) dengan status bekerja dan 5.906 jiwa (3,84 persen) merupakan pengangguran terbuka. Sedangkan untuk target capaian yang diharapkan dari indicator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 65%

4. Persentase Peningkatan UMKM dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil

   Usaha mikro adalah usaha dengan aset hingga Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan omzet tahunan hingga Rp.300.000.000,-,persentase peningkatan UMKM adalah persentase peningkatan Usaha mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil,adapun usaha kecil adalah suatu unit usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan,yang memiliki

aset antara Rp.50.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- diluar tanah dan bangunan serta memiliki omzet tahunan antara Rp.300.000.000,- hingga Rp.2.500.000.000,- Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 3,14%,dari 37.405 usaha yang ada di lingkup Kabupaten Takalar,dari target tersebut hingga akhir triwulan I tahun 2025 realisasi belum dapat diukur, disebabkan kegiatan yang terkait dengan indicator ini belum terlaksana karena menyesuaikan dengan rencana kas yang telah ditetapkan sebelumnya,pada akhir tahun diharapkan capaian akan 100%

5. Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas

   Koperasi adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya Koperasi berkualitas adalah yang terkelola dengan baik,yang salah satu indikatornya adalah yang secara rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan,persentase peningkatan koperasi yang berkualitas adalah rasio peningkatan jumlah koperasi berkualitas dari tahun ke tahun, Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 22,42% dari keseluruhan Koperasi sebanyak 368 unit koperasi,dari target tersebut hingga akhir triwulan I tahun 2025 realisasi masih belum dapat diukur, disebabkan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan sebagai tolok ukur koperasi berkualitas,belum terlaksana.

6. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

   Produktifitas tenaga kerja adalah rata-rata nilai PDRB yang dihasilkan seorang tenaga kerja, tingkat produktifitas tenaga adalah besaran nilai dalam satuan rupiah atau jumlah unit output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja dalam satuan waktu tertentu,Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.52.975.699.(per Tenaga Kerja/Tahun),dari target tersebut hingga akhir triwulan I tahun 2025 realisasi belum diukur,belum mencapai target disebabkan kegiatan yang terkait indicator ini belum terlaksana hingga akhir triwulan I 2025,pada akhir tahun diharapkan capaian akan 100%

7. Nilai Sakip Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

   Nilai Sakip adalah nilai hasil evaluasi kinerja suatu perangkat daerah,yang diukur oleh Inspektorat Daerah yang menunjukkan sejauh mana capaian kinerja suatu perangkat daerah dalam satu tahun anggaran,Target capaian yang diharapkan pada

tahun 2025 adalah 70,1 (BB),dari target tersebut pada tahun 2025 Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan memperoleh predikat BB (70)

8. Persentase literasi digital pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 100%,dari target tersebut hingga akhir triwulan I tahun 2025 realisasi belum dapat diukur,besaran capaian merupakan rata-rata kemampuan tiap aparatur di lingkup Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengakses produk-produk digital

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.1 Telaahan Terhadap RPJMN

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.3 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk

menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai berikut:

a. Tujuan

T1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM, meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan pengelolaan wilayah transmigrasi

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya pertumbuhan UMKM dari Usaha mikro menjadi usaha kecil
b. Meningkatnya kualitas layanan koperasi
c. Meningkanya kualitas tenaga kerja
d. Meningkatnya tata kelola kinerja pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 (Pokok dan Perubahan)

RENJA POKOK TAHUN 2025(Renstra PD 2023-2026)			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025(Renstra 2025-2029)		
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
T4.Meningkatnya tata kelola Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	T1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM, meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan pengelolaan wilayah transmigrasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	20,30%
S1.Meningkatnya tata kelola Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Sakip Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BB		Persentase UMKM yang terdigitalisasi	25%
T1.Meningkatnya kualitas koperasi dan produktifitas UKM	Persentase koperasi yang berkualitas	17%		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64%
	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	0,015%	S1.Meningkatnya pertumbuhan UMKM dari Usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase peningkatan UMKM dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	3,14%
S1.Meningkatnya keaktifan koperasi	Persentase koperasi aktif	75%	S2. Meningkatnya kualitas layanan koperasi	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas	22,42%

S2.Meningkatnya volume usaha dan asset usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang mencapai peningkatan volume & asset usaha	150	S3. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	52.975.699
	Jumlah usaha mikro baru	32,463	S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat Pada Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70,1 (BB)
T2.Peningkatan kesempatan kerja	Tingkat produktifitas tenaga kerja	23%		Tingkat Capaian Literasi Digital ASN pada Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%
S1.Berkurangnya masyarakat pengangguran	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	100%			
	Persentase tenaga kerja ditempatkan	85%			

T3.Peningkatan masyarakat transmigrasi yang mandiri	Persentase masyarakat transmigran yang mampu hidup mandiri	0,05%			
S1.Meningkatnya kualitas pembinaan transmigran	Persentase kelembagaan transmigrasi untuk hidup mandiri	48,2%			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

5.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital dan Prioritas Daerah – 2 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan,industrialisasi agromaritim,serta hilirisasi pertanian yang didukung BUMD,BUMDes,UKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	47.090.700
2	PROGRAM PENEMPATAN	Pelayanan antar Kerja di Daerah	Pelayanan antar Kerja	69.936.070

	TENAGA KERJA	Kabupaten/Kota		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.006.500
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.623.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.827.900
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.896.200
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.886.200
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.998.000
			Evaluasi Kinerja	3.460.000

			Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.159.338.068
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.444.790
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.849.300
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.463.900
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.969.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.725.000

		Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.700.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.400.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.958.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.950.000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	32.215.600

		Kabupaten/ Kota		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	108.660.250
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	3.855.380
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	54.629.620
	PROGRAM PENGEMBANGAN	Pengembangan Usaha Mikro	Pengembangan Usaha Mikro	197.859.300

	UMKM	dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	266.000.000
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	68.720.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	7.463.100

5.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan

Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 dengan total pagu Rp.7.176.925.878,- (Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TAKALAR

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	KPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	8	19	20	21
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							7,309,503,755.00	7,236,193,802.00	7,176,925,878.00	-132,577,877.00							8,459,000,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7,289,503,755.00	7,221,193,802.00	7,169,462,778.00	-120,040,977.00							8,389,000,000.00	
	2.07	URUSAN PEMERIN							27,564,000.00		117,026,770.00	89,462,770.00							90,000,000.00	

		TAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**100%**	**0**	**0**	**18.6 %**	**18.6 %**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**						100%	**20,000,000.00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase Dokumen Rencana dan Tenaga Kerja Yang Disusun*	100%	0	0	100 %	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	100%	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																	

			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	4	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		1	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi**	**100%**	**83%**	**17%**	**100%**	**100%**	**5,000,000.00**	**57,500,000.00**	**47,090,700.00**	**25,000,000.00**						**120%**	**30,000,000.00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi*	100%	83%	17%	100%	100%	5,000,000.00	57,500,000.00	47,090,700.00	42,090,700.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penu	asyarakat	120%	30,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA

																runan Kesenjangan Sosial Ekonomi				KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	24	20	4	80 Orang	80 Orang	5,000,000.00	57,500,000.00	47,090,700.00	42,090,700.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		4	30,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan**	**100%**	0	20%	**20%**	**20%**	**22,564,000.00**	**125,000,000.00**	**69,936,070.00**	**7,436,000.00**						20%	**30,000,000.00**	

		TENAGA KERJA	**(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota**																	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelayanan antar kerja daerah*	100%	0	20 %	100 %	100 %	22,564,000.00	125,000,000.00	69,936,070.00	47,372,070.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	20 %	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2500	0	500	1000 Orang	1000 Orang	22,564,000.00	125,000,000.00	69,936,070.00	47,372,070.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	RETRIBUSI DAERAH - LRA LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penu		500	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA

														HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		runan Kesenjangan Sosial Ekonomi				KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*	1	0	0	100 %	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	0	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjan		0	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRAN

															gan Sosial Ekonomi					SMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pekerja Migran yang ditempatkan di Daerah Kabupaten Kota*	1	0	0	100 %	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	0	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1	0	0	50 Orang	50 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosi		0	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

																al Ekonomi				
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	100%	0	0	**20.47 %**	**20.47 %**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**						0	**10,000,000.00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaa	-	0	0	0	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosi	erusahaan	0	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

		n yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota														al Ekonomi				
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1000	0	0	1500 Laporan	1500 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		0	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOP**							**7,261,939,755.00**	**7,038,693,802.00**	**7,052,436,008.00**	**-209,503,747.00**							**8,299,000,000.00**	

		ERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**22,18 %**	**22,18%**	**100 %**	**100 %**	**6,397,818,875.00**	**6,346,193,802.00**	**6,320,495,858.00**	**1,401,181,125.00**						25 %	**7,799,000,000.00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Pelaksanaan Perenca*	24,44 %	24,44 %	24,44%	100 %	100 %	21,576,720.00	25,526,720.00	24,697,800.00	3,121,080.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola	Persentase Dokumen Perencanaan	25 %	45,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			naan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	4,006,500.00	4,006,500.00	4,006,500.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerint		2	9,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

																ahan dan Pela yana n Publi k				
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	4,113,620.00	7,073,620.00	6,623,000.00	2,509,380.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	2,998,000.00	2,998,000.00	2,827,900.00	-170,100.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,300.00	2,000,300.00	1,896,200.00	-104,100.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN

																6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,300.00	2,990,300.00	2,886,200.00	885,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1	1	1 Laporan	1 Laporan	2,998,000.00	2,998,000.00	2,998,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	4	4	4 Laporan	4 Laporan	3,460,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pela		4	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENA

																yanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				GA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang mendapat gaji dan Tunjangan Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%	25%	25%	100%	100%	6,138,470,260.00	6,188,578,082.00	6,176,782,858.00	38,312,598.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Dokumen Keuangan	25%	7,061,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3600	908	908	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6,119,726,860.00	6,168,093,802.00	6,159,338,068.00	39,611,208.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		908	7,000,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	12	12	12 Dokumen	12 Dokumen	16,743,400.00	18,484,280.00	15,444,790.00	-1,298,610.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pela		12	55,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENA

																yanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				GA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	1	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pela		1	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

																yanan Publik				
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Persentase Laporan Barang Milik Daerah Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah*	100%	25%	25%	100%	100%	2,500,000.00	7,025,000.00	5,849,300.00	3,349,300.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	25%	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	2	2	4 Laporan	4 Laporan	2,500,000.00	7,025,000.00	5,849,300.00	3,349,300.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas dan ikut pelatihan Persentase ASN yang mendapatkan pakaian dinas dan ikut pelatihan*	100%	0	0	100 %	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan	ASN	0	57,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah													Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80	0	0	60 Paket	60 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	35,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	0	0	57 Orang	57 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	22,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenu*	100%	6,81%	25 %	100 %	100 %	39,619,000.00	39,531,000.00	22,432,900.00	-17,186,100.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan	ASN	25 %	110,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			han administrasi umum perangkat daerah													Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	3	1 Paket	1 Paket	3,644,000.00	3,644,000.00	3,463,900.00	-180,100.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470	32	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	35,975,000.00	35,887,000.00	18,969,000.00	-17,006,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		120	90,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan Persentase Barang Milik Daerah Yang Diadakan Persentase pemenuhan*	100%	0	33 %	100 %	100 %	9,525,000.00	9,525,000.00	14,725,000.00	5,200,000.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan	Dokumen Pengadaan Barang	33 %	243,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah													Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	0	2	2 Unit	2 Unit	9,525,000.00	9,525,000.00	14,725,000.00	5,200,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2	23,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	220,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunja*	100%	25 %	25 %	100 %	100 %	163,219,895.00	53,100,000.00	53,100,000.00	-110,119,895.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan	Dokumen Jasa Tagihan Listrik, Air, Internet, dan Jasa Tenaga Kantor	25 %	170,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			ng urusan pemerintah daerah Persentase Rekening yang terbayarkan,Persentase petugas kebersihan yang bekerja													Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12 Laporan	12 Laporan	112,819,895.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-110,119,895.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12	115,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	12	12 Laporan	12 Laporan	50,400,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12	55,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daer	*Persentase kendaraan dinas yang dipeliharaa Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100%	25%	0	100%	100%	22,908,000.00	22,908,000.00	22,908,000.00	0.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	20%	107,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN

		ah	*Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*													6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	12	0	4 Unit	4 Unit	20,958,000.00	20,958,000.00	20,958,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4	25,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	0	0	4 Unit	4 Unit	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4	22,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	0	1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pela		1	60,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENA

																yanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				GA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota**	**100 %**	**15,56 %**	**34 %**	**100 %**	**100 %**	**0.00**	**0.00**	**32,215,600.00**	**20,000,000.00**						**37 %**	**20,000,000.00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan	*Persentase pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi*	100%	15,56 %	34 %	100 %	100 %	0.00	0.00	32,215,600.00	32,215,600.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4.	Lembaga Koperasi	37 %	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENA

		Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota														Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi				GA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	270 unit	42 unit	92	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	0.00	0.00	32,215,600.00	32,215,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		100	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase koperasi yang bersertifikat kompotensi**	**100%**	**0**	**0**	**10026%%**	**10026%%**	**20,064,000.00**	**15,000,000.00**	**108,660,250.00**	**9,936,000.00**						**100%**	**30,000,000.00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam	*Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Bagi Anggota Koperasi ,UMKM Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan latihan bagi*	100%	0	0	100%	100%	20,064,000.00	15,000,000.00	108,660,250.00	88,596,250.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosi	Lembaga Koperasi dan Masyarakat	100%	30,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

		Daerah Kabupaten /Kota	*pengelola koperasi*													al Ekonomi				
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 org	0	0	200 Orang	200 Orang	20,064,000.00	15,000,000.00	108,660,250.00	88,596,250.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		100	30,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA**	**Persentase usaha mikro menjadi wirausaha Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**	**100 %**	**0,38%**	**0,38 %**	**52.795 %**	**52.795 %**	**17,500,000.00**	**111,500,000.00**	**58,485,000.00**	**132,500,000.00**						0,38 %	**150,000,000.00**	

		MIKRO (UMKM)																		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi Kemitraan, Kemudahan Perizinan,dan Pengembangan Usaha Mikro*	100%	0,38%	0,38 %	100 % 5 %	100 % 5 %	17,500,000.00	111,500,000.00	58,485,000.00	40,985,000.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	0,38 %	150,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		

			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	9250	50 unit	50 unit	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	5,000,000.00	7,500,000.00	3,855,380.00	-1,144,620.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		50	50,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	500 unit	300 unit	300 unit	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	12,500,000.00	104,000,000.00	54,629,620.00	42,129,620.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		300	100,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase jumah usaha yang diinput kedalam sistem ODS Persentase usaha mikro naik kelas**	**100 %**	**20 %**	**12 %**	**10048.79 %**	**10048.79 %**	**826,556,880.00**	**566,000,000.00**	**532,579,300.00**	**-526,556,880.00**						**12 %**	**300,000,000.00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase UKM yang diundang dalam pertemuan peningakatan kapasitas UMKM Persentase Usaha Mikro Yang meningkat menjadi Usaha kecil*	100%	20 %	12 %	0.5 % 100 %	0.5 % 100 %	826,556,880.00	566,000,000.00	532,579,300.00	-293,977,580.00			-	- -	asyarakat	12 %	300,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 unit	300 unit	100	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	513,278,440.00	200,000,000.00	197,859,300.00	-315,419,140.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPIS	-	- -		100	100,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENA

														AHKAN DANA BAGI HASIL (DBH)						GA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																		
			Jumlah yang Difasilitasi	100 org	0	50	100 Orang	100 Orang	100,000,000.00	266,000,000.00	266,000,000.00	166,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		50	100,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		

			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 unit	0	134	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	213,278,440.00	100,000,000.00	68,720,000.00	-144,558,440.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		134	100,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20,000,000.00**	**15,000,000.00**	**7,463,100.00**	**-12,536,900.00**							**70,000,000.00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**20,000,000.00**	**15,000,000.00**	**7,463,100.00**	**-12,536,900.00**							**70,000,000.00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASA**	**Persentase Bangunan penduduk Yang Berasal Dari daerah**	**100 %**	**0**	**0**	**20 %**	**20 %**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**						**0**	**50,000,000.00**	

		N TRANSMIGRASI	**Kabupaten/Kota**																	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penataan Persebaran penduduk Yang Berasal Dari daerah Kabupaten/Kota*	100%	0	0	100 %	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	0	50,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 KK	0	0	50 Kepala Keluarga	50 Kepala Keluarga	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekon		0	50,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

																omi				
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas**	**100%**	**25%**	**25%**	**23%**	**23%**	**20,000,000.00**	**15,000,000.00**	**7,463,100.00**	**0.00**						**25%**	**20,000,000.00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Persentase Pengembangan Satuan pemukiman Pada Tahap Kemandirian*	100%	25%	25%	100%	100%	20,000,000.00	15,000,000.00	7,463,100.00	-12,536,900.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	25%	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		

			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	4 SP	1 SP	1 SP	1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	20,000,000.00	15,000,000.00	7,463,100.00	-12,536,900.00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		1	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**7,309,503,755.00**	**7,236,193,802.00**	**7,176,925,878.00**	**-20,817,255,718.00**							**8,459,000,000.00**	

Sumber Data : RKPD Perubahan 2025

BAB V
PENUTUP

A . Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi , ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :

a. Melaksnakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

4. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

PEMERINTAH
KABUPATEN TAKALAR

PERUBAHAN RENJA
TAHUN 2025
KECAMATAN GALESONG SELATAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan. Renja Perubahan ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Perubahan Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing–masing Bagian/Seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan.

Kami menyadari, Perubahan Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Perubahan Renja ini, semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen, serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dalam melaksanakan Tugas Sebagai Abdi Negara.

Takalar, 11 Juni 2025

Camat Galesong Selatan

AMRAN T , S.Sos
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 197504142005021005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL V

DAFTAR GAMBAR VI

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-3

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.3.1 Maksud I-4

1.3.2 Tujuan I-4

1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GALESONG SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Selatan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-1

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Laporan, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Kecamatan Galesong Selatan 2025 yang Terakomodir di APBD 2025 ..... II-11

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025 ..... II-11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Galesong Selatan II-13

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) II-14

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) II-17

2.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-17

2.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) II-17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GALESONG SELATAN III-1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Galesong Selatan III-2

3.2.1 Tujuan III-2

3.2.2 Sasaran III-2

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GALESONG SELATAN V-1

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-1

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Galesong Selatan..... IV-2

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR PERIODE PELAKSANAAN : SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025..... I-2
Tabel II-2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025.....II-11
Tabel II-3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Hingga Triwulan I Tahun 2025.....II-11
Tabel II-4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Triwulan I Tahun 2025.....II-13
Tabel II-6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.....II-15

Tabel III-1 Kebijakan Nasional (Prioritas Nasional) Dalam RKP Tahun 2025.....III-2
Tabel III-3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar...III-3
Tabel IV-1 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Tahun 2025.....IV-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Renja Kecamatan Galesong Selatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Selatan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Galesong Selatan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Gambar I-1
Hubungan Renja Kecamatan Galesong Selatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

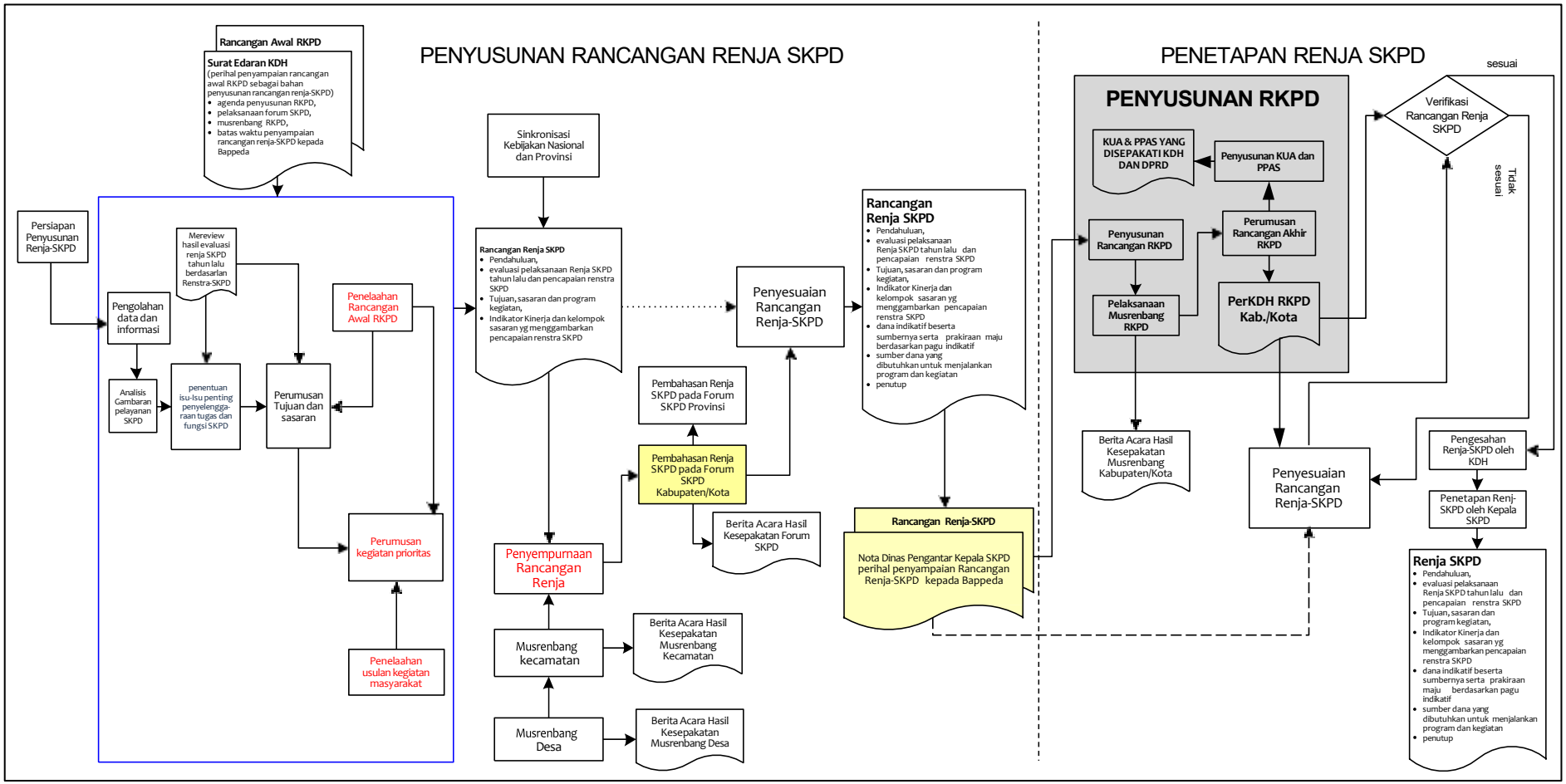

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Galesong Selatan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra kantor Kecamatan Galesong Selatan ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi Perubahan APBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Kantor Kecamatan Galesong Selatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Galesong Selatan adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Galesong Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Selatan Sampai Triwulan I Tahun 2025, memuat tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan I (Tahun 2025) sesuai dengan renstra dan tupoksi OPD, dan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Galesong Selatan, memuat tentang tujuan, sasaran program dan kegiatan berdasarkan renstra dan tupoksi Kecamatan Galesong Selatan khusus untuk tahun 2025.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Selatan, berisi tentang daftar program, kegiatan

dan sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dan dan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan perubahan renja Kecamatan Galesong Selatan.

BAB V Penutup, Bab ini berisikan bahasan tentang ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GALESONG SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Selatan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Kecamatan Galesong Selatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Selatan sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Periode Pelaksanaan 2025.

Tabel II-1
FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA
KECAMATAN GALESONG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR
PERIODE PELAKSANAAN : SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3				4	5	8		12		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
		7				**URUSAN KEWILAYAHAN**											
		7	**01**			**KECAMATAN GALESONG SELATAN**		100,0%	**1.722.482.120**	3,84%	**294.767.663**	4,39%	**294.767.663**	4,39%	17,11 %		
		7	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**######**	**1.700.890.120**	**19,18 %**	**294.767.663**	**21,96 %**	**294.767.663**	**21,96 %**	**17,33 %**	**KECAMATAN GALESONG SELATAN**	
		7	01	01	2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	100,00%	15.000.000	60,00 %	2.194.000	60,00 %	2.194.000	60,00%	14,63 %		

		7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.000.000	1	808.000	1	808.000	100,00 %	26,93 %		
		7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3.000.000	1	897.000	1	897.000	100,00 %	29,90 %		
		7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	3.000.000	1	489.000	1	489.000	100,00 %	16,30 %		

								Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**60,00 %**	**14,63 %**		
Predikat Kinerja																**R**	**SR**		
	Terpenuhinya dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	01	1	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik**	100,00%	1.579.928.130	13,40 %	282.767.663	13,40 %	282.767.663	13,40%	17,90 %		
		7	01	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji	224	1.140.678.666	56	282.767.663	56	282.767.663	25,00%	24,79 %		
								Jumlah Pegawai yang Menerima TPP	192	431.209.464	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
								Jumlah ASN yang menerima Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2	8.040.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**8,33%**	**8,26%**		
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**		
1		7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah yang baik**	100,00%	3.000.000	25,00 %	682.000	25,00 %	682.000	25%	23%		

		7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	3.000.000	1	682.000	1	682.000	25,00%	22,73 %		
															25,00 %	**22,73 %**		
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**		
	Terpenuhinya dukungan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	01	01	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Adminstrasi Perkantoran**	100,00%	40.005.990	0%	5.365.000	0%	5.365.000	0%	13%		
		1	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	13.714.000	1	5.365.000	1	5.365.000	25,00%	39,12 %		
		1	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5.323	2.071.990	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan Perbulan	12	1.560.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi/kalirapat	92	22.660.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**6,25%**	**9,78%**		
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**		
	S6 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja	1	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan Barang milik daerah penunjang**	100,00%	16.131.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%		

	pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan							**urusan Pemerintahan**										
		1	01	01	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	16.131.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**		
		1	01	01	2.08		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100,00%	22.554.000	16,67 %	3.759.000	16,67 %	3.759.000	16,67%	16,67 %		
		1	01	01	2.08	02	Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi (wifi)	12	4.554.000	2	759.000	2	759.000	16,67%	16,67 %		
		1	01	01	2.08	04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor	36	18.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	16,67%	16,67 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**16,67 %**	**16,67 %**		
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**		
		1	01	1	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah barang yang dipelihara**	100,00%	24.271.000	0,00%	-	16,67 %	-	17%	0%		
		1	01	01	2,09	02	Penyedia Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara	12	24.271.000	-	-	2	-	16,67%	0,00%		

							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)								**16,67 %**	**0,00%**		
							Predikat Kinerja								**SR**	**SR**		
							Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)								**22,15 %**	**12,01 %**		
							Predikat Kinerja								**SR**	**SR**		
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																		
Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.																		
Faktor penghambat: kurangnya ketersediaan SDM pelaksana pada sub bagian mempengaruhi target pencapaian kinerja tepat waktu																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																		
		7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase terpenuhinya Pelayanan Public)**	**######**	**4.812.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**KECAMATAN GALESONG SELATAN**	
		1	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan**	100,00%	2.654.700	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%		
		1	01	02	2.02	02	**Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan**	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah	4	2.654.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%		

								Kecamatan										
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**0,00%**	**0,00%**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**	
		1	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan**	100,00%	2.157.300	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%		
		1	01	02	2.04	01	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	4	2.157.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**0,00%**	**0,00%**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																**0,00%**	**0,00%**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**	
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																		
Faktor penghambat: : Masih ada sub Kegiatan yang tidak bisa terealisasi Anggarannya, dikarenakan Sub Kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan																		
Faktor penghambat: kurangnya ketersediaan SDM pelaksana pada sub bagian mempengaruhi target pencapaian kinerja tepat waktu																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																		
		7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan**	**######**	**9.806.800**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**KECAMATAN GALESONG SELATAN**	

		1	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Rapat/Desa**	100,00%	9.806.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%		
		1	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Rapat/Pertemuan TP-PKK di Desa	1	8.456.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		1	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Desa yang mengembang usaha Ekonomi Di Desa (13 Desa)	4	1.350.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Masih ada sub Kegiatan yang tidak bisa terealisasi Anggarannya, dikarenakan Sub Kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan

Faktor penghambat: kurangnya ketersediaan SDM pelaksana pada sub bagian mempengaruhi target pencapaian kinerja tepat waktu

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**######**	**3.000.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**KECAMATAN GALESONG SELATAN**	
		1	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraa**	100,00%	3.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%		

								n Ketentraman dan Ketertiban Umum										
		1	0 1	0 4	2.0 1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata	Jumlah Rapat /Pertemuan dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**		
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																		
Faktor penghambat: : Masih ada sub Kegiatan yang tidak bisa terealisasi Anggarannya, dikarenakan Sub Kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan																		
Faktor penghambat: kurangnya ketersediaan SDM pelaksana pada sub bagian mempengaruhi target pencapaian kinerja tepat waktu																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																		
		7	**0 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**	**######**	**3.973.200**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**KECAMATAN GALESONG SELATAN**	
		1	0 1	0 6	2.0 1		**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintahan Desa**	**Memfasilitasi Administrasi Desa**	100,00%	3.973.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%		
		1	0 1	0 6	2.0 1	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi administrasi tata Pemerintahan	13	2.130.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%		

								Desa										
		1	0 1	0 6	2.0 1	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah Pengelolaan Keuangan 13 Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	1.842.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Faktor penghambat: kurangnya ketersediaan SDM pelaksana pada sub bagian mempengaruhi target pencapaian kinerja tepat waktu

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**4,43%**	**2,40%**
Predikat Kinerja Program	**SR**	**SR**

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

1.

2.

3.

4.

5.

Faktor penghambat:

1.

2.

3.

4.

5.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
1.
2.
3.
4.
5.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):
1.
2.
3.
4.
5.

Sumber data, tabel berikut di kutip dari Monev Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Galesong Selatan

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Kecamatan Galesong Selatan 2025 yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabelsebagai berikut :

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kecamatan Galesong Selatan	5	12	22	5	12	23
TOTAL		**5**	**12**	**22**	**5**	**12**	23

Sumber : Monev TW 1 Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 5, jumlah kegiatan 12, dan jumlah sub kegiatan 22, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 5, jumlah indikator kegiatan sebanyak 12, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 23.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Hingga Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
1	Kecamatan Galesong Selatan	1.722.482.120	**294.767.663**	4,39%	17.11%
TOTAL		**1.722.482.120**	**294.767.663**	4,39%	17.11%

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Galesong Selatan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. **294.767.663**,-. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 17.11% persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 3,84% persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Selatan 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 25 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 25 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Kecamatan Galesong Selatan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Galesong Selatan sebanyak 5 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 4 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program (realisasi >10-20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 0 program (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan dapat dijelaskan bahwa terdapat 13 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 11 kegiatan yang realisasi

pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 0 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 2 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 23 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 21 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 4 sub kegiatan, dan 3 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kecamatan Galesong Selatan	5	4	1	0	12	7	4	1	22	14	3	5
TOTAL		**5**	**4**	**1**	**0**	**12**	7	4	1	**22**	**14**	**3**	**5**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Galesong Selatan

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Selatan 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi**

untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 25 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 25 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Kecamatan Galesong Selatan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Galesong Selatan sebanyak 5 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 4 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 0 program (realisasi >10-20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 1 program (realisasi diatas 20 persen).

2 Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Kecamatan Glesong Selatan dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 7 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 3 kegiatan, dan kategori 10-20 persen, dengan capaian realisasi diatas <20 persen sebanyak 2 kegiatan.

3 Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 22 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 13 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 3 sub kegiatan, dan 6 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kecamatan Galesong Selatan	5	4	0	1	12	7	3	2	22	13	3	6
TOTAL		**5**	**4**	**0**	**1**	**12**	**7**	**1**	**2**	**22**	13	3	6

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Galesong Selatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Galesong Selatan

Kantor Kecamatan Galesong Selatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliput pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan di Desa.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain pengantar KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Selatan tahun 2025 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan, harus dilakukan survey IKM. Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Galesong Selatan. Kinerja pelayanan didukung oleh sistem yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Galesong Selatan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada kantor Kecamatan Galesong Selatan dapat terlihat pada tabel berikut bahwa pada kolom kedua (2) terdapat indikator yang berasal dari Renstra 2023-2026, kemudian pada kolom ke 3 terdapat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dimana rata rata nilainya adahan 100% segaimana sesuai yang dirancang kemudian terpenuhi, adapun pada indikator Angka Kriminalitas terdapat angka 35 sebagumana seperti yang diharapkan yakni mengurangi/menekan angka kriminalitas yang ada di Galesong selatan. Kemudian pada kolom ke 4 terdapat Realisasi Capaian, semua angka yang terdapat pada kolom tersebut sesuai dengan target awal kemudian terealisasi pada akhirnya. Selanjutnya yakni kolom ke 5 indikator dari Renstra tahub 2025-2029, ke 6 berisi Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yakni yang terbaru, adapun isinya yaitu pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 Pelayanan Di Kecamatan memiliki target 90, sedangkan di tahun 2026 terdapat 95, dan pada 2027 terdapat 96 target, selanjutnya pada indikator Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban tahun 2025 terdapat 85% target, 2026 terdapat 87% serta 2027 terdapat 88% target, selanjurnya pada indikator ersentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dan indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Non Standart Pelayanan Minimal (Non SPM) memiliki target yang sama pada tahun 2025 yaitu 90%, sedangkan pada tahun 3036 dan 2027 berbeda yaitu 2026 92% dan 91% sedangkan pada tahun 2027 terdapat 93% dan 92% target. Selanjutnya indikator Angka Kriminalitas sudah menurun disetiap tahunnya yakni 2025 terdapat 30%, 2026 terdapat 25% dan 2027 terdapat 20% target. Kemudian indikator selanjutnya Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan yang meupakan indikator baru pada tahun 2025-2029, selanjutnya Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju juga mmiliki peningkatan target tiap tahunnya yakni 2025 terdapat 75%, 2026 terdapat 80% dan 2027 terdapat 82% target. Kemudian indikator selanjutnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat juga mengalami peningkatan target tiap tahunnya yakni 87% pada 2025, 88% pada 2026 dan 90% pada 2027 dab begu hingga seterusnya.

Tabel II-6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Triwulan I	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan	80	84,07	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan	90	95	96				
2	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban	85%	17%	Persentase Pelayanan Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	93%				
3	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)	100%	85%	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	90%	92%	94%				
4	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Non Standart Pelayanan Minimal (Non SPM)	90%	85%	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan	BB (71,50)	BB (71,50)	BB (71,50)				
5	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kondisi Baik	85%	83%	Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan	92%	92%	83%				
6	Angka Kriminalitas	30	26								
7	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,678	0,790								
8	Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju	70%	15,38%								
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	85%	75%								
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Belum dilakukan evaluasi penilaian								
11	Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan	B	BB (71,50)								

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Galesong Selatan

Perubahan indikator kinerja perangkat daerah dipengaruhi oleh adanya perbedaan visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. Pada periode sebelumnya melalui Renstra 2023–2026, arah pembangunan Kecamatan Galesong Selatan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan desa, serta peningkatan pelayanan publik yang bersifat fundamental. Sehingga, indikator tahun 2024 masih berfokus pada capaian dasar seperti kepuasan masyarakat, ketertiban umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan pembangunan desa. Namun, memasuki periode Renstra 2025–2029, arah kebijakan berubah mengikuti visi Bupati terpilih yaitu "Takalar Maju Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital". Visi ini mendorong transformasi pembangunan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis digital, dengan orientasi pada peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja tahun 2025 disusun lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi, seperti peningkatan kepuasan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan, penanganan aduan masyarakat, literasi digital ASN, serta penguatan akuntabilitas kinerja (SAKIP).

Dengan demikian, perubahan indikator dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran fokus pembangunan, dari orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas layanan publik, menuju pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Berdasarkan tabel II-6 diatas, pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Adapun penjelasannya yaitu :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan**

   Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian berada pada angka 84,07 poin dari target yang ditetapkan sebesar 80 poin. Capaian ini menggambarkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan sudah berjalan baik dan telah melebihi target yang ditentukan. Penilaian ini diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat yang melibatkan responden dari berbagai kelompok pengguna layanan, sehingga hasilnya mencerminkan persepsi masyarakat secara langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Meskipun secara umum sudah baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya pada aspek kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat dan kecepatan pelayanan. Perbaikan pada kedua aspek tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kepuasan masyarakat sehingga target IKM pada periode berikutnya dapat tercapai atau bahkan terlampaui.

2. **Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban** Berdasarkan data perbandingan angka kriminal di Kecamatan Galesong Selatan, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 213 kasus dan pada tahun 2024 menurun menjadi 179 kasus, atau terjadi penurunan sebesar 34 kasus. Jika dihitung dalam persentase, maka realisasi penurunan kriminalitas hanya mencapai sekitar 17%. Sementara itu, target penurunan kasus kriminal tahun 2024 ditetapkan sebesar 85%, sehingga capaian tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren positif berupa penurunan kasus, namun hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap strategi pencegahan dan penanganan tindak kriminal yang selama ini dijalankan. Upaya sinergis antara aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, dan partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat agar di tahun mendatang penurunan angka kriminalitas dapat lebih signifikan dan mendekati target yang ditetapkan.
3. **Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

   Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 85% dan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa pelayanan dasar publik di Kecamatan Galesong Selatan telah pada dasarnya sudah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku. Layanan kesehatan mencapai 90%, Layanan pendidikan 89%, Layanan Perumahan Rakyat 85%, Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 80%, Layanan Sosial 86% dan Layanan Pekerjaan Umum 86%. Dari total 788 permohonan pelayanan, sebanyak 686 telah dilaksanakan sesuai SPM, sehingga menghasilkan capaian rata-rata 87%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik, baik dalam hal ketepatan waktu, prosedur yang jelas, maupun kesesuaian hasil layanan dengan standar. Meski demikian, Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat masih dibawah 85%, sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan pada periode berikutnya.
4. **Persentase Pelayanan sesuai Non Standar Pelayanan Minimal (Non SPM)**

   Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Non SPM sebesar 85%, dan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 90%. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang cukup memadai. Berdasarkan data perhitungan, dari total 397 layanan yang diterima, sebanyak 338 layanan berhasil diselesaikan sesuai Non SPM, sehingga capaian rata-rata adalah 85%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Non SPM di Kecamatan Galesong Selatan telah terlaksana dengan baik, namun masih memerlukan optimalisasi sistem pelayanan, peningkatan kapasitas

SDM, serta penyediaan sarana pendukung agar capaian di tahun berikutnya bisa memenuhi atau melampaui target.

5. **Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kondisi Baik**

   Pada tahun 2024, capaian persentase sarana dan prasarana pelayanan umum dalam kondisi baik di Kecamatan Galesong Selatan mencapai 83%, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 85%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana prasarana sudah tersedia dan berfungsi dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan untuk mencapai standar optimal. Berdasarkan tabel perhitungan, dari total 94 sarana prasarana yang tersedia, terdapat 78 dalam kondisi baik. Hampir seluruh jenis prasarana seperti kantor, puskesmas, sekolah (SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA), dan pasar telah memenuhi standar ketersediaan. Namun, pada kategori kondisi kantor pelayanan hanya terdapat 14 dari 18 dengan kondisi baik atau sekitar 78%. Kekurangan ini menjadi faktor utama penyebab belum tercapainya target 85%. Dengan demikian, meskipun capaian 83% menunjukkan pelayanan publik sudah ditunjang sarana prasarana yang cukup memadai, tetap diperlukan penambahan dan perbaikan kantor pelayanan agar kualitas layanan masyarakat dapat lebih optimal dan sesuai dengan target.

6. **Angka Kriminalitas**

   Pada tahun 2024, angka kriminalitas di Kecamatan Galesong Selatan tercatat sebesar 26 kasus per 10.000 penduduk, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 30 kasus per 10.000 penduduk. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di wilayah Kecamatan Galesong Selatan relative terkendali dan kondisi keamanan masyarakat tergolong cukup kondusif. Berdasarkan data tabel tindak kriminal, jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2024 sebanyak 78 kasus dengan jumlah penduduk sebesar **29.965** jiwa, sehingga hasil perhitungan angka kriminalitas adalah:

   78 /**29.965**X 10.000 = 26 kasus per tahun

   Hasil ini membuktikan bahwa meskipun masih terdapat berbagai bentuk tindak kriminal, intensitasnya lebih rendah dibandingkan target, yang berarti efektivitas upaya aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan cukup baik. Namun demikian, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan patrol keamanan, penguatan koordinasi aparat, serta program pembinaan masyarakat untuk menekan angka kriminalitas lebih rendah lagi di tahun-tahun mendatang.

7. Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan

Pada tahun 2024, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Galesong Selatan mencapai 0,790 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 0,678. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian desa di wilayah Kecamatan Galesong Selatan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Indeks Desa Membangun merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa melalui tiga dimensi utama, yaitu Indeks Sosial (pendidikan, kesehatan, dan modal sosial), Indeks Ekonomi (keragaman produksi desa, akses ke pusat perdagangan, serta keterhubungan infrastruktur), dan Indeks Ekologi/Lingkungan (kualitas lingkungan dan mitigasi bencana). Capaian 0,790 menunjukkan IDM Kecamatan Galesong Selatan dengan status berkembang. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses infrastruktur dasar, serta dukungan pemerintah dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pembangunan desa Di Kecamatan Galesong Selatan berjalan efektif dan mampu meningkatkan kemandirian desa di atas target yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan langkah berkelanjutan berupa penguatan perekonomian lokal, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar seluruh desa dapat mencapai status desa mandiri secara menyeluruh.

8. Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju

Pada tahun 2024, persentase desa status berkembang menuju status desa maju di Kecamatan Galesong Selatan belum mencapai target. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang mengalami peningkatan menjadi desa maju sebanyak 2 desa dari 13 desa yang sebelumnya berstatus berkembang. Dengan semakin banyaknya desa berkembang yang naik kelas menuju desa maju, maka kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Galesong Selatan juga akan semakin meningkat, baik dari sisi akses layanan dasar, peluang ekonomi lokal, maupun pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga konsistensi pembinaan, memperkuat kelembagaan desa, serta meningkatkan sinergi antar- pemangku kepentingan agar seluruh desa dapat mencapai status desa maju bahkan desa mandiri.

9. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2024, persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Galesong Selatan mencapai 80%, dan belum mencapai target yang ditetapkan karena masih terdapat beberapa lembaga seperti Bumdes, Karang Taruna dan Kelompok Tani yang tingkat keaktifannya relative rendah

dibandingkan lembaga lain. Jumlah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Galesong Selatan tahun 2024 sebanyak 176 lembaga, dengan 140 lembaga yang aktif. Perhitungannya yaitu:

140/176 x 100% = 80%

Capaian ini menandakan peran lembaga kemasyarakatan cukup konsisten dalam pemberdayaan masyarakat. Tingkat keaktifan tertinggi ditunjukkan oleh LPM, BPD, dan PKK yang mencapai 100%.

10. **Indeks Reformasi Birokrasi**

    Target yang ditetapkan adalah predikat BB, namun pada tahun 2024 belum ada realisasi karena belum dilakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan dalam proses penilaian agar capaian reformasi birokrasi dapat terukur dengan jelas. Evaluasi yang tepat waktu penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Galesong Selatan.

11. **Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan**

    Target nilai B dan realisasi mencapai BB (71,50). Capaian ini berhasil melampaui target yang ditetapkan, menandakan adanya peningkatan kualitas dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja di Kecamatan Galesong Selatan. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar, yang sekaligus menunjukkan komitmen kecamatan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan**

   Pada tahun 2025 ditetapkan target IKM sebesar 88. Namun, pada Triwulan I, realisasi capaian belum tersedia karena proses survei kepuasan masyarakat masih berlangsung. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian survei agar dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas layanan.

2. **Persentase Pelayanan Masyarakat yang Selesai Tepat Waktu**

   Target pelayanan tepat waktu pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 90%, sementara hasil realisasi pada triwulan I sudah mencapai 35% dengan jumlah layanan yang masuk sebanyak 242 Layanan dan yang sudah diselesaikan tepat waktu sebanyak 67 Layanan. Pencapaian ini terjadi karena adanya kesadaran dan kompetensi petugas serta dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

3. **Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**

   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 90%, sementara realisasi triwulan I sudah mencapai 29% dengan target aduan dalam setahun sebanyak 24 aduan dan sudah diselesaikan sebanyak 6 aduan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan kecamatan semakin meningkat, karena mayoritas aduan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Meski demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, agar capaian di masa mendatang semakin optimal.

4. **Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan**

   Target yang ditetapkan adalah memperoleh nilai BB (71,50). Pada Triwulan I tahun 2025, penilaian SAKIP oleh Inspektorat belum dilaksanakan sehingga belum terdapat data realisasi. Oleh karena itu, Kecamatan perlu mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar saat penilaian dilakukan hasilnya dapat sesuai target.

5. **Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan**

   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 92%, dan realisasi pada triwulan I juga telah mencapai 83%, sehingga capaian ini hamper memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, dari 15 ASN di Kecamatan Galesong Selatan, sebanyak 10 ASN mampu mengoperasikan komputer, sehingga menghasilkan tingkat literasi digital sebesar 83%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital sudah cukup baik untuk mendukung tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Namun, peningkatan kapasitas masih tetap diperlukan agar literasi digital ASN semakin optimal dalam menunjang efektivitas, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GALESONG SELATAN

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

1.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut :

1.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Tabel III-1
Kebijakan Nasional (Prioritas Nasional)
Dalam RKP Tahun 2025

NO	KEBIJAKAN NASIONAL (PRIORITAS NASIONAL)	PERMASALAHAN PELAYANAN
1	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Sumber daya manusia di Kecamatan Galesong Selatan yang kurang berkualitas

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025; diolah

3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Galesong Selatan

Mendasari hasil evaluasi kinerja Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2023 – 2026, tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 mengalami perubahan setelah disesuikan dengan dinamika isu – isu nasional dan lokal yang tertuang di dalam tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029. Olehnya itu Renja Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan

sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Adapun perubahan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

1.2 Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. Untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Kecamatan Galesong Selatan yaitu **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan",** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Galesong Selatan dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini :

Table III-1

Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025 (Renstra PD 2023-2026)			PERUBAHAN RENJA POKOK 2025 (Renstra PD 2025-2029)		
TUJUAN / SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
T.1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan	90	T.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan	88
	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban	85%	S1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Pelayanan Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	90%
S.1.1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)	90%		Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	90%
	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Non Standart Pelayanan Minimal (Non SPM)	90%	S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan	BB (71,10)
S.1.2. Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Umum	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kondisi Baik	90%		Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan	92%
S.1.3. Meningkatnya ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	30			
T.2. Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,790			

S.2.1. Meningkatnya Status Desa	Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju	75%			
S.2.2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	87%			
T.3. Meningkatkan tata kelola pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,20)			
S.3.1. Meningkatnya Tata kelola kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan	Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan	BB (71,30)			

Sumber : Renstra Kec. Galesong Selatan Tahun 2023-2025 dan Renstra 2025-2029; diolah

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GALESONG SELATAN

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Galesong Selatan yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Prioritas Daerah

1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table IV-1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**3,900,000**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**2,000,000**
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2,000,000
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**1,900,000**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1,900,000
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**8,000,000**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**4,000,000**
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4,000,000

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**4,000,000**
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	4,000,000
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4,000,000
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**2,400,000**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**2,400,000**
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2,400,000
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,400,000
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**3,000,000**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**3,000,000**
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1,500.000
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,500.000

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2025 dengan total pagu Rp **1,702,682,000**,**00** (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL IV-1
REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PAGU PADA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN
TAHUN 2025

No	Urusan	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM RENJA PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN RENJA PERUBAHAN		JUMLAH SU KEGIATAN RENJA PERUBAHAN		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RENJA 2025	PENJABARAN APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025	RENJA 2025	PENJABARAN APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025	RENJA 2025	PENJABARAN APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025	RENJA 2025	PENJABARAN APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025	BARU	BERTAMBAH/BERKURANG	BARU	BERTAMBAH/BERKURANG	BARU	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Kecamatan Galesong Selatan	5	5	5	12	12	12	22	22	22	1,722,482,120	1,722,482,120	1,702,862,120	5	0	12	0	22	0	Kecamatan Galesong Selatan
JUMLAH		**5**	**5**	**5**	**12**	**12**	**12**	22	22	22	**1,722,482,120**	**1,722,482,120**	**1,702,862,120**	**5**	**0**	**12**	**0**	22	**0**	

Takalar, 2025
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar

(Drs. Achmad Rivai, M.Si)
NIP. 196810121989081001

TABEL IV-2

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2025

KABUPATEN : TAKALAR
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GALESONG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025	Renja PD 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	**01**				**KECAMATAN**										
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**				**1,700,890,120**	**1,700,890,120**	**1,685,899,120**	
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah**	**Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah**				**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA – SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA – SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025	Renja PD 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**				**1,579,928,130**	**1,579,928,130**	**1,579,928,130**	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji	Jumlah pegawai yang menerima gaji	1.236 Orang	1.236 Orang	1.236 Orang	1,140,678,666	1,140,678,666	1,140,678,666	
								Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1.236 Orang	1.236 Orang	1.133 Orang	431,209,464	431,209,464	431,209,464	
								Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan obyektif lainnya	Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan obyektif lainnya	0 Orang	0 Orang	0 Orang	8,040,000	8,040,000	8,040,000	
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Baik**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Baik**				**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**	
	7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Adminstrasi Umum yang Baik**	**Persentase Adminstrasi Umum yang Baik**				**40,005,990**	**40,005,990**	**25,014,990**	
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	13,714,000	13,714,000	12,303,000	
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang di sediakan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang di sediakan	5.323 Examplar	5.323 Examplar	5.323 Examplar	2,071,990	2,071,990	2,071,990	
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1855 Dos	1855 Dos	1855 Dos	1,560,000	1,560,000	1,560,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025	Renja PD 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	22,660,000	22,660,000	9,080,000	
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**16,131,000**	**16,131,000**	**16,131,000**	
	7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	16,131,000	16,131,000	16,131,000	
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**				**22,554,000**	**22,554,000**	**22,554,000**	
	07	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi (Wifi)	Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi (Wifi)	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	4,554,000	4,554,000	4,554,000	
	07	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor	36 Orang	36 Orang	36 Orang	18,000,000	18,000,000	18,000,000	
	07	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah**				**24,271,000**	**24,271,000**	**24,271,000**	
	07	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	24,271,000	24,271,000	24,271,000	
	07	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan publik oleh Pemerintah**	**Persentase pelayanan publik oleh Pemerintah**				**4,812,000**	**4,812,000**	**4,812,000**	
	07	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan**				**2,654,700**	**2,654,700**	**2,654,700**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025	Renja PD 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	07	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2,654,700	2,654,700	2,654,700	
	07	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan**	**Persentase Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan**				**2,157,300**	**2,157,300**	**2,157,300**	
	07	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2,157,300	2,157,300	2,157,300	
	07	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan**	**Persentase Tingkat Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan**				**9,806,800**	**9,806,800**	**7,659,800**	
	07	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Rapat/Desa**	**Jumlah Rapat/Desa**				**9,806,800**	**9,806,800**	**7,659,800**	
	07	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Rapat/Pertemuan TP-PKK di Desa	Jumlah Rapat/Pertemuan TP-PKK di Desa	1 Kali	1 Kali	1 Kali	8,456,000	8,456,000	6,309,000	
	07	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Desa yang mengembang usaha Ekonomi Di Desa (13 Desa)	Jumlah Desa yang mengembang usaha Ekonomi Di Desa (13 Desa)	4 Desa	4 Desa	4 Desa	1,350,800	1,350,800	1,350,800	
	07	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**3,000,000**	**3,000,000**	**850,000**	
	07	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**3,000,000**	**3,000,000**	**850,000**	
	07	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat /Pertemuan dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat /Pertemuan dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	3,000,000	3,000,000	850,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025	Renja PD 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	07	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**				**3,973,200**	**3,973,200**	**3,641,200**	
	07	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Memfasilitasi Administrasi Desa**	**Memfasilitasi Administrasi Desa**				**3,973,200**	**3,973,200**	**3,641,200**	
	07	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	2,130,300	2,130,300	2,093,400	
	07	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah Pengelolaan Keuangan 13 Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah Pengelolaan Keuangan 13 Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	1,842,900	1,842,900	1,547,800	
												J U M L A H	**1,722,482,120**	**1,722,482,120**	**1,702,862,120**	

Galesong Selatan, 11 Juni 2025
Camat Galesong Selatan,

AMRAN T , S.Sos
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 197504142005021005

BAB V
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahn Renja Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Perubahan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;
4. Perubahan Renja Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renja Kecamatan Galesong Selatan

Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Takalar, 11 Juni 2025
Camat Galesong Selatan

AMRAN T , S.Sos
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 197504142005021005

KECAMATAN
POLONGBANGKENG
UTARA

2025 PERUBAHAN RENJA

PREPARED BY :

SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

kecamatanpolut123.id@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan. Renja Perubahan ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Perubahan Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing–masing seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan.

Kami menyadari, Perubahan Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Perubahan Renja ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja Perubahan ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dalam melaksanakan Tugas Sebagai Abdi Negara.

Takalar, 10 Juni 2025

Camat Polongbangkeng Utara,

AJI SANGAJI, S.IP
Pembina
Nip. 198800531 200701 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……ii

DAFTAR ISI……iii

DAFTAR TABEL……iv

BAB I PENDAHULUAN ……I-1

1.1. Latar Belakang ……I-1

1.2. Landasan Hukum …… I-4

1.3. Maksud dan Tujuan ……I-5

1.4. Sistematika Penulisan …… I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA SAMPAI

DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ……II-7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Polongbangkeng Utara Sampai dengan Triwulan I …… II-7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Polongbangkeng Utara …… II-22

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA …….III-30

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional……III-30

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Polongbangkeng Utara……..
III-

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENCANA KERJA KECAMATAN POLONGBANGKENG

UTARA……..IV-37

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program PrioritasPembangunan Daerah……IV-38

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Polongbangkeng Utara Tahun

2025……IV-39

BAB V PENUTUP……V-51

DAFTAR TABEL

TABEL II-1 Formulir Evaluasi Hasil Renja Kabupaten Takalar II-8

TABEL II-2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025..... ..... II-17

TABEL II-3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I..... II-18

TABEL II-4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 ..... II-20

TABEL II-5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 ..... II-22

TABEL II-6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar II-24

TABEL III-1 Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Takalar 2025..... III-30

TABEL III-2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Polongbangkeng Utara..... III-32 TABEL III-3 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-37

TABEL III-4 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Tahun 2025 ..... III-45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Polongbangkeng Utara disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Polongbangkeng Utara Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Polongbangkeng Utara Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan

Renja Kecamatan Polongbangkeng Utara dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Polongbangkeng Utara Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

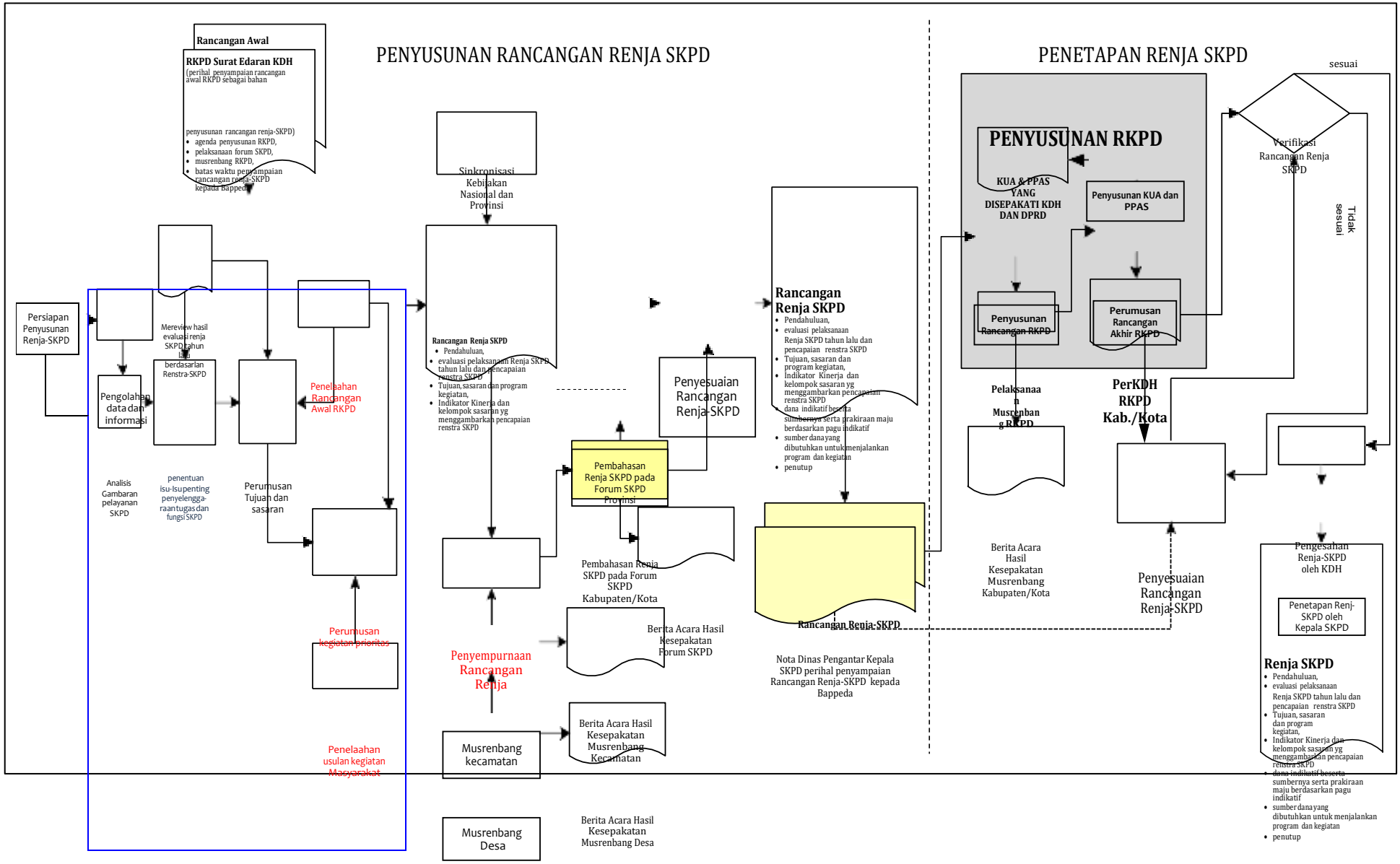
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Awal
RKPD Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan
penyusunan rancangan renja-SKPD)
agenda penyusunan RKPD,
pelaksanaan forum SKPD,
musrenbang RKPD,
batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu
berdasarkan Renstra-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-isupenting penyelenggaraantugas dan fungsi SKPD
Perumusan Tujuan dan sasaran
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan Masyarakat
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang kecamatan
Musrenbang Desa
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
PerKDH RKPD Kab./Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
sesuai
Tidak sesuai
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
Penetapan Renj-SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang sesuai dengan Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan perundangan lainnya yang mengatur Standar Operasional Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang diacu dalam perencanaan dan penganggaran di Badan/Dinas/Kecamatan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan,Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara adalah sebagai berikut

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi Perubahan APBD
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara

Tujuan penyusunan Renja Perubahan kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematik Renja Perubahan Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I Tahun 2025, memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I (Tahun 2025) sesuai dengan renstra dan tupoksi OPD dan Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Polongbangkeng Utara.

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Polongbangkeng Utara, memuat tentang Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Polongbangkeng Utara.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATANDALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA, Memuat tentang Daftar Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Polongbangkeng Utara.

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Polongbangkeng Utara Sampai dengan Triwulan I

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Polongbangkeng Utara sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Periode Pelaksanaan 2025.

TABEL II-I

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA KABUPATEN TAKALAR
PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

MENU

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
Periode Pelaksanaan: s/d Triwulan I Tahun 2025

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3					4	5	8		12		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
	7	**07**				**KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA**		**100.0%**	**8,415,592,258**	**18.0%**	**1,245,634,812**	**17.7%**	**1,245,634,812**	17.69%	14.80%		
1	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah (%)**	**100%**	**7,067,523,818**	**17%**	**1,241,609,812**	**15%**	**1,241,609,812**	**15.34%**	**17.57%**	**Kecamatan Polongbangkeng Utara**	
	7	01	01	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	100.00%	5,040,000	28.57%	900,000	28.57%	900,000	28.57%	18%		
	7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja Perangkat Daerah Yang disusun	2	900,000	2	900,000	2.00	900,000	100.00%	100.00%		
	7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun	1	1,050,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang disusun	1	1,050,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA Perangkat Daerah yang disusun	1	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang disusun	1	1,050,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	990,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
							Rata-rata capaian kinerja (%)							**16.67%**	**16.67%**		
							Predikat kinerja							**SR**	**SR**		
1	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan**	100.00%	6,384,590,378	15.15%	1,162,338,572	15.15%	1,162,338,572	15%	18%	Kecamatan Polongbangkeng Utara	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	770	4,952,936,822	220	1,161,138,572	220.00	1,161,138,572	28.57%	23.44%		
						Tambahan Penghasilan Pegawai (Beban Kerja, Kondisi Kerja, Prestasi Kerja)	Jumlah ASN yang menerima Tambahan Penghasilan	660	1,418,933,556	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Jumlah ASN yang menerima Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24	10,320,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan hasil pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1	1,200,000	1	1,200,000	1.00	1,200,000	100.00%	100.00%		
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semsteran	4	1,200,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
							Rata-rata capaian kinerja (%)							**25.71%**	**24.69%**		
							Predikat kinerja							**SR**	**SR**		

1	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah yang baik**	100.00%	1,200,000	40.00%	-	40.00%	-	40%	0%	Kecamatan Polongbangkeng Utara	
	7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan kebutuhan barang milik daerah yang di susun	1	600,000	1	-	1	-	100.00%	0.00%		
	7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	600,000	1	-	1	-	25.00%	0.00%		

							Rata-rata capaian kinerja (%)								62.50%	0.00%	
							Predikat kinerja								R	SR	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Parangkat Daerah**	100.00%	16,906,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75	16,906,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)								0.00%	0.00%	
							Predikat Kinerja								SR	SR	
1	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	100.00%	184,434,940	1.78%	10,355,000	1.78%	10,355,000	2%	6%	Kecamatan Polongbangkeng Utara	
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.	7	3,947,200	1	-	1.00	-	14.29%	0.00%		
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	73	92,681,500	18	1,000,000	18.00	1,000,000	24.66%	1.08%		
	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	11	2,377,300	2	380,000	2.00	380,000	18.18%	15.98%		
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25,000	17,078,940	300	1,500,000	300.00	1,500,000	1.20%	8.78%		
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	24	2,400,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1,388	27,080,000	100	5,600,000	100.00	5,600,000	7.20%	20.68%		
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat – rapat koordinasi yang diikuti.	264	38,870,000	55	1,875,000	55.00	1,875,000	20.83%	4.82%		
							Rata-rata capaian kinerja (%)								12.34%	7.34%	
							Predikat kinerja								SR	SR	
											1269609.589						
1	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	100.00%	427,793,500	16.18%	64,924,340	16.18%	64,924,340	16%	15%	Kecamatan Polongbangkeng Utara	
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Jaringan Internet/WIFI)	12	8,496,000	3	1,547,340	3.00	1,547,340	25.00%	18.21%		
							Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air PDAM)	48	7,947,500	3	877,000	3.00	877,000	6.25%	11.03%		
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	21	15,950,000	3	-	3.00	-	14.29%	0.00%		
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor dan jumlah tenaga jasa administrasi keuangan	840	395,400,000	140	62,500,000	140.00	62,500,000	16.67%	15.81%		
							Rata-rata capaian kinerja (%)								15.55%	11.26%	
							Predikat kinerja								SR	SR	
1	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan dalam kondisi baik**	100.00%	47,559,000	17.14%	3,091,900	5.71%	3,091,900	6%	7%	Kecamatan Polongbangkeng Utara	
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dibayarkan pajak dan jasa jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dibayarkan pajak dan jasa	26	19,249,000	6	3,091,900	2.00	3,091,900	7.69%	16.06%		
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	9	28,310,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)								3.85%	8.03%	
							Predikat kinerja								SR	SR	
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)								19.52%	9.71%	
							Predikat kinerja								SR	SR	
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Sub Kegiatan yang mencapai Kinerja 100% dikarenakan Sub Kegiatan tersebut harus sesuai Jadwal Perencanaan di Triwulan I																	
Faktor penghambat: : Adapun Sub Kegiatan yang belum terealisasi Anggarannya dikarenakan lambatnya proses pencairan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan adanya Persyaratan Administrasi yang belum terselesaikan																	
Faktor penghambat: Untuk sub Kegiatan yang belum tercapai Kinerjanya, dikarenakan Sub Kegiatan belum bisa terlaksana karena harus menyusaikan jadwal pelaksanaan sub kegiatan tersebut																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):Dalam pelaksanaan sub kegiatan tetap menyusaikan jadwal pelaksanaan sub kegiatan dan Anggaran Kas																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																	
1	**7**	**01**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan**	**100%**	**5,000,000**	**10%**	**-**	**10%**	**-**	**9.53%**	**0.00%**	**Kecamatan Polongbangkeng Utara**	

	7	01	2	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan**	100.00%	900,000	11.11%	-	11.11%	-	11%	0%		
	7	01	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan di tingkat kecamatan	18	900,000	2	-	2.00	-	11.11%	0.00%		
									Rata-rata capaian kinerja (%)					**11.11%**	**0.00%**		
									Predikat kinerja					**SR**	**SR**		
	7	01	2	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan**	100.00%	1,600,000	1.47%	-	1.47%	-	1%	0%		
	7	01	2	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan	60	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	7	01	2	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah indikator SPM yang mencapai target (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Permukiman, Sosial, Keamanan dan ketertiban)	8	600,000	1	-	1.00	-	12.50%	0.00%		
									Rata-rata capaian kinerja (%)					**6.25%**	**0.00%**		
									Predikat kinerja					**SR**	**SR**		
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan dalam Kondisi**	100.00%	1,600,000	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	0.00%		
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertkal	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal	10	1,600,000	2	-	2	-	20.00%	0.00%		
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)					**20.00%**	**0.00%**		
									Predikat Kinerja					**SR**	**SR**		
1	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh kecamatan**	100.00%	900,000	5.56%	-	5.56%	-	6%	0%	Kecamatan Polongbangkeng Utara	
	7	01	2	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen non Perizinan usaha yang di laksanakan	18	900,000	1	-	1.00	-	5.56%	0.00%		
														5.56%	**0.00%**		
									Predikat kinerja					**SR**	**SR**		
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)					**10.73%**	**0.00%**		
									Predikat kinerja					**SR**	**SR**		
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Kesadaran dan kemampuan Kinerja yang memadai para ASN di Kecamatan Polongbangkeng Utara																	
Faktor penghambat: : Belum adanya realisasi Anggaran untuk Sub sub kegiatan pada Program tersebut karena harus menyusaikan dengan Anggaran Kas																	
Faktor penghambat:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Dalam pelaksanaan sub kegiatan tetap menyusaikan jadwal pelaksanaan sub kegiatan dan Anggaran Kas																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																	
1	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persenatse peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**1,338,868,440**	**38%**	**4,025,000**	**38%**	**4,025,000**	**38.46%**	**0.30%**	**Kecamatan Polongbangkeng Utara**	
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan**	100.00%	4,025,000	100.00%	4,025,000	100.00%	4,025,000	100.00%	100.00%		
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	3	4,025,000	3	4,025,000	3	4,025,000	100.00%	100.00%		
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)					######	######		
									Predikat Kinerja					**ST**	**ST**		
1	7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di kelurahan**	100.00%	1,300,678,440	0.00%	-	0.00%	-	0%	0%	Kecamatan Polongbangkeng Utara	
	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di Kelurahan	6	917,960,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	18	382,718,440	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
									Rata-rata capaian kinerja (%)					**0.00%**	**0.00%**		
									Predikat kinerja					**SR**	**SR**		

	7	01	03	2.02		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang**	100.00%	34,165,000	15.38%	-	15.38%	-	15%	0%		
	7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	12	31,225,000	2	-	2.00	-	16.67%	0.00%		
	7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	2,940,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
													Rata-rata capaian kinerja (%)			**8.33%**	**0.00%**
													Predikat kinerja			**SR**	**SR**
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)			**36.11%**	**33.33%**
													Predikat kinerja			**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Sub Kegiatan yang mencapai Kinerja 100% dikarenakan Sub Kegiatan tersebut harus sesuai Jadwal Perencanaan di Triwulan I																	
Faktor penghambat: : Adapun Sub Kegiatan yang belum terealisasi Anggarannya dikarenakan lambat proses pencairan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan adanya Persyaratan Administrasi yang belum terselesaikan																	
Faktor penghambat: Untuk sub Kegiatan yang belum tercapai Kinerjanya, dikarenakan Sub Kegiatan belum bisa terlaksana karena harus menyusaikan jadwal pelaksanaan sub kegiatan tersebut																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Mempercepat Proses Administrasi dan Perlunya menyusaikan antara jadwal pelaksanaan sub kegiatan dengan penempatan anggaran Kas																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																	

1	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Angka kriminalitas**	**######**	**600,000**	**16.67%**	**-**	**16.67%**	**-**	**16.67%**	**0.00%**	**Kecamatan Polongbangkeng Utara**	
	7	01	04	2.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase sinergisitas kepolisian negara , Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di kecamatan**	100.00%	600,000	16.67%	-	16.67%	-	17%	0%		
	7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Frekwensi rapat/ pertemuan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12	600,000	2	-	2.00	-	16.67%	0.00%		
													Rata-rata capaian kinerja (%)			**16.67%**	**0.00%**
													Predikat kinerja			**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Kinerja para tenaga ASN Kecamatan Polongbangkeng Utara yang cukup memadai																	
Faktor penghambat: : Belum adanya Realisasi Anggaran pada Sub Kegiatan tersebut karena Harus Menyusaikan dengan Anggaran Kas																	
Faktor penghambat:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Menyusaikan pelaksanaan sub kegitan tersebut dengan penempatan Anggaran Kas																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																	

1	**7**	**0**	**1**	**5**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang telah di Laksanakan**	**######**	**1,200,000**	**12.50%**	**-**	**12.50%**	**-**	**12.50%**	**0.00%**	**Kecamatan Polongbangkeng Utara**	
	7	1	5	2	1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang telah di Laksanakan**	100.00%	1,200,000	12.50%	-	12.50%	-	13%	0%		
	7	1	5	201	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Perundang Undangan	24	1,200,000	3	-	3.00	-	12.50%	0.00%		
													Rata-rata capaian kinerja (%)			**12.50%**	**0.00%**
													Predikat kinerja			**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																	
Faktor penghambat: :																	
Faktor penghambat:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																	

1	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase sistem pemerintahan desa yang baik**	**######**	**2,400,000**	**13.64%**	**-**	**13.64%**	**-**	**13.64%**	**0.00%**	**Kecamatan Polongbangkeng Utara**	

	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase administarsi tata pemerintahan desa yang sesuai standar**	100.00%	2,400,000	13.64%	-	13.64%	-	14%	0%	
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Frekwensi rapat penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11	1,200,000	2	-	2.00	-	18.18%	0.00%	
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Frekwensi pertemuan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	11	1,200,000	1	-	1.00	-	9.09%	0.00%	
									Rata-rata capaian kinerja (%)					**13.64%**	**0.00%**	
									Predikat kinerja					**SR**	**SR**	
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Kinerja para tenaga ASN Kecamatan Polongbangkeng Utara yang cukup memadai																
Faktor penghambat: : Belum adanya Realisasi Anggaran pada Sub Kegiatan tersebut karena Harus Menyusaikan dengan Anggaran Kas																
Faktor penghambat:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):Menyusaikan pelaksanaan sub kegitan tersebut dengan penempatan Anggaran Kas																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Kecamatan Polongbangkeng Utara 2025 yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kecamatan Polongbangkeng Utara	6	17	38	6	17	41
TOTAL		**6**	**17**	**38**	**6**	**17**	**41**

Sumber : RKPD Pokok 2025, dan SIPD 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 6, jumlah kegiatan 17, dan jumlah sub kegiatan 41, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 6, jumlah indikator kegiatan sebanyak 17, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 41.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Kabupaten Takalar Tahun 2025
Hingga Triwulan I

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
1	Kecamatan Polongbangkeng Utara	8,415.592.258	1.245.634.812	17,69%	14,80%
TOTAL		**8.415.634.812**	**1.245.634.812**	**17,69%**	**14,80%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Polongbangkeng Utara

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp. 1.245.634.812,-. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 14,80 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 17,69 persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Polongbangkeng Utara 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk

perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Kecamatan Polongbangkeng Utara dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 6 program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara sebanyak 5 program masih dalam kategori rendah (realisasi di bawah 10%), 1 Program masuk kategori sedang (realisasi 10 sampai 20%) dan belum ada Program yang masuk dalam kategori Tinggi (realisasi di atas 20 %).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara dapat dijelaskan bahwa terdapat 17 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 13 kegiatan yang capaiannya masih dalam kategori rendah (di bawah 10 %), 3 kegiatan dalam kategori sedang (10 sampai 20 %) dan 1 kegiatan dalam kategori tinggi (di atas 20%).

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 38 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 29 sub kegiatan yang capaian nya dalam kategori rendah (di bawah 10%) 4 sub kegiatan masuk dalam kategori sedang (10 sampai 20%) dan 5 sub kegiatan dalam kategori tinggi (di atas 20%).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan

berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20 %		0 - 10 %	>10 – 20 %	> 20 %
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kecamatan Polongbangkeng Utara	6	5	1	0	17	13	3	1	38	29	4	5
TOTAL		**6**	**5**	**1**	**0**	**17**	**13**	**3**	**1**	**38**	**29**	**4**	**5**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Polongbangkeng Utara

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Polongbangkeng Utara 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan Gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang

diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program di triwulan I dengan menggunakan kategori di atas dapat digambarkan sebagai berikut: dari 6 Program yang dilaksanakan capaian kinerja program yang masuk dalam kategori rendah yaitu 1 Program (capaian di bawah 10%), 4 Program dalam Kategori Sedang (capaian 10 sampai 20%) dan 1 Program dalam kategori tinggi (capaian di atas 20%).

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan di triwulan I dapat dijelaskan bahwa dari 17 kegiatan yang dilaksanakan terdapat 6 kegiatan yang capaian kinerjanya masih dalam kategori rendah (capaian di bawah 10%), 8 capaian kinerja dalam kategori sedang (capaian 10 sampai 20%), dan 3 kegiatan yang capaian kinerja nya masuk dalam tinggi (capaian di atas 20%).

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan di triwulan I dapat dijelaskan bahwa dari 38 sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 18 sub kegiatan yang capaian kinerja dalam kategori rendah (capaian di bawah 10%), 11 sub kegiatan dalam kategori sedang (capaian 10 sampai 20%) dan 9 sub kegiatan dalam kategori tinggi (capaian di atas 20%) yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2025.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10 %	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kecamatan Polongbangkeng Utara	6	1	4	1	17	6	8	3	38	18	11	9
TOTAL		**6**	**1**	**4**	**1**	**17**	**6**	**8**	**3**	**38**	**18**	**11**	**9**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, di Kecamatan Polongbangkeng Utara

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Polongbangkeng Utara

Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliput pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kelurahan, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain pengantar KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara tahun 2025 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara, harus dilakukan survey IKM. Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara. Kinerja pelayanan didukung oleh sistem yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Utara yang mengacu pada RPJMD Kabupaten dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara
Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan	70	79,70	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan	87	90	92		95	96	
	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	89	80	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu	87	90	92	94	95	95	
	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SPM)	100%	100	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	87	90	92	94	95	95	

	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal (Non SPM)	100%	100	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan	B	B	B	B	B	B	
	Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum dengan kondisi baik	75%	80%	Tingkat literasi Digital ASN	86	87	88	90	100	100	
	Angka Kriminalitas	12	8								
	Jumlah Status Desa Maju Menuju Status Desa Mandiri	1 Desa	1 Desa								
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	75	81%								
	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Belum ada penilaian								
	Nilai SAKIP pada kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara	BB	B(67,00)								

Dari Tabel di atas dapat di lihat adanya Perubahan indikator kinerja perangkat daerah di sebabkan oleh adanya perbedaan visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. Di mana Pada periode sebelumnya di Renstra 2023–2026, arah pembangunan Kecamatan Polongbangkeng Utara lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan desa, serta peningkatan pelayanan publik yang bersifat fundamental. Sehingga, indikator tahun 2024 masih berfokus pada capaian dasar seperti kepuasan masyarakat, ketertiban umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan pembangunan desa.

Memasuki periode Renstra 2025–2029, arah kebijakan berubah mengikuti visi Bupati terpilih yaitu "Takalar Maju Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital". Visi ini mendorong transformasi pembangunan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis digital, dengan orientasi pada peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja tahun 2025 disusun lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi, seperti peningkatan kepuasan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan, penanganan aduan masyarakat, literasi digital ASN, serta penguatan akuntabilitas kinerja (SAKIP).

Dengan demikian, perubahan indikator dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran fokus pembangunan, dari orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas layanan publik, menuju pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Berdasarkan Tabel Pencapaian kinerja Kecamatan Polongbangkeng Utara pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Adapun penjelasannya yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan

   Hasil Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian memenuhi targaet yaitu pada angka 79 poin dari target yang ditetapkan sebesar 81 poin. Capaian ini menggambarkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan sudah berjalan baik dan hampir mendekati target

yang ditentukan. Penilaian ini diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat yang

melibatkan responden dari berbagai kelompok pengguna layanan, sehingga hasilnya mencerminkan persepsi masyarakat secara langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Meskipun secara umum sudah baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya pada aspek kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat dan kecepatan pelayanan. Perbaikan pada kedua aspek tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kepuasan masyarakat sehingga target IKM pada periode berikutnya dapat tercapai atau bahkan terlampaui

2. **Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban**

   Berdasarkan data perbandingan angka gangguan Ketentraman di Kecamatan Polongbangkeng Utara, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 70% dan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 80% dr target 89% sehingga capaian tersebut masih belum sesuai dari yang diharapkan. Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren positif berupa penurunan kasus, namun hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap strategi pencegahan dan penanganan tindak kriminal yang selama ini dijalankan. Upaya sinergis antara aparat penegakhukum, pemerintah kecamatan, dan partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat agar di tahun mendatang penurunan angka kriminalitas dapat lebih signifikan dan mendekati target yang ditetapkan. Secara lebih rinci, hampir semua jenis kejahatan mengalami penurunan, dengan kasus KDRT dan tawuran menurun paling tajam, sementara pencurian meski masih mendominasi juga sedikit berkurang. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Meski demikian, perhatian khusus tetap diperlukan terhadap kasus pencurian yang masih menjadi tindak kriminal tertinggi.

3. .Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%.

Hal ini menandakan bahwa pelayanan dasar publik di Kecamatan Polongbangkeng Utara telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan tabel perhitungan, terlihat bahwa hampir seluruh jenis pelayanan telah mencapai tingkat kesesuaian tinggi dengan SPM.

4. **Persentase Pelayanan Sesuai Non Standar Pelayanan Minimal (Non SPM)**
   Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Non SPM sebesar 100%, seuai dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelayanan non standar telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat deviasi kecil akibat keterbatasan sarana maupun sumber daya. Jenis layanan yang mencapai tingkat penyelesaian 100% meliputi Surat Keterangan Dispensasi Nikah, Surat Izin Penelitian, Surat Rekomendasi Subsidi Listrik, dan Surat Pengantar Keterangan Pindah.Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Non SPM di Kecamatan Polongbangkeng Utara telah terlaksana dengan baik, namun masih memerlukan optimalisasi sistem pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana pendukung agar deviasi kecil tersebut dapat diminimalisir, sehingga target 100% dapat tercapai lg di tahun berikutnya.

5. .**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik**

   Pada tahun 2024, capaian persentase sarana dan prasarana pelayanan umum dalam kondisi baik di Kecamatan Polongbangkeng Utara mencapai 80%, sedikit melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 7 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana prasarana sudah tersedia dan berfungsi dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan untuk mencapai standar optimal.Dengan demikian, meskipun capaian 80% menunjukkan pelayanan publik sudah ditunjang sarana prasarana yang cukup memadai, tetap diperlukan penambahan dan perbaikan kantor pelayanan agar kualitas layanan masyarakat dapat lebih optimal dan sesuai dengan target.

6. Angka Kriminalitas

   Pada tahun 2024, angka kriminalitas di Kecamatan Polongbangkeng Utara tercatat sebesar 8 kasus per 10.000 penduduk, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 12 kasus per 10.000 penduduk. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara relatif terkendali dan kondisi keamanan masyarakat tergolong cukup kondusif.

   Hasil ini membuktikan bahwa meskipun masih terdapat berbagai bentuk tindak kriminal, intensitasnya lebih rendah dibandingkan target, yang berarti efektivitas upaya aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan cukup baik.

Namun demikian, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan patroli keamanan, penguatan koordinasi aparat, serta program pembinaan masyarakat untuk menekan angka kriminalitas lebih rendah lagi di tahun-tahun mendatang.

7. Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan (IDM)

Pada tahun 2024, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Polongbangkeng Utara mencapai 0,7033, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 0,0978. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian desa di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Indeks Desa Membangun merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa melalui tiga dimensi utama, yaitu Indeks Sosial (pendidikan, kesehatan, dan modal sosial), Indeks Ekonomi (keragaman produksi desa, akses ke pusat perdagangan, serta keterhubungan infrastruktur), dan Indeks Ekologi/Lingkungan (kualitas lingkungan dan mitigasi bencana). Capaian 0,7033 mengindikasikan bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara telah bergerak menuju kategori desa mandiri,Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses infrastruktur dasar, serta dukungan pemerintah dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pembangunan desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara berjalan efektif dan mampu meningkatkan kemandirian desa di atas target yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan langkah berkelanjutan berupa penguatan perekonomian lokal, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar seluruh desa dapat mencapai status desa mandiri secara menyeluruh.

8. Meningkatnya Status Desa

Pada tahun 2024, Jumlah desa Maju yang berhasil meningkat statusnya menjadi desa mandiri di Kecamatan Polongbangkeng Utara yaitu satu Desa dari target yang sudah di rencanakan yaitu dua Desa Mandiri,Pencapaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan yang berbasis pada Indeks Desa Membangun (IDM)

Hasil ini mencerminkan bahwa arah kebijakan pembangunan desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara sudah tepat sasaran dan berhasil mendorong desa menjadi lebih mandiri. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga konsistensi pembinaan, memperkuat kelembagaan desa, serta meningkatkan sinergi antar-pemangku kepentingan agar seluruh desa dapat mencapai status desa maju bahkan desa mandiri.

9. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat

   Pada tahun 2024, persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Polongbangkeng Utara mencapai 81,12%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan stabilitas dan konsistensi peran lembaga masyarakat dalam mendukung kegiatan pemberdayaan, meskipun masih terdapat beberapa lembaga seperti Bumdes dan Forum Pemuda yang tingkat keaktifannya relatif rendah dibandingkan lembaga lain. Berdasarkan tabel, jumlah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Polongbangkeng Utara tahun 2024 sebanyak 111 lembaga, dengan 89 lembaga yang aktif. Perhitungannya yaitu:

   89/111x100% = 81%

10. Indeks Reformasi Birokrasi

    Target yang ditetapkan adalah predikat B, namun pada tahun 2024 realisasi belum dilakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan dalam proses penilaian agar capaian reformasi birokrasi dapat terukur dengan jelas. Evaluasi yang tepat waktu penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola

pemerintahan di Kecamatan Polongbangkeng Utara.

11. Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara

Target nilai B (69,00) dan realisasi mencapai B (67,00). Capaian ini belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, menandakan adanya penurunan kualitas dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar, yang sekaligus menunjukkan komitmen kecamatan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Kecamatan Polongbangkeng Utara Tahun 2025 (Triwulan I) di atas, maka dapat di jelaskan bahwa :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan

   Pada tahun 2025 ditetapkan target IKM sebesar 87. Namun, pada Triwulan I, realisasi capaian belum tersedia karena proses survei kepuasan masyarakat masih berlangsung. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian survei agar dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas layanan.

2. **Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Selesai Tepat Waktu.**

   Target pelayanan tepat waktu pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 87%, sementara hasil realisasi pada triwulan I mencapai 94%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Polongbangkeng Utara telah berjalan cukup baik dan hampir memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan tabel pelayanan non-standar pelayanan minimal (Non SPM) tahun 2024, dari 189 layanan yang diterima, terdapat 177 layanan yang berhasil ditindaklanjuti sesuai waktu penyelesaian, sehingga persentasenya mencapai 94%. Beberapa layanan telah mencapai tingkat ketepatan waktu maksimal, seperti Surat Keterangan Dispensasi Nikah, Surat Pengantar SPPT, Surat Izin Penelitian, dan Surat Pengantar Keterangan Pindah yang seluruhnya selesai tepat waktu (100%). Namun, terdapat layanan yang masih di bawah target, seperti Surat Keterangan Permohonan Kredit Bank (40%) dan serta layanan Kewarisan (92%) yang meskipun tinggi, tetap belum mencapai standar penuh.

3. Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%, sementara realisasi triwulan I mencapai 85%. Capaian ini melampaui target yang ditentukan, menandakan adanya peningkatan responsivitas aparat Kepolisian di kecamatan dalam menangani aduan masyarakat. Berdasarkan data tindak lanjut aduan kriminal di Kecamatan Polongbangkeng Utara tahun 2024, dari 46 aduan yang diterima, sebanyak 39 aduan berhasil ditindaklanjuti, dengan tingkat penyelesaian sebesar 85%. Beberapa jenis aduan bahkan mencapai tindak lanjut penuh (100%), seperti kasus perampokan, penganiayaan, narkotika, tawuran, dan penipuan. Sementara itu, aduan kasus pencurian (67%) dan KDRT (80%) masih menunjukkan adanya kendala dalam penanganan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan kecamatan semakin meningkat, karena mayoritas aduan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Meski demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penanganan aduan pencurian dan KDRT, agar capaian di masa mendatang semakin optimal.

4. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan

   Target yang ditetapkan adalah memperoleh nilai B (69,00). Pada Triwulan I tahun 2025, penilaian SAKIP oleh Inspektorat belum dilaksanakan sehingga belum terdapat data realisasi. Oleh karena itu, Kecamatan perlu mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar saat penilaian dilakukan hasilnya dapat sesuai target minimal predikat B.

5. Tingkat Literasi Digital ASN

   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 86%, dan realisasi pada triwulan belum mencapai 86%, sehingga capaian ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, dari 54 ASN di Kecamatan Polongbangkeng Utara, sebanyak 27 ASN mampu mengoperasikan komputer, menghasilkan tingkat literasi digital sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik. Namun, peningkatan kapasitas masih tetap diperlukan agar literasi digital ASN semakin optimal dalam menunjang

efektivitas, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.3 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

▪ **Prioritas Nasional Tahun 2025**



3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

3.2.1 Tujuan

Rumusan tujuan Renja KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah : “Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan”.

3.2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA;

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja, Isu Strategis dan Rancangan Renstra KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA Tahun 2025-2029, maka Tujuan dan

Sasaran KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III-1

Tujuan dan Sasaran Renja KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA 2005-2029

RENJA POKOK TAHUN 2025 (RENSTRA 2023-2026)			PERUBAHAN RENJA POKOK TAHUN 2025 (RENSTRA 2025-2029)		
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	90	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	85
	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	75%	S1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S1.1. Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu	85%
Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM)	90%		S1.2. Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	80%
	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal (Non SPM	100%	S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA	S2.1. Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan	B (65,01)

Sasaran 1.2 : Meningkatnya koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%		S2.2. Tingkat literasi Digital ASN	80%
Sasaran 1.3 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	40			
Tujuan 2: Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,707			
Sasaran 2.1 : Meningkatnya status desa	Persentasi desa status berkembang menuju status desa maju	100%			
Sasaran 2.2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	90%			
Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelolah pada Kantor KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,50)			

Sasaran 3.1 : Meningkatnya tata kelolah kinerja pada kantor KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA	Nilai Sakip Pada kantor KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA	BB (71,50)			

Sumber : Renstra Kec. Polut Tahun 2023-2026 dan Renstra Kec. Polut Tahun 2025-2029; diolah

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
	KECAMATAN			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**7.067.523.818**
		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**5.040.000**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	900.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.050.000

			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	1.050.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA –SKPD	1.050.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	990.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**6.384.590.498**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.382.190.378
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1,200,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	1.200.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**1.200.000**
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	600.000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	600,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**4.900.000**

			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannyaumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4.900.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**149.527.840**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**3.947.200**

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.509.400
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.377.300
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.078.940
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.080.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.135.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**427.793.500**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				16.443.500
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.950.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.400.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**47.559.000**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19,249,000.00
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	28.310.000

			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	0
2	**PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**3.500.000**
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**450.000**
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450,000
		Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		1.000.000
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.000.000
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		1.600.000
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum J	1.600.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		450.000

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	450.000
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**S 1.338.868.440**
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**4.025.000**

			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.025,000
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**1.300.678.440**
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	979.532.600
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	321.145.840
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**34.165.000**
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	31.225.000
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.940,000
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**600.000**
		Kegatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**600.000**

			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	600,000
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PNGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**600.000**
		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**600.000**
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	600,000
				8.364.779.278

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 dengan total pagu **Rp8.364.779.278 (Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)** dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV-1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TAKALAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA							**8.430.569.419,00**	**8.415.592.258,00**	**8.364.779.278,00**	**-65.790.141,00**							**9.040.470.570,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.430.569.419,00**	**8.415.592.258,00**	**8.364.779.278,00**	**-65.790.141,00**							**9.040.470.570,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.430.569.419,00**	**8.415.592.258,00**	**8.364.779.278,00**	**-65.790.141,00**							**9.040.470.570,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang perankat daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah**				**90 100 % %**	**90 100 % %**	**7.101.443.859,00**	**7.067.523.818,00**	**7.020.610.838,00**	**659.041.711,00**							**7.760.485.570,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Cakupan Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah Yang di Susun Tepat Waktu*				100 % 7 Dokumen	100 % 7 Dokumen	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		20.565.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.855.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.855.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.855.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik Capaian Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik Capaian Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik [deleted] Capaian Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik [deleted]1 Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.373.986.359,00	6.384.590.378,00	6.384.590.498,00	10.604.139,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		6.741.533.410,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	6.371.586.359,00	6.382.190.378,00	6.382.190.498,00	10.604.139,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.732.678.410,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana				4 Laporan	4 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola			1.855.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

			n/Semesteran SKPD													Pemerintahan dan Pelayanan Publik				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase administrasi barang milik daerah yang baik* *Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah*				100 %	100 %	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		3.750.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			750.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.250.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			750.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik* *Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	16.906.000,00	16.906.000,00	4.900.000,00	-12.006.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		72.500.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	16.906.000,00	16.906.000,00	4.900.000,00	-12.006.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.500.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	179.030.500,00	184.434.940,00	149.527.840,00	-29.502.660,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		363.998.700,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	4.319.200,00	3.947.200,00	3.947.200,00	-372.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.514.600,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	89.486.600,00	92.681.500,00	74.509.400,00	-14.977.200,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			227.737.140,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.535.300,00	2.377.300,00	2.377.300,00	-158.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.669.400,00	17.078.940,00	17.078.940,00	409.540,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.131.460,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	24.750.000,00	27.080.000,00	27.080.000,00	2.330.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.601.500,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	38.870.000,00	38.870.000,00	22.135.000,00	-16.735.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			108.014.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		77.537.460,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.537.460,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di sediakan Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	476.582.000,00	427.793.500,00	427.793.500,00	-48.788.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		437.290.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	65.232.000,00	16.443.500,00	16.443.500,00	-48.788.500,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			690.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				104 Laporan	104 Laporan	395.400.000,00	395.400.000,00	395.400.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			396.600.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	48.699.000,00	47.559.000,00	47.559.000,00	-1.140.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		43.311.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	19.249.000,00	19.249.000,00	19.249.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	29.450.000,00	28.310.000,00	28.310.000,00	-1.140.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.311.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik**				**100 %**	**100 %**	**6.150.000,00**	**5.000.000,00**	**3.500.000,00**	**8.340.000,00**							**14.490.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan*				100 %	100 %	900.000,00	900.000,00	450.000,00	-450.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		900.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	450.000,00	-450.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			900.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan*				100 %	100 %	2.250.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	-1.250.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		8.735.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-650.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.735.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik*				100 %	100 %	2.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelayanan non perizinan yang dilaksanakan oleh kecamatan*				100 %	100 %	900.000,00	900.000,00	450.000,00	-450.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		1.855.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	450.000,00	-450.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.855.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan**				**95 100 % %**	**95 100 % %**	**1.318.775.560,00**	**1.338.868.440,00**	**1.338.868.440,00**	**-68.535.560,00**							**1.250.240.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan di desa*				100 %	100 %	3.975.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	50.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		4.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3.975.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	50.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di kelurahan*				100 %	100 %	1.280.350.560,00	1.300.678.440,00	1.300.678.440,00	20.327.880,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		1.200.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	1.151.186.000,00	917.960.000,00	979.532.600,00	-171.653.400,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.022.574.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	129.164.560,00	382.718.440,00	321.145.840,00	191.981.280,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			177.426.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang*				100 %	100 %	34.450.000,00	34.165.000,00	34.165.000,00	-285.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		46.240.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	31.500.000,00	31.225.000,00	31.225.000,00	-275.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.240.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	2.950.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	-10.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Persentase pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan**				**1 20 Kasus %**	**1 20 Kasus %**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**2.870.000,00**							**3.470.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase sinergisitas kepolisian negara , Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di kecamatan*				100 %	100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Masyarakat		3.470.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			3.470.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan Persentase urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan**				**95 100 % %**	**95 100 % %**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**600.000,00**	**3.800.000,00**							**5.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan*				100 %	100 %	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	-600.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		5.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	-600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**600.000,00**	**4.385.000,00**							**6.785.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase peraturan desa dan peraturan Kepala desa yang di susun*				100 %	100 %	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00	-1.800.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		6.785.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.835.000,00	KECAMATAN POLO NGBANGKENG UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	-600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.950.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	J U M L A H								**8.430.569.419,00**	**8.415.592.258,00**	**8.364.779.278,00**	**-20.817.255.718,00**							**9.040.470.570,00**	

BAB V
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Perubahan Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja Perubahan dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja Perubahan ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
4. Renja Perubahan Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;

5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Takalar, 10 Juni 2025

Camat Polongbangkeng Utara,

Aji Sangaji, S.I.P
Pembina
19880531 200701 1 002

PERUBAHAN RENJA
KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
TAHUN 2025





PEMERINTAH KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga seluruh rangkaian proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini merupakan manifestasi pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mappakasunggu ini juga tetap mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah. Secara substantif, Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil evaluasi dan refleksi atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mappakasunggu selama 6 bulan berjalan, dengan tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2022-2026.

Disadari bahwa Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 ini masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, saran serta kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam upaya perbaikan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun berikutnya.

Takalar, 10 Juli 2025

CAMAT MAPPAKASUNGGU

DODY RIYAN SAPUTRA, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP. 19870605 200701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR TABEL..... iv
DAFTAR GAMBAR..... v
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 4
1.3 Maksud dan Tujuan..... 6
1.3.1 Maksud..... 6
1.3.2 Tujuan..... 6
1.4 Sistematika Penulisan..... 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MAPPAKASUNGGU TRIWULAN I TAHUN 2025..... 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mappakasunggu Triwulan I Tahun 2025..... 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mappakasunggu..... 21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MAPPAKASUNGGU..... 30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 30
3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Mappakasunggu..... 32
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MAPPAKASUNGGU..... 35
4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 35
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025..... 36
BAB V PENUTUP..... 49
5.1 Catatan Penting..... 49
5.2 Kaidah Pelaksanaan..... 49
5.3 Rencana Tindak Lanjut..... 49

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mappakasunggu Semester I Kabupaten Takalar..... 9

Tabel II-2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025..... 13

Tabel II-3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I..... 13

Tabel II-4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun2025.....14

Tabel II-5 Rekapitulasi Capaian Kinerja berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025.....16

Tabel II-6 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.....22

Tabel III-1 Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar 2025.....33

Tabel IV-1 Program, Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah..... 35

Tabel IV-2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Jumlah Pagu Perubahan Renja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025..... 37

Tabel IV-3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025..... 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Renja Kecamatan Mappakasunggu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Mappakasunggu dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu yang disusun ini juga telah dilksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025 dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPD dan Renstra sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat.

Gambar I-1
Keterkaitan Renja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

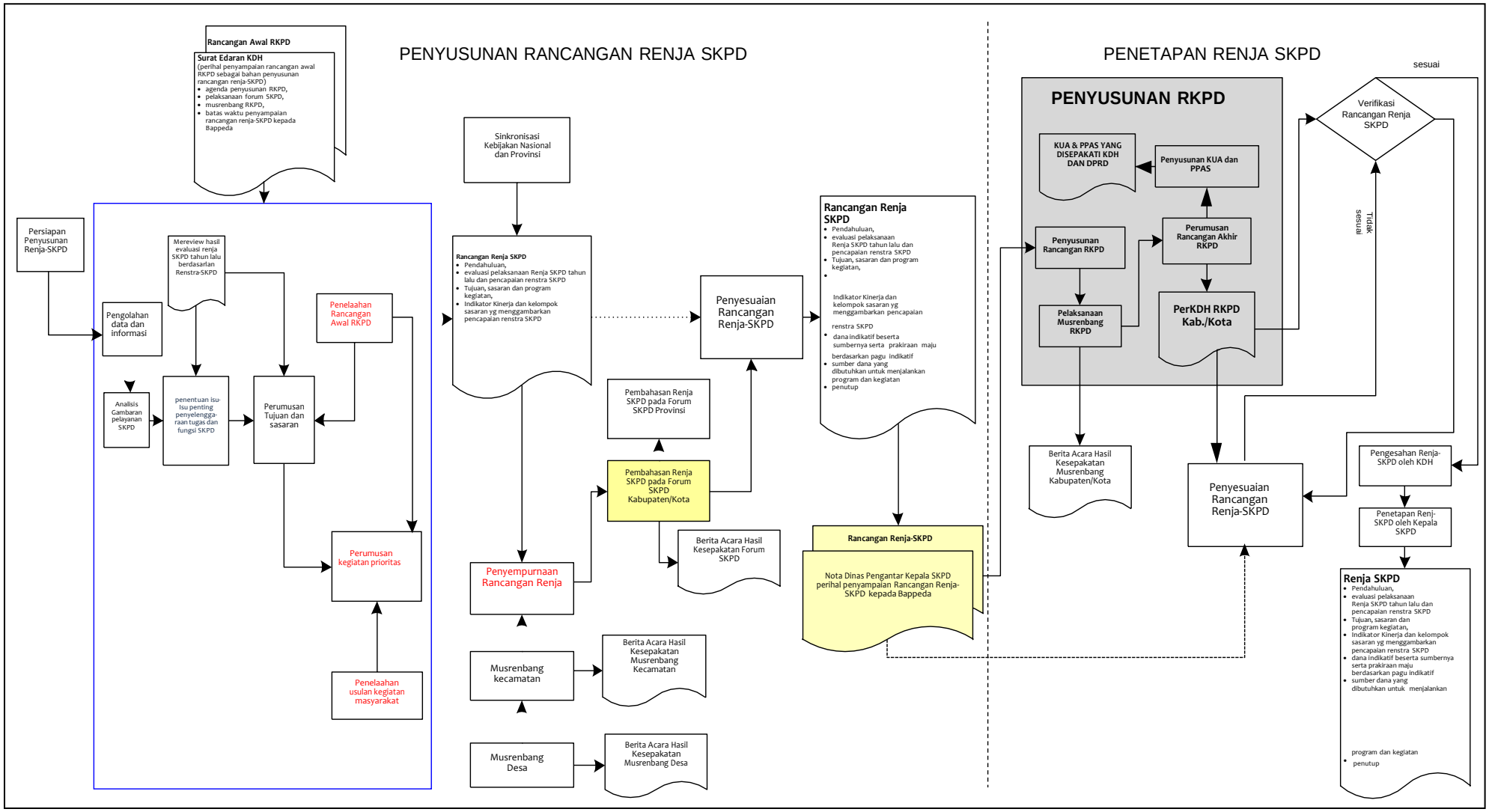

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renja memiliki nilai- nilai strategis, yaitu :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan Kecamatan Mappakasunggu;
2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Mappakasunggu selama 6 (Enam) Bulan;
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Kecamatan Mappakasunggu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan maksud :

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi Perubahan APBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kecamatan Mappakasunggu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025 terdiri dalam 5 (Lima) BAB sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025 Triwulan I.

Pada Bab ini berisi empat hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025 Triwulan I dan Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mappakasunggu

Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Tahun 2025 Triwulan I.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

Bab IV Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Renja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN MAPPAKASUNGGU TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mappakasunggu Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025 Triwulan I, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Mappakasunggu.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Mappakasunggu sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II-1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025 Triwulan I

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											Januari		Februari		Maret		I							
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	8		9		10		11		12		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
		7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
		7	01				KECAMATAN MAPPAKASUNGGU		100%	2.495.848.566	0,2%	92.179.602	7,4%	100.760.355	7,5%	221.713.692	15,1%	413.453.649	15%	413.453.649	15,13%	16,57%		
1	Meningkatnya tata kelola kinerja pada kantor Kecamatan Mappakasunggu	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	88%	2.176.629.346	0%	92.179.602	6%	98.460.355	6%	219.313.692	12%	408.753.649	12%	408.753.649	13,54%	18,78%		
1	Meningkatnya tata kelola kinerja pada kantor Kecamatan	7	01	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	% Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	100%	15.628.500	0%	-	6%	1.500.000	6%	1.345.000	11%	2.845.000	11,43%	2.845.000	11,43%	18,20%		
		7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3.542.200	-	-	-	350.000	-	250.000	-	600.000	- ,00	600.000	0,00%	16,94%		
		7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.150.400	-	-	0	550.000	0	500.000	0	1.050.000	0,40	1.050.000	40,00%	33,33%		
		7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAP-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.999.500	-	-	-	-	-	-	-	-	- ,00	-	0,00%	0,00%		
		7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3.436.400	-	-	0	600.000	0	595.000	0	1.195.000	0,40	1.195.000	40,00%	34,77%		
		7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- ,00	-	0,00%	0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)													16,00%	17,01%		
								Predikat kinerja													SR	SR		
2	Meningkatnya tata kelola kinerja pada kantor Kecamatan	7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan keuangan yang memenuhi Opini BPK	100%	1.922.968.196	4%	92.179.602	4%	92.665.355	7%	184.763.692	15%	369.608.649	15%	369.608.649	14,67%	19,22%	Kecamatan Mappakasunggu	
		7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji	252	1.386.140.760	18	92.179.602	18	92.165.355	36	184.213.692	72	368.558.649	72	368.558.649	28,57%	26,59%		
								Jumlah ASN yang mendapatkan TPP	216	522.733.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
								Jumlah ASN yang mendapatkan OL	24	8.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.022.900	-	-	0	250.000	0	250.000	0	500.000	0	500.000	18,00%	16,54%		
		7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	3.031.000	-	-	0	250.000	0	300.000	1	550.000	1	550.000	18,00%	18,15%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)													12,91%	12,26%		
								Predikat kinerja													SR	SR		
4	Meningkatnya tata kelola kinerja pada kantor Kecamatan	7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2.500.550	0%	-	8%	-	8%	400.000	17%	400.000	17%	400.000	16,67%	16,00%	Kecamatan Mappakasunggu	
		7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12	2.500.550	-	-	1	-	1	400.000	2	400.000	2	400.000	16,67%	16,00%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)													16,67%	16,00%		
								Predikat kinerja													SR	SR		
4	Meningkatnya tata kelola kinerja pada kantor Kecamatan	7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	3.501.100	0%	-	8%	300.000	8%	500.000	17%	800.000	17%	800.000	16,67%	22,85%	Kecamatan Mappakasunggu	
		7	01	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	3.501.100	-	-	1	300.000	1	500.000	2	800.000	2	800.000	16,67%	22,85%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)													16,67%	22,85%		
								Predikat kinerja													SR	SR		
4	Meningkatnya tata kelola kinerja pada kantor Kecamatan	7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	31.080.000	0%	-	8%	1.150.000	8%	2.650.000	17%	3.800.000	17%	3.800.000	16,67%	12,23%	Kecamatan Mappakasunggu	

		7	01	01	2,06	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	7.920.000	-	-	1	650.000	1	650.000	2	1.300.000	2	1.300.000	16,67%	16,41%		
		7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	23.160.000	-	-	1	500.000	1	2.000.000	2	2.500.000	2	2.500.000	16,67%	10,79%		
																					16,67%	13,60%		
																					ST	SR		
4	Meningkatnya tata kolola kinerja pada kantor Kecamatan						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	100%	7.700.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Mappakasunggu	
		7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	5	7.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%		
																					0,00%	0,00%		
																					SR	SR		
5	Meningkatnya tata kolola kinerja pada kantor Kecamatan	7	01	01	2,08		**Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**% Jumlah ketersediaan jasa penunjang**	100%	159.060.000	0%	-	0%	455.000	16%	26.055.000	17%	26.510.000	17%	26.510.000	16,67%	16,67%	Kecamatan Mappakasunggu	
		7	01	01	2,08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa Tenaga Administrasi dan Supir yang Dibayarkan (Orang)	72	38.400.000	-	-	-	-	12	6.400.000	12	6.400.000	12	6.400.000	16,67%	16,67%		
		7	01	01	2,08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Internet (WIFI) yang Dibayarkan	12	5.460.000	-	-	1	455.000	1	455.000	2	910.000	2	910.000	16,67%	16,67%		
		7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga administrasi (Kepala Lingkungan dan Imam Lingkungan)	288	115.200.000	-	-	-	-	48	19.200.000	48	19.200.000	48	19.200.000	16,67%	16,67%		
																					16,67%	16,67%		
																					SR	SR		
6	Meningkatnya tata kolola kinerja pada kantor Kecamatan	7	01	01	2,09		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Jmlh. barang yang dipelihara**	100%	34.191.000	0%	-	10%	2.390.000	9%	3.600.000	19%	5.990.000	19%	5.990.000	18,65%	17,52%	Kecamatan Mappakasunggu	
		7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	2.871.000	-	-	-	-	1	1.500.000	1	1.500.000	0,5	1.500.000	50,00%	52,25%		
								Jumlah Bahan Bakar dan Pelumas	1.860	26.217.000	-	-	185	2.390.000	162	2.100.000	367	4.490.000	367	4.490.000	18,66%	17,13%		
		7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	5.103.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%		
																					22,99%	23,12%		
																					SR	SR		
																					14,91%	15,19%		
																					SR	SR		
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Adanya sub Kegiatan yang mencapai Kinerja 100% dikarenakan Sub Kegiatan tersebut telah selesai di Triwulan I untuk mendukung proses kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Mappakasunggu																								
Faktor penghambat: : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.																								
Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																								
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat desa/ Kelurahan yang di berdayakan**	100%	302.839.220	0%	-	0%	2.200.000	8%	2.300.000	15%	4.500.000	15%	4.500.000	15,00%	1,49%	Kecamatan Mangarabombang	
		7	01	03	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pemberdayaan Pembangunan dan Penyelenggaraan**	100%	3.505.000	0,00%	-	100,00%	3.405.000	0,00%	100.000	100%	3.505.000	100%	3.505.000	100,00%	100,00%		
		7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Dokumen)	1	3.505.000	-	-	1	3.405.000	-	100.000	1	3.505.000	1	3.505.000	100,00%	100,00%		
																					100,00%	100,00%		
																					ST	ST		
		7	01	03	2,02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Prosentase Pemberdayaan Pembangunan dan Penyelenggaran Pemerintahan yang baik**	100%	277.334.490	0,00%	-	6,67%	400.000	6,67%	400.000	13,33%	800.000	13%	800.000	13%	0%		
		7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun di Kelurahan	3	140.432.020	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%		
		7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Poktan dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	136.902.470	-	-	1	400.000	1	400.000	2	800.000	2	800.000	16,67%	0,58%		
																					8,33%	0,29%		
																					SR	SR		
		7	01	03	2,03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang**	100%	21.999.730	0,00%	-	8,33%	1.800.000	8,33%	1.900.000	17%	3.700.000	17%	3.700.000	16,67%	16,82%		
		7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	21.999.730	-	-	1	1.800.000	1	1.900.000	2	3.700.000	2	3.700.000	16,67%	16,82%		
																					16,67%	16,82%		
																					SR	SR		
																					41,67%	39,04%		
																					SR	SR		
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																								
Faktor penghambat : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.																								
Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																								

		7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		100%	16.380.000	0,00%	-	8,33%	100.000	8,33%	100.000	17%	200.000	16,67%	200.000	16,67%	1,22%	Kecamatan Mangarabombang	
		7	01	04	2,01		**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**		100%	16.380.000	0,00%	-	8,33%	100.000	8,33%	100.000	17%	200.000	16,67%	200.000	16,67%	1,22%		
		7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Indonesia		12	16.380.000	-	-	1	100.000	1	100.000	2	200.000	2	200.000	16,67%	1,22%		
								Rata-rata capaian kinerja (%)													16,67%	1,22%		
								Predikat kinerja													SR	SR		
								Rata-rata capaian kinerja Program (%)													16,67%	1,22%		
								Predikat kinerja													SR	SR		
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																								
Faktor penghambat : Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2025 dikarenakan lambatnya Proses pencairan Uang Persediaan.																								
Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																								
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																					21,31%	19,55%		
Predikat Kinerja Program																					SR	SR		
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																								
1. sub kegiatan yang belum mencapai target kinerja dikarenakan sub kegiatan tersebut belum sesuai jadwal pelaksanaan program dan kegiatan serta rencana penarikan dana.																								
2.																								
3.																								
4.																								
5.																								
Faktor penghambat:																								
1.Sub Kegiatan yang belum mencapai target Kinerja dikarenakan Sub Kegiatan tersebut belum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.																								
2.Sub Kegiatan yang tidak terealisasi Anggarannya, dikarenakan Sub Kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.																								
3.Ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.																								
4.																								
5.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
1. Proses Penarikan Dana khusus Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Pendidikan, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Supir agar dapat dianggarkan setiap bulan.																								
2.																								
3.																								
4.																								
5.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																								
1. Sebaiknya sub kegiatan, target kinerja dan anggaran disesuaikan dengan yang telah ditetapkan agar kinerja dapat tercapai.																								
2.																								
3.																								
4.																								
5.																								

Sumber : Laporan Monev TW I RKPD Tahun 2025 Kecamatan Mappakasunggu.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKPD Kecamatan Mappakasunggu Triwulan I Tahun 2025, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
   - ➢ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Sub Kegiataan TPP dan OL.
   - ➢ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
     - Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
   - ➢ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
     - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.
     - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKPD Kecamatan Mappakasunggu Triwulan I Tahun 2025, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
   - ➢ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
   - ➢ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.

➢ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

➢ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik.

➢ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

➢ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

➢ Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Indonesia.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKPD Kecamatan Mappakasunggu Triwulan 1 Tahun 2025, yaitu :

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
  - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran/Efisiensi.
2. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
3. Masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan yang ditimbulkan oleh penggabungan program dan kegiatan yang mengalami peleburan.
4. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program.
5. Adapun sub Kegiatan yang tidak tercapai, dikarenakan Sub Kegiatan tersebut memang belum masuk waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kas.
6. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan.
7. Peran aktif Kepala Kecamatan selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
8. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Mappakasunggu

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Mappakasunggu, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya melakukan penyusunan Renstra SKPD yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;

2. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
3. Adanya koordinasi/konsultasi serta sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal yang terjalin dalam organisasi;
4. Perlunya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
5. Perlunya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan uraian atas faktor dan Implikasi perencanaan dan pengganggaran pencapaian kinerja Kecamatan Mappakasunggu menyampaikan Kebijakan yang dapat diambil/tindak lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program di lingkungan Bappelitbangda serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terus menerus.
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten dalam perencanaan keuangan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
5. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
6. Pelaksanaan kegiatan sesuai Renstra dan RPJMD.

7. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

2.1.7 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu 2025 yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecamatan Mappakasunggu	3	12	23	3	12	26
TOTAL		**3**	**12**	**23**	**3**	**12**	**26**

Sumber : Laporan Monev TW I RKPD Tahun 2025 Kecamatan Mappakasunggu.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 3, jumlah kegiatan 12, dan jumlah sub kegiatan 23, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 3, jumlah indikator kegiatan sebanyak 12, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 26.

2.1.8 Evaluasi Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan pada APBD Hingga Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	2	3	6	7	8
1	Kecamatan Mappakasunggu	2.495.848.566	413.453.649	15,13%	16,57%
TOTAL		**2.495.848.566**	**413.453.649**	**15,13%**	**16,57%**

Sumber : Laporan Monev TW I RKPD Tahun 2025 Kecamatan Mappakasunggu.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Pagu Anggaran Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025 sebesar Rp. 2.495.848.566,-. Dengan realisasi hingga Triwulan I sebesar Rp. 413.453.649,-. Sedangkan Persentase serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 15,13% untuk Fisik dan 16,57% untuk keuangan.

2.1.9 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Mappakasunggu Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang capaian Kinerja pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk tingat capaian Pendanaan dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk tingat capaian Pendanaan dengan realisasi

anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kecamatan Mappakasunggu	3	2	1	0	12	3	7	2	23	7	10	6
TOTAL		**3**	2	1	0	12	3	7	2	23	7	10	6

Sumber : Laporan Monev TW I RKPD Tahun 2025 Kecamatan Mappakasunggu.

1. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program**

   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Kecamatan Mappakasunggu dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Mappakasunggu sebanyak 3 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 2 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program (realisasi >10-20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 0 program.

2. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan**

   Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 3 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih

dalam kategori rendah yaitu (realisasinya 0-10 persen), sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 7 kegiatan dengan (realisasi >10-20 persen), dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 2 kegiatan.

3. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan**

Evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 23 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 7 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah (realisasinya 0-10 persen), sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 10 sub kegiatan (realisasi >10-20 persen), dan 6 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi diatas 20 persen.

2.1.10 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Mappakasunggu Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang capaian Kinerja memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi kinerja pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk tingat capaian kinerja dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk tingat capaian kinerja dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I
Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kecamatan Mappakasunggu	3	0	3	0	12	1	10	1	23	5	13	5
TOTAL		**3**	0	3	0	12	1	10	1	23	5	13	5

Sumber : Laporan Monev TW I RKPD Tahun 2025 Kecamatan Mappakasunggu.

1. **Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Program**

   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada level program untuk Kecamatan Mappakasunggu dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Mappakasunggu sebanyak 3 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah sebanyak 0 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 3 program (realisasi >10-20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 0 program.

2. **Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Kegiatan**

   Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pada level kegiatan pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu (realisasinya 0-10 persen), sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 10 kegiatan dengan (realisasi >10-20 persen), dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 1 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level sub Kegiatan

Evaluasi capaian kinerja pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 23 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 5 sub kegiatan yang capaian kinerja masih rendah (realisasinya 0-10 persen), sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi sedang terdapat 13 sub kegiatan (realisasi >10-20 persen), dan 5 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi kinerja tinggi diatas 20 persen.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mappakasunggu

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mappakasunggu berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berdasarkan tungas dan fungsi Kecamatan Mappakasunggu serta ketentuan peraturan perundang – undangan. Adapun Tabel analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mappakasunggu sebagai berikut :

Tabel II-6
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	IKU	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029			REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2024	2024		2025	2026	2027	2025 Triwulan I	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	√	70	85,74%	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	85%	86%	87%	35%	86%	87%	
2	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	√	89%	89%	Persentase Pelayanan Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	90%	91%	92%	35%	91%	92%	
3	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM)	√	100%	100%	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	85%	86%	87%	32%	86%	87%	
4	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (Non Standar Pelayanan Minimal)	√	100%	100%	Nilai SAKIP Kecamatan Mappakasunggu	B (67)	B (68)	B (69)	BB (70,08)	B (68)	B (69)	
5	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	√	75%	75%	Tingkat Literasi Digital ASN Kantor Kecamatan Mappakasunggu	70%	75%	80%	40%	75%	80%	
6	Angka Kriminalitas per 100.000 Penduduk	√	25	14								
7	Persentase desa status berkembang menuju Desa Maju dan Mandiri	√	0%	0%								
8	Jumlah desa status berkembang menuju Desa maju dan Mandiri	√	1 Desa Maju 2 Desa Berkembang	2 Desa Maju 1 Desa Berkembang								
9	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	√	75%	96,00%								
10	Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu	√	B (62%)	B (62,75)								

Berdasarkan tabel II-6 di atas dapat di lihat bahwa capaian kinerja masing masing indikator beserta faktor pendukung dan penghambat pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 Triwulan I yaitu :
   - ✓ Tahun 2024 target 70% dengan realisasi 85,74% melebihi target dikarenakan banyaknya Masyarakat/Penerima Layanan mengisi Kuesioner.
   - ✓ Tahun 2025 target 85 % dengan realisasi Triwulan I 35% belum mencapai target karena baru Triwulan I dengan responden 26 orang penerima layanan.
2. Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban Tahun 2024 dengan capaian sebagai berikut :
   - ✓ Tahun 2024 target 89% dengan realisasi 89% dengan rasio capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban mencerminkan dari upaya dan keberhasilan Kecamatan Mappakasunggu dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warganya serta mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan harmonis.
3. Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM) pada Tahun 2023-2024, yaitu :
   - ✓ Tahun 2024 target 100 % dengan realisasi 100% dengan rasio capaian 100% sesuai dengan target. Keberhasilan Kecamatan Mappakasunggu dalam memenuhi standar mutu pelayanan publik yang telah ditetapkan mencerminkan sejauh mana kecamatan sebagai unit pelaksana pelayanan terdepan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan.
4. Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan Non SPM dengan capaian, yaitu :
   - ✓ Tahun 2024 target 100 % dengan realisasi 100% dengan rasio capaian 100% sesuai dengan target. Pemerintah Kecamatan Mappakasunggu dapat memastikan bahwa seluruh aspek pelayanan, baik yang wajib

(SPM) maupun yang dikembangkan (Non-SPM), berjalan efektif dan efisien sesuai standar yang ditetapkan.

5. Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik dengan capaian, yaitu :
   - ✓ Tahun 2024 target 75 % dengan realisasi 75% dengan rasio capaian 100% sesuai dengan target. Berdasarkan Data terkait Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Pendidikan dan Kesehatan) 52 Sapras yang ada di Kecamatan Mappakasunggu, sebanyak 13 mengalami Kerusakan baik berat maupun sedang (Sekolah, Pustu dan Posyandu) sedangkan 39 Sapras dalam kondisi Baik selama periode tersebut.
6. Tingkat Angka Kriminalitas yang dicapai selama periode 2024 , yaitu :
   - ✓ Tahun 2024 target 25 dengan realisasi 14. Tingkat Angka Kriminalitas mengalami penurun signifikan selama Tahun 2024 dengan jumlah penduduk sebanyak 10.477 dengan jumlah Kasus sebanyak 14 yang tertangani dengan rasio tingkat Angka Kriminalitas sebesar 13, 36 %.
7. Persentase Desa Status Berkembang menuju Desa Maju dan Mandiri yang dicapai selama periode 2024 , yaitu :
   - ✓ Tahun 2024 target 0 % dengan realisasi 0%. Persentase Desa Status Berkembang menuju Desa Maju dan Mandiri tersebut terjadi secara dinamis dari waktu ke waktu dan tergantung pada banyak faktor. Meskipun tidak ada persentase pasti, tren yang terjadi menunjukkan bahwa jumlah desa dengan status berkembang terus menurun seiring dengan peningkatan jumlah desa maju dan mandiri.
8. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat dengan capaian, yaitu :
   - ✓ Tahun 2024 target 75 % dengan realisasi 96% dengan rasio capaian 128% melebihi target. Hal ini menunjukkan tingkat aktivitas yang tinggi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti PKK, LPM, dan Karang Taruna selama periode tersebut.

9. Jumlah desa status berkembang menuju Desa maju dan Mandiri Tahun 2024, yaitu :
   - ✓ Tahun 2024 target 1 Desa Maju 2 Desa Berkembang dengan realisasi 2 Desa Maju 1 Desa Berkembang melebihi target karena Desa Soreang naik status menjadi Desa Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun.
10. Indeks Reformasi Birokrasi hanya dilakukan penilaian ditingkat kabupaten. karena di tingkat kecamatan tidak diukur secara seragam oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) seperti evaluasi yang dilakukan di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
11. Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu pada Tahun 2024-2025 dengan capaian, yaitu :
    - ✓ Tahun 2024 target B (62) dengan realisasi mendapat Penilaian "B" (62,75) atau terjadi kenaikan tipis, Nilai predikat SAKIP dari Target.
    - ✓ Tahun 2025 target B (67) dengan realisasi mendapat nilai BB (70,08) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah Internal Inspektorat pada tanggal 20 Maret 2025.
12. Persentase Pelayanan Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2025 Triwulan I yaitu Target 90% dengan Realisasi sampai Triwulan I yaitu 35% karena Alur pelayanan yang baik, tidak berbelit-belit, dan efisien sehingga membantu penyelesaian yang lebih cepat.
13. Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2025 Triwulan I yaitu Target 85% dengan Realisasi Triwulan I sebesar 32%. Berdasarkan aduan yang ditindaklanjuti kecamatan selama Triwulan I.
14. Tingkat Literasi Digital ASN Kantor Kecamatan Mappakasunggu Target 70% dengan Realisasi Triwulan I sebesar 40%. Inisiatif digitalisasi yang dijalankan oleh pemerintah Kecamatan Mappakasunggu menunjukkan adanya upaya serius untuk meningkatkannya.

2.2.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Indikator Kinerja IKU Kecamatan Mappakasunggu

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2024 dan Tahun 2025 Triwulan I adalah :

Faktor Internal

1. **Sumber daya manusia (SDM):** Kualitas, kompetensi, dan motivasi pegawai kecamatan memainkan peran penting dalam mencapai IKU. Pelatihan yang tidak optimal dapat menghambat peningkatan kapasitas pegawai.
2. **Kepemimpinan camat:** Gaya kepemimpinan camat yang efektif dapat memacu kinerja bawahan melalui pemberian semangat kerja, pelatihan, dan perhatian terhadap kebutuhan pegawai.
3. **Budaya kerja:** Budaya kerja yang positif, kolaboratif, dan disiplin sangat memengaruhi kinerja pegawai. Sebaliknya, budaya kerja yang kurang optimal dapat berdampak pada pencapaian program.
4. **Sarana dan prasarana:** Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana, seperti peralatan kantor, juga memengaruhi kinerja kecamatan.
5. **Manajemen kinerja:** Sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang terstruktur dan objektif berperan dalam mencapai target IKU.
6. **Koordinasi internal:** Komunikasi dan kerja sama yang baik antar subbagian dan seksi di dalam kecamatan, serta dengan pemerintah desa dan kelurahan, dapat meningkatkan efektivitas kinerja.

Faktor Eksternal

1. **Dukungan kebijakan dan anggaran:** Kebijakan yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah kabupaten/kota sangat vital dalam menunjang kegiatan di tingkat kecamatan.
2. **Partisipasi masyarakat:** Keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pemberdayaan dan pembangunan yang diinisiasi oleh kecamatan dapat mendorong peningkatan capaian IKU.

3. **Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan:** Perubahan isu sosial, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat memengaruhi cara kecamatan merumuskan dan mencapai IKU.
4. **Sistem data:** Kurangnya sinkronisasi sistem data antara kecamatan dan dinas terkait, misalnya dalam hal administrasi kependudukan, dapat menghambat kinerja pelayanan.

2.2.2 Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Indikator Kinerja IKU Kecamatan Mappakasunggu.

Ada beberapa permasalahan umum yang kerap dihadapi kecamatan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain keterbatasan sumber daya, koordinasi yang kurang optimal, dan sistem pelaporan yang belum terintegrasi. Berikut adalah uraian permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan:

Permasalahan

1. **Keterbatasan sumber daya**
   - ☑ **Sumber daya manusia:** Jumlah aparatur di tingkat kecamatan seringkali terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas, termasuk dalam pengumpulan dan pengolahan data IKU.
   - ☑ **Sarana dan prasarana:** Infrastruktur pendukung seperti perangkat komputer, akses internet, dan kendaraan operasional mungkin belum memadai di beberapa wilayah, sehingga menghambat proses administrasi dan pelayanan.
   - ☑ **Anggaran:** Dana operasional yang terbatas dapat menjadi kendala dalam melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian IKU.
2. **Koordinasi yang kurang optimal**
   - ☑ **Antar-seksi:** Kurangnya komunikasi dan koordinasi di internal kecamatan dapat menyebabkan tumpang tindih pekerjaan atau justru ada tugas yang tidak dikerjakan secara maksimal.
   - ☑ **Dengan kelurahan / desa :** Kecamatan bertugas mengoordinasikan kegiatan di tingkat kelurahan/desa, namun

koordinasi ini seringkali tidak berjalan efektif, terutama dalam hal pelaporan data dan pelaksanaan program.

- ☑ **Dengan instansi vertikal:** Diperlukan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal atau perangkat daerah lain di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan program kecamatan selaras dengan rencana strategis daerah.

3. **Kurangnya pemahaman tentang IKU**
   - ☑ **Definisi yang tidak jelas:** Tidak semua aparatur memiliki pemahaman yang sama mengenai IKU dan cara pengukurannya. IKU yang ditetapkan terkadang terlalu umum dan tidak spesifik.
   - ☑ **Fokus pada proses, bukan hasil:** Pelaporan seringkali lebih berorientasi pada kegiatan yang telah dilakukan (proses), bukan pada hasil yang dicapai (IKU).

Solusi

1. **Peningkatan sumber daya**
   - ☑ **Pengembangan SDM:** Berikan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada aparatur kecamatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang IKU, pengumpulan data, dan pelaporan yang efektif.
   - ☑ **Optimalisasi sarana dan prasarana:** Alokasikan anggaran untuk pengadaan perangkat kerja yang memadai, terutama untuk meningkatkan konektivitas internet dan sistem informasi.
   - ☑ **Pemanfaatan anggaran yang lebih efisien:** Lakukan perencanaan anggaran yang lebih strategis untuk memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian IKU.
2. **Penguatan koordinasi**
   - ☑ **Rapat koordinasi rutin:** Adakan rapat koordinasi mingguan atau bulanan secara terstruktur di internal kecamatan dan dengan pihak kelurahan/desa untuk memantau progres dan menyelesaikan kendala.

- ☑ **Fasilitasi komunikasi digital:** Manfaatkan platform komunikasi digital seperti grup chat atau aplikasi kolaborasi untuk mempermudah komunikasi dan pertukaran informasi.
- ☑ **Peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):** Tingkatkan peran dan kapasitas PPTK dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan agar lebih terarah dan cepat.
- ☑ **Fokus pada hasil:** Libatkan aparatur dalam penyusunan IKU agar mereka memahami pentingnya setiap indikator dan berorientasi pada pencapaian hasil.

3. **Pembangunan sistem informasi terpadu**
   - ☑ **Sistem pelaporan digital:** Kembangkan atau manfaatkan sistem informasi yang memungkinkan kelurahan/desa melaporkan data secara *online* dan terintegrasi dengan sistem di kecamatan dan kabupaten.
   - ☑ **Analisis data berkala:** Lakukan analisis data IKU secara berkala untuk mengidentifikasi tren, mengevaluasi keberhasilan, dan merencanakan perbaikan di masa depan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Mappakasunggu selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mappakasunggu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025-2029, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025-2029, yang terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mappakasunggu yaitu pada : **Asta Cita - 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi** serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

3.1.3 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025 adalah :

- PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak asasi Manusia (HAM).
- PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- PN 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi , kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- PN 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

2.3 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Kecamatan Mappakasunggu yaitu : **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di tingkat Kecamatan Mappakasunggu".** Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka Kecamatan Mappakasunggu menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel III.1

Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja

Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025 (Renstra 2023-2026)			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 (Renstra 2025-2029)		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
1	2	3	4	5	6
T1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	81,25	T1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di tingkat Kecamatan Mappakasunggu	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	85%
	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	90%	S1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S1.1. Persentase Pelayanan Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	90%
S1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM)	100%		S1.2. Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	85%
	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan Non SPM	100%	S2. Meningkatnya tata kelola kinerja pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu	S.2 .1 Nilai SAKIP Kecamatan Mappakasunggu	B (67)
S1.2. Meningkatnya koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	80%		S.2.2 Tingkat Literasi Digital ASN Kantor Kecamatan Mappakasunggu	70%

RENJA POKOK TAHUN 2025 (Renstra 2023-2026)			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 (Renstra 2025-2029)		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
1	2	3	4	5	6
S1.3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas per 100.000 Penduduk	20			
T2. Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa status berkembang menuju status Desa maju	0%			
S2.1. Meningkatnya status desa	Jumlah desa status berkembang menuju Desa maju	2 Desa Maju 1 Desa Berkembang			
S2.2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	83%			
T3. Meningkatkan tata kelola pada kantor Kecamatan Mappakasunggu	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian hanya di Kabupaten			
S3.1. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu	Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu	B			

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV-1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Rp. 300.620.007,00**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Rp. 3.505.000,00**
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 3.505.000,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Rp. 276.465.277,00**
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 160.037.997,00
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 116.427.280,00

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Rp. 20.649.730,00**
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 20.649.730,00
2.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**Rp. 13.500.000,00**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Rp. 13.500.000,00**
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 13.500.000,00

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Sub bab ini menyajikan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, sumber pendanaan masing – masing sub kegiatan, penyebaran lokasi kegiatan serta rumusan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang telah diinput dalam aplikasi SIPD RI.

4.2.1 Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sumber Pendanaan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025 terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 24 Sub kegiatan, setelah efisiensi dengan total anggaran sebesar **Rp. 2.468.255.963,00.-** berikut ini tabel penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta sumber pendanaan.

Tabel IV-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Jumlah Pagu

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM RENJA PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN RENJA PERUBAHAN		JUMLAH SU KEGIATAN RENJA PERUBAHAN		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RENJA 2025	PENJABARAN APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025	RENJA 2025	PENJABARAN APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025	RENJA 2025	PENJABARAN APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025	RENJA 2025	PENJABARAN APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025	BARU	BERTAMBAH/BERKURANG	BARU	BERTAMBAH/BERKURANG	BARU	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Kecamatan Mappakasunggu	3	3	3	12	12	12	24	24	24	2.598.505.070,00	2.598.505.070,00	2.468.255.963,00	3	0	12	0	24	0	Kecamatan Mappakasunggu
JUMLAH		**3**	**3**	**3**	**12**	**12**	**12**	**24**	**24**	**24**	**2.598.505.070,00**	**2.598.505.070,00**	**2.468.255.963,00**	**3**	**0**	**12**	**0**	**24**	**0**	

Sumber : SIPD RI Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025.

Dari tabel IV-2 dapat dilihat bahwa program pada Dokumen Renja Pokok Tahun 2025 Kecamatan Mappakasunggu sebanyak 3 (tiga) program, Kegiatan sebanyak 12 (Dua Belas) dan Sub Kegiatan sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) dengan Jumlah Pagu sebesar **Rp. 2.598.505.070**,- (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah). Adapun Program pada Penjabaran APBD Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) program, Kegiatan sebanyak 12 (sepuluh) dan Sub Kegiatan sebanyak 24 (Dua Puluh Enam) dengan Jumlah Pagu sebesar **Rp. 2.598.505.070**,- (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah). Sedangkan Program pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) program, Kegiatan sebanyak 12 (sepuluh) dan Sub Kegiatan sebanyak 24 (Dua Puluh Enam) dengan Jumlah Pagu sebesar **Rp. 2.468.255.963,00** (Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

4.2.2 Rincian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan Perubahan Renja 2025 Kecamatan Mappakasunggu

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mappakasunggu pada Perubahan Renja Tahun 2025 pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.3

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN MAPPAKASUNGGU							**2.598.505.070,00**	**2.495.848.566,00**	**2.468.255.963,00**	**-130.249.107,00**							**2.989.057.700,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.598.505.070,00**	**2.495.848.566,00**	**2.468.255.963,00**	**-130.249.107,00**							**2.989.057.700,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.598.505.070,00**	**2.495.848.566,00**	**2.468.255.963,00**	**-130.249.107,00**							**2.989.057.700,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.275.338.290,00**	**2.176.629.346,00**	**2.156.310.586,00**	**309.219.410,00**							**2.584.557.700,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.499.180,00	15.628.500,00	6.590.650,00	-6.908.530,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		17.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.999.730,00	3.542.200,00	1.528.280,00	-1.471.450,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.990,00	3.150.400,00	2.302.200,00	-197.790,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.780,00	2.999.500,00	0,00	-2.499.780,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.680,00	3.436.400,00	2.760.170,00	-239.510,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.021.785.830,00	1.922.968.196,00	1.919.160.036,00	-102.625.794,00			-	- -	-		2.301.157.700,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.016.286.180,00	1.916.914.296,00	1.916.914.336,00	-99.371.844,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.294.157.700,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.499.720,00	3.022.900,00	1.028.200,00	-1.471.520,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.999.930,00	3.031.000,00	1.217.500,00	-1.782.430,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	2.499.800,00	2.500.550,00	804.200,00	-1.695.600,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.499.800,00	2.500.550,00	804.200,00	-1.695.600,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.499.700,00	3.501.100,00	1.564.700,00	-935.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	2.499.700,00	3.501.100,00	1.564.700,00	-935.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	30.955.000,00	31.080.000,00	27.240.000,00	-3.715.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		33.100.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.480.000,00	7.920.000,00	8.580.000,00	2.100.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.100.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.475.000,00	23.160.000,00	18.660.000,00	-5.815.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.695.600,00	7.700.000,00	7.700.000,00	3.004.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	2.695.600,00	0,00	0,00	-2.695.600,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	168.345.180,00	159.060.000,00	159.060.000,00	-9.285.180,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		189.800.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	12 Laporan	44.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	-6.000.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			61.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	8.745.180,00	5.460.000,00	5.460.000,00	-3.285.180,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.800.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	31.058.000,00	34.191.000,00	34.191.000,00	3.133.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		32.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	28.058.000,00	29.088.000,00	29.088.000,00	1.030.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	5.103.000,00	5.103.000,00	2.103.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**305.166.780,00**	**302.839.220,00**	**298.445.377,00**	**75.333.220,00**							**380.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	3.900.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00	-395.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.900.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00	-395.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	277.266.780,00	277.334.490,00	274.490.397,00	-2.776.383,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		340.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	208.001.340,00	140.432.020,00	160.037.997,00	-47.963.343,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	69.265.440,00	136.902.470,00	114.452.400,00	45.186.960,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	24.000.000,00	21.999.730,00	20.449.980,00	-3.550.020,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		36.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000,00	21.999.730,00	20.449.980,00	-3.550.020,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**18.000.000,00**	**16.380.000,00**	**13.500.000,00**	**6.000.000,00**							**24.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	18.000.000,00	16.380.000,00	13.500.000,00	-4.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		24.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	16.380.000,00	13.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	J U M L A H								**2.598.505.070,00**	**2.495.848.566,00**	**2.468.255.963,00**	**130.249.107,00**							**2.989.057.700,00**	

Sumber : SIPD RI Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025.

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mappakasunggu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi, Lurah dan seluruh staf Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Cilallang , 10 Juli 2025
CAMAT MAPPAKASUNGGU

UCODY RIYAN SAPUTRA,S.IP
Pangkat : Pembina
NIP. 19870605 200701 1 001

PERUBAHAN RENJA 2025

DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KAB. TAKALAR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat Taufik dan hidayah-Nya, Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 telah selesai kami susun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini merupakan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Triwulan I Tahun 2025 dan sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 untuk antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Akhirnya tak lupa Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Takalar, Juni 2025
Kepala Dinas

Ir. H. SUKWANSYAH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP:19661231 19903 1 025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
DAFTAR TABEL III
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3
1.3.1 MAKSUD 3
1.3.2 TUJUAN 3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 4
BAB II EVALUASI PELAKSAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TRIWULAN 1 5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 23
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 28
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 28
3.1.1 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL PADA RKP TAHUN 2025 . 28
3.1.2 TEMA PEMBANGUNAN PADA RKP TAHUN 2025 28
3.1.2.1 PRIORITAS NASIONAL PADA RKP TAHUN 2025 28
3.2. TUJUAN DAN SASARAN 29
BAB IV RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 32
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 32
4.2 RENCANA PROGRAM,KEGIATAN SUB KEGIATAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 33
BAB V PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Sampai Dengan Triwulan 1 Tahun 2025 6
Tabel II.2 Rekapitulasi Jumlah Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025 21
Tabel II.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 hingga Triwulan I 22
Tabel II.4 Capaian Kinerja Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 24
Tabel II.5 *Capaian Kinerja* Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 27
Tabel III.1 Perubahan Tujuan,Sasaran serta Target Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Takalar Tahun 2025 . 35
Tabel IV.1 Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah 37
Tabel IV.2 Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun

2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Kabupaten Takalar Hewan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9 Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 32);

10 Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 1);

11 Peaturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan maksud :

a. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 ke dalam program/kegiatan tahunan;
b. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
c. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan empat tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 terdiri dalam 5(Lima) BAB sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Triwulan I, memuat tentang evaluasi kinerja berdasarkan rencana Kerja yang telah ditetapkan tahun sebelumnya sesuai dengan renstra dan tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, analisis kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, memuat tentang tujuan, sasaran program dan kegiatan berdasarkan renstra dan tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan khusus untuk tahun 2025.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan,Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, berisi tentang ringkasan gambaran rencana kerja berdasarkan renstra dan tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan khusus untuk Tahun Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V Penutup,Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sampai Dengan Triwulan I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini:

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Sampai Dengan Tahun 2025

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
							DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																	
		03					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
		03	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**30,823,376,214**		**-**	**100%**	**6,117,295,660**	**26.1%**	**782,270,834**	**22%**	**781,590,834**	**21.72%**	**12.78 %**		
1		**03**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang perangkat daerah**	**######**	**Persen**	**14,236,502,520**	**0.00%**	**-**	**100%**	**3,528,814,160**	**30%**	**686,923,634**	**30%**	**686,923,634**	**30.45%**	**19.47 %**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEAWAN**	

		3	27	01	2.01		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	100%	Persen	67,366,800	0.00%	-	100%	19,041,800	57.14%	4,374,040	57.14 %	4,374,040	57.14%	22.97 %		
	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	9,931,800			2	11,093,190	1	3,343,000	1	3,343,000	50%	30%		
		3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	12,818,000			1	1,290,000	1	-	1	-	100%	0%		
		3	27	01	2.01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	11,504,300			1	2,135,400	-	-	-	-	0%	0%		
		3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	12,228,700			1	1,008,600	1	1,008,600	1	1,008,600	100%	100%		
		3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	11,700,000			1	596,900	-	-	-	-	0%	0%		

		3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4	Laporan	9,184,000			1	2,917,710	1	22,440	1	22,440	100%	1%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			**58.33%**	**21.82 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																			**R**	**SR**		
		3	27	01	2.02		**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100.00%	Persen	13,290,087,320	0.00%	0	100.00%	3,339,208,280	14.95%	656,222,034	14.95 %	656,222,034	14.95%	19.65 %		
	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji	2128	Orang/ Bulan	9,719,821,104			420	2,429,955,276	120	655,919,634	120	655,919,634	29%	27%		
								Jumlah pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	1824	Orang/ Bulan	3,558,074,016			360	889,518,504	-	-	-	-	0%	0%		
								Jumlah pegawai yang menerima Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						33	11,280,000	-	-	-	-	0%	0%		
		3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	12,192,200			1	6,247,700	1	-	1	-	100%	0%		

		3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan				2	2,206,800	1	302,400	1	302,400	50%	14%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			**35.71%**	**8.14 %**		
Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**		
		3	27	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah**	100%	Persen	22,524,200	0.00%	0	100.00%	6,162,500	50.00%	1,217,000	50.00 %	1,217,000	50.00%	19.75 %	SEKRETARIAT	
	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	5,611,800			1	1,014,600	1	442,000	1.00	442,000	100.00%	43.56 %		
		3	27	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	8,700,000			1	3,582,200	1	498,000	1.00	498,000	100.00%	13.90 %		
		3	27	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	Dokumen	8,212,400			4	1,565,700	1	277,000	1.00	277,000	25.00%	17.69 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			**75.00%**	**25.05 %**		
Predikat Kinerja																			**S**	**SR**		
		3	27	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian**	100%	Persen	-	#DIV/0!	-	100.00%	11,430,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	SEKRETARIAT	

	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						30	11,430,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				**0.00%**	**0.00 %**		
Predikat Kinerja																				**SR**	**SR**		
		3	27	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	100%	Persen	602,071,000	0.00%	-	100%	68,171,900	12.50%	7,077,500	12.50 %	7,077,500	12.50%	10.38 %	SEKRETARIAT	
	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	Jenis	20,024,600			2	1,938,000	1	820,000	1.00	820,000	50.00%	42.31 %		
		3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Unit	237,955,300			2	24,675,900	1	1,452,500	1.00	1,452,500	50.00%	5.89%		
		3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1	129,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	21,071,100			1	504,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Eksemplar	29,600,000			2	1,200,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		

		27	01	2.06		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	Kali	293,420,000			56	39,725,000	6	4,805,000	6.00	4,805,000	10.71%	12.10 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				**18.45%**	**10.05 %**		
Predikat Kinerja																				**SR**	**SR**		
		3	27	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	#DIV/0!	Persen	-	#DIV/0!	0	100.00%	3,570,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%		
	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan						1	3,570,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				**0.00%**	**0.00 %**		
Predikat Kinerja																				**SR**	**SR**		
		3	27	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	100.00%	Persen	254,453,200	0.00%	0	100.00%	79,458,300	17.65%	18,033,060	17.65 %	18,033,060	17.65%	22.69 %		
	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah meteran/ rekening air yang dibayar (unit bulan)	48	Unit Bulan	4,953,200			12	1,238,300	2	233,060	2.00	233,060	16.67%	18.82 %		
		3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Jenis				2	1,420,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		

		3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80	Orang	249,500,000.00			3	76,800,000	1	17,800,000	1.00	17,800,000	33.33%	23.18 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			**16.67%**	**14.00 %**		
Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**		
		3	27	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	#DIV/0!	Persen	-	#DIV/0!	0	100.00%	1,771,380	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%		
	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1	150,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara DIrehabilitasi						1	1,621,380	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			**0.00%**	**0.00 %**		
Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																			**25.52%**	**9.88 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																			**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja: adanya komitmen yang tinggi untuk mencapai target kinerja (Dukungan dari pimpinan, legislatif, dan mitra kerja sangat menentukan kelancaran implementasi program.)

Faktor penghambat: Dana tidak mencukupi, keterlambatan pencairan, atau refocusing anggaran yang tidak terduga.

Faktor penghambat: Kurangnya perhatian pimpinan terhadap pencapaian kinerja dan lemahnya pengambilan keputusan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

2		**3**	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase ketersediaan sarana pertanian/ peternakan**	**######**	**Persen**	**3,431,424,300**	**0.00%**	**-**	**#####**	**1,306,291,790**	**49.84%**	**82,038,400**	**49.84 %**	**82,038,400**	**49.84%**	**6.28 %**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**	POKIR (Pengentasan Kemiskinan Ekstrim)
		3	27	2	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	100%	Persen	799,999,800.00	0.00%	0	100.00%	3,872,000	33.33%	772,000	33.33 %	772,000	33.33%	19.94 %		105,000,000
	Meningkatnya populasi dan Produksi ternak	3	27	02	2.02	05	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	12	Jenis	799,999,800.00			3	3,872,000	1	772,000	1.00	772,000	33.33%	19.94 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				**33.33%**	**19.94 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**SR**	**SR**		
		3	27	2	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak**	100.00%	Persen	60,000,000.00	0.00%	0	100.00%	6,989,700	100.00%	6,695,200	100.00 %	6,695,200	100.00%	95.79 %		4,999,900
	Meningkatnya populasi dan Produksi ternak	3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	180000	Kartu	60,000,000.00			1	4,555,200	1	4,555,200	1.00	4,555,200	100.00%	100.00%		

		3	27	02	2.05	09	Pengandalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia						1	2,434,500	1	2,140,000	1.00	2,140,000	100.00%	87.90 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				######	**93.95 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**ST**	**ST**		
		3	27	2	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Persentase terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	100%	Person	2,571,424,500	0.00%	0	100.00%	1,295,430,090	16.19%	74,571,200	16.19 %	74,571,200	16.19%	5.76%		976,979,900
	Meningkatnya populasi dan Produksi ternak	3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	20	Ton	300,000,000			18,226	391,689,390	3,676	38,871,200	3,676.00	38,871,200	20.17%	9.92%		
		3	27	02	2.06	03	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	20000	Ekor	2,571,424,500			7,069	903,740,700	420	35,700,000	420.00	35,700,000	5.94%	3.95%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				**13.06%**	**6.94 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																				**48.80%**	**40.28 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja: adanya komitmen yang tinggi untuk mencapai target kinerja (Dukungan dari pimpinan, legislatif, dan mitra kerja sangat menentukan kelancaran implementasi program.)

Faktor penghambat:

Faktor penghambat:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

3		**3**	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase ketersediaan prasarana pertanian/ peternakan**	**######**	**Persen**	**12,093,952,494**	**0.00%**	**-**	**#####**	**1,242,189,840**	**0.00%**	**5,546,000**	**0.00%**	**5,546,000**	**0.00%**	**0.45%**		POKIR (Pengentasan Kemiskinan Ekstrim)
		3	27	03	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase prasarana pertanian/peternakan yang dibangun**	100.00%	Persen	12,093,952,494	0.00%	-	100.00%	1,242,189,840	0.00%	5,546,000	0.00%	5,546,000	0.00%	0.45%		2,091,784,000
	Meningkatnya populasi dan Produksi ternak	3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	68	Unit	12,093,952,494			6	1,230,097,940	-	5,020,000	-	5,020,000	0.00%	0.41%		
		3	27	03	2.02	14	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara						1	4,198,900	-	526,000	-	526,000	0.00%	12.53%		
		3	27	03	2.02	15	Pembangunan, Rehabilitasi , Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara						1	7,893,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				**0.00%**	**4.31%**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja: adanya komitmen yang tinggi untuk mencapai target kinerja (Dukungan dari pimpinan, legislatif, dan mitra kerja sangat menentukan kelancaran implementasi program.)

Faktor penghambat: : Dana tidak mencukupi, keterlambatan pencairan, atau refocusing anggaran yang tidak terduga.																						
Faktor penghambat: Kurangnya perhatian pimpinan terhadap pencapaian kinerja dan lemahnya pengambilan keputusan.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																						
4		**3**	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner**	**100%**	Persen	**825,575,000**	**0.00%**	**-**	**100%**	**19,999,980**	**50.00%**	**5,140,000**	**50.00 %**	**4,460,000**	**50.00%**	**22.30 %**	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**	POKIR
		3	27	04	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian, pembebasan dan penanggulangan Kasus Penyakit Hewan Menular**	100%	Persen	75,000,000	0.00%	-	100.00%	12,349,980	100.00%	3,100,000	100.00%	3,100,000	100.00%	25.10 %		150,000,000
	Meningkatnya populasi dan Produksi ternak	3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1	laporan	75,000,000			1	12,349,980	1	3,100,000	1.00	3,100,000	100.00%	25.10 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			######	**25.10 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																			**ST**	**SR**		
							Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan, Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	0%	Persen	-	0.00%	0	100.00%	2,550,000	0.00%	680,000	0.00%	680,000	0.00%	26.67 %		DAK NONFISIK

							Pengawasan dan Pemerikasaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1	2,550,000	-	680,000	-	680,000	0.00%	26.67 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				**0.00%**	**26.67 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**SR**	**SR**		
		3	27	04	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di kelola**	100%	Persen	750,575,000	0.00%	0	100.00%	5,100,000	0.00%	1,360,000	0.00%	1,360,000	0.00%	26.67 %		DAK NONFISIK
	Meningkatnya populasi dan Produksi ternak	3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4	Laporan	750,575,000			1	5,100,000	-	1,360,000	-	1,360,000	0.00%	26.67 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				**0.00%**	**26.67 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																				**50.00%**	**25.88 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja: adanya komitmen yang tinggi untuk mencapai target kinerja (Dukungan dari pimpinan, legislatif, dan mitra kerja sangat menentukan kelancaran implementasi program.)

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat:

Faktor penghambat:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

5		**3**	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase terlaksanany a kegiatan perizinan**	######	Perse n	**235,921,900**	**0.00%**	**0**	**#### ##**	**9,880,390**	**0.00%**	**1,983,300**	**0.00 %**	**1,983,300**	**0.00%**	**20.07 %**	**DINAS PETERNA KAN DAN KESEHAT AN HEWAN**	
		3	**27**	**06**	**2.0 3**		**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributo r) Obat Hewan**	**Persentase pelaksanaaa n izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diawasi**	100%	Perse n	235,921,900	0.00%	0	100.0 0%	9,880,390	0.00%	1,983,300	0.00%	1,983,300	0.00%	20.07 %		
	Meningk atnya populasi dan Produksi ternak	3	27	06	2.03	02	Pengawasa n Pelaksanaa n Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah izin usaha yang diawasi (Izin usaha)	48	Izin Usaha	235,921,900			1	9,880,390	-	1,983,300	-	1,983,300	0.00%	20.07 %	**Dinas Pertania n dan Ketahan an pangan**	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				**0.00%**	**20.07 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																				**0.00%**	**20.07 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja: adanya komitmen yang tinggi untuk mencapai target kinerja (Dukungan dari pimpinan, legislatif, dan mitra kerja sangat menentukan kelancaran implementasi program.)

Faktor penghambat: Dana tidak mencukupi, keterlambatan pencairan, atau refocusing anggaran yang tidak terduga.

Faktor penghambat: Kurangnya perhatian pimpinan terhadap pencapaian kinerja dan lemahnya pengambilan keputusan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

6		**3**	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULU HAN PERTANIA N**	**Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/ gapotan**	######	Perse n	**235,921,900**	**0.00%**	**0**	**#### ##**	**10,119,500**	**0.00%**	**639,500**	**0.00 %**	**639,500**	**0.00%**	**6.32 %**	**DINAS PETERNA KAN DAN KESEHAT AN HEWAN**	

		3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase terlaksananya kegiatan Penyuluhan Peterakan**	100%	Persen	235,921,900	0.00%	0	100.00%	10,119,500	0.00%	639,500	0.00%	639,500	0.00%	6.32%		
		3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	48	Izin Usaha	235,921,900			1	10,119,500	-	639,500	-	639,500	0.00%	6.32%	**Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan**	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				**0.00%**	**6.32 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																				**0.00%**	**6.32 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**SR**	**SR**		

Faktor pendorong pencapaian kinerja: adanya komitmen yang tinggi untuk mencapai target kinerja (Dukungan dari pimpinan, legislatif, dan mitra kerja sangat menentukan kelancaran implementasi program.)
Faktor penghambat: Dana tidak mencukupi, keterlambatan pencairan, atau refocusing anggaran yang tidak terduga.
Faktor penghambat: Kurangnya perhatian pimpinan terhadap pencapaian kinerja dan lemahnya pengambilan keputusan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**20.72%**	**17.79 %**	
Predikat Kinerja Program	**SR**	**SR**	

Faktor pendorong pencapaian kinerja:
1. adanya komitmen yang tinggi untuk mencapai target kinerja (Dukungan dari pimpinan, legislatif, dan mitra kerja sangat menentukan kelancaran implementasi program.)
2. Perencanaan yang Matang
3. Sumber Daya Manusia yang Kompeten
4
5

Faktor penghambat:
1. Dana tidak mencukupi, keterlambatan pencairan, atau refocusing anggaran yang tidak terduga.
2. Kurangnya perhatian pimpinan terhadap pencapaian kinerja dan lemahnya pengambilan keputusan.
3.
4
5
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
1.
2.
3.
4
5
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):
1.
2.
3.
4
5

Sumber Data : Laporan Monev TW I Tahun 2025

2.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja

Informasi tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RPJMD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	17	38	6	17	40
TOTAL		6	17	38	6	17	40

Sumber Data : Laporan Monev TW I Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan jumlah program sebanyak 6, jumlah kegiatan 17, dan jumlah sub kegiatan 38, sedangkan jumlah indikator program sebanyak 6, jumlah indikator kegiatan sebanyak 17, dan sub kegiatan 40.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan 1 Tahun 2025

Realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggran yang telah terserap pada triwulan 1 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan pada APBD Kabupaten Takalar
Tahun 2025 hingga Triwulan I

No.	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan 1	persentase	
				Fisik	Keuangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.117.295.660	781.590.834	21,72%	12,78%
		6.117.295.660	781.590.834	21,72%	12,78%

Sumber Data : Laporan Realisasi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 Triwulan 1

Berdasarakan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025 Rp. 6.117.295.660, realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan triwulan 1 sebesar 12,78% dengan capaian realisasi fisik sebesar 21,72%.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah mulai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu kategori ***Rendah*** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0-10%, kategori ***Sedang*** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari > 10-20% persen dan kategori ***Tinggi*** > 20% untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran di atas 12,78 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan 1 adalah 2 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 Persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. **Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Program**

   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program

yang dilaksanakan Kantor Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan sebanyak 6 program. Program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada 2 (realisasinya 0 – 10 persen), untuk tingkat capaian pendanaan kategori sedang sebanyak 2 program (realisasi > 10 -20 persen), dan jumlah program berdasarkan tingkat capaian pendanaan kategori tinggi sebanyak 2 program (realisasi diatas > 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada level Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dijelaskan bahwa terdapat 17 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 17 kegiatan yang resalisasi pendanaannya hingga triwulan I masih dalam kategori rendah 6 kegiatan yaitu 0-10 persen, yang berada dalam kategori sedang > 10-20 sebanyak 4 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi pendanaannya > 20 persen sebanyak 7 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada kantor Dinas Peternakan dan kesehatan hewan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 38 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaannya masih rendah terdapat 17 sub kegiatan, sedangkan yang msuk kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 7 sub kegiatan, dan 12 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan > 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 4

Capaian Kinerja Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%		-10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	3	1	2	17	6	4	7	38	19	7	12
TOTAL		6	3	1	2	17	6	4	7	38	19	7	12

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Capaian Kinerja memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah mulai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Capaian kinerja Kinerja tersebut dikategorikan dalam 4 kelompok yaitu kategori ***Sangat Rendah*** untuk perangkat daerah denga realisasi 0-10%, kategori ***Sedang*** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10-20 persen dan kategori ***Tinggi*** >20 persen untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran di atas 3 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 0 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan 1 adalah 3 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi Kinerja lebih dari 20 Persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

4. **Evaluasi Capaian Kinerja pada Level Program**
   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Kinerja pada level program untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan sebanyak 6 program. Program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada 3 (realisasinya 0 – 10 persen), untuk tingkat capaian Kinerja kategori sedang sebanyak 0 program (realisasi > 10 -20 persen), dan jumlah program berdasarkan tingkat capaian Kinerja kategori tinggi sebanyak 3 program (realisasi diatas > 20 persen).
5. **Evaluasi Capaian Kinerja Pada level Kegiatan**
   Evaluasi pelaksanaan capaian kinerja Kinerja pada level kegiatan kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dijelaskan bahwa terdapat 17 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 17 kegiatan yang resalisasi Kinerjanya hingga triwulan I masih dalam kategori rendah sebanyak 8 kegiatan yaitu 0-10 persen, yang berada dalam kategori sedang > 10-20 sebanyak 4 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi Kinerjanya > 20 persen sebanyak 5 kegiatan.
6. **Evaluasi Capaian Kinerja pada Level Sub Kegiatan**
   Adapun evaluasi capaian kinerja Kinerja pada kantor Dinas Peternakan dan kesehatan hewan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 38 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapata sub kegiatan yang capaian kinerja Kinerjanya masih rendah terdapat 18 sub

kegiatan, sedangkan yang msuk kategori pencapaian realisasi Kinerja sedang terdapat 2 sub kegiatan, dan 18 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi Kinerja tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi Kinerja > 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja Kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 5

Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%		-10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	3	0	3	17	8	4	5	38	18	2	18
TOTAL		6	3	0	3	17	8	4	5	38	18	2	18

Adapun penjelasan dari tabel di atas yaitu : untuk Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai 6 program yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota yang terdiri dari 8 kegiatan dan 25 sub kegiatan
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan
3. Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan
5. Program Perizinan Usaha Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
6. Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan berhasil dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat, terutama dalam hal kesehatan hewan dan kesejahteraan peternakan. Analisis ini meliputi berbagai aspek yang dapat diukur untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan oleh dinas tersebut.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang melibatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, dinas dapat memperbaiki layanan yang ada, memastikan bahwa program yang dijalankan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat peternak, serta meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan produktivitas peternakan secara keseluruhan.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat melalui realisasi capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode 2023-2026. Adapun realisasi capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel II-3 dibawah ini :

Tabel II-5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Persentase laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	6,1		Persentase meningkatnya produktifitas ternak yang berkelanjutan.	10%	20%	30%		20%	30%	
2.	Persentase peningkatan populasi dan produksi ternak	25%	9,8% (Triwulan II)	Persentase peningkatan populasi ternak dengan varietas unggul	50%	60%	70%		60%	70%	
3.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	90%	50% (Triwulan II)	Persentase penurunan kasus Penyakit Hewan ternak	100%	100%	100%		100%	100%	
4.	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Peternakan dan	BB	BB	Persentase peternak yang memiliki sarana dan prasarana	10%	20%	30%		20%	30%	

	Kesehatan Hewan			peternakan yang sesuai standar.							
5.	Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	BB	B	1. Tingkat capaian PAD pada Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Hewan.	100%	100%	100%	78,57%	100%	100%	
6.				2. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13%	14,4%	15,8%	78,57%	14,4%	15,8%	
7.				1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan.	69	70	70	69	70	70	
8.				2. Tingkat literasi Digital ASN Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan	60,7%	96,4%	96,4%	60,7%	96,4%	96,4%	

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar mempunyai 8 indikator yaitu :

- Persentase meningkatnya produktifitas ternak yang berkelanjutan yaitu upaya Peternakan tidak hanya meningkatkan hasil atau produksi dan reproduksi ternak tetapi juga menjaga sumber daya Peternakan (lahan, air, genetik) dan berkelanjutan ekologis dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan lingkungan untuk jangka Panjang, indikator ini diukur dari produksi daging dan telur. Untuk memperoleh jumlah produksi daging tahun 2025 dihitung dari banyaknya populasi tahun sebelumnya ditambah 10% yaitu dari 13.155 ekor menjadi 14.471 ekor, dimana konstanta produksi 55% dari berat hidup, berat hidup sapi diratakan 100 kg, sehingga untuk jumlah populasi 14.471 diperoleh produksi daging triwulan 1 tahun 2025 yaitu 79,588 kg. Sedangkan untuk memperoleh jumlah produksi telur dihitung dari banyaknya jumlah populasi ayam tahun 2025 yaitu 65.959 ekor dikali 80% sehingga menghasilkan 52.767 butir telur atau 1.759 rak. Produksi telur untuk triwulan 1 yaitu 52.767 butir atau 1.759 rak.
- Persentase peningkatan populasi dengan varietas unggul dengan tujuan untuk mendapatkan hasil ternak yang lebih produktif melalui inseminasi buatan. Capaian triwulan 1 tahun 2025 yaitu 354 yang sudah dilaksanakan kegiatan inseminasi buatan di seluruh wilayah Kabupaten Takalar.
- Persentase penurunan kasus penyakit hewan ternak yaitu terlaksananya vaksinasi untuk menekan perkembangan penyakit atau penularan penyakit. Untuk kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 yaitu 0 karena tdk ada kasus penyakit untuk PHMS.
- Persentase peternak yang memiliki sarana dan prasarana Peternakan sesuai standar yaitu peternak diharapkan memiliki kandang sesuai standar untuk semua jenis ternak dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas ternak dan mencegah pencemaran lingkungan. Indikator ini diukur dari jumlah kandang ayam petelur yang memenuhi standar yaitu 87 kk. Capaian triwulan 1 tahun 2025 belum ada capaian, karena belum ada kegiatan fisik yang dilaksanakan.
- Tingkat capaian PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan mencapai target setiap tahunnya , dimana kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) harus lengkap sarana dan prasarananya sehingga RPH bisa berfungsi secara maksimal. Capaian PAD triwulan 1 tahun 2025 yaitu Rp. 5. 480.000 dengan jumlah ternak yang dipotong 137 ekor.
- Persentase peningkatan PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tujuan capaian PAD setiap tahunnya bisa meningkat. Capaian triwullan 1 tahun 2025 yaitu 10,96 %.

- Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapakan bisa mendapatkan nilai BB. Capaian indikator triwulan 1 yaitu BB dengan nilai 70,42 dengan cara melengkapi semua dokumen yang diminta oleh Inspektorat.
- Tingkat Literasi ASN pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tujuan agar ASN yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengerti dan paham dengan aplikasi yang ada. Indikator ini diukur dengan cara melalukan survei kepada pegawai yang mengerti aplikasi yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Capaian triwulan 1 tahun 2025 yaitu 53% .

Adapun perubahan indikator Tahun 2024 dan Tahun 2025 yaitu untuk menyesuaikan rencana dan perkembangan situasi dan kebutuhan, mengevaluasi pencapaian kinerja, memastikan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan agar program pembangunan berjalan efektif dan efisien.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pada sub bab sebelumnya (Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Telahaan renstra kementerian/Lembaga dengan sasaran perangkat daerah, telaahan renstra perangkat daerah provinsi dengan sasaran perangkat daerah serta telaahan RTRW) diramu menjadi isu strategis perangkat daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023-2026, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan.

.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijaakan Nasional

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan Tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi public, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah " Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2 Tema Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio dini, tingkat kemiskinan, tingkat

kemiskinan ekstrim, serta intensitas emisi gas rumah kaca. Target indikator sasaran pembangunan Tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut .

3.1.2.1 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional yaitu "***Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan industrialisasi agromaritim serta hirilisasi pertanian yang didukung peran BUMD,BUMDES,UMKM dan koperasi berbasis ekonomi digital***"

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025-2029 dan RPJMD Tahun 2025-2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden kedalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023-2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025-2029. Untuk menunjang keberhasilan visi, misi dan tujuan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu "***Meningkatkan Produktifitas Ternak yang Berkelanjutan***" untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 5 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya populasi ternak melalui Inseminasi Buatan;
2. Terjaminnya kesehatan ternak melalui vaksinasi dan sanitasi lingkungan;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana Peternakan;
4. Meningkatnya PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Meningkatnya tata kelola yang berintegritas dan adaptif;

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel III.1 di bawah ini :

Tabel III. 1 Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025 (Renstra PD 2023-2026)			**PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 (Renstra 2025-2029)**		
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
T1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	T.1.1. Persentase laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	6,1	T1. Meningkatkan produktifitas ternak yang berkelanjutan	T1.1.Persentase menignkatnya produktifitas ternak yang berkelanjutan	10%
S1.1. Meningkatnya populasi dan produksi ternak	T.1.1. Persentase peningkatan populasi dan produksi ternak	25%	S1. Meningkatnya populasi ternak melalui Inseminasi Buatan	S1.1 Persentase peningkatan populasi dengan varietas unggul	50%
	T.1.2. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	90%	S.2. Terjaminnya kesehatan ternak melalui vaksinasi dan sanitasi lingkungan	S1.1. Persentase penurunan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100%
T.2. Meningkatkan	T.1.1. Indeks	B	S.3. Meningkatnya	S1.1. Persentase	10%

tata kelola penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Reformasi Birokrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		sarana dan prasarana peternakan	peternak yang memiliki sarana dan prasarana peternakan yang sesuai standar	
	T.1.1. Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	BB	S.4. Meningkatnya PAD pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan	S.1.1. Tingkat capaian PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100%
				S.1.2. Persentase peningkatan PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13%
			S.5. Meningkatnya tata kelola yang berintegritas dan adaptif	S.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	69
				S.1.2. Tingkat literasi ASN pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan	60,7%

BAB IV
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjang prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025. Prioritas Daerah yaitu "***Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan industrialisasi agromaritim serta hirilisasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDES, UMKM dan koperasi berbasis ekonomi digital"*** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan prasarana pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	1.172.259.840

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan renja.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Tahun 2025 dengan total pagu Rp. 5.956.834.460 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan							4.851.515.980,00	5.972.794.460,00	5.965.982.730,00							8.251.133.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.851.515.980,00	5.972.794.460,00	5.965.982.730,00							8.251.133.000,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							4.851.515.980,00	5.972.794.460,00	5.965.982.730,00							8.251.133.000,00	
1	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	3.341.153.280,00	3.528.814.160,00	3.505.989.600,00							4.411.133.000,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-			100 %	100 %	21.319.000,00	19.041.800,00	19.041.800,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		33.100.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.375.000,00	11.093.190,00	8.330.220,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			14.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.035.000,00	1.290.000,00	630.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.135.400,00	2.135.400,00	315.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.008.600,00	1.008.600,00	1.008.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			3.800.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	584.000,00	596.900,00	558.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			3.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.181.000,00	2.917.710,00	2.728.950,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	3.110.446.822,00	3.339.208.280,00	3.339.208.280,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		3.563.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.102.026.422,00	3.330.753.780,00	3.330.760.710,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			3.550.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	6.092.800,00	6.247.700,00	5.115.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

							Akhir Tahun SKPD															
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.327.600,00	2.206.800,00	1.802.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			3.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	-			100 %	100 %	6.201.130,00	6.162.500,00	6.162.500,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		22.700.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.208.500,00	1.014.600,00	918.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																

							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.565.530,00	3.582.200,00	3.118.240,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.427.100,00	1.565.700,00	981.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			2.700.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	10.500.000,00	11.430.000,00	11.430.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	33 Paket	10.500.000,00	11.430.000,00	11.430.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	71.026.230,00	68.171.900,00	68.171.900,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		114.033.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.938.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.033.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.476.230,00	24.675.900,00	24.553.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			53.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	273.000,00	129.000,00	129.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN

																(DAU)					HEWAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	504.000,00	504.000,00	453.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	41.635.000,00	39.725.000,00	25.220.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

							yang Disediakan															
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	120.370.098,00	79.458.300,00	79.458.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		163.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.540.098,00	1.238.300,00	1.238.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.030.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				12 Laporan	12 Laporan	76.800.000,00	76.800.000,00	76.800.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN

							Kantor yang Disediakan																HEWAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.290.000,00	1.771.380,00	1.771.380,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		355.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.140.000,00	1.621.380,00	1.621.380,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana pertanian/ peternakan				100 %	100 %	319.779.300,00	1.231.720.590,00	1.196.883.400,00							1.470.000.000,00	

	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan mikroorganisme yang di kelola	-			100 %	100 %	5.415.000,00	3.872.000,00	3.872.000,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak		350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	5.415.000,00	3.872.000,00	3.872.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan ternak.	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak		20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																
							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak		10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																
							Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 %	100 %	4.410.000,00	6.989.700,00	6.989.700,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak		390.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.05	0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																
							Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat				1 Laporan	1 Laporan	4.410.000,00	4.555.200,00	4.472.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																
							Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak															
							Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.434.500,00	2.430.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	-			100 %	100 %	309.954.300,00	1.220.858.890,00	1.220.858.890,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak		700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain															
							Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain				20 Ton	20 Ton	3.008.300,00	352.818.190,00	314.329.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain															

							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain				1000 Ekor	1000 Ekor	306.946.000,00	868.040.700,00	871.780.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertanian/ peternakan				100 %	100 %	769.801.000,00	1.172.259.840,00	1.229.154.150,00							1.510.000.000,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian/peternakan yang dibangun.	-			100 %	100 %	769.801.000,00	1.172.259.840,00	1.172.259.840,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak		1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																	
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	764.361.000,00	1.160.167.940,00	1.217.245.150,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan																	

							Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	5.440.000,00	4.198.900,00	4.016.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Kale Lantang Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Sialangrampai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																	
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	0,00	7.893.000,00	7.893.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Lahan Pengembalaan umum yang di kembangkan	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak		10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.04	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum																	
							Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan				10 Ha	10 Ha	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

4	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner				100 %	100 %	400.981.400,00	19.999.980,00	16.435.690,00							490.000.000,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian ,pembebasan dan penanggulangan Kasus Penyakit Hewan Menular	-			100 %	100 %	19.831.400,00	12.349.980,00	12.349.980,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak		230.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																	
							Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				4 Laporan	4 Laporan	19.831.400,00	12.349.980,00	8.785.690,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																	
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				2 Wilayah	2 Wilayah	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 %	100 %	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak		30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																		
							Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang di kelola	-			100 %	100 %	381.150.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		

							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				3 Laporan	3 Laporan	381.150.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak		30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																	
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase terlaksanaanya kegiatan perizinan				100 %	100 %	9.708.000,00	9.880.390,00	9.880.390,00							125.000.000,00	
	3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang di bina dan diawasi	-			100 %	100 %	9.708.000,00	9.880.390,00	9.880.390,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

							pelaksanaannya.															
	3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan																
							Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.708.000,00	9.880.390,00	9.880.390,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	06	2.02	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan																	
							Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diawasi	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/gapoktan				100 %	100 %	10.093.000,00	10.119.500,00	7.639.500,00							245.000.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase terlaksananya kegiatan Penyuluhan Peternakan	-			100 %	100 %	10.093.000,00	10.119.500,00	10.119.500,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak		245.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	10.093.000,00	10.119.500,00	7.639.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			45.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																

							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	JUMLAH												**4.851.515.980,00**	**5.972.794.460,00**	**5.965.982.730,00**							**8.251.133.000,00**	

Sumber Data : SIPD Perubahan Tahun 2025

BAB V
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 disusun sebagai respons atas dinamika perkembangan situasi aktual, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Perubahan Renja ini memuat penyesuaian terhadap sasaran, target kinerja, lokasi, serta besaran anggaran yang diselaraskan dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk dinamika populasi ternak, isu kesehatan hewan strategis, kebutuhan vaksinasi dan pengendalian penyakit hewan menular, serta peningkatan kapasitas peternak dan pelaku usaha peternakan.

Penyesuaian ini dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat lebih tepat sasaran, berdaya guna, dan mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah di sektor peternakan, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan asal hewan, peningkatan produktivitas ternak, dan jaminan kesehatan hewan yang berkelanjutan.

Diharapkan dokumen ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mengimplementasikan kegiatan secara efektif dan akuntabel, serta menjadi alat bantu dalam pemantauan dan evaluasi kinerja yang transparan dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya peternak, serta mewujudkan sistem peternakan daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Takalar, Pebruari 2024

Ir. H. SUKWANSYAH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19661231 19903 1 025



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahahan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sesuai dengan pedoman penyempurnaan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang proses penyusunan serta substansinya mengacu kepada Ketetapan Undang- undang No. 25 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dokumen ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam proses penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Angaran 2025 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perencanaan pembangunan di sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahahan Pangan Tahun 2025. Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahahan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan sebagaimana mestinya.

Takalar, Juni 2025
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAKALAR,

Drs. H. PARAWANGSA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19691216 199112 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (Indikator Kinerja Utama) ... 33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan 43
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 47
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 49
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting 78
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 78
5.3 Rencana Tindak Lanjut 79

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	**:**	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Periode Pelaksanaan: s/d Triwulan I Tahun 2025	8
Tabel II.2	**:**	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025	28
Tabel II.3.	**:**	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Takalar Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I	29
Tabel II.4		Rekapitulasi Capaian Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025	30
Tabel II.5		Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025	32
Tabel II.6		Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar	34
Tabel. III.1.	**:**	Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025	44
Tabel IV.1	**:**	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	48
Tabel IV.2	**:**	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	51
Tabel IV.3	**:**	Rincian perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, target dan pagu pada perubahan rencana kerja dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan kab. Takalar tahun 2025	51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 **:** Keterkaitan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Perencanaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan Dokumen Lainnya 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2025 melalui perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, terdiri atas :

a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator utama (IKU) dan target indikator kunci (IKK) serta target indikator lainnya dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026;
2. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I;
3. Isu-isu strategis yang berkembang;
4. Kebijakan Nasional;
5. Regulasi yang berlaku.

Gambar I.1
Keterkaitan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

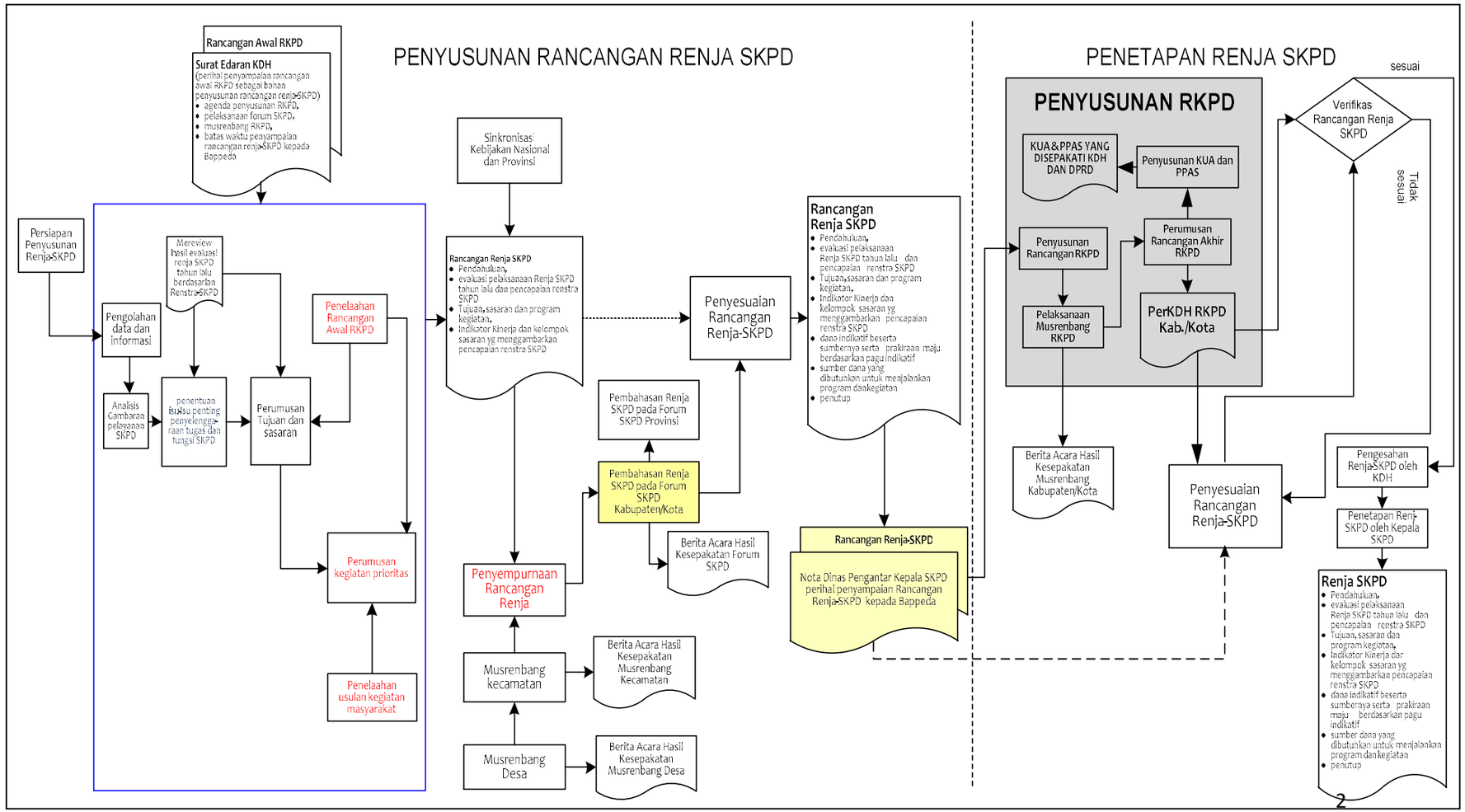

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan sektor agribisnis. Menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, dalam dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, seringkali terjadi perubahan kondisi, baik dari aspek kebijakan, ketersediaan anggaran, maupun kebutuhan riil di lapangan. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dan strategis untuk memastikan program dan kegiatan tetap relevan, responsif, dan dapat dilaksanakan secara efektif serta efisien. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dasar perencanaan yang adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar tahun 2025 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025. Dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 mengacu pada beberapa landasan hukum yang terkait dan masih berlaku. Beberapa landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 34);
15. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 adalah:

- Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang karena adanya beberapa perubahan dari rencana kerja sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah akibat terjadinya refocusing anggaran.;
- Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

b. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 tidak lain adalah:

- Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai triwulan 1 dan dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
- Mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan kedalam suatu strategi program/kegiatan.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar.

- Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian latar belakang disusunnya Perubahan Rencana Kerja, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan pembuatan Perubahan Renja dan sistematika penulisan Perubahan Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAKALAR TRIWULAN I

Pada bab ini akan menjelaskan tetang evaluasi pelaksanaan Rencana kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Analisis kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang telaahan kebijakan nasional terhadap Rencana Kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dan penjelasan tentang tujuan, sasaran rencana kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

BAB IV. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pada bab ini menguraikan tentang daftar program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah dan rencanan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025, Bab ini juga menyajikan program, kegiatan dan sub kegiatan apa saja yang berubah dalam hal target dan penganggarannya.

BAB V P E N U T U P

Pada bab ini memuat tentang catatan penting ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut atas penyusunan dokumen Renja.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAKALAR TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 disajikan dalam tabel II.1 berikut :

Tabel II.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar
Periode Pelaksanaan : s/d Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
		0 3					**UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN**		**100%**	**16.364.539.848**		**2.350.930.992**	**13%**	**2.350.930.992**	**13,34%**	**14,37%**	
		0 3	**2 6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**		**100%**	**257.499.140**	**5,6%**	**8.915.980**	**6%**	**8.915.980**	**5,56%**	**3,46%**	
1		2	9	3			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor PPH konsumsi**	**100%**	**254.999.210**	**16,67 %**	**8.255.510**	**16,67 %**	**8.255.510**	**16,67%**	**3,24%**	
		2	9	3	2,01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Persentase terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	100%	4.999.210	33,33%	4.365.510	33,33%	4.365.510	33,33%	87,32%	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
		2	09	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya (Laporan)	1	1.999.600	-	1.484.900	-	1.484.900	0,00%	74,26%	
		2	09	03	2,01	13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi prognosa neraca pangan wilayah kabupaten/kota	1	999.950	-	880.950	-	880.950	0,00%	88,10%	
		2	09	03	2,01	15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Laporan pemantauan stok dan harga pangan	1	1.999.660	1	1.999.660	1	1.999.660	100,00 %	100,00 %	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**33,33%**	**87,45%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**T**	
		2	9	4	2,02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase telaksananya kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	100%	250.000.000	0,00%	3.890.000	0,00%	3.890.000	0,00%	1,56%	
		2	9	4	2,02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (ton)	16,00	250.000.000	-	3.890.000	- ,00	3.890.000	0,00%	1,56%	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**1,56%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**16,67%**	**44,50%**	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
Predikat Kinerja											**SR**	**SR**	
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Anggaran kegiatan operasional tersedia													
Faktor penghambat: :													
Faktor penghambat:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): kinerja sementara berproses													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):													
		2 9 4			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase penanganan kerawanan pangan**	######	**1.499.760**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		2 9 4	2,01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase terlaksananya kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan**	100%	1.499.760	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
		2 09 04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1	1.499.760	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											**0,00%**	**0,00%**	
Predikat Kinerja											**SR**	**SR**	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											**0,00%**	**0,00%**	
Predikat Kinerja											**SR**	**SR**	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
		2	9	5			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pengawasan keamanan pangan**	**100%**	**1.000.170**	**0,00%**	**660.470**	**0,00%**	**660.470**	**0,00%**	**66,04%**	
		2	9	5	2,01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan keamanan pangan segar kabupaten/kota**	100%	1.000.170	0,00%	660.470	0,00%	660.470	0,00%	66,04%	
		2	09	05	2,01	09	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen pengutanan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	1.000.170	-	660.470	-	660.470	0,00%	66,04%	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**66,04%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**S**	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**0,00%**	**66,04%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**S**	
		03					**UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN**										
		03	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		**100%**	**16.107.040.708**	**21,1%**	**2.342.015.012**	**21,12 %**	**2.342.015.012**	**21,12%**	**14,54%**	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
		3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhnan urusan penunjang perangkat daerah(%)**	**100%**	**11.163.664.248**	**19%**	**1.949.060.692**	**19%**	**1.949.060.692**	**18,57%**	**17,46%**	
		3	27	01	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase DokumenPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	100,00%	14.889.410	33,33%	5.186.370	33,33%	5.186.370	33,33%	34,83%	
	Terpenuhinya dukungan administrasi, sarana prasarana, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan serta kapasitas SDM Perkantoran bidang Pertanian	3	27	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Dokumen Renja Pokok, Dokumen Renja Perubahan (Dok)	3	6.389.980	2	2.119.980	2	2.119.980	66,67%	33,18%	
		3	27	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Pokok (Dok)	1	1.498.520	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		3	27	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan (Dok)	1	1.499.810	-	564.810	-	564.810	0,00%	37,66%	
		3	27	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Pokok (Dok)	1	1.499.680	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		3	27	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan (Dok)	1	1.499.840	-	-	-	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
		3	27	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan LAKIP (Laporan)	1	1.501.580	1	1.501.580	1	1.501.580	100,00 %	100,00 %	
		3	27	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja perangkat daerah (Laporan)	1	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	0,00%	100,00 %	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**23,81%**	**38,69%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**	
		3	27	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu**	100,00%	10.942.894.578	14,72%	1.909.040.742	14,72%	1.909.040.742	14,72%	17,45%	
	Terpenuhinya dukungan administrasi, sarana prasarana, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan serta kapasitas SDM Perkantoran bidang Pertanian	3	27	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji (93 orang)	1.302	7.581.953.308	372	1.901.062.032	372	1.901.062.032	28,57%	25,07%	
								Jumlah ASN yang menerima Tambahan Penghasilan (93 orang)	1.116	3.337.463.540	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
								Jumlah ASN yang menerima Objektifitas Lainnya	24	13.080.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		3	27	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1.800	2.399.710	250	1.602.080	250	1.602.080	13,89%	66,76%	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
								Keuangan SKPD (Dokumen)									
		3	27	01	2,02	04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dok)	1	1.999.760	-	978.370	-	978.370	0,00%	48,92%	
		3	27	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Lap)	1	2.499.890	1	2.499.890	1	2.499.890	100,00 %	100%	
		3	27	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dok)	3	1.498.810	1	1.498.810	1	1.498.810	33,33%	100%	
		3	27	01	2,02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKDP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(Lap)	18	1.999.560	4	1.399.560	4	1.399.560	22,22%	69,99%	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**24,75%**	**51,34%**	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
Predikat Kinerja															**SR**	**R**	
		3	27	01	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Padminstrasi BMD yang disusun tepat waktu**	100,00%	4.424.700	0,00%	1.584.100	0,00%	1.584.100	0,00%	35,80%	
	Terpenuhinya dukungan administrasi, sarana prasarana, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan serta kapasitas SDM Perkantoran bidang Pertanian	3	27	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dok)	1	1.074.840	-	284.300	-	284.300	0,00%	26,45%	
		3	27	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1.499.860	-	1.299.800	-	1.299.800	0,00%	86,66%	
		3	27	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1.850.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**37,70%**	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**	
		3	27	01	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah**	100%	28.794.160	33,33%	13.666.380	33,33%	13.666.380	33,33%	47,46%	
	Terpenuhinya dukungan administrasi, sarana prasarana, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan serta kapasitas SDM Perkantoran bidang Pertanian	3	27	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	1	998.900	1	998.900	1,00	998.900	100,00 %	100,00 %	
		3	27	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	1	2.665.260	-	465.200	-	465.200	0,00%	17,45%	
		27	01	2,06		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	1	25.130.000	-	12.202.280	-	12.202.280	0,00%	48,56%	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**33,33%**	**55,34%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**R**	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
		3	27	01	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan**	100%	105.593.670	0,00%	18.253.100	0,00%	18.253.100	0,00%	17,29%	
	Terpenuhinya dukungan administrasi, sarana prasarana, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan serta kapasitas SDM Perkantoran bidang Pertanian	3	27	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1	1.993.670	-	987.300	-	987.300	0,00%	49,52%	
		3	27	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	1	103.600.000	-	17.265.800	-	17.265.800	0,00%	16,67%	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**33,09%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**	
		3	27	01	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi**	100%	67.067.730	30,00%	1.330.000	30,00%	1.330.000	30,00%	1,98%	
	Terpenuhinya dukungan administrasi, sarana	3	27	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan (Unit)	1	14.387.730	-	-	-	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
	prasarana, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan serta kapasitas SDM Perkantoran bidang Pertanian						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		3	27	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7	2.680.000	3	1.330.000	3,00	1.330.000	42,86%	49,63%	
		3	27	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	50.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**14,29%**	**16,54%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**16,03%**	**38,79%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**	

Faktor pendorong pencapaian kinerja: Realisasi belanja sesuai dengan perencanaan anggaran kas

Faktor penghambat : keterbatasan anggaran penunjang untuk pelaksanaan tugas rutin

Faktor penghambat :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
6		3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase ketersediaan sarana pertanian**	**######**	**2.146.105.290**	**0,00%**	**13.824.600**	**0,00%**	**13.824.600**	**0,00%**	**0,64%**	
		3	27	02	2,01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase sarana pertanian yang diawasi**	100%	2.091.605.450	0,00%	11.828.000	0,00%	11.828.000	0,00%	0,57%	
	Meningkatnya produksi tanaman pangan utama, tanaman hortikultura utama, tanaman perkebunan utama	3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi (laporan)	4	2.090.105.300	-	11.828.000	-	11.828.000	0,00%	0,57%	
		3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1	1.500.150	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,28%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**	
		3	27	02	2,02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	100%	54.499.840	0,00%	1.996.600	0,00%	1.996.600	0,00%	3,66%	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
	Meningkatnya Produksi Tanaman pangan utama	3	27	02	2,02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Tanaman (Luas areal penangkaran benih (Ha))	1	2.499.850	-	1.996.600	-	1.996.600	0,00%	79,87%	
		3	27	02	2,02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah jenis benih/bibit tanaman pangan dan hortiukultura yang diadakan (jenis)	1	51.999.990	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**39,93%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**0,00%**	**20,11%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**	
Faktor pendorong pencapaian kinerja: kerjasama tim di bidang terkaiit persiapan pelasanaan kegiatan																	
Faktor penghambat : pelaksanaan kegiatan menunggu perencanaan anggaran kas																	
Faktor penghambat :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
7		3	27	03			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase ketersediaan prasarana pertanian**	######	**2.755.233.890**	**27,50 %**	**375.439.980**	**27,50 %**	**375.439.980**	**27,50%**	**13,63%**	
		3	27	03	2,01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase Jumlah produk dokumen pengembangan prasarana pertanian**	100%	5.409.890	50,00%	2.689.980	50,00%	2.689.980	50,00%	49,72%	
	Meningkatnya produksi tanaman pangan utama, tanaman hortikultura utama, tanaman perkebunan utama	3	27	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya (laporan)	1	1.499.980	1	1.499.980	1,00	1.499.980	100,00 %	100,00 %	
		3	27	03	2,01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelnjutan /KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola (dokumen)	1	3.909.910	-	1.190.000	-	1.190.000	0,00%	30,44%	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**50,00%**	**65,22%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**R**	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
		3	27	03	2,02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/ dipelihara**	100,00%	2.749.824.000	5,00%	372.750.000	5,00%	372.750.000	5,00%	13,56%	
	Meningkatnya produksi tanaman pangan utama, tanaman hortikultura utama, tanaman perkebunan utama	3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara (unit)	14	2.002.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pokir : Rp. 1.165.000.000
		3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang terbangun (unit)	1	372.750.000	1	372.750.000	1,00	372.750.000	100,00 %	100,00 %	Stunting : Rp. 500.000.000
	Meningkatnya produksi tanaman pangan utama, tanaman hortikultura utama, tanaman perkebunan utama	3	27	03	2,02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi, sumur dangkal dan sumur dalam yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara (unit)	5	374.574.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pokir : Rp. 590.376.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**33,33%**	**33,33%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**41,67%**	**49,28%**	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
								Predikat Kinerja							**SR**	**SR**	
Faktor pendorong pencapaian kinerja: kerjasama tim di bidang terkaiit persiapan pelasanaan kegiatan																	
Faktor penghambat: : untuk kegiatan fisik masih menunggu perencanaan anggaran kas																	
Faktor penghambat:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																	
9		**3**	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Peresentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT**	**100%**	**4.529.730**	**50,00 %**	**2.499.740**	**50,00 %**	**2.499.740**	**50,00%**	**55,19%**	
		3	**27**	**05**	**2,01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	100%	4.529.730	50,00%	2.499.740	50,00%	2.499.740	50,00%	55,19%	
	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan utama	3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan yang dikendalikan (Ha)	1	2.029.990	-	-	-	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
		3	27	05	2,01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani	1	2.499.740	1	2.499.740	1,00	2.499.740	100,00 %	100,00 %	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Program (%)															**50,00%**	**50,00%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**	
Faktor pendorong pencapaian kinerja: ketersediaan anggaran																	
Faktor penghambat: : pagu yangdianggarakan hanya sebatas pendampingan saja untuk penanganan anggaran tidak mengcukupi																	
Faktor penghambat:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																	
11		**3**	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/Gapoktan**	**100%**	**37.507.550**	**9,52%**	**1.190.000**	**9,52%**	**1.190.000**	**9,52%**	**3,17%**	
		3	**27**	**07**	**2,01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian**	100,00%	37.507.550	9,52%	1.190.000	9,52%	1.190.000	9,52%	3,17%	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
	Meningkatnya produksi tanaman pangan utama, tanaman hortikultura utama, tanaman perkebunan utama; Meningkatnya populasi ternak utama; Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan utama	3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	10	5.000.000	2	1.190.000	2,00	1.190.000	20,00%	23,80%	
		3	27	07	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10	30.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		3	27	07	2,01	08	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Petani yang Dibentuk/diperbaharui (Unit)	1	2.507.550	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Program (%)															**6,67%**	**7,93%**	
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**	

Faktor pendorong pencapaian kinerja: ketersediaan anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran kas

Faktor penghambat : keterbatasan anggaran tidak bisa memaksimalkan kegiatan

Faktor penghambat:

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Keterangan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9 = 8/6 x 100%		10
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):													
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											**16,38%**	**34,58%**	
Predikat Kinerja Program											**SR**	**SR**	
Faktor pendorong pencapaian kinerja:													
1. Anggaran untuk kegiatan yang sifatnya operasional danayan tersedia sesuai dengan anggaran kas													
Faktor penghambat:													
1. Pelaksanaan pengadaan abrang dan jasa masih dalam tahap penyusunan kontrak													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):													
1. Koordinas dan rapat-rapat teknis bidang dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):													
1. Penyediaan cadangan pangan untuk antisipasi pemenuhan kebutuhan daerah rawan pangan atau yang terkena bencana													

Sumber : Monev TW.1 RKPD Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Progam/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target (<25%)

   Secara umum, masih terdapat cukup banyak program/kegiatan yang realisasi kinerjanya masih rendah, berada dibawah 25%. Sejumlah program/kegiatan masih belum mencapai target yang direncanakan, diantaranya Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan capaian kinerja, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Penyuluhan Pertanian. Adapun kegiatan yang tidak memenuhi target antara lain Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kabupaten/Kota, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Pembangunan Prasarana Pertanian, dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa hingga triwulan I sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan administrasi, menunggu realisasi anggaran kas, atau proses kontraktual sehingga output belum sepenuhnya terealisasi.

b. Program/Kegiatan yang Memenuhi Target (25%)

   Tidak terdapat program/kegiatan telah menunjukkan capaian sesuai target yang direncanakan. Beberapa kegiatan administrasi umum dan pelaporan, realisasi kinerjanya bahkan melebihi target indikator kinerja (output) yang ditetapkan. Kegiatan ini umumnya bersifat rutin, administratif, dan lebih mudah dilaksanakan relatif lebih mudah untuk dicapai sesuai target yang ditetapkan.

c. Program/Kegiatan yang Melebihi Target (>25%)

   Ada pula program/kegiatan yang berhasil melebihi target kinerja, misalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Untuk kegiatan yang melebihi target Adalah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengembangan Prasarana Pertanian serta kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan yang sifatnya administratif, rutin, dan tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal dapat dilaksanakan lebih cepat dan efektif.

d. Faktor Penyebab Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang menyebabkan capaian kinerja antara lain dipengaruhi oleh :

- Faktor penghambat tidak tercapainya target antara lain keterbatasan pagu anggaran, keterlambatan pencairan anggaran kas, serta ketergantungan pelaksanaan kegiatan fisik pada tahapan administrasi yang cukup panjang.
- Faktor pendorong tercapainya target adalah dukungan sumber daya manusia yang memadai, ketersediaan anggaran operasional untuk kegiatan rutin, serta adanya koordinasi yang baik antar unit pelaksana.
- Sementara itu, faktor yang memungkinkan capaian melampaui target adalah efisiensi pelaksanaan kegiatan, percepatan proses administrasi, serta adanya dukungan koordinasi lintas sektor.

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang Terakomodir di APBD 2025

Rincian Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang terakomodir dalam APBD Tahun 2025, memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	8	16	44	8	16	46
TOTAL		8	16	44	8	16	46

Sumber : Monev Triwulan 1 RKPD Tahun 2025

Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dasn Ketahanan Pangan melaksanakan 8 program yang dijabarkan ke dalam 16 kegiatan dan selanjutnya terurai menjadi 44 sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun. Indikator kinerja program dan kegiatan jumlahnya selaras dengan jumlah program dan kegiatan,

namun di sub kegiatan terdapat perbedaan disebabkan karena adanya sub kegiatan memiliki indikator kinerja lebih dari satu.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Takalar Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	11.163.664.248	1.949.060.692	18,57	17,46
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	254.999.210	8.255.510	16,67	3,24
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.499.760	0	0	0
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.000.170	660.470	0	66,04
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.146.105.290	13.824.600	0	0,64
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.755.233.890	375.439.980	27,50	13,63
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.529.730	2.499.740	50,0	55,19
8	Program Penyuluhan Pertanian	37.507.550	1.190.000	9,52	3,17
	Total	**16.364.539.848**	**2.350.930.992**	**13,34**	**14,37**

Sumber : Monev Triwulan 1 RKPD Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja masih belum maksimal karena belum mencapapai target 25% yang diharapkan sampai dengan triwulan I. secara keseluruhan dari 8 program, realisasi capaiannya kinerjanya masih masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini karena kegiatan belum banyak yang dilaksanakan, kegiatan pengadaan barang/jasa, proses pembuatan kontrak masih dalam tahap persiapan, sehingga pelaksanaannya belum terlihat pada indikator output atau hasil. Faktor lain yang berpengaruh adalah terjadi perubahan kebijakan, revisi anggaran, atau pergeseran prioritas program kegiatan.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.4.
Rekapitulasi Capaian Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 - 20 %	>20 %		0 - 10%	>10-20%	>20 %		0 - 10%	>10-20%	>20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	8	4	2	2	16	6	3	7	44	16	2	26
TOTAL		**8**	**4**	**2**	**2**	**16**	**6**	**3**	**7**	**44**	**16**	**2**	**26**

Sumber : Monev Triwulan 1 RKPD Tahun 2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian pendanaan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar pada Triwulan I Tahun 2025 melaksanakan 8 program. Dari jumlah tersebut, capaian pendanaan menunjukkan bahwa terdapat 4 program berada pada kategori rendah (0–10%), 2 program berada pada kategori sedang (>10–20%), dan 2 program lainnya telah mencapai kategori tinggi (>20%). Selanjutnya, dari total 16 kegiatan,

sebanyak 6 kegiatan masih berada pada kategori rendah (0–10%), 3 kegiatan pada kategori sedang (>10–20%), dan 7 kegiatan telah berada pada kategori tinggi (>20%). Adapun untuk 44 sub kegiatan, capaian pendanaan memperlihatkan bahwa 16 sub kegiatan masih berada dalam kategori rendah (0–10%), 2 sub kegiatan berada pada kategori sedang (>10–20%), serta 26 sub kegiatan sudah mencapai kategori tinggi (>20%).

Secara umum, capaian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar sub kegiatan telah berada pada kategori capaian pendanaan tinggi (>20%). Namun demikian, masih terdapat proporsi cukup besar program, kegiatan dan sub kegiatan yang berada pada kategori rendah, sehingga perlu perhatian lebih lanjut dalam percepatan realisasi pada triwulan berikutnya.

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Evaluasi capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan bagian penting dalam mengukur sejauh mana pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara target kinerja dengan realisasi yang dicapai. Dengan adanya evaluasi ini, dapat diketahui program/kegiatan yang sudah berjalan optimal, yang masih perlu percepatan, maupun yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan strategi tindak lanjut, sekaligus sebagai bahan perbaikan perencanaan pada periode berikutnya agar sasaran dapat tercapai secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.5

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD
Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10%	>10-20%	>20 %		0 - 10%	>10-20%	>20 %		0 - 10%	>10-20%	>20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	8	4	2	2	16	9	1	6	44	30	2	12
TOTAL		**8**	**4**	**2**	**2**	**16**	**9**	**1**	**6**	**44**	**30**	**2**	**12**

Sumber : Monev Triwulan 1 RKPD Tahun 2025

Keterangan :
1. >20% Tinggi (T)
2. .10 - 20% Sedang (S)
3. 0 – 10% Rendah (R)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwae rekapitulasi capaian kinerja pendanaan Triwulan I Tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan melaksanakan 8 program. Dari jumlah tersebut, capaian kinerja menunjukkan bahwa 4 program masih berada pada kategori rendah (0–10%), 2 program berada pada kategori sedang (>10–20%), dan 2 program telah mencapai kategori tinggi (>20%).

Selanjutnya, dari 16 kegiatan yang dilaksanakan, capaian kinerja menunjukkan bahwa 9 kegiatan masih berada pada kategori rendah (0–10%), 1 kegiatan pada kategori sedang (>10–20%), dan 6 kegiatan telah mencapai kategori tinggi (>20%). Sementara itu, dari total 44 sub kegiatan, capaian kinerja memperlihatkan bahwa 30 sub kegiatan masih berada pada kategori rendah (0–10%), 2 sub kegiatan pada kategori sedang (>10–20%), dan 12 sub kegiatan sudah mencapai kategori tinggi (>20%).

capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 masih didominasi kategori rendah (0–10%), khususnya pada tingkat sub kegiatan. Hal ini disebabkan terutama oleh keterlambatan realisasi anggaran dan proses administrasi pengadaan, sementara kegiatan yang bersifat rutin dan

administratif lebih mudah mencapai target. Ke depan, percepatan pelaksanaan, penyederhanaan administrasi, serta penguatan dukungan anggaran perlu menjadi prioritas agar target kinerja dapat tercapai lebih optimal pada triwulan berikutnya..

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (Indikator Kinerja Utama)

Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi ini dilakukan dengan menelaah ketercapaian indikator kinerja, realisasi pendanaan, serta capaian keluaran (output) dan hasil (outcome) dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan program pelayanan dinas tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas capaian kinerja yang dihasilkan, oleh karena itu, analisis ini menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi sejauh mana target kinerja telah tercapai, hambatan yang dihadapi, serta potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dengan adanya analisis kinerja pelayanan ini, diharapkan dapat diperoleh masukan yang obyektif sebagai dasar perumusan kebijakan, peningkatan efektivitas perencanaan, serta pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan dan memperkuat kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut tabel yang menyajikan analisis kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan untuk capaian tahun sebelumnya sampai dengan saat ini.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat strategis dan menjadi tolok ukur utama dalam menilai pencapaian tujuan serta sasaran organisasi. IKU disusun secara terukur, relevan, dan konsisten dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan sektor pertanian dan pangan yang menjadfi tanggung jawab Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, sehingga mampu menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program maupun kegiatan. Dengan adanya IKU, arah penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat dipantau secara lebih sistematis dan akuntabel, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel II.6
Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Triwulan I	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/Ha)	57,00	57,17	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	57,5	57,6	57,8	56,85	57,6	57,8	
2	Produktivitas tanaman pangan utama padi (ton/Ha)	5,2	5,19	Produktivitas tanaman pangan utama padi (ton/Ha)	6,00	6,20	6,30	5,17	6,20	6,30	
3	Produktivitas tanaman pangan utama Jagung (ton/Ha)	7,2	6,63	Produktivitas tanaman pangan utama Jagung (ton/Ha)	6,75	7,10	7,30	5,99	7,10	7,30	
4	Produktivitas tanaman hortikultura utama Cabe Rawit (ton/Ha)	7,8	6,73	Produktivitas tanaman hortikultura utama Cabe Rawit (ton/Ha)	7,40	7,80	8,25	6,53	7,80	8,25	
5	Produktivitas gula tanaman perkebunan utama tebu (ton/Ha)	4,5	1,93	Produktivitas tanaman perkebunan utama tebu (ton/Ha)	50,30	50,65	51,50	Data Belum Tersedia	50,65	51,50	
6	Skor Pola Pangan Harapan	87,9	94,40	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	84,89	85,39	85,89	Data Belum Tersedia	85,39	85,89	
7	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	100.000	121.394	Skor Pola Pangan Harapan	95,30	96,30	97,20	Data Belum Tersedia	96,30	97,20	
8	Jumlah temuan bahan berbahaya pada pangan segar (temuan)	0	0	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	9,20	9,00	8,80	Data Belum Tersedia	9,00	8,80	

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Triwulan I	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)
9	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	55,50	55,25	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	BB 71,00	BB 71,50	BB 72,00	71,08	BB 71,50	BB 72,00	
10	Nilai SAKIP	BB	BB	Tingkat Literasi Digital ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	9,7	9,75	9,8	9,69	9,75	9,8	

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2024, Renstra Tahun 2023-2026 DTPHPK, Renstra Tahun 2025-2029 DTPHPKP

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Utama di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan indikator kinerja tujuan maupun sasaran dari target Renstra tahun 2023-2026 ke target Renstra tahun 2025-2029. Skor Pola Pangan Harapan yang merupakan indikator tujuan Renstra tahun 2023-2026, pada Renstra tahun 2025-2029 diubah menjadi indikator sasaran. Kemudian ketersediaan pangan utama beras dan jumlah temuan bahan berbahaya pada pangan segar yang merupakan indikator sasaran pada Renstra tahun 2023-2026, pada Renstra tahun 2025-2029 sudah bukan lagi menjadi indikator sasaran. Namun diganti dengan Skor PPH dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Kemudian pada Renstra tahun 2025-2029 juga terdapat penambahan indikator sasaran baru yaitu Tingkat Literasi Digital ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Perubahan-perubahan ini dilakukan dalam rangka penyempuranaan dan penyesuaian pengukuran kinerja agar lebih relevan, akurat dan tetap sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Adapun capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. *Produktivitas pertanian per hektar per tahun*, merupakan ukuran jumlah hasil produksi tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dalam satuan ton dalam satu tahun yang dibagi dengan total luas panen dalam satuan hektar dalam satu tahun. Dari target 57,00 ton/Ha diperoleh angka realisasi 57,17 ton/Ha atau angka capaian 100,30% rentang capaian 91> kriteria sangat tinggi. Angka ini diperoleh dari jumlah keseluruhan produktivitas tanaman pangan yang didominasi oleh produktivitas komoditi ubi kayu dan ubi jalar, disusul produktivitas padi dan jagung. Capaian ini didukung oleh kondisi lahan seperti potensi luas lahan, topografi, kesuburan, kondisi fisik, dan lingkungan. Selain itu adanya adopsi teknologi modern, seperti alat dan mesin pertanian serta penerapan teknik budidaya yang efektif, seperti jarak tanam yang optimal mendukung peningkatan hasil panen.
2. *Produktivitas tanaman pangan utama padi*, merupakan ukuran jumlah hasil produksi padi dalam satuan ton yang dibagi dengan total luas panen padi dalam satuan hektar dalam satu tahun. Dari target 5,20 ton/Ha diperoleh angka realisasi 5,19 ton/Ha atau 99,80% dengan rentang capaian 91> kriteria sangat tinggi. Berdasarkan data, produksi tanaman padi mengalami trend kenaikan yaitu 149.322,55 ton/Ha tahun 2022 menjadi 154.520,05 ton/Ha pada tahun 2023 dan 171.310,93ton pada tahun 2024. Peningkatan produksi tahun

2024 ini dibarengi dengan penambahan luas tanam pada tahun 2023 yaitu 24.245,88 Ha menjadi 33.452,36 Ha pada tahun 2024 dan penambahan luas panen dari tahun 2023 seluas 29.847,4 Ha menjadi 32.954,90 Ha pada tahun 2024. Penambahan luas tanam ini juga untuk mendukung program pemerintah pusat melalui Program Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai upaya untuk meningkatkan luas lahan tanam dan produksi pangan yang dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Upaya yang dilakukan berupa penyediaan sarana dan prasarana irigasi untuk memaksimalkan pertanaman yang kegiatan ini tetap dilanjutkan pada tahun 2024. Selain itu adanya optimalisasi pemanfaatan lahan, memastikan ketersediaan pupuk dan benih unggul, ketersediaan teknologi pertanian modern, adanya dukungan dari TNI dan petani muda serta bantuan benih dari pemerintah pusat.

3. *Produktivitas tanaman pangan utama jagung*, merupakan ukuran jumlah hasil produksi jagung dalam satuan ton yang dibagi dengan total luas panen jagung dalam satuan hektar dalam satu tahun. Dari target 7,2 ton/Ha diperoleh angka realisasi 6,63 ton/Ha atau 92,08% dengan rentang capaian 91> kriteria sangat tinggi. Capaian ini diperoleh karena adanya penambahan luas tanam jagung yang dibarengi denga peningkatan produksi jagung. Berdasarkan data terjadi peningkatan produksi jagung sejumlah 15.921,49 ton atau dari 54.597,43 ton pada tahun 2023 menjadi 70.518,92 ton pada tahun 2024. Penerapan teknologi modern seperti benih unggul dan pupuk serta peningkatan luas lahan panen menjadi pemicu peningkatan produksi.
4. *Produktivitas tanaman hortikultura utama Cabe Rawit*, merupakan ukuran jumlah hasil produksi cabe dalam satuan ton yang dibagi dengan total luas panen cabe dalam satuan hektar dalam satu tahun. Dari target 7,8 ton/Ha diperoleh angka realisasi 6,73 ton/Ha atau 86,28% dengan rentang capaian 76 < 90 kriteria tinggi. Meskipun kriteria tinggi namun dianggap masih perlu dilakukann upaya khusus pencapain target mendekati 100%. Namun demikian berdasarkan data, produksi tanaman cabe rawit mengalami peningkatan yaitu 845,44ton pada tahun 2023 menjadi 2.577,45ton pada tahun 2024. Jumlah produksi ini belum dianggap ideal jika dibandingkan dengan luas panen. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca utamanya pada bulan Nopember. Fase pertumbuhan tanaman cabe ini membutuhkan kondisi iklim yang spesifik. Perubahan cuaca yang ekstrem, baik terlalu panas, terlalu dingin, curah hujan berlebihan, atau kekeringan, dapat mengganggu proses biologis tanaman dan menyebabkan hasil panen tidak maksimal berdasarkan luas tanamnya.

5. *Produktivitas gula tanaman perkebunan utama tebu*, merupakan ukuran jumlah hasil produksi gula tebu dalam satuan ton yang dibagi dengan total luas panen tebu dalam satuan hektar dalam satu tahun. Dari target 4,5 ton/Ha diperoleh angka realisasi 1,93 ton/Ha atau 42,89% dengan rentang capaian < 50 kriteria sangat rendah. Hal ini berarti bahwa untuk indikator kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktivitas Gula Tanaman Perkebunan Utama capaian kinerjanya tidak tercapai. Berdasarkan data, produksi tebu tahun 2023 adalah 4.100 ton dengan luas 2.125,42 Ha. Sedangkan produksi tahun 2023 adalah 2.924,12 ton dengan luas panen 1.193,52 Ha. Dapat dilihat bahwa meskipun terjadi penurunan produktivitas namum produksi bertambah seiring dengan penambahan luas panen. Adapun yang menjadi penyebab penurunan produktivitas ini sehingga menyebabkan tidak ketercapainya target antara lain adalah penambahan luas tanam yang tidak diiringan penambahan produksi yang siginfikan. Kurangnya rendemen akibat serangan hama yang menginfeksi tebu yang dapat menyebabkan kerugian hasil yang cukup tinggi, baik itu menurunkan produksi maupun kualitas nira yang dihasilkan, yaitu hama kutu putih dan penggerek batang. Hasil penelitian, setiap persen kerusakan ruas karena hama ini, terdapat kerugian gula sebesar 0,5%. Kerugian karena serangan hama akan menyebabkan penurunan bobot tebu. Serangan berturut-turut 10%, 20%, dan 30% akan menurunkan bobot tebu berturut-turut 16%, 38,8%, dan 60,8% yang merupakan bobot produksi. Tahun 2025 ini komoditi tebu perlu perhatian dan upaya khusus dalam upaya pencapaian target.
6. *Skor Pola Pangan Harapan (PPH),* adalah indikator yang mengukur kualitas konsumsi pangan penduduk berdasarkan keberagaman, keseimbangan, dan kecukupan gizi, dengan skor ideal 100%. Semakin tinggi skornya, semakin baik pola konsumsi pangan karena mencakup 9 kelompok pangan utama dengan proporsi yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi. Dari target skor PPH 87,9 diperoleh angka realisasi 94,4 atau 107,39% dengan rentang capaian 91> kriteria sangat tinggi. Ini menunjukkan angak survey pola makan masyarakat Takalar yang beragam, yang dicapai melalui peningkatan konsumsi pangan dari berbagai kelompok, seperti padi-padian, pangan hewani, buah, sayur, dan umbi-umbian, serta adanya peningkatan pendapatan yang memungkinkan masyarakat membeli makanan berkualitas. Selain itu, program pemerintah daerah seperti diversifikasi pangan, Gerakan pangan murah dan promosi pangan lokal juga turut berkontribusi pada kenaikan skor PPH Kab. Takalar.

7. *Ketersediaan pangan utama beras*, merupakan kondisi di mana pangan beras dalam jumlah dan kualitas yang cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk Kabupaten Takalar, yang berasal dari produksi dalam wilayah Kabupaten Takalar, cadangan pangan jika ada, dan impor jika ada. Ketersediaan ini meliputi pangan pokok beras, dan sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang cukup. Dari target 100.000 ton diperoleh angka realisasi 121.934 ton atau 121,93% dengan rentang capaian 91> kriteria sangat tinggi. Berdasarkan neraca pangan Kabupaten Takalar, produksi beras tahun 2024 mencapai 71.200 ton dari hasil konversi gabah kering giling 122.432 ton. Stok awal beras 63.374 ton, beras masuk 2.800 ton dan bveras keluar 15.500 ton sehingga total ketersediaan 121.934 ton. Sedangkan total kebutuhan konsumsi beras hanya 35.817 ton, sehingga tercatat dalam neraca sejumlah surplus 86.118 ton.
8. *Jumlah temuan bahan berbahaya pada pangan segar*, merupakan indikator yang menujukkan kualitas keamanan pangan segar asal tumbuhan. Kualitas keamanan pangan tersebut ditunjukkan melalui serangkain hasil pengujian. Pangan segar yang dimaksud adalah sayuran, buah-buahan, biji-bijian serta umbi-umbian. Dari target 0 temuan berdasarkan hasil pengujian sampel diperoleh angka realisasi 0 temuan atau 100% dengan rentang capaian 91> kriteria sangat tinggi. Ini menujukkan bahwa, kondisi keamanan pangan asal tumbuhan yang beredar di Kabupaten Takalar berada pada kondisi aman untuk dikonsumsi. Sampling dilakukan secara periodik pada titik-titik sampel yang telah ditentukan baik itu pasar tradisonal maupun minimarket modern yang tersebar di Kabupten Takalar. Adapun cemaran yang diuji dari dapat berasal dari berbagai sumber, seperti biologis, kimia, dan fisik dengan jenis pangan ini mencakup beragam komoditas pertanian, yang diatur dalam regulasi seperti Peraturan Bapanas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran dalam Pangan Segar di Peredaran dan Peraturan Bapanas Nomor 15 Tahun 2024 tentang Residu Pestisida pada Pangan Segar.

Untuk capaian kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 belum seluruhnya tersedia data utamanya pada indikator urusan pangan seperti Indeks Ketahanan Pangan, Skor PPH dan Prevelansi ketidakcukupan pangan (PoU). Sebab, indikator ini dihitung tahunan pada akhir tahun anggaran. Terdapat beberapa variabel yang ikut dalam perhitungan di mana angkanya dapat diperoleh pada akhir atau selesainya tahun anggaran.

Kemudian untuk indikator produktivitas, baik produktivitas padi, jagung maupun cabe sudah dapat dihitung dengan realisasi sebagaimana tabe di atas masing-masing mendekati angka target. Pertanaman padi saat ini sudah selesai musim panen MT2 dan diperoleh nilai produktivitas 5,17 ton/Ha. Ditargetkan pada akhir tahun anggaran akan dicapai produktivitas di atas 6 ton/Ha. Untuk jagung diperoleh nilai produktivitas 5,99 ton/Ha dan cabe diperoleh nilai produktivitas 6,53 ton/Ha. Angka aini akan terus bertambah smpai akhir tahun anggaran mengingat masih terdapat lahan pertanaman menuggu panen untuk masuk dalam perhitungan produktivitas tahunan. Sedangkan untuk produktivitas tebu belum tersedia karena saati ini masih dalam proses panen dan penggilingan dengan kata lain perhitungan final produksi belum tersedia.

Untuk indikator pasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dari target 71,00 pada tahun 2025 diperoleh 71,08 atau 100,11% dengan rentang capaian 91> kriteria sangat tinggi. Ini menunjukkan adanya komitmen kuat pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas dalam penerapan SAKIP yang konsisten dan berorientasi pada hasil, serta peningkatan akuntabilitas kinerja di semua sub unit bidang maupun bagian.

Untuk indikator Tingkat Literasi Digital ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dari target 9,70% pada tahun 2025 diperoleh 9,69 atau 99,89% dengan rentang capaian 91> kriteria sangat tinggi. Tingkat Literasi Digital ASN meripakan tingkat kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memahami, menggunakan, dan berinteraksi dengan teknologi digital secara produktif, bertanggung jawab, serta etis dalam konteks tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik pada perangkat kerja masing-masing. Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupeten Takalar, berdasarkan data terdapat 17 Aplikasi dan 88 orang ASN. Sebagian besar aplikasi merupakan aplikasi domain kementerian dengan operator khusus dan terbatas. Tidak semua ASN wajib mengetahui aplikasi tersebut sebagai bentuk fokus pada efisiensi kerja, spesialisasi tupoksi, dan alur kerja yang terstruktur serta menjaga kerahasiaan data.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar berkaitan dengan:

- Fluktuasi iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang mempengaruhi hasil produksi Jagung, Cabe Rawit, dan Tebu.

- Keterbatasan teknologi budidaya dan sarana produksi pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan.
- Belum optimalnya infrastruktur irigasi dan prasarana pertanian, terutama untuk mendukung peningkatan produktivitas tebu.
- Kapasitas kelembagaan dan birokrasi yang masih perlu ditingkatkan, terlihat dari capaian indeks reformasi birokrasi yang sedikit di bawah target.
- Keterbatasan data realisasi pada indikator konsumsi pangan menyebabkan analisis capaian belum sepenuhnya lengkap.

Faktor pendorong dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar sesuai dengan tujuan Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- Kesesuaian kawasan pengembangan komoditas tingkat pusat dengan kabupaten
- Dukungan program kegiatan yang bersumber dari APBN
- Kesesuaian tujuan Kementerian Pertanian dalam meningkatnya pemantapan ketahanan pangan dan meningkatnya nilai tambah serta daya saing pertanian, yang sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar sebagai acuan penyusunan Renja.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAKALAR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar tahun 2025 ini merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar ini berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian Pertanian, maupun di tingkat Provinsi seperti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten Takalar tahun 2025-2029.

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pembangunan pertanian dan pangan memiliki peran sentral dalam mewujudkan Asta Cita 2025-2029, terutama pada misi memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Program-program strategis di sektor pertanian dan pangan ini dirancang untuk mencapai swasembada, meningkatkan produksi, serta memperkuat ketahanan pangan nasional yang secara garis besar diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi, mencapai kemandirian pangan nasional sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing produk pertanian melalui hilirisasi. Tujuan-tujuan ini menjadi implementasi langsung dari misi pembangunan nasional untuk menciptakan Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera.

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.3. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Prioritas pembangunan nasional (Asta Cita) yang selaras dengan tujuan pembangunan pertanian dan pangan Kabupaten Takalar "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan" adalah **Asta Cita - 2**. "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru".

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang ingin dicapai yaitu: ***Meningkatnya produktivitas pertanian dan kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan daerah.***

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Utama;
b. Meningkatnya Ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
c. Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel. III.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025 (Renstra 2023 – 2026)			**PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 (Renstra 2025-2029)**		
TUJUAN / SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
1	2	3	4	5	6
T1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	T.1 Konstribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB (%)	15,6	T.1 Meningkatnya produktivitas pertanian dan kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan daerah	T1.1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	57,5
				T1.2 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	84,89
S.1 Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan utama	S.1.1 Produktivitas tanaman pangan utama padi (ton/Ha)	5,4	S.1 Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Utama	S.1.1 Produktivitas Tanaman Pangan Utama Padi (Ton/Ha)	6,0
	S.1.2 Produktivitas tanaman pangan utama Jagung (ton/Ha)	7,5		S.1.2 Produktivitas Tanaman Pangan Utama Jagung (Ton/Ha)	6,75
				S.1.3 Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama Cabe (Ton/Ha)	7,4
				S.1.4 Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama Tebu (Ton/Ha)	50,3
S.2 Meningkatnya Produktivitas Tanaman Hortikultura utama	S.2 Produktivitas tanaman hortikultura utama cabe rawit (ton/Ha)	8,3	S.2 Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	95,3
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	9,2

RENJA POKOK TAHUN 2025 (Renstra 2023 – 2026)			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 (Renstra 2025-2029)		
TUJUAN / SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
1	2	3	4	5	6
S.3 Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan utama	S.3 Produktivitas gula Tanaman perkebunan utama tebu (ton/Ha)	4,8	S.3 Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (Nilai)	71
				Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (%)	9,7
T.2 Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan daerah baik kualitas maupun kuantitas	T.2 Skor Pola Pangan Harapan	91,5			
S.4 Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Keamanan Pangan	S.4.1 Ketersediaan pangan utama beras (ton)	110.000			
	S.4.2 Jumlah temuan bahan berbahaya pada pangan segar (temuan)	0			
T.3 Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	T3. Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan				
S.5 Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	S.5 Nilai SAKIP	BB			

Sumber : Renstra DTPHPKP Tahun 2023-2026, Renstra DTPHPKP Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan indikator kinerja tujuan maupun sasaran dari target Renstra tahun 2023-2026 ke target Renstra tahun 2025-2029. Skor Pola Pangan Harapan yang merupakan indikator tujuan Renstra tahun 2023-2026, pada Renstra tahun 2025-2029 diubah menjadi indikator sasaran. Kemudian ketersediaan pangan utama beras dan jumlah temuan bahan berbahaya pada pangan segar yang merupakan indikator sasaran pada Renstra tahun 2023-2026, pada Renstra tahun 2025-2029 sudah bukan lagi menjadi indikator sasaran. Namun diganti dengan Skor PPH dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Kemudian pada Renstra tahun 2025-2029 juga terdapat penambahan indikator sasaran baru yaitu Tingkat Literasi Digital ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Perubahan-perubahan ini dilakukan dalam rangka penyempuranaan dan penyesuaian pengukuran kinerja agar lebih relevan, akurat dan tetap sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Adapun target indikator ditentukan menganalisis tujuan dan sasaran dinas yang sejalan dengan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten takalar dan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Angka baseline tahun sebelumnya sangat digunakan sebagai data sebagai dasar, dan tetapkan target kinerja tahunan yang realistis dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang ada antara lain estimasi penganggaran, sumber daya penyuluh serta estimasi jumlah dan jenis bantuan yang akan masuk ke Kabupaten Takalar.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar tahun 2025 merupakan penyesuaian rencana kerja tahun 2025 yang mempertimbangkan evaluasi kinerja triwulan, dinamika kebutuhan masyarakat, dan perubahan anggaran, sehingga program dan kegiatan yang tertuang menjadi lebih realistis dan sesuai dengan kondisi actual.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja tahun berjalan melalui penyusunan perubahan Renja. Perubahan ini disusun sebagai bentuk respons terhadap dinamika kebutuhan pembangunan sektor pertanian serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya.

Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas yang disajikan dalam dokumen ini merupakan bagian integral dari upaya strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan untuk mendorong ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian, serta kesejahteraan petani. Penajaman fokus pada program prioritas juga dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam perubahan Renja ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan terukur dalam mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing, khususnya dalam sektor pertanian.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Prioritas Daerah -2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digitaldapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertanian komoditi utama tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	➢ **Pengadaan Drone Pupuk (Drone Sprayer)**. Penyemprotan pupuk dan pestisida dengan media drone ➢ **Pengadaan Alat dan Mesin pertanian (pra panen dan pasca panen)**. Mekanisasi pertanian melalui penyediaan alsintan
2.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertanian komoditi utama tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	**Pembangunan Green House/ Screen House Modern**
			3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	**Penyediaan Irigasi Pertanian.** Irigasi berupa Sumur dangkal, sumur dalam, dan jaringan irigasi tersier

Sumber : Renstra DTPHPKP Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan utama yang akan menjabarkan sevcara rinci dan spesifik aktivitas dari suatu kegiatan utama yang mendukung pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakli Bupati Takalar antara lain:

1. *Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi* dengan rincian aktivtas Pengadaan Drone Pupuk (Drone Sprayer). Drone sprayer merupakan pesawat nirawak yang dirancang khusus untuk menyemprotkan cairan seperti pestisida, pupuk, dan herbisida ke lahan pertanian secara efisien. Alat ini dilengkapi tangki dan sistem penyemprotan, serta dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk memetakan dan menjangkau area yang sulit diakses. Kemudian Pengadaan Alat dan Mesin pertanian (pra panen dan pasca panen) dapat berupa hand traktor, pompa air, hand sprayer, rice transplanter, corn sheller dan sebagainya.
2. *Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya* dengan rincian aktivitas Pembangunan Green House/ Screen House Modern. Bangunan ini merupakan salah satu prasarana pertanian yang menggunakan teknologi smart farming, seperti jaring khusus pada dinding dan atap, serta sistem pengatur suhu dan irigasi otomatis, untuk menciptakan lingkungan terkontrol yang optimal bagi pertumbuhan tanaman, sekaligus melindungi dari hama dan penyakit tanpa bergantung pada musim. Jadi manfaatnya melindungi tanaman dari hama dan penyakit, mengendalikan kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban agar optimal untuk pertumbuhan tanaman, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, serta menghemat penggunaan air dan energi melalui sistem irigasi dan nutrisi yang terintegrasi seperti hidroponik
3. *Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani*, dengan rincian aktifitas pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi berupa irigasi tersier, sumur dangkal pertanian, dan sumur dalam pertanian. Tujuannya Mengadakan, atau mengembalikan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi yang rusak akibat kerusakan fisik atau alih fungsi, sehingga mampu menambah luas tanam dan/atau meningkatkan indeks pertanaman.

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perekebunan dan Ketahanan Pangan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan disusun sebagai tindak lanjut atas dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program yang berjalan sampai dengan Triwulan I tahun 2025, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan strategis sektor pertanian dan pangan.

Penyusunan perubahan Renja ini dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan melalui program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perekebunan dan Ketahanan Pangan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Fokus diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan

produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, serta pemberdayaan petani dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian.

Rencana program dan kegiatan yang tercantum juga disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan sumber pendanaan yang tersedia, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan demikian, perubahan Renja ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam pencapaian target pembangunan pertanian serta mendukung visi dan misi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan total pagu Rp18.307.446.147 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel IV.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan				27.475.382.671,00	16.156.616.084,00	18.307.446.147							30.865.527.992,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.998.370,00	257.499.140,00	257.499.140,00							383.400.000,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				9.998.370,00	257.499.140,00	257.499.140,00							383.400.000,00	
1	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	91.5 Angka	91.5 Angka	7.999.200,00	254.999.210,00	254.999.210,00							278.400.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan	Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase	100 %	100 %	6.999.510,00	4.999.210,00	4.999.210,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		128.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Harga Pangan	terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan													
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			22.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	2.999.880,00	1.999.600,00	1.999.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			57.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	499.740,00	999.950,00	999.950,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														
							Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.499.890,00	1.999.660,00	1.999.660,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			24.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	499.740,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3,2 Ton	16 Ton	499.740,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	-	499.950,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	0 Laporan	499.950,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	-	999.690,00	1.499.760,00	1.499.760,00							55.000.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	-	499.950,00	1.499.760,00	1.499.760,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	499.950,00	1.499.760,00	1.499.760,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	499.740,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	0 Laporan	499.740,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	-	999.480,00	1.000.170,00	1.000.170,00							50.000.000,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	999.480,00	1.000.170,00	1.000.170,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	0 Dokumen	499.740,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	499.740,00	1.000.170,00	1.000.170,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				27.465.384.301,00	15.899.116.944,00	18.049.947.007,00							30.482.127.992,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				27.465.384.301,00	15.899.116.944,00	18.049.947.007,00							30.482.127.992,00	
4	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-	-	-	11.024.652.115,00	11.168.490.484,00	11.147.217.957,00							20.225.027.992,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	-	-	74.913.210,00	14.889.410,00	14.889.410,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		161.900.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Perangkat Daerah														
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5.499.970,00	6.389.980,00	4.529.980,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			94.200.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.479.740,00	1.498.520,00	1.148.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.870,00	1.499.810,00	1.499.810,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.750,00	1.499.680,00	959.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.700.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.880,00	1.499.840,00	1.499.840,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	1.501.580,00	1.501.580,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	57.434.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	10.613.357.971	10.947.720.814,00	10.947.720.814			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		18.194.810.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/bulan	93 Orang/bulan	10.600.958.681	10.937.323.084,00	10.932.496.867	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.114.810.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1800 Dokumen	1800 Dokumen	2.399.910,00	2.399.710,00	2.382.810,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.920,00	1.999.760,00	1.999.760,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.010,00	2.499.890,00	2.499.890,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.999.500,00	1.498.810,00	1.498.810,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	3.499.950,00	1.999.560,00	1.999.560,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	5.497.860,00	4.424.700,00	4.424.700,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.720,00	1.074.840,00	780.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.499.840,00	1.499.860,00	1.499.860,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.998.300,00	1.850.000,00	490.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	119.460,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		271.340.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	123 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			71.340.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0 Orang	119.460,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	27.015.770,00	28.794.160,00	28.794.160,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		595.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	999.000,00	998.900,00	998.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	0 Dokumen	1.349.910,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	2.499.860,00	2.665.260,00	2.665.260,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	22.167.000,00	25.130.000,00	13.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	298.805.174,00	105.593.670,00	105.593.670,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		611.377.992,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.249.900,00	1.993.670,00	1.473.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	205.155.274,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			334.377.992,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	92.400.000,00	103.600.000,00	103.600.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			270.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	4.942.670,00	67.067.730,00	67.067.730,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		370.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1.900.000,00	14.387.730,00	14.387.730,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	253.770,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	108.900,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
5	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-	1.203.419.810,00	2.458.605.290,00	2.432.820.390,00							1.873.540.000,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	-	998.919.730,00	2.404.105.450,00	2.404.105.450,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		1.548.200.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	4 Laporan	997.019.850,00	2.402.605.300,00	2.376.820.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			1.523.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	1.899.880,00	1.500.150,00	1.500.150,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			25.200.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	204.500.080,00	54.499.840,00	54.499.840,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		325.340.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.010,00	2.499.850,00	2.499.850,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	201.500.070,00	51.999.990,00	51.999.990,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			125.340.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-	14.797.132.476,00	2.229.983.890,00	2.938.929.380,00							7.619.000.000,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	371.464.690,00	5.409.890,00	5.409.890,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		439.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	369.117.000,00	1.499.980,00	1.499.980,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			399.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	2.347.690,00	3.909.910,00	3.909.910,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			40.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-	14.425.667.786,00	2.224.574.000,00	2.224.574.000,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		7.180.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	73 Unit	14 Unit	10.697.499.786,00	1.850.000.000,00	1.992.581.490,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			4.150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	0 Unit	480.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			480.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0 Unit	548.168.000,00	0,00	372.750.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	25 Unit	15 Unit	2.700.000.000,00	374.574.000,00	568.188.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			2.050.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
7	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	-	4.530.000,00	4.529.730,00	4.529.730,00							174.700.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	-	-	-	4.530.000,00	4.529.730,00	4.529.730,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah	-		174.700.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 Ha	1 Ha	2.030.000,00	2.029.990,00	2.029.990,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			61.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1 Ha	1 Ha	1.500.000,00	2.499.740,00	2.499.740,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			61.700.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Ha	0 Ha	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			52.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
8	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	-	1.000.180,00	0,00	0,00							150.860.000,00	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	1.000.180,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		150.860.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian														
							Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.860.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	10 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	0 Laporan	1.000.180,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			51.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
9	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	-	434.649.720,00	37.507.550,00	1.526.449.550,00							439.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	-	434.649.720,00	37.507.550,00	37.507.550,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		439.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	10 Unit	67.500.000,00	5.000.000,00	1.523.942.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			67.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	10 Unit	4.999.910,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan			12.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Penyerapan Tenaga Kerja				
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	0 Unit	257.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			249.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	2 Unit	1 Unit	4.999.810,00	2.507.550,00	2.507.550,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	JUMLAH					**27.475.382.671**	**16.156.616.084**	**18.307.446.147**							**30.865.527.992**	

Sumber : Laporan Monev Triwulan I Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan anggaran dari RKPD tahun 2025 senilai Rp. 27.475.382.671 menjadi Rp. 16.156.616.084 pada APBD pokok 2025. Sebagaimana diketahui bahwa RKPD berisi rencana program dan kegiatan prioritas secara garis besar, sementara APBD adalah rincian anggaran yang lebih detail dan operasional. RKPD disusun sebelum APBD, sehingga datanya lebih berdasarkan perkiraan atau asumsi. Saat penyusunan APBD, data untuk penyusunan rencana kerja anggaran dinas yang digunakan lebih aktual dan realistis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dengan kebijakan nasional atau provinsi serta pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Takalar. Selanjutnya pada RKPD perubahan tahun 2025 terjadi kembali perubahan anggaran menjadi Rp. 18.307.446.147. ini disebabkan adanya penambahan anggaran dana transfer DAK Non Fisik Pertanian senilai Rp. 1.518.942.000 dengan rincian belanja Honor THL penyuluh pertanian dan BOP penyuluh pertanian. Perubahan lain pada RKPD perubahan 2025 adalah adanya pengurangan belanja pada rekening alat tulis kantor sebagai bentuk kebijakan daerah dalam efisiensi belanja.

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025, disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, perubahan kebijakan, serta ketersediaan anggaran yang terjadi di tengah tahun anggaran berjalan. Perubahan ini dilakukan dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan semester sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini mencerminkan komitmen Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dalam penyesuaian kebijakan-kebijakan anggaran pemerintah daerah mealui TAPD yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan lebih lanjut terhadap kebijakan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap memperhatikan tujuan, sasaran serta tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar. Diharapkan melalui dokumen ini, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya pada urusan pertanian dan urusan pangan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja Perubahan ini disusun secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan pertanian dan keterkaitan antar program dan kegiatan. Penyusunan Renja juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk petani, kelompok tani, pelaku usaha pertanian, dan masyarakat umum, melalui mekanisme musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang mana perubahannya menyesuaikan dengan kebijakan anggaran daerah yang telah dielaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2030, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah. Renja Perubahan ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, berikut target capaian kinerja dan indikatornya yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2025 merupakan pedoman penyesuaian ringkasan program/kegiatan dan sub kegiatan dalam penganggaran yang mengalami perubahan yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian Kabupaten Takalar. Apa yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga masih diperlukan kerja dan usaha yang lebih keras dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, untuk itu tidak menutup kemungkinan adanya masukan dan saran dalam penyempurnaan kegiatan yang akan datang.

Dokumen Perubahan Renja ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh dan sinergi antar sektor terkait sehingga tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Takalar dapat tercapai. Dengan adanya rencana tindak lanjut ini, diharapkan seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat berjalan secara lebih terarah, akuntabel, serta mendukung pencapaian target pembangunan sektor pertanian yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dibuat untuk bahan dalam penyesuaian dan penyempurnaan program pembangunan pertanian tahun 2025.

Takalar, Juni 2025
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAKALAR,

Drs. H. PARAWANGSA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19691216 199112 1 001

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan penyesuaian dan penjabaran terhadap Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Selain itu perubahan Renja ini dimaksudkan untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan OPD. Dimana Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar mendukung misi kedua yakni "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik" Misi kelima yaitu "Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital" dan Misi keenam yaitu Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolah ragaan, dan pemajuan kebudayaan.

Perubahan Renja dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan tidak terlepas dari pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 dalam rangka mendukung perwujudan misi dan misi Pemerintah Kabupaten Takalar yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Sekretariat Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai posisi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan Sekretariat Daerah.

Perubahan Renja sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan yang telah melalui tahap evaluasi dan merupakan turunan dari Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan dasar untuk menyusun perubahan rencana kegiatan dan anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Takalar, Juni 2025

Sekretaris Daerah Kab. Takalar

Dr. MUHAMMAD HASBI, S.STP., M.AP., M.I.Kom
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19810112 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Triwulan I Tahun 2025 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 2025 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 26

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 26

3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 30

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas DalamMendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 30

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 32

BAB V PENUTUP 51

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Periode Triwulan I Tahun 2025..... 6

Tabel II-2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang ada dalam APBD Tahun 2025 19

Tabel II-3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 hingga Triwulan I..... 19

Tabel II-4 Evaluasi Capaian Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Sekretariat Daerah Triwulan I Tahun 2025..... 20

Tabel II-5 Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan Sub Kegiatan RKPD Sekretariat Daerah Triwulan I Tahun 2025..... 21

Tabel II-6 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 23

Tabel III-1 Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025..... 28

Tabel III-2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah..... 31

Tabel IV-2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah (Sekretariat Daerah) disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Sekretariat Daerah Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan (DPPA) melalui penetapan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, kondisi Triwulan I dan II ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendali dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025).

1.3 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

  Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah sebagai berikut:

  a. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra OPD ke dalam program/kegiatan tahunan
  b. Menyiapkan acuan bagi Rancangan Perubahan APBD
  c. Menyiapkan kerangka evaluasi perubahan kinerja program/ kegiatan tahunan bagi OPD.

- **Tujuan**

  Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD

1.4 Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan, Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan dokumen Renja (Rencana Kerja) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, IKK, SPM dan SDGs, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak dan upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai triwulan I.

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran, review terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, serta rencana program dan kegiatan perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025.

BAB IV: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan dalam perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025.

BAB V: PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I Tahun 2025.

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Sekretariat Daerah. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Sekretariat Daerah. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Takalar
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4			5		5	6	7		5		5
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**													
4	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**81.693.848.476**	**95,43%**	**39.246.607.808**	**100%**	**30.327.794.243,18**	**19%**	**7.937.639.816**	**19,52%**	**7.937.639.816**	**19,52%**	**26,17%**
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**320.000.000,00**	**39,29%**	192.698.500,00	**100%**	70.000.000,00	28,57%	24.506.300,00	28,57%	24.506.300,00	28,57%	35,01%
4	1	1	2.01	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	120.000.000,00	4	41.735.800,00	2	18.000.000,00	0	4.506.300,00	0	4.506.300,00	0%	25%

4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	30.000.000,00	3	31.030.800,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	100%	100%
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	40.000.000,00	3	35.881.000,00	2	11.000.000,00	0	-	0	-	0%	0%
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	30.000.000,00	3	33.369.800,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	100%	100%
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	30.000.000,00	3	30.986.800,00	2	11.000.000,00	0	-	0	-	0%	0%
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	16	70.000.000,00	6	19.694.300,00	4	10.000.000,00	0	-	0	-	0%	0%
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat**	**100%**	**56.525.663.640,00**	**50,26%**	**22.500.595.471,00**	**100%**	**12.801.187.344,00**	**15%**	**2.173.885.021,00**	**15%**	**2.173.885.021,00**		
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (110)	6216	41.616.840.840,00	3.159,00	15.097.752.708,00	1400	8.395.603.871,00	400	2.095.310.771,00	400	2.095.310.771,00	29%	25%
						Jumlah Orang yang menerima Tunjangan Penghasilan ASN	5328	14.118.822.800,00	2.592,00	6.261.844.066,00	1200	4.059.397.443,00	0	0	0	0	0%	0%

						Jumlah ASN yang menerima Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3				3	17.700.000,00	0	0	0	0	0%	0%
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	220.000.000,00	4,00	19934000,00	2	10.000.000,00	0	1.905.260,00	0	1.905.260,00	0%	19%
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	120.000.000,00	59,00	730096644,00	12	251.486.030,00	3	61.865.390,00	3	61.865.390,00	25%	25%
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	30.000.000,00	28,00	328100153,00	6	34.000.000,00	0	3.803.600,00	0	3.803.600,00	0%	11%
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	80.000.000,00	2,00	21200100,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	100%	100%
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	280.000.000,00	4,00	20791100,00	2	11.000.000,00	0	-	0	-	0%	0%

4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	60.000.000,00	2,00	20876700,00	1	11.000.000,00	0	-	0	-	0%	0%
4	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**420.000.000,00**	**92,11%**	**207.675.500,00**	**100%**	**153.817.000,00**	**16,67%**	**34.413.000,00**	**16,67%**	**34.413.000,00**	**16,67%**	**22,37%**
4	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48	300.000.000,00	17	45.946.200,00	12	31.000.000,00	2	13.951.200,00	2	13.951.200,00	17%	45%
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	60.000.000,00	19	30.978.800,00	4	29.817.000,00	1	5.232.000,00	1	5.232.000,00	25%	18%
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	60.000.000,00	34	130.750.500,00	2	93.000.000,00	0	15.229.800,00	0	15.229.800,00	0%	16%
4	**1**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**60.500.000,00**	**100,00%**	**59.332.800**	**100%**	**55.000.000,00**	**25%**	**8.156.400,00**	**25%**	**8.156.400,00**	**25%**	**14,83%**
4	1	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16	10.000.000,00	4	59.332.800	4	55.000.000,00	1	8.156.400,00	1	8.156.400,00	25%	15%

4	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**370.000.000,00**	**22,22%**	**111.174.400,00**	**100%**	**122.981.670,00**	**11%**	**12.787.700,00**	**11%**	**12.787.700,00**	**11,11%**	**10,40%**
4	1	1	2.05	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16	180.000.000,00	1	18.339.300,00	4	42.349.570,00	1	6.159.800,00	1	6.159.800,00	25%	15%
4	1	1	2.05	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	100.000.000,00	2	87.480.000,00	4	80.132.100,00	0	6.627.900,00	0	6.627.900,00	0	8%
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	90.000.000,00	1	5.355.100,00	1	500.000,00	0	0	0	0	0	0%
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**3.540.000.000**	**94%**	**2.364.313.125**	**100%**	**1.202.073.688,00**	**24%**	**598.065.188,00**	**24%**	**598.065.188,00**	**23,53%**	**49,75%**
4	1	1	2.06	1	penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	300.000.000,00	1	281.679.860,00	15	52.003.300,00	5	11.886.000,00	5	11.886.000,00	33%	23%
4	1	1	2.06	2	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	16	500.000.000,00	-	-	4	1.000.000,00	1	0,00	1	0,00	25%	0%

4	1	1	2.06	4	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	160.000.000,00	4	220.566.473,00	4	90.005.388,00	1	35.439.000,00	1	35.439.000,00	25%	39%
4	1	1	2.06	5	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	180.000.000,00	4	77.855.000,00	4	56.070.000,00	1	28.786.000,00	1	28.786.000,00	25%	51%
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	1.200.000.000,00	12	1.380.845.957,00	12	854.880.000,00	2	404.849.500,00	2	404.849.500,00	17%	47%
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	1.200.000.000	10	403.365.835,00	12	148.115.000,00	2	117.104.688,00	2	117.104.688,00	17%	79%
4	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Nilai Aset Pemerintah Bertambah**	**100%**	**1.873.392.000**	**100,00%**	**3.017.740.003**	**100%**	**3.508.407.609,00**	**23%**	**2.248.376.400,00**	**23%**	**2.248.376.400,00**	**23,08%**	**64,09%**
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	1.173.392.000	2	1.158.600.000	5	2.346.803.000,00	1	2.239.526.400,00	1	2.239.526.400,00	20%	95%
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	400.000.000	12	56.410.000	4	339.441.000,00	1	0	1	0	25%	0%
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16	300.000.000	2	1.802.730.003	4	822.163.609,00	1	8.850.000,00	1	8.850.000,00	25%	1%

4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase rata-rata capaian output kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**6.609.292.836,00**	**93,06%**	**4.387.210.856,00**	**100%**	**2.546.053.692,00**	**100,00**	**1.430.847.716,00**	**100,00**	**1.430.847.716,00**	**25%**	**56,20%**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	480.000.000,00	11	97.206.800,00	12	118.241.420,00	3	25.831.400,00	3	25.831.400,00	25%	22%
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tagihan Air	48	1.371.883.200,00	11	143.071.551,00								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tagihan Listrik	48	2.365.409.636,00	11	979.521.632,00	12	185.998.272,00	3	23.153.138,00	3	23.153.138,00	25%	12%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tagihan Telepon/wifi	48	512.000.000,00	11	29.874.250,00								
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	880.000.000,00	11	1.910.436.623,00	12	1.350.514.000,00	3	1.186.663.178,00	3	1.186.663.178,00	25%	88%
4	1	1	2.08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	1.000.000.000,00	12	1.227.100.000,00	20	891.300.000,00	5	195.200.000,00	5	195.200.000,00	25%	22%
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Aset Milik Pemerintah**	**100%**	**4.000.000.000**	**98%**	**2.154.047.504**	**100%**	**5.402.921.340,18**	**27%**	**598.589.186,00**	**27%**	**598.589.186,00**	**25,77%**	**11,08%**

4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	80	2.000.000.000,00	70	803.376.078	20	3.459.394.500,00	5	155.963.258,00	5	155.963.258,00	25%	5%
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	200.000.000,00	38	38.912.000	15	158.480.000,00	5	19.351.000,00	5	19.351.000,00	33%	12%
4	1	1	2.09	9	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	368	1.800.000.000,00	1	1.311.759.426	92	1.785.046.840,18	24	423.274.928,00	24	423.274.928,00	26%	24%
4	**1**	**1**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**2.850.000.000**	**100%**	**697.348.700**	**100%**	**1.001.965.000**	**100,00**	**173.447.300,00**	**100,00**	**173.447.300,00**	**25%**	**17,31%**
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2.800.000.000	2	570.000.000	2	850.000.000,00	1	145.000.000,00	1	145.000.000,00	50%	17,06%
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	50.000.000	2	127.348.700	2	151.965.000,00	0	28.447.300,00	0	28.447.300,00	0	18,72%

4	**1**	**1**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Terpenuhinya Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**2.775.000.000**	**100%**	**2.461.894.018,00**	**100%**	**3.234.096.900,00**	**0%**	**592.394.605,00**	**0%**	**592.394.605,00**	**0%**	**18,32%**
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	1.775.000.000	1	2.142.828.904,00	1	1.587.546.900,00	1	458.288.279,00	1	458.288.279,00	0%	28,87%
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1				1	1.000.000.000,00	1	91.646.126,00	1	91.646.126,00	0%	9,16%
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	1.000.000.000	1	319.065.114,00	1	646.550.000,00	1	42.460.200,00	1	42.460.200,00	0%	6,57%
4	**1**	**1**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**persentase peningkatan kinerja dan terwujudnya kelembagaan efektif dan efisien**	**100%**	**1.250.000.000,00**	**90,91%**	**164.612.000,00**	**100%**	**65.000.000,00**	**14,29%**	**8.310.000,00**	**14,29%**	**8.310.000,00**	**14,29%**	**12,78%**
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	16	325.000.000,00	8	49.627.800,00	1	12.067.000,00	0	2.480.000,00	0	2.480.000,00	0%	20,55%
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Pelayanan Publik yang dievaluasi	4	325.000.000,00	4	50.676.200,00	4	22.733.000,00	1	2.010.000,00	1	2.010.000,00	25%	8,84%
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Lembar Kerja Evaluasi PMPRB	4	400.000.000,00	4	32.318.500,00	1	15.298.000,00	0	2.580.000,00	0	2.580.000,00	0%	16,86%

4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4	200.000.000,00	4	31.989.500,00	1	14.902.000,00	0	1.240.000,00	0	1.240.000,00	0%	8,32%
4	**1**	**1**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**persentase rata-rata capaian output sub kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**1.100.000.000,00**	**86,11%**	**927.964.931,00**	**100%**	**164.290.000,00**	**16,67%**	**33.861.000,00**	**16,67%**	**33.861.000,00**	**16,67%**	**20,61%**
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48	500.000.000,00	11	548.361.604,00	12	75.000.000,00	2	26.081.000,00	2	26.081.000,00	17%	35%
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Informasi Pembangunan Daerah yang tersebar melalui Media Elektronik	48	500.000.000,00	10	12.153.100,00	12	14.997.400,00	2	2.820.000,00	2	2.820.000,00	17%	19%
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	jumlah Laporan Informasi yang dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan online	48	100.000.000,00	10	367.450.227,00	12	74.292.600,00	2	4.960.000,00	2	4.960.000,00	17%	7%
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rata-rata capaian Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**5.068.400.000**	**96,08%**	**10.858.924.388**	**100%**	**5.045.652.450,00**	**25,75%%**	**89.813.800,00**	**25,75%**	**89.813.800,00**	**26%**	**1,78%**
4	**1**	**2**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**100%**	**1.050.000.000,00**	**89%**	**435.267.173,00**	**100%**	**48.516.810,00**	**28%**	**15.855.700,00**	**28%**	**15.855.700,00**	**32,68%**	**3,65%**
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen LPPD	4	400.000.000,00	2	399.538.173	1	27.631.930,00	1	15.855.700,00	1	15.855.700,00	33%	57,38%

						Jumlah Dokumen LKPJ	4		2		1		1		1		33%	
						Jumlah Dokumen SPM	4		2		1		1		1		33%	
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pemekaran Kecamatan	5		2		2		2		2		33%	
						Jumlah Desa dan Kelurahan yang di mekarkan	20	325.000.000	2	26.520.900	2	9.235.680,00	2	0	2	0	33%	0%
						Jumlah Koordinas dan Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas	100		2		2		2		2		33%	
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan dan otonomi daerah yang dilakukan	48		10		-		-		-		0%	
						Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan	48	325.000.000	10	9.208.100	1	11.649.200,00	1	0	1	0	25%	0%
							48		6		1		1		1		25%	
						Jumlah Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah	48		10		1		1		1		25%	
4	**1**	**2**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**418.400.000**	**100%**	**9.763.380.800,00**	**100%**	**4.703.657.450,00**	**25%**	**15.511.500,00**	**25%**	**15.511.500,00**	**25%**	**0,33%**
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Pelaksanaan STQ, MTQ dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	1	18.400.000	1	9.756.370.800,00	4	4.701.657.450,00	1	15.511.500,00	1	15.511.500,00	25%	
						Jumlah Jemaah Haji yang di Fasilitasi	120		110		4		1		1		25%	0%

						Jumlah Kunjungan Safari Jum'at	48		12		4		1		1		25%	
						Jumlah Imam Desa/Kel. Dan Guru TK/TPA yang mendapatkan insentif	474		452		4		1		1		25%	
						Jumlah Pelaksanaan PHBI	2		2		4		1		1		25%	
						Jumlah Diklat dalam Bidang Keagamaan	6		6		4		1		1		25%	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan yang di Pelihara	21		21		4		1		1		25%	
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tratibum Linmas	16	325.000.000	1	7.010.000,00	4	1.000.000,00	1		1		25%	0%

4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tratibum Linmas	16	75.000.000	-	0	4	1.000.000,00	1		1		25%	0%
4	**1**	**2**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase tersusunnya Kebijakan Daerah**	**100%**	**3.400.000.000,00**	**100%**	**646.388.815**	**100%**	**276.995.000,00**	**25%**	**58.446.600,00**	**25%**	**58.446.600,00**	**25,08%**	**21,10%**
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2600	1.400.000.000,00	200	146.200.395	600	59.000.000,00	150	15.864.200,00	150	15.864.200,00	25%	27%
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang di tangani	6	1.000.000.000,00	3	309.275.420	2	152.995.000,00	1	37.852.900,00	1	37.852.900,00	50%	25%
						Jumlah Laporan yang ditangani	60		20		2		1		1		50%	
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2600	1.000.000.000,00	200	190.913.000	600	65.000.000,00	150	4.729.500,00	150	4.729.500,00	25%	7%
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase Terwujudnya Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**100%**	**200.000.000,00**	**100%**	**13.887.600**	**100%**	**16.483.190,00**	**25%**	**-**	**25%**	**-**	**25%**	**0,00%**

4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	22	140.000.000	2	8.847.800	6	12.303.190,00	2	-	2%	-	25%	0%
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	8	60.000.000	2	5.039.800	2	4.180.000,00	1	-	0	-	0%	0%
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rata-rata capaian Kegiatan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**1.090.000.000,00**	**93%**	**1.114.967.705,00**	**100%**	**301.718.000,00**	**15%%**	**11.548.404,00**	**15,09%**	**11.548.404,00**	**15,09%**	**4,04%**
4	**1**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100%**	**300.000.000,00**	**100%**	**847.494.567,00**	**100%**	**36.904.900,00**	**23%**	**5.629.800,00**	**23%**	**5.629.800,00**	**23,08%**	**15,25%**
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	16	90.000.000,00	16	10.714.500,00	4	15.172.900,00	1	4.189.400,00	1	4.189.400,00	25%	28%
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	28	125.000.000,00	28	234.915.642,00	7	10.948.000,00	2	-	2	-	29%	0%
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8	85.000.000,00	8	601.864.425,00	2	10.784.000,00	0	1.440.400,00	0	1.440.400,00	0%	13%

4	**1**	**3**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase rata - rata capaian output kegiatan Administrasi Pembangunan**	**100%**	**300.000.000,00**	**100%**	**63.428.700,00**		**65.000.000,00**	**0%**	**4.426.700,00**	**0%**	**4.426.700,00**	**0%**	**7,81%**
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	7	100.000.000,00	2	21.493.200,00	2	21.688.000,00	0	772.200,00	0	772.200,00	0	7%
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6	100.000.000,00	5	20.694.000,00	2	21.859.000,00	0	996.300,00	0	996.300,00	0	5%
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6	100.000.000,00	6	21.241.500,00	2	21.453.000,00	0	2.658.200,00	0	2.658.200,00	0	12%
4	**1**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa**	**100%**	**400.000.000,00**	**90,63%**	**110.665.441,00**	**100%**	**171.718.000,00**	**37%**	**0**	**37,28%**	**0**	**37,28%**	**0%**
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan yang di selesaikan	4	100.000.000,00	4	35.414.976,00	4	24.433.000,00	1	0	1	0	25%	0%
4	1	1	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	4	200.000.000,00	3	35.656.509,00	800	24.873.000,00	300	0	300	0	38%	0%
4	1	1	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	100.000.000,00	22	39.593.956,00	6	122.412.000,00	1	0	1	0	12%	0%

4	**1**	**3**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Tingkat Capaian Kebijakan terkait Sumber Daya Alam**	**100%**	**90.000.000,00**	**87,50%**	**93.378.997**	**100%**	**28.095.100,00**	**0%**	**1.491.904,00**	**0%**	**1.491.904,00**	**0%**	**23%**
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	8	40.000.000,00	5	73.310.900,00	2	6.497.100,00	0	1.491.900,00	0	1.491.900,00	0%	23%
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	8	25.000.000,00	8	9.885.200,00	2	10.798.000,00	0	2,00	0	2,00	0%	0%
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan energi dan air	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan energi dan air	8	25.000.000,00	8	10.182.897,00	2	10.800.000,00	0	2,00	0	2,00	0%	0%

Sumber : Laporan Monev Renja Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 untuk triwulan I yang terdiri dari 3 (tiga) program capaiannya di bawah target yang telah ditetapkan baik target kinerjanya maupun target keuangannya yaitu rata-rata kinerjanya 18 % dan pendanaannya 13,22%. Sebagai gambaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program yang capaian kinerja dibawah 25 % adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program perekonomian dan pembangunan yaitu 19%, dan 15,09%, hal ini dikarenakan belum teridentifikasinya kegiatan-kegiatan diawal tahun dan keterlambatan penerbitan pedoman/petunjuk teknis kegiatan atau adanya penundaan kegiatan akibat berbagai alasan yang juga bisa menghambat realisasi termasuk dalam penyusunan anggaran kas.
2. Program yang capaian kinerja sampai dengan 25% adalah program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yaitu capaiannya sebesaar 25,75%.
3. Program yang capaian realisasi capaian pendanaannya diatas 25% adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota hal ini dikarenakan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang didalamnya ada gaji pegawai yang realisasi setiap bulannya.

2.1.2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Sekretariat Daerah	3	21	71	11	21	87
Total		**3**	**21**	**71**	**11**	**21**	**87**

Sumber : Lapora Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 3, jumlah kegiatan 21, dan jumlah sub kegiatan 71, sedangkan jumlah indikator program sebanyak 3, jumlah indikator kegiatan sebanyak 21, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 71.

2.1.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiaan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 HinggaTriwulan I

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realiasasi s/d Triwulan I	Persentase	
		Rp	Rp	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Sekretariat Daerah	35.675.164.693,18	8.039.653.716,00	20,12%	22,54%
Total		**35.675.164.693,18**	**8.039.653.716,00**	**20,12%**	**22,54%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Triwulan I Setda 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun

2025 sebesar Rp.35,675.164.693,18. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar Rp.8.39.653.716,00 atau 20 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 20,12 persen. Kondisi ini menunjukkan capaian dari target 25,00 persen yang diharapkan pada triwulan I tidak tercapai dan Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah hingga triwulan I masih dalam kategori **Sangat Rendah**.

2.1.3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Sangat Rendah, Rendah dan Tinggi. Adapun capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-4
Evaluasi Capaian Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 - 20 %	>20 %		0 - 10%	>10-20 %	>20%		0 - 10%	>10-20 %	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Perangkat Daerah	3	0	2	1	21	6	9	6	71	34	18	19
Total		**3**	**0**	**2**	**1**	**21**	**6**	**9**	**6**	**71**	**34**	**18**	**19**

Sumber : Laporan Monev Triwulan I Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi Perubahan Renja Sekretariat Daerah dapat dikatakan Sangat Rendah Untuk Triwulan I Dari 3 program kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Takalar, 21 kegiatan dan 71 sub kegiatan realisasi kinerja dan pendanaannya masih Sangat Rendah yaitu :

1. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Sekretariat Daerah dengan menggunakan kategori tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa semua program yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah yaitu sebanyak 3 (tiga) program realisasinya masih tergolong kategori **sedang**, yakni 2 program masih di bawah 20% dan 1 program diatas 20% karena data yang digunakan adalah realisasi triwulan I.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Sekretariat Daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut

terdapat 6 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah, 9 kegiatan berada pada kategori sedang dan 6 kegiatan berada pada kategori tinggi..

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian pendanaan pada sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 71 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 34 sub kegiatan atau 47,88 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 18 sub kegiatan atau 25,35 persen dan hanya 19 sub kegiatan atau 26,76 persen dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab pada triwulan I.

2.1.3.2 Evaluasi Capaian Kinerja berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Sangat Rendah, Rendah dan Tinggi. Adapun capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-5
Evaluasi Capaian Kinerja berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10%	>10 - 20 %	>20 %		0 - 10%	>10 - 20 %	>20 %		0 - 10%	>10-20%	>20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Perangkat Daerah	3	0	2	1	21	4	5	12	71	27	9	35
Total		**3**	**0**	**2**	**1**	**21**	**4**	**5**	**12**	**71**	**27**	**9**	**35**

Sumber : Laporan Monev Triwulan I Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi Perubahan Renja Sekretariat Daerah dapat dikatakan masih Sangat Rendah Untuk Triwulan I. Dari 3 program kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Takalar, 21 kegiatan dan 71 sub kegiatan realisasi kinerja dan pendanaannya masih Sangat Rendah yaitu :

1. Evaluasi Capaian Kinerja pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Sekretariat Daerah dengan menggunakan kategori tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa semua program yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah yaitu sebanyak 3 (tiga) program realisasinya masih tergolong kategori

sedang, yakni di bawah 25% karena data yang digunakan adalah realisasi triwulan I.

2. Evaluasi Capaian Kinerja pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pada level kegiatan pada Sekretariat Daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 4 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I dalam kategori rendah, 5 kegiatan dalam kategori sedang dan 12 kegiatan dalam kategori tinggi.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masing perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 7 1 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 27 sub kegiatan atau 38,02 persen yang capaian kinerja masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi kinerja sedang terdapat 9 sub kegiatan atau 12,67 persen dan hanya 35 sub kegiatan atau 49,29 persen dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi kinerja lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Adapun kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dalam periode 5 tahun yang lalu, tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel II-6

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	*(2)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (73-75)	B (69,23)	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	70	75	78		76	77	
2	Nilai Sakip Daerah	B (>60-70)	B (64,05)	Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah	100	100	100	1,99	100	100	
3	Nilai Evaluasi LPPD	3,3	1,62	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah	15	15	20		16	22	
4	Indeks Inovasi Daerah	45	57,02	Nilai Sakip Daerah	70	72	75		73	77	
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	BAIK	CUKUP	Indeks Pelayanan Publik.	3,25	3,51	3,6		3,55	3,65	
6	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	70-80	82,39	Indeks Reformasi Hukum	60	62	63		63	65	
7	Indeks Reformasi Birokrasi Setda	BB (73-75)	-	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	65	70	75		72	77	

8	Nilai Sakip Setda	B (>60-70)	BB (71,00)	Tingkat Inflasi	1,19	1,18	1,17	0,38	1,15	1,14	
9				Return on Asset (ROA) BUMD	2,97	3,02	3,46		3,03	3,48	
10				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Sekretariat Daerah	73	75	78		76	79	
11				Tingkat Literasi Digital ASN pada Sekretariat Daerah	92	94	95		96	98	

Sumber : Lap. LKj Tahun 2024 dan Renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah untuk tahun 2024 dan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum mencapai target yaitu B sedangkan targetnya BB. Hal ini disebabkan Penilaian Indeks RB memiliki metode baru yaitu dengan penginputan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik, Kurangnya SDM dan anggaran pada Bagian Organisasi. Dan adapun faktor penentu keberhasilan adalah Pemahaman terkait Rencana Aksi RB General dan RB Tematik, dan kerja sama dengan Perangkat Daerah sebagai pelaksana Indikator perlu ditingkatkan.
2. Indikator Sakip Daerah capaiannya yaitu B. Penilaian SAKIP Daerah ini merupakan Capaian Indikator Kinerja dari Perangkat Daerah Kabupaten Takalar. Adapun faktor penentu keberhasilan adalah tiap Perangkat Daerah komitmen dalam manajemen kinerja.
3. Indikator Nilai Evaluasi LPPD belum mencapai target dari 3,30 sedangkan target yang dicapai untuk tahun 2024 adalah 1,62 disebabkan belum optimalnya pembinaan LPPD masih rendahnya kualitas laporan penyelenggaran pelaksanaan pemerintahan daerah.
4. Indikator Indeks Inovasi capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu target 45 sedangkan realisasi capaiannya 57,02 hal ini disebabkan adanya inovator-inovator mampu mengaktualisasikan karyanya untuk diikutkan dalam kompetisi, baik tinggal regional maupun tingkat Nasional.
5. Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa capaiannya lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dimana targetnya BAIK sedangkan capaiannya CUKUP hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang tersedia dan kualitas serta kuantitas aparatur penyedia barang dan jasa masih kurang.
6. Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal capaiannya lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 82,39 sedangkan targetnya 70-80.
7. Indikator Nilai SAKIP Setda capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu BB. Hasil evaluasi keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s/d 100 Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sebesar 71,00 dengan kategori predikat BB, Interprestasi Sangat Baik.
8. Indikator Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah untuk tahun 2025 masih 1,99 % untuk realisasi triwulan I dan juga dikarenakan masih tahun berjalan.
9. Indikator Tingkat Inflasi masih disekitaran angka 0,38 untuk triwulan pertama dan masih tahun berjalan.
10. Untuk indikator lainnya di tahun 2025 masih belum terukur karena masih tahun berjala.

Adanya perubahan IKU tahun 2023-2026 ke IKU tahun 2025-2029 didasari oleh adanya Visi Misi terbaru dari Bupati - Wakil Bupati Takalar periode 2025-2029, Visi: Takalar Maju dan berdaya saing melalui Ekonomi Digital sedangkan Misi ada 7, yakni :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
2. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik;
3. Membangun dan mengembangkan kemudahan akses Infrastruktur;
4. Memaksimalkan Sumber Daya Alam dan kelestarian lingkungan hidup;
5. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kreatif dan Inovatif;
6. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, seni dan Budaya;

7. Penguatan Sistem jaminan dan perlindungan sosial;

Dari hasil penjabaran Visi Misi Bupati diatas, di lingkup dan kewenangan Sekretariat Daerah kami turunkan Indikator Kinerja Utama(IKU) untuk periode 2025-2029 sebanyak 11 Indikator sedangkan di Dokumen Renstra Transisi Setda 2023-2026 IKU sebanyak 8 Indikator.

Dari Penjabaran IKU Setda, terdapat kesamaan Indikator di Periode 2023-2026 dengan Periode 2025-2029 yaitu: 1. Indeks Reformasi Birokrasi Daerah; 2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah; 3. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah; 4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa; sedangkan ada 7 Indikator IKU yang ditambahkan di Renstra 2025-2029 untuk mempertajam Visi dan 7 Misi Bupati-Wakil Bupati Takalar yaitu :

1. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Penajaman Misi 2 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik”;
2. Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah, Penajaman Misi 2 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik”;
3. Tingkat Inflasi Daerah, Penajaman Misi 5”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Inovatif”;
4. Return on Asset(ROA) BUMD, Penajaman Misi 5. “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Inovatif;
5. Tingkat Literasi Digital ASN pada Setda, Penajaman Misi 1. “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Unggul”;
6. Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Setda, Penajaman Misi5 “Memperkuat pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Inovatif”;
7. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Setda, Penajaman Misi 5 “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Inovatif”;

Capaian tingkat Inflasi Kabupaten Takalar pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,46. Nilai tersebut hasil penetapan dari Badan Pusat Statistik(BPS) melalui kota acuan IHK (Indeks Harga Konsumen), untuk Takalar acuan Kota IHK nya adalah Kota Makassar, perlu diketahui pula bahwa Target nilai Inflasi Kab.Takalar di Tahun 2025 ini sebesar 1,19 . target capaian ini didasari oleh kondisi tahun sebelumnya pada saat Indonesia mengalami Pemulihan Ekonomi Nasional, dari kondisi tersebut dengan capaian TW.I sebesar 0,46 dengan target pencapaian Tahun ini sebesar 1,19 tentunya perlu dilakukan upaya upaya dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok komoditas oleh Pemerintah Kabupaten Takalar karena Range Kondisi nilai Inflasi Kabupaten yang Normal/stabil di Nilai Inflasi 1 – 3 (wajar),

Capaian inflasi Kabupaten Takalar di Triwulan I sebesar 0,46 menggambarkan Kondisi Takalar sedang DEFLASI, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan anjloknya Harga Komoditas (Beras, Jagung, Cabe) hal ini disebabkan pada Bulan Maret 2025 ini melimpahnya stok Komoditas ***Beras*** di Kabupaten Takalar karena masuk masa Panen raya.

Capaian Inflasi di Triwulan II sebesar 2,16 hal ini menggambarkan kondisi takalar masih dalam kategori Wajar/Normal meskipun melampaui target di Tahun ini, Upaya Upaya yg perlu dilakukan untuk kembali ke posisi Target Tahunan antara lain perlu dilakukan Operasi pasar secara berkelanjutan; gerakan pangan murah di beberapa lokasi rawan kenaikan harga komoditas karena issu yang berkembang di TW.II ini adanya Kenaikan Harga Komoditas ***Ayam*** dalam wilayah Takalar.

Capaian Realisasi PAD dari Sektor Pajak yang dikelola oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 ada 2(dua) jenis, yaitu Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Gedung-gedung/Villa/pesanggrahan dan Lain-lain PAD yang sah (Tuntutan Ganti Rugi; Pengembalian Dana Hibah dst..)

Capaian PAD pada TW.I ini sebesar Rp 49.799.509,35 sedangkan target PAD Tahun 2025 sebesar Rp 2.605.150.000,- atau tingkat pencapaiannya sebesar 1,912%. Hal ini masih jauh dari target yang dibebankan sehingga perlu dilakukan upaya upaya dalam 3(tiga) Triwulan kedepan untuk bisa mencapai target PAD secara keseluruhan.

Nilai Realisasi sebesar Rp 49.799.509,35 pada TW.I Tahun 2025 ini bersumber dari setoran PAD sektor “Lain-lain PAD yang sah” yaitu Jenis Tuntutan Ganti Rugi dan lebih spesifik lagi ke Tindaklanjut Temuan BPK/Inspektorat Kabupaten dari Jenis Belanja Perjalanan Dinas Pegawai

untuk Indikator Kinerja Nilai Evaluasi LPPD; Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal sudah tidak lagi menjadi IKU di Tahun 2025-2029 dengan pertimbangan bahwa indikator indikator tersebut diturunkan ke Indikator Program

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasioonla menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui misi dan program yang terencana, diharapkan indonesia dapat mencapai visi yang telah ditetapkan dan menghadapi tantangan di masa depan. Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjng Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional Pada RKP 2025

Tema Pembangunan Nasional pada RKP tahun 2025 adalah " ***Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***" Tema ini difokuskan pada penguatan fondasi transformasi dan menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan diseluruh Indonesia. RKP 2025 juga menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun Rencana Kerja Kementrian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3.1.2 Sasaran Pembangunan Pada RKP tahun 2025

Sasaran pembangunan pada RKP tahun 2025 mencakup berbagai indikator yang berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa sasaran pembangunan yang diharapkan tercapai pada tahun 2025 adalah pertumbuhan ekonomi, menunrunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, Indeks Modal Manusia, dan penurunan intesitas emisi gas rumah kaca.

3.1.2.1 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Pada RKP tahun 2025 prioritas Nasional menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang berkualitas, dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Prioritas nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita. Dan Asta Cita yang terkait dengan urusan pemerintahan adalah Asta Cita 2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enenrgi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru, Asta Cita 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, Asta Cita 8 yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkunga, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 mengalami perubahan setelah disesuikan dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan Inmen Nomor 2 Tahun 2025 merekomendasikan agar Perangkat Daerah cukup memiliki 1 (satu) tujuan dengan mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah saat ini. Sehingga Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran pada Rancangan Awal Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Adapun rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Rumusan tujuan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 -2029 adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

3.2.2 Sasaran

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan focus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD. Adapun sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
2. Meningkatnya tata kelola kinerja pada Sekretariat Daerah .
3. Meningkatnya Retribusi Pelayana Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Lain-Lain PAD yang Sah pada Sekretariat Daerah.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 seperti terdapat dalam Rancangan Renstra 2025-2029 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel III- 1
Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	BB (76-78	T1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	70
Sasaran 1-1: Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan	Nilai SAKIP Daerah	BB (71-80)	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Nilai SAKIP Daerah	65
	Nilai Evaluasi LPPD	3,40		Indeks Pelayanan Publik	3,01
	Indeks Inovasi Daerah	50		Indeks Reformasi Hukum	57
Sasaran 1-2: Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	BAIK		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60
	Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal	80-90		Tingkat Inflasi	1,2

Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola pada Sekretariat Daerah Sasaran 2-1: Meningkatnya Tata Kelola	Indeks Reformasi Birokrasi Setda	BB (76-78)		Return On Asset (ROA) BUMD (%)	2,06
	Nilai SAKIP Setda	BB (71-80)	S.2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa Dan Lain-Lain PAD yang Sah	Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah (%)	100
				Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah	10
			S.3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Pada Sekretariat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Sekretariat Daerah	72
				Tingkat LIterasi Digital ASN	90

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan masing Perangkat Daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan disertai pagunya. Sekretariat Daerah diharapkan mampu berkontribusi dalam pencapaian misi ke-2 RPJMD periode 2025-2029 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik", misi ke-5 yaitu Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital dan misi ke-6 yaitu Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolah ragaan, dan pemajuan kebudayaan. Selain itu Sekretariat Daerah juga menjadi salah SKPD yang berperan dalam pencapaian misi ke-5 yaitu "Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital" dimana Sekretariat Daerah diwajibkan mampu mengelola Perusda dengan baik dan akuntabel, sehingga mampu berkontribusi untuk peningkatan PAD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel IV-1 sebaik berikut :

Tabel IV.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

N0	Program	Kegiaran	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Keg. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp 39.405.160
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Keg. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Rp 5.157.027.190

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2025 Sekreariat Daerah Kabupaten Takalar terdiri atas 3 Program, 21 kegiatan dan 72 sub kegiatan dengan jumlah dana pagu indikatif adalah sebesar **Rp.49.227.486.570,00** ***(Empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)*** dengan sumber dana berasal dari APBD-P. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel IV-2 berikut:

Tabel IV-2
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
						Sekretariat Daerah							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00				29.323.447.109,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00				29.323.447.109,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00				29.323.447.109,00	
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.807.571.459,00	31.229.601.768,00	43.273.861.980,00				22.433.447.109,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00				80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	18.000.000,00	16.240.110,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	11.000.000,00	10.999.670,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	11.000.000,00	10.999.670,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	10.000.000,00	6.775.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		17.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.871.559.353,00	12.748.655.806,86	12.748.655.806,86				15.918.623.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1708 Orang/bulan	1708 Orang/bulan	10.865.649.323,00	12.392.745.776,86	12.472.700.330,45	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		15.721.123.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	10.000.000,00	8.470.070,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	910.030,00	278.910.030,00	243.599.170,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.000.000,00	34.000.000,00	30.864.670,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	11.000.000,00	8.795.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	11.000.000,00	8.780.090,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	153.817.000,00	153.817.000,00				105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	31.000.000,00	27.249.220,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	29.817.000,00	23.516.580,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	93.000.000,00	88.018.890,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00				2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														

							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	55.000.000,00	44.177.250,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.100.000,00	122.981.670,00	122.981.670,00				92.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				4 Unit	4 Unit	4.300.000,00	42.349.570,00	34.107.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	4.300.000,00	80.132.100,00	50.227.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	500.000,00	500.000,00	80.050.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		22.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	21.133.000,00	1.259.508.688,00	1.259.508.688,00				885.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	2.000.000,00	52.003.300,00	52.003.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.293.000,00	90.005.388,00	174.985.388,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.100.000,00	56.070.000,00	105.063.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.150.000,00	854.880.000,00	2.144.570.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.590.000,00	205.550.000,00	305.550.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	8.857.000,00	2.685.047.109,00	2.685.047.109,00				210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	19.000,00	586.715.000,00	2.331.696.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	4.838.000,00	369.212.000,00	389.956.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	4.000.000,00	1.729.120.109,00	1.628.409.209,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	2.151.922.106,00	2.438.358.692,00	2.438.358.692,00				1.652.323.209,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.300.000,00	118.241.420,00	71.345.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	832.922.106,00	185.998.272,00	185.998.272,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)		1.062.323.209,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	751.419.000,00	2.245.183.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.313.700.000,00	1.382.700.000,00	1.704.700.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	6.764.267.802,14	6.764.267.802,14				1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	1.000.000,00	4.479.207.000,00	4.668.846.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	1.000.000,00	158.480.000,00	158.170.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				92 Unit	92 Unit	1.000.000,00	2.126.580.802,14	7.940.710.960,55	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	-	852.000.000,00	1.001.965.000,00	1.001.965.000,00				850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	151.965.000,00	402.547.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		12.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah		12.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	-	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00				837.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.281.240.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.241.240.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		287.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah													
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	750.000.000,00	759.557.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00				29.323.447.109,00	
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00				29.323.447.109,00	
2	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.807.571.459,00	31.229.601.768,00	43.273.861.980,00				22.433.447.109,00	
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	-	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00				837.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00				29.323.447.109,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00				29.323.447.109,00	
3	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.807.571.459,00	31.229.601.768,00	43.273.861.980,00				22.433.447.109,00	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00				300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	4 Dokumen	12.067.000,00	12.067.000,00	8.340.320,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	22.733.000,00	22.733.000,00	16.720.670,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	15.298.000,00	15.298.000,00	10.236.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	14.902.000,00	14.902.000,00	11.000.170,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	-	65.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00				500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	75.000.000,00	309.659.970,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	14.997.400,00	14.997.400,00	9.169.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														

							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	25.002.600,00	25.002.600,00	69.392.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	4.525.926.750,00	4.539.657.450,00	5.540.943.620,00				5.900.000.000,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	-	48.516.810,00	48.516.810,00	48.516.810,00				250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	24.248.430,00	27.631.930,00	79.883.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				6 Dokumen	6 Dokumen	12.619.180,00	9.235.680,00	45.046.370,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11.649.200,00	11.649.200,00	35.406.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	-	4.189.046.000,00	4.259.657.450,00	4.259.657.450,00				4.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	4.187.046.000,00	4.257.657.450,00	5.157.027.190,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		4.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	652.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	652.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	-	271.880.750,00	215.000.000,00	215.000.000,00				850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													

							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				600 Dokumen	600 Dokumen	104.074.100,00	59.000.000,00	34.397.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	102.806.650,00	91.000.000,00	125.512.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				600 Dokumen	600 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	39.331.260,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	-	16.483.190,00	16.483.190,00	16.483.190,00				50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				6 Dokumen	6 Dokumen	12.303.190,00	12.303.190,00	20.061.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama													
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	2 Laporan	4.180.000,00	4.180.000,00	2.974.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
5	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	195.000.000,00	301.718.000,00	412.680.970,00				990.000.000,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	-	32.626.000,00	32.626.000,00	32.626.000,00				250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.894.000,00	10.894.000,00	39.405.160,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian															
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	10.948.000,00	10.948.000,00	163.870.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil															
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	2 Dokumen	10.784.000,00	10.784.000,00	6.934.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00				300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	21.688.000,00	21.688.000,00	12.789.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan															
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	21.859.000,00	21.859.000,00	13.308.350,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan															
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	21.453.000,00	21.453.000,00	14.471.630,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	-	65.000.000,00	171.718.000,00	171.718.000,00				350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	4 Dokumen	21.633.000,00	24.433.000,00	14.646.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				800 Dokumen	800 Dokumen	22.073.000,00	24.873.000,00	13.319.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				6 Orang	6 Orang	21.294.000,00	122.412.000,00	109.578.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	-	32.374.000,00	32.374.000,00	32.374.000,00				90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	2 Dokumen	10.776.000,00	10.776.000,00	6.017.340,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen	2 Dokumen	10.798.000,00	10.798.000,00	9.024.370,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	9.316.320,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
												J U M L A H	**22.528.498.209,00**	**36.070.977.218,00**	**49.227.486.570,00**				**29.323.447.109,00**	

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pada RKPD adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota mengalami perubahan anggaran RKPD dari Rp.22.528.498.209,00 menjadi Rp.49.227.486.570,00
2. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran yaitu administrasi umum perangkat daerah dari Rp. 21.133.000,00 menjadi 1.259.508.688,00, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari Rp. 2.151.922.106,00 menjadi Rp. 2.438.358.692,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari Rp. 1.000.000,00 menjadi Rp. 4.668.846.500,00
3. Sub Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari Rp.1.293.000,00 menjadi Rp.174.985.388,00, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan darp Rp.8.100.000,00 menjadi Rp.105.063.400,00, Fasilitasi Kunjungan Tamu dari Rp.3.150.000,00 menjadi Rp.2.144.570.000,00 dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari Rp.1.000.000,00 menjadi Rp.7.940.710.960,55

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2025 merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 tidak terlepas dari Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar 2025-2029. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah yang diemban Sekretariat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif, kegiatan dan sub kegiatan Sekretarit Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Takalar, Juni 2025

Sekretaris Daerah,

DR. MUHAMMAD HASBI, S.STP., M.AP., .I.Kom
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19810112 200012 1 001

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 tidak terlepas dari Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Serta peningkatan perencanaan pembangunan dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun2025.

Takalar, Juni 2025

KEPALA DINAS

SITTI NI'MAH, SE

Pangkat :Pembina Utama Muda

NIP. 19650831 199203 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.3.1 Maksud 9
1.3.2 Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II EVALUASI PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2024 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD Sampai Dengan Triwulan I 7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 22
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun2025 22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 34
4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 34
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun2025 34
BAB V PENUTUP 80

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Diskopukmnakertrans Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Diskopkmnakertrans Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Diskopukmnakertrans dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Diskopkmnakertrans Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P)

melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahn Deerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Takalar Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah selaras dengan maksud dan tujuan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan TransmigrasiTahun 2023-2026 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program/kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Takalar Tahun 2023-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

a) Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024;
b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP) Tahun 2024;
c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan danberkelanjutan;

Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTakalar..

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIWULAN I
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan I
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (IKU dan SPM)
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah
4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja PD

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sampai dengan Triwulan I

Dinas koperasi,Usaha Kecil Menengah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan SKPD hasil dari perubahan SKPD sesuai Perbup. Nomor 32 Tahun 2023 dimana sebelumnya merupakan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan,Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 3 urusan,yaitu urusan Koperasi dan UKM,urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,Tahun Anggaran 2025 Dinas koperasi,Usaha Kecil Menengah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar merencanakan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu urusan Penunjang terdiri dari 1 Program,6 Kegiatan,17 Sub Kegiatan.Unsur Perkoperasian dan UKM terdiri dari 3 Program,3 Kegiatan,6 Sub Kegiatan,Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 2 Program,2 Kegiatan,2 Sub Kegiatan,Urusan Transmigrasi terdiri dari 1 Program,1 Kegiatan,1 Sub Kegiatan,dengan alokasi anggaran sebesarRp. 7.227.438.068,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah) atau meningkat dari Rp. 7.145.906.015,00 (Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Belas rupiah)

Secara Keseluruhan Capaian fisik Program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten takalar mencapai 3,31% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 16,28% .Capaian realisasi keuangan tersebut termasuk Kategori Sedang dari target capaian pada akhir triwulan I 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan masih belum mencapai target,dikarenakan sebagian besar anggaran kas untuk belanja langsung direncanakan realisasi mulai triwulan II. Hal ini mengakibatkan adanya program dan kegiatan belum dilaksanakan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja PD Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) sesuai urusan PD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel II-1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Periode Pelaksanaan: s/d Triwulan I Tahun 2025

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun2025) yang Dievaluasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
02	17				Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Tenaga Kerja dan Transmigrasi				7,227,438,068		1,176,328,411		
02	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	6,337,438,068	17	2,764,210,354	15,73	18.50
02	07	01	2.01		Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	25.526.720	25	6.886.100	25	26,98

02	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.006.500	1	3.992.500	33,33	99,65
02	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.073,620	0	0	0	0
02	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.998.000	0	0	0	0
02	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.300	0	0	0	0
02	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.990.300	0	0	0	0
02	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	2.998.000	1	2.893.600	100	96,52
02	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	3.460.000	1	0	25	0
02	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	**6,179.822.348**	12,15	**1.152.413.811**	12,15	18,65
02	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Dokumen	1692	6.159.338.068	208	1.146.228.191	25	26
02	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	18.484.280	3	4.186.800	25	23
02	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	1.998.820	100	100
02	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0
02	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	**7.025.000**	50	**2,240,000**	50	6

02	07	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.025.000	1	397.500	50	6
02	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	**39.531.000**	11,76	**4.014.600**	11,76	10,16
02	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	2	3.664.000	1	1.134.600	50	31
02	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	32	35.887.000	3	2.880.000	9	8
02	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	Persen	100	**9.525.000**	0	**0**	0	0
02	07	01	2.06	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	10	9.525.000	0	0	0	0
02	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	**53.100.000**	4,17	**8.400.000**	4,17	15,82
02	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	60	2.700.000	0	0	0	0
02	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	60	50,400,000	3	8.400.000	5	17
02	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	**22.908.000**	0	**0**	0	0
02	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	20.958.000	0	0	0	0
02	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dokumen	4	1.950.000	0	0	0	0
02	07	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Wilayah Kab./Kota	Persen	100	**15.000.000**	25	**4.214.400**	25	28

02	07	03	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan bagi Pengelola Koperasi	Persen	100	**15.000.000**	25	**4.214.400**	25	28
02	07	03	2.01	04	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	100	15.000.000	25	4.214.400	25	28
02	07	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Persen	100	**111.500.000**	0	**0**	0	0
02	07	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persen	100	**111.500.000**	**0**	**0**	0	0
02	07	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif,Bernilai Tambah,Memiliki Akses Pasar,Akses Pembiayaan,Penguatan Kelembagaan,Penataan Manajemen,Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	UKM	18.250	7.500.000	0	0	0	0
02	07	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	UKM	100	104.000.000	0	0	0	0
02	07	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang diundang dalam Pertemuan dalam rangka Peningkatan Kapasitas UMKM	Persen	100	**566.000.000**	0	**0**	0	0
02	07	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persen	100	**566.000.000**	0	**0**	0	0
02	07	08	2.01	02	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Skala Usahanya	UKM	100	200.000.000	0	0	0	0

02	07	08	2.01	03	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Skala Usahanya	UKM	50	266,000,000	0	0	0	0
02	07	08	2.01	06	Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	UKM	100	100.000.000	0	0	0	0
03	07	03			Program Pelatihan Kerja dan ProduktItas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Berkualitas dan Terampil	Persen	100	**57.500.000**	0	**0**	0	0
03	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persen	100	**57.500.000**	0	**0**	0	0
03	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat PelatihanBerbasis Klaster Kompetensi	Paket	6	57.500.000	0	0	0	0
03	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen	100	**125.000.000**	0	0	0	0
03	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daearah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang Dilayani	Persen	100	**125.000.000**	0	0	0	0
03	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilayani	Dokumen	4	125.000.000	0	0	0	0
03	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	Persen	100	**15.000.000**	0	**0**	0	0
03	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persen	100	**15.000.000**	0	**0**	0	0
03	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi dan Kelembagaannya	Paket	1	15.000.000	0	0	0	0

Sumber Data : Data Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar adalah Penjabaran Rencana Kerja Tahunan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Pelaksana Teknis Urusan Perkoperasian,UKM,Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Terkait dengan hal tersebut,Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar pada Tahun 2025

Anggaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp.7.227.438.068 dengan capaian realisasi fisik sebesar 3,31 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.176.326.411,- atau 16,28 %

Pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 capaian kinerja secara kumulatif sebesar 3,31%,dimana capaian kinerja masih belum mencapai target.

Untuk tahun 2025,berdasarkan progress hingga akhir triwulan I 2025,Capaian Kinerja tercapai 3,31%,Capaian anggaran tercapai 16,28%,yang didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan ASN.

Pencapaian target kinerja akan ditunjang oleh Perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran kas serta kesiapan sumberdaya manusia dalam pelaksanaannya,akan tetapi di sisi lain kegiatan tidak mencapai target,hal ini disebabkan karena adanya mayoritas Kegiatan belum dilaksanakan karena belum ada kesesuaian dengan anggaran kas yang telah ditetapkan sebelumnya/jadwal pencairan belum tercapai

Implikasi yang timbul dari capaian realisasi renja terhadap capaian renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah terwujudnya progres yang sesuai dengan target tahunan yang direncanakan dalam renstra.

Walaupun secara kumulatif,capaian belum sesuai target,diharapkan pad akhir tahun anggaran akan mencapai target yang telah ditetapkan,walau pun demikian tetap diperlukan perencanaan anggaran serta penyiapan sumberdaya yang kompeten.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi .Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja dan pencapaian renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan tahun berjalan .

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	13	27	7	13	29
TOTAL		**7**	**13**	**27**	**7**	**13**	**29**

Sumber data : Monev TW I Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan Informasi tentang Jumlah Program,Kegiatan,SubKegiatan pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2025,dimana terdapat 7 Program,13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan Jumlah Indikator yang terdiri dari 8 Indikator Program,13 Indikator Kegiatan,serta 29 Indikator Sub Kegiatan.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7,227,438,068	1,176,328,411	3,31	16,28
TOTAL		**7,227,438,068**	**1,176,328,411**	**3,31**	**16,28**

Sumbe data : Monev TW I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada tahun anggaran 2025, pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi kab.Takalar dianggarkan sebesar Rp. 7,227,438,068,hingga akhir Triwulan I terealisasi sebesar Rp. 1,176,328,411 dengan capaian Kinerja 3,31 Persen serta capaian anggaran 16,28 persen,realisasi anggaran mayoritas dari belanja pegawai,berupa gaji dan tunjangan

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hingga akhir Triwulan I,dari total anggaran sebesar Rp. 7,227,438,068,terealisasi sebesar Rp. 1,176,328,411 atau 16,28 persen serta capaian kinerja sebesar 3,31 persen,atau dapat dikatakan bahwa pada akhir Triwulan I,capaian kinerja pendanaan tergolong **sedang** (≤20%) Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I

adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 7 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 5 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program (realisasi >10 - 20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 1 program (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dijelaskan bahwa terdapat 13 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 8 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwulan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang (>10 – 20) yang berada dalam kategori sedang sebanyak 2 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 3 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 27 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 19 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori sedang,terdapat 1 sub kegiatan, dan 7 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	5	1	1	13	8	2	3	27	19	1	7
TOTAL		**7**	**5**	**1**	**1**	**13**	8	2	3	**27**	**19**	**1**	**7**

Sumber Data : Capaian Monev. Triwulan I 2025

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hingga akhir Triwulan I,dari total anggaran sebesar Rp. 7,227,438,068,terealisasi sebesar Rp. 1,176,328,411 atau 16,28 persen serta capaian kinerja sebesar 3,31 persen,atau dapat dikatakan bahwa pada akhir Triwulan I,capaian kinerja pendanaan tergolong **rendah** (≤10%) Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi kinerja pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada level program pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 7 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 5 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program (realisasi >10 - 20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 1 program (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pada level kegiatan pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dijelaskan bahwa terdapat 13 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 8 kegiatan yang realisasi kinerja hingga triwulan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang (>10 – 20) yang berada dalam kategori sedang sebanyak 2 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 3 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 27 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 19 sub kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori sedang, tidak terdapat sub kegiatan dan 8 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi kinerjanya tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi kinerja lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Uraian capaian kinerja dapat dilihat pada table II-5 berikut :

Tabel II-5

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	5	1	1	13	8	2	3	27	19	0	8
TOTAL		**7**	**5**	**1**	**1**	**13**	**8**	**2**	**3**	**27**	**19**	**0**	**8**

Sumber Data : Capaian Monev. Triwulan I 202

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD (IKU)

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Tabel II-6

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Tw. I	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase koperasi Aktif	75%	11,91 %	Persentase koperasi yang berkualitas	*20,38 %*	*22,42 %*	*24,66 %*	-	*22,42 %*	*24,66 %*	
2	Jumlah Usaha Mikro yang mencapai Peningkatan Volume dan Aset Usaha	37.405	3.233	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	25%	50%	75%		50%	75%	
3	Jumlah Usaha Mikro Baru	37.405	1.163	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja	*65%*	*70%*	*70%*		*70%*	*70%*	
4	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	50.326.914	50.326.914	Persentase Peningkatan UMKM dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	3,14 %	3,24 %	3,34 %		3,24 %	3,34 %	
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100%	0,09%	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	22,42%	24,66%	27,12%		24,66%	27,12%	
6	Persentase Tenaga Kerja Ditempatkan	80%	4,24%	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	52.975.699	55.623.433	58.404.605		55.623.433	58.404.605	
7	Persentase Masyarakat	48,2	48,2								

	Transmigran yang Hidup Mandiri	%	%									
8	Nilai Sakip Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BB	BB	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	*70,1(BB)*	*70,5(BB)*	*71(BB)*		*70,5(BB)*	*71(BB)*		
				Persentase literasi digital pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	*100 %*	*100 %*	*100 %*		*100 %*	*100 %*		

Sumber Data : Capaian Monev. Tw I 2025

Berdasarkan table II-6 diatas,dapat diuraikan sebagaiberikut :

A. Target dan Capaian masing-masing Indikator Tahun 2024 :

1. Persentase Koperasi Aktif

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 75%,dari target tersebut hingga akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 11%,besaran capaian ini merupakan jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan untuk tahun buku 2024,yaitu sebanyak 28 Koperasi dari jumlah keseluruhan koperasi di lingkup Kabupaten Takalar sebanyak 257 unit Koperasi,adapun target tidak tercapai karena tingkat kesadaran berkoperasi masyarakat yang masih harus ditingkatkan,selain factor ekonomi secara makro yang kurang kondusif,dari kondisi capaian yang masih rendah,akan diupayakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesadaran kesadaran berkoperasi.

2. Jumlah Usaha Mikro yang mencapai Peningkatan Volume dan Aset Usaha

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 37.405 UKM atau 100%,dari target tersebut hingga akhir tahun 2024 terealisasi sebanyak 3233 atau 8,43%,besaran capaian ini merupakan jumlah UKM skala Mikro yang meningkat jumlah asset dan usaha terealisasi dari jumlah keseluruhan sebanyak 37.405 UKM kurangnya pencapaian target tersebut disebabkan situasi perekonomian yang kurang kondusif.

3. Jumlah Usaha Mikro Baru

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%,dari target tersebut hingga akhir tahun 2024 terealisasi sebanyak 1163 usaha mikro atau 3,11%,besaran capaian ini merupakan jumlah UKM skala Mikro yang memiliki legalitas berupa Nomor Induk Berusaha sebanyak 1163 UKM atau 3,11% yang merupakan realisasi dari jumlah keseluruhan sebanyak 37.405 UKM,kurangnya pencapaian target tersebut disebabkan situasi perekonomian yang kurang kondusif.

4. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%,dari target tersebut hingga akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 0,09%,besaran capaian ini merupakan jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2024 sebanyak 135 orang dari jumlah keseluruhan tenaga kerja

sebanyak 147.857 orang,masih rendahnya pencapaian target tersebut disebabkan kurangnya dukungan anggaran pelaksanaan pada tahun anggaran 2024,olehnya pada tahun anggaran berikutnya akan diupayakan kecukupan anggaran.

5. Persentase Tenaga Kerja Ditempatkan

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%,dari target tersebut hingga akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 4,24%,besaran capaian ini merupakan jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2024 sebanyak 15 orang dari jumlah keseluruhan tenaga kerja sebanyak 354 yang terdaftar,masih rendahnya pencapaian target tersebut disebabkan kurangnya daya serap dunia usaha terkait kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi baik pencari kerja maupun tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan,olehnya pada tahun anggaran berikutnya akan diupayakan kecukupan anggaran pelatihan berbasis kompetensi pada lingkup Dinas maupun upaya kerjasama dengan lembaga pelatihan lainnya serta upaya keikutsertaan pada kegiatan-kegiatan terkait peluang kerja,misalnya job fair.

6. Persentase Transmigran Kelembagaan untuk Hidup Mandiri

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 48,2%,dari target tersebut hingga akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 48,2% atau 100% dari target,besaran capaian ini merupakan jumlah transmigran yang dibina pada 1 Satuan Permukiman transmigrasi yang berlokasi di UPT. Tanakeke

7. Nilai Sakip Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2024 adalah predikat BB,dari target tersebut pada tahun 2024 Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapatkan predikat BB atau 100% dari target.

B. Target dan Capaian masing-masing Indikator Tahun 2025 :

1. Persentase Koperasi yang Berkualitas

   Kualitas koperasi salah satunya diukur dari pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi. Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 20,30%. Namun, hingga triwulan I Tahun 2025, capaian indicator ini masih belum dapat diukur, karena belum ada koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

2. Persentase UMKM yang Terdigitalisasi

   Perkembangan teknologi informasi yang begitu massif saat ini, menjadikan hal tersebut sebagai kebutuhan dan tolak ukur kemajuan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek diharapkan dapat mempermudah aktivitas dengan biaya yang relative murah. Begitu pula pemanfaatannya pada sector Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dimana digitalisasi dapat dilakukan pada setiap transaksi jual beli dan aktivitas pemasaran misalnya melalui marketplace. Sehingga untuk mengukur seberapa maju UMKM, dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi (digitalisasi) dalam setiap aktivitas UMKM tersebut. Untuk indicator ini, target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 25% atau sebanyak 9.351 UMKM dari total 37.405 UMKM yang terdaftar hingga akhir tahun 2024.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

   Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPD) Takalar pada Buku Takalar Dalam Angka Tahun 2025, bahwa pada tahun 2024, dari 238.637 jiwa penduduk usia kerja di Kabupaten Takalar, 153.763 jiwa merupakan angkatan kerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Takalar sebesar 64,43 persen, dengan rincian 147.857 jiwa (96,16 persen) dengan status bekerja dan 5.906 jiwa (3,84 persen) merupakan pengangguran terbuka. Sedangkan untuk target capaian yang diharapkan dari indicator ini pada tahun 2025 adalah sebesar **65%**

4. Persentase Peningkatan UMKM dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil

   Usaha mikro adalah usaha dengan aset hingga Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan omzet tahunan hingga Rp.300.000.000,-,persentase peningkatan UMKM adalah persentase peningkatan Usaha mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil,adapun usaha kecil adalah suatu unit usaha perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan,yang memiliki aset antara Rp.50.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- diluar tanah dan bangunan serta memiliki omzet tahunan antara Rp.300.000.000,- hingga Rp.2.500.000.000,- Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 3,14%,dari 37.405 usaha yang ada di lingkup Kabupaten Takalar,dari target tersebut hingga akhir triwulan I tahun 2025 realisasi belum dapat diukur, disebabkan kegiatan yang terkait dengan indicator ini belum terlaksana karena menyesuaikan dengan rencana kas yang telah ditetapkan sebelumnya,pada akhir tahun diharapkan capaian akan 100%

5. Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas

   Koperasi adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya Koperasi berkualitas adalah yang terkelola dengan baik,yang salah satu indikatornya adalah yang secara rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan,persentase peningkatan koperasi yang berkualitas adalah rasio peningkatan jumlah koperasi berkualitas dari tahun ke tahun, Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 22,42% dari keseluruhan Koperasi sebanyak 368 unit koperasi,dari target tersebut hingga akhir triwulan I tahun 2025 realisasi masih belum dapat diukur, disebabkan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan sebagai tolok ukur koperasi berkualitas,belum terlaksana.

6. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

   Produktifitas tenaga kerja adalah rata-rata nilai PDRB yang dihasilkan seorang tenaga kerja, tingkat produktifitas tenaga adalah besaran nilai dalam satuan rupiah atau jumlah unit output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja dalam satuan waktu tertentu,Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.52.975.699.(per Tenaga Kerja/Tahun),dari target tersebut hingga akhir triwulan I tahun 2025 realisasi belum diukur,belum mencapai target disebabkan kegiatan yang terkait indicator ini belum terlaksana hingga akhir triwulan I 2025,pada akhir tahun diharapkan capaian akan 100%

7. Nilai Sakip Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

   Nilai Sakip adalah nilai hasil evaluasi kinerja suatu perangkat daerah,yang diukur oleh Inspektorat Daerah yang menunjukkan sejauh mana capaian kinerja suatu perangkat daerah dalam satu tahun anggaran,Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah 70,1 (BB),dari target tersebut pada tahun 2025 Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan memperoleh predikat BB (70)

8. Persentase literasi digital pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

   Target capaian yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 100%,dari target tersebut hingga akhir triwulan I tahun 2025 realisasi belum dapat diukur,besaran capaian merupakan rata-rata kemampuan tiap aparatur di lingkup Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengakses produk-produk digital

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.1. Telaahan Terhadap RPJMN

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk

menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai berikut:

a. Tujuan

T1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM, meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan pengelolaan wilayah transmigrasi

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya pertumbuhan UMKM dari Usaha mikro menjadi usaha kecil
b. Meningkatnya kualitas layanan koperasi
c. Meningkanya kualitas tenaga kerja
d. Meningkatnya tata kelola kinerja pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 (Pokok dan Perubahan)

RENJA POKOK TAHUN 2025(Renstra PD 2023-2026)			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025(Renstra 2025-2029)		
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
T4.Meningkatnya tata kelola Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	T1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM, meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan pengelolaan wilayah transmigrasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	20,30%
S1.Meningkatnya tata kelola Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Sakip Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BB		Persentase UMKM yang terdigitalisasi	25%
T1.Meningkatnya kualitas koperasi dan produktifitas UKM	Persentase koperasi yang berkualitas	17%		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64%
	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	0,015%	S1.Meningkatnya pertumbuhan UMKM dari Usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase peningkatan UMKM dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	3,14%
S1.Meningkatnya keaktifan koperasi	Persentase koperasi aktif	75%	S2. Meningkatnya kualitas layanan koperasi	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas	22,42%

S2.Meningkatnya volume usaha dan asset usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang mencapai peningkatan volume & asset usaha	150	S3. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	52.975.699
	Jumlah usaha mikro baru	32,463	S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat Pada Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70,1 (BB)
T2.Peningkatan kesempatan kerja	Tingkat produktifitas tenaga kerja	23%		Tingkat Capaian Literasi Digital ASN pada Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%
S1.Berkurangnya masyarakat pengangguran	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	100%			
	Persentase tenaga kerja ditempatkan	85%			

T3.Peningkatan masyarakat transmigrasi yang mandiri	Persentase masyarakat transmigran yang mampu hidup mandiri	0,05%			
S1.Meningkatnya kualitas pembinaan transmigran	Persentase kelembagaan transmigrasi untuk hidup mandiri	48,2%			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital dan Prioritas Daerah – 2 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan,industrialisasi agromaritim,serta hilirisasi pertanian yang didukung BUMD,BUMDes,UKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	47.090.700
2	PROGRAM PENEMPATAN	Pelayanan antar Kerja di Daerah	Pelayanan antar Kerja	69.936.070

	TENAGA KERJA	Kabupaten/Kota		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.006.500
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.623.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.827.900
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.896.200
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.886.200
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.998.000
			Evaluasi Kinerja	3.460.000

			Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.159.338.068
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.444.790
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.849.300
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.463.900
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.969.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.725.000

		Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.700.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.400.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.958.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.950.000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	32.215.600

		Kabupaten/ Kota		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	108.660.250
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	3.855.380
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	54.629.620
	PROGRAM PENGEMBANGAN	Pengembangan Usaha Mikro	Pengembangan Usaha Mikro	197.859.300

	UMKM	dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	266.000.000
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	68.720.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	7.463.100

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan

Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 dengan total pagu Rp.7.176.925.878,- (Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TAKALAR

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	KPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	8	19	20	21
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							7,309,503,755.00	7,236,193,802.00	7,176,925,878.00	-132,577,877.00							8,459,000,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7,289,503,755.00	7,221,193,802.00	7,169,462,778.00	-120,040,977.00							8,389,000,000.00	
	2.07	URUSAN PEMERIN							27,564,000.00		117,026,770.00	89,462,770.00							90,000,000.00	

		TAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**100%**	**0**	**0**	**18.6 %**	**18.6 %**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**						100%	**20,000,000.00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase Dokumen Rencana dan Tenaga Kerja Yang Disusun*	100%	0	0	100 %	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	100%	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																	

			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	4	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		1	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi**	**100%**	**83%**	**17%**	**100%**	**100%**	**5,000,000.00**	**57,500,000.00**	**47,090,700.00**	**25,000,000.00**						**120%**	**30,000,000.00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi*	100%	83%	17%	100%	100%	5,000,000.00	57,500,000.00	47,090,700.00	42,090,700.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penu	asyarakat	120%	30,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA

																runan Kesenjangan Sosial Ekonomi				KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	24	20	4	80 Orang	80 Orang	5,000,000.00	57,500,000.00	47,090,700.00	42,090,700.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		4	30,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan**	**100%**	0	20%	**20%**	**20%**	**22,564,000.00**	**125,000,000.00**	**69,936,070.00**	**7,436,000.00**						20%	**30,000,000.00**	

		TENAGA KERJA	**(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota**																	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelayanan antar kerja daerah*	100%	0	20 %	100 %	100 %	22,564,000.00	125,000,000.00	69,936,070.00	47,372,070.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	20 %	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2500	0	500	1000 Orang	1000 Orang	22,564,000.00	125,000,000.00	69,936,070.00	47,372,070.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	RETRIBUSI DAERAH - LRA LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penu		500	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA

														HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		runan Kesenjangan Sosial Ekonomi				KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*	1	0	0	100 %	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	0	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjan		0	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRAN

															gan Sosial Ekonomi					SMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pekerja Migran yang ditempatkan di Daerah Kabupaten Kota*	1	0	0	100 %	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	0	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1	0	0	50 Orang	50 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosi		0	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

																al Ekonomi				
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	100%	0	0	**20.47 %**	**20.47 %**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**						0	**10,000,000.00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaa	-	0	0	0	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosi	erusahaan	0	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

		n yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota														al Ekonomi				
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1000	0	0	1500 Laporan	1500 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		0	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOP**							**7,261,939,755.00**	**7,038,693,802.00**	**7,052,436,008.00**	**-209,503,747.00**							**8,299,000,000.00**	

		ERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**22,18 %**	**22,18%**	**100 %**	**100 %**	**6,397,818,875.00**	**6,346,193,802.00**	**6,320,495,858.00**	**1,401,181,125.00**						25 %	**7,799,000,000.00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Pelaksanaan Perenca*	24,44 %	24,44 %	24,44%	100 %	100 %	21,576,720.00	25,526,720.00	24,697,800.00	3,121,080.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola	Persentase Dokumen Perencanaan	25 %	45,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			naan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	4,006,500.00	4,006,500.00	4,006,500.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PADYANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerint		2	9,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

																ahan dan Pela yana n Publi k				
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	4,113,620.00	7,073,620.00	6,623,000.00	2,509,380.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	2,998,000.00	2,998,000.00	2,827,900.00	-170,100.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,300.00	2,000,300.00	1,896,200.00	-104,100.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN

																6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,300.00	2,990,300.00	2,886,200.00	885,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1	1	1 Laporan	1 Laporan	2,998,000.00	2,998,000.00	2,998,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	4	4	4 Laporan	4 Laporan	3,460,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pela		4	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENA

																yanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				GA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang mendapat gaji dan Tunjangan Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%	25%	25%	100%	100%	6,138,470,260.00	6,188,578,082.00	6,176,782,858.00	38,312,598.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Dokumen Keuangan	25%	7,061,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3600	908	908	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6,119,726,860.00	6,168,093,802.00	6,159,338,068.00	39,611,208.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		908	7,000,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	12	12	12 Dokumen	12 Dokumen	16,743,400.00	18,484,280.00	15,444,790.00	-1,298,610.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pela		12	55,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENA

																yanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				GA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	1	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pela		1	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

																yanan Publik				
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Persentase Laporan Barang Milik Daerah Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah*	100%	25%	25%	100%	100%	2,500,000.00	7,025,000.00	5,849,300.00	3,349,300.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	25%	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	2	2	4 Laporan	4 Laporan	2,500,000.00	7,025,000.00	5,849,300.00	3,349,300.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2	6,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas dan ikut pelatihan Persentase ASN yang mendapatkan pakaian dinas dan ikut pelatihan*	100%	0	0	100 %	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan	ASN	0	57,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah													Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80	0	0	60 Paket	60 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	35,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	0	0	57 Orang	57 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	22,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenu*	100%	6,81%	25%	100%	100%	39,619,000.00	39,531,000.00	22,432,900.00	-17,186,100.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan	ASN	25%	110,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			han administrasi umum perangkat daerah													Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	3	1 Paket	1 Paket	3,644,000.00	3,644,000.00	3,463,900.00	-180,100.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470	32	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	35,975,000.00	35,887,000.00	18,969,000.00	-17,006,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		120	90,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan Persentase Barang Milik Daerah Yang Diadakan Persentase pemenuhan*	100%	0	33 %	100 %	100 %	9,525,000.00	9,525,000.00	14,725,000.00	5,200,000.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan	Dokumen Pengadaan Barang	33 %	243,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah													Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	0	2	2 Unit	2 Unit	9,525,000.00	9,525,000.00	14,725,000.00	5,200,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2	23,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	220,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunja*	100%	25 %	25 %	100 %	100 %	163,219,895.00	53,100,000.00	53,100,000.00	-110,119,895.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan	Dokumen Jasa Tagihan Listrik, Air, Internet, dan Jasa Tenaga Kantor	25 %	170,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			ng urusan pemerintah daerah Persentase Rekening yang terbayarkan,Persentase petugas kebersihan yang bekerja													Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12 Laporan	12 Laporan	112,819,895.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-110,119,895.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12	115,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	12	12 Laporan	12 Laporan	50,400,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12	55,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daer	*Persentase kendaraan dinas yang dipelihara aa Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100%	25%	0	100%	100%	22,908,000.00	22,908,000.00	22,908,000.00	0.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	20%	107,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN

		ah	*Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*													6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	12	0	4 Unit	4 Unit	20,958,000.00	20,958,000.00	20,958,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4	25,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	0	0	4 Unit	4 Unit	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PADYANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4	22,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	0	1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pela		1	60,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENA

																yanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				GA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota**	**100 %**	**15,56 %**	**34 %**	**100 %**	**100 %**	**0.00**	**0.00**	**32,215,600.00**	**20,000,000.00**						**37 %**	**20,000,000.00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan	*Persentase pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi*	100%	15,56 %	34 %	100 %	100 %	0.00	0.00	32,215,600.00	32,215,600.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4.	Lembaga Koperasi	37 %	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENA

		Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota														Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi				GA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	270 unit	42 unit	92	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	0.00	0.00	32,215,600.00	32,215,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		100	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase koperasi yang bersertifikat kompotensi**	**100%**	**0**	**0**	**100%**	**100%**	**20,064,000.00**	**15,000,000.00**	**108,660,250.00**	**9,936,000.00**						**100%**	**30,000,000.00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam	*Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Bagi Anggota Koperasi ,UMKM Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan latihan bagi*	100%	0	0	100%	100%	20,064,000.00	15,000,000.00	108,660,250.00	88,596,250.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosi	Lembaga Koperasi dan Masyarakat	100%	30,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

		Daerah Kabupaten /Kota	*pengelola koperasi*													al Ekonomi				
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 org	0	0	200 Orang	200 Orang	20,064,000.00	15,000,000.00	108,660,250.00	88,596,250.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		100	30,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA**	**Persentase usaha mikro menjadi wirausaha Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**	**100 %**	**0,38%**	**0,38 %**	**52.795 %**	**52.795 %**	**17,500,000.00**	**111,500,000.00**	**58,485,000.00**	**132,500,000.00**						0,38 %	**150,000,000.00**	

		MIKRO (UMKM)																		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi Kemitraan, Kemudahan Perizinan,dan Pengembangan Usaha Mikro*	100%	0,38%	0,38 %	100 % 5 %	100 % 5 %	17,500,000.00	111,500,000.00	58,485,000.00	40,985,000.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	0,38 %	150,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		

			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	9250	50 unit	50 unit	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	5,000,000.00	7,500,000.00	3,855,380.00	-1,144,620.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PADYANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		50	50,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	500 unit	300 unit	300 unit	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	12,500,000.00	104,000,000.00	54,629,620.00	42,129,620.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PADYANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		300	100,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase jumah usaha yang diinput kedalam sistem ODS Persentase usaha mikro naik kelas**	**100%**	**20%**	**12%**	**10048.79%%**	**10048.79%%**	**826,556,880.00**	**566,000,000.00**	**532,579,300.00**	**-526,556,880.00**						**12%**	**300,000,000.00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase UKM yang diundang dalam pertemuan peningakatan kapasitas UMKM Persentase Usaha Mikro Yang meningkat menjadi Usaha kecil*	100%	20%	12%	0.5%100%	0.5%100%	826,556,880.00	566,000,000.00	532,579,300.00	-293,977,580.00			-	--	asyarakat	12%	300,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 unit	300 unit	100	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	513,278,440.00	200,000,000.00	197,859,300.00	-315,419,140.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPIS	-	--		100	100,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENA

														AHKAN DANA BAGI HASIL (DBH)						GA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																		
			Jumlah yang Difasilitasi	100 org	0	50	100 Orang	100 Orang	100,000,000.00	266,000,000.00	266,000,000.00	166,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		50	100,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		

			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 unit	0	134	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	213,278,440.00	100,000,000.00	68,720,000.00	-144,558,440.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		134	100,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20,000,000,000.00**	**15,000,000,000.00**	**7,463,100.00**	**-12,536,900.00**							**70,000,000,000.00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**20,000,000,000.00**	**15,000,000,000.00**	**7,463,100.00**	**-12,536,900.00**							**70,000,000,000.00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASA**	**Persentase Bangunan penduduk Yang Berasal Dari daerah**	**100 %**	**0**	**0**	**20 %**	**20 %**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000,000.00**						**0**	**50,000,000,000.00**	

		N TRA NSMI GRA SI	**Kabupat en/Kota**																	
	3.32. 03.2. 01	Penat aan Perse baran Pend uduk yang Beras al dari 1 (Satu) Daer ah Kabu paten /Kota	*Persenta se Penataa n Perseba ran pendudu k Yang Berasal Dari daerah Kabupat en/Kota*	10 0%	0	0	100 %	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-	4. Penu runa n Kese njan gan Sosi al Ekon omi 4. Penu runa n Kese njan gan Sosi al Ekon omi	asya rakat	0	50,00 0,000. 00	DINA S KOPE RASI, USAH A KECI L, MEN ENGA H, TENA GA KERJ A DAN TRAN SMIG RASI
	3.32. 03.2. 01.0 005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmi gran yang Mendap atkan Penyulu han	10 0 KK	0	0	50 Kep ala Kel uar ga	50 Kep ala Kel uar ga	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takal ar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	4. Penu runa n Kese njan gan Sosi al Ekon		0	50,00 0,000. 00	DINA S KOPE RASI, USAH A KECI L, MEN ENGA H, TENA GA KERJ A DAN TRAN SMIG RASI

																omi				
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas**	**100%**	**25%**	**25%**	**23%**	**23%**	**20,000,000.00**	**15,000,000.00**	**7,463,100.00**	**0.00**						**25%**	**20,000,000.00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Persentase Pengembangan Satuan pemukiman Pada Tahap Kemandirian*	100%	25%	25%	100%	100%	20,000,000.00	15,000,000.00	7,463,100.00	-12,536,900.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	asyarakat	25%	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		

			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	4 SP	1 SP	1 SP	1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	20,000,000.00	15,000,000.00	7,463,100.00	-12,536,900.00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		1	20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**7,309,503,755.00**	**7,236,193,802.00**	**7,176,925,878.00**	**-20,817,255,718.00**							**8,459,000,000.00**	

Sumber Data : RKPD Perubahan 2025

BAB V
PENUTUP

a. Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi , ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksnakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan penyesuaian dan penjabaran terhadap Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Selain itu perubahan Renja ini dimaksudkan untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan OPD. Dimana BKAD Kabupaten Takalar mendukung misi kedua yakni "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik".

Peningkatan pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi satu-satunya tujuan BKAD dengan sasaran peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Perubahan Renja dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan tidak terlepas dari pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 dalam rangka mendukung perwujudan misi dan misi Pemerintah Kabupaten Takalar yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. BKAD merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai posisi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Perubahan Renja sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan yang telah melalui tahap evaluasi dan merupakan turunan dari Rancangan Awal Renstra BKAD 2025-2029. Perubahan Renja BKAD Tahun 2025 merupakan dasar untuk menyusun perubahan rencana kegiatan dan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Takalar, Agustus 2025

KEPALA BKAD KAB.TAKALAR

Drs.RAHMANSYAH LANTARA, M.SI
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19701106 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-6
1.3 Maksud dan Tujuan I-9
1.4 Sistematika Penulisan I-9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025 II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai Triwulan I Tahun 2025 .....
2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 .....
2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025 .....
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH **III-1**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah III-2
3.2.1 Tujuan III-3
3.2.2 Sasaran III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH **IV-1**
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ..... IV-1
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Badan dan Pendanaan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ..... IV-1
BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2023 ..... I-3
Tabel II-2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan II-23
Tabel II-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Periode 2023-2026 ..... II-24
Tabel II-4 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas II-36
Tabel II-5 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Takalar..... II- 46
Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-4
Tabel IV-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Takalar IV-7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) (Bappelitbangda) disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja BKAD Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor ……. Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029. Selanjutnya Perubahan Renja Bappelitbangda dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) BKAD Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan (DPPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja Pemerintah Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, kondisi Triwulan I dan II ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendali dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

  Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah sebagai berikut:

  a. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra OPD ke dalam program/kegiatan tahunan
  b. Menyiapkan acuan bagi Rancangan Perubahan APBD
  c. Menyiapkan kerangka evaluasi perubahan kinerja program/ kegiatan tahunan bagi OPD.

- **Tujuan**

  Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD

1.4 Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan, Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan dokumen Renja (Rencana Kerja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar.

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, IKK, SPM dan SDGs, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak dan upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai triwulan I.

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran, review terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, serta rencana program dan kegiatan perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

BAB IV: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan dalam perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

BAB V: PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel II. 1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Takalar
Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	8		12		25		26 = 25/8 x 100%		29
		5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
		5	**02**				**KEUANGAN**			**191,690,022,197**	**11.79%**	**9,402,054,323**		**9,402,054,323**	11.79%	4.90%	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan BPKAD	5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**22,474,171,589**	**18.81%**	**3,502,770,243**	**18.81%**	**3,502,770,243**	**18.81%**	**15.59%**	
		5	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	100%	374,322,440	23.53%	87,419,860	23.53%	87,419,860	23.53%	23.35%	
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	64,732,040	1	20,653,860	1	20,653,860	33%	32%	Kasubag Perencanaan
		5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	37,000,000	-	-	-	-	0%	0%	Kasubag Perencanaan
		5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	44,525,700	-	-	-	-	0%	0%	Kasubag Perencanaan
		5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	37,028,500	-	-	-	-	0%	0%	Kasubag Perencanaan
		5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	43,456,200	-	-	-	-	0%	0%	Kasubag Perencanaan

		5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	40,000,000	2	39,997,000	2	39,997,000	100%	100%	Kasubag Perencanaan
		5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	107,580,000	1	26,769,000	1	26,769,000	25%	25%	Kasubag Perencanaan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**22.62%**	**22.40%**	
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
		5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi keuangan PD**	100%	15,251,389,709	23.82%	2,196,372,739	23.82%	2,196,372,739	23.82%	14.40%	
		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN BPKD yang menerima gaji dan Tunjangan	700	11,421,694,479	200	2,108,670,279	200	2,108,670,279	29%	18%	Kasubag Keuangan
								Jumlah ASN BPKD yang menerima TPP	588	3,416,376,000	-	-	-	-	0%	0%	Kasubag Keuangan
		5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	59,361,700	3	7,196,700	3	7,196,700	25%	12%	Kasubag Keuangan
		5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	10,000	109,207,060	2,490	38,048,000	2,490	38,048,000	25%	35%	Kasubag Keuangan
		5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	51,671,850	3	5,323,900	3	5,323,900	25%	10%	Kasubag Keuangan
		5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	40,060,510	-	26,629,510	-	26,629,510	0%	66%	Kasubag Keuangan
		5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	62,479,850	-	5,492,750	-	5,492,750	0%	9%	Kasubag Keuangan
		5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2	55,000,300	1	5,011,600	1	5,011,600	50%	9%	Kasubag Keuangan
		5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	35,537,960	-	-	-	-	0%	0%	Kasubag Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**17.05%**	**17.79%**	
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
		5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	100%	265,081,800	18.18%	59,783,633	18.18%	59,783,633	18.18%	22.55%	
		5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	30,965,100	1	1,984,200	1	1,984,200	50%	6%	Kasubag umum dan kepegawaian
		5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	34,541,100	-	8,490,800	-	8,490,800	0%	25%	Kasubag umum dan kepegawaian
		5	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	40,016,100	-	7,829,000	-	7,829,000	0%	20%	Kasubag umum dan kepegawaian

		5	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	33,370,400	-	5,975,034	-	5,975,034	0%	18%	Kasubag umum dan kepegawaian
		5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi Penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	52,633,400	1	13,007,400	1	13,007,400	25%	25%	Kasubag umum dan kepegawaian
		5	02	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	37,203,000	-	13,684,200	-	13,684,200	0%	37%	Kasubag umum dan kepegawaian
		5	02	01	2.03	07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	36,352,700	-	8,812,999	-	8,812,999	0%	24%	Kasubag umum dan kepegawaian
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**10.71%**	**22.03%**	
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
		5	02	01	2.05		**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	100%	179,029,900	8%	34,459,400	8%	34,459,400	7.69%	19.25%	
		5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	49	21,000,000	-	-	-	-	0%	0%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	02	01	2.05	03	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	36,596,400	3	7,769,300	3	7,769,300	25%	21%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	02	01	2.05	05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	110,657,500	3	26,690,100	3	26,690,100	25%	24%	Kasubag Keuangan
		5	02	01	02.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	10,776,000	-	-	-	-	0%	0%	Kasubag Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**12.50%**	**11.34%**	
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
		5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentasi cakupan administrasi umum perangkat daerah**	100%	761,203,900	12.00%	64,140,900	12.00%	64,140,900	12.00%	8.43%	
		5	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	14,450,900	-	-	-	-	0%	0%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	02	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	170,507,300	-	1,635,000	-	1,635,000	0%	1%	Kasubag umum dan kepegawaian
		5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	26,500,000	-	-	-	-	0%	0%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	63,000,000	-	8,138,001	-	8,138,001	0%	13%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	447,653,000	3	46,398,399	3	46,398,399	25%	10%	
		5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	39,092,700	-	7,969,500	-	7,969,500	0%	20%	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**3.57%**	0.06375334	
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
		5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	5,531,883,840	25.00%	1,045,108,704	25.00%	1,045,108,704	25.00%	18.89%	
		5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	4,976,380,800	3	997,508,704	3	997,508,704	25%	20%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	555,503,040	3	47,600,000	3	47,600,000	25%	9%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**25.00%**	**14.31%**	
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
		5	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase cakupan pemiharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	111,260,000	21.43%	15,485,007	21.43%	15,485,007	21.43%	13.92%	
		5	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	111,260,000	6	15,485,007	6	15,485,007	21%	14%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**21.43%**	**13.92%**	
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**16.13%**	**15.45%**	
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**	

Faktor pendorong pencapaian kinerja: komitmen untuk menyelesaikan target kinerja sesuai dengan tenggang waktu

Faktor penghambat: Adanya efisiensi anggran sehingga ada beberapa sub kegiatan yang dihapus

Faktor penghambat:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		5	02	02			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase pengunaan anggaran tepat sasaran**	**100%**	**168,203,850,618**	**16.55%**	**5,747,567,480**	**16.55%**	**5,747,567,480**	**16.55%**	**3.42%**	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemda	5	02	02	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	100%	1,700,000,000	0%	262,944,330	0%	262,944,330	0.00%	15.47%	
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	115,000,000	-	-	-	-	0%	0%	Kasubid Penyusunan APBD
		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	110,000,000	-	-	-	-	0%	0%	Kasubid Penyusunan APBD
		5	02	02	2.01	03	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	38	160,000,000	-	-	-	-	0%	0%	Kasubid Penyusunan APBD

		5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	38	160,000,000	-	4,950,020	-	4,950,020	0%	3%	Kasubid Penyusunan APBD
		5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	38	100,000,000	-	-	-	-	0%	0%	Kasubid Penyusunan APBD
		5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	38	100,000,000	-	14,919,800	-	14,919,800	0%	15%	Kasubid Penyusunan APBD
		5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	140,000,000	-	-	-	-	0%	0%	Kasubid Penyusunan APBD
		5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	160,000,000	-	42,979,750	-	42,979,750	0%	27%	Kasubid Penyusunan APBD
		5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	100,000,000	-	17,951,000	-	17,951,000	0%	18%	Kasubid Penyusunan APBD
		5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	100,000,000	-	84,059,360	-	84,059,360	0%	84%	Kasubid otorisasi DPA-SKPD & Pembiayaan
		5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	155,000,000	-	98,084,400	-	98,084,400	0%	63%	Kasubid otorisasi DPA-SKPD & Pembiayaan
		5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	100,000,000	-	-	-	-	0%	0%	Kasubid otorisasi DPA-SKPD & Pembiayaan
		5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	200,000,000	-	-	-	-	0%	0%	Kasubid otorisasi DPA-SKPD & Pembiayaan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0.00%**	**17.51%**	
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemda	**5**	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase cakupan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**100%**	**1,225,951,000**	**23.23%**	**254,732,900**	**23.23%**	**254,732,900**	**23.23%**	**20.78%**	
		5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	199,701,400	3	61,137,400	3	61,137,400	25%	31%	Subid Perbendaharaan
		5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2	52,108,400	-	-	-	-	0%	0%	Subid Perbendaharaan
		5	02	02	2.02	03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	840	109,676,000	210	75,838,500	210	75,838,500	25%	69%	Subid Perbendaharaan
		5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5	73,407,600	-	9,404,700	-	9,404,700	0%	13%	Subid Perbendaharaan
		5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	26	115,202,000	6	37,941,000	6	37,941,000	23%	33%	Subid Perbendaharaan
		5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	30,000,000	3	-	3	-	25%	0%	Subid Perbendaharaan

		5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dannPenyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48	212,473,600	12	23,929,500	12	23,929,500	25%	11%	Subid Perbendaharaan
		5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1	41,640,200	-	9,146,600	-	9,146,600	0%	22%	Subid Perbendaharaan
		5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	184	133,036,000	45	10,957,500	45	10,957,500	24%	8%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	32,765,800	-	6,472,500	-	6,472,500	0%	20%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70	225,940,000	-	19,905,200	-	19,905,200	0%	9%	Subid Perbendaharaan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**13.41%**	**19.59%**	
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**	
		5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**persentase cakupan koordinasi dan pelaporan keuangan daerah**	**100%**	**974,250,020**	**23.93%**	**145,573,800**	**23.93%**	**145,573,800**	**23.93%**	**14.94%**	
		5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntasi penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24	76,014,720	6	19,291,299	6	19,291,299	25%	25%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	300	182,710,500	75	49,704,801	75	49,704,801	25%	27%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19	56,742,000	3	13,938,100	3	13,938,100	16%	25%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan

		5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	168,838,000	-	4,910,900	-	4,910,900	0%	3%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	304,504,000	-	36,962,200	-	36,962,200	0%	12%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	120,788,000	-	15,025,600	-	15,025,600	0%	12%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	64,652,800	-	5,740,900	-	5,740,900	0%	9%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**9.40%**	**16.22%**	
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
		5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase cakupan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	**163,493,649,598**	**12.50%**	**4,946,169,050**	**12.50%**	**4,946,169,050**	**12.50%**	**3.03%**	
		5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	12,096,567,195	-	-	-	-	0%	0%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	143,886,337,500	1	4,946,169,050	1	4,946,169,050	25%	3%	
		5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	4,400,000,000	-	-	-	-	0%	0%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2	3,110,744,903	-	-	-	-	0%	0%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**6.25%**	**0.86%**	
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
		5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi pemerintah Daerah Lingkup Keuangan daerah**	**Persentase data yang telah diolah dan diimplementasikan melalui sistem informasi Keuangan daerah (SIPD)**	**100%**	**810,000,000**	**23.08%**	**138,147,400**	**23.08%**	**138,147,400**	**23.08%**	**17.06%**	
		5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis data bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1	10,000,000	-	-	-	-	0%	0%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12	800,000,000	3	138,147,400	3	138,147,400	25%	17%	Subid Perbendaharaan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**12.50%**	**8.63%**	

Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**8.31%**	**12.56%**	
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**	

Faktor pendorong pencapaian kinerja: komitmen kuat menyelesaikan target kinerja sesuai dengan jadwal

Faktor penghambat: kegiatan yang belum ada realisasi kinerjanya adalah karena hasil pelaksanaan kegiatannya jadwalnya ada di triwulan berikutnya

Faktor penghambat:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	**5**	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan**	**100%**	**1,011,999,990**	**0.00%**	**151,716,600**	**0.00%**	**151,716,600**	**0.00%**	**14.99%**	
		5	02	03	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase cakupan pengelolaan barang milik daerah**	100%	1,011,999,990	0.00%	151,716,600	0.00%	151,716,600	0.00%	14.99%	
		5	02	03	2.01	01	Penysunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	2	216,023,300	-	4,881,700	-	4,881,700	0%	2%	subid. Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
		5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	19,218,800	-	7,914,200	-	7,914,200	0%	41%	subid. Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
		5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	26,334,790	-	10,463,200	-	10,463,200	0%	40%	Subid Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
		5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	36,940,400	-	4,234,400	-	4,234,400	0%	11%	Subid Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
		5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	38	94,048,000	-	12,932,700	-	12,932,700	0%	14%	Subid Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
		5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	38	19,732,000	-	7,516,700	-	7,516,700	0%	38%	Subid Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
		5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	38	39,432,100	-	7,094,400	-	7,094,400	0%	18%	Subid Pemanfaatan dan Penghapusan
		5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	38	191,839,300	-	14,297,200	-	14,297,200	0%	7%	Subid Pemanfaatan dan Penghapusan
		5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	38	48,831,200	-	9,241,400	-	9,241,400	0%	19%	Subid Pemanfaatan dan Penghapusan
		5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	38	21,809,500	-	5,107,000	-	5,107,000	0%	23%	Subid Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset

		5	02	03	2.01	12	Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	2	297,790,600	-	68,033,700	-	68,033,700	0%	23%	Subid Pemanfaatan dan Penghapusan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0.00%**	**21.56%**	
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**0.00%**	**21.56%**	
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**	

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : belum ada realisasi kinerja karena hasil pelaksanaan kegiatannya jadwalnya ada di triwulan ke II

Faktor penghambat:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**8.15%**	**16.52%**
Predikat Kinerja Program	**SR**	**SR**

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

1.Komitmen kuat untuk menyelesai target kinerja sesuai jadwal kegiatan

2.Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai

3.Dukungan SDM yang sesuai kualifikasi kemampuan

4.

5.

Faktor penghambat:

1.Efisiensi Anggaran sehingga ada beberapa sub kegiatan yang dihapus

2.

3.

4.

5.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

1.

2.
3.
4.
5.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):
1.
2.
3.
4.
5.

Sumber : Laporan Monev Triwulan I Tahun 2025

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam Renja BKAD Tahun 2025

APBD 2025							
No. Urut	**Perangkat Daerah**	**Jmlh Prog.**	**Jmlh Keg**	**Jmlh Sub Keg.**	**Indikator**		
					Jmlh Prog.	**Jmlh Keg**	**Jmlh Sub Keg.**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	BKAD	3	13	83	3	13	84

Sumber : Laporan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 3, jumlah kegiatan 13, dan jumlah sub kegiatan 83, sedangkan jumlah indikator program sebanyak 3, jumlah indikator kegiatan sebanyak 13, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 83.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar
hingga Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Program	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan I	Persentase	
				Fisik	Keu.
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	22.474.171.589	3,502,770,243	18,81	15,59
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	168.203.850.618	5,747,567,480	16,55	3,42
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.011.999.990	151,716,600	0	14,99
	Jumlah	**191.690.022.197**	**9.402.054.323**	**11,79**	**4,90**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Trw. I BKAD Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp191.690.022.197,00. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar Rp9.402.054.323,00 atau 4,90 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 11,79 persen. Kondisi ini menunjukkan capaian fisik masih kurang yakni 13,21 persen dari target 25,00 persen yang diharapkan pada triwulan I.

Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah hingga triwulan I masih dalam kategori **Sangat Rendah** yaitu rata-rata >5 persen.

2.1.3 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Badan Keuagan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Sangat Rendah** untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan realisasi masih di bawah 20%.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan kategori tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa semua program yang dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebanyak 3 (tiga) program realisasinya masih tergolong kategori **Sangat Rendah**, yakni di bawah 20% karena yang data yang digunakan adalah realisasi triwulan I.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 13 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 2 kegiatan atau 15,38 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori sangat rendah yaitu 0 – 10 persen, sedangkan yang berada dalam kategori sedang sebanyak 8 kegiatan atau

61,53 persen, dan yang berada pada kategori tinggi ada 3 kegiatan dengan capaian realisasi di atas 20 persen atau 23,08 persen dari total kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masing perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 83 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 35 sub kegiatan atau 42,17 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 20 sub kegiatan atau 24,10 persen dan 28 sub kegiatan atau 33,73 persen dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
		0 - 10%	>10 – 20%	> 20 %		0 - 10%	>10 – 20%	> 20 %		0 - 10%	>10 – 20%	> 20 %
		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
BKAD	3	1	2	0	13	2	8	3	83	35	20	28

Sumber : Laporan Realisasi Renja Trw. I BKAD Tahun 2025

2.1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi kinerja antara 10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi kinerja di atas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan lebih dari 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah lebih dari 20 persen, sehingga jika terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada tiap-tiap perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 3 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori **Rendah** atau di bawah 20 persen. Dari 3 program pencapaian kinerjanya masih digolongkan kategori rRendah yaitu di bawah 20 persen pada triwulan I Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 13 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama terdapat 10 kegiatan (76,92 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih **Rendah** atau di bawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori **Sedang** terdapat 3 kegiatan (23,08 persen), dan belum ada yang mencapai kategori **Tinggi** pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 83 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih **Rendah** atau di bawah 20 persen terdapat 56 sub kegiatan (67,47 persen), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 1 sub kegiatan (0,01 persen), selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi

sebanyak 26 sub kegiatan atau 31,32 persen, yaitu pencapaian lebih dari 20% persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Renja BKAD Kabupaten Takalar Triwulan I
Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10 %	>10 – 20%	> 20 %		0 - 10 %	>10 – 20%	> 20 %		0 - 10 %	>10 – 20%	> 20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	BKAD	3	1	2	0	13	3	3	7	83	56	1	26

Sumber : Laporan Realisasi Renja Trw. I BKAD Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (IKU dan SPM)

Adapun analisis kinerja pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk IKU adalah sebagai berikut :

Tabel II-5
Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR (berdasarkan Renstra 2023-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR (Renstra 2025-2029)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	B (76,050)	B (79,681)	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	N/A	WTP	WTP	
2	Persentase kesesuaian nomelaktur program KUA-PPAS dan APBD	99%	100%	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	42.22%	40.15%	30.00%	42,22%	40.15%	30.00%	
3	Persentase kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD	99%	99%	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	16.27%	20.27%	25.75%	16.27%	20.27%	25.75%	
4	Persentase belanja pendidikan	22%	31%	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	92.52%	94.75%	95.00%	N/A	94.75%	95.00%	
5	Persentase belanja kesehatan	12%	33%	Persentase Penurunan SiLPA	56.42%	50.25%	45.50%	N/A	50.25%	45.50%	
6	Persentase belanja infrastruktur dari dana transfer umum	25%	30,45%	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	92.11%	92.11%	92.11%	N/A	92.11%	92.11%	

NO	INDIKATOR (berdasarkan Renstra 2023-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR (Renstra 2025-2029)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7	Persentase anggaran belanja standar pelayanan minimal	7%	4,20%	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	0.89%	2.25%	2.50%	N/A	2.25%	2.50%	
8	Persentase pelaporan tepat waktu	96%	94%	Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada BKAD	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	100.00%	100.00%	
9	Persentase laporan dapat diakses	100%	100%	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada BKAD	5.00%	5.00%	7.50%	N/A	5.00%	7.50%	
10	Persentase capaian pelaksanaan belanja daerah	85%	88%	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada BKAD	71.25	71.30	71,35	N/A	71.30	71,35	
11	Rasio kemandirian keuangan	13	12	Tingkat Literasi Digital ASN BKAD	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	
12	Rasio fleksibiltas keuangan	114	120								
13	Rasio solvabilitas operasional	82	97.94								
14	Rasio solvabilitas jangka pendek	250.5	247.01								
15	Rasio solvabilitas jangka panjang	630.5	767.25								
16	Rasio solvabilitas layanan	503.250.725,05	516.682.948,64								
17	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP								

NO	INDIKATOR (berdasarkan Renstra 2023-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR (Renstra 2025-2029)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pemda										
18	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	97%	87%								
19	Persentase data aset yang akurat	93%	99%								
20	Indeks reformasi birokrasi BKAD	BB	BB								
21	Nilai SAKIP BKAD	BB	BB								

Sumber : SIPD-RI

Dari tabel II. 5 di atas dapat dilihat realisasi data capaian untuk indikator tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan daerah memiliki target B(76,050) dan capaiannya adalah B(79,681). Capaiannya telah melampui target karena didukung oleh komitmen pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara lebih berkualitas,akuntabel dan transparan.
2. Indikator Persentase kesesuaian nomelaktur program KUA-PPAS dan APBD memiliki target 99% dan capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Dari Jumlah program pada KUA/PPAS sebanyak 179 Program yang sama dengan yang terdapat pada APBD, sehingga kesesuaian antara nomenklatur program pada KUA/PPAS dan APBD telah terpenuhi. Hal ini didukung oleh penggunakan aplikasi SIPD RI yang terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pengganggaran.
3. Indikator Persentase kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD memiliki target 98% capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 99%. Dari Jumlah pagu program pada KUA/PPAS sebesar Rp1.254.766.297.961,00 dan pagu program pada APBD sebesar Rp1.270.139.670.225,00 sehingga diperoleh capaian 99%. Capaian ini telah sesuai dengan target karena didukung oleh aplikasi SIPD yang telah terintegrasi mulai dari perencanaan hingga penganggaran.
4. Indikator Persentase belanja pendidikan capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 31,02% sedangkan targetnya 22%. Dari Jumlah anggaran bidang pendidikan sebesar Rp396.752.589.268,00 dengan jumlah belanja pada APBD sebesar Rp1.278.839.325.660,00 sehingga diperoleh capaian 31,02%. Capaian ini telah sesuai dengan target karena didukung oleh komitmen pimpinan untuk menganggarkan belanja pendidikan minimal 20%.
5. Indikator Persentase belanja kesehatan capaian melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 21,96% sedangkan targetnya 12%. Dari Jumlah anggaran bidang kesehatan sebesar Rp280.820.914.065,00 dan jumlah belanja pada APBD sebesar Rp1.278.839.325.660,00 sehingga diperoleh capaian 21,96%. Capaian ini telah sesuai dengan target karena didukung oleh komitmen pimpinan untuk menganggarkan belanja kesehatan minimal 10% .
6. Indikator Persentase belanja infrastruktur dari dana transfer capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 30,45% dari target 25%. Dari Jumlah anggaran belanja infrastruktur dari dana transfer sebesar Rp 334.829.459.151,00 dan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD sebesar Rp 1.099.627.618.335,46 sehingga diperoleh capaian 30,45%. Capaian ini telah sesuai dengan target karena didukung oleh komitmen pimpinan untuk menganggarkan belanja infrastruktur

dari dana transfer minimal 25%.

7. Indikator Persentase belanja standar pelayanan minimal capaiannya tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 4,20% sedangkan targetnya 7%. Dari Jumlah anggaran belanja standar pelayanan minimal sebesar Rp53.729.449.679,00 dan jumlah belanja pada APBD sebesar Rp1.278.839.325.660,00 sehingga diperoleh capaian 4,20%. Capaian ini tidak sesuai dengan target karena kurangnya komitmen pimpinan untuk menganggarkan belanja standar pelayanan minimal sebesar 7% sehingga diharapak ke depannya tim TPAD bisa menganggarkan belanja SPM yang lebih besar.
8. Indikator Persentase pelaporan tepat waktu capaiannya tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 94% dari target 96% dengan. Dari Jumlah SKPD yang melakukan pelaporan tepat waktu sebanyak 36 SKPD dari 38 SKPD. Diharapkan ke depannya perlu semacam reward bagi SKPD yang bisa mengumpulkan laporannya tepat waktu .
9. Indikator Persentase laporan dapat diakses capaiannya sesuai target yang ditetapkan yaitu 100,00%. Dari 12 (dua belas) dokumen pengelolaan keuangan yang terdiri dari Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda APBD, Ranperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA Seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah diaudit dan Opini atas LKPD dapat diakses melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Indikator Persentase capaian pelaksanaan belanja daerah capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 88% dari target 85%. Dari Jumlah realisasi belanja sebesar Rp1.096.651.270.668,81 dan jumlah anggaran belanja pada APBD sebesar Rp1.244.132.362.335,46 sehingga diperoleh capaian 88%. Hal ini didukung oleh optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang telah direncanakan.
11. Indikator Rasio kemandirian keuangan capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 12 dari targetnya 13. Dari Jumlah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp142.876.434.018,19 dan jumlah realisasi penerimaan pendapatan daerah pada APBD sebesar Rp1.151.682.151.320,55 sehingga diperoleh capaian 12. Indikator ini realisasinya belum sesuai dengan target, hal ini bisa disebabkan karena rendahnya realisasi PAD karena kemandirian keuangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerahnya. Sehingga ke depannya perlu peningkatan realisasi yang lebih signifikan.
12. Indikator Rasio fleksibilitas keuangan capaiannya telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 120 dari targetnya 114. Dari realisasi total pendapatan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp214.857.617.732,18 dan realisasi total kewajiban ditambah belanja pegawai dalam APBD sebesar Rp343.043.502.706,76

sehingga diperoleh capaian 120. Capaian indikator ini telah melebihi target karena daerah telah cukup baik dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dan gaji pegawai.

13. Indikator Rasio solvabilitas operasional capaiannya lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 97,94 dari targetnya 82,00. Dari realisasi total pendapatan Laporan Operasional dikurangi pendapatan Dana Alokasi Khusus LO sebesar Rp828.113.180.216,36 dan realisasi total beban LO dalam APBD sebesar Rp845.495.202.011,34 sehingga diperoleh capaian 97,94. Capaian inidkator ini telah melebihi target karena didukung oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran tahun 2024.
14. Indikator Rasio solvabilitas jangka pendek capaiannya lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 247,41 dari targetnya 250,00. Dari Jumlah kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek sebesar Rp113.609.956.931,37 dan kewajiban lancar sebesar Rp45.993.174.550,57 sehingga diperoleh capaian 247,41. Capaian indikator ini telah melebihi target karena didukung oleh kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo selama tahun 2024.
15. Indikator Rasio solvabilitas jangka panjang capaiannya lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 767,25 sedangkan targetnya 630,50. Dari Jumlah aset tetap sebesar Rp1.616.235.931.643,81 dan kewajiban jangka Panjang sebesar Rp210.652.948.088 sehingga diperoleh capaian 767,25. Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, capaian indikator ini telah melebihi target karena didukung oleh besarnya nilai aset tetap yang telah tercatat dibandingkan dengan jumlah kewajiban jangka panjang yang harus dibayarkan oleh Pemda Takalar
16. Indikator Rasio solvabilitas layanan capaiannya lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 516.682.948,64 sedangkan targetnya 503.250.725,05. Dari Jumlah aset tetap sebesar Rp1.616.235.931.643,81 dan jumlah penduduk 312.810 sehingga diperoleh capaian 516.682.948,64. Capaian indikator ini telah melebihi target karena kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan dinginkan oleh masyarakat karena besarnya jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
17. Indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda. Realisasinya telah sesuai dengan target yaitu WTP. Hal ini bisa tercapai karena penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi, walau pun masih ada beberapa temuan dan perbaikan sehingga ke depannya Pemda masih perlu meningkatkan kualitas pengelelolaan keuangan dan pelaporannya.

18. Indikator Persentase ketepatan waktu menyampaikan laporan BMD capaiannya lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 87% dari targetnya 97%. Dari Jumlah perangkat daerah yang mengumpulkan laporan BMD tepat waktu 32 OPD dibagi jumlah perangkat daerah 38 OPD. Diharapkan ke depannya dilakukan pembinaan agar OPD bisa lebih disiplin dalam menyampaikan laporan barang.
19. Indikator Persentase data aset yang akurat capaiannya telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 99% dari targetnya 93%. Dari Jumlah data aset di lapangan sebesar Rp2.957.512.530.960,91 dan jumlah data inventaris barang sebesar Rp3.145.972.646.301,69 sehingga diperoleh capaian 99%. Indikator ini telah melebihi target karena para OPD yang telah melakukan inventarisasi aset di OPD masing-masing dan melakukan pelaporan dengan baik.
20. Indikator Nilai SAKIP BKAD capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu BB sedangkan targetnya BB dengan demikian capaiannya 100,00%. Hasil evaluasi keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s/d 100 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sebesar 70,33 dengan kategori predikat BB, Interprestasi Sangat Baik.

Untuk indikator pada tahun 2025 berbeda dengan indikator pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena indikator pada tahun 2024 berdasarkan renstra tahun 2023-2026 sedangkan indikator pada tahun 2025 berdasarkan renstra tahun 2025-2029 yang menyesuaikan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2029.

Adapun realisasi dari capaian indikator pada tahun 2025 berdasarkan tabel II. 5 adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan targetnya adalah WTP sedangkan realisasinya belum tersedia di tahun 2025 karena penilaiannya dilakukan di tahun 2026.
2. Untuk indikator Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Transfer ke Daerah) targetnya adalah 42,22% dan realisasinya sesuai target yaitu 42,22%. Dari jumlah belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD yaitu 499.625.333.812,86 dan jumlah belanja APBD yaitu 1.183.542.239.179,00 sehingga diperoleh capaian tersebut. Indikator ini telah sesuai dengan target karena komitmen pemerintah untuk memenuhi alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD yang sesuai dengan aturan.
3. Untuk indikator Persentase Belanja Infastruktur pelayanan publik targetnya adalah 16,27% dan realisasinya juga sesuai target yaitu 16,27%. Dari total belanja infrasturktur pelayanan publik yaitu 168.625. 446.700,14 dan total belanja daerah di luar belanja transfer yaitu 1.036.545.156.776 sehingga diperoleh capaian tersebut . Indikator ini telah sesuai dengan target karena komitmen pemerintah

untuk memenuhi alokasi Belanja Infastruktur pelayanan publik yang sesuai dengan aturan.

4. Untuk indikator Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar targetnya adalah 92.52% dan untuk realisasinya belum ada data yang tersedia karena untuk mengukur realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar hanya dapat diukur pada akhir tahun anggaran.
5. Untuk indikator Persentase Penurunan SiLPA targetnya adalah 56.42% dan untuk realisasinya belum ada data yang tersedia karena untuk mengukur realisasi SiLPA hanya dapat diukur pada akhir tahun anggaran.
6. Untuk indikator Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu targetnya adalah 92.11% dan untuk realisasinya belum ada data yang tersedia karena untuk mengukur realisasi pelaporan keuangan tepat waktu untuk realisasi tahun 2025 dilaksanakan di tahun 2026.
7. Untuk indikator Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap targetnya adalah 0.89% dan untuk realisasinya belum ada data yang tersedia karena untuk mengukur realisasi penambahan nilai aset tetap hanya dapat diukur pada akhir tahun anggaran.
8. Untuk indikator Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah Pada BKAD targetnya adalah 100% dan untuk realisasinya belum ada data yang tersedia karena untuk mengukur realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya dapat diukur pada akhir tahun anggaran.
9. Untuk indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada BKAD targetnya adalah 5% dan untuk realisasinya belum ada data yang tersedia karena untuk mengukur realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya dapat diukur pada akhir tahun anggaran.
10. Untuk indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada BKAD targetnya adalah 71.25 dan untuk realisasinya belum ada data yang tersedia karena penilaian SAKIP untuk tahun 2025 dilaksanakan di tahun 2026.
11. Untuk indikator Tingkat Literasi Digital ASN BKAD targetnya adalah 100% dan realisasinya adalah 100%. Nilai ini diperoleh dengan mencari persentase dari perbandingan antara Jumlah ASN yang dapat mengoperasikan Aplikasi yang digunakan dalam PD dengan jumlah ASN PD. Dari 53 pegawai yang ada di BKAD semuanya telah bisa mengoperasikan aplikasi yang digunakan seperti E-Kinerja, Simpegnas, dan presensi. Hal ini didorong oleh komitmen kuat dari pimpinan agar seluruh pegawai di BKAD bisa melek dengan teknologi digital.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijkan Nasional

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 –

2029 maka dirumuskanlah tujuan Badan keuangan dan Aset Daerah yaitu **"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel",** Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka disusunlah sasaran sebagai

berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Anggaran
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Perbendahraan
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan
4. Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah
5. Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
6. Sasaran 6 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Adapun rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel III. 1
Perubahan Tujuan, Sasaran, Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja Pengelolaan keuangan daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	B (78,050)	Tujuan 1 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BKP atas Laporan Keuangan	WTP
Sasaran 1.1 : Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian nomelaktur program KUA-PPAS dan APBD	100%	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	42.22%
	Persentase kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD	99%		2. Persentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	16.27%
Sasaran 2.1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan pengalokasian anggaran belanja dalam APBDdalam APBD	Persentase belanja pendidikan	22%	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	1.Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	92.52%
	Persentase belanja kesehatan	12%		2. Persentase Penurunan SiLPA	56.42%

	Persentase belanja infrastruktur dari dana transfer umum	25%	Sasaran 1.3 : Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	92.11%
	Persentase anggaran belanja standar pelayanan minimal	8%	Sasaran 1.4 : Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	0.89%
Sasaran 1.3 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan	Persentase pelaporan tepat waktu	100%	Sasaran 1.5 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sektor hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah	1. Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah Pada BKAD	100%
	Persentase pelaporan dapat diakses	100%			
Sasaran 1.4 : Meningkatnya rasio penyerapan anggaran	Persentase capaian pelaksanaan belanja daerah	90%		2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada BKAD	5%
Sasaran 1.5 : Meningkatnya kondisi keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan	0.14	Sasaran 1.6 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada BKAD	71.25
	Rasio Fleksibiltas Keuangan	1.15		2. Tingkat Literasi Digital ASN BKAD	100%
	Rasio Solvabilitas Operasional	82.5			
	Rasio Solvabilitas jangka pendek	250.5			
	Rasio Solvabilitas jangka panjang	632.5			
	Rasio Solvabilitas Layanan	504.250.725.05			
Sasaran 1.6 : Meningkatnya Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda	WTP			
Sasaran 1.7 : Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	100%			

	Persentase data aset yang akurat	94%			
Sasaran 2.1 : Meningkatnya tata kelola kinerja pada BPKD	Nilai SAKIP BPKD	BB (76 - 78)			
	Indeks reformasi birokrasi BKAD	BB (>70 - 80)			

Sumber : Renstra 2025-2029 dan Renstra 2023-202

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan keuangan dan Aset Daerah yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1**. **Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital,** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		**899,832,930**
			Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS	132,000,000
			Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	118,790,850
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	76,312,000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	139,170,000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	71,214,000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	112,329,030
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	105,110,210
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubaha APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	144,906,840
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah		**184,357,900**
			Penilaian Barang Milik Daerah	153,566,400
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30,791,500

Sumber : SIPD-RI

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar terdiri atas 3 Program, 13 kegiatan dan 83 sub kegiatan dengan jumlah dana pagu indikatif adalah sebesar **Rp189.592.572.318,,81** ***(Seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan belas koma delapan puluh satu rupiah)*** dengan sumber dana berasal dari APBD-P. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel IV-2 berikut:

Tabel IV-2
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Keuangan dan Aset Daerah							192.837.663.268,00	191.457.207.148,00	189.592.572.318,81							214.041.204.814,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							192.837.663.268,00	191.457.207.148,00	189.592.572.318,81							214.041.204.814,00	
	5	02				KEUANGAN							192.837.663.268,00	191.457.207.148,00	189.592.572.318,81							214.041.204.814,00	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	25.358.155.973,00	22.241.355.340,00	20.905.663.070,81							28.872.755.248,00	

	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BKAD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 % 3 Dokumen	100 % 3 Dokumen	354.150.000,00	374.322.440,00	374.322.440,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		354.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	58.570.000,00	64.732.040,00	62.356.940,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			72.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	37.000.000,00	29.580.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	44.525.700,00	33.988.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	37.028.500,00	27.225.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	43.456.200,00	33.960.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			47.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	107.580.000,00	107.580.000,00	97.157.030,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			67.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	21.924.387.033,00	15.018.524.460,00	15.018.524.460,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		21.611.890.048,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	21.511.056.733,00	14.605.205.100,00	13.680.915.810,81	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	59.361.700,00	59.361.700,00	50.380.290,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			77.360.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12000 Dokumen	12000 Dokumen	109.217.900,00	109.207.190,00	95.095.590,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.321.130,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	51.672.010,00	51.671.850,00	41.569.350,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81.672.154,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	52.536.380,00	52.536.310,00	32.870.510,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			82.536.514,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	6 Dokumen	50.004.050,00	50.004.050,00	41.639.450,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	55.000.300,00	55.000.300,00	48.422.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	35.537.960,00	35.537.960,00	34.349.360,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen pengelolaan administrasi barang milik daerah lingkup BKAD Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	228.522.900,00	245.440.900,00	245.440.900,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		306.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.965.100,00	28.268.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	

							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.081.700,00	34.541.100,00	23.417.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			44.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	29.000.000,00	29.760.700,00	30.264.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			32.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.664.000,00	23.984.900,00	25.586.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	49.782.800,00	52.633.400,00	49.499.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			88.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.500.000,00	37.203.000,00	33.957.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			38.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.494.400,00	36.352.700,00	24.034.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			38.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	172.908.700,00	170.294.000,00	170.294.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		613.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			104.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	35.992.800,00	36.596.400,00	26.673.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	101.915.900,00	101.921.600,00	103.787.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			169.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0,00	10.776.000,00	10.176.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen hasil kegiatan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.151.815.300,00	764.429.700,00	764.429.700,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		2.716.399.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	

						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.627.400,00	14.450.900,00	14.450.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	361.295.000,00	0,00	34.159.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.333.400,00	24.025.200,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	141.664.000,00	68.587.900,00	132.910.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			87.384.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	123.000.000,00	123.000.000,00	63.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			169.960.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	21.120.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.320.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	421.300.000,00	447.653.000,00	220.642.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.053.035.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.995.500,00	39.092.700,00	30.059.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	-			100 % 3 paket	100 % 3 paket	195.605.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		227.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	195.605.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			156.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan hasil kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 % 2 Laporan	100 % 2 Laporan	935.767.040,00	5.557.083.840,00	5.557.083.840,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		1.287.160.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	296.264.000,00	4.976.380.800,00	4.976.380.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			641.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	639.503.040,00	580.703.040,00	555.503.040,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			645.960.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	395.000.000,00	111.260.000,00	111.260.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		1.756.106.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	124.670.000,00	111.260.000,00	111.260.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			160.846.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	58.820.000,00	0,00	14.620.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.260.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	154.660.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.270.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	56.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			227.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen APBD tepat waktu				100 %	100 %	166.247.174.315,00	168.203.851.818,00	167.879.264.258,00							182.591.957.300,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen APBD Persentase cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	-			100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	1.318.914.400,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		3.110.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																	
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	115.000.000,00	132.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			175.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	110.000.000,00	118.790.850,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			175.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																	
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	140.980.000,00	160.000.000,00	76.312.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	124.571.040,00	160.000.000,00	139.170.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																	

							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	90.000.000,00	100.000.000,00	71.214.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																	
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	90.000.000,00	100.000.000,00	112.329.030,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																	
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00	140.000.000,00	105.110.210,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																	
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	160.000.000,00	144.906.840,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	70.040.000,00	100.000.000,00	68.442.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			420.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	88.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	80.323.360,00	155.000.000,00	144.460.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	100.000.000,00	108.185.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	125.000.000,00	200.000.000,00	401.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen hasil kegiatan pengelolaan perbendaharaan daerah Persentase cakupan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah Persentase data yang telah diolah dan diimplementasikan melalui sistem informasi Keuangan daerah (SIPD)	-			100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	1.733.094.200,00	1.225.951.000,00	1.225.951.000,00			-	-	OPD		1.731.497.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	199.701.400,00	199.701.400,00	140.744.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	-			209.366.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Laporan	2 Laporan	52.108.400,00	52.108.400,00	30.334.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39.930.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				840 Dokumen	840 Dokumen	109.676.000,00	109.676.000,00	119.902.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			226.270.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				5000 Dokumen	5000 Dokumen	73.407.600,00	73.407.600,00	51.301.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			106.480.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				26 Dokumen	26 Dokumen	115.202.000,00	115.202.000,00	82.174.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			133.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	10.730.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			64.686.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																	

							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				48 Laporan	48 Laporan	212.473.600,00	212.473.600,00	158.968.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			226.270.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	41.640.200,00	41.640.200,00	30.682.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			53.240.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																	
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				184 Dokumen	184 Dokumen	133.036.000,00	133.036.000,00	93.580.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			199.650.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																	

							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	32.765.800,00	32.765.800,00	24.905.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			113.135.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	733.083.200,00	225.940.000,00	443.057.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			359.370.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah persentase cakupan koordinasi dan pelaporan keuangan daerah Persentase cakupan koordinasi dan pelaporan keuangan daerah	-			100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	1.243.229.620,00	974.251.220,00	974.251.220,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		1.385.308.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	76.014.720,00	76.014.720,00	53.850.430,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			46.585.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																	
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				300 Dokumen	300 Dokumen	201.005.100,00	182.710.900,00	201.491.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			346.060.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																	

							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				19 Laporan	19 Laporan	122.970.700,00	56.742.000,00	41.296.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			266.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	168.838.800,00	168.838.800,00	198.252.640,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			190.333.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																	
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	430.504.000,00	304.504.000,00	275.451.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			199.650.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	165.861.000,00	120.788.000,00	102.104.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			106.480.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	78.035.300,00	64.652.800,00	336.737.260,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	-			4 kegiatan	4 kegiatan	161.141.936.095,00	163.493.649.598,00	163.493.649.598,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		175.424.721.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	13.977.668.185,00	12.096.567.195,00	12.096.567.195,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.473.437.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	139.253.523.000,00	143.886.337.500,00	143.199.859.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			133.304.589.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	4.800.000.000,00	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	3.110.744.910,00	3.110.744.903,00	3.110.744.903,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.646.694.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data yang telah diolah dan diimplementasikan melalui sistem informasi Keuangan daerah (SIPD)	-			100 %	100 %	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		939.930.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																	

							Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39.930.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	954.007.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu				100 %	100 %	1.232.332.980,00	1.011.999.990,00	807.644.990,00							2.576.492.266,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase cakupan pengelolaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	1.232.332.980,00	1.011.999.990,00	1.011.999.990,00			-	-	OPD		2.576.492.266,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	216.107.300,00	216.023.300,00	193.176.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			581.438.117,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	19.330.800,00	19.218.800,00	16.102.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			103.640.027,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.378.580,00	26.334.790,00	23.022.590,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			131.745.797,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																	

							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	37.052.400,00	36.940.400,00	17.963.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			131.745.797,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	109.650.000,00	94.048.000,00	50.724.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			434.967.573,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	61.799.000,00	19.732.000,00	17.726.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			240.655.656,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	169.044.100,00	39.432.100,00	31.478.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			189.713.948,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	159.895.300,00	191.839.300,00	153.566.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			205.874.257,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				38 Dokumen	38 Dokumen	57.382.200,00	48.831.200,00	30.791.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			156.086.764,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	

							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	83.782.100,00	21.809.500,00	17.283.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			149.679.955,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	292.911.200,00	297.790.600,00	255.810.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.944.375,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H												**192.837.663.268,00**	**191.457.207.148,00**	**189.592.572.318,81**							**214.041.204.814,00**	

Sumber : SIPD-RI

4.3 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam perannya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memiliki tugas dan fungsi krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD. Penganggaran pendapatan transfer di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) merupakan bagian penting dari perencanaan keuangan daerah yang melibatkan pencatatan dan pelaporan pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain. PPKD, melalui fungsi akuntansinya, bertanggung jawab atas pencatatan transaksi pendapatan transfer, mulai dari penerimaan kas hingga penyusunan laporan keuangan.

Di samping itu BKAD juga mengelola Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Kedua jenis PAD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Dividen yang diterima Pemerintah Daerah dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan komponen pendapatan yang signifikan dan langsung disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana ini berkontribusi pada penguatan perekonomian daerah dan dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat

2) Jasa Giro pada Kas Daerah

Jasa giro berkontribusi terhadap pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari bunga atas dana yang disimpan pemerintah daerah di bank umum, yang kemudian disetor ke kas daerah. Kontribusi ini diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3) Pendapatan Bunga

Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum, sesuai dengan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

4) Penjualan Aset Daerah

Penjualan aset daerah, atau pemanfaatan aset daerah melalui pelepasan seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, atau kerja sama penyediaan infrastruktur, berkontribusi signifikan terhadap pemerintah daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan dan kualitas hidup masyarakat.

5) Pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan kepada pemerintah daerah.

Meskipun bukan merupakan kontribusi positif dalam arti peningkatan kas

daerah, sangat penting untuk memastikan akurasi dan keadilan keuangan serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi anggaran negara. Ini melibatkan proses koreksi dan pengembalian dana yang seharusnya tidak dibayarkan atau dibayarkan secara keliru. Pengembalian ini dilakukan ketika ada kesalahan dalam pembayaran gaji atau tunjangan, seperti kesalahan perhitungan, pembayaran ganda, atau pembayaran kepada individu yang tidak berhak. Dengan mengembalikan dana tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-4
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) BKAD Tahun 2025 s/d 2030

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2024 (Dalam Rp)	Target						Perangkat Daerah Pengampu PAD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Penerimaan dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.097.366.422	10.210.889.000	10.210.889.000	10.210.889.000	10.210.889.000	10.210.889.000	10.210.889.000	BKAD
	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain/Aset Rusak Berat/Usang	48.499.000	93.330.000	111.805.000	130.280.000	148.755.000	167.228.000	170.250.000	
	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.435.460.084	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	
	Pendapatan dari Pengembalin Kelebihan Pembayaran gaji dan Tunjangan PNS	367.440.930	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
	Jumlah	**14.948.766.436**	**15.054.219.000**	**15.072.694.000**	**15.091.169.000**	**15.109.644.000**	**15.128.117.000**	**15.131.139.000**	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2025 merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 tidak terlepas dari Rancangan Awal Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar 2025-2029. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah yang diemban BKAD dalam RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, serta peningkatan pelayanan publik dalam dibidang keuangan daerah dan aset daerah.

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Takalar, Agustus 2025

KEPALA BKAD,

Drs. RAHMANSYAH LANTARA, M.Si.
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19701106 199003 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIALAR

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025 tidak terlepas dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar 2023-2026. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian antaranya adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi serta dukungan sistem elektronik dalam pelayanan publik.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025 mendatang.

Takalar, September 2025

Kepala Dinas,

SYAINAL MANNAN, S.STP.,M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197705051997111001

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR Tabel 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASTIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Sampai dengan Triwulan I 10

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2025 yang terakomodir di APBD 2025..... 20

2.1.2 Evaluasi program kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2025..... 26

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASTIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 30

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025..... 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASTIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas PembangunanDaerah..... 38

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 40

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Semester I Kabupaten Takalar.....9

Tabel II-2 Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang ada dalam APBD 2025.....6

Tabel II-3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan pada APBD.....17

Tabel II-4 Rekapitulasi capaian anggaran Program/Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian..... 21

Tabel II-5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan... 24

Tabel II-6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.....27

Tabel III-1 Kebijakan Nasional (Prioritas Nasional) Dalam RKP Tahun 2025.....29

Tabel III-2 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar 2025.....30

Tabel IV-1 Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025.....33

Tabel IV-2 Pendanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 34

Tabel IV-3 Pendanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Mandatory Spending Pendidikan 34

Tabel IV-4 Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Mandotory Sepnding Infrastruktur pelayanan publik..... 35

Tabel IV-5 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sumber Pendanaan 36

Tabel IV-6 Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025..... 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Keterkaitan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya.....9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 – 2029.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Gambar I-1
Keterkaitan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

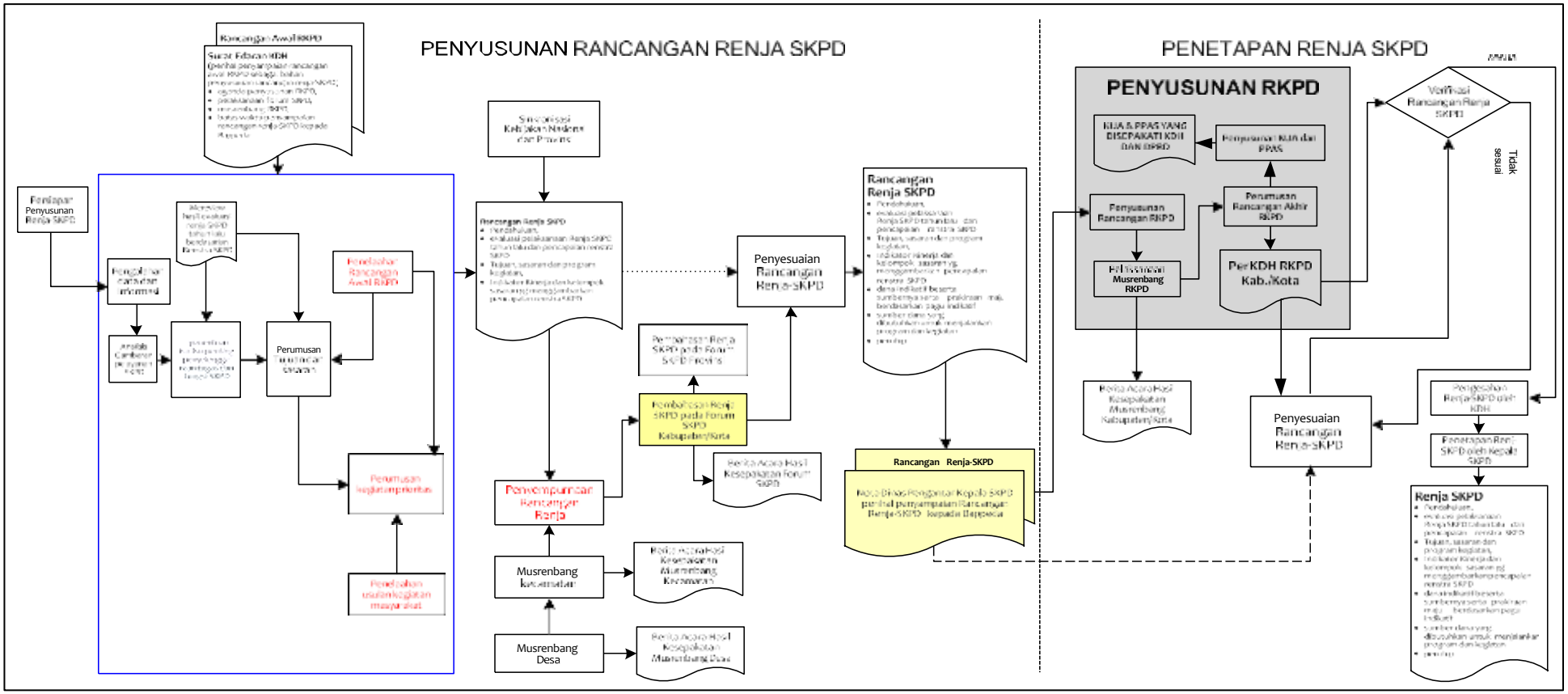

Sumber :

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahn Deerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Teknologi Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 20118 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/kota
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan maksud:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 kedalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Kabupaten Takalar Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Penyusunan Perubahan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang di pergunakan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Sampai Triwulan I Tahun 2025. Pada Bab ini berisi Sub Bab tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada Triwulan I Tahun 2025

BAB III Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar. Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Takalar Tahun 2025. Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan uraian penutup yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan dokumen perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Sampai Dengan Triwulan I

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar menyayikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah di tetapkan.

Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar tahun 2025 sampai pada Triwulan I belum dapat menunjukkan capaian kinerja secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata hanya mencapai 13,99% untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai 48,57% untuk kinerja *output* dan *outcome* kegiatan.

Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar.

Kegiatan evaluasi Renja Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Tabel II-1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sampai pada Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	8		12		25		26 = 25/8 x 100%		29
		02					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100%**	**6.627.912.394**		**964.162.424**	**1%**	**1..324.056.524**	**0,85%**	**19.98%**	
		02	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**		**100%**	**6.478.937.394**	**3%**	**951.296.424**	**3%**	**1.311.190.524**	2,56%	20,24%	
		02	16	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**3.392.470.254**	**8%**	**613.481.224**	**8%**	**613.481.224**	**7,67%**	**18,08%**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMAKSI**
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	02	16	01	2.01		**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Diskominfo**	100%	109.301.860	14,29%	8.306.135	14,29%	8.306.135	14,29%	7,60%	SEKRETARIAT
		02	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	9.104.860	-	1.363.605	-	1.363.605	0%	15%	
		02	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	83.197.000	-	4.719.160	-	4.719.160	0%	6%	
		02	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	4.000.000	1	1.093.220	1	1.093.220	100%	27%	

								Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		02	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	4.000.000	-	185.650	-	185.650	0%	5%	
		02	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	3.000.000	-	508.250	-	508.250	0%	17%	
		02	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	6.000.000	-	436.250	-	436.250	0%	7%	
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	02	16	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi keuangan**	100%	3.156.262.394	15%	578.385.730	15%	578.385.730	15%	18%	SEKRETARIAT
		02	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	392	2.263.912.450	112	576.034.140	112	576.034.140	29%	25%	
								Jumlah ASN yang menerima TPP	336	870.079.944	-	-	-	-	0%	0%	
							Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Jumlah ASN yang menerima Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24	10.320.000	-	-	-	-	0%	0%	

		02	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	4.000.000	-	1.124.600	-	1.124.600	0%	28%	
		02	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	3.950.000	-	313.400	-	313.400	0%	8%	
		02	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	4.000.000	-	913.590	-	913.590	0%	23%	
		02	16	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		100%	6.000.000	0%	870.473	0%	870.473	0%	15%	SEKRETARIAT
		02	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	3.000.000	-	636.370	-	636.370	0%	21%	
		02	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	3.000.000	-	234.103	-	234.103	0%	8%	
		02	16	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas pegawai**	100%	1.500.000	0%	246.800	0%	246.800	0%	16%	SEKRETARIAT
		02	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	2	500.000	-	-	-	-	0%	0%	

		02	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	35	1.000.000	-	246.800	-	246.800	0%	25%	
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	02	16	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum**	100%	42.860.000	0%	13.813.057	0%	13.813.057	0%	32%	SEKRETARIAT
		02	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	3	697.500	-	173.100	-	173.100	0%	25%	
		02	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	3	2.931.171	-	835.407	-	835.407	0%	29%	
		02	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen bahan cetakan dan penggandaan	3	3.131.329	-	909.550	-	909.550	0%	29%	
		02	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50	36.100.000	-	11.895.000	-	11.895.000	0%	33%	
		02	16	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		100%	1.000.000	0%	238.809	0%	238.809	0%	24%	SEKRETARIAT
		02	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10	1.000.000	-	238.809	-	238.809	0%	24%	
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	02	16	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan**	100%	44.056.000	16%	7.400.220	16%	7.400.220	16%	17%	SEKRETARIAT
		02	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3	1.056.000	-	219.000	-	219.000	0%	21%	

		02	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	1.000.000	-	181.220	-	181.220	0%	18%	
		02	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	60	42.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	17%	17%	
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	02	16	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	100%	31.490.000	17%	4.220.000	17%	4.220.000	17%	13%	SEKRETARIAT
		02	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	31.490.000	1	4.220.000	1	4.220.000	17%	13%	
		02	**16**	**02**			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah**	**100%**	**1.425.319.240**	**0%**	**316.216.800**	**0,00%**	**316.216.800**	**0,00%**	**22,19%**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMAKSI**
	Terselenggaranya Kehumasan, Komunikasi dan Informasi Publik dalam rangka keterbukaan informasi publik	02	16	02	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**	**Persentase tata kelola informasi dan komunikasi publik**	100%	1.425.319.240	0%	316.216.800	0%	316.216.800	0,00%	22,19%	
		02	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	262.819.240	-	20.277.180	-	20.277.180	0%	8%	
		02	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	1	12.500.000	-	2.040.620	-	2.040.620	0%	16%	
		02	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1	1.150.000.000	-	293.899.000	-	293.899.000	0%	26%	

		02	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi**	**100%**	**1.661.147.900**	**0%**	**8.732.400**	**0%**	**381.492.500**	**0,00%**	**22,97%**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMAKSI**
	Meningkatnya dukungan sistem elektronik dalam pelayanan publik	02	16	03	2.01		**Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa**	100%	52.650.000	0%	1.349.500	0%	1.349.500	0,00%	2,56%	
		02	16	03	2.01	04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa**	1	52.650.000	-	1.349.500	-	1.349.500	0,00%	2,56%	
	Meningkatnya dukungan sistem elektronik dalam pelayanan publik	02	16	03	2.02		**Pengelolaan E Goverment di lingkup Pemerintah DaerahKabupaten /Kota**	**Persentase tata kelola e-government**	100%	1.608.497.900	0%	7.382.900	0%	380.143.000	0,00%	23,63%	
		02	16	03	2.02	14	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	Jumlah Dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1	6.155.900	-	2.292.900	-	2.292.900	0,00%	37,25%	
		02	16	03	2.02	15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemda	1	51.626.200	-	1.871.900	-	1.871.900	0,00%	3,63%	
		02	16	03	2.02	17	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan arsitektur SPBE pemerintah daerah	1	40.564.000	-	1.516.100	-	1.516.100	0,00%	3,74%	
		02	16	03	2.02	22	Koordinasi Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh perangkat daerah dan	1	16.444.000	-	1.702.000	-	1.702.000	0,00%	10,35%	

								disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah									
		02	16	03	2.02	23	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program kabupaten/kota cerdas	28	1.493.707.800	-	372.760.100	-	372.760.100	0,00%	24,96%	
		02					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
		02	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**		**100%**	**138.975.000**	**0%**	**8.461.700**	**0%**	**8.461.700**	**0,00%**	**6,09%**	
		02	**20**	**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik sektoral**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan daerah**	**100%**	**138.975.000**	**0,00%**	**8.461.700**	**0,00%**	**8.461.700**	**0,00%**	**6,09%**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMAKSI**
	Tersusunnya data Pembangunan dan statistik terintegrasi	02	20	02	2.01		**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase terselenggaranya statistik sektoral**	100%	138.975.000	0,00%	8.461.700	0,00%	8.461.700	0,00%	6,09%	
		02	20	02	2.01	7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	1	10.000.000	-	3.212.000	-	3.212.000	0%	32%	
		02	20	02	02.01	9	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	1	105.000.000	-	2.854.000	-	2.854.000	0%	3%	
		02	20	02	02.01	10	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1	23.975.000	-	2.395.700	-	2.395.700	0%	10%	
		02					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
		02	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		**100%**	10.000.000	**0%**	4.404.300	**0%**	4.404.300	0,00%	44,04%	

		02	21	02			**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase Tingkat keamanan Informasi Pemerintah**	**100%**	**10.000.000**	**0%**	**4.404.300**	**0,00%**	**4.404.300**	**0,00%**	**44,04%**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMAKSI**
	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dalam rangka perlindungan data perangkat daerah	02	21	02	2.01		**Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Persentase pengamanan informasi pemerintah**	100%	10.000.000	0,00%	4.404.300	0,00%	4.404.300	0,00%	44,04%	
		02	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1	5.000.000	-	1.488.300	-	1.488.300	0%	30%	
		02	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	10	5.000.000	-	2.916.000	-	2.916.000	0%	58%	

Sumber data : Monev Tw 1 Tahun 2025

Pada tabel II.1 menjelaskan bahwa tidak ada program yang memenuhi target kinerja 25% pada triwulan 1 tahun 2025 penyebab dapat dilihat pada faktor, yiatu:

Faktor yang mempengarahui pencapaian kinerja tidak mencapai target 25% sampai triwulan 1 Tahun 2025:

1. keterlambatan perencanaan dan penganggaran Proses perencanaan kegiatan dan penganggaran mengalami keterlambatan di awal tahun. Hal ini berdampak langsung pada waktu pelaksanaan program, sehingga beberapa kegiatan belum dapat dimulai sesuai jadwal
2. Hambatan administratif dan regulasi terdapat kendala dalam proses administratif, seperti keterlambatan penandatanganan dokumenatau revisi peraturan teknis
3. Keterbatasan sumber daya maupun teknis yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan
4. Rendahnya serapan anggaran karena sebagian besar kegiatan berada dalam tahap persiapan atau proses administrasi. Ini berkontribusi terhadap rendahnya capaian kinerja fisik
5. namun pada realisasi keuangan ada yang sudah melewati target.

Namun pada realisasi keuangan sudah ada 1 program dan 1 Kegiatan yang mencapai realisasi di atas 25%, adapun faktor pendukung realisasi keuangan yaitu:

1. Kesiapan Administratif dan Proses Awal yang Cepat seperti DPA, RAB, dan kontrak mumungkinkan realisasi keuangan dapat berjalan lebih cepat.
2. Pelaksanaan kegiatan rutin, realisasi anggaran banyak di dorong oleh kegiatan rutin seperti belanja pegawai, opersional kantor, rapat koordinasi dan perjalanan dinas.
3. Output belum dapat diukur meskipun kegiatan telah berjalan dan dana sudah terealisasi belumdapat dilaporkan karena belum mencapai tahap penyelesaian, masih menunggu hasil evaluasi/verifikasi dan diukur secara kumulatif di akhir kegiatan
4. Perbedaan waktu antara serapan dan capaian fisik, ada jeda waktu antara pencairan anggaran dan penyelesaian kegiatan. Pembayaran dilakukan di awal atau tegah proses, sementara pelaporan kinerja dilakukan setelah kegiatan selesai ataupun output terlihat secara nyata.

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 yang terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar pada Tahun 2025, Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Table II-2
Tabel Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	5	13	38	5	13	39

Sumber: Renja Pokok 2025, SIPD 2025 dan MONEV TW 1

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 5, jumlah kegiatan 13, dan jumlah sub kegiatan 38, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 5, jumlah indikator kegiatan sebanyak 39.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud

dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel II.3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Takalar
Tahun 2025 Sampai Triwulan I

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	*(Rp)*	*Fisik*	*Keu*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	3.392.470.254,00	613.481.224,00	7.67	18,08
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.425.319.240,00	316.216.800	0	22,19
3	Pengelolaan Aplikasi Informatik	1.661.147.900,00	381.492.500	0	22,97
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	138.975.000,00	8.461.700	0	6,09
5	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	10.000.000,00	4.404.300	0	44,04
	Total	**6.627.912.394**	**1.324.056.524**	**2.85%**	**19.98%**

Sumber : Laporan Monev Renja Diskominfo Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 1.324.056.524, anggaran tersebut digunakan dalam 5 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 19.98% dengan capaian realisasi fisik sebesar 2.85%. Kondisi ini menunjukkan rata-rata capaian realisasi fisik yang belum maksimal karena pelaksanaan kegiatan baru berjalan 3 bulan. Dari 5 program yang ada belum ada yang telah mencapai realisasi kinerja di atas 20%.

Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian hingga triwulan I dalam kategori tinggi yaitu >20 persen sebanyak 3 (Tiga) Program atau 60 persen dari keseluruhan program, kategori sedang yaitu >10 - <20persen sebanyak 1 (Tiga) Program atau 20 persen dari jumlah keseluruhan Program, , dan sebanyak 1(Satu) Program atau 20 persen dari jumlah keseluruhan Program dengan realisasi anggaran yang tergolong masih rendah dengan serapan anggaran kurang dari <10 persen.

2.12.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 sampai pada Triwulan I

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >10– 20% dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 20% . Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program, anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian terdapat 5 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah sebanyak 1 program atau 20 Persen (realisasinya 0-10persen) yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program atau 20 persen (realisasi >10-20 persen) yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota, dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 3 program atau 60 persen (realisasi diatas 20 persen), yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pubik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 13 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 3 kegiatan atau 23,07 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 5 kegiatan atau 38,46 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 5 kegiatan atau 38,46 persen.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 39 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 13 sub kegiatan atau 35,89 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 7 sub kegiatan atau 17,94 persen, dan 18 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau 46,15 persen sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

TABEL II.4
REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan		
		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	5	1	1	3	13	3	5	5	38	13	7	18

Sumber : Monev Renja Diskominfo Triwulan I Tahun 2025

Keterangan:

0-10 Rendah
>10-20 Sedang
>20 Tinggi

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** untuk realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.Kegiatan evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut; untuk pencapaian target kinerja program pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat dijelaskan bahwa dari 5 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I, terdapat 5 Program atau 100% program yang masuk pada kategori rendah atau dibawah 10 persen yaitu Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 13 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I terdapat 9 kegiatan atau 69,23 persen yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 10 persen dan selebihnya terdapat 4 kegiatan atau 30,76 persen yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian 10-20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari

38 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 34 sub kegiatan atau 89,74 persen, capaian kinerja masuk dalam kategori sedang sebanyak 2 sub kegiatan atau 5,26 persen dan capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 2 sub kegiatan atau 5,26 persen , yaitu pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL II.5
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome		
			0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	5	5	-	-	13	9	4	-	38	34	2	2

Sumber : Laporan Monev Renja Diskominfo Triwulan I Tahun 2025

Keterangan:

0-10	Rendah
>10-20	Sedang
>20	Tinggi

2.2 Analisis Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metedologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, yakni 1) Sederhana, 2) Partisipatif, 3). Akuntabel, 4) Berkelanjutan, 5) Transparansi dan 6) Keadilan. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas menyediakan saluran komunikasi resmi pemerintah, penyelenggaraan pejabat pengelolaan informasidan dokuemntasi (PPID), membuat dan pengelolaan aplikasi pelayanan publik online, penyediaan infrastruktur server, jaringan dan pusat data, fasilitasi akses internet gratis di ruang publik, (wifi gratis/internet desa), perluasan jaringan komunikasi dan internet ke daerah terpencil, peningkatan kualitas layanan infrastruktur digital.

Agar sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat tercapai , maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Ada beberapa indikator kinerja yang dapat diukur untuk melihat capaian pelayanan kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran Dinas strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian oleh Kepala Dinas. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Organisasi. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RENSTRA Dinas strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RENSTRA yang digariskan pada Tahun 2025. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Penetapan Target indikator kinerja utama Dinas strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini;

TABEL II.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar

No	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Indeks Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik	Belum Dinilai	Belum Dinilai	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik, Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	75	80	85		80	85	
2	Persentase penerapan e-goverment yang terintegrasi	80%	51%	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	50	70	80		70	80	
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	50	10	Indeks SPBE/Indeks PEMDI (Pemerintah Digital)	2.90	3.00	3.50	2.80	3.00	3.50	
4	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kab. Takalar	80:20	60:40	Indeks Pembangunan Statistik	2.6	3.0	3.25	2.11	3.0	3.25	
5	Persentase penyediaan data statistik sektoral	100%	80%	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	129	255	381		255	381	
6	Ketersediaan Metadata statistik sektoral	Ada	Ada	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	75.00	80.00	85.00	70.02	80.00	85.00	
7	Persentase tingkat pengamanan informasi	50%	20%	Tingkat literasi digital ASN Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	100%	100%	100%	75%	100%	100%	

8	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi sebagai jaring keamanan dalam komunikasi dan perlindungan data perangkat daerah	57,14%	2,63%	
9	Indeks reformasi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B	B	
10	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B	B	

Sumber: Renstra 2023-2026

Pada tabel di atas menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024. Untuk Nilai Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik belum dapat dinilai karena proses evaluasi resmi oleh Kementrian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai instansi penilai nasional masih dalam tahap pelaksanaan atau belum dijadwalkan untuk tahun berjalan. Selain itu, penilaian Indeks SPBE dilakukan secara periodik (tidak setiap tahun) dan memerlukan mekanisme evaluasi menyeluruh yang mencakup pengisian mandiri oleh instansi, pengumpulan bukti dukung, hingga proses verifikasi dan validasi oleh evaluator pusat. Hingga akhir periode pelaporan, hasil resmi indeks SPBE belum diterbitkan.

Untuk indikator Persentase Penerapan e-Government yang Terintegrasi menunjukkan realisasi 51% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Ketidaktercapaian ini disebabkan karena kolaborasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk melakukan integrasi dengan beberapa aplikasi atau aplikasi lainnya dan terbatasnya anggaran untuk melakukan integrasi di beberapa aplikasi

KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat yang secara aktif mengelola informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah masyarakat Untuk indikator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan mencapai 10% jauh di tetapakan yaitu karena keterbatasan anggaran dan fasilitasi, minimnya sumber daya manusi pendamping, kurangnya kesadaran dan komitmen di tingkat kecamatan, tantangan inftrastruktur dan teknologi, dan proses sosialisasi dan edukasi yang belum maksimal, pada tahun 2024 cuman ada 2 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Untuk indikator Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kab. Takalar mencapai 60:40 dibawah terget yang telah ditetapkan 80:20 capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu isu-isu strategis dan kontroversial, penyampaian informasi dan humas yang belum optimal, pengaruh media sosial dan berita tidak terverifikasi, dan keterbatasan pengelolaan krisis dan respon cepat.

Untuk indikator Persentase penyediaan data statistik sektoral mencapai 80% masih di bawah target yang di tetapkan yaitu 100% disebabkan beberapa kendala yaitu keterbatasan kapasitas pengelola data, kurangnya standarisasi dan singkronisasi data, tantangan teknis dan infrastruktur, proses validasi dan verfikasi yang memakan waktu.

Untuk indikator ketersediaan meta data Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil memenuhi komitmennya dalam menyediakan metadata statistik sektoral yang menjadi elemen penting dalam pembangunan sistem statistik daerah yang terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk Indikator Persentase Tingkat Pengamanan Informasi hanya mencapai 20% dari target yang ditetapkan sebesar 50% Capaian ini mencerminkan bahwa upaya perlindungan terhadap aset informasi pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Faktor

penyebab rendahnya realisasi adalah Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Teknologi, Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan Keamanan Informasi, Rendahnya Kesadaran dan Literasi Keamanan Siber, Belum Tersusunnya Dokumen Strategis Pendukung, Pengamanan Masih Bersifat Parsial.

Untuk indikator Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi sebagai jaring keamanan dalam komunikasi dan perlindungan data hanya mencapai 2,63% dari target sebesar 57,14%**.** Ini berarti baru 1 dari 38 perangkat daerah yang telah menerapkan mekanisme pengamanan informasi melalui sistem persandian secara memadai. Faktor penyebab Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah tentang Urgensi Penggunaan Sandi, Ketiadaan Regulasi Internal yang Mengikat, Terbatasnya Sosialisasi dan Pendampingan Teknis, Keterbatasan SDM dan Infrastruktur, dan Keterlambatan dalam Implementasi Program Pengamanan Informasi Terpusat.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar sampai TW 1 Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik, Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian pada tahun 2025 ditetapkan target B namun realisasi kinerja sampai TW 1 Tahun 2025 yaitu belum di nilai karena survei kepuasa masyarakat belum dilaksanakan pada periode ini.
2. Indeks Keterbukaan Informasi publik pada tahun 2025 ditetapkan target 50 dan realisasi kinerja pada Tw 1 tahun 2025 yaitu belum di nilai di sebabkan oleh belum dilaksanakannya kegiatan pengukuran atau penilaian IKIP secara forma, baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh komisi informasi Selain itu, belum optimalnya pengelolaan sistem informasi publik, keterbatasan sumber daya manusia PPID, serta belum tersedianya data pendukung menjadi faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target tersebut
3. Indeks SPBE/Indeks PEMDI (Pemerintah Digital) pada tahun 2025 ditetapkan target 2.90 dan realisasi kinerja pada Tw 1 tahun 2025 yaitu 2.80 Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPBE di pemerintah daerah telah berjalan dengan baik dan terus mengalami kemajuan, terutama dalam aspek kebijakan internal SPBE, pengelolaan layanan digital, dan keamanan informasi**.**
4. Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2025 ditetapkan target 2.60 dan realisasi kinerja pada Tw 1 tahun 2025 yaitu 2.11 nilai ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik di pemerintah daerah masih berada pada tahap “Berkembang”**,** dengan beberapa capaian positif terutama pada aspek koordinasi kelembagaan statistik dan ketersediaan metadata statistik sektoral**.**
5. Indeks keamanan informasi (Indeks KAMI) pada tahun 2025 ditetapkan target 129 dan realisasi kinerja pada Tw 1 tahun 2025 belum tersedia dikarenakan proses pengukuran dan penilaian keamanan informasi belum dilaksanakan secara formal oleh instansi yang

berwenang atau masih dalam tahap persiapan internal.

6. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Target yang ditetapkan adalah memperoleh nilai 75,00 Pada Triwulan I tahun 2025, penilaian SAKIP oleh Inspektorat belum dilaksanakan sehingga belum terdapat data realisasi. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian perlu mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar saat penilaian dilakukan hasilnya dapat sesuai target.
7. Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Satatistik dan Persandian Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi pada triwulan I juga telah mencapai 100%, sehingga capaian ini hampir memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, dari 25 ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, semua ASN mampu mengoperasikan komputer, sehingga menghasilkan tingkat literasi digital sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital sudah cukup baik untuk mendukung tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Namun, peningkatan kapasitas masih tetap diperlukan agar literasi digital ASN semakin optimal dalam menunjang efektivitas, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

2.2 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

2.2.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan Triwulan I

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada triwulan 1 dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses pengajuan kontrak ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya;
3. Keterbatasan infrastruktur jaringan akibatnya masih banyak daerah terutama desa terpencil atau blank spot yang belum terjangkau jaringan stabil
4. Jumlah dan kompetensi SDM TIK, keamanan informasi dan pengelola data masih belum memadai di seluruh OPD.
5. Rendahnya literasi digital masyarakat dan ASN seperti masyarakat belu terbiasa menggunakan layanan digital (misal aplikasi pengaduan, informasi online, TTE) dan ASN masih banyak yang belum melek digital sehingga digitalisasi pelayanan belum berjalan lancar

2.2.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan Triwulan I

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang dilaksanakan tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja :

1. Peningkatan Infrastuktur TIK;

2. Digitalisasi layanan publik (SPBE);
3. Penguatan pengelolaan informasi publik dan media pemerintah
4. Penguatan statitik sektoral dan impementasi satu data
5. Peningkatan kapasitas SDM dan Literasi Digital

2.2.3 Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian tahun 2025 sampai dengan Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan uraian di atas terkait faktor penghambat pencapaian kinerja, serta upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, maka Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta pengendalian dan evaluasi internal yang dilakukan secara terus menerus;
2. Perlunya Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan;

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

3.1.1 Tema Pemabngunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

3.1.2 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rancangan RKP Tahun 2024 adalah :



Berikut Prioritas Nasional yang terkait dengan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika,

- PN 1 : Memperkokoh ideology Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
- PN 2 : Memantapkan system pertahanan kemananan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- PN 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infastruktur;
- PN 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesahatan, prestasi olahrag

- PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Salah satu elemen utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah pemerintahan yang efektif dan transparan dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam peningkatan kapasitas riset dan inovasi untuk pencapaian daya saing Indonesia pada tataran global, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar harus mampu menciptakan suatu inovasi pelayanan public untu dapat mengatasi permasalahan yang di hadapi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Kebijakan Nasional dan Program Prioritas dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai wujud implementasi dari Prioritas Nasional yang merupakan misi dari presiden maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Serta mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, sehingga melalui Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Komunikasi dan Informasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar sebagai Instansi pelaksana urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian di tingkat daerah, berupa pelayanan Peningkatan Infrastuktur TIK, Digitalisasi layanan publik (SPBE), Penguatan pengelolaan informasi publik dan media pemerintah, Penguatan statitik sektoral dan impementasi satu data, Peningkatan kapasitas SDM dan Literasi Digital.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian yaitu "**Meningkatnya pelayanan penyelenggaran pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital**" untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 5 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah
2. Sasaran 2 : Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
3. Sasaran 3 : Meningkatnya akurasi dan pemutakhiran data sektoral yang terpublikasi dalam portal satu data kabupaten
4. Sasaran 4 : Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah
5. Sasaran 5 : Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.2
Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra Diskominfo 2023-2026)			Perubahan Renja Tahun 2025 (Renstra Diskominfo 2025-2029)		
Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Target 2025**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**
Tujuan 1: Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum Dinilai	**Tujuan:** Meningkatnya pelayanan penyelenggaran pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	75
Sasaran 1.1 : Meningkatnya dukungan sistem elektronik dalam pelayanan publik	Persentase penerapan e-government yang terintegrasi	100%	**Sasaran 1 :** Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	50
Sasaran 1.2 Terselenggaranya Kehumasan, Komunikasi dan Informasi Publik dalam rangka keterbukaan informasi publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	80	**Sasaran 2 :** Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digital	2,90
	Rasio berita positif dan negatif di media tentang pemerintah Kab. Takalar	80:20	**Sasaran 3 :** Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah	Indeks Pembangunan Statistik	2,11

Tujuan 2: Meningkatnya pelayanan statistik sektoral di Lingkup Kabupaten Takalar	Persentase penyediaan data statistik sektoral	100%	**Sasaran 4 :** Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Indek Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	129
Sasaran 2.3: Tersusunnya data pembangunan dan statistik terintegrasi	Ketersediaan Metadata statistik sektoral	Ada	**Sasaran 5 :** Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	75,00
Tujuan 3 : Peningkatan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase tingkat pengamanan informasi	75%		Tingkat literasi digital ASN Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	100%
Sasaran 3.4 : Meningkatnya pengelolaan persandian dalam rangka perlindungan data perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang telah mengguakan sandi sebagai jaringan keamanan dalam komunikasi dan perlindungan data perangkat daerah	85,71%			
Tujuan 4: Meningkatkan tata kelola pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B			

Sasaran 4.5 : Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B	

Sumber : Sumber: Renstra Diskominfo 2023-2026, Renstra Diskominfo 2025-2029

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Takalar Super Apps Oneclick	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemda Pengelolaan e-government di Lingkup Pemda	Fasilitasi peyelenggaraan spbe di lingkungan pemda Fasilitasi peyelenggaraan spbe di lingkungan pemda	**2.534.768.200**
2	Layanan Desa (Digital Desa/Kelurahan)			

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 dengan total pagu Rp dapat dilihat pada tabel dibawah ini

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah adanya perubahan dalam rencana kerja, yang diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang baru untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah KabupatenTakalar.

Di dalam Perubahan Renja Tahun 2025 ini terdapat rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar, dimana di dalammya terdapat 5 Program, 13 Kegiatan serta 38 Sub Kegiatan, dimana untuk penyebaran kegiatannya adalah untuk kegiatan rutin berlokasi di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar, sedangkan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada kecamatan ataupun desa/kelurahan, dan kegiatan yang sifatnya koordinasi selain berlokasi pada daerah setempat yakni pada pemerintah daerah Kabupaten Takalar serta ada juga yang berlokasi di luar daerah.

Jumlah dana yang program ,kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud bersumber dari Dana Alakosi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp. 12.461.973.915.

Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2025 beserta pendanaan diharapkan dapat terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kominfo-SP dapat dilihat pada tabel IV. 2 berikut :

Tabel IV-2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TAKALAR 2025

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN							**4.903.726.129**	**6.627.912.394**	**12.461.973.915**	**7.558.247.786**							**5.459.439.415**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.903.726.129**	**6.627.912.394,00**	**12.461.973.915,00**	**7.558.247.786,00**							**5.459.439.415,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**4.873.726.129,00**	**6.478.937.394,00**	**12.378.175.215,00**	**7.504.449.086,00**							**5.429.439.415,00**	
1,	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**3.063.626.129,00**	**3.392.470.254,00**	**3.310.258.255,00**	**535.714.166,00**							**3.599.340.295,00**	

	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	109.301.860,00	55.208.430,00	30.208.430,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.00001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	9.104.860,00	4.430.790,00	430.790,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																Pelayanan Publik				
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	83.197.000,00	39.314.510,00	35.314.510,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	2.815.910,00	-1.184.090,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	3.029.370,00	-970.630,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																Pelayanan Publik				
	2.16.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	1.888.640,00	-1.111.360,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.729.210,00	-2.270.790,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.882.097.300,00	3.156.262.394,00	3.150.967.734,00	268.870.434,00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.400.740.295,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	2.870.097.300,00	3.144.312.394,00	3.144.312.394,00	274.215.094,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.388.740.295,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	2.257.000,00	-1.743.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelol			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

															a Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.950.000,00	2.464.600,00	-1.535.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.933.740,00	-2.066.260,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/ Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	4.413.040,00	-1.586.960,00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.384.430,00	-615.570,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.028.610,00	-971.390,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.333.770,00	-166.230,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		14.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	36 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	500.000,00	500.000,00	450.170,00	-49.830,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	883.600,00	-116.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	37.428.829,00	42.860.000,00	22.616.400,00	-14.812.429,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		41.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	697.500,00	697.500,00	697.500,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.000.000,00	2.931.171,00	1.642.651,00	-1.357.349,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.131.329,00	3.131.329,00	2.416.249,00	-715.080,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	30.600.000,00	36.100.000,00	17.860.000,00	-12.740.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3 2.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	899.211,00	-100.789,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	899.211,00	-100.789,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	84.600.000,00	44.056.000,00	43.329.670,00	-41.270.330,00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan	-		84.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																Pelayanan Publik				
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	-48.944.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	273.670,00	-726.330,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33.600.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	8.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			33.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																Pelayanan Publik					
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	26.000.000,00	31.490.000,00	31.490.000,00	5.490.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		26.380.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan				6 Unit	6 Unit	26.000.000,00	31.490.000,00	31.490.000,00	5.490.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.380.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

			Pajaknya													6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
2,	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**880.000.000,00**	**1.425.319.240,00**	**2.497.935.700,00**	**0,00**							**880.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	880.000.000,00	1.425.319.240,00	2.497.935.700,00	1.617.935.700,00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		880.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		

			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				2 Komunitas	2 Komunitas	850.000.000,00	1.150.000.000,00	2.049.900.000,00	1.199.900.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			850.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	1 Permohonan	12.500.000,00	12.500.000,00	207.235.810,00	194.735.810,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																Pelayanan Publik				
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	2 Media	17.500.000,00	262.819.240,00	240.799.890,00	223.299.890,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3,	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**930.100.000,00**	**1.661.147.900,00**	**6.569.981.260,00**	**19.999.120,00**							**950.099.120,00**	

	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	10.000.000,00	52.650.000,00	51.889.880,00	41.889.880,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		9.999.880,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	52.650.000,00	51.889.880,00	41.889.880,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			9.999.880,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																Pelayanan Publik				
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	920.100.000,00	1.608.497.900,00	6.518.091.380,00	5.597.991.380,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		940.099.240,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis																		
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	6.155.900,00	4.733.900,00	233.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.999.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	51.626.200,00	2.537.768.200,00	2.534.768.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.999.770,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		

			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	40.564.000,00	39.194.080,00	35.194.080,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi				1 Dokumen	1 Dokumen	3.570.000,00	16.444.000,00	9.845.800,00	6.275.800,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan			4.999.720,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

			perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah												Pelayanan Publik				
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																	
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				28 unit	28 unit	905.030.000,00	1.493.707.800,00	3.926.549.400,00	3.021.519.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			913.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**20.000.000,00**	**138.975.000,00**	**76.954.700,00**	**56.954.700,00**							**20.000.000,00**	

1,	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**138.975.000,00**	**76.954.700,00**	**0,00**							**20.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	20.000.000,00	138.975.000,00	76.954.700,00	56.954.700,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	5.884.000,00	-4.116.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelol			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																a Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2.20.02.2.01.00 09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	5.000.000,00	105.000.000,00	52.902.300,00	47.902.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.00 10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		

			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	23.975.000,00	18.168.400,00	13.168.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**6.844.000,00**	**-3.156.000,00**							**10.000.000,00**	
1,	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**6.844.000,00**	**0,00**							**10.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	10.000.000	10.000.000	6.844.000	-3.156.000			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

															6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	2.21.02.2.01.00003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	3.084.000	-1.916.000	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/ Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.00004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	3.760.000	-1.240.000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	J U M L A H								**4.903.726.129**	**6.627.912.394**	**12.461.973.915**	**20.817.255.718**							**5.459.439.415**	

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pendanaan karena adanya pergeseran, penambahan, maupun pengurangan anggaran karena adanya efesiensi anggaran. Terdapat 5 Program, 13 Kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pendanaan adalah sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 3.063.626.129, setelah parsial 3 mengalami penambahan anggaran menjadi Rp**.** 3.392.470.254, dan pada anggaran perubahan terjadi pengurangan anggaran menjadi Rp. 3.310.258.255, pada program ini terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 535.714.166. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa kegiatan pada program ini yang mengalami efesiensi. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah :
    - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 25.000.000 dan setelah mengalami perubahan pada parsial 3 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 109.301.860, dan pada anggaran perubahan anggaran menjadi Rp. 55.208.430. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 30.208.430, pada kegiatan ini terjadi penambahan dan pengurangan pada 3 sub kegiatan yaitu :
        - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran pokok sebesar Rp. 4.000.000, setelah parsial 3 mengalami penambahan anggaran sebrsar Rp. 9.104.860 dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 4.430.790, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 430.790.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 4.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran pada parsial 3 menjadi Rp. 83.197.000, dan pada perubahan anggaran menjadi 39.314.510 ada penambahan sebesar 35.314.510.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 4.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.815.910, terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.184.090
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 4.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 3.029.370, terjadi pengurangan sebesar Rp. 970.630
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.888.640, terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.111.360
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 6.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 3.729.210, terjadi pengurangan sebesar Rp. 2.270.790

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 2.882.097.300, setelah mengalami parsial 3 anggaran menjadi Rp. 3.156.262.394 dan pada perubahan anggaran menjadi Rp. 3.150.967.734 Kegiatan ini mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 268.870.434, pengurangan terjadi pada 2 sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran pokok sebesar Rp. 2.870.097.300 dan perubahan anggaran menjadi Rp3.144.312.394, terjadi penanbahan sebesar Rp. 274.215.094.
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 4.000.000, dan pada perubahan mengalami penurunan anggaran menjadi Rp. 2.275.000, terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.743.000
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD , anggaran

pokok sebesar Rp. 4.000.000, setelah mengalami parsial 3 anggaran menjadi Rp. 3.950.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.464.600. terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.535.400

- Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, anggaran pokok sebesar Rp 4.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp 1.933.740, terjadi pengurangan sebesar Rp. 2.066.260

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 6.000.000 dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp4.413.040. Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.586.960, pengurangan terjadi pada 2 sub kegiatan yaitu :
  - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.384.430, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 615.570.
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.028.610, terjadi pengurangan sebesar Rp. 971.390.
- Admnistrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 1.500.000 dan setelh mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.333.770, terjadi pengurangan anggaran pada 2 sub kegiatan yaitu
  - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasrkan tugas dan fungsi, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 500.000 dan setelah mengalami perubahan sebesar Rp. 450.170, terjadi pengurangan sebesar Rp. 49.830
  - Sosialisasi peraturan perundang-undangan, anggaran pokok sebesar Rp. 1.000.000dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 883.600, terjadi pengurangan sebesar Rp. 116.400
- Administrasi Umum Perangkat Daerah , dengan anggaran pokok sebesar Rp. 37.428.829, setelah mengalami parsial 3 anggran sebesar Rp 42.860.000, dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 22.616.400. Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 14.812.429, perubahan anggaran terjadi pada 3 sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran pokok sebesar Rp.

3.000.000, setelah mengalami parsial 3 anggaran sebesar Rp. 2.931.171 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.642.651, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 1.357.394.

- Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan, anggaran pokok sebesar Rp. 3.313.329, dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.416.249, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 715.080.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 30.600.000, setelah mengalami parsial 3 anggaran menjadi Rp 36.100.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 17.860.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 12.740.000.

- Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 1.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 899.211, terjadi pengurangan sebesar Rp. 100.789
  - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 1.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 899.211, terjadi pengurangan sebesar Rp. 100.789
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 84.600.000, setelah parsial 3 anggaran sebesar Rp. 44.056.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 43.329.670, Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 41.270.330, pengurangan anggaran terjadi pada 2 sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran pokok Rp. 50.000.000 namun setelah pengurangan menjadi sebesar Rp. 1.056.000terjadi pengurangan anggaran sebesar 48,944,000.
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran pokok sebesar Rp. 1.000.000 dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 273.670, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 726.330.
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, anggaran pokok sebesar Rp. 26.000.000, setelah mengalami parsial 31.490.000, kegiatan ini mengalami penguragan anggaran terjadi pada 1 sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan, anggaran pokok sebesar Rp. 26.000.000, setelah mengalami parsial sebesar 31.490.000, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 5.490.000

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 880.000.000, setelah parsial 3 sebesar Rp. 1.425.319.240 dan setelah perubahan menjadi Rp**.** 2.497.935.7000, Hal ini terjadi karena kegiatan pada program ini yang mengalami efesiensi. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah :
   - Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 880.000.000, setelah parsial 3 sebesar Rp 1.425.319.240 dan setelah mengalami perubahan sebesar Rp. 2.497.935.700, mengalami anggaran menjadi Rp 1.617.935.700
     - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, anggaran pokok sebesar Rp. 850.000.000, setelah mengalami parsial sebesar 1.150.000.0000, dan

setelah mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 2.049.900.000, mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 1.199.900.000

- Pelayanan informasi publik, anggaran pokok sebesar Rp. 12.500.000, dan setelah mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 207.235.810, mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 194.735.810
- Pengelolaan media komunikasi publik, anggaran pokok sebesar Rp. 17.500.000, setelah mengalami parsial sebesar 262.819.240, dan setelah mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 240.799.890, mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 223.299.890.

3. Program Pengelolaan aplikasi informatika, mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 930.100.000, setelah parsial 3 sebesar Rp. 1.661.147.900 dan setelah perubahan menjadi Rp. 6.569.981.260, Hal ini terjadi karena kegiatan pada program ini yang mengalami efesiensi. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah :

- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, anggaran pokok sebesar Rp. 10.000.000, setelah parsial 3 sebesar Rp. 52.650.000, dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 51.889.880
  - Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa, anggaran pokok sebesar Rp 10.000.000, setelah parsial 3 sebesar Rp. 52.650.000, dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 51.889.880, terjadi penambahan 41.889.880
- Pengelolaan e-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, anggaran pokok sebesar Rp. 920.100.000, setelah parsial 3 menjadi Rp 1.608.497.900 dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp 6.518.091.380. Terjadi penambahan anggaran sebenyak 5 sub kegiatan adalah:
  - Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis , anggaran pokok sebesar Rp 4.500.000, setelah parsial 3 sebesar Rp. 6.155.900, dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 4.733.900, terjadi penambahan 233.900
  - Fasilitasi penyelenggan SPBE di lingkungan Pemda anggaran pokok sebesar Rp 3.000.000, setelah parsial 3 sebesar Rp. 51.626.200, dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 2.537.768.200, terjadi penambahan 2.534.768.200
  - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi , anggaran pokok sebesar Rp 4.000.000, setelah parsial 3 sebesar Rp. 40.564.000, dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 39.194.080, terjadi penambahan 35.194.080

- Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah , anggaran pokok sebesar Rp 3.570.000, setelah parsial 3 sebesar Rp. 16.444.000, dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 9.845.800, terjadi penambahan 6.275.800
- Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas , anggaran pokok sebesar Rp 905.030.000, setelah parsial 3 sebesar Rp1.493.707.800, dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 3.926.549.400, terjadi penambahan 3.021.519.400

4. Program Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota, mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 20.000.000, setelah parsial 3 sebesar Rp. 138.975.000 dan setelah perubahan menjadi Rp**.** 76.954.7000, Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah :
   - Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, anggaran pokok sebesar Rp. 20.000.000, setelah parsial 3 menjadi Rp 138.975.000 dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp 76.954.700 Terjadi penambahan anggaran sebenyak 3 sub kegiatan adalah:
     - Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral, anggaran pokok sebesar Rp 10.000.000 dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 5.884.000, terjadi pengurangan sebesar Rp.4.116.000
     - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, anggaran pokok sebesar Rp 5.000.000, setelah mengalami parsial 3 anggaran sebesar Rp 105.000.000 dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 52.902.300, terjadi penambahan sebesar Rp.47.902.300
     - Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia, anggaran pokok sebesar Rp 5.000.000, setelah mengalami parsial 3 anggaran sebesar Rp 23.975.000 dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 18.168.400, terjadi penambahan sebesar Rp.13.168.400
5. Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 10.000.00,dan setelah perubahan menjadi Rp**.** 6.844.000 Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah :
   - Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota anggaran pokok sebesar Rp. 10.000.000, setelah parsial 3 menjadi Rp 10.000.000 dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp 6.844.000 Terjadi penambahan anggaran sebenyak 2 sub kegiatan adalah:
     - Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis

elektronik dan non elektronik, anggaran pokok sebesar Rp 5.000.000 dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 3.084.000, terjadi pengurangan sebesar Rp.1.916.000

- Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota, anggaran pokok sebesar Rp 5.000.000dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 3.760.000, terjadi penambahan sebesar Rp.1.240.000

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Kepala Dinas,

SYAINAL MANNAN, S.STP.,M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197705051997111001

PEMERINTAH
KABUPATEN TAKALAR

PERUBAHAN RENJA 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Perubahan Penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, dan memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Perubahan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar dimaksudkan menjadi pegangan perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun tersebut dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar.

Untuk dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap, karena itu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) ini melibatkan seluruh Pejabat dan Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar dengan diskusi yang mendalam dan terjadi komunikasi timbal balik antara pimpinan dan staf. Sehingga, tersusun keputusan-keputusan sistematis yang akhirnya menjadi dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Takalar, September 2025
PLT. Kepala Badan,

MUHAMMAD SAYUTI, S.Kom.,M.AP
Pangkat : Penataa Tingkat I
NIP. 19781109 200701 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (IKU) 2

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah 44
3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM
4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 49
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja PD 49
4.3 Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2025 49

BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting 62
5.2 Kaidah Pelaksanaan 62
5.3 Rencana Tindak Lanjut 62

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
II-1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusai s/d Tahun 2023 Kabupaten Takalar	11
II-2	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	24
II-4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024	29
II-5	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Tahun 2024	31
II-6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tahun 2025	35
III-1	Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025	52
IV-1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025	57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 360 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap OPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja OPD (Perubahan Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Selain itu, memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor ……. Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029 dan Rancangan Awal Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025–2029. Selanjutnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2025 melalui Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahn Deerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD;
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 48);
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan maksud:

1. Untuk menjabarkan beberapa perubahan dari rencana kerja sebelumnya yang berupa program dan kegiatan sehingga dapat memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan daerah akibat terjadinya efesiensi anggaran;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta adanya kesinambungan program kerja;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja Pembangunan urusan kepegawaian sampai triwulan 1 dan dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun berjalan;
2. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

3. Sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama tahun 2025;
4. Sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan;
5. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Bab ini berisi dua hal pokok yaitu evaluasi pelaksanaan renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Triwulan I Tahun 2025 dan analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar

Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai daftar program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah dan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa poin-poin yang menjadi perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan serta rencana tindak lanjut dari pelaksanaan penyusunan dokumen perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Triwulan I Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar pada Triwulan I Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2025 mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 sampai pada Triwulan I belum dapat menunjukkan capaian kinerja secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata hanya mencapai **14,25%** untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai **18,11%** untuk kinerja output dan outcome kegiatan.

Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar. Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar tahun 2025, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada tahun 2025 dengan total anggaran berjumlah **Rp. 6.330.230.913** (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah). Adapun anggaran yang terealisasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar di tahun 2025 Triwulan I sebesar **Rp. 902.197.387** (Sembilan Ratus Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau **14,25%**.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) program yang dijabarkan melalui 12 kegiatan dan 33 subkegiatan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Pada Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 kegiatan dan 16 sub kegiatan dan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh

mana target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dapat direalisasikan secara optimal, baik dari sisi output kegiatan maupun serapan anggaran. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan langkah perbaikan untuk triwulan berikutnya agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-1
Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Takalar
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar
Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2025

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 -2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				KEPEGAWAIAN													
5.03	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian**	**100%**	**4.603.467.775**	**96,85%**	**4.022.764.593**	**100%**	**4.746.185.903**	**21%**	**787.340.139**	**29,15%**	**787.340.139**	**29,15%**	**16,59%**
5.03	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu dalam Menyusun Perencanaan Program/ Kegiatan**	**100%**	**4.000.000**	**100%**	**22.122.260**	**100%**	**11.157.100**	**60,00%**	**6.360.100**	**60,00%**	**6.360.100**	**60,00%**	**57,00%**
5.03	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	2.000.000	2 dokumen	1.273.700	2 dokumen	4.000.100	2 dokumen	4.000.100	2 dokumen	4.000.100	100%	100%
5.03	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	1.000.000	1 dokumen	11.872.460	1 dokumen	3.340.000	-	-	-	-	0%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 -2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. 03	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	1 dokumen	1.101.500	-	-	-	-	0%	0%
5. 03	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	1.000.000	1 dokumen	8.976.100	1 dokumen	2.715.500	1 dokumen	2.360.000	1 dokumen	2.360.000	100%	87%
5. 03	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyerapan Anggaran dan Laporan Tepat Waktu**	**100%**	**4.396.698.800**	**96,15%**	**3.811.305.297**	**100%**	**4.492.186.933**	**14%**	**732.662.169**	**14%**	**732.662.169**	**14%**	**16,31%**
5. 03	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	2.240 orang	3.188.698.800	490 orang	2.630.647.952	480 orang	3.198.499.571	140 orang	731.595.669	140 orang	731.595.669	29%	23%
					Jumlah ASN yang menerima Tunjangan TPP	1.920 orang	1.208.000.000	385 orang	1.180.657.345	480 orang	1.278.599.462	-	-	-	-	0%	0%
					Jumlah ASN yang menerima honorarium penanggungjawab	-	-	-	-	24 orang	10.320.000	-	-	-	-	0%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 -2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. 03	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir	-	-	-	-	1 laporan	191.800	-	-	-	-	0%	0%
5. 03	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	-	4 laporan	2.117.100	-	-	-	-	0%	0%
5. 03	2	02	08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	-	-	-	-	1 dokumen	2.459.000	-	1.066.500	-	1.066.500	0%	43%
5. 03	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Penyusunan Adminsitrasi Barang**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**1.187.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0%**
5. 03	2	03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	-	-	-	-	2 dokumen	1.187.500	-	-	-	-	0%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 -2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.03	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang Baik dan Tepat Waktu**	**100%**	**60.000.000**	**88%**	**93.637.762**	**100%**	**149.771.370**	**38%**	**40.367.870**	**38%**	**40.367.870**	**38%**	**27%**
5.03	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 buah	15.000.000	11 buah	16.605.320	9 paket	13.890.000	1 paket	1.642.500	1 paket	1.642.500	11%	12%
5.03	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 kegiatan	15.000.000	4 kegiatan	6.906.000	4 paket	13.156.370	1 paket	3.878.370	1 paket	3.878.370	25%	29%
5.03	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 eksemplar	15.000.000	10 eksemplar	2.750.000	15 dokumen	3.120.000	10 dokumen	1.500.000	10 dokumen	1.500.000	67%	48%
5.03	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 kali	15.000.000	12 kali	67.376.442	12 laporan	119.605.000	3 laporan	33.347.000	3 laporan	33.347.000	25%	28%
5.03	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Tercapainya Kebutuhan Pegawai**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**43.743.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 -2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. 03	2	07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	-	1 unit	43.743.000	-	-	-	-	0%	0%
5. 03	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tercapainya Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**	**60.000.000**	**100%**	**88.439.274**	**100%**	**42.000.000**	**25%**	**6.300.000**	**25%**	**6.300.000**	**25%**	**15%**
5. 03	2	08	02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 rekening	55.000.000	12 rekening	46.439.274	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 03	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 orang	5.000.000	60 orang	46.439.274	12 laproan	42.000.000	3 laporan	6.300.000	3 laporan	6.300.000	25%	15%
5. 03	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tercapainya Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**	**82.768.975**	**100%**	**7.260.000**	**100%**	**6.140.000**	**9,09%**	**1.650.000**	**9,09%**	**1.650.000**	**9%**	**27%**
5. 03	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan peroranngan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 unit	82.768.975	11 unit	7.260.000	11 unit	6.140.000	9,09%	1.650.000	9,09%	1.650.000	9%	27%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 -2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	**03**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**100%**	**181.592.500**	**86,61%**	**932.901.701**	**100%**	**853.633.130**	**5,19%**	**75.841.130**	**5,19%**	**75.841.130**	**5,19%**	**8,88%**
5.	**03**	**2.**	**01**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai**	**100%**	**60.000.000**	**100%**	**244.091.265**	**100%**	**473.231.330**	**0%**	**37.990.130**	**0%**	**37.990.130**	**0%**	**8,03%**
5.	03	2.	01	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	-	-	-	-	4 dokumen	53.246.400	-	1.939.400	-	1.939.400	0%	4%
5.	03	2.	01	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	8 kali	10.000.000	2 kali	200.166.165	2 dokumen	296.005.430	-	35.266.730	-	35.266.730	0%	12%
5.	03	2.	01	Perumusan bahan kebijakannn pemberhentiann ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	-	-	-	-	2 dokumen	38.030.000	-	-	-	-	0%	0%
5.	03	2.	01	Koordinasi pelaksanaan pemberhentiann ASN	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	1.480 kali	40.000.000	12 kali	34.067.900	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	03	2.	01	Pengelolaan system informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	-	-	-	-	1 dokumen	59.043.700	-	-	-	-	0%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 -2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. 03	02	2. 01	11	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	80 orang	10.000.000	20 orang	9.857.200	20 dokumen	11.944.800	-	-	-	-	0%	0%
5. 03	02	2. 01	12	Evaluasi data, informasi dan system informasi kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	-	-	-	-	5 laporan	14.961.000	-	784.000	-	784.000	0%	5%
5. 03	**02**	**2. 02**		**Mutasi Dan Promosi**	**Persentase Pemenuhan perpindahan pegawai, SK Kenaikan Pangkat /KGB yang diproses tepat waktu**	**100%**	**70.000.000**	**46,43%**	**57.057.560**	**100%**	**133.851.300**	**9,09%**	**31.395.100**	**9,09%**	**31.395.100**	**9,09%**	**23,46%**
5. 03	02	2. 02	01	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 kali	20.000.000	4 kali	32.512.000	400 dokumen	13.857.200	7 dokumen	2.512.200	7 dokumen	2.512.200	2%	18%
5. 03	02	2. 02	02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1.480 kali	30.000.000	2 kali	22.445.560	100 dokumen	109.998.590	13 dokumen	20.170.390	13 dokumen	20.170.390	13%	18%
5. 03	02	2. 02	03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	80 orang	20.000.000	20 kali	2.100.000	50 dokumen	9.995.510	30 dokumen	8.712.510	30 dokumen	8.712.510	60%	87%
5. 03	**02**	**2. 03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Pemenuhan PNS yang mengikuti Diklat**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**628.392.876**	**100%**	**239.940.000**	**12%**	**5.478.500**	**12%**	**5.478.500**	**12,35%**	**2,28%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 -2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.03	02	2.03	01	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	200 orang	50.000.000	50 orang	83.295.700	50 orang	225.622.700	-	4.451.200	-	4.451.200	0%	2%
5.03	02	2.03	02	Pengelolaan assessment center	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	-	-	-	-	9 dokumen	7.090.000	-	-	-	-	0%	0%
5.03	02	2.03	03	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan sertifikasi ASN	-	-	14 orang	545.097.176	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03	02	2.03	04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	-	-	-	-	10 orang	1.027.300	10 orang	1.027.300	10 orang	1.027.300	100%	100%
5.03	02	2.03	09	Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	-	-	-	-	12 dokumen	6.200.000	-	-	-	-	0%	0%
5.03	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Aparatur yang Telah memenuhi Standar Kompetensi**	**100%**	**1.592.500**	**100%**	**3.360.000**	**100%**	**6.610.500**	**-**	**977.400**	**-**	**977.400**	**0%**	**14,79%**
5.03	02	2.04	02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4 orang	1.592.500	1 orang	3.360.000	1 dokumen	3.620.400	-	977.400	-	977.400	0%	27%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 -2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. 03	02	2. 04	04	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	-	-	-	-	100 orang	1.030.600	-	-	-	-	0%	0%
5. 03	02	2. 04	10	Evaluasi disiplin ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	-	-	-	-	5 laporan	1.959.500	-	-	-	-	0%	0%
5. 04	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**730.411.880**	**19%**	**39.016.118**	**19%**	**39.016.118**	**19,05%**	**5,34%**
5. 04	**02**	**2. 01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**730.411.880**	**19,05%**	**39.016.118**		**39.016.118**	**19,05%**	**5,34%**
5. 04	02	2. 01		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	-	-	-	-	21 orang	**730.411.880**	4 orang	39.016.118	4 orang	39.016.118	195	5%

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusai Kabupaten Takalar pada Triwulan I di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 pada Triwulan I dapat dijelaskan sebagai berikut:
   - Pada tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 3 (tiga) program yaitu Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari ketiga program di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya sangat rendah dengan target yang telah ditetapkan yakni Program Kepegawaian Daerah mendapatkan capaian kinerja masih 5,19%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan capaian kinerja sebesar 18% sedangkan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya sebesar 19%. Hal ini terjadi karena adanya sub-sub kegiatan belum bisa terlaksana berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan yang telah ditetapakan dan realisasi masih sangat rendah karena disesuaikan dengan anggaran kas yang tersedia dan masih dalam tahap persiapan.

.

B. Implikasi Terhadap Target Capaian Program Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar
   - Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/ kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar.
   - Dengan berhasilnya program/kegiatan yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar sesuai target yang diinginkan dapat menciptakan pelayanan yang lebih berkualitas yang berarah pada tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan handal dalam fungsi dan perannya sebagai pelayanan publik di bidang kepegawaian, sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud.

C. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran
   - Untuk mengatasi faktor penyebab sehingga target kinerja program /kegiatan/ sub kegiatan tidak tercapai maka tindakan yang harus dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya adalah
     a. Melakukan perubahan terhadap target program dan kegiatan pada perjanjian kinerja.
     b. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.
     c. Merencanakan target kinerja dan keuangan yang seimbang agar pencapaiannya maksimal.
     d. Lebih meningkatkan koordinasi di tingkat pimpinan sehingga dapat merencanakan kegiatan yang dikondisikan dengan kemampuan anggaran daerah.

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 yang terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada table II-2 sebagai berikut:

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan
dan Sub Kegiatan yang ada dalamAPBD Tahun 2025

APBD 2025							
No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	33	3	12	35
TOTAL		3	12	33	3	12	35

Sumber: Laporan Monev BKPSDM TW 1 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah program sebanyak 3, jumlah kegiatan 12, dan jumlah sub kegiatan 30, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 3, jumlah indikator kegiatan sebanyak 12, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 35.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan pada APBD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusai Tahun 2025
sampai Triwulan I

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	4.746.185.903	787.340.139	29,15%	16,59%
2	Program Kepegawaian Daerah	853.633.130	75.841.130	5,19%	8,88%
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	730.411.880	39.016.118	19,05%	5,34%
TOTAL		**6.330.230.913**	**902.197.387**	**18,11%**	**14,25%**

Sumber: Laporan Monev BKPSDM TW 1 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 902.197.387, anggaran tersebut digunakan dalam 3 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 14,25 % dengan capaian realisasi fisik sebesar 18,11 %. Kondisi ini menunjukkan rata-rata capaian realisasi fisik yang belum maksimal karena pelaksanaan kegiatan baru berjalan 3 bulan.

Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kanupaten Takalar hingga triwulan I pada tahun 2025 dalam kategori rendah atau kurang dari <10% sebanyak 1 (satu) program dari jumlah keseluruhan program yang dilaksanakan, yaitu Program Kepegawaian Daerah, dan terdapat 1 program yang realisasi anggaran tergolong sedang atau kurang dari <20%, yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan selebihnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaaten/Kota memiliki tingkat realisasi anggaran kategori tinggi dengan serapan anggaran lebih dari >20%.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sampai pada Triwulan I

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu **kategori Rendah** untuk realisasi **0–10%, Kategori Sedang** untuk realisasi

anggaran lebih besar dari **>10–20%** dan **kategori Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas **>20%**. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar >20% didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I tahun 2025 adalah 20%, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 20% dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebagai berikut:

1. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program**

   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program, anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 3 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah 8,88% dan 5,34% (realisasinya <0-10%) sebanyak 2 program yaitu pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Kepegawaian Daerah. Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program atau 16,59% (realisasi >10-20%) yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota.

2. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan**

   Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing kegiatan di Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 4 kegiatan yang realisasi pendanaanya masuk pada kategori tinggi atau >20%. Sedangkan 3 kegiatan realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori sedang yaitu pada >10-20% untuk realisasinya, dan yang berada dalam kategori rendah sebanyak 5 kegiatan yang realisasi penyerapan anggarannya masih antara 0-10%.

3. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan**

   Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 33 sub kegiatan dengan 35 sub indikator kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 17 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah atau realisasinya masih dikisaran 0-10%, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang atau realisasi anggaranya >10-20% terdapat 5 sub kegiatan, dan 11 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau telah melampui 20%.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusai Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	2	1	0	12	5	3	4	33	17	5	11
TOTAL		**3**	**2**	**1**	**0**	**12**	**5**	**3**	**4**	**33**	**17**	**5**	**11**

Sumber : Laporan Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2025 Triwulan I

Keterangan:

0-10% Rendah

>10-20% Sedang

>20% Tinggi

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sampai pada Triwulan I

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Capaian kinerja pada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu **kategori Rendah** untuk realisasi **0–10%, Kategori Sedang** untuk realisasi anggaran lebih besar dari **>10–20%** dan **kategori Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas **>20%**. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar >20% didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I tahun 2025 adalah 20%, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi kinerja lebih dari 20% dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebagai berikut:

1. **Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Program**

   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada level program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja terdapat 3 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah 5,19% (realisasinya <0-10%) sebanyak 1 program yaitu Program Kepegawaian Daerah. Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program atau 19,05% (realisasi >10-20%) yaitu pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, sedangkan terdapat 1 program yang tingkat realisasi pencapaian kinerjanya >20% atau sekitar 29,15%, yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota.

2. **Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Kegiatan**

   Untuk evaluasi pelaksanaan capaian kinerja pada level kegiatan di Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 3 kegiatan yang realisasi kinerja masuk pada kategori tinggi atau >20%. Sedangkan 1 kegiatan yang realisasi kinerjanya hingga triwulan I masih dalam kategori sedang yaitu pada >10-20%, dan yang berada dalam kategori rendah sebanyak 6 kegiatan yang realisasi pelaksanaan kinerjanya masih antara 0-10%.

3. **Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Sub Kegiatan**

   Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 33 sub kegiatan dengan 35 sub indikator kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 21 sub kegiatan yang capaian kinerja masih rendah atau realisasinya masih dikisaran 0-10%, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi kinerja sedang atau realisasi kinerja >10-20% terdapat 3 sub kegiatan, dan 9 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi kinerja tinggi atau telah melampui 20%.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusai Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	1	1	1	12	6	3	3	33	21	3	9
TOTAL		**3**	**1**	**1**	**1**	**12**	**6**	**3**	**3**	**33**	**21**	**3**	**9**

Sumber : Laporan Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2025 Triwulan I

Keterangan:

0-10% Rendah

>10-20% Sedang

>20% Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar adalah untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluiasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metedologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta ketentuan peraturan perundang–undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Kepala Badan. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Organisasi. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RENSTRA yang digariskan pada Tahun 2025. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Penetapan Target indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini;

Tabel II-6
Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar

No	Indikator Kinerja Utama 2023-2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Profesionalitas ASN	70%	75.23%	Indeks Profesionalitas ASN	75.50%	76%	77%	72.88%	76%	77%	
2	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang Memiliki Sertifkat Diklat Sesuai Dengan Jenjang Jabatannya	70%	25,31%	Persentase pejabat struktural dan fungsional yang memiliki sertifkat diklat sesuai dengan jenjang jabatannya	70%	72%	74%	36,52%	72%	74%	
3	Persentase ASN dengan capaian SKP minimal BAIK	100%	95.50%	Persentase ASN dengan capaian SKP minimal BAIK	100%	100%	100%	96%	100%	100%	
4	Persentase ASN yang mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin	<1%	<1% (0.0007)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	70.75%	71%	71.25%	70.85%	71%	71.25%	
5	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM (Pelayanan Kepagawaian ; Penerimaan, Promosi, Demosi, Pensiun dll)	85%	95.09%	Tingkat literasi digital ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85%	87%	80%	75%	87%	89%	
6	Indeks Reformasi Birokrasi BKPSDM	B	B								
7	Nilai SAKIP pada BKPSDM	B	BB (70.50)								

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Profesionalitas ASN dengan target 70% dan telah terealisasi sebesar 75,23%.**

   Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tahun 2024 untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa IP ASN Kabupaten Takalar mencapai 75,23%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70%. Walaupun demikian, capaian ini masih berada pada kategori "sedang", sehingga perlu terus ditingkatkan agar profesionalitas ASN dapat masuk pada kategori "tinggi" atau bahkan "sangat tinggi" di masa mendatang.

   Indeks Profesionalitas ASN sendiri merupakan gambaran kualitas aparatur sipil negara yang diukur melalui empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dengan capaian ini, ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar dinilai telah menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Takalar yang melampaui target 70% tidak terlepas dari sejumlah faktor pendorong, antara lain:

   - Komitmen pimpinan daerah dan manajemen ASN
     Dukungan penuh dari pimpinan daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadalam menegakkan kedisiplinan, membangun budaya kerja yang produktif, serta memberikan arahan strategis dalam pengelolaan SDM aparatur.
   - Peningkatan kompetensi ASN
     Terselenggaranya program pengembangan kompetensi, baik melalui pendidikan dan pelatihan, diklat teknis maupun fungsional, yang membantu ASN meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai bidang tugasnya.
   - Optimalisasi penilaian kinerja ASN
     Pelaksanaan penilaian kinerja melalui SKP yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga mendorong ASN untuk mencapai target kinerja minimal kategori "Baik".
   - Budaya disiplin dan etos kerja
     Penerapan aturan disiplin ASN secara konsisten menjadi faktor penting yang menjaga kepatuhan terhadap regulasi serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

2. **Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang Memiliki Sertifkat Diklat sesuai dengan Jenjang Jabatannya dengan target 70% dan telah terealisasi sebesar 25,31%.**

   Pada tahun 2024, persentase Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang memiliki sertifikat diklat sesuai dengan jenjang jabatannya tercatat sebesar 25,31%, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 70%. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pejabat struktural dan pegawai fungsional yang memiliki sertifikat diklat sesuai dengan jenjang jabatannya adalah:

Jenis Jabatan	Jumlah Pejabat	Memiliki Sertifikat Diklat	Persentase Kepemilikan Sertifikaat (%)
1	2	3	4
Pejabat struktural yang memiliki sertifikat diklat	462	70	15,15%
Pegawai fungsional yang memiliki sertifikat diklat	249	110	44,17%
Total	**711**	**180**	**25,31%**

Sumber: BKPSDM Takalar Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur, Desember 2024

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat, baik yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional, belum mengikuti atau menyelesaikan diklat yang sesuai dengan tingkat dan tanggung jawab jabatannya. Selain faktor keterbatasan kuota pelatihan, alokasi anggaran, dan kesibukan jabatan, capaian rendah ini juga dipengaruhi oleh adanya dinamika organisasi yang berkontribusi terhadap realisasi capaian, terutama adanya peralihan jabatan dari pejabat struktural ke jabatan fungsional, misalnya pejabat eselon IV yang dialihkan ke jabatan fungsional tertentu. Peralihan ini menimbulkan kebutuhan baru bagi pejabat untuk menempuh diklat sesuai jenjang fungsional, sehingga sementara waktu persentase kepemilikan sertifikat masih belum optimal.

Capaian sebesar 25,31% ini menjadi dasar bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyusun strategi peningkatan kapasitas pegawai yang lebih terstruktur. Program diklat perlu dirancang secara sistematis, termasuk bagi pejabat yang melakukan peralihan jabatan, sehingga mereka dapat segera memperoleh sertifikasi yang sesuai. Dengan upaya yang terfokus, diharapkan persentase kepemilikan sertifikat diklat dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya, mendekati target 70%, dan setiap pejabat, baik struktural maupun fungsional, memiliki kompetensi yang mendukung kinerja organisasi secara optimal.

3. **Persentase ASN dengan capaian SKP minimal BAIK dengan target 100% dan telah terealisasi sebesar 95,50%.**

Data ini diambil secara langsung dari dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun, diinput, dan divalidasi oleh masing-masing ASN serta diverifikasi oleh atasan langsung sesuai mekanisme penilaian kinerja yang berlaku. Meskipun realisasi masih berada sedikit di bawah target 100%, capaian 95,50% ini tetap dapat dikategorikan sangat baik karena hanya terdapat sebagian kecil ASN yang belum mencapai predikat minimal BAIK.

Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar telah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tercermin dari mayoritas pegawai yang

memperoleh predikat minimal BAIK pada penilaian SKP. Capaian tersebut menjadi bukti adanya komitmen pegawai untuk terus menjaga kualitas kinerja serta menjalankan peran dan fungsi sesuai jabatan yang diemban. Adapun faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain perbedaan tingkat pemahaman ASN terhadap penyusunan SKP berbasis kinerja, variasi dalam pencapaian indikator individu, serta adanya kendala dalam proses adaptasi sistem penilaian yang semakin berbasis digital dan terukur.

4. **Persentase ASN yang mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin dengan target <1% dan terealisasi sebesar <1% (0,0007).**

   Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan kedisiplinan pegawai, penerapan aturan yang konsisten, serta peran pengawasan melekat oleh atasan langsung. Selain itu, adanya upaya pencegahan berupa sosialisasi regulasi disiplin ASN, budaya kerja yang kondusif turut mendukung minimnya angka pelanggaran, dan penegakan kode etik terhadap aturan disiplin PNS yang sesuai dengan SOP serta tindak lanjut dari PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.

5. **Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM (Pelayanan Kepagawaian; Penerimaan, Promosi, Demosi, Pensiun dll) dengan target 85% dan terealisasi sebesar 95,09%**

   Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan oleh Pihak Ketiga pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin. Survey IKM atas layanan Pemerintah Kabupaten Takalar pada unit layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menunjukkan nilai rata-rata Sangat Baik. Akumulasi nilai unsur tertimbang pada unit pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dari total nilai unsur pelayanan yang dihitung berdasarkan skala 25 adalah 95,09 dan indeks IKM keseluruhan adalah 3,80, yang menghasilkan kategori mutu A (Sangat Baik). Ini menandakan bahwa kualitas pelayanan secara umum sudah baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama pada aspek kecepatan dan kemudahan prosedur pelayanan.

   Tabel di bawah ini menunjukkan nilai IKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Unsur Pertanyaan	Nilai Unsur Tertimbang	Total Nilai Unsur (*25)
Kesesuaian persyaratan pelayanan	0.41	**95.09**
Kemudahan prosedur pelayanan	0.41	
Kecepatan waktu	0.41	
Kewajaran biaya/tarif	0.44	
Kesesuaian standar pelayanan	0.42	
Kompetensi/kemampuan petugas	0.44	
Kesopanan dan keramahan	0.43	

Unsur Pertanyaan	Nilai Unsur Tertimbang	Total Nilai Unsur (*25)
Kualitas sarana dan prasarana	0.41	
Penanganan pengaduan	0.43	
INDEKS IKM	**3.80**	**A**

Sumber: LPPM Universitas Hasanuddin Tahun 2024

6. **Indeks Reformasi Birokrasi BKPSDM dengan target predikat B dan telah mencapai target predikat B.**

   Indeks Reformasi Birokrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan dengan target predikat B pada tahun berjalan. Hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan, penataan kelembagaan, penguatan sistem akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berhasil mencapai target tersebut dengan meraih predikat B. Capaian ini menggambarkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai arah kebijakan yang ditetapkan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dan penguatan di beberapa aspek agar kualitas birokrasi dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi di masa mendatang.

7. **Nilai SAKIP pada BKPSDM dengan target predikat B dan telah mencapai target predikat BB (70,50).**

   Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 ditetapkan dengan target predikat B. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat, capaian yang diperoleh justru melampaui target, yakni meraih predikat BB dengan skor 70,50. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja yang semakin terarah, akuntabel, dan sesuai prinsip manajemen berbasis hasil.

   Hal ini juga menjadi bukti bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah berupaya memperkuat budaya kinerja, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, serta menjalankan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja secara lebih optimal. Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan pimpinan, koordinasi lintas unit, serta pembinaan dan pendampingan Inspektorat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi. Capaian predikat BB (70,50) ini menjadi motivasi sekaligus landasan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Secara umum, capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari tujuh indikator yang ditetapkan, sebagian besar berhasil melampaui target yang telah direncanakan. Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 pada umumnya berada pada kategori baik hingga sangat baik,

meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek pemenuhan sertifikasi diklat pejabat sesuai jenjang jabatan.

Sedangkan pada tahun 2025 memasuki periode Renstra 2025–2029, indikator kinerja utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengalami penyesuaian. Hal ini terjadi karena indikator kinerja utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengikut dan berpedoman pada Renstra terbaru tahun 2025-2029. Berdasarkan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025, capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Indeks Profesionalitas ASN dengan target 75,50% dan telah terealisasi sebesar 72,88%.**

   Hasil pengukuran Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Indeks Profesionalitas ASN tahun berjalan ditargetkan sebesar 75,50%, namun realisasi capaian yang diperoleh adalah 72,88%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum mencapai target, tingkat profesionalitas ASN masih berada pada kategori sedang. Capaian ini mencerminkan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar telah memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin yang cukup baik. Namun, masih terdapat gap yang perlu diperbaiki, khususnya dalam penguatan kapasitas individu maupun organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian ini antara lain keterbatasan pelaksanaan program pengembangan kompetensi, kebutuhan peningkatan kesesuaian antara jabatan dan kualifikasi pendidikan, serta perlunya konsistensi dalam pengawasan dan pembinaan disiplin ASN.

   Ke depan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkomitmen untuk meningkatkan profesionalitas ASN melalui berbagai strategi, antara lain: memperluas akses pelatihan dan diklat berbasis kebutuhan jabatan, mendorong pengelolaan karier yang lebih terarah, memperkuat sistem penilaian kinerja berbasis hasil, serta meningkatkan pembinaan kedisiplinan secara berkesinambungan. Dengan langkah tersebut, diharapkan target Indeks Profesionalitas ASN dapat tercapai bahkan melampaui standar yang ditetapkan.

2. **Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang Memiliki Sertifkat Diklat sesuai dengan Jenjang Jabatannya dengan target 70% dan telah terealisasi sebesar 36,52%.**

   Pada tahun 2025, persentase Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang memiliki sertifikat diklat sesuai dengan jenjang jabatannya tercatat sebesar 36,52%, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 70%. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kompetensi pejabat melalui program diklat, meskipun sebagian besar pejabat masih belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi diklat sesuai dengan jabatan mereka. Berikut ini tabel menunjukkan jumlah pejabat struktural dan pegawai fungsional yang memiliki sertifikat diklat sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

   1.

Jenis Jabatan	Jumlah Pejabat	Memiliki Sertifikat Diklat	Persentase Kepemilikan Sertifikaat (%)
1	**2**	**3**	**4**
Pejabat struktural yang memiliki sertifikat diklat	444	127	28,60%
Pegawai fungsional yang memiliki sertifikat diklat	276	136	49,27%
Total	**720**	**263**	**36,52%**

Sumber: BKPSDM Takalar Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur, September 2025

Perolehan capaian sebesar 36,52% ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan kuota dan kesempatan pelatihan, alokasi anggaran yang masih terbatas, serta belum meratanya penyelenggaraan diklat di seluruh unit kerja, sehingga beberapa pejabat di wilayah atau bidang tertentu belum memiliki kesempatan yang memadai untuk mengikuti diklat yang sesuai. Selain itu, variasi dalam kesiapan administrasi dan dokumen pendukung bagi pejabat yang akan mengikuti diklat juga turut mempengaruhi realisasi sertifikasi. Terdapat juga kendala dalam sinkronisasi antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan jenis diklat yang tersedia, sehingga beberapa pejabat harus menunggu jadwal diklat yang sesuai dengan jabatan mereka.

Meskipun realisasi sebesar 36,52% belum memenuhi target, capaian ini menjadi dasar bagi perencanaan strategis ke depan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu terus memperluas akses pelatihan, menyesuaikan jadwal diklat dengan ketersediaan waktu pejabat, serta memberikan perhatian khusus bagi pejabat yang mengalami peralihan jabatan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya persentase kepemilikan sertifikat diklat dapat meningkat secara signifikan dan mendekati target 70%, sehingga seluruh pejabat struktural dan fungsional memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatannya dan mampu mendukung kinerja organisasi secara optimal.

3. **Persentase ASN dengan capaian SKP minimal BAIK dengan target 100% dan telah terealisasi sebesar 96%.**

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar dengan capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) minimal predikat BAIK pada tahun berjalan ditargetkan sebesar 100%, namun realisasi yang dicapai adalah 96%. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh ASN telah mampu menunjukkan kinerja sesuai standar yang dipersyaratkan, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum memenuhi target secara penuh. Capaian ini tidak terlepas dari adanya sistem penilaian kinerja pegawai yang semakin optimal, transparan, dan akuntabel sehingga proses evaluasi di setiap perangkat daerah berjalan lebih objektif dan terukur.

Selain itu, kedisiplinan ASN dalam menyusun SKP tepat waktu memberikan dampak positif terhadap kelancaran proses monitoring dan penilaian kinerja. Peran aktif pimpinan perangkat daerah yang senantiasa melakukan pembinaan dan supervisi juga berkontribusi besar dalam menjaga kualitas capaian kinerja ASN. Di sisi lain, peningkatan literasi ASN terhadap regulasi dan aplikasi penilaian kinerja turut mempercepat proses penyusunan dan pelaporan SKP sehingga hasilnya lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, capaian ini belum mencapai target 100% karena masih terdapat sejumlah kendala. Keterlambatan sebagian ASN dalam melengkapi penyusunan SKP, baik akibat kendala teknis maupun masalah kedisiplinan individu, menjadi salah satu faktor utama. Selain itu, permasalahan teknis pada sistem aplikasi penilaian kinerja sesekali menghambat proses input dan validasi data, ditambah dengan masih adanya ASN baru yang belum sepenuhnya memahami mekanisme penilaian kinerja sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif.

Meskipun demikian, realisasi sebesar 96% tetap tergolong sangat baik karena mencerminkan bahwa mayoritas ASN di Kabupaten Takalar telah menunjukkan profesionalitas, kedisiplinan, dan orientasi pada hasil kerja. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen untuk memperkuat monitoring, meningkatkan kapasitas ASN, serta memperluas pembinaan kinerja agar target 100% ASN dengan capaian SKP minimal predikat BAIK dapat tercapai secara menyeluruh.

4. **Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan target 70,75% dan terealisasi sebesar 71,25%.**

Pada tahun 2025, hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar yang dilaksanakan oleh Inspektorat menunjukkan capaian sebesar 71,25%, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 70,75%. Keberhasilan ini menegaskan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semakin terarah, ditunjukkan dengan perencanaan berbasis kinerja yang lebih terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran strategis daerah, serta pelaporan kinerja yang lebih disiplin dan tepat waktu. Selain itu, capaian ini didukung oleh komitmen pimpinan dan aparatur dalam mengawal akuntabilitas kinerja, serta peran aktif Inspektorat melalui pembinaan dan pemberian rekomendasi yang berkontribusi terhadap perbaikan sistem pengendalian internal. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan validitas data kinerja, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam integrasi data, serta kompetensi ASN yang belum merata dalam pengelolaan kinerja. Dengan capaian di atas target dan identifikasi hambatan tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Takalar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SAKIP melalui penguatan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi agar dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. **Tingkat literasi digital ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan target 85% dan terealisasi sebesar 80%.**

   Tingkat literasi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 85%, sementara capaian realisasi yang diperoleh adalah sebesar 80%. Persentase ini dihitung dari jumlah ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi digital dibandingkan dengan jumlah total aplikasi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi yang dimaksud mencakup sistem utama dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi, antara lain Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), e-Kinerja untuk penilaian kinerja pegawai, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, Sistem Informasi Diklat (SIDIKLAT) untuk pengelolaan pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta Layanan Seleksi ASN berbasis CAT. Sebagian besar ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mampu menguasai dan mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut, khususnya yang bersifat wajib dan digunakan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

   Namun demikian, capaian sebesar 80% menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian ASN yang belum sepenuhnya mampu memanfaatkan seluruh aplikasi secara optimal, baik karena keterbatasan keterampilan digital, kurangnya intensitas penggunaan aplikasi tertentu, maupun masih adanya kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana penunjang teknologi di unit kerja tertentu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menilai capaian ini sudah menggambarkan kemajuan yang cukup signifikan, namun masih memerlukan langkah strategis untuk mencapai target 85% di tahun mendatang. Upaya yang akan ditempuh antara lain adalah memperluas program pelatihan literasi digital, melakukan pendampingan teknis intensif terhadap aplikasi yang belum dikuasai sebagian ASN, serta mengoptimalkan budaya kerja berbasis digital di seluruh unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tahun 2025 menghadapi tantangan baru dengan indikator yang lebih berorientasi pada kualitas dan literasi digital. Hasil Triwulan I menunjukkan capaian cukup baik, namun masih terdapat gap pada profesionalitas ASN, literasi digital, dan sertifikasi diklat.

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Takalar untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan

terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara pimpinan beserta bawahannya dan penguasaan dibidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

2.2.1 Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2023-2026 dengan Renstra 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2025 merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Pergantian periode renstra menuntut adanya reformulasi indikator kinerja agar lebih relevan dengan tantangan dan kebutuhan manajemen kepegawaian saat ini maupun di masa mendatang. Ada beberapa pertimbangan utama perubahan IKU tersebut antara lain:

1. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan daerah.
   IKU baru disusun agar sejalan dengan target pembangunan nasional, khususnya agenda reformasi birokrasi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas aparatur sipil negara. Pemerintah tidak lagi cukup puas dengan capaian standar seperti kepatuhan dan kepuasan layanan, tetapi menghendaki bukti nyata peningkatan kualitas ASN, khususnya dalam hal profesionalitas, kompetensi, dan daya saing.
2. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja.
   Jika pada periode sebelumnya lebih menekankan pada kepatuhan administratif dan kepuasan layanan, maka pada periode 2025–2029 indikator diperluas ke aspek literasi digital dan penilaian kinerja berbasis hasil. Era digitalisasi menuntut ASN tidak hanya menguasai prosedur birokrasi, tetapi juga memiliki literasi digital yang kuat agar mampu mendukung transformasi pelayanan publik berbasis teknologi. Karena itu, indikator baru menekankan pada pengukuran sejauh mana ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga dapat menggambarkan kualitas dan daya saing ASN secara lebih komprehensif.
3. Respons terhadap dinamika kebutuhan organisasi.
   Perubahan lingkungan strategis, termasuk tuntutan pelayanan publik yang lebih cepat, adaptif, dan berbasis teknologi, mendorong perlunya indikator baru yang mampu mengukur kapasitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjawab tantangan tersebut.
4. Penguatan akuntabilitas kinerja.
   Dengan memasukkan indikator penilaian SAKIP oleh Inspektorat maupun tingkat literasi digital ASN, diharapkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia lebih terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
5. Fokus pada kualitas layanan jangka panjang.
   Perubahan indikator juga bertujuan agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak terjebak pada target administratif tahunan, melainkan mendorong pencapaian yang berorientasi pada hasil (outcome), selaras dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

Dengan demikian, perubahan IKU bukan sekadar pergantian angka target, melainkan penajaman fokus kinerja untuk memastikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar berperan optimal dalam mendukung reformasi birokrasi, pengembangan kompetensi ASN, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai arah Renstra 2025–2029. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar dituntut tidak hanya menjaga kepatuhan ASN, tetapi juga menjadi motor transformasi birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing digital.

2.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Beberapa hal yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat berjalan dengan baik antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur. Adanya dukungan penuh dari pimpinan daerah maupun pimpinan internal BKPSDM mendorong ASN lebih disiplin dalam melaksanakan tugas dan menuntaskan target kinerja.
2. Peningkatan sistem tata kelola. Penerapan aplikasi kepegawaian, sistem informasi manajemen ASN, serta penggunaan teknologi informasi telah mempercepat proses layanan kepegawaian dan mendukung ketercapaian target, khususnya pada indikator SAKIP dan kepuasan layanan.
3. Budaya disiplin asn yang relatif baik. Rendahnya tingkat pelanggaran disiplin ASN menunjukkan bahwa tata kelola kedisiplinan berjalan dengan efektif, sehingga membantu menjaga stabilitas capaian kinerja.
4. Tingkat kepuasan asn yang tinggi. Pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel menghasilkan kepuasan ASN di atas target, yang sekaligus memperkuat citra dan legitimasi kinerja BKPSDM.
5. Dukungan regulasi dan kebijakan nasional. Sinkronisasi dengan agenda reformasi birokrasi dan pengembangan kompetensi ASN di tingkat nasional memberikan arah yang jelas bagi penyusunan indikator kinerja yang lebih strategis.

Meski capaian IKU sebagian besar menunjukkan tren positif, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan Adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya persentase ASNbersertifikat diklat. Banyak pejabat struktural maupun fungsional belum memiliki sertifikasi sesuai jenjang jabatan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan kuota pelatihan, anggaran, dan kesempatan belajar.
2. Kesenjangan kompetensi ASN. Masih terdapat disparitas kualitas ASN, terutama dalam penguasaan kompetensi teknis dan literasi digital, sehingga memengaruhi capaian indikator profesionalitas dan literasi digital.
3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya. Dukungan anggaran untuk pengembangan kompetensi dan digitalisasi layanan belum sepenuhnya memadai, sehingga beberapa program strategis tidak bisa dijalankan secara optimal.
4. Perubahan indikator yang lebih menantang. Dengan adanya penyesuaian IKU pada periode Renstra 2025–2029, target kinerja menjadi lebih tinggi

dan kompleks (misalnya literasi digital dan capaian SAKIP), sehingga memerlukan adaptasi cepat dari organisasi.

5. Resistensi terhadap perubahan. Sebagian ASN masih memiliki pola pikir konvensional dan belum sepenuhnya terbiasa dengan digitalisasi dan budaya kerja berbasis kinerja, sehingga menghambat percepatan pencapaian target tertentu.

Faktor pendukung menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar memiliki fondasi yang cukup kuat dalam disiplin ASN, kepuasan layanan, dan dukungan sistem. Namun, faktor penghambat menegaskan bahwa tantangan utama terletak pada peningkatan kompetensi ASN, literasi digital, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, strategi ke depan harus diarahkan pada penguatan kapasitas SDM melalui diklat, optimalisasi anggaran, serta akselerasi transformasi digital untuk memastikan seluruh indikator kinerja utama dapat tercapai sesuai target Renstra 2025–2029.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menegaskan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaya Saing menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, RPJMN menekankan transformasi birokrasi, pengembangan kompetensi aparatur, dan penerapan manajemen ASN berbasis merit. Visi RPJMN 2025–2029 untuk pengembangan SDM aparatur adalah

"Mewujudkan ASN Profesional, Kompeten, dan Berintegritas untuk Mendukung Indonesia Maju dan Berdaya Saing."

Visi ini menjadi landasan bagi formulasi strategi, program, dan kegiatan BKN serta instansi terkait dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas ASN. Misi strategis yang diturunkan meliputi peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN, penerapan manajemen berbasis merit, penguatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi, peningkatan kesejahteraan dan motivasi aparatur, serta pengembangan kolaborasi lintas instansi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan RPJMN 2025–2029 memberikan arah yang jelas bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk memastikan aparatur negara siap menghadapi tantangan pembangunan nasional secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2025–2029, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKN) berperan strategis dalam memastikan manajemen ASN berjalan berbasis meritokrasi, profesional, dan akuntabel. Arah kebijakan BKN difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Pengembangan Kompetensi ASN secara Menyeluruh

   Program pengembangan kompetensi mencakup pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kepemimpinan ASN. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan nasional.
2. Digitalisasi dan Transformasi Proses Manajemen ASN

   Transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data kepegawaian. Digitalisasi proses ini juga mendukung penilaian kinerja dan perencanaan karier ASN yang lebih berbasis data dan merit.
3. Penerapan Sistem Manajemen ASN Berbasis Merit

   BKN mendorong implementasi sistem manajemen berbasis kinerja yang adil dan transparan, termasuk dalam pengangkatan, promosi, dan penempatan ASN. Hal ini bertujuan untuk memperkuat profesionalisme dan integritas aparatur negara.

4. Kolaborasi Lintas Instansi dan Penguatan Tata Kelola

   Keberhasilan kebijakan pengembangan SDM aparatur memerlukan koordinasi erat antara BKN, KemenPANRB, LAN, serta kementerian dan lembaga terkait. Sinergi ini penting untuk memastikan penyusunan, monitoring, dan evaluasi kebijakan berjalan efektif.
5. Penguatan Motivasi dan Kesejahteraan ASN

   Strategi pengembangan SDM juga menekankan pentingnya penghargaan berbasis kinerja, kepastian karier, serta peningkatan kesejahteraan untuk menjaga motivasi dan loyalitas aparatur.

Tantangan implementasi kebijakan ini antara lain dinamika regulasi, kebutuhan manajemen talenta yang belum optimal, serta resistensi perubahan dalam birokrasi. Untuk itu, strategi BKN diarahkan agar kebijakan dapat dijalankan secara berkesinambungan melalui integrasi perencanaan, digitalisasi, penguatan kompetensi, dan penerapan meritokrasi yang konsisten di seluruh instansi pemerintah.

Dengan arah kebijakan dan strategi tersebut, BKN diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam membangun aparatur negara yang profesional, kompeten, dan berintegritas, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Di tingkat daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya berperan menerjemahkan kebijakan ini agar implementasi di kabupaten konsisten dengan prinsip merit, profesionalisme, dan digitalisasi manajemen ASN.

Sinergi BKN, BKPSDM, KemenPANRB, LAN, serta instansi daerah lainnya memastikan bahwa arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dapat dijalankan secara efektif, membangun aparatur negara yang kompeten, profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas di bidang kepegawaian. Kebijakan daerah juga berfungsi sebagai jembatan penerapan kebijakan nasional ke tingkat lokal dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya menjadi instrumen strategis dalam menerjemahkan RPJMN, UU ASN, Perpres SPBE, dan Renstra KemenPANRB agar aparatur daerah profesional, kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas.

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas

Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Gambar 3.1 Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029 dan untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu "**Terwujudnya**

Profesionalitas ASN", serta untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 - Meningkatnya kompetensi dan kinerja ASN;
2. Sasaran 2 - Meningkatnya kualitas tata Kelola kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III-1
Perubahan Tujuan, Sasaran sertaa Target Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
Tujuan/Sasaran	**Indikator Tujuan/sasaran**	**Target 2025**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator Tujuan/sasaran**	**Target 2025**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Tujuan 1: Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	70%	**Tujuan:** Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	75.50%
Sasaran 1.1: Meningkatnya kompetensi dan kinerja ASN	Persentase pejabat struktural dan fungsional yang memiliki sertifkat diklat sesuai dengan jenjang jabatannya	75%	**Sasaran 1:** Meningkatnya kompetensi dan kinerja ASN	Persentase pejabat struktural dan fungsional yang memiliki sertifkat diklat sesuai dengan jenjang jabatannya	70%
	Persentase ASN dengan capaian SKP minimal BAIK	100%		Persentase ASN dengan capaian SKP minimal BAIK	100%
	Persentase ASN yang mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin	<1%	**Sasaran 2:** Meningkatkan tata kelola kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	70.75%
Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pengadaan, pemberhentian, dan mutasi (pergeseran, promosi dan demosi) ASN	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM (Pelayanan Kepagawaian ; Penerimaan, Promosi, Demosi, Pensiun dll)	85%		Tingkat literasi digital ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85%

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
Tujuan/Sasaran	**Indikator Tujuan/sasaran**	**Target 2025**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator Tujuan/sasaran**	**Target 2025**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Tujuan 2: Meningkatkan tata kelola pada BKPSDM	Indeks Reformasi Birokrasi BKPSDM	B			
Sasaran 2.1: Meningkatnya tata kelola kinerja pada BKPSDM	Nilai SAKIP pada BKPSDM	B			

Sumber : Renstra BKPSDM Tahun 2023-2026 dan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAANBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembanngan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki peran strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengembangan kompetensi aparatur di tingkat daerah. BKPSDM bertugas memastikan bahwa kebijakan nasional, termasuk UU ASN No. 5 Tahun 2014, RPJMN 2025–2029, serta Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang SPBE, dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pemerintahan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dirancang untuk meningkatkan profesionalisme ASN, memperkuat reformasi birokrasi, serta mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada pengelolaan kepegawaian dan pengembangan kompetensi, tetapi juga menitikberatkan pada digitalisasi proses administrasi, penguatan budaya kerja, dan peningkatan kesejahteraan ASN.

Dengan strategi prioritas yang jelas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan SDM aparatur daerah, mempercepat pencapaian target pembangunan, dan menyelaraskan implementasi kebijakan nasional dengan kebutuhan spesifik daerah. Hal ini sekaligus mendukung terciptanya ASN yang profesional, kompeten, adaptif, dan berintegritas, serta pelayanan publik yang responsif dan akuntabel bagi masyarakat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembanngan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV-1
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
1	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**			**730.411.880**
		Pengembangan Kompetensi Teknis		**730.411.880**
			Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi jabatan Administrasi Penyelenggala Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	730.411.880
2	**Program Kepegawaian Daerah**			**853.633.130**
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		**473.231.330**
			Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	53.246.400

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
			Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	296.005.430
			Perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	38.030.000
			Pengelolaan system informasi kepegawaian	59.043.700
			Pengelolaan data kepegawaian	11.944.800
			Evaluasi data, informasi dan system informasi kepegawaian	14.961.000
		Mutasi dan Promosi		**133.851.300**
			Pengelolaan mutasi ASN	13.857.200
			Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	109.998.590
			Pengelolaan promosi ASN	9.995.510

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
		Pengembangan Kompetensi ASN		**239.940.000**
			Peningkatan kapasitas kinerja ASN	225.622.700
			Pengelolaan assessment center	7.090.000
			Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	1.027.300
			Pembinaan jabatan fungsional ASN	6.200.000
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**6.610.500**
			Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3.620.400
			Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	1.030.600
			Evaluasi disiplin ASN	1.959.500

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
3	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**			**4.746.185.903**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**11.157.100**
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.000.100
			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.340.000
			Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	1.101.500
			Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	2.715.500
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**4.492.186.933**
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.487.419.033
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	191.800

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	2.117.100
			Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2.459.000
		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		**1.187.500**
			Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	1.187.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**149.771.370**
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.890.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.156.370
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.120.000
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	119.605.000

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**43.743.000**
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	43.743.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**42.000.000**
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	42.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**6.140.000**
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6.140.000

Sumber : Laporan Monev TW I BKPSDM Tahun 2025

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (hasil antara/*intermediate outcome*) adalah sebuah hasil akumulasi dari output sub kegiatan yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, dan merupakan indikator hasil jangka Panjang (*outcome*) dari program. Sedangkan sub kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu sub kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu sub kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan. Sub bab ini menyajikan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, sumber pendanaan masing – masing sub kegiatan, penyebaran lokasi kegiatan serta rumusan rencana kerja Tahun 2025 yang telah diinput dalam aplikasi SIPD RI.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan total pagu **Rp 5.927.762.783** dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV-2
Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**5.662.756.564,00**	**6.340.991.399,00**	**5.927.762.783,00**	**265.006.219,00**							**5.601.171.899,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.662.756.564,00**	**6.340.991.399,00**	**5.927.762.783,00**	**265.006.219,00**							**5.601.171.899,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**4.097.944.354,00**	**5.364.979.499,00**	**5.266.457.003,00**	**1.168.512.649,00**							**5.394.171.899,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**4.002.541.724,00**	**4.756.076.469,00**	**4.716.669.933,00**	**1.155.131.175,00**							**5.157.672.899,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.292.100,00	11.157.100,00	11.157.100,00	3.865.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.160.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	2.180.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.101.500,00	1.101.500,00	1.101.500,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.030.500,00	2.715.500,00	2.715.500,00	1.685.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.804.379.080,00	4.502.077.499,00	4.491.995.263,00	687.616.183,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.704.512.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.802.114.580,00	4.497.309.599,00	4.487.419.163,00	685.304.583,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENINJANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.674.512.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	191.800,00	191.800,00	0,00	-191.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.572.700,00	2.117.100,00	2.117.100,00	544.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10	10	500.000,00	2.459.000,00	2.459.000,00	1.959.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		117.406.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			117.406.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	44.015.060,00	149.771.370,00	120.447.070,00	76.432.010,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		84.998.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	2.190.000,00	13.890.000,00	13.890.000,00	11.700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.060,00	13.156.370,00	14.365.070,00	9.365.010,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	33.705.000,00	119.605.000,00	89.072.000,00	55.367.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.998.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	37.616.000,00	43.743.000,00	43.743.000,00	6.127.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	37.616.000,00	43.743.000,00	43.743.000,00	6.127.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	100.641.984,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-58.641.984,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		102.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58.641.984,00	0,00	0,00	-58.641.984,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.410.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	-1.270.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		18.755.374,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	7.410.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	-1.270.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.755.374,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**99.402.730,00**	**612.903.130,00**	**553.787.170,00**	**144.096.270,00**							**243.499.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	31.345.130,00	273.231.330,00	228.967.060,00	197.621.930,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		51.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	3.009.400,00	53.246.400,00	28.991.400,00	25.982.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.230,00	130.703.230,00	111.843.960,00	110.843.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	8.765.000,00	28.030.000,00	19.480.000,00	10.715.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9.989.000,00	59.043.700,00	49.703.700,00	39.714.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				20 Dokumen	20 Dokumen	7.830.000,00	800.000,00	5.665.000,00	-2.165.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				5 0	5 0	751.500,00	1.408.000,00	13.283.000,00	12.531.500,00	-	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	33.047.100,00	133.851.300,00	83.229.610,00	50.182.510,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				500 Dokumen	500 Dokumen	13.047.200,00	13.857.200,00	13.857.200,00	810.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				600 Dokumen	600 Dokumen	10.000.190,00	109.998.590,00	59.376.900,00	49.376.710,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			64.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	9.999.710,00	9.995.510,00	9.995.510,00	-4.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	28.075.000,00	199.210.000,00	234.980.000,00	206.905.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		82.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	5.747.700,00	184.892.700,00	225.622.700,00	219.875.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				9 Dokumen	9 Dokumen	8.900.000,00	7.090.000,00	5.230.000,00	-3.670.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				10 Orang	10 Orang	1.027.300,00	1.027.300,00	1.027.300,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				12 Dokumen	12 Dokumen	12.400.000,00	6.200.000,00	3.100.000,00	-9.300.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	6.935.500,00	6.610.500,00	6.610.500,00	-325.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-			9.999.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	3.870.400,00	3.620.400,00	3.620.400,00	-250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.592.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				100 Orang	100 Orang	1.030.600,00	1.030.600,00	1.030.600,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.043.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				5 Laporan	5 Laporan	2.034.500,00	1.959.500,00	1.959.500,00	-75.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.364.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.560.812.110,00**	**972.011.800,00**	**657.305.680,00**	**-903.506.430,00**							**200.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	-				-	-	**1.560.812.110,00**	**972.011.800,00**	**657.305.680,00**	**-1.360.812.110,00**							**200.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	1.560.812.110,00	972.011.800,00	657.305.680,00	-903.506.430,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				21 Orang	21 Orang	1.560.812.110,00	972.011.800,00	657.305.680,00	-903.506.430,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**4.000.100,00**	**4.000.100,00**	**4.000.100,00**	**0,00**							**7.000.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**4.002.541.724,00**	**4.756.076.469,00**	**4.716.669.933,00**	**1.155.131.175,00**							**5.157.672.899,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.292.100,00	11.157.100,00	11.157.100,00	3.865.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.100,00	4.000.100,00	4.000.100,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	JUMLAH								**5.662.756.564,00**	**6.340.991.399,00**	**5.927.762.783,00**	**265.006.219,00**							**5.601.171.899,00**	

Sumber : SIPD RI Kemendagri 2025

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 tidak terlepas dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar 2023-2026. Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

Perubahan Renja bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya perencanaan tahun 2025, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar pada tahun sebelumnya adalah sangat baik.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar merencanakan 3 program, 12 kegiatan dan dijabarkan menjadi 33 sub kegiatan. Sebagai penutup, Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025

Selain itu, apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga/OPD pengelola kepegawaian Kabupaten Takalar.

Takalar, September 2025
PLT. Kepala Badan,

MUHAMMAD SAYUTI, S.Kom.,M.AP
Pangkat : Penataa Tingkat I
NIP. 19781109 200701 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 dilakukan untuk memberikan arahan yang lebih jelas sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efesien dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, terlebih lagi dengan adanya efesiensi anggaran yang mengharuskan penghematan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar ini merupakan uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar dalam rangka pencapaian Tujuan serta Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 202-2026, sedangkan perubahan Rencana Kerja ini sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2025-2029 sebagaimana telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Takalar serta 7 (tujuh) Program Prioritas Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.

Perubahan Renja Tahun 2025 BPBD Kabupaten Takalar disusun dengan memperhatikan kebutuhan pengurangan anggaran yang harus dilakukan dengan sedapat mungkin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencapian target kinerja BPBD Kabupaten Takalar yang telah ditetapkan pada Renja Pokok Tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat tetap bersinergi dengan program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD lainnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalat Tahun 2025-2029.

Takalar, September 2025

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Takalar,

NURIKSAN NURDIN, SE., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197001132005021002

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 : Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-2

Tabel II-2 : Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang ada dala APBD Tahun 2025 ..... II-8

Tabel II-3 : Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan pada APBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I II-9

Tabel II-4 : Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ... II-11

Tabel II-5 : Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 ... II-13

Tabel II-6 : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar II-15

Tabel II-7 : Evaluasi Indikator SPM BPBD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 ..... II-18

Tabel III-1 : Perubahan Tujuan, Sasaran serta Target Kinerja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-3

Tabel IV-1 : Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah IV-2

Tabel IV-2 : Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... IV-4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-4

1.3.1. Maksud I-4

1.3.1. Tujuan I-5

1.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCAN KERJA BPBD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-1

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar yang Terakomodir pada APBD Tahun 2025 ..... II-8

2.1.2. Evaluasi Capaian Kinerja dan Pendanaan APBD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD KABUPATEN TAKALAR III-1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Takalar III-2

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BPBD KABUPATEN TAKALAR IV-1

4.1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-1

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 …..... IV-3

BAB IV PENUTUP …… V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai perencanaan pembngunan yang disusun untuk jangka menengah, mengacu pada Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakanan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kenerja, serta bagaimana pelaksanaan program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penangguangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2025 melalui perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 361 ayat (1), Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), terdiri atas:

a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar tahun 2025 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh BNPB RI dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar Tahun 2025 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.

Dalam menyempurnakan Perubahan Rencana dimaksaud, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 45 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan *(input)*, keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)* yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2025.
c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan keselarasan antara Renja dengan APBD Tahun 2025.
d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025.
e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025, yang merupakan tahun ke-1 dari pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah untuk menyusun rekomendasi dan tindak lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) serta peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Takalar agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dengan meliputi : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistimatika Penulisan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Sampai Triwulan I Tahun 2025. Bab ini memuat rekapitulasi jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terakomodir dalam APAD Kabupaten Takalar serta evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Takalar. Berisikan rumusan tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Takalar dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.

BAB III. Rencana Program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025. Berisikan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan yang terakomodir dalam Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB IV. Penutup. Berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar Takalar Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD KABUPATEN TAKALAR TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2025. Demikian pula dengan realisasi anggaraan yang sangat rendah pada smpai dengan taanggal 30 maret 2025. Pada APBD Pokok Tahun 2025 BPBD Kabupaten Takalar melaksanakan 2 (dua) program yang didukung dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (Delapan belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.048.525.815,- (Tiga milyar empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2025 dan Pencapaian Rencana Strategis BPBD Kabupaten Takalar 2023-2026 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II.1

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Indeks Pelayanan Penanggulangan Bencana 100%
2. Indeks Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nilai Sakip BB

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	8		12		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
		1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**			**3,031,236,816**	**24%**	**425,863,720**		**425,863,720**	23.53%	14.05%		
		1	**5**	**1**			**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**2,781,236,906**	**13%**	**422,064,880**	**13%**	**422,064,880**	**13.05%**	**15.18%**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	
	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	**1**	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, program dan kegiatan yang disusun**	**100%**	**11,042,290**	**0%**	**826,200**	**0%**	**826,200**	**0%**	**7%**		
		1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja perangkat Daerah yang disusun	2	4,574,790	-	670,000	-	670,000	0%	15%		
		1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA perangkat daerah yang disusun	1	3,386,800	-	-	-	-	0%	0.00%		
		1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA perangkat daerah yang disusun	1	3,080,700	-	156,200	-	156,200	0%	5.07%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0.00%**	**6.57%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		

	Meningkatkan kualitas pengelolaanadministrasi keuangan	**1**	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pealaksanaan pengelolaan administrasi keuangan**	**100%**	**2.438.062.406**	**15%**	**375.867.590**	**15%**	**375.867.590**	**15%**	**15%**		
		1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangn ASN	252	1.686.419.246	72	375.424.490	72	375.424.490	29%	22%		
								Jumlah ASN yang menerima TPP	216	739.593.660	-	-	-	-	0%	0%		
								Jumlah ASN yang menerima Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan	24	9.240.000	-	-	-	-	0%	0%		
		1	5	1	2.02	7	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ Semesteran	jumlah laporan keuangan triwulanan/ semesteran yang disusun	4	2.809.500	1	443.100	1	443.100	25%	16%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**13,39%**	**9,51%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
	Meningkatkan kualitas kedisiplinan dan SDM Aparatur	**1**	**5**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**1.441.100**	**25%**	**161.800**	**25%**	**161.800**	**25%**	**11%**		
		1	5	1	2.05	5	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4	1.441.100	1	161.800	1	161.800	25%	11%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**25%**	**11,23%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	**1**	**5**	**1**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perkantoran**	**100%**	**64.138.210**	**25%**	**16.145.090**	**25%**	**16.145.090**	**25%**	**25%**		
		1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	**10.553.200**	1	2.533.200	1	2.533.200	25%	24%		
		1	5	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan dan barang cetakan yang disediakan	3	**2.849.000**	1	522.640	1	522.640	33%	18%		
		1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	50	**50.736.010**	12	13.089.250	12	13.089.250	24%	26%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**27,44%**	**22,72%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		

		1	**5**	**1**	**2.07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**100%**	**22.934.000**	**0,00%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**0%**		
		1	5	1	2.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3	22.934.000	-	-	-	-	0%	0%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0%**	**0%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	**1**	**5**	**1**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**100%**	**195.978.900**	**20,83%**	**28.439.200**	**21%**	**28.439.200**	**20,83%**	**14,51%**		
		1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening PDAM yang dibayarkan	12	2.778.900	3	439.200	3	439.200	25%	16%		
		1	5	1	2.08	4	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	193.200.000	2	28.000.000	2	28.000.000	17%	14%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**20,83%**	**15,15%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	**1**	**5**	**1**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah**	**100%**	**47.640.000**	**6%**	**625.000**	**6%**	**625.000**	**6%**	**1%**		
		1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	43.580.000	1	625.000	1	625.000	17%	1%		
		1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prsarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah saran dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	4.060.000	-	-	-	-	0%	0%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**8,33%**	**0,72%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**13,57%**	**9,41%**		
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**		

		1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana**	**100%**	**249.999.910**	**34,00%**	**3.798.840**	**34,00%**	**3.798.840**	**34,00%**	**1,52%**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bencana	**1**	**5**	**3**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100%**	**25.000.100**	**0,00%**	**1.123.000**	**0,00%**	**1.123.000**	**0%**	**4%**		
		1	5	3	2.01	1	Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)	Jumlah Dokumen KRB sampai dinyatakan sah/legal	1	25.000.100	-	1.123.000	-	1.123.000	0%	4%		SPM
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**4,49%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
	Terwujudnya sistem penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang efektif dan efisien	**1**	**5**	**3**	**2.03**		**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**25.000.000**	**102,00%**	**1.166.900**	**102,00%**	**1.166.900**	**102%**	**5%**		
		1	5	3	2.03	9	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah logistik dasar yang diberikan kepada korban bencanapaket	100	25.000.000	102	1.166.900	102	1.166.900	102%	5%		SPM
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**102,00%**	**4,67%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**ST**	**SR**		
	Terwujudnya sistem penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang efektif dan efisien	**1**	**5**	**3**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**199.999.810**	**0,00%**	**1.508.940**	**0,00%**	**1.508.940**	**0%**	**1%**		
		1	5	3	2.04	6	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1	199.999.810	-	1.508.940	-	1.508.940	0%	1%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,75%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**34,00%**	**3,30%**		
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**		

	Terwujudnya sistem penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang efektif dan efisien	**1**	**5**	**3**	**2.03**		**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**Persen**	**744.000.000**	**89,00%**	**15.355.200**	**100%**	**25.000.000**	**102,00%**	**1.166.900**	**102,00%**	**1.166.900**	**102%**	**5%**		
		1	5	3	2.03	9	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah logistik dasar yang diberikan kepada korban bencanapaket	400	Paket	744.000.000	89	15.355.200	100	25.000.000	102	1.166.900	102	1.166.900	102%	5%		SPM
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				**102,00%**	**4,67%**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**ST**	**SR**		
	Terwujudnya sistem penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang efektif dan efisien	**1**	**5**	**3**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**Persen**	**100.000.000**	**100,00%**	**9.940.000**	**100%**	**199.999.810**	**0,00%**	**1.508.940**	**0,00%**	**1.508.940**	**0%**	**1%**		
		1	5	3	2.04	6	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	4	Dokumen	100.000.000	1	9.940.000	1	199.999.810	-	1.508.940	-	1.508.940	0%	1%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				**0,00%**	**0,75%**		
Predikat Kinerja Kegiatan																				**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																				**34,00%**	**3,30%**		
Predikat Kinerja Program																				**SR**	**SR**		
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Ketersediaan petugas penanggulangan bencana serta bantuan logistik dasar dari BPBD Provinsi sulsel																							
Faktor penghambat: Skil dan keterampilan TRC masih kurang, butuh pelatihan rutin																							
Faktor penghambat: Peralatan penanggulangan bencana sangat kurang dan kondisinya banyak yang rusak berat																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																							
Sumber Data : Monef Renja BPBD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025																							

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BPBD Kabupaten Takalar melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penanggulangan Bencana dengan tingkat realisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target (<25%) :
   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja sebesar 13,05%. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi target adalah sebagai berikut :
   - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi kinerja 0%
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan raealisasi kinerja 15%
   - Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan raealisasi kinerja 0 %
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan raealisasi kinerja 6 %

   Realisasi capaian program ini secara umum belum mencapai target, meskipun beberapa sub kegiatan telah mencapai target kinerja. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya :
   - Rendahnya serapan anggaran akibat lemahnya kinerja kinerja keuangan BPBD Kabupaten Takalar serta peralatan kerja yang kurang memadai
   - Beberapa kegiatan yang memang belum bisa dilaksanakan pada Triwulan I, seperti penyusunan dokumen perencanaan dan pengadaan barang.
2. Program/kegiatan yang sudah memenuhi target (> 25%) :
   Program Penanggulangan Bencana dengan realisasi kinerja 34%. Adapun kegiatan yang telah melampaui target kinerja (> 25%) adalah :
   - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, kegiataan ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target kinerja indikator 100 paket logistik dasar/darurat yang disalurkan kepada korban bencana. Realisasi sampai dengn Triwulan I Tahun 2025 adalah 102 paket yang telah disalurkan (102%).

   Sesungguhnya dari 3 (tiga) kegiatan yang mendukung program penanggulangan bencana, 2 (dua) kegiatan diantaranya belum ada kinerja sama sekali karena sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 kegiatan

penyusunan dokumen KRB serta Penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstrusi Pasca Bencana (R3P) melalui Jitupasna belum bias dilaksanakan. Tingginya realisasi kinerja pada sub kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana disebabkan karena hal-hal berikut :

- Tingginya jumlah masyarakat Kabupaten Takalar yang terkena atau terdampak bencana secara langsung padaawal tahun 2025;
- Ada bantuan logistik dasar/darurat dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Ada dukungan dari Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) untuk melakukan kaji cepat pada setiap kejadian bencana dan pada saat penyaluran bantuan logistik dasar/darurat.

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar yang Terakomodir pada APBD Tahun 2025

Rekapitulasi jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut :

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	BPBD	2	10	17	2	10	19
TOTAL		**2**	**10**	**17**	**2**	**10**	**19**

2.1.2. Evaluasi Capaian Kinerja dan Pendanaan APBD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Rata-rata Capaian kinerja program (output) pada APBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulaan I Tahun 2025 adalah 23,79 % (tinggi) sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran program adalah 6,36 % (sangat rendah).

Rata-rata Capaian kinerja kegiatan (output) pada APBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah 23,79% (sangat tinggi) sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran kegiatan adalah 7,89 % (sangat rendah).

Rata-rata Capaian kinerja sub kegiatan (output) pada APBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulaan I Tahun 2025 adalah 23,52 % (tinggi) sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran sub kegiatan adalah 8,35 % (sangat rendah).

Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II.3 berikut :

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	BPBD	3.031.236.816	425.863.720	23,50%	14,05%
TOTAL		**3.031.236.816**	**425.863.720**	**23,50%**	**14,05%**

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan

Rekapitulasi capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan ABPD BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dijelaskan Sebagai berikut :

- Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan, 1 (satu) Program dengan realisasi pendanaan <10%, yaitu Program Penanggulangan bencana dengan ralisasi 1,25% dan 1 (satu) program dengan realisasi pendanaan <20%, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan ralisasi pendanaan 15,18 %
- Dari 10 (sepuluh) Kegiatan yang dilaksanakan, 6 (enam) kegiatan dengan realisai 0-10% (rendah), 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi <10%-20% (sedang) dan 1 (satu) kegiatan dengan realisasi >20% (tinggi)
- Dari 17 (sepuluh) Kegiatan yang dilaksanakan, 8 (delapan) kegiatan dengan realisai 0-10% (rendah), 6 (enam) kegiatan dengan realisasi <10%-20% (sedang) dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan realisasi >20% (tinggi)

Rekapitulasi capaian pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II-4

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja BPBD Kabupaten Takalar

Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	BPBD	2	1	1	-	10	6	3	1	17	8	6	3
TOTAL		**2**	**1**	**1**	**0**	**10**	**6**	**3**	**1**	**17**	**8**	**6**	**3**

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja

Rekapitulasi capaian kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan ABPD BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dijelaskan Sebagai berikut :

- Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan, 1 (satu) Program dengan realisasi kinerja <10%-20% (sedang), yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan ralisasi kinerja 13,05 % Program Penanggulangan bencana dengan ralisasi 1,25% dan 1 (satu) program dengan realisasi pendanaan >20% (tinggi), yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan ralisasi kinerja 34 %
- Dari 10 (sepuluh) Kegiatan yang dilaksanakan, 5 (lima) kegiatan dengan realisai 0-10% (rendah), 1 (satu) kegiatan dengan realisasi <10%-20% (sedang) dan 4 (empat) kegiatan dengan realisasi >20% (tinggi)
- Dari 17 (sepuluh) Kegiatan yang dilaksanakan, 7 (tujuh) kegiatan dengan realisai 0-10% (rendah), 2 (dua) kegiatan dengan realisasi <10%-20% (sedang) dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan realisasi >20% (tinggi)

Rekapitulasi capaian kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II-5

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	BPBD	2	0	1	1	10	5	1	4	17	7	2	8
TOTAL		**2**	**0**	**1**	**1**	**10**	**5**	**1**	**4**	**17**	**7**	**2**	**8**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian IKU BPBD Kabupaten Takalar mengalami perubahan, Renja BPBD Tahun 2025 berdasarkan Renstra BPBD Tahun 2023-2025 dan Perubahan Renja Tahun 2025 berdasarkan Renstra BPBD Tahun 2025-2029. Adapun IKU BPBD pada Renstra Tahu 2023-2026 adalah sebagai Berikut :

1. Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
2. Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Persentase warga negara memperoleh layanan penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
4. Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten melalui melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna)
5. Indikator Nilai Sakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sementara itu IKU BPBD Kabupaten Takalar pada Renstra BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Resiko Bencana
2. Indeks Ketahana Daerah
3. Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada BPBD
4. Tingkat Literasi Digital ASN BPBD

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel II-6 berikut :

Tabel II-6
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KabupatenTakalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	10%	12,98%	**Indeks Risiko Bencana**	**125,40**	**125,10**	**124,80**	-	**125,10**	**124,80**	
2	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10%	0,12%	Indeks Ketahana Daerah	0,41	0,43	0,45	-	0,43	0,45	
3	Persentase warga negara memperoleh layanan penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100%	42,86%	Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat pada BPBD	70,01	71,20	72,00	-	71,20	72,00	
4	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten melalui JITU PASNA dan R3P	1	1	Tingkat literasi digital ASN BPBD	100%	100%	100%	-	100%	100%	
5	Indeks Reformasi Birokrasi BPBD	B	B								

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKU BPBD Kabupaten Takalar adalah :

1. Indikator Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, target kinerja adalah 10 %. Realisasi sampai dengan Triwulan I adalah 30.622 orang atau **13,53 %** dari penduduk Kabupaten Takalar yang berusia antara 15-64 tahun pada Tahun 2025 sebanyak 226.346 jiwa. Jumlah warga Negara yang mendapatkan informasi rawan bencana terdiri dari 24.509 orang melalui papan informasi publik, 5.938 orang melaui rambu evakuasi dan 175 orang melalui sosialisasi tatap muka.
2. Indikator Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, target kinerja adalah 10 %. Pada Renstra 2025-2029, indikator ini telah berubah menjadi Jumlah warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan demikian maka indikator pada Perubahan Renja 2025 juga berubah menjadi Jumlah warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target kinerja 200 orang. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah 397 orang yang mengikuti pelatihan atau **1,19%** dari penduduk Kabupaten Takalar sebanyak 332.863 jiwa.
3. Indikator Persentase warga negara memperoleh layanan penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban bencana dengan target kinerja 100%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja indikator ini adalah 34,11% atau 102 jiwa dari 299 jiwa warga Negara yang terkena bencana. Layanan yang diberikan adalah evakuasi orang tenggelam di laut, hanyut di sungai serta pemberian paket logistic dasar/darurat bagi korban bencana.
4. Indikator Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten melalui JITU PASNA dan R3P dengan target kinerja 1 dokumen proposal. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, BPBD Kabupaten Takalar belum menyelesaikan proposal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna)
5. Indikator Nilai Sakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan target kinerja 70,01 (Nilai sakip B). Sampai dengan saat ini nilai Sakip Tahun 2025 belum dinilai.

Sementara itu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Renstra 2025-2029 yang tercantum dalam Perubahan Renja sampai saat ini belum dinilai.

2.2.3 Capaian SPM BPBD Kabupaten Takalar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), BPBD menyelenggarakan SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan Bencana, sebagai berikut :

1. Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2. Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Indikator Persentase warga negara memperoleh layanan penyelamatan.

Capaian Indikator SPM BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel II-6 berikut :

Tabel II-7

Evaluasi Indikator SPM

BPBD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pelayanan informasi rawan bencana					
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100%	13.53%	BPBD
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100%	0,12%	BPBD
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100%	34,11%	BPBD

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian SPM BPBD Kabupaten Takalar adalah :

1. Indikator Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, target kinerja adalah 10 %. Realisasi sampai dengan Triwulan I adalah 30.622 orang atau **13,53 %** dari penduduk Kabupaten Takalar yang berusia antara 15-64 tahun pada Tahun 2025 sebanyak 226.346 jiwa. Jumlah warga Negara yang mendapatkan informasi rawan bencana terdiri dari 24.509 orang melalui papan informasi publik, 5.938 orang melaui rambu evakuasi dan 175 orang melalui sosialisasi tatap muka.
2. Indikator Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, target kinerja adalah 10 %. Pada Renstra 2025-2029, indikator ini telah berubah menjadi Jumlah warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan demikian maka indikator pada Perubahan Renja 2025 juga berubah menjadi Jumlah warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target kinerja 200 orang. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah 397 orang yang mengikuti pelatihan atau **1,19%** dari penduduk Kabupaten Takalar sebanyak 332.863 jiwa.
3. Indikator Persentase warga negara memperoleh layanan penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban bencana dengan target kinerja 100%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja indikator ini adalah 34,11% atau 102 jiwa dari 299 jiwa warga Negara yang terkena bencana. Layanan yang diberikan adalah evakuasi orang tenggelam di laut, hanyut di sungai serta pemberian paket logistic dasar/darurat bagi korban bencana.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BPBD KABUPATEN TAKALAR

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Tema Pembangunan Pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah pada Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran Pembangunan Nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, serta intensitasemisi gas rumah kaca.

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagaai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sisten pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sertamengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk miningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis denngan lingkungan, alam dan budaya,, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025-2029 dan RPJMD Tahun 2025-2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja BPBD Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra BPBD Tahun 2023–2026 sementara untuk Perubahan Renja BPBD Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra BPBD Tahun 2025–2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 maka dirumuskanlah tujuan BPBD Kabupaten Takalar yaitu “Meningkatkan pelayanan Penanggulalangan Bencana”, untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif dan terpadu; dan
2. Meningkatnya Tata Kelola pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja BPBD Kabupaten Takalar beserta indikator dan target kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel III.1 berikut :

TABEL III-1

Perubahan Tujuan, Sasaran serta Target Kinerja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			RENJA POKOK TAHUN 2025		
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET 2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan-1 : Meningkatkan pelayanan Penanggulangan Bencana	**Indeks Pelayanan Penanggulangan Bencana**	**25,00%**	**Tujuan-1 : Meningkatkan pelayanan Penanggulangan Bencana**	**Indeks Risiko Bencana**	**125,40**
Sasaran-1.1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bencana	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	10,00%	**Sasaran-1.1 :** Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bencana	Indeks Ketahana Daerah	0,43
Sasaran-1.2 : Meningkatnya kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10,00%	**Sasaran-1.2 :** Meningkatnya Tata Kelola pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat pada BPBD	BB
Sasaran-1.3 : Meningkatnya pelayanan penanganan darurat bencana yang lebih responsif	Persentase warga negara memperoleh layanan penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100,00%		Tingnkat literasi digital ASN BPBD	100%
Sasaran-1.4 : Meningkatnya pelayanan pemulihan kondisi masyarakat serta sarana dan prasarana pasca bencana	Jumlah warga negara memperoleh layanan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana	200			
Tujuan-2 : Meningatkan Tata kelola pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Indeks Reformasi Birokrasi pada Badan Penanaggulangan Bencana Daerah**	**B**			
Sasaran-2.1 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja BPBD	Nilai Sakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B			

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BPBD KABUPATEN TAKALAR

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 **Prioritas Daerah-5. Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. IV.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Proram	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
Program Penanggulangan Bencana			**157.097.370**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	***Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana***	***12.967.100***
		Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	12.967.100
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	***Persentase warga negara korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana***	***22.550.000***
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22.550.000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	***Persentase Jumlah dokumen penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tersusun***	***121.580.270***
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	121.580.270

4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan Total anggaran Rp. 2.928.911.796,- (Dua milyar Sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu ribu tujuh ratus sembulan puluh enam rupiah) dapat dilihat pada tabel berikut, yyang merupakan hasi download SIPD :

Dari table IV.22 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan alokasi anggaran antara Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar dengan DPA Pokok Tahun 2025 yaitu total anggaran sebesar Rp. 3.031.236.816,- (Tiga milyar tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota sebesar Rp. 2.781.236.906,- (Dua Milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus enam rupiah)

Program penanggulangan bencana sebesar Rp. 249.999.910;- (Dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah)

Sementara itu pada perubahan Rencana Kerja (Renja) terdapat pegurangan anggaran sehingga total anggaran yang akan dikelola BPBD Kabupaten Takalar adalah sebesar Rp. 2.938.334.276,- (Dua milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota sebesar Rp. 2.781.236.906,- (Dua Milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus enam rupiah)

Program penanggulangan bencana sebesar Rp. 157.097.370;- (Seratus lima puluh tujuh juta Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)

Pengurangan anggaran dilakan karena adanya efesiensi anggaran ole BPKD Kabupaten Takalar, khususnya untuk anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian hanya program penanggulangan bencana yang mengalami pengurangan sebesar Rp. 92.902.540,- (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus empat puluh rupiah). Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota tidak mengalami efesiensi anggaran karena seluruh anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini menjadi instrumen utama bagi BPBD Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar tahun 2025 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara BPBD dengan instansi lainnya serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, BPBD Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tugas dan kewenangan, maka dengan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 diharapkan untuk :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada BPBD Kabupaten Takalar;
2. Menciptakan kepastian arah kebijakan program dan kegitan prioritas;
3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA BPBD Kabupaten Takalar tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Takalar sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung Prioritas Pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar 2025-2029 yang ingin dicapai.

Takalar, September 2025

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Takalar,

NURIKSAN NURDIN, SE., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197001132005021002

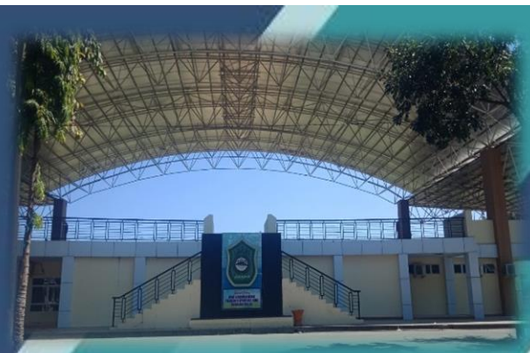

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DPMPTSP KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

dpmptsp
KABUPATEN TAKALAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
KATA PENGANTAR **1**
BAB I **2**
PENDAHULUAN **2**
1.1 LATAR BELAKANG 2
1.2 LANDSAN HUKUM 4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 6
BAB II **7**
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **7**
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 7
2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 yang Terakomodir di APBD 2025 13
2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025 13
2.1.3 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 14
2.1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025 17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 19
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 19
BAB III **25**
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **25**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25
3.1.1 Tema Pembangunan Kebijakan Nasional Pada RKP Tahun 2025 25
3.1.2 Sasaran Pembangunan Pada RKP Tahun 2025 25
3.1.3 Prioritas Nasional Pad RKP Tahun 2025 25
3.2 Tujuan Dan Sasaran 25
BAB IV **27**
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025 ..... **27**
4.1 Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan 27
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Perubahan Renja PD 27
BAB V **43**
P E N U T U P **43**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tahun 2025.

Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenTakalar tahun 2025 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2025–2029 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dankegiatan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yangditetapkan.

Takalar, September 2025

Plt. Kepala Dinas,

NASRUDDIN. A.,S.T.,M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP.19710724 200212 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar (DPMPTSP) disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor ……. Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan dan/atau perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan

adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap PD diharuskan untuk Menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurung waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan

b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2025 melalui perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2025. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 361 ayat (1), Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), terdiri atas:

a. Perumusan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b. Penyajian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke III (ke- Tiga)

pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tahun 2025 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2025 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025. Dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ,maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.2 LANDSAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

JangkaMenengah Daerah, dan RencanaKerjaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-258 Tahun 2025 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 30);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. MAKSUD

Adapun Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 yang karena adanya beberapa perubahan dari rencana kerja sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah akibat terjadinya Pelenyelarasan anggaran.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

b. TUJUAN

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tidak lain adalah:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai triwulan I dan dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
2. Mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedalam suatu strategi program/kegiatan.
3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan Berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Renja, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sampai Dengan Triwulan I Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Hambatan, upaya pencapaian dan rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Berisikan rumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, serta memuat program dan kegiatan beserta lokasinya sesuai dengan rancangan Perubahan RKPD dan rancangan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun rencana keduanya.

BAB IV. Penutup bab ini berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sampai Dengan Triwulan I

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 sampai pada Triwulan I telah dicapai dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata mencapai untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai untuk kinerja *output* dan *outcome* kegiatan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*)dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,sumber daya manusia,laporan, buku dan indikator lainnya.

Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

Kegiatan evaluasi Renja SKPD dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 :

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Laporan Monev Triwulan I

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
											JANUARI		FEBRIARI		MARET		Triwulan I		TRIWULAN I 2025			
									K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										3.416.127.054							21,31%	519.329.292	21,31%	519.329.292		15,20%
1	2	18	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**3.121.127.054**	**2,93%**	**120.530.180**	**2,93%**	**120.949.663**	**9,03%**	**271.224.649**	**14,87%**	**512.704.492**	**14,89%**	**512.704.492**	**14,89%**	**16,43%**
	2	18	01	2.01		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	100%	26.598.700	0,00%	-	0,00%	-	28,57%	8.484.000	28,57%	8.484.000	28,57%	8.484.000	28,57%	31,90%
	2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja serta perubahannya yang disusun	Dokumen	1	5.197.500	0	-			1	4.164.000	1	4.164.000	1	4.164.000	100,00%	80,12%
	2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1	5.292.000	0	-			1	4.320.000	1	4.320.000	1	4.320.000	100,00%	81,63%
	2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1	3.000.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%
	2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Dokumen DPA Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1	4.188.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%
	2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	1	3.629.200							0	-	0	-	0,00%	0,00%
	2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	1	1.572.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%
	2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/triwulan	Laporan	1	3.720.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**28,57%**	**23,11%**
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**
	2	18	01	2.02		**Administrasi Keuangan**	**Persentase**	**Persen**	100%	2.916.554.154	3,52%		3,52%		7,20%		0,15%		14,24%		14,24%	16,64%

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
											JANUARI		FEBRIARI		MARET		Triwulan I		TRIWULAN I 2025			
									K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.
						Perangkat Daerah	**Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah**					120.530.180		120.949.663		243.928.149		485.407.992		485.407.992		
	2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji	Orang	336	2.016.728.148	23	120.530.180	23	120.949.663	46	242.928.149	92	484.407.992	92	484.407.992	27,38%	24,02%
							Jumlah ASN yang mendapat TPP	Orang	288	874.632.506							0	-	0	-	0,00%	0,00%
							Jumlah ASN yang mendapat Honorarium Pengelola Keuangan	Orang	24	9.240.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%
	2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas	Dokumen	1	8.957.500							0	-	0	-	0,00%	0,00%
	2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	1	1.000.000					1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00%	100,00%
	2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	1	4.364.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%
	2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan	1	1.008.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%
	2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan	1	624.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**15,92%**	**15,50%**
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**
	2	18	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**Persen**	100%	5.006.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	3.998.800							0	-	0	-	0,00%	0,00%
	2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1.008.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%
Predikat kinerja																					SR	SR
	2	18	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Dukungan Penyelenggaraan**	**Persen**	100%	29.119.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
											JANUARI		FEBRIARI		MARET		Triwulan I		TRIWULAN I 2025			
									K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.
							Pelayanan Administrasi															
	2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Bulan	10	1.000.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%
	2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	6	28.119.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**0,00%**	**0,00%**
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**
	2	18	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa yang tersedia**	**Persen**	100%	107.126.400	0,00%	-	0,00%	-	17,53%	13.207.000	17,71%	13.207.000	17,71%	13.207.000	17,71%	12,33%
	2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening pemakaian telepon, sumber daya air dan listrik	Rekening	12	14.726.400					3	2.007.000	3	2.007.000	3	2.007.000	25,00%	13,63%
	2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	84	92.400.000					14	11.200.000	14	11.200.000	14	11.200.000	16,67%	12,12%
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**20,83%**	**12,87%**
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**
	2	18	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi**	**Persen**	100%	36.722.000	0,00%	-	0,00%	-	57,14%	5.605.500	57,14%	5.605.500	57,14%	5.605.500	57,14%	15,26%
	2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Unit	4	33.630.000					1	2.520.000	1	2.520.000	1	2.520.000	25,00%	7,49%
	2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	2	1.420.000					2	1.420.000	2	1.420.000	2	1.420.000	100,00%	100,00%
	2	18	01	2.09	09	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Paket	1	1.672.000					1	1.665.500	1	1.665.500	1	1.665.500	100,00%	99,61%
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**75,00%**	**69,03%**
Predikat kinerja																					**S**	**R**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																					22,20%	18,46%
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**
	2	18	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Iklim Penanaman Modal**	**Persen**	**100%**	50.000.000	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	**0,00%**	**0,00%**
	2	18	02	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kapubaten**	**Persenatse penetapan dan**	**Persen**	100%	50.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
											JANUARI		FEBRIARI		MARET		Triwulan I		TRIWULAN I 2025			
									K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.
						Takalar/kota	**pelaksanaan kebijakan penanaman moda**															
	2	18	02	2.02	04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%
	Rata-rata capaian kinerja (%)																				0%	0%
	Predikat kinerja																				SR	SR
2	2	18	03			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentasi Jumlah Promosi Penanaman Modal**	**Persen**	**100%**	30.000.000	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	**2.543.000**	**0,00%**	**2.543.000**	**0,00%**	2.543.000	**0,00%**	**8,48%**
	2	18	03	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**Persen**	100%	30.000.000	0%	-	0%	-	0%	2.543.000	0,00%	2.543.000	0%	2.543.000	0,00%	8,48%
	2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	1	15.000.000						1.295.000	0	1.295.000	-	1.295.000	0%	8,63%
	2	18	03	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	15.000.000						1.248.000	0	1.248.000	-	1.248.000	0%	8,32%
	\																				**0,00%**	**8,48%**
	Predikat kinerja																				SR	SR
3	2	18	04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu**	**Persen**	**100%**	115.000.000	**7,08%**	-	**8,40%**	-	**7,26%**	**4.081.800**	**22,74%**	**4.081.800**	**22,74%**	4.081.800	**22,74%**	**3,55%**
	2	18	04	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu**	**Persen**	100%	115.000.000	7,08%	-	8,40%	-	0,00%	4.081.800	22,74%	4.081.800	22,74%	4.081.800	22,74%	3,55%
	2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	4.356	85.000.000	309		369		318	2.691.700	996	2.691.700	996	2.691.700	23%	3,17%
	2	18	04	2.01	07	Penyediaan dan Pengelolaan	Jumlah Pelaku usaha	Pelaku	50	30.000.000	3		1		2		6				12,00%	4,63%

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
											JANUARI		FEBRIARI		MARET		Triwulan I		TRIWULAN I 2025			
									K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.
						Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Usaha								1.390.100		1.390.100	6	1.390.100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**17,43%**	**3,90%**
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**
4	2	18	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Frekuensi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persen**	**100%**	100.000.000	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**0,00%**
	2	18	05	02:01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota**	**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persen**	100%	100.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	50	100.000.000	0		0		0		0	-	0	-	0,00%	0,00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**0,00%**	**0,00%**
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																					**15,78%**	**13,29%**
Predikat Kinerja Program																					**SR**	**SR**
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																					14,04%	8,82%
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan																					22,46%	19,41%

Sumber Data : Monev Triwulan I 2025

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatanyang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	10	28	5	10	32
TOTAL		**5**	**10**	**28**	**5**	**10**	**32**

Sumber: Laporan Monev 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 5, jumlah kegiatan 10, dan jumlah sub kegiatan 28, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 5, jumlah indikator kegiatan sebanyak 10, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 32.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.416.127.054,00	519.329.292,00	21,31%	15,20%
TOTAL		**3.416.127.054,00**	**519.329.292,00**	**21,31%**	**15,20%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja DPMPTSP Tahun 2025 Triwulan I

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebesar Rp. 1.236.018.196,- anggaran tersebut dilaksanakan dalam 5 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 15,20 persen dengan capaian Kinerja sebesar 21,31 persen.

2.1.3 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 5 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah sebanyak 4 Program atau 0% (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 0

program dengan realisasi >10-20 persen, dan untuk capaian kinerja kategori tinggi ada 1 program dengan realisasi diatas 20 persen.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 10 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 6 kegiatan atau 0 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedangkan yang berada dalam kategori sedang juga sebanyak 3 kegiatan atau 38,46 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 1 kegiatan atau 99,84 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 28 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 20 sub kegiatan atau 0-10 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 2 sub kegiatan atau 10-20 persen, dan 6 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau 20 persen sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 15 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 1.3

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PENDANAAN BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RKPD KABUPATEN TAKALAR TRIWULAN I

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	4	0	1	10	6	3	1	28	20	2	6
TOTAL		**5**	**4**	**0**	**1**	**10**	**6**	**3**	**1**	**28**	**20**	**2**	**6**

Sumber : Laporan Realisasi Renja DPMPTSP Tahun 2025 Triwulan I

Keterangan:

0-10 Rendah

>10-20 Sedang

>20 Tinggi

2.1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan subkegiatan yang terdapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** untuk realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dijelaskan bahwa dari 5 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat capaian kinerja atau 0% sebanyak 3 program yang masuk pada kategori rendah atau dibawah 0-10 persen, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 10-20 persen) terdapat 0 program, selebihnya sebanyak 2 program atau 40% yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 20 persen pada triwulan I Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Output* pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 10 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan satu terdapat 5 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 10 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang atau dibawah 10-20 persen terdapat 2 kegiatan, selebihnya terdapat 3 kegiatan yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Output* pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 28 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 17 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 2 sub kegiatan, selebihnya

yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 9 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025. Adapun gambaran pencapaian target kinerja Sub Kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.4
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RKPD
KABUPATEN TAKALAR TRIWULAN I TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10 %	>10-20 %	>20 %		0 - 10 %	>10-20 %	>20 %		0 - 10 %	>10-20 %	>20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	3	0	2	10	5	2	3	28	17	2	9
TOTAL		**5**	**3**	**0**	**2**	**10**	**5**	**2**	**3**	**28**	**17**	**2**	**9**

Sumber : Laporan Realisasi Renja DPMPTSP Tahun 2025 Triwulan I

Keterangan:

0-10	Rendah
>10-20	Sedang
>20	Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal san Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.Proses ini dimaksuduntuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metedologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, yakni 1) Sederhana, 2) Partisipatif, 3). Akuntabel, 4) Berkelanjutan, 5) Transparansi dan

6) Keadilan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan dalam pengurusan dokumen Perizinan dan Non Perizinan seperti pelayanan pendaftaran Nomor Induk Berusaha.

Agar sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar dapat tercapai , maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Ada beberapa indikator kinerja yang dapat diukur untuk melihat capaian pelayanan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kepala Dinas. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Organisasi. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RENSTRA yang digariskan pada Tahun 2024. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Lebih lanjut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel II.6

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PELAYANAN PADA PERUBAHAN RENJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUAPTEN TAKALAR

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian sampai Triwulan I	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TUJUAN			INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TUJUAN							
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN+PMA)	5,90	205%	Nilai Investasi	728.398.228.379	804.297.323.776	880.142.561.408	40.743.764.788	804.297.323.776	880.142.561.408	
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN			INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN							
1	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	60	35,29	Persentase Peningkatan Investor	4,00%	4,00%	4,00%	0,05%	4,00%	4,00%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Hasil Survei)	87,50	91,78	Hasil Penilaian Sakip Oleh Insfektorat untuk Dinas PMPTSP	70,38	70,40	70,45	Belum Dinilai	70,40	70,45	
3	Nilai Sakip pada DPMPTSP	Predikat BB (70,80)	BB (70,33)	Tingkat Literasi Digital ASN	15%	15%	20%	5%	15%	20%	

Sumber: dari Bidang DMPTSP 2025

Pada table diatas menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 pada persentase peningkatan Nilai Investasi (PMDN+PMA) capain kinerja telah melampaui target dengan nilai capai 205 % dari nilai 5,90% yang telah ditargetkan untuk tahun 2024. Peningkatan nilai investasi dengan melakukan pengawasan dan bimbingan teknis serta sosialisasi kepada pelaku usaha.

Untuk indikator persentase peningkatan jumlah investor tahun 2024 nilai 46 investor sedangkan untuk tahun 2023 hanya mencapai 34 investor jadi peningkatan investor untuk tahun 2024 mencapai 35,29 %, sedangkan untuk indeks kepuasan masyarakat capaian kinerja telah melampaui target dengan nilai 91,78 dari nilai sebelumnya 87,50 karena dengan terpenuhinya beberapa seperti transparansi, dan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Untuk indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 diperoleh nilai BB (70,33), capaian kinerja sudah sangat baik karena setiap rekomendasi untuk perbaikan kekurangan dari dokumen yang direviu telah ditindaklanjuti meskipun masih diperlukan perbaikan dokumen dengan lebih memperhatikan kualitas dokumen yang disusun.

Dari table diatas Indikator kinerja utama (IKU) tahun 2025 pada Nilai Investasi dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan 1 baru mencapai Rp. 40.743.764.788,00,- ini desebabkan karena masih tahap perencanaan belum masuk pada tahap kontruksi dan komersil. Untuk indikator persentase peningkatan jumlah investor tahun 2025 nilai sampai dengan triwulan I baru mencapai 23 investor sedangkan untuk tahun 2024 ditriwulan I jumlah 22 investor jadi peningkatan investor untuk tahun 2025 mencapai 0,05 %, ini di sebabkan karena pelaku usaha yang ingin berinvestasi masih melakukan survey (Rencana) yang akan di tempati untuk melakukan usaha.

Untuk Indikator Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat untuk Dinas PMPTSP dengan Capaian Realisasi Masih 0 karena belum ada penilaian sakip dari inspektorat, dan Indicator Tingkat Literasi Digitas ASN dengan capaian realiasi baru mencapai 5 % di sebabkan karena Minimnya ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi/IT dan jugaketerbatasan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang ada pada Dinas PMPTSP.

1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

a. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
b. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
c. Terdapatnya beberapa belanja barang yang harga dan spesifikasinya tidak lagi sesuai dengan harga saat ini.
d. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan

2. Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan ke I tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja :

1. Adanya komitmen pimpinan dan Koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.

3. Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan uraian di atas terkait faktor penghambat pencapaian kinerja, serta upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan tindak

lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pengendalian dan evaluasi internal yang dilakukan secara terus menerus;
2. Perlunya Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan;
3. Peran aktif Kepala Dinas selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan- kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Menyediakan informasi kependudukan dalam rangka perencanaan pembangunan dan kepentingan publik;
9. Perlunya melakukan penyusunan Renstra Disdukcapil yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
11. Adanya Kesesuaian Renstra dan RPJMD dalam pelaksanaan kegiatan;
12. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Tema Pembangunan Kebijakan Nasional Pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2 Sasaran Pembangunan Pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.3 Prioritas Nasional Pad RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai tambah di dalam Negeri

3.2 Tujuan Dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu **"MENINGKATNYA NILAI INVESTASI"** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
2. Sasaran 2 : Meningkatnya tata Kelola kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran Serta Target Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025 (RENSTRA PD 2023-2026)			**PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 (RENSTRA PD 2025-2029)**		
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
T1. Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN+PMA)	6,20	T1.Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	728.398.228.379
S1. Meningkatnya Jumlah Investor (PMDN+PMA)	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	64	S1. Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondisif	Persentase Peningkatan Investor	4,00%
T2. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	83,00	S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas DPMPTSP	Hasil Penilaian Sakip Oleh Insfektorat untuk Dinas PMPTSP	70,38
S2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (Hasil Survei)	88		Tingkat Literasi Digital ASN	15%
T3. Meningkatkan Tata Kelola Pada DPMPTSP	Indeks Birokrasi Reformasi pada Dinas PMPTSP	BB			
S3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada DPMPTSP	Nilai Sakip pada DPMPTSP	Predikat BB (70,80)			

Sumber Data : Renstra 2023-2026 dan renstra 2025-2029

BAB IV

RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1 Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000
			Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	50.000.000
		Pembuatan Peta Potensi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.000.000
			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	30.000.000

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Perubahan Renja PD

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dengan total pagu Rp 3.282.058.841,00 (Tiga Meliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2

Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2025

Kabupaten : Takalar
Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu							3.329.701.160,00	3.426.994.996,00	3.282.058.841,00							0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.329.701.160,00	3.426.994.996,00	3.282.058.841,00							0,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							3.329.701.160,00	3.426.994.996,00	3.282.058.841,00							0,00	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota				88,75 %	88,75 %	2.678.188.160,00	3.131.994.996,00	3.102.502.641,00							0,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	-			100 %	100 %	27.524.200,00	26.598.700,00	26.598.700,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.197.500,00	4.996.830,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Alokasi	-	6. Perbaikan Tatakelola			0,00	DINAS PENANAMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																ng, Kalabbirang	Umum (DAU)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik				MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.292.000,00	5.174.240,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.430.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.188.000,00	4.188.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	1 Dokumen	4.024.200,00	3.629.200,00	3.629.200,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Alokasi	-	6. Perbaikan Tatakelola			0,00	DINAS PENANAMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD									ng, Kalabbirang	Umum (DAU)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik				MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	1.572.000,00	2.280.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.720.000,00	2.112.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.374.140.560,00	2.927.422.096,00	2.927.422.096,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				408 Orang/bulan	408 Orang/bulan	2.363.140.560,00	2.911.468.596,00	2.900.600.671,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbiran	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																g	Alokasi Umum (DAU)		Pelayanan Publik				N TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00	8.957.500,00	8.810.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.364.000,00	2.804.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	1.008.000,00	882.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Alokasi	-	6. Perbaikan Tatakelola			0,00	DINAS PENANAMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									ng, Kalabbirang	Umum (DAU)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik				MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	624.000,00	624.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Daerah	-			100 %	100 %	6.680.000,00	5.006.800,00	5.006.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah SKPD		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	3.998.800,00	3.091.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.680.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbiran	Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																g	(DAU)		Pelayanan Publik				N TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapat Pakaian Dinas Persentase Pegawai Yang Mendapat Pakaian Dinas Persentase Pegawai Yng Mendapat Pakaian Dinas	-			100 % 58 Pegawai	100 % 58 Pegawai	285.800,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	285.800,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Rapat Koordinasi Persentase Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Rapat Koordinasi	-			100 %	100 %	56.172.000,00	29.119.000,00	29.119.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.832.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	32.340.000,00	28.119.000,00	14.024.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Kantor Persentase Penyediaan Jasa Kantor	-			100 %	100 %	168.775.600,00	107.126.400,00	107.126.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Non ASN dan Kantor PLN,PDAM,Telkom		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8	1	8	2																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.975.600,00	14.726.400,00	14.726.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58.800.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Terpelihara Persentase Barang Yang Terpelihara	-			100 %	100 %	44.610.000,00	36.722.000,00	36.722.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin Lainnya dan Gedung Kantor		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	36.770.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan				10 Unit	10 Unit	2.840.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab.	Dana	-	6.			0,00	DINAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Mesin Lainnya yang Dipelihara									Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persenatse penetapan dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal				25 %	25 %	2.144.000,00	50.000.000,00	31.300.000,00							0,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif pada Bidang Penanaman Modal Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Pada Bidang penanaman Modal	-			100 %	100 %	624.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	312.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																							SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	312.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	[deleted] Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	1.520.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	520.000,00	50.000.000,00	31.300.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi				28,72 %	28,72 %	10.000.000,00	30.000.000,00	19.254.000,00							0,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	-			100 %	100 %	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perusahaan swasta		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	15.000.000,00	4.781.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	15.000.000,00	14.473.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP				28,971 % %	28,971 % %	40.960.000,00	115.000.000,00	66.649.500,00							0,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non	-			100 %	100 %	40.960.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00			-	6. Perbaikan	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Perizinan secara Terpadu pada Bidang Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Pada Bidang penanaman Modal												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				AN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2400 Pelaku Usaha	2400 Pelaku Usaha	20.000.000,00	85.000.000,00	49.148.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	20.000.000,00	30.000.000,00	17.500.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																							PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				7 Kegiatan Usaha	7 Kegiatan Usaha	340.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha/Penanaman Modal terhadap Penyampaian LKPM				28,10 %	28,10 %	597.785.000,00	100.000.000,00	62.352.700,00							0,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendaian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-			100 %	100 %	597.785.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																	
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				7 Kegiatan Usaha.	7 Kegiatan Usaha.	89.667.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan				275 Pelaku Usaha	275 Pelaku Usaha	328.783.000,00	100.000.000,00	62.352.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerinta			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko									n, Semua Kel/Desa			han dan Pelayanan Publik				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																	
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				33 Kegiatan Usaha	33 Kegiatan Usaha	179.335.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal				1 50 % %	1 50 % %	624.000,00	0,00	0,00							0,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi	-			100 %	100 %	624.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang				1 Dokumen	1 Dokumen	624.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassa	Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan									ng	(DAU)		Pelayanan Publik				N TERPADU SATU PINTU
								JUMLAH	**3.329.701.160,00**	**3.426.994.996,00**	**3.282.058.841,00**							**0,00**	

Sumber Data : Renja Perubahan di SIPD 2025

BAB V
P E N U T U P

Dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini menjadi instrumen utama bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan mutu pelayanan kepada Masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tahun 2025 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Bappelitbangda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2025 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pemangku kepentingan; dan
3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pemangku kepentingan

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar telah berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Takalar, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Takalar yaitu Terwujudnya Kabupaten Takalar Yang Unggul, Sejahtera Dan Bermartabat**.**

Takalar, September 2025

Plt. Kepala Dinas



NASRUDDIN. A S.T., M.Si
Pangkat: Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19710724 200212 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2025

NAMA INSTANSI RSUD H. PADJONGA DAENG NGALLE
KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA KERJA (RENJA)
RSUD H. PADJONGA DAENG NGALLE
KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar dapat menyelesaikan penyusunan rencana kerja tahun 2025. Diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar sesuai dengan visi dan misi. Rencana kerja tahun 2025 menggambarkan keadaan rumah sakit pada tahun sebelumnya serta tahun berjalan sesuai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya.

Hasil analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal menunjukkan bahwa RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar mempunyai peluang yang cukup baik, namun juga memiliki beberapa ancaman yang harus dihadapi terutama dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekarang ini. Agar dapat mengantisipasi berbagai ancaman, maka rumah sakit harus mengoptimalkan kekuatan yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan/penerima pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, rumah sakit melakukan penyusunan rencana kerja tahun 2025 guna menghadapi dan memenangkan persaingan yang sangat ketat.

Kami telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyusun rencana kerja tahun 2025 berdasarkan pada data dan informasi yang ada dengan tujuan agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di rumah sakit. Namun,kami juga menyadari bahwa rencana kerja ini masih belum sempurna, oleh karena itukritik maupun saran yang bersifat membangun kami butuhkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Takalar, September 2025

Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle

dr. Ruslan Ramli, M. Adm. Kes
Pangkat : Pembina
NIP. 19700528 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… 1

DAFTAR ISI …… 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …….. 5

1.2 Landasan Hukum …… 6

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan…….. 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA RSUD PADJONGA DG. NGALLE TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I dan Capaian Renstra RSUD H. PadjongaDaeng Ngalle..... 11

2.1.1 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I I Tahun 2025……..... 20

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Tahun 2025 sampai pada Triwulan I …… 22

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle…….. 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD H. PADJONGA DAENG NGALLE KABUPATEN TAKALAR

3.1 Tujuan Renstra H. Padjonga Dg. Ngalle Tahun 2025-2029..... 26

3.2 Sasaran RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Tahun 2025-2029 28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE

4.1 Program dan Kegiatan RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Tahun 2025…… 33

4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan ……. 34

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan Renja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator utama (IKU) dan target indikator kunci (IKK) serta target indikator lainnya dalam Renstra RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2023-2026;
2. Kesesuaian tujuan dan sasaran Renstra RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
3. Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renstra RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022;
5. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022;

6. Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;
7. Isu-isu strategis yang berkembang;
8. Kebijakan Nasional;
9. Regulasi yang berlaku.

Gambar.1

Keterkaitan Renja RSUD H Padjonga Dg.Ngalle Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

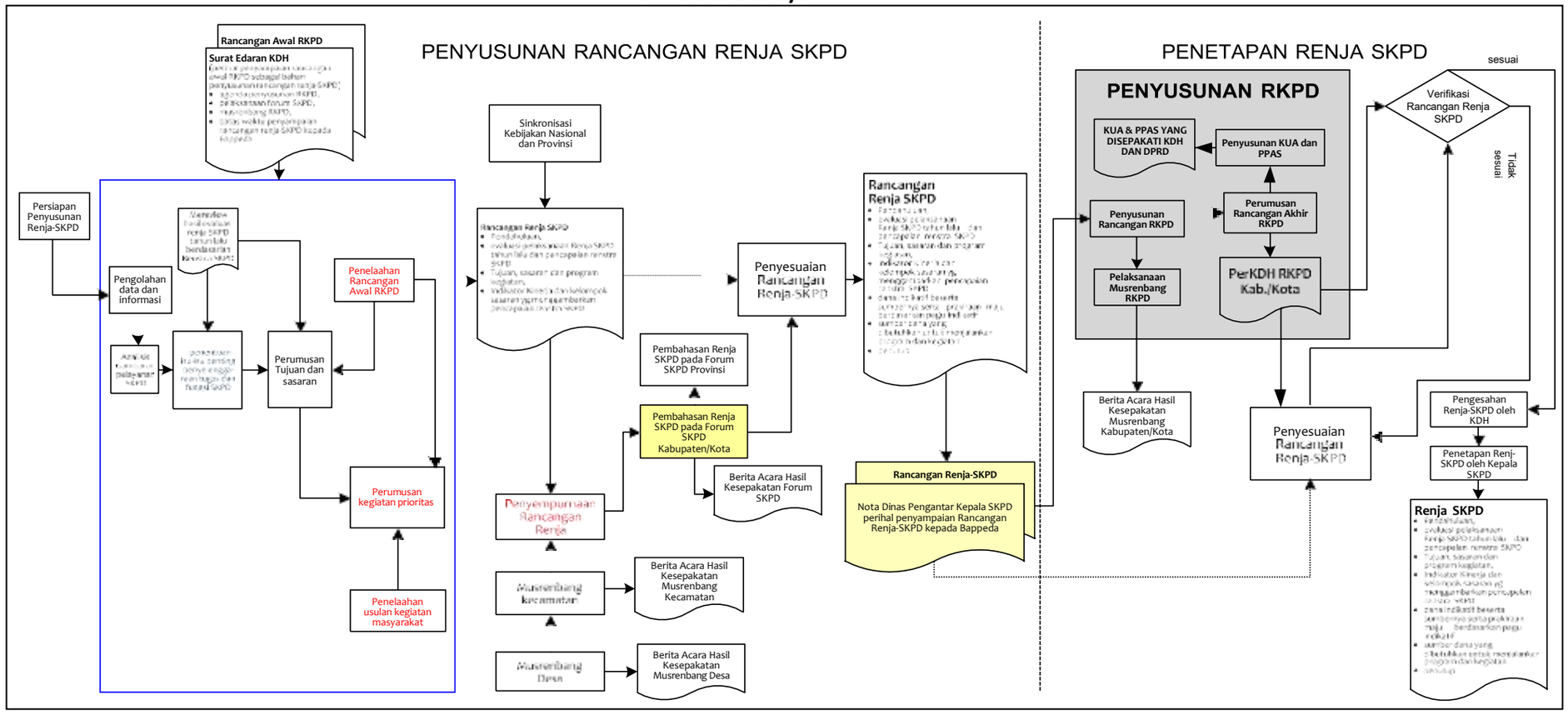

Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Kerja RSUD H Padjonga Dg. Ngalle yang disusun ini juga telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki perangkat daerah. Kedudukan Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 dalam Rencana Strategis RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada Renstra.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan pada Bulan Januari yang meliputi penetapan Tim Penyusun dan pengumpulan data teknis;
2. Menyusun Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 pada Bulan Januari dengan memperhatikan Rancangan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Takalar Tahun 2025 sebelum diajukan untuk dilakukan verifikasi oleh Bappelitbangda;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2026;
5. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
6. Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten

Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;

7. Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025;
8. Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPD Tahun 2023–2026 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi Renja tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle sangat penting bagi pencapaian kinerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle secara khusus dan pemerintah daerah secara umum, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar. Proses penyusunan Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPD dan Renstra PD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renja memiliki nilai-nilai strategis, yaitu :

A. Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun;
B. Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappelitbangda Tahun 2025;
C. Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan tahunan Bappelitbangda;
D. Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja tahunan

Kepala RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle;

E. Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penilaian keberhasilan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 Tahun 2025 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan maksud :

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 kedalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan :

Tujuan Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan rencana kerja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2025, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas, serta review terhadap rancangan awal renja.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan penjelasan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Uraian penutup berupa hal-hal yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA RSUD PADJONGA DG. NGALLE TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I dan Capaian Renstra RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Dg.Ngalle, ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan RSUD H. Padjonga Dg.Ngalle dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada lima tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan RSUD H. Padjonga Dg.Ngalle maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, RSUD H. Padjonga Dg.Ngalle Kab.Takalar melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD H. Padjonga Dg.Ngalle Kab.Takalar dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam Renstra dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Triwulan I Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9						
					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1	02	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi Rumah Sakit**	**100%**		**99,22%**	**27.771.343.965**	**100,00%**	**29.276.387.392**	**10,2%**	**22.867.511.974**	**10,2%**	**22.867.511.974**	**10,2%**	**19.30%**
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**22.984 Orang**		**99,22%**	**27.771.343.965**	**4.776 orang**	**29.276.387.392**	**20,37%**	**7.420.836.410**	**20,37%**	**7.420.836.410**	**20,37%**	**25,35**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yag menerima Gaji (334 Orang)	18.760 Orang		**4.599**	**25.907.381.327**	3.900 orang	26.819.354.824	20,37%	7.420.836.410	20,37%	7.420.836.410	25%	28%
						Jumlah ASN yag menerima Tunjangan TPP	3.600 Orang		**892**	**1.863.962.638**	876 orang	2.457.032.568	973	7.420.836.410	973	7.420.836.410	0%	0%
						Jumlah ASN yag menerima Objektifitas Lainnya	624 Orang		0		0	0	0	0		0		0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9						
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan uapaya kesehatan masyarakat**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**100%**		97,77%	82.049.799.468	**100%**	**89.212.000.000**	**0,00%**	**15.446.675.564**	**0,00%**	**15.446.675.564**	**0,00%**	**17,31%**
1	02	02	2.02		**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota**	**Persentase Persediaan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit**	3 Dokumen		97,77%	82.049.799.468	100,00%	89.212.000.000	0,00%	15.446.675.564	0,00%	15.446.675.564	0%	17%
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan jaminan kesehatanmasyarakat	Pelayanan Kesehatan berkualitas bagi pasien BPJS	1 Dokumen		96	78.356.319.010	100%	85.000.000.000	-	14.271.718.082	-	14.271.718.082	0%	17%
1	02	02	2.02	34	Operasional pelayanan fasilitaskesehatan lainnya	Pelayanan Kesehatan Berkualitas bagipasien umum	1 Dokumen		100	3.693.480.458	100%	4.212.000.000	-	1.174.957.482	-	1.174.957.482	0%	28%

Sumber S : Monev RSUD Triwulan I

Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah:

A. Realisasi Program yang tidak Memenuhi Target Kinerja < 25% yaitu :

   Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Indikator program ini adalah Persentase capaian peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakatdengan capaian kinerja 0%, hal ini disebabkan karena ada 2 kegiatan yang belum bisa terealisasi yaitu :

   - Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 0%.
   - Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 0%.

   Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja :

   Pada Kegiatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah masih kurangya serapan anggaran dari pengkalaiman BPJS dan dan jasa pelayanan lainnya.

B. Realisasi Program yang telah Memenuhi Target Kinerja 25 % yaitu :

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahandengan capaian kinerja 25% ada 1 kegiatanyang menuhi target kinerja pada Triwulan I tahun 2025 yaitu :

   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25%.

C. Realisasi Program yang tidak Memenuhi Target Kinerja > 25% belum ada.

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Tahun 2025 yang terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakanoleh RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yangada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle	2	2	3	2	2	3

Sumber: Renja Pokok 2025 dan SIPD 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 2, jumlah kegiatan 2, dan jumlah sub kegiatan 3, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 2, jumlah indikator kegiatan sebanyak 2, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 3.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel II.3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar Tahun 2025Sampai Triwulan I

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	*(Rp)*	*Fisik*	*Keu*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	29.276.387.392	7.420.836.410	20,37%	25%
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan uapaya kesehatan masyarakat	89.212.000.000	15.446.675.564	0%	17%
	Total	118.488.387.392	22.867.511.974	10,19	19,30

Sumber : Monev Renja RSUD Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 22.867.511.974, anggaran tersebut digunakan dalam 2 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota adalah sebesar 25% dan untuk program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan uapaya kesehatan masyarakat capaian realisasi sebesar 17 %.Kondisi ini menunjukkan rata-rata capaian realisasi fisik yang belum maksimal karena pelaksanaan kegiatan baru berjalan 3 bulan.

2.1.1.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja RSUD H. Padjonga Dg. NgalleTahun 2025 sampai pada Triwulan I

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program, anggaran pada RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran pada RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle terdapat 1 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah atau 0% (realisasinya 0-10 persen) sebanyak 1 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program atau 25 persen (realisasi > 25 persen) yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang realisasi pendanaannya hinggatriwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 1 kegiatan atau 25 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 3 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 2 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 1 sub kegiatan atau 25 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.4

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	RSUD	2	1	1	0	2	1	1	0	3	2	1	0
TOTAL		2	1	1	0	3	2	1	0	3	2	1	0

2.1.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Tahun 2025 Kegiatan evaluasi Renja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle dapat dijelaskan bahwa dari 1 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I terdapat capaian kinerja 0-10 persen. terdapat 1 program. yang pencapaiannya 25 persen pada triwulan I Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I terdapat kurang dari 0-10 % yang capaian kinerjanya sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 1 kegiatan 25 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 10 dan 1 Program yang capaian kinerja yang pencapaian 25 persen yang merupakan batasrealisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	RSUD	2	1	0	1	2	1	0	1	3	1	0	2
TOTAL		2	1	0	1	2	1	0	1	3	1	0	2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaiansetiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metedologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Agar sasaran strategis RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle KabupatenTakalar dapat tercapai , maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerjasebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan.Ada beberapa indikator kinerja yang dapat diukur untuk melihat capaian pelayanan kinerja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle dapat di lihat pada table berikut :

Tabel II.6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle
Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat DaerahTahun 2025-2029					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indeks Kepatuhan terhadap Standar PelayananRumah sakit	≥80%	86%	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar									
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadaplayanan rumah sakit	≥80%	86%	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu (BOR)	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	68 %	60-85%	60-85%	
	Persentase pemakaian tempat tidur padasatuan waktu tertentu (BOR)	60 %	71 %	Rata-rata lama rawat (AvLOS)	4 Hari	4 Hari	4 Hari	3 Hari	3 Hari	4 hari	6-9 Hari	6-9 Hari	
	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (BTO)	40 kali	67 kali	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (BTO)	40 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali	2 kali	40-50 kali	40-50 kali	
	Rata-rata hari dimana tempat tidurtidak ditempati (TOI)	25 ‰	1 hari	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati (TOI)	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	0 Hari	1 hari	1-3 hari	1-3 hari	
	Jumlah angka kematian umum setiap 1000penderita keluar (GDR)	25 ‰	100 %	Jumlah angka kematian umum setiap 1000 penderita keluar (GDR)	21 ‰	15 ‰	10 ‰	5 ‰	0 ‰	21 ‰	45‰	45‰	
	Tingkat kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (NDR)	90%	10‰	Tingkat kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (NDR)	21 ‰	20 ‰	15 ‰	10 ‰	5 ‰	6 ‰	25‰	25‰	
	Kepuasan masyarakat (pasien) terhadap pelayanankesehatan	90%	10‰	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	86%	90%	95%	98%	100%	80 %	80%	80%	
	Pemenuhan Quick respon time terhadap laporan masyarakat dalam menangani Penanggula-ngan Penyakit	90%	95%	Pemenuhan Quick respon time terhadap laporan masyarakat dalam menangani Penanggulangan Penyakit	85%	90%	95%	98%	100%	80 %	80%	80%	
	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikutipendidikan dan pelatihan formal	25 ‰	95%	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada DINAS KESEHATAN	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	0	75%	75%	
	Persentase ketersediaan tenagamedis dan non medis	25 ‰	95%	Tingkat Literasi Digital ASN pada RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle	4 Hari	4 Hari	4 Hari	3 Hari	3 Hari	0	80%	80%	

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat DaerahTahun 2025-2029					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indeks Reformasi Birokrasi	70	75	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Kesehatan	70(BB)	70	75	80	85	0	70(BB)	70	
	Nilai SAKIP	CC	BB	Tingkat literasi digitalASN RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle	85%	85%	90%			0	85%	85%	

Berdasarkan tabel II.6 capaian indikator Bed Occupancy Rate (BOR) merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu dengan standar Depkes RI sebesar 60%-85%, dimana capaian BOR RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2025 triwulan I 68 % dengan jumlah tepat tidur 200 buah dan jumlah tempat tidur yang terpakai rata-rata 135-150 tempat tidur.

Average Length of Stay (AvLOS) adalah rata-rata lama seorang pasien di rawat inap dimana jumlah satu satuan waktu tertentu dengan standar Depkes RI sebesar 6-9 hari. Jumlah hari rawat triwulan I adalah 90 hari dengan jumlah jumlah pasien yang keluar selama 90 hari sekitar 360 orang, baik yang hidup maupun yang meninggal sehingga rata-rata lama rawat adalah 4 hari.

Bed Turn Over (BTO) adalah angka yang menunjukkan frekuensi pemakaian tempat tidur satu satuan waktu tertentu dengan standar Depkes RI sebesar 40-50 kali. Jumlah pasien yang keluar sekitar 360 orang baik yang hidup maupun yang meninggal dengan 200 tempat tidur sehingga BTO adal 2 kzli pemakaian selama Triwulan I.

Berdasarkan standar nasional Turn Over Interval (TOI) Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya adalah 1-3 hari, penggunaan tempat tidur rawat inap RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle sudah sesuai, karena nilai TOI pada Tahun 2025 triwulan I yaitu 1 hari.

Gross Death Rate (GDR) tingkat capaiannya 21‰ sesuai dengan standar nasional < 45 ‰ dimana dimana jumlah pasien yg dirawat sebanyak 75 orang dengan jumlah pasien keluar hidup dan mati 3633 orang selama 3 bulan.

Sementara untuk Nett Death Rate (NDR) merupakan angka kematian lebih 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dengan tingkat capaiannya 6 ‰ sudah sesuai dengan standar nasional < 25 ‰ dimana jumlah pasien yg dirawat lebih dari 48 jam sebanyak 20 orang dengan jumlah pasien keluar hidup dan mati 3633 orang selama 3 bulan.

Dari hasil keseluruhan capaian Jika dibandingkan dengan tahun 2025 pelayanan kesehatan di RSUD RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle menunjukan trend perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan. Untuk capaian tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan ditahun 2025 tidak terdapat tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan disebabkan tidak adanya anggaran pelatihan. Capaian nilai SAKIP RSUD RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle mengikuti nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

RSUD H. PADJONGA DAENG NGALLE KABUPATEN TAKALAR

3.1. Tujuan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar

Untuk mewujudkan visi *"Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital"*, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah secara sistematis dan terukur. Tujuan dan sasaran ini merupakan bentuk operasionalisasi dari 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, 7 (tujuh) tujuan pembangunan daerah dan 18 (delapan belas) sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten takalar Tahun 2025-2029, yang disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Takalar.

Tujuan Renstra RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat"

1.2. Sasaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar

Dalam rangka mencapai tujuan Renstra RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2025-2029, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan perangkat daerah sebagai perwujudan kontribusi terhadap tema pembangunan tahunan daerah. Tahapan pembangunan tahunan selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 diharapkan dapat menjadi fokus perangkat daerah pada tahun berkenaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk mewujudkan Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital. Tahun 2030 merupakan masa transisi pembangunan yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan estafet pembangunan. Pentahapan Renstra RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 1
Pentahapan Renstra RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle Daerah Tahun 2025 – 2029

2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan sistem perencanaan layanan Kesehatan yang berkualitas dan inovatif.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia RSUD	Pemantapan kualitas layanan Kesehatan dan sumber daya manusia	Perwujudan sistem Layanan Kesehatan yang terintegrasi dan inovatif.	Pemantapan tata kelola berintegritas berbasis pemerintahan digital dan didukung oleh perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

2. Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.
3. Sasaran 2 : Meningkatnya pendapatan asli daerah pada RSUD
4. Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Rumah Sakit

Keselarasan antara tujuan dan sasaran Renstra RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2025 – 2029 terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.2

Tujuan dan Sasaran RenjaRSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar

Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra RSUD 2023-2026)			Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra RSUD 2025-2029)		
Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Kepatuhan terhadap StandarPelayanan Rumah sakit	≥80%	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layananrumah sakit	≥80%			
Sasaran 1 : Meningkatknya mutu pelayanan rumah sakit	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu (BOR)	65%	Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu (BOR)	75 %
	Rata-rata lama rawat (AvLOS)			Rata-rata lama rawat (AvLOS)	4 Hari
	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (BTO)	55 Kali		Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (BTO)	40 Kali

Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra RSUD 2023-2026)			Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra RSUD 2025-2029)		
Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6
	Rata-rata hari dimana tempat tidurtidak ditempati (TOI)	3 Hari		Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati (TOI)	1-3 hari
	Jumlah angka kematian umum setiap 1000 penderita keluar (GDR)	55‰		Jumlah angka kematian umum setiap 1000 penderita keluar (GDR)	45 ‰
	Tingkat kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000penderita keluar (NDR)	10‰		Tingkat kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (NDR)	25 ‰
	Pemenuhan Quick respon time terhadap laporan masyarakat dalam Menangani Penanggula-ngan Penyakit	95%		Pemenuhan Quick respon time terhadap laporan masyarakat dalam menangani Penanggulangan Penyakit	80%
	Kepuasan masyarakat (pasien) terhadap pelayanan Kesehatan	95%		Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	80%
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas SumberDaya Manusia Rumah sakit	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	95%	Sasaran-2: Meningkatnya Tata Kelola kinerja pada Rumah Sakit	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada DINAS KESEHATAN	75%
	Persentase ketersediaan tenaga medis dan nonmedis	95%		Tingkat Literasi Digital ASN pada RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle	80%

Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra RSUD 2023-2026)			Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra RSUD 2025-2029)		
Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6
Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pada Rumah Sakit	Indeks ReformasiBirokrasi	75%			
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	Nilai SAKIP	80%			

Tabel III.3

Rumusan Sasaran Penunjang Peningkatan PAD Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2024 (Dalam Rupiah)	Target						Perangkat Daerah Pengampu PAD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Retribusi sektor Kesehatan Pada RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah penerimaan Retribusi sektor Kesehatan	Rp 75.887.470.437	Rp 88.472.000.000	Rp 88.472..000.000	Rp 88.472..000.000	Rp 88.472.000.000	Rp 88.472.000.000	Rp 88.472.000.000	RSUD HPDN

Tabel III.4

Potensi PAD Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan Daerah yang Tertuang Dalam RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2029	Perangkat Daerah Pengampu PAD	Jenis Pajak/ Retribusi	Fokus / Lokasi	Jumlah Wajib Pajak/ Jumlah Sasaran	Potensi PAD (Dalam Rupiah)	Target PAD	Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Solusi
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	RSUD HPDN	Penerimaan dari BPJS Kesehatan pada FKRTL	RSUD HPDN	Pasien	82,000,000,000	85.000.000.000	Jumlah Peserta BPJS Yang berobat	1. Kualitas pelayanan yang tidak memuaskan dapat mempengaruhi kepuasan peserta BPJS 2. Inefisiensi dalam pengelolaan data dan proses klaim dapat memperlambat pelayanan	1. Meningkatkan komunikasi dan transparansi tentang peraturan dan kebijakan BPJS kepada peserta dan fasilitas Kesehatan 2. Mengembangkan sistem manajemen digital untuk efisiensi pengelolaan data dan proses klaim
		Penerimaan Non Jaminan	RSUD HPDN	Pasien	3,400,000,000	3,400,000,001	Jumlah Pasien Non Asuransi	Persaingan dengan fasilitas Kesehatan lain yang memiliki pelayanan yang memuaskan dapat mempengaruhi jumlah pasien non asuransi	Meningkatkan kualitas pelyanan melalui pelatihan dan pengembangan bagi staf
		Sewa Lahan ATM	RSUD HPDN	Bank	24,000,000	24,000,001	Jumlah ATM yang Tersedia di Rs	Kerusakan mesin ATM dan keterlambatan pengisian uang dapat mempengaruhi kinerja layanan	Mengembangkan Kerjasama dengan pihak bank untuk memastikan ketersediaan uang dan meningkatkan kinerja mesin ATM
		Tempat khusus parkir	Halaman Depan RSUD HPDN	Pengunjung	20,000,000	20,000,001	Jumlah Pengunjung Rumah Sakit	Keterbatasan kapasitas lahan parkir, pengelolaan yang tidak efektif serta kurangnya pengawasan sehingga keamanan tidak terjamin	Mengembangkan kapasitas lahan parkir, mengelola system parkir yang modern dan terintegrasi serta meningkatkan fasilitas yang membantu keamanan kendaraan pengunjung

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE

Tahun 2025

4.1. Program dan Kegiatan RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Tahun 2025

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang mengacu kepada Renstra RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Tahun 2023-2026. Pemilihan kegiatan dan program tersebut berdasarkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatuprogram sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (hasil antara / *intermediate outcome*) adalah sebuah hasil akumulasi dari output sub kegiatan yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, dan merupakan indikator hasil jangka panjang (outcome) dari program. Sedangkansub kegiatan (*output* / keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu sub kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu sub kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titiktolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Rencana Program RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Tahun 2025 yaitu sebanyak2 (dua) program yang dijabarkan melalui 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan, dengan pagu pada sebesar Rp.101.469.837.329,00 (Seratus satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan Rupiah).

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan dan sub kegiatannya yaitu:

   1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      (a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran sebesar Rp 30.804.305.110,00, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
   2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      (a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran sebesar Rp 0
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah Kabupaten Kota
      (a) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya anggaran sebesar Rp 1.499.952.100,00 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
   2) Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      (a) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, anggaran sebesar Rp 64.765.580.119,00, bersumber dari Pendapatan BLUD
      (b) Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya, anggaran sebesar Rp 4.400.000.000,00 Dengan rincian anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebesar Rp 1.000.000.000 bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Obat-obatan dan bahan habis pakai sebesar Rp 3.400.000.000 bersumber dari Pendapatan BLUD.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE KAB. TAKALAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE							**101.469.837.329,00**	**118.488.387.392,00**	**123.225.241.833,00**	**21.755.404.504,00**							**86.017.623.696,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**101.469.837.329,00**	**118.488.387.392,00**	**123.225.241.833,00**	**21.755.404.504,00**							**86.017.623.696,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**101.469.837.329,00**	**118.488.387.392,00**	**123.225.241.833,00**	**21.755.404.504,00**							**86.017.623.696,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**30.804.305.110,00**	**29.276.387.392,00**	**29.276.387.392,00**	**-27.605.486.545,00**							**3.198.818.565,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi berjalan lancar*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		21.415.925,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			4.999.970,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			4.999.850,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			1.702.580,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			4.999.730,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			4.713.795,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	30.804.305.110,00	29.276.387.392,00	29.276.387.392,00	-1.527.917.718,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		15.007.860,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4634 Orang /bulan	4634 Orang /bulan	30.804.305.110,00	29.276.387.392,00	29.276.387.392,00	-1.527.917.718,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			4.999.770,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			5.008.320,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			4.999.770,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		95.921.720,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			95.921.720,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Rumah sakit		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				500 Orang	500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		60.448.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			60.448.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*PersentaseTersedianya Jasa Penunjang*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		1.826.025.060,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.826.025.060,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		280.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			20.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			10.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk**				**100 %**	**100 %**	**70.665.532.219,00**	**89.212.000.000,00**	**93.948.854.441,00**	**12.153.272.912,00**							**82.818.805.131,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya Gedung Perawatan sesuai standar*				100 %	100 %	1.499.952.100,00	0,00	0,00	-1.499.952.100,00			-	- -	Meningkatknya mutu pelayanan rumah sakit		4.100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	1.499.952.100,00	0,00	0,00	-1.499.952.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Persediaan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit*				100 %	100 %	69.165.580.119,00	89.212.000.000,00	93.948.854.441,00	24.783.274.322,00			-	- -	Meningkatknya mutu pelayanan rumah sakit		78.618.805.131,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	64.765.580.119,00	85.000.000.000,00	89.736.854.441,00	24.971.274.322,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	- -			75.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			218.805.131,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000.000,00	4.212.000.000,00	4.212.000.000,00	-188.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Terpenuhinya Sistem Informasi Kesehatan di Rumah Sakit*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Meningkatknya mutu pelayanan rumah sakit		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	- -			100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	J U M L A H								**101.469.837.329,00**	**118.488.387.392,00**	**123.225.241.833,00**	**21.755.404.504,00**							**86.017.623.696,00**	

BAB V

PENUTUP

Apabila dalam pelaksanaan Renja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Rencana Kerja RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembataniantara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Takalar, September 2025
Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle

dr. Ruslan Ramli, M. Adm. Kes
Pangkat : Pembina
NIP. 19700528 200212 1 002

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Kelaurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 12

TABEL II.2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025..... 20

TABEL II.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan1 21

TABEL II.4 Rekapitulasi Capaian Anggaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 25

TABEL II.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 28

TABEL III.1 Kebijakan Nasional dan Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBerdasarkaan Tugas danFungsi 32

TABEL III.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 ... .35

TABEL III.3 Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2025..... 36

TABEL IV.1 Daftar Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 39

TABEL IV.2 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2025 42

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR TABEL 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan..... 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Sampai dengan Triwulan I..... .....

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD (IKU & SPM)

BAB III T U J U A N D A N S A S A R A R A N DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

3.1 **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025..... 33

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4.1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja PD

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5080);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan RencanaKerjaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kalender Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Peubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang karena adanya beberapa perubahan dari rencana kerja sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah akibat terjadinya efesiensi anggaran.
- Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

b. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak abupaten Takalar tidak lain adalah:

- Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil sampai triwulan 1 dan dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
- Mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedalam suatu strategi program/kegiatan.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar.

1.4 Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Perubahan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sampai Triwulan I Tahun 2025, pada Bab ini berisi Sub Bab tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan I Tahun 2025

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keuarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

BAB IV. **Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak l,** Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja **Dinas Pengendalian Penduduk Keuarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,** Pada.

BAB V. Penutup, Bab ini berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja **Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAKALAR

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sampai Dengan Triwulan I

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Kelaurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Kelaurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 sampai pada Triwulan I belum dapat menunjukkan capaian kinerja secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata hanya mencapai 20% untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai 10 % untuk kinerja *output* dan *outcome* kegiatan.

Rumusan evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk Kelaurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;

Tabel II.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Takalar

Renja *Perangkat Daerah* Kabupaten Takalar

Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2025** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun **2025**)	Keterangan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	8		12		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25	30
		02	**DPPKBPPPA**		**100%**	**11.406.121.874**		**1.173.504.342**	**2,41%**	**1.173.504.342**	**2,41%**	**10,29 %**		
		02 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**100%**	**4.235.296.674**	**2,9%**	**70 0.528.142**	**2,31%**	**700.528.142**	**2,31%**	**16,54 %**		
		02 08 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota**	**100%**	**3.814.647.024**	**12%**	**70 0.528.142**	**12%**	**700.528.142**	**11,55%**	**18,36 %**	**#DIV/0!**	

	Meningkatnya tata Kelola pada Dinas PPKBPPPA	02	08	01	2.01		**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	18.359.490	0%	2.510.030	0%	2.510.030	0,00%	13,67%	0%	
		02	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	5.530.770	-	2.510.030	-	2.510.030	0%	45%	-	
		02	08	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang disusun	1	3.576.150	-	-	-	-	0%	0%	-	
		02	08	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	1.998.270	-	-	-	-	0%	0%	-	
		02	08	01	2.01	04	Koordinasi Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah PerubahanDPa-SKPD yang disusun	1	2.083.500	-	-	-	-	0%	0%	-	
		02	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	4	2.931.900	-	-	-	-	0%	0%	-	
		02	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4	2.238.900	-	-	-	-	0%	0%	-	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**9,08%**		
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**		

	Meningkatnya tata Kelola pada Dinas PPKBPPPA	02	08	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	100%	3.623.810.634	15,54%	677.172.312	16%	677.172.312	16%	19%	3%	
		02	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji	434	2.520.966.814	124	671.486.312	124	671.486.312	29%	27%	124	
								Jumlah ASN yang menerima TPP	372	1.087.832.820	-	-	-	-	0%	0%	-	
		02	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca)	1	7.474.000	1	4.284.000	1	4.284.000	100%	57%	1	
		02	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Penyusunan Laporan	4	7.537.000	1	1.402.000	1	1.402.000	25%	19%	1	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**38,39%**		**25,64%**	
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**		**SR**	
	Meningkatnya tata Kelola pada Dinas PPKBPPPA	02	08	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	29.418.000	20,00%	3.080.000	20%	3.080.000	20%	10%	1%	
		02	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsulasi	20	29.418.000	4	3.080.000	4	3.080.000	20%	10%	4	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**20,00 %**		**10,47%**		
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**		**SR**		

	Meningkatnya tata Kelola pada Dinas PPKBPPPA	02	08	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	127.473.900	13,89%	20.235.800	13,89%	20.235.800	13,89%	15,87%	7%	
		02	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa Komunikasi , smber daya air dan istrik yang di bayarkan	12	12.707.000	2	370.600	2	370.600	17%	3%	2	
		02	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12	-	-	-	-	-	0%	0%	-	
		02	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	114.766.900	3	19.865.200	3	19.865.200	25%	17%	3	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**13,89 %**		**6,74%**		
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**		**SR**		

	Meningkatnya tata Kelola pada Dinas PPKBPPPA	02	08	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerntah daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerntah daerah**	100%	15.585.000	8%	610.000	8%	610.000	8%	4%	#DIV/0!	

		02	08	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya , pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Pemeliahraan biaya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6	9.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	
		02	08	01	2.09	09	pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor yang di rehabilitasi	2	405.000	-	-	-	-	0%	0%	-	
		02	08	01	2.09	10	Pemeliharaan rehabilitsi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan rehabilitsi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	2	4.960.000	-	-	-	-	0%	0%	-	
		02	08	01	2.09	11	Pemeliharaan rehabilitsi sarana dan sarana gedung pendukung gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rehabilitsi sarana dan sarana gedung pendukung gedung kantor	2	1.220.000	1	610.000	1	610.000	50%	50%	1	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**12,50 %**		**12,50%**		
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**		**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**16,96 %**		**12,89%**		
Predikat Kinerja Program														**SR**		**SR**		
Faktor pendorong pencapaian kinerja: komitmen untuk menyelesaikan target kinerja sesuai dengan tenggang waktu																		
Faktor penghambat: : Adanya efisiensi anggaran sehingga ada beberapa sub kegiatan yang dihapus																		
Faktor penghambat:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																		

	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Kehidupan bermasyarakat	2	08	02			**PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase indikator yang terpenuhi pada tingkat perangkat daerah**	**100%**	**9.999.860**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0%**	**0%**	200%	
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Kehidupan bermasyarakat	2	08	02	2.01		**Pelembangaan pengarustamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota**	**jumlah pelembagaan pengarustamaan gender (PUG**	100%	7.719.860	0%	-	0%	-	0%	0%	200%	
		2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perumusan PUG	2	2.569.900	-	-	-	-	0%	0%	2	
		2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota	4	1.979.460	-	-	-	-	0%	0%	4	
		2	08	02	2.01	05	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaran PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaran PUG kewenangan Kab/Kota	1	2.365.500	-	-	-	-	0%	0%	1	
		2	08	02	2.01	08	Sosialisasi Kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan	20	805.000	-	-	-	-	0%	0%	20	

								Kab/Kota										
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**			
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Kehidupan bermasyarakat	2	08	02	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/kota**	**Cakupan pamberdayaan perempuan Bidang Politik , Hukum , Sosial , dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenganan kabupaten untuk dilaksanakan**	100%	2.280.000	0%	-	0%	-	0%	0%	#REF!	
		2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	30	2.280.000	-	-	-	-	0%	0%	30	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**			
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Program														**SR**	**SR**			

Faktor pendorong pencapaian kinerja: komitmen untuk menyelesaikan target kinerja sesuai dengan tenggang waktu

Faktor penghambat: : Adanya efisiensi anggaran sehingga ada beberapa sub kegiatan yang dihapus

Faktor penghambat: Terlambatnya Permintaan GU

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

	Terwujudnya kabupaten Layak Anak	2	08	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Cakupan kekerasan terhadap perempuan lingkup Kabupaten yang dapat dicegah	**100%**	**251.914.680**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**0%**	**0%**	
	Terwujudnya kabupaten Layak Anak	2	08	03	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota**	100%	71.550.000	0,00%	-	0%	-	0%	0%	0%	
		2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan singronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten /kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan singronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten /kota	10	71.550.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK PPA Non Fisik. Rp. 70.000.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**		
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**		
		2	08	03	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Bagi Perempuan Korban kekerasan yang**	**Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban**	100%	111.345.000	0,00%	-	0%	-	0%	0%	0%	

							Memerlukan Koordinasi kewenangan Kab/Kota	**keakerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten yang disediakan**										
		2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenanga n Kabupaten /Kota yang Memerluka n Koordinasi dan Sinkronisas i	10	111.345.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK PPA Non Fisik. Rp. 212.000.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**			
		2	08	03	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kab/Kota**	**umlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten yang mendapat penguatan dan pengembvangan**	100%	69.019.680	0,00%	-	0%	-	0%	0%	0%	
		2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia Layanan	1	69.019.680	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK PPA Non Fisik. Rp.124.000.000

							kab/Kota	Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kab/Kota										
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**			
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Program														**SR**	**SR**			

Faktor pendorong pencapaian kinerja: komitmen untuk menyelesaikan target kinerja sesuai dengan tenggang waktu

Faktor penghambat: : Adanya Efesiensi Anggaran sehingga ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang di hapus

Faktor penghambat: kegiatan yang belum ada realisasi kinerjanya adalah karena hasil pelaksanaan kegiatannya jadwalnya ada di triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		2	08	06			**PROGRAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**	**Persentase Desa dan kelurahan Ramah anak**	**100%**	**9.470.110**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**0%**	**0%**	
		2	08	06	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan**	**Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non pemerintah dan dunia usaha Kewenangnan kabupaten yang dilaksanakan**	100%	9.470.110	0%	-	0%	-	0%	0%	#DIV/0!	
		2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	jumalh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	10	4.100.110	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK PPA Non Fisik. Rp. 70.000.000

							Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/KotaAdvokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan									
		2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan	10	5.370.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK PPA Non Fisik. Rp. 70.000.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**			
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Program														**SR**	**SR**			
		2	2.08	7			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum**	**100%**	**149.265.000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**0%**	**0%**	
		2	208	07	2,.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan LingKUp daerah Kabupaten /Kota**	**Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan**	100%	30.470.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	

								Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan									
		2	08	07	2.01	03	Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten /kota layak anak, Kecamatan layak Anak, Desa/Keluarahan layak Anak dan DRPPA	Jumlah Laporan Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten /kota layak anak, Kecamatan layak Anak, Desa/Keluarahan layak Anak dan DRPPA	1	520.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK PPA Non Fisik. Rp. 70.000.000
		2	208	07	2,.01	04	Advokasi dan Pendampingan Perangkat daerah dalam Pelaksananaan kebijakan/program kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah Laporan Advokasi dan Pendampingan Perangkat daerah dalam Pelaksananaan kebijakan/program kegiatan Pencegahan KTA	2	29.950.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK PPA Non Fisik. Rp. 70.000.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**			
		2	208	07	2,.0		**Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan**	**Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan**	100%	118.795.000	0,00%	-	0%	-	0%	0%	0%	

					2		**khusus Tingkat daerah Kabupaten Kota**	**perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten yang disediakan**										
		2	208	07	2.02	06	koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	10	118.795.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK PPA Non Fisik. Rp. 212.000.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**			
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Program														**SR**	**SR**			

Faktor pendorong pencapaian kinerja: komitmen untuk menyelesaikan target kinerja sesuai dengan tenggang waktu

Faktor penghambat: : kegiatan yang belum ada realisasi kinerjanya adalah karena hasil pelaksanaan kegiatannya jadwalnya ada di triwulan berikutnya

Faktor penghambat:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		02	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**100%**	**7.170.825.200**	**#DIV/0!**	**472.976.200**	**3%**	**472.976.200**	**2,50%**	**6,60%**		
		2	14	02			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**100%**	**60.000.000**	**0,00%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**0%**	**#REF!**	

	Menurunnya Tingkat kelahiran Anak	2	14	02	2.02		**Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten /kota**	**Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan**	100%	60.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	#REF!	
		2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistem informasi	12	60.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	DAK BOKB Non Fisik. Rp. 55.200.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**			
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Program														**SR**	**SR**			

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : kegiatan yang belum ada realisasi kinerjanya adalah karena hasil pelaksanaan kegiatannya jadwalnya ada di triwulan berikutnya

Faktor penghambat:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

	Meningkatnya produktivitas SDM masyarakat	**2**	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Ratio Akseptor KB**	**100%**	**5.398.025.200**	**#DIV/0!**	**472.976.200**	**7,50%**	**472.976.200**	**7,50%**	**8,76%**	**#REF!**	
	Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana	2	14	03	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan Penyediaan Data Mikro disetiap desa**	100%	1.089.000.000	13%	46.000.000	13%	46.000.000	13,33%	4,22%	#REF!	
		2	14	03	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	jumlah laporan Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10	604.000.000	2	46.000.000	2	46.000.000	20%	8%	2	DAK BOKB Non Fisik. Rp. 495.990.000
		2	14	03	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Dokumen Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	1	160.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK BOKB Non Fisik. Rp. 135.000.000

								Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									
		2	14	03	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang	1	125.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK BOKB Non Fisik. Rp. 100.400.000
		2	14	03	2.01	13	Komunikasi Informasi dan edukasi KIE program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Kegiatan Komunikasi Informasi dan edukasi KIE program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	1	-	-	-	-	-	0%	0,00%	-	DAK BOKB Non Fisik. Rp. 66.902.600
		2	14	03	2.01	14	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2	200.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK BOKB Non Fisik. Rp. 200.000.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**4,00%**		**1,52%**	
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**		**SR**	

	Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana	2	14	03	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Pendayagunaan PKB atau PLKB yang didayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan embangunan daerah bidang pengendalian penduduk**	100%	2.491.165.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	
		2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kade masyarakat institusi yang aktif disetiap Desa	768	860.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK BOKB Non Fisik. Rp. 360.000.000
		2	14	03	2.02	06	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan penggerakan pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan penggerakan pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	2	1.631.165.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	DAK BOKB Non Fisik. Rp. 55.200.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**			

	Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana	2	14	03	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan**	100%	887.384.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	
		2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasyankes penditribusian alat obat kontrasepsi	27	23.400.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK BOKB Non Fisik. Rp. 26.100.000
		2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	418	807.584.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK BOKB Non Fisik. Rp. 453.136.000
		2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi di fasilitasi Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	1	56.400.000	-	-	-	-	0%	0,00%	-	DAK BOKB Non Fisik. Rp. 22.100.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**			
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**			

	Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana	2	14	03	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaen/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**jumlah Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49**	100%	930.476.200	#DIV/0!	426.976.200	17%	426.976.200	17%	46%	0%	
		2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen pembangunan Lintas Sektor dikampung KB	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	DAK BOKB Non Fisik Rp. 42.494.700
		2	14	03	2.04	05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kamping Keluarga Berencana	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (HASHAT) di Kamping Keluarga Berencana	10	762.476.200	7	426.976.200	7	426.976.200	70,00%	56,00%	7	DAK BOKB Non Fisik untuk Stunting Rp. 1.471.225.000
		2	14	03	2.04	06	Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di kampung Keluarga Berencana	Jumlah Pelaksanaa n dan Pengelolaa n Program Bangga Kencana	32	168.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	DAK BOKB Non Fisik Rp. 603.020.000

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	**23,33 %**	**18,67%**
Predikat Kinerja Kegiatan	**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**6,83%**	**5,05%**
Predikat Kinerja Program	**SR**	**SR**

Faktor pendorong pencapaian kinerja: komitmen untuk menyelesaikan target kinerja sesuai dengan tenggang waktu

Faktor penghambat: : kegiatan yang belum ada realisasi kinerjanya adalah karena hasil pelaksanaan kegiatannya jadwalnya ada di triwulan berikutnya

Faktor penghambat:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

	Meningkatnya produktivitas SDM masyarakat	**2**	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**100%**	**1.712.800.000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	
	Meningkatnya Kualitas Keluarga	2	14	04	2,01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	persentase pelaksanaan pembangunan melalui bina keluarga remaja ber KB	100%	187.600.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	
		2	14	04	2.01	16	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah kegiatan Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS))	1	57.600.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK BOKB Non Fisik Rp. 300.000.000
		2	14	04	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10	130.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	DAK BOKB Non Fisik Rp. 300.000.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**		

Predikat Kinerja Kegiatan													**SR**		**SR**		
		2	14	04	2,02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	100%	1.525.200.000	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%	0,00%	
		2	14	04	2,02	05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko stunting (Termasuk remaja Calon Penganting/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko stunting (Termasuk remaja Calon Penganting/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	1	690.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	DAK BOKB Non Fisik untuk Stunting. Rp. 696.000.000
		2	14	04	2,02	06	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Penganting/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Kegiatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Penganting/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	1	835.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	DAK BOKB Non Fisik untuk Stunting Rp. 765.600.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													**0,00%**		**0,00%**		
Predikat Kinerja Kegiatan													**SR**		**SR**		

Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**0,00%**	**0,00%**				
Predikat Kinerja Program														**SR**	**SR**				
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																			
Faktor penghambat: : kegiatan yang belum ada realisasi kinerjanya adalah karena hasil pelaksanaan kegiatannya jadwalnya ada di triwulan berikutnya																			
Faktor penghambat:																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																			
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**3,96%**	**2,99%**				
Predikat Kinerja Program														**SR**	**SR**				

Sumber data Laporan Monev 2025

.

Berdasarkan Tabel II. 1 dapat dijelaskan Faktor yang mempengaruhi Pencapaian Kinerja sampai Triwulan 1 Tahun 2025

- ***Faktor Pendorong***

1. Adanya komitmen pimpinan dan Koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
3. Data tentang Pengendalian Penduduk dan Data tentang indeks Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan tepat waktu
4. SDM pada Dinas DPPKBPPPA memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap Pelayanan Baik dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Bidang KB dan maupan Bidang Pengarustamaan Gender dan Bidang PPA .

- ***Faktor Penghambat***

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses pengujuan kontrak ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya;
3. Terlamabatnya Juknis Penyaluran Dana DAK Baik Dak Non Fisik Bidang KB maupun Bidang /UPT PPA

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakl Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengenalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.2

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	DPPKBPPA	8	20	48	8	20	49
TOTAL		8	20	48	8	20	49

Sumber: Perubahan Renja 2025 dan SIPD 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program Tahun 2025 dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 8 Program , jumlah kegiatan 20 dan jumlah sub kegiatan

48 dan 49 Indikator sub. Kegiatan , Dijelaskan bahwa kategori capaian < 100 % ada 7 Program , capaian 100 % ada 1 Program dan untuk Capaian 100 > 0 Program , dan untuk capaian kegiatan < 100 10 Kegiatan ada 3 Kegiatan Capaianya 100 % dan sub Kegiatan , capaian 20 sub kegiatan capaian < 100 dan 5 sub kegiatan persen 5 Kegiatan 100 % dan untuk capaian > 100 7 sub kegiatan .

Dapat di jelaskan bahwa di tahun 2024 program kegiatan dan sub kegiatan dari tri wulan 1 -4 Tahun 2024 merangkum 7 program 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan dan 36 Indikator sub kegiatan dengan capaian realisasi keuangan 75,47 dan untuk fisik 70,63 persen dengan total pagu Anggaran 12.000.114.185

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel II.3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar Tahun 2025 Sampai Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	DPPKBPPPA	11.406.121.874	1.175.509/342	2.41 %	10.29%
TOTAL		11.406.121.874	**0**		

Sumber : Laporan Monev Renja DPPKBPPPA Triwulan I Tahun

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. **1.173.504.342**, Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase capian program kegiatan sampai triwulan 1 Tahun 2025 untuk Fisik mencapai 2.14 Persen dan untuk keuangan mencapai 10,29% jumlah program Tahun 2025 sebanyak 8, jumlah kegiatan 20 dan jumlah sub kegiatan 48, Sedangkan untuk jumlah indikator jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 49. Dijelaskan bahwa kaegori capaian 0-10 % ada 7 Program , capaian 10-20 % ada 1 Program dan untuk Capaian 20 % 0 Program , dan untuk capaian kegiatan 0-10 ada 15 Kegiatan , capaian 10-20 persen 5 Kegiatan dan untuk capaian 20 % 0 kegiatan sedangkan capaian pada sub kegiatan 0-10 % 39 sub kegiatan, dan 10. 29 persen untuk capaian 10-20 persen ada 3 kegiatan dan 20 % ada 6 kegiatan dan dijelaskan pula capaian sub kegiatan di triwulan pertama 2025 0-10 capaian sub kegiatan ada 39 dan untuk capaian 10-20 persen 3 sub kegiatan dan untuk 20 persen ada 6 sub kegiatan .

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2025 sampai pada Triwulan I

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 20 persen. tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian

yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Sebagai berikut:

1. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program, anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan Total Pagu Anggaran tahun 2025 Rp 11.406.121.874 dan Capain Realisasi Program sampai dengan Triwulan 1 dTahun 2025 Capaian Fisik 2,24% % dan untuk realisasi keuangan 10,29 %, Capaian Pendanaan program pada Triwulan 1 untuk kategori 0-10 (Tujuh) 7 Program dan untuk kategori 10- 20 % Satu (1) Program dan dan untuk Kategori 20 persen 0 Program dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak masih Kategori capaian rendah. Dan Realisasi Anggaran di sampai triwulan 1 2025 sebesar Rp. ***2.148.111.682*** Ada dua Program yang terealisasi Anggarannya di triwulan Pertama Tahun 2025 Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Pembinaan Keluarga Berencana

2. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan**

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Beremcana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijelaskan bahwa terdapat 20 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dan untuk kategori capaian 0-10 15 kegiatan , untuk kategori capaian 10-20 % 5 (lima) kegiatan dan untuk Kategori 20 % capaian 0

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 48 sub kegiatan dan 49 Indikator sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 48 sub kegiatan dengan capaian realisasi di triwulan Pertama 32,25 % persen untuk kategori 0-10 % ada 39 sub kegiatan , dan 10-20 % terdapat 3 sub kegiatan dan untuk kategori 20 %

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

TABEL II.4
REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	DPPKBPPA	8	7	1	0	20	15	4	1	48	40	3	5
TOTAL													

Sumber data Laporan Monev Triwulan I 2025

Keterangan:

0-10	Rendah
>10-20	Sedang
>20	Tinggi

2.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat Dinas Pengendalian Penduduk Kelaurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 7 Program yang masuk kategori **Rendah** dengan realisasi 0 – 10 persen, 1 program Kategori **Sedang** untuk realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen dan 0 program dan kategori **Tinggi** dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 25 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Kelaurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Kelaurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program, anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan Total Pagu Anggaran tahun 2025 Rp 11.406.121.874 dan Capain Realisasi Program sampai dengan Triwulan 1 dTahun 2025 Capaian Fisik 3, 74 % dan untuk realisasi keuangan 18,54 %, Capaian Pendanaan program pada Triwulan 1 untuk kategori 0-10 (Tujuh) 6 Program dan untuk kategori 10- 20 % Satu (1) Program dan dan untuk Kategori 20 persen 0 Program dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak masih Kategori capaian rendah. Dan Realisasi Anggaran di sampai triwulan 1 2025 sebesar Rp. ***2.148.111.682*** Ada dua Program yang terealisasi Anggarannya di triwulan Pertama Tahun 2025 Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Pembinaan Keluarga Berencana

1. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan**

   Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Beremcana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijelaskan bahwa terdapat 20 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dan untuk kategori capaian 0-10 15 kegiatan , untuk kategori capaian 10-20 % 5 (lima) kegiatan

dan untuk Kategori 20 % capaian 0

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 48 sub kegiatan dan 49 Indikator sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 48 sub kegiatan dengan capaian realisasi di triwulan Pertama 32,25 % persen untuk kategori 0-10 % ada 39 sub kegiatan , dan 10-20 % terdapat 3 sub kegiatan dan untuk kategori 20 %

3. *Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan*

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 48 sub kegiatan dan 49 Indikator sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 48 sub kegiatan dengan capaian realisasi di triwulan Pertama 32,25 % persen untuk kategori 0-10 % ada 39 sub kegiatan , dan 10-20 % terdapat 3 sub kegiatan dan untuk kategori 20 % I dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.5
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20 %		0 - 10%	>10-20%	>20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	7	1	0	20	15	5	0	48	39	3	6
TOTAL													

Sumber : Laporan Monev Renja DPPKBPPPA Triwulan I Tahun 2025

Keterangan:

0-10	Rendah
>10-20	Sedang
>25	Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD (IKU & SPM)

Analisis kinerja pelayanan yang dimaksudkan merujuk pada evaluasi pencapaian dan dampak dari berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat, yang dapat diukur melalui **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** yang mencerminkan ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga; **Indeks Kualitas Keluarga (IKK)** sebagai ukuran pencapaian kualitas keluarga secara keseluruhan; dan **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** yang mengukur kesenjangan pembangunan antar laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. **Indeks Kekerasan pada Anak dan Perempuan** tidak secara langsung tercantum sebagai satu indeks tunggal, namun data mengenai kekerasan sering kali menjadi bagian dari analisis untuk mengukur kualitas dan pencapaian pembangunan yang inklusif gender, terutama dalam konteks pemberdayaan dan perlindungan anak serta perempuan, Analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan data capaian dari berbagai aspek yang direpresentasikan oleh indeks-indeks tersebut untuk kemudian dievaluasi kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Adalah Alat ukur kuantitatif untuk mengetahu hasil dari Peaksanaan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak . Tujuan Penetapan IKU adalah memberikan Gambaran tentang keberhasilan pencapaian Target indikator tujuan dan sasaran organisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian indikator program

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memebrikan gambaran terkait target target capaian keberhasilan Analisis: Dengan menganalisis IKU daerah dapat diketahui sejauh mana kinerja pelayanan publik OPD dalam mengimplementasikan program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel II-6

Indikator Kinerja Utama Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Kabupaten Takalar

	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.02	1,03	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (%)	56.46	58.46	59.46		58.46	59.46	
	Total Fertility Rate (TFR)	02.06	2.23	Indeks Kemandirian (%) 48.87	48.87	;49,87	50.87		;49,87	50.87	
	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR	75.02	67,04	Indeks Ketentraman	62.73	63.73	64.73		63.73	64.73	
	Indeks Bangga Kencana	64.55.00	57,85	Indeks Kebahagiaan	60.79	61.79	62.79		61.79	62.79	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.89	88,64	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	86.91	87.93	87.95		87.93	87.95	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.74	73,63	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	54.716	54.718	54.720		54.718	54.720	
	Predikat Kabupaten Layak	Madiya	Patama	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	61.32	62,32	63.32		62,32	63.32	

	Anak										
	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	B	65.00	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Predikat)	BB	BB	BB		BB	BB	
		BB	70,71	Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (%)	70	75	75		75	75	

1. Pada Tabel diatas menujukkan Kinerja Utama (IKU) tahun 2024

a. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan persentase jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang diukur sebagai angka yang menunjukkan seberapa cepat populasi bertambah atau berkurang. Angka ini dipengaruhi oleh empat faktor utama: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk (imigrasi), dan migrasi keluar (emigrasiuntuk laju pertumbuhan penduduk sebagai tujuan indikator Utama IKU pada tahun 2024 dan mencapai target Renstara 2023-2026 adalah 1.02 dan realisasi capaian 01.03 dan Faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk secara umum adalah tiga variabel demografi utama: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi (perpindahan penduduk). Kelahiran dan migrasi masuk (imigrasi) akan meningkatkan jumlah penduduk, sedangkan kematian dan migrasi keluar (emigrasi) akan mengurangi jumlah penduduk. Faktor-faktor lain bseperti ekonomi, sosial, budaya, kesehatan,.

Tabel II-150

b. Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun), dengan asumsi pola kelahiran individu akan mengikuti tren kelahiran yang ada pada tahun tertentu. Indikator ini sering digunakan secara internasional untuk membandingkan tingkat kesuburan antar wilayah atau negara dan membantu dalam perencanaan pembangunan serta program kependudukan Perlambatan laju pertumbuhan penduduk antara lain disebabkan karena menurunnya Total Fertility Rate (TFR). TFR atau tingkat kelahiran total adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun). Pada Tahun 2024, angka TFR Kabupaten Takalar sebesar 2,09 yang dapat disimpulkan bahwa terdapat 2,09 kelahiran pada setiap wanita berusia 15-49 tahun. angka TFR ini mengalami penurunan 0,05 poin dari capaian tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 2,14

c. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive modern (modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR) pada tahun 2024 mencapai 68,51 persen atau menurun 1,22 poin dari capaian tahun sebelumnya. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR) di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 Prevalence rate/ mCPR) di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jika dibandingakan capaian ditahun 2023 69,73 dan untuk tahun 2024 capaiannya 68,51 di tahun 2024 mengalami Penurun capaian Pemakaian pemakaian kontrasepsi modern sebesar 1,22 persen jumlah wanita usia 15-19 tahun, kemudian hitung jumlah wanita pengguna kontrasepsi caranya : wanita 15-49 tahun dikali CPR dibagi 100. Untuk tahun 2024, dari 100.976 jiwa penduduk wanita usia 15-49 tahun, terdapat 67.694 jiwa yang menggunakan alat kontrasepsi modern atau sebesar 67.04%).

Tabel H-150

- Adapun faktor Yang Menyebabkan menurunnya pemakaian alat kontrasepsi modern di masyarakat kabupaten takalar
  1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang metode KB, Keterbatasan Akses infomasi dan laynan , pengalaman negatif sebelumnya seperti Takut dan efek samping , dukugan suamu yag kurang
  2. Hambatan sosial dan budaya dan masalah ekonomi dan jaminan

d. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran kualitas keluarga yang mencerminkan **ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan** keluarga melalui 17 variabel, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. iBangga

digunakan sebagai indikator strategis untuk mengukur keberhasilan program pembangunan keluarga dan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan keluarga di berbagai tingkatan wilayah di IndonesiaIndeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kamandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga dengan klasifikasi wilayah dengan status pembangunan keluarga dalam tiga ketegori dan kisaran nilai masing-masing kategori yaitu Tangguh(>70), berkembang (40 – 70) atau rentan (<40). iBangga merupakan kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam rangka mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak untuk menjadi tolok ukur basis perencanaan pembangunan kualitas keluarga di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. iBangga mulai diukur di Kabupaten Takalar pada Tahun 2021 melalui Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK-21) yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Berencana Nasional (BKKBN) dengan torehan nilai mencapai 53,51 poin. Capaian ini kemudian berfluktuasi hingga mencapai 57.46 poin di Tahun 2024. Perbandingan antara Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sampai dengan 2024 target capaian Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2023 capaiannya 57.85 dan mengalami sedikit penurunan pencapaian di Tahun 2024 sekitar 0.39 persen

Tabel II-156

e. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah, dengan membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. Semakin besar jarak IPG dari angka 100, semakin besar pula ketimpangan gender dalam pembangunan di suatu daerah, yang menunjukkan keberhasilan pembangunan belum mengakomodasi persoalan gender secara merata.dan IPG untuk capaian di Tahun 2023

adalah 87.45 dan di Tahun 2024 88,64 dan untuk capaian di tahun 2024 menujukkan bahwa IPG di kabupaten takalar menurut data dari BPS di Aplikasi Siperindu mengalami kenaikan capaian sebesar 1,19 persen . 2 (dua) dari Indikaor Utama IKU Tahun 2024 dengan capaian target , 87.89 dan capaian realisasi IKU 88,64 ukuran untuk menilai kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG mengukur tingkat kesetaraan gender dalam hal kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Nilai IPG yang mendekati 100 (atau angka 1) menunjukkan kesetaraan yang lebih tinggi, sementara nilai yang jauh dari 100 (atau angka 1) menandakan kesenjangan yang besar antara pencapaian laki-laki dan perempuan

Tabel II 150

F. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG mencerminkan sejauh mana perempuan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan, mengakses sumber daya ekonomi, memiliki pendapatan, serta peran dalam dunia profesional dan legislatif, menunjukkan tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai sasaran 1 tujuan 2 dari indikaotor utama IKU Tahun 2024 dengan capaian target 70,74 dengan realisasi capaian tahun 2024 adalah 73,63 , Indeks Pemberdayaan Gender dan untuk realisasi Tahun 2023 adalah 74,45 sehingga mengalami penurunan capaian realisasi di tahun 2024 senilai 1.02 persen ini data dari BPS di aplikasi Siperindu BKKBN .

e. Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten atau kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak, di mana pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha terintegrasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Konsep ini didasarkan pada Konvensi Hak Anak dan bertujuan menciptakan lingkungan kota yang responsif terhadap kebutuhan anakPredikat Kabupaten Layak Anak sebagai indikator dari sasaran 2 tujuan 2 dari Indikator Utama IKU Tahun 2024 dengan capaian target predikat Pratama dan capaian realisasi presikat Madya , Sebuah kabupaten yang meraih predikat KLA harus mampu memenuhi berbagai indikator yang telah ditetapkan dalam kerangka kerja KLA, yang mencakup

pemenuhan 24 indikator hak anak, termasuk hak untuk bermain, berekspresi, dan mendapatkan informasi

2. Pada Tabel diatas menujukkan Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 yaitu :

Tabel II-150

a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran kualitas pembangunan keluarga yang dinilai berdasarkan dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks ini, yang menggunakan 17 variabel dan memiliki nilai antara 0 hingga 100, digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat pembangunan keluarga sebagai rentan, berkembang, atau tangguh, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan oleh pemangku kepentingan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga adalah Indikator dari Tujuan Utama Tahun 2025 dengan target capaian 58.46 dan capaian realisasi masih dalam angka 0 (nol) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator terpadu Diciptakan oleh BKKBN, iBangga membantu pemerintah dan pemangku kepentingan merumuskan kebijakan dan intervensi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yang ditandai dengan rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik.

@. Indeks Kemandirian adalah indikator utama tahun 2025 dengan capaian target 49.87 dan capaian realisasi tahun 2025 masih dalam angka (nol)

@ Indeks Ketentraman adalah indikator utama tahun 2025 dengan capaian target 63.73 dan capaian realisasi tahun 2025 masih dalam angka (nol)

@ Indeks Kebahagiaan adalah indikator utama tahun 2025 dengan capaian target 61.79 dan capaian realisasi tahun 2025 masih dalam angka (nol)

b. (Indeks) Pembangunan Gender adalah ndeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesenjangan gender dalam pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. IPG menggunakan tiga dimensi utama seperti **kesehatan**, **pendidikan**, dan **standar hidup** untuk membandingkan capaian pembangunan antara kedua jenis kelamin. Semakin dekat nilai IPG dengan 1 atau 100, semakin baik kesetaraan gender dalam pembangunan, sementara nilai yang jauh dari 1 atau 100 menunjukkan ketimpangan yang signifikan Indikator dari sasaran 2 dari Indikator Utama (IKU) tahun 2025 dengan capaian target adalah 87.93 dan capaian realisasi tahun 2025 masih dalam angka (nol) Indeks Pembangunan Genderadalah ukuran yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai kesetaraan pembangunan

manusia antara laki-laki dan perempuan, mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang telah mengakomodasi isu gender dengan menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

Tabel II-150

c. Indeks Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah indikator yang mengukur dan menggambarkan sejauh mana hak-hak anak, yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta pendidikan dan waktu luang, telah dipenuhi. IPHA merupakan bagian dari Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan menjadi tolok ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program perlindungan anak di Indonesia adalah indikator dari sasaran 3 dari Indikator Utama (IKU) tahun 2025 dengan capaian target adalah 54.718 dan capaian realisasi tahun 2025 masih dalam angka (nol), indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah sebuah indikator yang mengukur sejauh mana hak-hak anak telah terpenuhi di suatu wilayah, baik di tingkat nasional maupun daerah. IPHA merupakan bagian dari Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang lebih luas, yang terdiri dari empat klaster utama hak anak: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Capaian IPHA yang rendah menunjukkan bahwa hak-hak anak di wilayah tersebut belum terpenuhi secara optimal, yang menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengambil tindakan

d.. Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan sejumlah indikator dan mengacu pada **Konvensi Hak Anak**. IPA berfungsi sebagai tolok ukur capaian pembangunan perlindungan anak untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan pemerintah serta sebagai dasar penyusunan strategi di masa depanadalah indikator dari sasaran 3 dari Indikator Utama (IKU) tahun 2025 dengan capaian target adalah 54.718 dan capaian realisasi tahun 2025 masih dalam angka (nol) Indeks Perlindungan Anak (IPA), adalah tolok ukur atau ukuran komprehensif yang dirancang untuk menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia, mengacu pada lima klaster hak anak dari Konvensi Hak Anak (KHA). IPA terdiri dari dua komponen utama: Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) yang mengukur pemenuhan hak-hak anak secara umum, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berfokus pada capaian perlindungan anak yang membutuhkan

penanganan khusus, seperti anak-anak disabilitas atau anak terlantar

f. ndeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator kuantitatif yang mengukur tingkat pencapaian pembangunan perlindungan anak bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti penyandang disabilitas, pekerja anak, atau anak terlantar. IPKA menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perlindungan anak dan mengevaluasi efektivitas program, dengan mengacu pada standar Konvensi Hak Anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) indikator dari sasaran 3 dari Indikator Utama (IKU) tahun 2025 dengan capaian target adalah 64.576 dan capaian realisasi tahun 2025 masih dalam angka (nol) ndeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah panduan atau deskripsi yang menguraikan mengenai capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak yang membutuhkan perlindungan ekstra karena kondisi atau situasi khusus. IPKA berfokus pada klaster V dari Konvensi Hak Anak, yang mencakup perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan, seperti anak penyandang disabilitas, anak terlantar, dan anak yang dieksploitasi atau mengalami kekerasan, serta untuk mengukur upaya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Tabel II-150

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Tabel II-150
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Telaah Kebijakan Nasional pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus pada Implementasi kebijakan daerah untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender ,keseimbangan daya dukung lingkungan ,peningkatan kualitas penduduk serta perlindungan perempuan dan anak. Dengan merujuk pada rencana Strategis daerah yang selaras dengan peraturan Perundangan nasional , seperti Perpres no 186 Tahun 2024 terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis .

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) Tahun 2025 biasanya mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan keluarga berencana, dan penguatan perlindungan perempuan dan anak, sejalan dengan prioritas daerah dan nasional. Tujuan utamanya adalah menentukan program pembangunan yang terukur, efisien, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta mewujudkan sinergi antar program untuk mencapai kinerja yang optimal dalam tugas dan fungsinya

Tabel II-150

Sasaran Umum Pembangunana Nasional Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Beremcana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pengendalian Penduduk: Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui program KB dan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi.
2. Pemberdayaan Perempuan: Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan menciptakan keluarga yang kecil serta sejahtera sesuai kondisi ekonomi keluarga.
3. Perlindungan Perempuan dan Anak: Melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kerasan, diskriminasi, dan masalah sosial lainnya.
4. Pemberdayaan Keluarga: Membentuk keluarga yang berkualitas dan berdaya melalui berbagai program yang mendukung kesejahteraan keluarga.

Program Unggulan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Beremcana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (GENTING):
2. Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA):
3. Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI):
4. Lansia Berdaya (SIDAYA):

3.1.2.1Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang berkaitan dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPPA) fokus pada

penguatan keluarga berencana, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak

Prioritas Nasional Tahun 2025

Tabel II-150

PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

PRIORITAS NASIONAL 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PRIORITAS NASIONAL 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

PRIORITAS NASIONAL 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu elemen utama untuk mencapai Peningkatan kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender merupakan fokus kebijakan nasional yang penting, terutama dalam konteks mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan inklusif, dengan memperhatikan peran perempuan, anak, dan seluruh anggota keluarga adalah pemerintahan yang efektif dan transparan dengan Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera untuk pencapaian Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargal, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar harus mampu menciptakan kelompok ketahanan keluarga permasalahan yang dihadapi demi meningkatnya ketahanan sosial daerah yang lebih baik.

3.2 **Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.150

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu "Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta terwujudnya keluarga yang berkualitas" tujuan tersebut dicapai melalui 4 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Terwujudnya keluarga yang berkualitas.
2. Sasaran 2: Meningaktnya Pengarustamaan Gender
3. Sasaran 3 : Meningkatnya perlindungan khusus anak
4. Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola kinerja DPPKBPPPA

   Tujuan dan sasaran DPPKBPPPA dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra DPPKBPPPA Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini

Tabel III.1.

Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Penduduk Keluaraga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Tujuan : Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.01	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga	58.46
Sasaran 1 : Menurunnya Tingkat Kelahiran Anak	Total Fertility Rate (TFR)	2.04	Sasaran 1 Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Kemandirian	49.87
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR	77.06		Indeks Ketentraman	63.73
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Bangga Kencana	66.67		Indeks Kebahagiaan	61.79
Tujuan : 2 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG	87.93	Sasaran 2 Meningaktnya Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks	87.93
Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.78	Sasaran 3 : Meningkatnya perlindungan khusus anak)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	54.718
Sasaran 2 : Terwujudnya Kabupaten	Predikat Kabupaten Layak	Madiya		Indeks Perlindungan Anak	62.3157

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Layak Anak	Anak			(IPA) (Indeks)	
Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	B		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	64.576
Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola	Nilai SAKIP Dinas	**70,86**	Sasaran 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	58

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Predikat)	70,86
				Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (%)	70.0

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel IV.1.50

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital**

Program prioritas yang mendukung Pembangunan daerah dalam Peningkatan kualitas keluarga adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar Urusan Pengendalian Penduduk keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak . Program-program tersebut mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan pelayanan Kekerasan Perempuan dan Anak.

Berikut pada tabel IV.1 disajikan daftar program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah tahun 2025;

Tabel. IV.1

Daftar Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarustamaan Gender pada lembaga Pemerintah	Koordinasi dan singkronisasi Perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	2.569.990
			Penyusunan Kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	2.365.500
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2.280.000
2	Progran Perlindugan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	29.950.000
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.795.000
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	118.795.000

		Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	520.000

Tabel IV-150

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 4.1 Lanjut

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah adanya perubahan dalam rencana kerja, yang diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang baru untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten

Takalar.

Di dalam Perubahan Renja Tahun 2025 ini terdapat rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, dimana di dalammya terdapat 5 Program, 14 Kegiatan serta 30 Sub Kegiatan, dimana untuk penyebaran kegiatannya adalah untuk kegiatan rutin berlokasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, sedangkan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada kecamatan ataupun desa/kelurahan, dan kegiatan yang sifatnya koordinasi selain berlokasi pada daerah setempat yakni pada pemerintah

daerah Kabupaten Takalar serta ada juga yang berlokasi di luar daerah.

Tabel II-150

Jumlah dana yang program ,kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud bersumber dari Dana Alakosi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp. 4.471.926.831.

Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2025 beserta pendanaan yang diharapkan dapat terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel IV. 2 berikut :

Tabel II-150

Tabel IV.2

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00							11.296.003.652,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00							11.296.003.652,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00							5.119.136.552,00	

1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Dokumen 2	Dokumen 2	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00							4.534.136.552,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			Dokumen 2	Dokumen 2	15.194.750,00	18.359.490,00	18.359.490,00			-	1. Pembangunan Manusia	Dokumen		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.724.400,00	5.530.770,00	3.160.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.069.000,00	3.576.150,00	3.122.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

Tabel II-150

																						MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.250,00	1.998.270,00	71.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.083.500,00	1.728.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					NON URUSAN							10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00								11.296.003.652,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00								5.119.136.552,00	
2	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Dokumen 2	Dokumen 2	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00								4.534.136.552,00	

	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			Dokumen 2	Dokumen 2	15.194.750,00	18.359.490,00	18.359.490,00			-	1. Pembangunan Manusia	Dokumen		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00								11.296.003.652,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00								5.119.136.552,00	
3	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				Dokumen 2	Dokumen 2	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00							4.534.136.552,00	

						DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah															
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			Dokumen 2	Dokumen 2	15.194.750,00	18.359.490,00	18.359.490,00			-	1. Pembangunan Manusia	Dokumen		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Laporan	1 Laporan	2.160.000,00	2.931.900,00	1.353.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.841.100,00	2.238.900,00	1.766.070,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.630.640.390,00	3.633.824.045,00	3.633.824.045,00			-	1. Pembangunan Manusia	Dokumen		4.214.136.552,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				432 Orang/bulan	432 Orang/bulan	3.615.641.390,00	3.618.813.045,00	3.608.509.774,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non	-	1. Pembangunan Manusia			4.194.136.552,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

																	Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak						MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 1	2 . 0 2	0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.303.000,00	7.474.000,00	3.434.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

		8	1	.02	007																	

Tabel II-150

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.696.000,00	7.537.000,00	2.426.040,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			Laporan 4	Laporan 4	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	Laporan		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUA

Tabel II-150

																						N DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 1	2 . 0 3	0 0 0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 1	2 . 0 3	0 0 0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 1	2 . 0 3	0 0 0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

Tabel II-150

																						MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pengelolaan Adminsitrasi Persentase Pengelolaan Umum perangkay daerah	-			dolu, em 1 persen	dolu, em 1 persen	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	Dokumen		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabiran	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

																g						BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 1	2 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pengelolaan Adminsitrasi	-			persen 100	persen 100	24.478.000,00	29.418.000,00	29.418.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	persentase pengelolaan Adminsitrasi		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 1	2 . 0 6	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					NON URUSAN							10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00							11.296.003.652,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00							5.119.136.552,00	
4	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persen 100	Persen 100	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00							4.534.136.552,00	

	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pengelolaan Adminsitrasi	-			persen 100	persen 100	24.478.000,00	29.418.000,00	29.418.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	persentase pengelolaan Adminsitrasi		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00							11.296.003.652,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00							5.119.136.552,00	
5	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persen 100	Persen 100	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00							4.534.136.552,00	

						DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pengelolaan Adminsitrasi	-			persen 100	persen 100	24.478.000,00	29.418.000,00	29.418.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	persentase pengelolaan Adminsitrasi		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

Tabel II-150

																							PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	24.478.000,00	29.418.000,00	15.729.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	-			Laporan 4	Laporan 4	13.374.000,00	270.000,00	270.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Pengadaan BMD		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

Tabel II-150

																						MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	270.000,00	5.470.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					NON URUSAN							10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00							11.296.003.652,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00							5.119.136.552,00	
6	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah pengadaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah				Laporan 4	Laporan 4	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00							4.534.136.552,00	

	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	-			Laporan 4	Laporan 4	13.374.000,00	270.000,00	270.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Pengadaan BMD		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00							11.296.003.652,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00							5.119.136.552,00	
7	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah "Perencanaan,				Laporan B 1 Huruf	Laporan B 1 Huruf	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00							4.534.136.552,00	

Tabel II-150

						DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"															
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daearah persentase pengelolaan Adminsitrasi	-			38 laporan Laporan 1	38 laporan Laporan 1	318.990.100,00	127.473.900,00	127.473.900,00			-	1. Pembangunan Manusia	Laporan		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang				12 Laporan	12 Laporan	201.390.100,00	12.707.000,00	5.482.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabiran	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

							Disediakan										g						BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	117.600.000,00	114.766.900,00	113.713.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	0 8	0 1	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan daerah Persentase pelaksanaPersentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan daerah Tersedianya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			43 unit Laporan 4	43 unit Laporan 4	28.884.000,00	15.585.000,00	15.585.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Laporan BMD		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 1	2 . 0 9	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	22.410.000,00	9.000.000,00	18.996.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMB

Tabel II-150

																	)						ERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.700.000,00	405.000,00	2.430.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.554.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

Tabel II-150

																						MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD				70,78 95 indeks %	70,78 95 indeks %	9.999.990,00	9.999.950,00	3.570.000,00							160.000.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-			87.93 indeks 90 Persen	87.93 indeks 90 Persen	3.699.990,00	7.719.950,00	7.719.950,00			-	1. Pembangunan Manusia	Lembaga		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																	

		8	2	.01	001	*Tabel II-150*																	
							Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	999.990,00	2.569.990,00	910.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	1.979.460,00	630.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMB

							Kabupaten/Kota																	ERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota																	
							Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota				35 Kebijakan	35 Kebijakan	900.000,00	2.365.500,00	770.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																	

							Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				35 Orang	35 Orang	900.000,00	805.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	Terlaksananya Kegiatan pamberdayaan perempuan Bidang Politik , Hukum , Sosial , dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenganan kabupaten untuk dilaksanakan	-			10 organisasi	10 organisasi	3.600.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	organisasi		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN

						Kabupaten/Kota																	GAN ANAK
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	2.280.000,00	1.260.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	

							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Organisasi	35 Organisasi	900.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02	004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
							Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi				35 Orang	35 Orang	900.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

							perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi																	MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.700.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	lembaga		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan				2 Lembaga	2 Lembaga	900.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalab	-	-	1. Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUA

							Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan										biran g							RGA BEREN CANA, PEMB ERDAY AAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
	2	0 8	0 2	2 . 0 3	0 0 0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				35 Oran g	35 Oran g	900.00 0,00	0,00	0,00	Kab. Takal ar, Patta llassa ng, Kalab biran g	-	-	1. Pemb angun an Man usia			15.000. 000,00	DINAS PENGE NDALI AN PEND UDUK, KELUA RGA BEREN CANA, PEMB ERDAY AAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
	2	0	0	2	0	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

		8	2	. 0 3	0 0 6	*Tabel II-150*																	
							Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota				2 Unit	2 Unit	900.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	2	0 8	0 3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penyelesaian Kasus terhadap Perempuan Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten				90 layanan % 10	90 layanan % 10	72.650.090,00	251.914.680,00	251.914.680,00							175.000.000,00	

							yang mendapat penguatan dan																
	2	0 8	0 3	2 . 0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase Penyelesaian Kasus terhadap Perempuan Tersedianya layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	-			70.78 indeks 78 indeks 90 % layanan 10	70.78 indeks 78 indeks 90 % layanan 10	40.250.000,00	71.550.000,00	71.550.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	penyediaan Layanan		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 3	2 . 0 1	0 0 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan				1 Dokumen	1 Dokumen	37.250.000,00	71.550.000,00	71.550.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalab	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUA

							Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									biran g	Perli ndun gan Pere mpu an dan Anak						RGA BEREN CANA, PEMB ERDAY AAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
	2	0 8	0 3	2 . 0 1	0 0 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendamping an Layanan Perlindunga n Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Pera ngka t Daer ah	35 Pera ngka t Daer ah	3.000.0 00,00	0,00	0,00	Kab. Takal ar, Patta llassa ng, Kalab biran g	-	-	1. Pemb angun an Man usia			20.000. 000,00	DINAS PENGE NDALI AN PEND UDUK, KELUA RGA BEREN CANA, PEMB ERDAY AAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	-			10 layanan	10 layanan	26.100.090,00	111.345.000,00	111.345.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	layanan Perempuan Korban Kekerasan		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				50 Orang	50 Orang	20.940.090,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

Tabel II-150

																							MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Layanan	10 Layanan	5.160.000,00	111.345.000,00	111.345.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Tersedianya layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	-			19 Lembaga	19 Lembaga	6.300.000,00	69.019.680,00	69.019.680,00			-	1. Pembangunan Manusia	Lembaga Penyedia Layanan		95.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

						Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.	00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

				0 3	0 2																	
							Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				25 Orang	25 Orang	1.500.000,00	69.019.680,00	69.019.680,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 3	2 . 0 3	0 0 0 3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan				30 Orang	30 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAY

							Kebutuhan Spesifik																AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS	Persentase kelompok perempuan berdaya Persentase Kelompok				9590 % %	9590 % %	0,00	0,00	0,00								40.000.000,00	

						KELUARGA	perempuan berdaya															
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender	-			Indeks p70,78	Indeks p70,78	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	Indeks Pemberdayaan Gender		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk				35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BEREN

							Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																CANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.0	000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	

				1	3																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/ Desa	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 4	2 . 0 3		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban keakerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten yang disediakan	-			Layanan l10nan	Layanan l10nan	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	penyediaan Layanan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLI

Tabel II-150

																						NDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Layanan	10 Layanan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak				Persen 85	Persen 85	0,00	0,00	0,00							30.000.000,00	

	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-			persen 85	persen 85	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	sistem data gender dan Anak		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

Tabel II-150

																							MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kabupaten Layak anak				Madya Predikat	Madya Predikat	45.372.000,00	9.470.110,00	5.310.010,00								75.000.000,00	

	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	-			Madua Predikay	Madua Predikay	12.000.000,00	9.470.110,00	9.470.110,00			-	1. Pembangunan Manusia	Predeikat Kabupaten Layak Anak		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan				40 Organisasi	40 Organisasi	4.500.000,00	4.100.110,00	1.800.010,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

							Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha																MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	5.370.000,00	3.510.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembag	Tersedianya layanan peningkatan kulaitas hidup anak	-			Lembaga 9	Lembaga 9	33.372.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Man	Lembaga penyedia layan		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PEND

						a Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	keweangan kabuapten yang mendapat penguatan dan pengembangan												usia	an			UDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	4.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

																							ANAK
	2	0 8	0 6	2 . 0 2	0 0 0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 6	2 . 0 2	0 0 0 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1.422.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/K				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

							ota																MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu				Kasus 30	Kasus 30	297.978.000,00	149.265.000,00	149.265.000,00							105.000.000,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	-			Kasus 30	Kasus 30	64.950.000,00	30.470.000,00	30.470.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Kasus Kekerasan Anak		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

																							ANAK
	2	0 8	0 7	2 . 0 1	0 0 0 3	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																	
							Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.500.000,00	520.000,00	520.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 7	2 . 0 1	0 0 0 4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																	

							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				35 Orang	50 Orang	63.450.000,00	29.950.000,00	29.950.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten	-			Keca ,tan 10	Keca ,tan 10	128.925.000,00	118.795.000,00	118.795.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Layanan Kasus kekerasan Anak		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN

						Kabupaten/Kota																		GAN ANAK
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				30 Orang	30 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		

							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				10 Layanan	10 Layanan	125.925.000,00	118.795.000,00	118.795.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Tersedianya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	-			Kecamatan 19camatan	Kecamatan 19camatan	104.103.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	Lembaga Penyedia Layanan di 10 Kecamatan		65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN

						Daerah Kabupaten/Kota																		GAN ANAK
	2	0 8	0 7	2 . 0 3	0 0 0 4	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																		
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				2 Lembaga	2 Lembaga	13.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 7	2 . 0 3	0 0 0 5	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		

							Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																	
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				30 Orang	30 Orang	4.557.090,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

Tabel II-150

																							MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																	
							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																	

							Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota																
							jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan				1 Dokumen	1 Dokumen	86.045.910,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

							perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota																MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						5.918.966.000,00	6.743.869.000,00	7.367.965.200,00							6.176.867.100,00	
14	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah kebijakan peraturan daerah ,peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk				Kebijakan 2	Kebijakan 2	71.600.000,00	60.000.000,00	345.200.000,00							220.000.000,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] Jumlah kebijakan peraturan daerah ,peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Jumlah	-			10 sektor 4 dokumen Kebijakan 2	10 sektor 4 dokumen Kebijakan 2	11.600.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	kebijakan peraturan daerah		130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

						dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kebijkan peraturan daerah																	PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Tabel II-150

																							PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																	
							Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

							Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																	
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				35 Organisasi	35 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																	

							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				35 Organisasi	35 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																	
							Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

Tabel II-150

																							MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																	
							Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																	

							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependuduk				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

							an, dan Keluarga Berencana)																MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																	
							Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)																	

							Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																	
							Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

Tabel II-150

																						MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter	-			10 sektor	10 sektor	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	sektor data profil		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabiran	-	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

Tabel II-150

																g							BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.	00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																	

				0 2	0 9																	
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				10 Laporan	10 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 2	2 . 0 2	0 0 1 2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan Laporan	0,00	0,00	231.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAY

																						AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	1 Laporan Dokumen	0,00	0,00	54.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																

							Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				18 Unit	18 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota																	
							Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

Tabel II-150

																						PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB																
							Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																

							Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																	
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

																						MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Capaian KB Aktif				85 %	85 %	4.355.766.000,00	4.971.069.000,00	5.309.965.200,00							4.085.267.100,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Angka Pemakaian Kontasepsi	-			Angka 71,07	Angka 71,07	1.137.150.000,00	1.089.000.000,00	1.089.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Angka Pemakaian Kontrasepsi		238.140.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.0	000	Pengendalian Program KKBPK																	

				1	8																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	19.830.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 3	2 . 0 1	0 0 0 9	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

							Keluarga Berencana)																	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Laporan	10 Laporan	504.120.000,00	604.000.000,00	547.120.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		

							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			46.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependuduk				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			50.640.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BEREN

							an, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																CANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																	
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.0	001	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																	

				1	4																	
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				10 Organisasi	10 Organisasi	313.200.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunkan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan	-			persen 100	persen 100	585.000.000,00	2.491.185.000,00	2.491.185.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan		320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLI

Tabel II-150

																						NDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																
							Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																

							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				618 Orang	618 Orang	585.000.000,00	860.000.000,00	860.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			280.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																	
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangun				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.631.185.000,00	1.631.185.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	-	1. Pembangunan Manusia			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

							an Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	ketersediaan dan jejaringnya seluruh Tingkat wilayah yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan KBKR dengan standarisasi pelayanan	-			OPD 35	OPD 35	22.116.000,00	887.384.000,00	887.384.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi		1.422.882.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	17.116.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			64.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				720 Orang	720 Orang	0,00	807.584.000,00	807.584.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/ Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana DAK Non	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

																Fisik-BOKKB-BOKB							MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																	
							Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	

							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	-	1. Pembangunan Manusia			652.882.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

Tabel II-150

																							MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	0,00	56.400.000,00	25.200.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			556.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

																							MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																	
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																	

							Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan																	
							Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

																						MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya Peran serta Organisasi melalui Kampung KB	-			persen 65	persen 65	2.611.500.000,00	503.500.000,00	503.500.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Peran serta Organisasi		2.104.245.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																	

							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				4 Organisasi	4 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																	
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/ Desa	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

																							MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				18 Laporan	18 Laporan	660.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																	

							Jumlah DASHAT di Kampung KB				18 Unit	18 Unit	1.950.000.000,00	335.500.000,00	762.476.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			1.471.225.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																	
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga				18 Kampung	18 Kampung	1.500.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			603.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMB

							Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)															ERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Bangga Kencana				Indeks 62	Indeks 62	1.491.600.000,00	1.712.800.000,00	1.712.800.000,00							1.871.600.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapianya Indeks Bangga Kencana	-			Indeks 62	Indeks 62	25.000.000,00	187.600.000,00	187.600.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Indeks Bangga Kencana		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN

																							GAN ANAK
	2	1 4	0 4	2 . 0 1	0 0 0 8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 4	2 . 0 1	0 0 1 4	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																	

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				150 Keluarga	150 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																	
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

Tabel II-150

																							MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	-	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	

							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	10 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan				52 Orang	52 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE

							Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				52 Orang	52 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		

							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				10 Kelompok	10 Kelompok	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta	Tercapianaya Indeks bangga Kencana	-			Indeks 62	Indeks 62	1.466.600.000,00	1.525.200.000,00	1.525.200.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Indeks Bangga Kencana		1.471.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUA

						Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																	RGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	
							Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

							dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				10 laporan	10 laporan	696.000.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			696.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			

							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				10 laporan	10 laporan	765.600.000,00	835.200.000,00	835.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			765.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
											JUMLAH		**10.376.527.320,00**	**10.989.449.175,00**	**11.571.596.674,00**							**11.296.003.652,00**	

Sumber Data Perubahan Reja si di Aplikasi SIPD 2025

Tabel II-150

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pendanaan karena adanya pergeseran, penambahan, maupun pengurangan anggaran karena adanya efesiensi anggaran. Terdapat 3 Program 5 Kegiatan, dan 16 Sub Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran.

Tabel II.150

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pendanaan adalah sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 3.824.930.435 dan setelah perubahan menjadi Rp**.** 3.817.969.435, pada program ini terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000. Hal ini terjadi karena terdapat kegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran meskipun adanya beberapa kegiatan pada program ini yang mengalami efesiensi. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah :
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 18.359.490,00 dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 16.892.490. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 1.467.000, pada kegiatan ini terjadi penambahan dan pengurangan pada 3 sub kegiatan yaitu :
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran pokok sebesar Rp. 5.530.770 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 4.225.770, adalah belanja perjalanan Dinas dalam Kota.
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 1.998.270 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.806.270, terjadi pengurangan sebesar Rp. 192.000. Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja Belanja Bahan /Bahan Untuk ATK
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 3.633.824.045 dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 3.631.550.045. Kegiatan ini mengalami

pengurangan anggaran sebesar Rp. 2,274.00, pengurangan terjadi pada 2 sub kegiatan yaitu :

Tabel II-150

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran pokok sebesar Rp. 3.633.824.045 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 3.631.550.045, terjadi pengurangan sebesar Rp. 2,274.00 . Rincian belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD , anggaran pokok sebesar Rp. 7.474.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 450.0000. terjadi pengurangan sebesar Rp. 450.000. Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja Meeting dalam Kota.

- Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 29.418.000,0 dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 13.220.000 Kegiatan ini mengalami pengurangan terjadi pada 1 sub kegiatan yaitu :
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulatsi SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 29.418.000,0 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 13.220.000, terjadi pengurangan sebesar Rp. 13.220.000 Rincian belanja yang mengalami mengurangan adalah belanja perjalanan dinas biasa
  - Koordinasi dan Singronisasi Partisispasi PerempuanBidang Politik, Hukum ekonomi Kewenagan Kabupaten Kota anggaran pokok sebesar Rp. 2.280.000,00 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.505.750, terjadi pengurangan sebesar Rp. 774.250 Rincian belanja yang mengalami mengurangan adalah belanja Belanja Bahan untuk kegiatan Kantor-Cover
  - Koordinasi dan Sinronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG anggaran Pokok 2.569.990, 00 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.009.990 , terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.560.000 Rincian

belanja yang mengalami mengurangan adalah belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel II-150

- Penyususnan Kebijakan Penyelanggaran PUG Kewenangana Kabupaten /Kota anggaran Pokok 2.365.500, dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.329.990 , terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.240.000 Rincian belanja yang mengalami mengurangan adalah belanja Perjalanan Dinas Biasa.
- Advokasi Kebijakan dan Pndampingan Pemenuhan Hak Anak pada Media dan dunia usaha dengan Anggaran Pokok 4.100.110 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.460.000 , terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.640.000 Rincian belanja yang mengalami mengurangan adalah belanja Perjalanan Dinas Biasa.

2. Pada Parsial I Dinas PPKBPPPA mendapat tambahan anggaran sebesar **Rp 426.976.200** dengan sumber dana Insentif Fiskal yang diperuntukkan untuk membayar Utang Tahun 2024 untuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Stunting dan Anak yang berisiko Stunting. Sehingga Jumlah Anggaran Dinas PPKBPPPA pada Parsial I menjadi **Rp. 11.416.425.375,-**
3. Pada Parsial II Dinas PPKBPPPA mendapat Efisiensi Anggaran sebesar **(38.158.701)** dengan sumber dana DAU, Anggaran yang diefisiensi adalah anggaran Perjalanan DInas. Sehingga Jumlah Anggaran Dinas PPKBPPPA pada Parsial II menjadi **Rp. 11.378.266.674,-**
4. Pada Parsial III Dinas PPKBPPPA mendapat tambahan anggaran sebesar **Rp 210.307.800** dana ini bersumber dari DBH yang diperuntukkan untuk Kegiatan Verifikasi Pendataan Kemiskinan Ekstrim. Sehingga Jumlah Anggaran Dinas PPKBPPPA pada Parsial III menjadi **Rp. 11.588.574.474,-**
5. Saat ini Dinas PPKBPPPA mendapat efisiensi ATK sebesar **Rp. (16.977.550)** dari Jumlah Anggaran ATK sebesar **Rp**. **21.058.050,-**
6. Rekap dari Keseluruhan Anggaran Dinas PPPKBPPP Tahun 2025 dapat dilihat di Tabel Berikut :

REKAP ANGGARAN DINAS PPKBPPPA

TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel II-150

NO	URAIAN	ANGGARAN POKOK	ANGGARAN PARSIAL I	ANGGARAN PARSIAL II	ANGGARAN PARSIAL III	EFISIENSI ATK
1	DAU (Gaji)	3,618,813,045	3,618,813,045	3,608,509,544	3,608,509,544	3,608,509,544
2	DAU (Operasional)	111,624,950	111,624,950	83,769,750	94,077,550	77,100,000
3	DAU (Gani Non ASN)	114,482,500	114,482,500	114,482,500	114,482,500	114,482,500
4	DAK BOKB	4,725,849,000	4,725,849,000	4,725,849,000	4,725,849,000	4,725,849,000
5	DAK FISIK KB	2,018,020,000	2,018,020,000	2,018,020,000	2,018,020,000	2,018,020,000
6	DAK PPPA	400,659,680	400,659,680	400,659,680	400,659,680	400,659,680
7	Insentif Fiskal (Utang Tahun 2024)	-	426,976,200	426,976,200	426,976,200	426,976,200
8	DBH		-	-	200,000,000	200,000,000
JUMLAH ANGGARAN		**10,989,449,175**	**11,416,425,375**	**11,378,266,674**	**11,588,574,474**	**11,571,596,924**
SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)		**-**	**426,976,200**	**(38,158,701)**	**210,307,800**	**(16,977,550)**

BAB V
PENUTUP

Tabel II-150

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem[uan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini menjadi instrumen utama bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolah ragaan, dan pemajuan kebudayaan

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem[uan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar tahun 2025 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem[uan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar dengan Bappelitbangda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem[uan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar r harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem[uan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemerintah Daerah dengan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem[uan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2025 mempuunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar

Tabel II-150

2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar l dengan pemangku kepentingan; dan
3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem[uan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar dengan pemangku kepentingan

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem[uan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar telah berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Takalar, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem[uan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Dokumen Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem[uan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

,

Tabel II-150

PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Mandatory Spending Untuk Mendukung Belanja Daerah Yang Berkualitas Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 serta digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Perubahan Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi instansi baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga tersusunnya renja ini. Perlu di sadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan renja ini, ole karena itu masukan dan saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga renja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar program/kegiatan/sub kegiatan dapat berjalan lancer dan mencapai sasaran yang ditetapkan

Takalar, Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Takalar

DARWIS, S.Pd.,M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701201199802 1 005

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Keterkaitan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya II-10

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Sampai Dengan Tahun 2022 ... II-2
Tabel II-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel II-3 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel II-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel III-2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel IV-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025..... 38

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II-2
DAFTAR ISI II-6
DAFTAR TABEL II-2
DAFTAR GAMBAR II-2
BAB I PENDAHULUAN II-6
1.1 Latar Belakang II-8
1.2 Landasan Hukum II-13
1.3 Maksud dan Tujuan II-16
1.3.1 Maksud II-16
1.3.2 Tujuan II-16
1.4 Sistematika Penulisan II-16
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023 ..... II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai Dengan Triwulan I II-1
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.1.1 Kebijakan Nasional Dalam RPJMN/RKP **Error! Bookmark not defined.**
3.1.2 Telaahan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 **Error! Bookmark not defined.**
3.2.1 Tujuan ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2.2 Sasaran ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 37

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 37
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Penja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 47
BAB V PENUTUP 206
5.1 Catatan Penting 206
5.2 Kaidah Pelaksanaan 206
5.3 Rencana Tindak Lanjut 206

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Perubahan Dokumen Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perubahan Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan

Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Gambar 0-1
Keterkaitan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

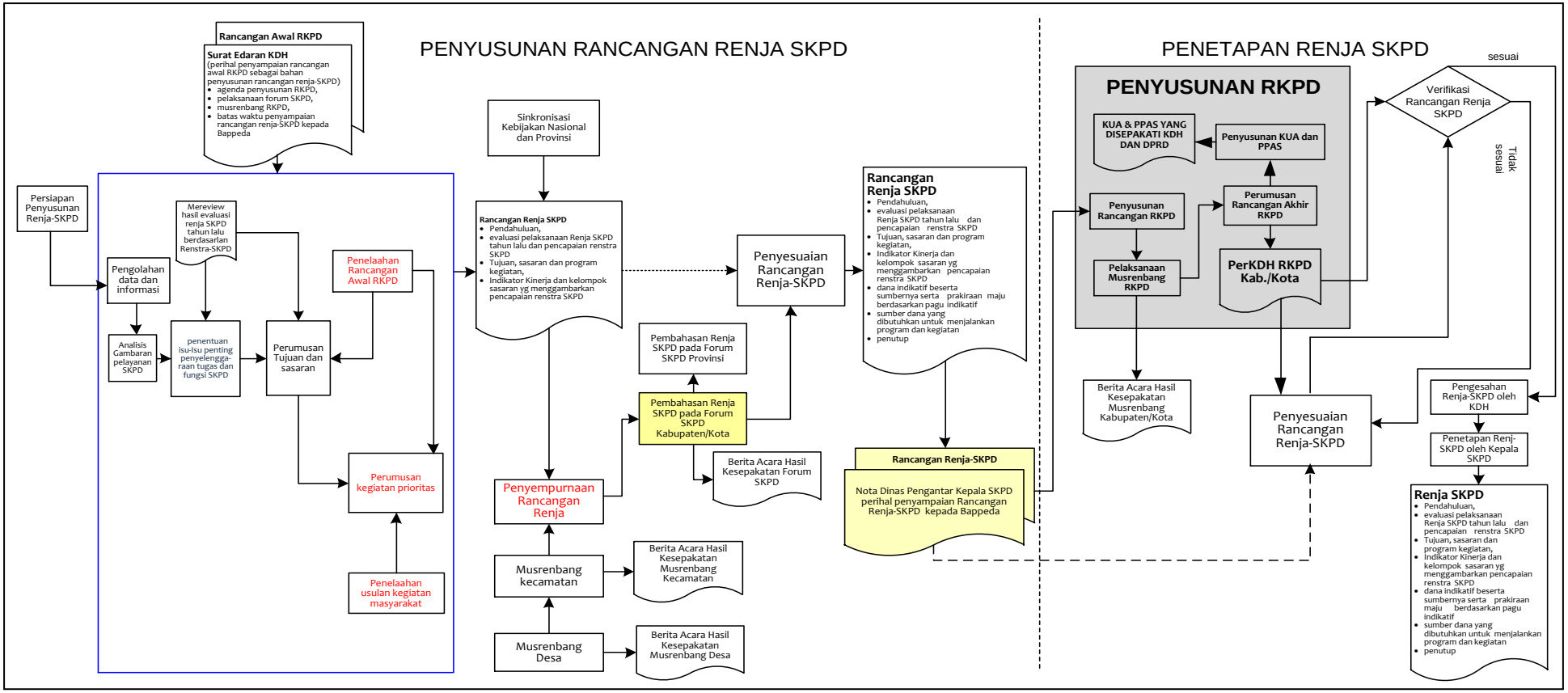

Sumber :

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun ini juga telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki perangkat daerah. Kedudukan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2026 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada Renstra.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan pada Bulan Januari yang meliputi penetapan Tim Penyusun dan pengumpulan data teknis;
2. Menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 pada Bulan Januari dengan memperhatikan Rancangan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2026;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
5. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
6. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025;

7. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPD Tahun 2025–2026 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi Renja tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat penting bagi pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus dan pemerintah daerah secara umum, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar. Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPD dan Renstra PD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang

perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renja memiliki nilai-nilai strategis, yaitu :

1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun;
2. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025;
3. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja tahunan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahn Deerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9 0);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Takalar Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 1).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan maksud :

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2026 kedalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RPD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan empat tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025. Pada Bab ini berisi empat hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar. Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar.

BAB IV Rencana, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Takalar. Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penyajian Tabel rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2025.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai Dengan Triwulan I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II-1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	8		12		25		26 = 25/8 x 100%	
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100 %**	**367,470,988,709**		**56,319,788,348**	**8%**	**57,800,012,167**	**7.95%**	**15.73 %**
		1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		**100 %**	**366,858,437,149**	**0.20%**	**56,319,788,348**	**16 %**	**57,800,012,167**	**15.90 %**	**15.76 %**
		1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**266,642,753,056**	**0%**	**56,319,788,347**	**31 %**	**56,319,788,347**	**31.40 %**	**21.12 %**

		1	01	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	100 %	18,095,000	77.78 %	12,419,800	77.78 %	12,419,800	77.78 %	68.64 %
						01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan perangkat Daerah	5	3,572,000	5	3,572,000	5	3,572,000	100.00%	100.00%
						02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5,206,000	1	5,206,000	1	5,206,000	100.00%	100.00%
						03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2,441,800	-	-	-	-	0.00%	0.00%
						04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3,641,800	1	3,641,800	1	3,641,800	100.00%	100.00%
						05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	3,233,400	-	-	-	-	0.00%	0.00%
															60.00%	**60.00%**
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)								
															R	**R**
								Predikat Kinerja								
		1	01	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	100 %	266,213,841,056	13 %	56,236,489,347	13 %	56,236,489,347	12.95 %	21.12 %
		1	01	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang mendapatkan gaji dan tunjangan + PPPK	23,674	165,920,369,598	6,734	43,271,453,147	6,734	43,271,453,147	28.44 %	26.08 %
								Jumlah ASN Yang mendapatkan TPP	4,2	6,774,0	-	-	-	-	0.00%	0.00%

									00	42,458							
								Jumlah ASN Yang mendapatkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	24,150	93,511,111,000	-	12,958,735,200	-	12,958,735,200	0.00%	13.86%
						03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%
						04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1,767,000	1	1,767,000	1	1,767,000	100.00%	100.00%
						05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3,534,000	1	3,534,000	1	3,534,000	100.00%	100.00%
						07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2,017,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)							**46.92%**	**48.56%**
								Predikat Kinerja							**SR**	**SR**
		1	01	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		100%	5,615,000	100.00%	5,615,000	100.00%	5,615,000	100.00%	100.00%
						01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%

						04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2,572,000	1	2,572,000	1	2,572,000	100.00%	100.00%
						05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2,043,000	2	2,043,000	2	2,043,000	100.00%	100.00%
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)							##########	##########
								Predikat Kinerja							**ST**	**ST**
		1	01	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		100.00%	2,322,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
						05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	2,322,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)							**0.00%**	**0.00%**
								Predikat Kinerja							**SR**	**SR**
		1	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	100%	50,990,000	8%	7,744,200	8%	7,744,200	8.24%	15.19%
		1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	22	13,566,000	4	4,080,000	4	4,080,000	18.18%	30.08%
		1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	100.00%	100.00%

		1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan yang disediakan	2	4,148,600	1	2,164,200	1	2,164,200	50.00%	52.17%
		1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	45	16,800,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	5,975,400	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	9,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)							**24.03%**	**26.03%**
								Predikat Kinerja							**SR**	**SR**
		1	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	100.00%	338,230,000	8.33%	54,600,000	8.33%	54,600,000	8.33%	16.14%
		1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diadakan	12	6,030,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%

		1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Umum Yang disediakan	12	331,200,000	2	54,600,000	2	54,600,000	16.67%	16.49%
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)							**5.56%**	**5.50%**
								Predikat Kinerja							**SR**	**SR**
		1	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100.00%	13,660,000	12.50%	2,920,000	12.50%	2,920,000	12.50%	21.38%
		1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	2,200,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	8,760,000	2	2,920,000	2	2,920,000	33.33%	33.33%
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	2,700,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)							**16.67%**	**16.67%**
								Predikat Kinerja							**SR**	**SR**
								Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)							**36.17%**	**36.68%**
								Predikat Kinerja							**SR**	**SR**

Sumber Data : Laporan Monev TW 1 Tahun 2025

Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah:

A. Realisasi Program yang tidak Memenuhi Target Kinerja <25%

Ada 6 program yang tidak memenuhi target kinerja yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah. Indikator program ini adalah Jumlah program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 31,40%, hal ini disebabkan karena ada 13 sub kegiatan yang belum bisa terealisasi 100 % yaitu:
   1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian 0%.
   2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan capaian 0%.
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan capaian 0%.
   4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan capaian 0%.
   5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian 0%.
   6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian 0%.
   7) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan capaian 0%.
   8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian 0%.
   9) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian 0%.
   10) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian 0%.
   11) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian 16.49%.
   12) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian 0%.
   13) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian 0%.
2. Program Pengelolaan Pendidikan. Indikator program ini adalah Jumlah Program Pengelolaan Pendidikan yang dilaksanakan capaian kinerja 1.48%%, hal ini disebabkan karena ada 30 sub kegiatan yang belum terealisasi 100% yaitu:
   1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan capaian 17.13%
   2) Pengadaan Mebel Sekolah dengan capaian 0.00%.
   3) Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan capaian 0.00%.
   4) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan capaian 0.00%.
   5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan capaian 5.29%.
   6) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan capaian 0.00%.
   7) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan capaian 0.00%.
   8) Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan capaian 0.00%.

9) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan capaian 0.00%.
10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan capaian 0.00%.
11) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan capaian 0.00%.
12) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan capaian 0.00%.
13) Pengadaan Mebel Sekolah dengan capaian 0.00%.
14) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan capaian 0.00%.
15) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan capaian 0.00%.
16) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan capaian 8.34%.
17) Pengelolaan dana Bos Sekolah Menengah Pertama dengan capaian 0.00%.
18) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dengan capaian 0.00%.
19) Pengadaan Perlengkapan PAUD dengan capaian 0.00%.
20) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD dengan capaian 0.00%.
21) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD dengan capaian 0.00%.
22) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dengan capaian 0.00%.
23) Pengelolaan Dana BOP dengan capaian 0.00%.
24) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD dengan capaian 0.00%.
25) Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan capaian 14.92%.
26) Penyelenggaran Proses Belajar PAUD dengan capaian 0.00%.
27) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan capaian 0.00%.
28) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan dengan capaian 0.00%.
29) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan capaian 4.15%.
30) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan capaian 0.00%.

3. Program Pengembangan Kebudayaan. Indikator program ini adalah Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola dengan capaian 0.00%, hal ini disebabkan karena ada 1 sub kegiatan yang belum bisa terealisasi yaitu:
   1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan capaian 0.00%

4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Indikator program ini adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional dengan capaian 0.00%, hal ini disebabkan karena ada 2 sub kegiatan yang belum bisa terealisasi yaitu:
   1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dengan capaian 0.00%
   2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional dengan capaian 0.00%

5. Program Pembinaan Sejarah. Indikator program ini adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah dengan capaian 0.00%, hal ini disebabkan karena ada 1 sub kegiatan yang belum bisa terealisasi yaitu:
   1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota dengan capaian 0.00%

6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Indikator program ini adalah meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan dengan capaian 0.00%, hal ini disebabkan karena ada 1 sub kegiatan yang belum bisa terealisasi yaitu:
   1) Penetapan Cagar Budaya dengan capaian 0.00%
   2) Pengembangan Cagar Budaya dengan capaian 0.00%.

B. Realisasi Program / kegiatan yang memenuhi target kinerja 25%

- Tidak ada Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja pas 25%

C. Realisasi Program / kegiatan yang memenuhi target kinerja >25%

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian 100%
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian 100%
3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan capaian 100%
4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian 26,08%
5) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan capaian 100%
6) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan capaian 100%
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian 100%.
8) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan capaian 100%.
9) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian 100%.
10) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian 100%.
11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 30.08%
12) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian 100%.

13) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian 52.17%
14) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian 33.33%
15) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan capaian 71.13%.
16) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan capaian 40.98%
17) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dengan capaian 32.75%%.

D. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya target kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah., hal ini disebabkan karena:
   a. Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hanya tercapai 26,08% kerena ada 2 indikator yang tidak terealisasi yaitu jumlah insentif bagi KDH/WKDH dan Jumlah jenis obyektifitas lainnya. Kedua indikator ini tidak terealisasi karena target PAD tidak terpenuhi sebagai syarat pembayaran insentif.
   b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian 52.17%, hal ini dikarenakan adanya 2 indikator yang tidak terealisasi yaitu jumlah penggandaan yang disediakan dan jumlah dokumen yang dijilid. Kedua indikator ini tidak dapat direalisasikan karena di tiap-tiap sub kegiatan telah menganggarkan untuk biaya cetak dan jilid.
2. Program Pengelolaan Pendidikan.. Hal ini disebabkan karena:
   a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan capaian 17.13%. Hal ini disebabkan karena anggaran yang belum cair sehingga sub kegiatan ini blm dapat dilaksanakan secara maksimal.
   b. Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan capaian 14.92%. Hal ini disebabkan karena anggaran yang belum cair sehingga sub kegiatan ini blm dapat dilaksanakan secara maksimal.

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 yang terakomodir di APBD 2025

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6	16	66	6	16	68
TOTAL		**6**	**16**	**66**	**6**	**16**	**68**

Sumber Data : Laporan Monev TW 1 Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 6, jumlah kegiatan 16, dan jumlah sub kegiatan 66, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 6, jumlah indikator kegiatan sebanyak 16, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 68.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan di Kinerja APBD Triwulan 1 Tahun 2025

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No	**Perangkat Daerah**	**Pagu APBD**	**Realisasi s/d Triwulan I**	**Persentase**	
		(Rp)	**(Rp)**	**Fisik**	**Keu**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	367,470,988,709	57,800,012,167	7.95%	15.73%
TOTAL		**367,470,988,709**	**57,800,012,167**	**7.95%**	**15.73%**

Sumber Data : Laporan Monev TW 1 Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 367,470,988,709, anggaran tersebut digunakan dalam 6 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 7.95% dengan capaian realisasi fisik sebesar 0 %. Kondisi ini menunjukkan rata-rata capaian realisasi fisik yang belum maksimal karena belum ada pelaksanaan kegiatan baru berjalan 3 bulan. Dari 6 program blm ada yang mecapai realisasi kinerja di atas 25%.

Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar hingga triwulan I dalam kategori Rendah yaitu < 20, selebihnya sebanyak 2 (Dua) Program atau 25 persen dari jumlah keseluruhan Program dengan realisasi anggaran yang tergolong Sangat Rendah dengan serapan anggaran 0 persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk realisasi 0 – 10%, Kategori Sedang Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori Tinggi untuk realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 25 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 25 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program, anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar terdapat 6 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah atau 0% (realisasinya 0 persen) sebanyak 4 program yaitu Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program

Pembinaan Sejarah dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 2 program atau 25 persen (realisasi >10-20 persen) yaitu program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah dan Program Pengelolaan Pendidikan.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 7 kegiatan atau 50 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 4 kegiatan atau 29 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 3 kegiatan atau 21 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 31 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 16 sub kegiatan atau 57 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 4 sub kegiatan atau 13 persen, dan 9 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau 30 persen sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 25 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10 %	>10-20 %	>20 %		0 - 10 %	>10-20 %	>20 %		0 - 10 %	>10-20 %	>20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6	5	1	0	16	10	2	4	71	46	3	17
TOTAL		**6**	**5**	**1**	**0**	**16**	**10**	**2**	**4**	**71**	**46**	**3**	**17**

Sumber Data : Laporan Monev TW 1 Tahun 2025

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 5 kelompok, yaitu kategori Rendah dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori Sedang untuk realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar dapat dijelaskan bahwa dari 6 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua tidak terdapat capaian kinerja atau 0% program yang masuk pada kategori rendah atau dibawah 10 persen, begitupun pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 10-20 persen) tidak ada program atau 0% program yang msuk kategori sedang, semua program atau 100% yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 20 persen pada triwulan I Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 16 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 0 kegiatan (0 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20 persen.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 71 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 5 sub kegiatan (16,13 persen), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 3 kegiatan (9,68 persen).

Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD
Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10 %	>10 - 20 %	>20 %		0 - 10 %	>10 - 20 %	>20 %		0 - 10 %	>10 - 20 %	>20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6	5	0	1	16	12	2	2	71	47	4	15
TOTAL		**6**	**5**	**0**	**1**	**16**	**12**	**2**	**2**	**71**	**47**	**4**	**15**

Sumber Data : Laporan Monev TW 1 Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metedologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, yakni 1) Sederhana, 2) Partisipatif, 3). Akuntabel, 4) Berkelanjutan, 5) Transparansi dan 6) Keadilan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan dalam Pendidikan.

Agar sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar dapat tercapai, maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Ada beberapa indikator kinerja yang dapat diukur untuk melihat capaian pelayanan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Kepala Dinas. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Organisasi. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RENSTRA Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RENSTRA yang digariskan pada Tahun 2025. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Penetapan Target indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini;

Tabel II-6
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR (2023-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR (2025-2029)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks Pendidikan (58,37) 2020	65		Rata-rata lama sekolah	7.8	7.87	7.94	Belum diukur	7.87	7.94	
2	**APK Pendidikan**			Harapan lama sekolah	12.52	12.54	12.56	Belum diukur	12.54	12.56	
3	- PAUD	86%	62.14%	Skor Literasi Pendidikan Tingkat SD	52.40	54.90	57.40	53.77	54.90	57.40	
4	- SD	106.00%	101.04%	Skor Numerasi Pendidikan Tingkat SD	50.77	53.67	56.57	54.57	53.67	56.57	
5	- SMP	116.00%	105.79%	Skor Literasi Pendidikan Tingkat SMP	59.50	60.60	61.7	58	60.60	61.7	
6	- Kesetaraan/PKBM	30%	0%	Skor Numerasi Pendidikan Tingkat SMP	57.57	59.07	60.57	53.88	59.07	60.57	
7	**Angka Harapan Lama Sekolah**	12.56	12,50	Angka Melanjutkan tingkat SD	100	100	100	Belum diukur	100	100	
8	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	7.56	7.73	Angka Melanjutkan tingkat dan SMP	100	100	100	Belum diukur	100	100	
9	**Rata Rata Capaian SPM Pendidikan**		65.01	Angka Partisipasi PAUD	81.49	84.46	87.43	Belum diukur	84.46	87.43	

10	- PAUD	65%	65%	Persentase kelulusan warga belajar pendidikan non formal	100	100	100	Belum diukur	100	100	
11	- SD	93%	93%	Presentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola sesuai standar (NPSK)	14.29	42.85	64.28	Belum diukur	42.85	64.28	
12	- SMP	76%	76%	Nilai Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan	BB (70,29)	BB (70,29)	BB (70,29)	Belum diukur	BB (70,29)	BB (70,29)	
13	- Kesetaraan/PKBM	6%	6%	Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan	85	90	95	Belum diukur	90	95	
14	**Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf**	92%									
15	Presentase Guru Bersertifikasi di semua jenjang pendidikan										
	- PAUD	40%	31.9								
	- SD	60.50%	64.32%								
	- SMP	75.50%	72,0%								
	- Kesetaraan/PKBM	2.50%	0%								
16	Presentase Benda, Situs, Kesenian Daerah dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	55%	47%								
17	Presentase Objek Pemajuan Budaya dan Kesenian Lokal yang dilaksanakan/ditingkatkan	60%	40%								
18	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CC	BB (73.12)								
19	Nilai Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan	65 (B)	70.29								

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Data Diolah

Berdasarkan Tabel II.12, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar pada periode RPD Tahun 2023–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan pada sebagian besar indikator pendidikan dan kebudayaan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Pada indikator Indeks Pendidikan, target tahun 2023 sebesar 60,01 dan tahun 2024 sebesar 65, yang disusun berdasarkan capaian tahun dasar 2020 sebesar 58,37. Indeks pendidikan diakomodir melalui data BPS tahun 2023 dan 2024. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan kualitas pendidikan secara komprehensif di Kabupaten Takalar.

Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan, capaian pada jenjang PAUD menunjukkan peningkatan dari 59,07% pada tahun 2023 menjadi 62,14% pada tahun 2024, dimana dari 19.042 penduduk takalar yang berusia 5 – 6 tahun, 11.833 anak diantaranya berpartisipasi dalam PAUD. APK jenjang SD relatif stabil dan mendekati target, dimana keseluruhan penduduk usia 7 – 12 tahun yang sebanyak 34.681 orang, semua berpartisipasi dalam jenjang SD. sementara APK SMP menunjukkan kecenderungan menurun meskipun masih berada di atas 100%, dimana seluruh penduduk usia 7 – 18 tahun yang sebanyak 17.499 orang, seluruhnya juga berpartisipasi dalam jenjang SMP. Adapun APK Pendidikan Kesetaraan/PKBM belum menunjukkan capaian pada kedua tahun pelaporan.

Indikator Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan capaian yang mendekati target, yaitu 12,49 tahun pada 2023 dan meningkat menjadi 12,50 tahun pada 2024. Sementara itu, Angka Rata-Rata Lama Sekolah telah melampaui target pada kedua tahun, dengan capaian 7,66 tahun pada 2023 dan meningkat menjadi 7,73 tahun pada 2024, yang mengindikasikan peningkatan tingkat pendidikan penduduk, data ini diambil berdasarkan data dari badan pusat dan statistik kabupaten takalar

.

Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, rata-rata capaian meningkat dari 56,04% pada tahun 2023 menjadi 65,01% pada tahun 2024. Seluruh jenjang pendidikan, baik PAUD, SD, SMP, maupun Pendidikan Kesetaraan/PKBM, menunjukkan kesesuaian antara target dan realisasi, yang mencerminkan konsistensi pelaksanaan layanan pendidikan dasar. Untuk data SPM diakomodir melalui rapor pendidikan yang terhimpun berdasarkan data dari seluruh sekolah di jenjang PAUD, SD, SMP Sederajat. Namun kondisi untuk SPM di tahun 2020 -2021 dan 2022 serta 2023-2024 berbeda indikatir penyusunan SPMnya.

Berdasarkan data dari badan pusat statistik kabupaten takalar, Indikator Penduduk Usia di atas 15 Tahun Melek Huruf mencapai 89,74% pada tahun 2023, dimana dari

penduduk usia 15 ke atas yang sebanyak 245.768 orang, 220.552 jiwa diantaranya telah melek huruf. Capaian ini masih di bawah target, sehingga perlu penguatan program keaksaraan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

Pada indikator Persentase Guru Bersertifikasi, jenjang SD Guru yang bersertifikasi sebanyak 1.653 orang dari jumlah guru ASN dan Non ASN sebanyak 2.452 orang dan SMP Guru yang bersertifikasi sebanyak. 749 orang dari jumlah guru ASN dan Non ASN sebanyak 1.032 orang menunjukkan capaian yang cukup baik, bahkan melampaui target pada tahun 2023 dan 2024 untuk jenjang SD. Guru PAUD yang bersertifikasi 266 orang dari jumlah guru ASN dan Non ASN sebanyak 667 orang. Namun demikian, jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan/PKBM belum ada aturan yang mengatur terkait dengan sertifikasi bagi tutor, masih memerlukan perhatian lebih karena capaian belum memenuhi target yang ditetapkan dan untuk persentase guru bersertifikasi akan terus bertambah dimana kegiatan PPG terus berlanjut di Kementrian.

Dalam bidang kebudayaan, Persentase Benda, Situs, Kesenian Daerah, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dari data kebudayaan untuk keseluruhan situs kebudayaan sebanyak 117 objek dan telah mencapai target pada tahun 2023, namun belum mengalami peningkatan pada tahun 2024. Demikian pula dengan Persentase Objek Pemajuan Budaya dan Kesenian Lokal, yang realisasinya stagnan meskipun target meningkat.

Dari aspek tata kelola, Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan peningkatan dengan predikat BB pada tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya, Nilai SAKIP juga mengalami peningkatan dari predikat B (69,50) pada tahun 2023 menjadi 70,29 pada tahun 2024, yang mencerminkan perbaikan akuntabilitas kinerja instansi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar pada periode 2023–2024 menunjukkan tren positif, khususnya pada indikator pendidikan dasar, rata-rata lama sekolah, serta tata kelola pemerintahan. Namun demikian, masih diperlukan upaya optimalisasi pada pendidikan kesetaraan, sertifikasi guru PAUD, dan pemajuan kebudayaan agar seluruh target RPD dapat tercapai secara maksimal

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar menunjukkan **arah yang positif**, namun masih memerlukan fokus perbaikan pada pendidikan PAUD dan nonformal, peningkatan mutu pembelajaran, sertifikasi guru, serta pengelolaan dan pemajuan kebudayaan daerah agar target Renstra 2025–2029 dapat tercapai secara optimal.

Tabel II-7

Evaluasi Indikator SPM

Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	80,57	81,49 %	84,46 %	87,43 %	97.78 %	99.27 %	99.50 %	99.85 %	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15	97,46	96,38 %	98,16 %	98,80 %	99.34 %	99.21	99.50 %	99.80 %	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	99,32	99,98 %	100%	100%	97.05 %	99%	99.35 %	99.60 %	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	89,78	92,79 %	95,80 %	98,81 %	96.38 %	92%	92.45 %	96%	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	21,71	39,33	44,30 %	49.28 %	51%	68%	70%	75%	
	Kemampuan Literasi									
	SD	47.71 %	52.40 %	54.90 %	57.40 %	47.71 %	53%	54%	65%	
	SMP	50.65 %	59.5	60.6	61.7	50.65 %	58%	60%	75%	
	Kemampuan Numerasi									
	SD	44,31	50,77	53,67	56,57	44.31 %	54.57 %	60%	70%	
	SMP	48.39	57,57	59,07	60,57	48,39 %	53%	60%	70%	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	65,84	67,23	67.64	68,06	70%	67%	73%	84%	
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	65,29	69,11	69.86	70,61	72%	69%	73%	84%	
	Iklim Keamanan									
	SD	70,56 %	73,80 %	74.70 %	75,60 %	70.56 %	72%	75%	80%	
	SMP	65,35 %	68,88 %	70.38 %	71.88 %	65.35 %	66%	69%	78%	

	Iklim Kebinekaan									
	SD	69,78	69.90	70,70	71,10	69.78 %	68%	70%	75%	
	SMP	69,29	69.93	70.93	71,93	69.29 %	68%	70%	75%	
	Iklim Inklusivitas									
	SD	52,35	58,45	60.95	63,45	52.35 %	55%	60%	65%	
	SMP	52,96	56,73	59,13	61,53	52.96 %	54%	60%	65%	

SUMBER DATA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. DATA DIOLAH

Berdasarkan Tabel II-7 Evaluasi Indikator SPM Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 yang menggambarkan hasil kinerja bidang pendidikan secara komprehensif dan analitis. Evaluasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar telah mencapai kinerja yang cukup baik dalam berbagai aspek layanan dasar pendidikan, baik dari sisi akses, mutu, maupun lingkungan belajar.

1. **Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar**
   Pada indikator **tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun dalam PAUD**, capaian mencapai **81,49%**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini telah berjalan efektif. Sementara itu, **partisipasi pendidikan dasar** (usia 7–12 tahun) berada pada angka **99,98%**, menunjukkan hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah bersekolah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan dasar di Kabupaten Takalar telah menjangkau hampir seluruh sasaran wajib belajar.
   Untuk jenjang **pendidikan menengah pertama** (usia 13–15 tahun), capaian partisipasi mencapai **92,79%**, menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil anak usia SMP yang belum terlayani, meskipun angkanya sudah sangat tinggi dan mendekati target penuh.

2. **Pendidikan Kesetaraan**
   Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam **pendidikan kesetaraan** tercatat sebesar **39,33%**. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran bagi masyarakat yang belum menempuh pendidikan formal untuk tetap memperoleh layanan pendidikan melalui jalur nonformal.

Namun, angka ini masih menunjukkan ruang perbaikan untuk memperluas jangkauan layanan kesetaraan, terutama bagi kelompok usia produktif.

3. **Kemampuan Literasi dan Numerasi**
   Hasil **Asesmen Nasional** menunjukkan capaian kemampuan literasi siswa SD sebesar **52,40%**, sedangkan siswa SMP mencapai **59,5%**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki kemampuan literasi dasar, namun perlu penguatan dalam pemahaman bacaan tingkat lanjut. Untuk **kemampuan numerasi**, capaian siswa SD berada pada angka **50,77%**, dan siswa SMP sebesar **57,57%**. Meskipun angka ini cukup positif, hasil tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah matematis di kalangan peserta didik, terutama di jenjang dasar.

4. **Mutu Lembaga dan Pendidik PAUD**
   Proporsi satuan PAUD yang telah memperoleh **akreditasi minimal B** mencapai **67,23%**, menunjukkan kemajuan dalam peningkatan mutu lembaga PAUD di Kabupaten Takalar. Sementara itu, **proporsi pendidik PAUD yang telah berkualifikasi S1/D-IV** tercatat sebesar **69,11%**, menggambarkan peningkatan kompetensi tenaga pendidik sesuai standar nasional. Namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas bagi sekitar 30% pendidik PAUD yang belum mencapai kualifikasi akademik tersebut.

5. **Iklim Sekolah: Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas**
   Hasil evaluasi terhadap iklim satuan pendidikan menunjukkan kondisi yang cukup kondusif.
   a. **Indeks Iklim Keamanan** berada pada angka **73,80% untuk SD** dan **68,88% untuk SMP**, menandakan lingkungan belajar yang relatif aman dan nyaman bagi peserta didik.
   b. **Indeks Iklim Kebhinekaan** mencatat **69,9% untuk SD** dan **69,93% untuk SMP**, menunjukkan bahwa nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman sudah mulai tertanam di sekolah-sekolah.
   c. **Indeks Iklim Inklusivitas** berada pada angka **52,35% di SD** dan **52,96% di SMP**, mengindikasikan bahwa penerapan pendidikan inklusif masih perlu diperkuat, terutama dalam hal penerimaan dan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Secara keseluruhan, capaian indikator SPM Triwulan I Tahun 2025 di Kabupaten Takalar menunjukkan hasil yang **sudah sesuai target** pada sebagian besar indikator utama, terutama dalam aspek **akses pendidikan** di semua jenjang. Namun, **tantangan masih terdapat** pada peningkatan **mutu**

pembelajaran, terutama dalam hal literasi, numerasi, dan penguatan iklim inklusif di satuan pendidikan. Dengan capaian ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan pelayanan dasar pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sesuai amanat Standar Pelayanan Minimal.

2.2. Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

2.2.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan I

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada triwulan 1 dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses pengajuan kontrak ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya;

2.2.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan I

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan ke 1, program/kegiatan yang dilaksanakan tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja :

1. Adanya komitmen pimpinan dan Koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;

2.2.3 Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan uraian di atas terkait faktor penghambat pencapaian kinerja, serta upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pengendalian dan evaluasi internal yang dilakukan secara terus menerus;
2. Perlunya Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan;
3. Peran aktif Kepala Dinas selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Menyediakan informasi kependudukan dalam rangka perencanaan pembangunan dan kepentingan publik;
9. Perlunya melakukan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
11. Adanya Kesesuaian Renstra dan RPJMD dalam pelaksanaan kegiatan;
12. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar yaitu **"**Meningkatnya akses dan partisipasi Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah**",** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 3 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Layanan Pendidikan Kewenangan kabupaten.
2. Sasaran 2: Meningkatnya jumlah objek pemajuan kebudayan yang di kelola sesuai standar
3. Sasaran 3: Meningkatnya Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.1.
Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Tujuan 1 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan (58,37) 2020	65	Meningkatnya akses dan partisipasi Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah	Rata-rata lama sekolah	7.80
Sasaran 1.1 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pendidikan	**Pendidikan**	84.50%		Harapan lama Sekolah	12.52
	- PAUD	86%	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Layanan Pendidikan Kewenangan kabupaten	Skor Numerasi Pendidikan Tingkat SD	50.77
	- SD	106.00 %		Skor Literasi Pendidikan Tingkat SMP	59.50

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
	- SMP	116.00 %		Skor Numerasi Pendidikan Tingkat SMP	57.57
	- Kesetaraan/PKBM	30%		Angka Melanjutkan tingkat SD	100
	Angka Harapan Lama Sekolah	12.62		Angka Melanjutkan tingkat dan SMP	100
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7.56		Angka Partisipasi PAUD	81.49
	Rata Rata Capaian SPM Pendidikan	100%		Persentase kelulusan warga belajar pendidikan non formal	100
	- PAUD	100%	Sasaran.2 Meningkatnya jumlah objek pemajuan kebudayan yang di kelola sesuai standar	Presentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola sesuai standar (NPSK)	14.29
	- SD	100%	Sasaran 3: Meningkatnya Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan	BB (70.29)

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
	- SMP	100%		Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan	85
	- Kesetaraan/PKBM	100%			
	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	92%			
Sasaran 1.2 Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase Guru Bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	45%			
	- PAUD	40%			
	- SD	60.50%			

6

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
	- SMP	75.50%			
	- Kesetaraan/PKBM	2.50%			
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Budaya Daerah	Presentase Benda, Situs, Kesenian Daerah dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	55%			
Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Budaya dan Kesenial Lokal	Presentase Objek Pemajuan Budaya dan Kesenian Lokal yang dilaksanakan/ditingkatkan	60%			
Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CC			
Sasaran 3.1 Meningkatnya Tata	Nilai Sakip Dinas Pendidikan dan	65 (B)			

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Kelola Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kebudayaaan				

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2026. Pemilihan kegiatan dan program tersebut berdasarkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (hasil antara / *intermediate outcome*) adalah sebuah hasil akumulasi dari output sub kegiatan yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, dan merupakan indikator hasil jangka panjang (outcome) dari program. Sedangkan sub kegiatan (*output* / keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu sub kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu sub kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data

capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Adapun Jumlah Program, Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 terdiri dari 11 (sebelas) Program, 26 (dua puluh Enam) kegiatan dan 216 (Dua Ratus Enam Belas) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. **384.988.879.189 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)**. Berikut ini uraian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Tabel *IV.1*

Daftar Sub Kegiaatn Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu
1	Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	107.515.680.855,00
			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	58.038.034.330,00
			1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	750.376.173,00
			1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	450.000.000,00
			1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	450.000.000,00
			1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	350.000.000,00
			1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.246.768.480,00
			1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	125.000.000,00
			1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.000.000,00
			1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	125.000.000,00

			1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	125.000.000,00
			1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	125.000.000,00
			1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	175.000.000,00
			1.01.02.2.01.0015 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	125.000.000,00
			1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	125.000.000,00
			1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	125.000.000,00
			1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	115.000.000,00
			1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	35.000.000,00
			1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	125.000.000,00
			1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	76.000.000,00
			1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32.977.330.637,00
			1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	95.000.000,00
			1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	250.000.000,00
			1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	250.000.000,00
			1.01.02.2.01.0033 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	77.000.000,00
			1.01.02.2.01.0034 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	0
			1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25.000.000,00
			1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	45.000.000,00
			1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	56.000.000,00
			1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	75.000.000,00
			1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	125.000.000,00

			1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	75.000.000,00
			1.01.02.2.01.0044 - Penataan Ruang/Sudut Baca	0
			1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0
			1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.125.000.000,00
			1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.991.222.800,00
			1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	450.000.000,00
			1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	75.000.000,00
			1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	25.000.000,00
			1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11.547.683.440,00
			1.01.02.2.01.0052 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	0
			1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	0
			1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.800.652.800,00
			1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	100.000.000,00
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.089.604.757,00
			Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.089.604.757,00
			1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00
			1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	250.000.000,00
			1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	250.000.000,00
			1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	250.000.000,00
			1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	175.000.000,00
			1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	125.000.000,00
			1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah	350.000.000,00

			1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	250.000.000,00
			1.01.02.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir	150.000.000,00
			1.01.02.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah	150.000.000,00
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00
			1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.811.921.320,00
			1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	175.000.000,00
			1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	175.000.000,00
			1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	175.000.000,00
			1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	175.000.000,00
			1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	175.000.000,00
			1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	150.000.000,00
			1.01.02.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	150.000.000,00
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	125.000.000,00
			1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	75.000.000,00
			1.01.02.2.02.0026 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	75.000.000,00
			1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	150.000.000,00
			1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	125.000.000,00
			1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	75.000.000,00
			1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	65.000.000,00
			1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.000.000,00
			1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	275.000.000,00
			1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000,00

			1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.787.683.437,00
			1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75.000.000,00
			1.01.02.2.02.0046 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	100.000.000,00
			1.01.02.2.02.0047 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	0
			1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25.000.000,00
			1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	125.000.000,00
			1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	75.000.000,00
			1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	75.000.000,00
			1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75.000.000,00
			1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0
			1.01.02.2.02.0056 - Penataan Ruang/Sudut Baca	0
			1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	75.000.000,00
			1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.775.000.000,00
			1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	125.000.000,00
			1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	125.000.000,00
			1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	125.000.000,00
			1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	175.000.000,00
			1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	175.000.000,00
			1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	0
			1.01.02.2.02.0066 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	0

			1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	100.000.000,00
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.763.041.768,00
			1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	450.000.000,00
			1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	150.000.000,00
			1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	75.000.000,00
			1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	85.000.000,00
			1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	150.000.000,00
			1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	15.000.000,00
			1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	85.000.000,00
			1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	40.000.000,00
			1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.665.200.000,00
			1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	35.000.000,00
			1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	100.000.000,00
			1.01.02.2.03.0021 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0
			1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	75.000.000,00
			1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	75.000.000,00
			1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	75.000.000,00
			1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	250.000.000,00
			1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75.000.000,00
			1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.350.000.000,00
			1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca	0
			1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	250.000.000,00
			1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	45.000.000,00

			1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	75.000.000,00
			1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0
			1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	75.000.000,00
			1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	0
			1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0
			1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0
			1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	75.000.000,00
			1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00
			1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	0
			1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	125.000.000,00
			1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	250.000.000,00
			1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	250.000.000,00
			1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	75.000.000,00
			1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0
			1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	250.000.000,00
			1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	250.000.000,00
			1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.292.841.768,00
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.625.000.000,00
			1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	135.000.000,00
			1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	150.000.000,00

			Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000,00
			1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	250.000.000,00
			1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.370.000.000,00
			1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	75.000.000,00
			1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00
			1.01.02.2.04.0023 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0
			1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	45.000.000,00
			1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	45.000.000,00
			1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	55.000.000,00
			1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	55.000.000,00
			1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0
			1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0
			1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca	0
			1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	65.000.000,00
			1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	85.000.000,00
			1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	55.000.000,00
			1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	350.000.000,00
			1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	450.000.000,00
			1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	175.000.000,00

			1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	250.000.000,00
			1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	75.000.000,00
			1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	0,00
			1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0
			1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	0,00
			1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	45.000.000,00
			1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium	250.000.000,00
			1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah	170.000.000,00
			1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00
			1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	150.000.000,00
			1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	0
			1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	0
			1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	125.000.000,00
			1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0
			1.01.02.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	150.000.000,00
			1.01.02.2.04.0058 - Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	0
			1.01.02.2.04.0059 - Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	150.000.000,00
			1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	150.000.000,00
			1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	450.000.000,00

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TAKALAR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	KPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							393,656,180,162.00	356,369,669,572.00	346,967,978,252.16	-46,688,201,909.84							79,608,701,853.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB							392,586,180,162.00	355,757,118,012.00	346,531,707,252.16	-46,054,472,909.84							78,924,201,853.00	

		YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**392,586,180,162.00**	**355,757,118,012.00**	**346,531,707,252.16**	**-46,054,472,909.84**							**78,924,201,853.00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah**				**65 %**	**65 %**	**272,610,602,662.00**	**257,086,317,739.00**	**261,063,084,408.43**	**-270,306,976,147.00**							**2,303,626,515.00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas*				100 %	100 %	8,000,000.00	18,095,000.00	18,095,000.00	10,095,000.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		103,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		Daerah	*i Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu*													dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2,000,000.00	3,572,000.00	3,572,000.00	1,572,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.			55,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	5,206,000.00	5,206,000.00	4,206,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pem			10,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																erintahandan Pelayanan Publik				
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	2,441,800.00	2,441,800.00	1,441,800.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahandan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahandan Pelayanan			7,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	3,641,800.00	3,641,800.00	2,641,800.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			10,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	3,233,400.00	3,233,400.00	2,233,400.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			7,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			7,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			7,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	272,095,329,300.00	256,657,405,739.00	260,634,172,408.43	-11,461,156,891.57			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		94,469,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2745 Orang/bulan	2745 Orang/bulan	272,088,329,300.00	256,649,087,739.00	260,625,854,408.43	-11,462,474,891.57	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJ	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														IAN KER JAD AU YAN G DITE NTU KAN P ENG GUN AAN N YA BIDA NG PEN DIDI KAN DAK NON FISIK -TPG PNS DDA K NON FISIK - TAM SIL GUR U PNS D						
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	1,767,000.00	1,767,000.00	767,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16,900,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00	2,534,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12,369,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000.00	2,017,000.00	2,017,000.00	1,017,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27,700,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7,000,000.00	5,615,000.00	5,615,000.00	-1,385,000.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan	-		224,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perb			5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																aikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			22,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																dan Pelayanan Publik				
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			22,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	2,572,000.00	2,572,000.00	1,572,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000.00	2,043,000.00	2,043,000.00	1,043,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			65,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			66,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			9,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	9,000,000.00	2,322,000.00	2,322,000.00	-6,678,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		148,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	2,322,000.00	2,322,000.00	1,322,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	31,000,000.00	50,990,000.00	45,790,000.00	14,790,000.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan	-		351,844,926.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.			13,754,926.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	4,000,000.00	13,566,000.00	13,566,000.00	9,566,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pem			45,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																erintahandan Pelayanan Publik				
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahandan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahandan Pelayanan			8,090,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			12,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,000,000.00	4,148,600.00	4,148,600.00	148,600.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			25,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				45 Dokumen	45 Dokumen	12,000,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	4,800,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			45,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	5,975,400.00	775,400.00	-224,600.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			12,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	5,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publi			7,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																k				
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			7,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	18,000,000.00	0.00	5,200,000.00	-12,800,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		460,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	1,000,000.00	0.00	5,200,000.00	4,200,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		

			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			175,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Penduk ung Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya yang Disedia kan				25 Unit	25 Unit	5,000, 000.00	0.00	0.00	- 5,000,0 00.00	Kab. Tak alar, Patt allas sang , Kala bbir ang	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD) DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	-	6. Perb aika n Tata kelol a Pem erint ahan dan Pela yana n Publi k 6. Perb aika n Tata kelol a Pem erint ahan dan Pela yana n Publi k			55,00 0,000. 00	DINA S PEN DIDI KAN DAN KEB UDA YAA N
	1.01.0 1.2.08	Penyed iaan Jasa Penunj ang Urusan Pemeri ntahan Daerah	-				-	-	424,27 3,362. 00	338,23 0,000. 00	338,23 0,000. 00	- 86,043, 362.00			-	6. Perb aika n Tata kelol a Pem erint ahan dan	-		614,3 12,58 9.00	DINA S PEN DIDI KAN DAN KEB UDA YAA N

																Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perb			5,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																aikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91,073,362.00	6,030,000.00	6,030,000.00	-85,043,362.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			126,612,589.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																dan Pelayanan Publik				
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			85,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	331,200,000.00	331,200,000.00	331,200,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan			397,200,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Publik				
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	18,000,000.00	13,660,000.00	13,660,000.00	-4,340,000.00			-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		307,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	1,000,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,200,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	1,000,000.00	8,760,000.00	8,760,000.00	7,760,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	4,000,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-1,300,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Sarana dan Prasarana Penduk ung Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya yang Dipeliha ra/Direh abilitasi				5 Unit	5 Unit	6,000, 000.00	0.00	0.00	- 6,000,0 00.00	Kab. Tak alar, Patt allas sang , Kala bbir ang	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD) DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	-	6. Perb aika n Tata kelol a Pem erint ahan dan Pela yana n Publi k 6. Perb aika n Tata kelol a Pem erint ahan dan Pela yana n Publi k			85,00 0,000. 00	DINA S PEN DIDI KAN DAN KEB UDA YAA N
2 .	**1.01.0 2**	**PROG RAM PENGE LOLAA N PENDI DIKAN**	**Jumlah Progra m Pengel olaan Pendidi kan yang dilaksa nakan Persent**				**100 30 % %**	**100 30 % %**	**119,16 2,053, 700.00**	**98,670 ,800,2 73.00**	**85,468 ,622,8 43.73**	**- 43,186, 978,362 .00**							**75,97 5,075, 338.0 0**	

			ase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum																	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 % 1 Unit	100 % 1 Unit	52,242,738,464.00	51,835,676,890.00	45,493,836,422.00	-6,748,902,042.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		40,290,191,637.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah				10 Ruang	1 Ruang	464,786,400.00	0.00	199,611,000.00	-265,175,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pem			450,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA

			Dibangun										Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN		bangunan Manusia				YAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	389,131,200.00	0.00	0.00	-389,131,200.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			450,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		

			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	308,039,200.00	0.00	0.00	-308,039,200.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			350,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	16 Unit	756,644,000.00	1,440,000,000.00	2,151,669,240.00	1,395,025,240.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITE	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			733,861,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													a	NTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD						
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	159,015,000.00	0.00	0.00	-159,015,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD						
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	1 Ruang	267,959,300.00	0.00	182,353,000.00	-85,606,300.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			225,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	132,215,680.00	0.00	0.00	-132,215,680.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	132,215,680.00	0.00	0.00	-132,215,680.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																	

			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang /Berat				10 Unit	10 Unit	83,759,800.00	0.00	0.00	-83,759,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				4 Paket	2 Paket	168,847,000.00	3,766,000,000.00	3,766,000,000.00	3,597,153,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			175,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																	

			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	121,878,000.00	0.00	0.00	-121,878,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	56,700,000.00	425,812,000.00	323,602,000.00	266,902,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDI	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														KAN DAK FISIK - BIDA NG P ENDI DIKA N-RE GUL ER-SD						
	1.01.0 2.2.01 .0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasara na dan Utilitas Sekolah yang Dilaksa nakan Pemelih araan				10 Unit	10 Unit	115,28 2,800. 00	0.00	0.00	- 115,282 ,800.00	Kab. Tak alar, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	DAN A ALO KASI UMU M (DAU) DAU YAN G DITE NTU KAN P ENG GUN AAN N YA BIDA NG PEN DIDI KAN	-	1. Pem bang unan Man usia 1. Pem bang unan Man usia			125,0 00,00 0.00	DINA S PEN DIDI KAN DAN KEB UDA YAA N
	1.01.0 2.2.01 .0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				75 Peserta Didik	75 Peserta Didik	110,553,800.00	61,326,900.00	61,100,000.00	-49,453,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			115,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				125 Orang	125 Orang	23,244,000.00	0.00	0.00	-23,244,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		

			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	500 Orang	725,490,000.00	240,384,900.00	822,470,000.00	96,980,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			750,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manaje				236 Satuan Pendidikan	236 Satuan Pendidikan	755,110,000.00	1,351,423,410.00	982,617,560.00	227,507,560.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Des	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDA	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			476,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			men sekolah										a	NG PEN DIDI KAN						
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				240 Satuan Pendidikan	240 Satuan Pendidikan	28,756,416,563.00	30,051,100,000.00	30,190,586,762.00	1,434,170,199.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK - DANA BOSP-BOS REGULER	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			29,977,330,637.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana				236 Orang	236 Orang	43,654,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	196,346,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Des	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN N YA BIDA	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			95,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			BOS Sekolah Dasar										a	NG PEN DIDI KAN					
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																	
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	331,907,600.00	0.00	0.00	-331,907,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																	
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	231,827,440.00	0.00	0.00	-231,827,440.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													DIDIKAN						
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah																	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				4 Unit	4 Unit	77,000,000.00	0.00	0.00	-77,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	77,250,000.00	0.00	0.00	-77,250,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			725,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													DIDIKAN						
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	1 Ruang	993,473,120.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-793,473,120.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Pakkabba	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			750,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	517,003,650.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-467,003,650.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			450,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														P ENG GUN AAN N YA BIDA NG PEN DIDI KAN						
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				236 Satuan Pendidikan	236 Satuan Pendidikan	43,698,000.00	0.00	0.00	-43,698,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			55,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat				30 Ruang	30 Ruang	11,547,683,440.00	200,000,000.00	3,514,197,180.00	-8,033,486,260.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan			2,128,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													Kel/ Desa	G DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN		Manusia				
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				31546 Peserta Didik	31546 Peserta Didik	4,800,652,800.00	13,809,629,680.00	2,809,629,680.00	-1,991,023,120.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			750,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta				10 Paket	10 Paket	51,299,991.00	0.00	0.00	-51,299,991.00	Kab. Takalar, Semua Kec	DAU YANG DITENTUKAN	-	1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN

			Didik yang Tersedia										amatan, Semua Kel/ Desa	PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN		1. Pembangunan Manusia				KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	36,040,055,416.00	28,114,653,836.00	24,199,940,574.73	-11,840,114,841.27			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		23,737,683,437.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	273,361,600.00	0.00	0.00	-273,361,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK	-	1. Pembangunan Manusia			250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP						
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	152,210,400.00	0.00	0.00	-152,210,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		

	.0005																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	377,394,400.00	0.00	0.00	-377,394,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	284,170,800.00	0.00	0.00	-284,170,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan			175,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													Kel/ Desa	N YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		Manusia				
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	271,111,600.00	0.00	0.00	-271,111,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDI	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														DIKAN-REGULER-SMP						
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	159,015,000.00	0.00	0.00	-159,015,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			350,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		

	.0009																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah , Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	203,547,200.00	0.00	0.00	-203,547,200.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																	

			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	140,501,200.00	0.00	79,198,342.00	-61,302,858.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah																		

			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	152,210,400.00	0.00	0.00	-152,210,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	5 Unit	152,210,400.00	520,000,000.00	520,000,000.00	367,789,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITE	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													a	NTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP						
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				30 Ruang	8 Ruang	5,814,615,940.00	0.00	951,061,800.00	-4,863,554,140.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENG	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			950,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														GUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN						
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	1 Ruang	133,915,680.00	0.00	59,981,800.00	-73,933,880.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			175,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		

			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat				10 Ruang	10 Ruang	132,215,680.00	0.00	40,237,600.00	-91,978,080.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			175,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat				10 Ruang	1 Ruang	132,215,680.00	150,000,000.00	223,049,000.00	90,833,320.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			175,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																	

			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				10 Ruang	10 Ruang	132,215,680.00	0.00	0.00	-132,215,680.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			175,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	132,215,680.00	0.00	0.00	-132,215,680.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			175,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir																		

			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat				10 Unit	10 Unit	140,141,660.00	0.00	0.00	-140,141,660.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang /Berat				10 Unit	10 Unit	170,845,580.00	0.00	0.00	-170,845,580.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	

			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat				10 Unit	4 Unit	173,645,580.00	275,000,000.00	803,003,009.73	629,357,429.73	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	2 Paket	49,280,000.00	3,560,000,000.00	3,560,000,000.00	3,510,720,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDI	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			75,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													KAN						
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	161,775,000.00	0.00	0.00	-161,775,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			75,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10 Paket	2 Paket	3,001,200,000.00	0.00	292,189,000.00	-2,709,011,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													P ENG GUN AAN N YA BIDA NG PEN DIDI KAN							
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	137,439,360.00	0.00	0.00	-137,439,360.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENG GUN AAN N YA BIDA NG PEN DIDI KAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima				3 Peserta Didik	3 Peserta Didik	302,362,400.00	8,495,806,736.00	2,495,806,736.00	2,193,444,336.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	DAU YANG DITENTUKAN P ENG GUN AAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan			475,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			Biaya Personil Peserta Didik										Kel/ Desa	N YA BIDANG PENDIDIKAN		Manusia			
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				75 Peserta Didik	75 Peserta Didik	71,944,000.00	0.00	193,800,000.00	121,856,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			65,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Meneng				125 Orang	125 Orang	15,252,000.00	0.00	0.00	-15,252,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN N YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			ah Pertama											DIDIKAN						
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				550 Orang	550 Orang	921,680,000.00	419,443,300.00	155,060,000.00	-766,620,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			475,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		

			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				45 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	1,164,860,000.00	500,203,800.00	486,681,250.00	-678,178,750.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			275,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				45 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	15,787,683,437.00	14,194,200,000.00	14,339,872,037.00	-1,447,811,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK - DANA BOSP-BOS REG	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,787,683,437.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														ULER						
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				90 Orang	90 Orang	22,125,000.00	0.00	0.00	-22,125,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			75,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	5 Unit	106,640,000.00	0.00	0.00	-106,640,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENG	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pem			100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA

													Semua Kel/ Desa	GUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN		bangunan Manusia			YAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				4560 Satuan Pendidikan	4560 Satuan Pendidikan	49,785,000.00	0.00	0.00	-49,785,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	377,394,400.00	0.00	0.00	-377,394,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Des	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDA	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			350,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													a	NG PEN DIDI KAN DAK FISIK - BIDA NG P ENDI DIKA N-RE GUL ER-SMP						
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				500 Buku	500 Buku	20,600,000.00	0.00	0.00	-20,600,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		

			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	4,235,760,000.00	0.00	0.00	-4,235,760,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			475,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat				10 Unit	10 Unit	132,215,680.00	0.00	0.00	-132,215,680.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			175,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	211,799,004.00	0.00	0.00	-211,799,004.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	142,499,975.00	0.00	0.00	-142,499,975.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDA	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													a	NG PEN DIDI KAN					
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	19,713,131,600.00	12,958,258,147.00	10,104,525,847.00	-9,608,605,753.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		8,536,100,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				10 Unit	5 Unit	1,297,104,000.00	366,423,600.00	366,423,600.00	-930,680,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG P	-	1. Pembangunan Manusia			450,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													ENDIDIKAN-REGULER-PAUD						
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	511,106,000.00	0.00	0.00	-511,106,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			75,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD																	
			Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	179,800,000.00	0.00	0.00	-179,800,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan			75,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													Kel/ Desa	N YA BIDANG PENDIDIKAN		Manusia			
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																	
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				10 Paket	15 Paket	888,810,000.00	2,808,488,000.00	2,808,488,000.00	1,919,678,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			85,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				12100 Peserta Didik	12100 Peserta Didik	1,025,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	-1,025,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				150 Orang	150 Orang	14,335,000.00	0.00	0.00	-14,335,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,				215 Orang	215 Orang	736,960,000.00	145,493,300.00	100,000,000.00	-636,960,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDA	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			385,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi											NG PENDIDIKAN						
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				215 Satuan Pendidikan	215 Satuan Pendidikan	558,750,000.00	320,743,200.00	224,255,000.00	-334,495,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			140,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				215 Satuan Pendidikan	215 Satuan Pendidikan	4,563,600,000.00	4,633,200,000.00	4,633,200,000.00	69,600,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - DANA BOS P-BOS KINERJA DAK NON FISIK - DANA BOS P-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK - DANA BOS P-BOP PAUD KINERJA	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			5,665,200,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				250 Orang	250 Orang	22,500,000.00	259,559,680.00	222,313,680.00	199,813,680.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah																	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	362,550,000.00	0.00	0.00	-362,550,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	

			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	6 Ruang	2,269,932,000.00	1,317,040,567.00	1,547,967,567.00	-721,964,433.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			350,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	44,520,000.00	0.00	0.00	-44,520,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Man			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													Desa	BIDANG PENDIDIKAN		usia			
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	2,248,313,600.00	0.00	0.00	-2,248,313,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat				10 Unit	10 Unit	2,810,392,000.00	0.00	0.00	-2,810,392,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			350,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														DIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD						
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	67,200,000.00	0.00	0.00	-67,200,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengik				12100Satuan Pendidik	12100Satuan Pendidik	150,000,000.00	57,309,800.00	34,619,000.00	-115,381,000.00	Kab. Takalar, Semua Kec	DAU YANG DITENTUKAN	-	1. Pembangunan Manusia			45,900,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN

			uti Proses Belajar				an	an					amatan, Semua Kel/ Desa	PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN		1. Pembangunan Manusia				KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat				10 Ruang	2 Ruang	1,962,259,000.00	50,000,000.00	167,259,000.00	-1,795,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			450,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Presentase Pemenuhan Pengelolaan*				100 %	100 %	11,166,128,220.00	5,762,211,400.00	5,670,320,000.00	-5,495,808,220.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		3,411,100,264.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				550 Peserta Didik	550 Peserta Didik	117,566,400.00	60,834,000.00	60,730,000.00	-56,836,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kes				150 Orang	150 Orang	7,815,000.00	0.00	0.00	-7,815,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			etaraan											DIDIKAN					
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	580,330,000.00	0.00	0.00	-580,330,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	

			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				42 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	223,574,000.00	475,777,400.00	383,990,000.00	160,416,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			48,900,264.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				42 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	4,334,400,000.00	5,225,600,000.00	5,225,600,000.00	891,200,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK NON FISIK - DANA BOS P- BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK - DANA BOS	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			2,370,200,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														P-BOP KESETARAAN KINERJA						
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				84 Orang	84 Orang	31,053,000.00	0.00	0.00	-31,053,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksa				2 Unit	2 Unit	35,540,000.00	0.00	0.00	-35,540,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Sem	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembang			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA

			nakan Pemelih araan										ua Kel/ Des a	AAN N YA BIDA NG PEN DIDI KAN		unan Man usia				N
	1.01.0 2.2.04 .0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertam bah				2 Rua ng	2 Rua ng	1,815, 945,60 0.00	0.00	0.00	- 1,815,9 45,600. 00	Kab. Tak alar, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	DAU YAN G DITE NTU KAN P ENG GUN AAN N YA BIDA NG PEN DIDI KAN	-	1. Pem bang unan Man usia 1. Pem bang unan Man usia			50,00 0,000. 00	DINA S PEN DIDI KAN DAN KEB UDA YAA N
	1.01.0 2.2.04 .0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perleng kapan Sekolah yang Tersedi a				5 Pak et	5 Pak et	199,02 4,000. 00	0.00	0.00	- 199,024 ,000.00	Kab. Tak alar, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	DAU YAN G DITE NTU KAN P ENG GUN AAN N YA BIDA NG	-	1. Pem bang unan Man usia 1. Pem bang unan Man usia			50,00 0,000. 00	DINA S PEN DIDI KAN DAN KEB UDA YAA N

													PENDIDIKAN						
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	737,727,900.00	0.00	0.00	-737,727,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium																	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	119,441,660.00	0.00	0.00	-119,441,660.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													DIDIKAN						
	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	17,000,000.00	0.00	0.00	-17,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				550 Peserta Didik	550 Peserta Didik	24,609,540.00	0.00	0.00	-24,609,540.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			22,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													a	DIDI KAN					
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium																	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	907,972,800.00	0.00	0.00	-907,972,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	64,449,000.00	0.00	0.00	-64,449,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			75,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													DIDIKAN						
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	632,338,200.00	0.00	0.00	-632,338,200.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				10 unit	10 unit	691,788,800.00	0.00	0.00	-691,788,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													DIDIKAN						
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	35,370,000.00	0.00	0.00	-35,370,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			45,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	590,182,320.00	0.00	0.00	-590,182,320.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														DIDIKAN						
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**				**-**	**-**	**323,578,900.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,078,900.00**							**321,500,000.00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	206,128,900.00	0.00	0.00	-206,128,900.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		193,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				100 Dokumen	100 Dokumen	67,385,000.00	0.00	0.00	-67,385,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			52,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													DIDIKAN						
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				1 Buku	1 Buku	34,968,500.00	0.00	0.00	-34,968,500.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompet				100 Orang	100 Orang	67,556,600.00	0.00	0.00	-67,556,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			54,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			ensinya											DIDIKAN						
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				100 Dokumen	100 Dokumen	36,218,800.00	0.00	0.00	-36,218,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			52,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-				-	-	117,450,000.00	0.00	0.00	-117,450,000.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		128,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				120 Dokumen	120 Dokumen	40,848,000.00	0.00	0.00	-40,848,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			41,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				1 Buku	1 Buku	41,200,000.00	0.00	0.00	-41,200,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			42,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				120 Dokumen	120 Dokumen	35,402,000.00	0.00	0.00	-35,402,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			45,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**105,813,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-55,813,000.00**							**50,000,000.00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan	-				-	-	105,813,000.00	0.00	0.00	-105,813,000.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pem	-		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA

		Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														bangunan Manusia				YAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonfor				1 Dokumen	1 Dokumen	60,252,000.00	0.00	0.00	-60,252,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			mal/Kesetaraan																	
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	45,561,000.00	0.00	0.00	-45,561,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZI**	**-**				**-**	**-**	**40,972,000.00**	**0.00**	**0.00**	**26,528,000.00**							**67,500,000.00**	

		NAN PENDI DIKAN																		
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-				-	-	14,140,000.00	0.00	0.00	-14,140,000.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		22,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	6,901,000.00	0.00	0.00	-6,901,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		

			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	7,239,000.00	0.00	0.00	-7,239,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			7,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-				-	-	26,832,000.00	0.00	0.00	-26,832,000.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		45,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		

			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	11,694,000.00	0.00	0.00	-11,694,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselen				1 Dokumen	1 Dokumen	7,569,000.00	0.00	0.00	-7,569,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			ggaraka n oleh Masyar akat																	
	1.01.0 5.2.02 .0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokum en Hasil Pembin aan PAUD dan Pendidi kan Nonfor mal yang Diselen ggaraka n oleh Masyar akat				1 Dok ume n	1 Dok ume n	7,569, 000.00	0.00	0.00	- 7,569,0 00.00	Kab. Tak alar, Sem ua Kec amat an, Sem ua Kel/ Des a	DAU YAN G DITE NTU KAN P ENG GUN AAN N YA BIDA NG PEN DIDI KAN	-	1. Pem bang unan Man usia 1. Pem bang unan Man usia			15,00 0,000. 00	DINA S PEN DIDI KAN DAN KEB UDA YAA N
6 .	**1.01.0 6**	**PROG RAM PENGE MBAN GAN BAHA SA DAN SASTR A**	**-**				**-**	**-**	**343,15 9,900. 00**	**0.00**	**0.00**	**- 136,659 ,900.00**							**206,5 00,00 0.00**	

	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	343,159,900.00	0.00	0.00	-343,159,900.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		206,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota																		
			Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun				1 Kamus	1 Kamus	425,900.00	0.00	0.00	-425,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			45,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi				1 Bahasa	1 Bahasa	681,000.00	0.00	0.00	-681,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota																		
			Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Publikasi	1 Publikasi	75,876,000.00	0.00	0.00	-75,876,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan				1 Orang	1 Orang	27,975,000.00	0.00	0.00	-27,975,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota																	
			Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi				1 Buku	1 Buku	75,561,000.00	0.00	0.00	-75,561,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			38,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	86,189,000.00	0.00	0.00	-86,189,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			22,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	76,452,000.00	0.00	0.00	-76,452,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			36,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG**							**1,070,000,000.00**	**612,551,560.00**	**436,271,000.00**	**-633,729,000.00**							**684,500,000.00**	

		TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1,070,000,000.00**	**612,551,560.00**	**436,271,000.00**	**-633,729,000.00**							**684,500,000.00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**460,000,000.00**	**115,106,000.00**	**0.00**	**-133,500,000.00**							**326,500,000.00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200,000,000.00	0.00	0.00	-200,000,000.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		79,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				29 Objek	29 Objek	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			44,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				45 Orang	45 Orang	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150,000,000.00	115,106,000.00	0.00	-150,000,000.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		122,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				13 Objek	13 Objek	50,000,000.00	115,106,000.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia			45,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		

			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			39,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				25 Sertifikat	25 Sertifikat	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			38,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengantunya	-				-	-	110,000,000.00	0.00	0.00	-110,000,000.00			-	1. Pembangunan Manusia 1.	-		125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEB

		dalam Daerah Kabupaten/Kota														Pembangunan Manusia				UDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				13 Objek	13 Objek	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			41,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				55 Orang	55 Orang	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			42,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													DIDIKAN						
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	1 Unit	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			42,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**90,000,000.00**	**142,900,160.00**	**86,050,000.00**	**-10,000,000.00**							**80,000,000.00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	-				-	-	90,000,000.00	142,900,160.00	86,050,000.00	-3,950,000.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan	-		80,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		Daerah Kabupaten/Kota														Manusia				
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				45 Orang	45 Orang	30,000,000.00	83,322,860.00	29,250,000.00	-750,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			40,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang				25 Sertifikat	25 Sertifikat	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan			25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			Mengikuti Proses Standarisasi										Kel/ Desa	N YA BIDANG PENDIDIKAN		Manusia			
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Lembaga	9 Lembaga	30,000,000.00	59,577,300.00	56,800,000.00	26,800,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**				**-**	**-**	**90,000,000.00**	**115,667,300.00**	**114,200,000.00**	**-20,000,000.00**							**70,000,000.00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	90,000,000.00	115,667,300.00	114,200,000.00	24,200,000.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Man	-		70,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

															usia				
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				45 Orang	45 Orang	30,000,000.00	115,667,300.00	114,200,000.00	84,200,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	1 Unit	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDI	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			22,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														KAN						
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			23,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**210,000,000.00**	**238,878,100.00**	**236,021,000.00**	**-78,500,000.00**							**131,500,000.00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringk	-				-	-	60,000,000.00	55,800,700.00	55,181,000.00	-4,819,000.00			-	1. Pembangunan Man	-		30,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

		at Kabupaten/Kota													usia 1. Pembangunan Manusia				DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																	
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				13 Objek	13 Objek	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				0 Objek	0 Objek	30,000,000.00	55,800,700.00	55,181,000.00	25,181,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														PENDIDIKAN						
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	90,000,000.00	183,077,400.00	180,840,000.00	90,840,000.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		86,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				13 Objek	13 Objek	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia			26,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		

			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				13 Objek	13 Objek	30,000,000.00	183,077,400.00	180,840,000.00	150,840,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			28,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				13 Objek	13 Objek	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			32,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar	-				-	-	60,000,000.00	0.00	0.00	-60,000,000.00			-	1. Pembangunan Manusia 1.	-		15,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEB

		Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														Pembangunan Manusia				UDAYAAN
	2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				13 Objek	13 Objek	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			5,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Sem	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembang			10,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA

			ke Luar Daerah Provinsi										ua Kel/ Desa	AAN N YA BIDA NG PEN DIDI KAN		unan Man usia				N
5.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**				**-**	**-**	**220,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-143,500,000.00**							**76,500,000.00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-				-	-	220,000,000.00	0.00	0.00	-220,000,000.00			-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia	-		76,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanf				1 Unit	1 Unit	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Des	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDA	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			17,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			ataan Koleksi Secara Terpadu									a	NG PENDIDIKAN						
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				45 Orang	45 Orang	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																	
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	1 Unit	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			17,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													DIDIKAN						
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PEN	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			12,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													DIDI KAN						
	J U M L A H								**393,656,180,162.00**	**356,369,669,572.00**	**346,967,978,252.16**	**-20,817,255,718.00**						**79,608,701,853.00**	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksnakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pattallassang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Kecamatan

Pattallassang Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Pattallassang Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

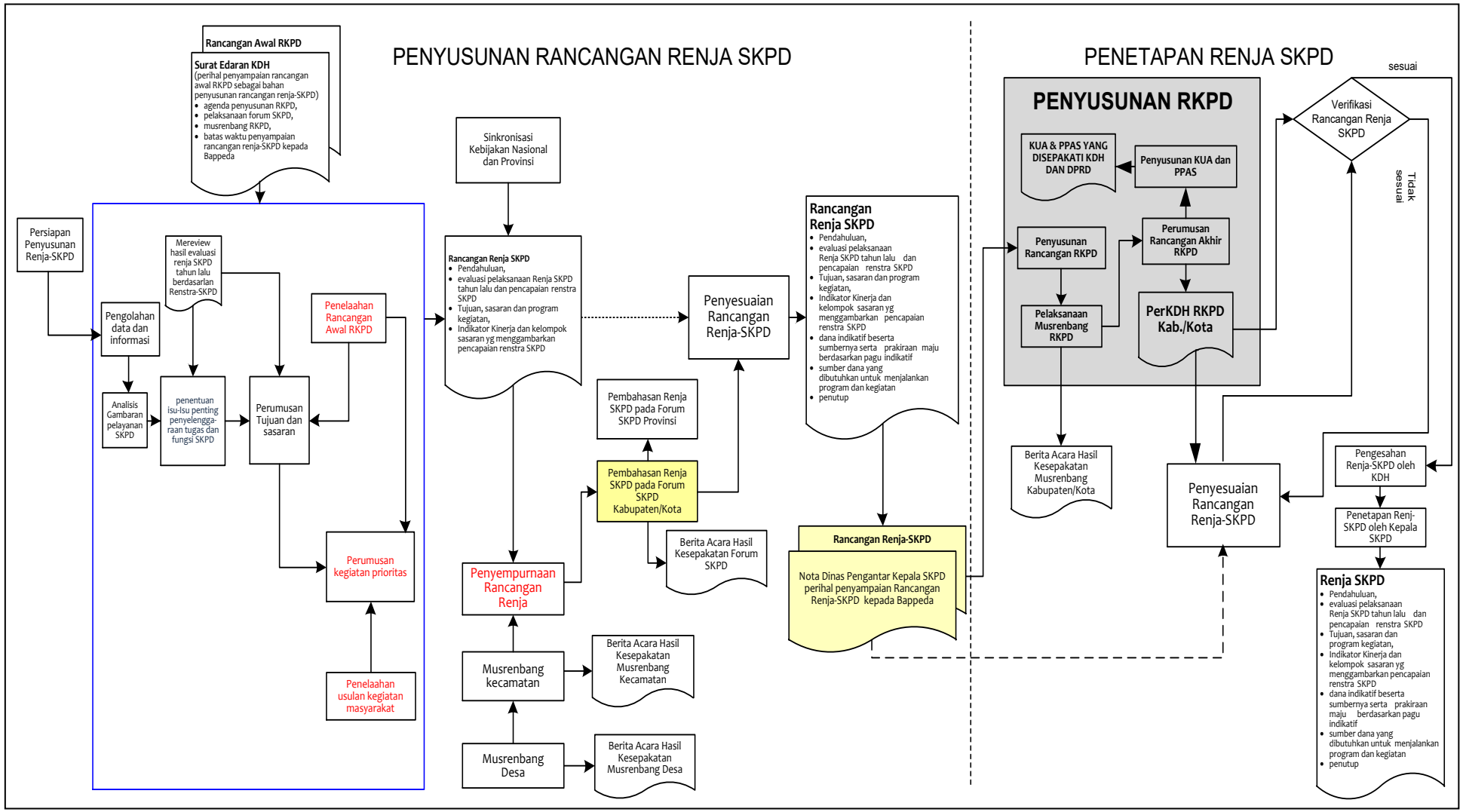
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)
agenda penyusunan RKPD,
pelaksanaan forum SKPD,
musrenbang RKPD,
batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-Isu penting penyelengga-raan tugas dan fungsi SKPD
Perumusan Tujuan dan sasaran
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
sesuai
Tidak sesuai
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
Penetapan Renj-SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang sesuai dengan Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan perundangan lainnya yang mengatur Standar Operasional Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang diacu dalam perencanaan dan penganggaran di Kecamatan Pattallassang sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan,Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Pattallassang adalah sebagai berikut

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra kantor Kecamatan Pattallassang ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi Perubahan APBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi kantor Kecamatan Pattallassang

Tujuan penyusunan Perubahan Renja kantor Kecamatan Pattallassang adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan kantor Kecamatan Pattallassang

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematik Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I Tahun 2025, memuat tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai

dengan Triwulan I (Tahun 2025) sesuai dengan renstra dan tupoksi OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Pengkat Daerah, memuat tentang tujuan, sasaran program dan kegiatan berdasarkan renstra dan tupoksi Kecamatan Pattallassang untuk Tahun 2025.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang, memuat tentang Rencana Program Kegiatan Perubahan Renja dan pendanaan OPD khusus untuk Tahun 2025.

BAB IV Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PATTALLASSANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pattallassang Sampai dengan Triwulan I

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Kecamatan Pattallassang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pattallassang sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Periode Pelaksanaan 2025.

TABEL II-I

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA
KABUPATEN TAKALAR
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	**01**				**KECAMATAN**				**9,796,225,393**		**1,584,644,760**		**16.18%**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**8,070,347,831**	**17.50%**	**1,576,394,760**	**17.50%**	**19.53%**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah**	**Persen**	**100%**	**9,886,000**	**57.14%**	**5,626,000**	**57.14%**	**56.91%**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,056,000	1	1,528,000	50.00%	50.00%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1,366,000	1	1,366,000	100.00%	100.00%

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1,366,000	-	-	0.00%	0.00%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1,366,000	1	1,366,000	100.00%	100.00%
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1,366,000	-	-	0.00%	0.00%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1,366,000	1	1,366,000	100.00%	100.00%
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**	**Persen**	**100%**	**7,246,140,831**	**11.66%**	**1,440,853,660**	**11.66%**	**19.88%**

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji	Orang	1,236	5,466,497,591	288	1,437,353,660	23.30%	26.29%
						Jumlah Pegawai yang Menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Orang	1,236	1,763,457,240	-	-	0.00%	0.00%
						Jumlah Pegawai yang Menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya	Orang	2	10,320,000	-	-	0%	0%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,500,000	1	3,500,000	100%	100%
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	2,366,000	-	-	0%	0%

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah yang baik**	**Persen**	**100%**	**500,000**	**0.00%**	**-**	**0%**	**0%**
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	500,000	-	-	0%	0%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Adminstrasi Umum yang Baik**	**Persen**	**100%**	**211,123,800**	**24.98%**	**40,060,000**	**24.98%**	**18.97%**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	225	71,832,500	68	21,706,000	30.22%	30.22%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang di sediakan	Jenis	-	-	-	-	0.00%	0.00%
						Jumlah penggandaan yang di sediakan	Eksemplar	44,800	13,096,300	11,319	3,309,000	25.27%	25.27%
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasiltas Kegiatan Rapat/ Kunjungan tamu	Kali	1,855	81,565,000	342	15,045,000	18.44%	18.45%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	75	44,630,000	-	-	0.00%	0.00%

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100%**	**52,416,000**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Unit	24	13,498,000	-	-	0.00%	0.00%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	8	38,918,000	-	-	0.00%	0.00%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**	**Persen**	**100%**	**518,178,000**	**7.69%**	**85,855,100**	**12.50%**	**16.57%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayar	Rekening	-	-	-	-	0.00%	0.00%
						Jumlah rekening PDAM yang di bayar	Rekening	72	8,778,000	4	555,100	5.56%	6.32%
						Jumlah rekening Wifi Internet yang di bayar	Rekening	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	120	509,400,000	20	85,300,000	16.67%	16.75%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah**	**Persen**	**100%**	**32,103,200**	**21.05%**	**4,000,000**	**21.05%**	**12.46%**

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	48	15,003,200	12	4,000,000	25.00%	26.66%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	17,100,000	-	-	0.00%	0.00%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan II-13ublic oleh Pemerintah**	**Persen**	**100%**	**4,125,000**	**100.00%**	**4,125,000**	**100.00%**	**100.00%**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan pencapaian standart pelayanan minimal (SPM) di Kecamatan**	**Persen**	**100%**	**4,125,000**	**100.00%**	**4,125,000**	**100.00%**	**100.00%**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Peserta Musrembang di Kantor Kecamatan, Jumlah Usulan Prioritas Kelurahan	Orang	90	4,125,000	90	4,125,000	100%	100%

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat desa/ Kelurahan yang di berdayakan**	**Persen**	**100%**	**1,721,752,562**	**0.00%**	**4,125,000**	**0.00%**	**0.00%**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**Persen**	**100%**	**1,642,882,562**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Orang	405	18,810,000	-	-	0%	0%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	9	734,099,850	-	-	0%	0%
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelompok	18	889,972,712	-	-	0%	0%
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang**	**Persen**	**100%**	**78,870,000**	**5.19%**	**4,125,000**	**5.19%**	**5.23%**

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Frekwensi pertemuan dan pelaksanaan kegiatan TP PKK kecamatan dan Kelurahan	Kali	945	78,870,000	49	4,125,000	5.19%	5.23%

Sumber : Data Monev TW I Tahun 2025;

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Kecamatan Pattallassang 2025 yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kecamatan Pattallassang	3	10	25	3	10	27
TOTAL		**3**	**10**	**25**	**3**	**10**	**27**

Sumber : Monev TW I Tahun 2025;

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 3, jumlah kegiatan 10, dan jumlah sub kegiatan 25, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 3, jumlah indikator kegiatan sebanyak 10, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 27.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan

dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Kabupaten Takalar Tahun 2025
Hingga Triwulan I

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
1	Kecamatan Pattallassang	9.796.225.393	1.584.644.760	40.03%	16.18%
TOTAL		**9.796.225.393**	**1.584.644.760**	**40.03%**	**16.18%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Pattallassang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp. 1.584.644.760,-. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 16,18 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 40,03 persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Pattallassang 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Pattallassang. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen

didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Kecamatan Pattallassang dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Pattallassang sebanyak 3 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 1 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program (realisasi >10-20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 1 program (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Kecamatan Pattallassang dapat dijelaskan bahwa terdapat 10 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 4 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 4 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 2 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Kecamatan Pattallassang pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 25 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 14 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 2 sub kegiatan, dan 9 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 – 10%	>10 – 20%	> 20%		0 – 10%	>10 – 20%	> 20%		0 – 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kecamatan Pattallassang	3	1	1	1	10	4	4	2	25	14	2	9
TOTAL		**3**	**1**	**1**	**1**	**10**	**4**	**4**	**2**	**25**	**14**	**2**	**9**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Pattallassang

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Pattallassang 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Pattallassang. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Kantor Kecamatan Pattallassang dapat dijelaskan bahwa dari 3 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 10 persen terdapat 1 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 10-20 persen) terdapat 1 program, selebihnya sebanyak 1 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 20 persen pada triwulan I Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 10 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I terdapat 4 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 10 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 2 kegiatan, selebihnya terdapat 4 kegiatan yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 25 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 14 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 2 kegiatan, selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 9 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I
Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 – 10 %	>10 – 20 %	> 20 %		0 – 10 %	>10 – 20 %	> 20 %		0 – 10 %	>10 – 20 %	> 20 %
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kecamatan Pattallassang	3	1	1	1	10	4	2	4	25	14	2	9
TOTAL		**3**	**1**	**1**	**1**	**10**	**4**	**2**	**4**	**25**	**14**	**2m**	**9**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Pattallassang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pattallassang

Kantor Kecamatan Pattallassang mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliput pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan di Kelurahan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain pengantar KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pattallassang tahun 2025 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan

Pattallassang, harus dilakukan survey IKM. Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pattallassang. Kinerja pelayanan didukung oleh sistem yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Pattallassang yang mengacu pada RPJMD Kabupaten dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada kantor Kecamatan Pattallassang dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-6

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pattallassang

Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan di Kecamatan	70%	88.80%	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar	80%	85%	90%	Belum dapat dihitung	85%	90%	
2	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	90%	22.63%	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu	80%	85%	90%	100%	85%	90%	
3	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SPM)	100%	100%	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	85%	90%	Belum dapat dihitung	85%	90%	
4	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (Non Standar Pelayanan Minimal)	100%	100%	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Pattallassang	B (68.50)	B (69.50)	B (70)	Belum di lakukan evaluasi penilaian	B (69.50)	B (70)	
5	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	75%	89.38%	Tingkat Literasi Digital ASN Kantor Kecamatan Pattallassang	80%	85%	90%	83.33%	85%	90%	

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6	Angka Kriminalitas	25	16								
7	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	77.78%	100%								
8	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Belum di lakukan evaluasi penilaian								
9	Nilai SAKIP pada kantor Kecamatan Pattallassang	B	B (67,64)								

Berdasarkan tabel II.6 diatas dapat dilihat Capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, adapun penjelasan capaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Indikator Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan di Kecamatan pada tahun 2024 sebesar 88.80%, sumber data IKM berasal dari Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Takalar.
2. Indikator Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban pada tahun 2024 sebesar 22.63% dari perhitungan data K3 Tahun 2024 sebesar 24 Kasus dan data K3 Tahun 2023 Sebesar 33 Kasus. Dari data tersebut dapat dilihat terjadinya penurunan kasus sebesar 22.63%.
3. Indikator Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (Non Standar Pelayanan Minimal) pada tahun 2024 sebesar 100% dikarenakan surat keluar atau surat pengantar sebanyak 60 dokumen semuanya terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Indikator Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik pada tahun 2024 sebesar 90%, dikarenakan dari total sarana dan prasarana sebanyak 73 unit ada 7 unit kantor dengan kondisi rusak.
5. Indikator Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk pada tahun 2024 sebanyak 16 kasus, dikarenakan jumlah kasus pertahun sebanyak 61 kasus dengan jumlah penduduk sebanyak 37.259 Jiwa.
6. Indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat pada tahun 2024 sebanyak 100% dikarenakan dari 27 Lembaga semua Lembaga masih aktif.
7. Indikator Nilai SAKIP pada kantor Kecamatan Pattallassang pada tahun 2024 mendapatkan Predikat B (67,64). Nilai tersebut berdasarkan nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar.

Berdasarkan tabel II.6 diatas dapat dilihat Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 terdapat perbedaan dengan Indikator Tahun 2024 dikarenakan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 mengacu pada Renstra 2025-2029, yang sebelumnya pada Tahun 2024 terdapat 9 Indikator sedangkan pada Tahun 2025 terdapat 5 Indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar belum dapat dihitung peningkatannya karena rumus perhitungan peningkatan harus menyajikan capaian tahun 2025.
2. Indikator Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu sebesar 100% dikarenakan pada TW I terdapat 235 surat keterangan atau surat pengantar yang masuk di Kecamatan dan semuanya selesai di proses tepat waktu.
3. Indikator Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti belum dapat dihitung peningkatannya karena rumus perhitungan peningkatan harus menyajikan capaian tahun 2025 dan disandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Indikator Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Pattallassang belum dilakukan evaluasi penilaian.
5. Indikator Tingkat Literasi Digital ASN Kantor Kecamatan Pattallassang sebanyak 83% dengan penggunaan 3 aplikasi E-Kinerja, SIPD dan Absen Presensi. Pada penggunaan aplikasi E-Kinerja masih terdapat sekitar 50% pegawai yang masih membutuhkan bantuan dalam pembuatan SKP.

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pattallassang Tahun 2025

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Pattallassang 2025 sampai dengan Triwulan ke I

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
3. Masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan yang ditimbulkan oleh penggabungan program dan kegiatan yang mengalami peleburan.
4. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
5. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.
6. Beberapa komponen kegiatan pada sistem aplikasi perencanaan terkait kodefikasi program/kegiatan dan penganggaran mengalami perubahan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan ini berdampak pada kode rekening belanja.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Kecamatan Pattallassang 2025 sampai dengan Triwulan ke I

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ke I tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;

2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pattallassang 2025 Triwulan selanjutnya

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program di lingkungan Bappelitbangda serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terus menerus.
2. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan.
3. Peran aktif Kepala Kecamatan selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;

7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Perlunya melakukan penyusunan Renstra SKPD yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
9. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
11. Pelaksanaan kegiatan sesuai Renstra dan RPJMD.
12. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pattallassang

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra

Tahun 2023–2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. Untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 maka dirumuskanlah tujuan Kantor Kecamatan Pattallassang yaitu **"Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan",** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Pattallassang.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Pattallassang dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Kecamatan Pattallassang Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III-1

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, SERTA TARGET KINERJA KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
T.1 : Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	*Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan di Kecamatan*	*81.25*	*T1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan*	*Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar*	*80%*
	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	*93.50%*	S1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu	80%
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SPM)	100%		Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	80%
	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (Non Standar Pelayanan Minimal)	100%	S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Pattallassang	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Pattallassang	B (68.50)
Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	80%		Tingkat Literasi Digital ASN Kantor Kecamatan Pattallassang	80%
Sasaran 3 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	20			

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
Sasaran 4 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	88.89%			
Tujuan 2: Meningkatkan Tata Kelolah pada Kantor Kecamatan Pattallassang	*Indeks Reformasi Birokrasi*	*B*			
Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelolah Kinerja pada Kantor Kecamatan Pattallassang	Nilai SAKIP pada kantor Kecamatan Pattallassang	B			

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PATTALLASSANG

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pattallassang yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL IV-1

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**8,019,322,931**
		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**9,330,000**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,056,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,366,000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	1,366,000

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,366,000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA – SKPD	810,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,366,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**7,245,647,981**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,240,274,981
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	3,500,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	1,873,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**-**
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**147,487,750**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,354,600
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6,548,150
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	81,565,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,020,000

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**66,576,000**
			Pengadaan Mebel	13,498,000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53,078,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**518,178,000**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,778,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	509,400,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**32,103,200**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15,003,200
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	17,100,000
	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**4,125,000**
		Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**4,125,000**
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	4,125,000

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1,721,752,412
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**1,642,882,412**
			Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18,810,000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	803,549,250
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	820,523,162
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**78,870,000**
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	78,870,000
	TOTAL PAGU			**9,745,200,343**

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang Tahun 2025 dengan total pagu Rp 9.745.200.343,- (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL IV-2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PATTALLASSANG							**9,332,713,021.00**	**9,796,225,393.00**	**9,745,200,343.00**	**412,487,322.00**							**10,146,045,934.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9,332,713,021.00**	**9,796,225,393.00**	**9,745,200,343.00**	**412,487,322.00**							**10,146,045,934.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9,332,713,021.00**	**9,796,225,393.00**	**9,745,200,343.00**	**412,487,322.00**							**10,146,045,934.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				-	-	**7,641,864,639.00**	**8,070,347,831.00**	**8,019,322,931.00**	**584,631,295.00**							**8,226,495,934.00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9,886,000.00	9,886,000.00	9,330,000.00	-556,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		50,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,056,000.00	3,056,000.00	3,056,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,366,000.00	1,366,000.00	1,366,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,366,000.00	1,366,000.00	1,366,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,366,000.00	1,366,000.00	1,366,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,366,000.00	1,366,000.00	810,000.00	-556,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,366,000.00	1,366,000.00	1,366,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6,776,443,639.00	7,246,140,831.00	7,245,647,981.00	469,204,342.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		7,080,656,884.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/ bulan	103 Orang/ bulan	6,770,577,639.00	7,240,274,831.00	7,240,274,981.00	469,697,342.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7,062,656,884.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2,366,000.00	2,366,000.00	1,873,000.00	-493,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-500,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	500,000.00	500,000.00	0.00	-500,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	214,978,800.00	211,123,800.00	147,487,750.00	-67,491,050.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		249,406,800.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75,577,500.00	71,832,500.00	51,354,600.00	-24,222,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			88,618,800.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,096,300.00	13,096,300.00	6,548,150.00	-6,548,150.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13,440,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12,720,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	81,675,000.00	81,565,000.00	81,565,000.00	-110,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85,275,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	44,630,000.00	44,630,000.00	8,020,000.00	-36,610,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49,353,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	52,416,000.00	52,416,000.00	66,576,000.00	14,160,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		126,842,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	13,498,000.00	13,498,000.00	13,498,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	38,918,000.00	38,918,000.00	53,078,000.00	14,160,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			46,842,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	555,537,000.00	518,178,000.00	518,178,000.00	-37,359,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		606,443,850.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46,137,000.00	8,778,000.00	8,778,000.00	-37,359,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			48,443,850.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	509,400,000.00	509,400,000.00	509,400,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			558,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	32,103,200.00	32,103,200.00	32,103,200.00	0.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		103,146,400.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	15,003,200.00	15,003,200.00	15,003,200.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			67,306,400.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	17,100,000.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19,000,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	65 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16,840,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-				-	-	**4,050,000.00**	**4,125,000.00**	**4,125,000.00**	**11,550,000.00**							**15,600,000.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2,025,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,025,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	4,050,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	75,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		9,525,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,050,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	75,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7,500,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,025,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2,025,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,025,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		2,025,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi 4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			2,025,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-				-	-	**1,686,798,382.00**	**1,721,752,562.00**	**1,721,752,412.00**	**213,101,618.00**							**1,899,900,000.00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1,607,823,382.00	1,642,882,562.00	1,642,882,412.00	35,059,030.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1,818,225,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	18,225,000.00	18,810,000.00	18,810,000.00	585,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18,225,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	842,420,550.00	734,099,850.00	803,549,250.00	-38,871,300.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,399,983,200.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	747,177,832.00	889,972,712.00	820,523,162.00	73,345,330.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400,016,800.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	78,975,000.00	78,870,000.00	78,870,000.00	-105,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		81,675,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	78,975,000.00	78,870,000.00	78,870,000.00	-105,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81,675,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-				-	-	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,050,000.00**							**4,050,000.00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		4,050,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			2,025,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			2,025,000.00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	JUMLAH								**9,332,713,021.00**	**9,796,225,393.00**	**9,745,200,343.00**	**-20,817,255,718.00**							**10,146,045,934.00**	

Sumber : SIPD-RI 2025

BAB V
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja Perubahan ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
4. Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;

5. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renja Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Takalar, 2025

Plh. Camat Pattallassang,

IMAL FAIZAL, S.I.P., M.M
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19791215 200801 1 011



RENJA PERUBAHAN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah member rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukanberdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan di masa depan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. AMIN.

Takalar, Mei 2025

Kepala Badan,

ZUBAIR, S.Sos. MM.

Nip. 19730621 199206 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Pembahasan 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 28
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 41
4.1. Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatanprioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah 41
4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah 47
BAB V PENUTUP 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Bappelitbangda Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Bappelitbangda dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Bappelitbangda Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

1.2. LANDASAN HUKUM

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional; 2.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana tetah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64O2).
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Prinsip Good Governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangungan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Perturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah selaras dengan maksud dan tujuan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program/kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

a) Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025;
b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP) Tahun 2024;
c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan danberkelanjutan;
e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan sistematika seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 40, bahwa sistematika Rencana Kerja mencakup :

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisikan latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan dokumen Renja (Rencana Kerja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025. Bab ini berisikan kajian evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I dan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH. Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional serta Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH. Bab ini berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan dalam perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sampai dengan Triwulan I.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar adalah Penjabaran Rencana Kerja Tahunan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Pelaksana Teknis Urusan Pemerintahan Umum. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar pada Tahun 2025.

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp. 5.421.497.176,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 8,03 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 720.778.852,- atau 13,30 %. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2025 capaian kinerja secara kumulatif sebesar 6%,dimana capaian kinerja masih belum mencapai target.

Untuk tahun 2025, berdasarkan progress hingga akhir triwulan I 2025, Capaian Kinerja tercapai 8,03 %, Capaian anggaran tercapai 13,30 %, yang didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan ASN. Pencapaian target kinerja akan ditunjang oleh Perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran kas serta kesiapan sumberdaya manusia dalam pelaksanaannya, akan tetapi di sisi lain kegiatan tidak mencapai target,hal ini disebabkan karena adanya mayoritas Kegiatan belum dilaksanakan karena belum ada kesesuaian dengan anggaran kas yang telah ditetapkan sebelumnya/jadwal pencairan belum tercapai.

Implikasi yang timbul dari capaian realisasi renja terhadap capaian renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah terwujudnya progres yang sesuai dengan target tahunan yang direncanakan dalam renstra. Walaupun secara kumulatif, capaian belum sesuai target, diharapkan pada akhir tahun anggaran akan mencapai target yang telah ditetapkan, walaupun demikian tetap diperlukan perencanaan anggaran serta penyiapan sumberdaya yang kompeten.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja PD Pencapaian Perencanaan

Strategis (Renstra) sesuai urusan PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel II-1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

Kabupaten Takalar

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	8		12		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
		8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
		8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			5.421.497.176	8,0%	720.788.852		720.788.852	8,03%	13,30%		
		8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan	100%	2.966.824.426	26,46%	559.987.852	26,46%	559.987.852	26,46%	18,87%	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	18.951.100	80,00%	9.802.900	80,00%	9.802.900	80,00%	51,73%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kesbangpol	8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4.570.800	2	2.705.700	2	2.705.700	100%	59%		
		8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	1.791.600	2	1.125.000	2	1.125.000	100%	63%		
		8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	1.843.700	1	1.043.200	1	1.043.200	50%	57%		
		8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	1.556.000	1	1.325.000	1	1.325.000	100%	85%		
		8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	2.685.000	-	1.240.000	-	1.240.000	0%	46%		
		8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	1	2.380.000	1	620.000	1	620.000	100%	26%		
		8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	4.124.000	1	1.744.000	1	1.744.000	100%	42%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															78,57%	54,04%		
Predikat Kinerja Kegiatan															T	R		

		8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.775.096.386	16%	522.334.870	16%	522.334.870	16%	19%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kesbangpol	8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kesbangpol yang menerima gaji	322	2.039.619.958	92	519.914.870	92	519.914.870	29%	25%		
								Jumlah ASN yang menerima TPP	276	730.009.428	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	3.620.000	1	1.620.000	1	1.620.000	100%	45%		
		8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1	1.847.000	1	800.000	1	800.000	100%	43%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															57,14%	28,39%		
Predikat Kinerja Kegiatan															R	SR		
		8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	4.203.000	33%	500.000	33%	500.000	33%	12%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kesbangpol	8	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	815.000	1	500.000	1	500.000	100%	61%		
		8	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1	2.884.000	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1	504.000	-	-	-	-	0%	0%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															33,33%	20,45%		
Predikat Kinerja Kegiatan															SR	SR		
		8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.596.000	0,00%	400.000	0,00%	400.000	0%	11%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kesbangpol	8	01	01	2.05	03	Pendataan dan pengelolaan administrasi keegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	1.986.000	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	1.610.000	-	400.000	-	400.000	0%	25%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															0,00%	12,42%		
Predikat Kinerja Kegiatan															SR	SR		
		8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	99.203.370	24%	17.550.082	24%	17.550.082	24%	18%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kesbangpol	8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasui listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1.323.000	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	2.728.000	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan RT yang disediakan	1	900.400	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	01	2.06	04	Penyedia bahan logidtik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	1	6.669.000	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	01	2.06	05	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	1	2.660.970	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	2.200.000	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2	1.650.000	1	650.000	1	650.000	50%	39%		
		8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20	81.072.000	6	16.900.082	6	16.900.082	30%	21%		Pokok - pokok pikiran Rp. 100.000.000,-
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															10,00%	7,53%		
Predikat Kinerja Kegiatan															SR	SR		

		8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	46.122.770	15%	7.400.000	15%	7.400.000	15%	16%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kesbangpol	8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Wifi/Telepon yang Dibayarkan	1	708.000	-	-	-	-	0%	0%		
								Jumlah Rekening Listrik yang Dibayarkan	1	124.770	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	3.290.000	2	1.400.000	2	1.400.000	17%	43%		
		8	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	42.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	17%	14%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															8,33%	14,21%		
Predikat Kinerja Kegiatan															SR	SR		
		8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase cakupan pemiharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	19.651.800	16,67%	2.000.000	16,67%	2.000.000	17%	10%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kesbangpol	8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	19.651.800	2	2.000.000	2	2.000.000	17%	10%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															16,67%	10,18%		
Predikat Kinerja Kegiatan															SR	SR		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															29,15%	21,03%		
Predikat Kinerja Program															SR	SR		
		8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	100%	642.907.150	1,01%	454.000	1,01%	454.000	1%	0%	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pemahaman empat pilar kengsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar1945, BNKRI, Bineka Tunggal Ika)	100%	642.907.150	1%	454.000	1%	454.000	1%	0%		
		8	01	01	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	6	702.150	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	01	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembarauan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	6	3.914.400	1	454.000	1	454.000	17%	12%		
		8	01	01	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, , bela negara, karakter bangsa, pembarauan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	2	2.364.000	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	01	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Anggota Paskibraka	85	635.926.600	-	-	-	-	0%	0%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															4,17%	2,90%		
Predikat Kinerja Kegiatan															SR	SR		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															4,17%	2,90%		
Predikat Kinerja Program															SR	SR		

		8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	100%	1.116.257.000	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Cakupan Peningkatan Pendidikan Politik dalam Masyarakat	100%	1.116.257.000	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%		
		8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	12	1.109.868.000		-	-	-	0%	0%		
		8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan politik	2	6.389.000		-	-	-	0,00%	0%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja Program																SR	SR	
		8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Cakupan Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	3.466.800	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Peningkatan Pengelolaan Pengurus Ormas	100%	3.466.800	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%		
		8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sangketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	12	1.606.800		-	-	-	0%	0%		
		8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sangketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	2	1.860.000		-	-	-	0%	0%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja Program																SR	SR	

		8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Cakupan Pembinaan Tentang Ketahanan Ekonomi ,Social dan Budaya	100%	5.881.800	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Kecamatann Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	5.881.800	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%		
		8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomui, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunanan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	12	2.271.800	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomui, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunanan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	12	2.610.000	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomui, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunanan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	2	1.000.000	-	-	-	-	0%	0%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0,00%	0,00%		
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																0,00%	0,00%		
Predikat Kinerja Program																SR	SR		
		8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi permasalahan Strategis yang ditangani	100%	686.160.000	20,69%	160.347.000	20,69%	160.347.000	21%	23%	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Hubungan Kerjasama Lintas SKPD dan Institusi Non Pemerintah	100%	686.160.000	21%	160.347.000	21%	160.347.000	21%	23%		
		8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang KewaspadaanDini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan, serta penanganan konflik di daerah	12	190.000.000	3	37.457.000	3	37.457.000	25%	20%		
		8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan, serta penanganan konflik di daerah	3	1.685.000	-	-	-	-	0%	0%		
		8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan, serta penanganan konflik di daerah	2	2.305.000	-	290.000	-	290.000	0%	13%		
		8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	12	492.170.000	3	122.600.000	3	122.600.000	25%	25%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																12,50%	14,30%		
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																12,50%	14,30%		
Predikat Kinerja Program																SR	SR		
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																7,64%	6,37%		
Predikat Kinerja Program																SR	SR		
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																			

Sumber Data: Monev TW I Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 untuk triwulan I, dari 6 program pada Badan Kesatuan Bagsa dan Politik, belum ada yang mencapai realisasi pendanaan 25%, sedangkan capaian kinerja hanya satu program yang mencapai 25% yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebagai gambaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program yang capaian kinerja dibawah 25 % sebanyak 5 program yakni Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (1%), Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (0%), Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (0%), Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya (0%) dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (23%). Hal ini dikarenakan belum teridentifikasinya kegiatan-kegiatan diawal tahun dan keterlambatan penerbitan pedoman/petunjuk teknis kegiatan atau adanya penundaan kegiatan akibat berbagai alasan yang juga bisa menghambat realisasi termasuk dalam penyusunan anggaran kas.
2. Program yang capaian kinerja sampai dengan 25% adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mencapapi angka 26,46%.
3. Sedangkan untuk capaian realisasi pendanaan, belum ada program yang terealisasi sampai 25%. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti proses penyusuan anggaran kas.

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Terakomodir di APBD 2025

Rincian Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terakomodirdal am APBD Tahun 2025, memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	42	6	12	44
TOTAL		**6**	**12**	**42**	**6**	**12**	**44**

Sumbe data : Monev TW I RKPD Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan program terdiri dari 6 program beserta indikatornya, kegiatan terdiri dari 12 kegiatan beserta indikatornya, sedangkan sub kegiatan berjumlah 42 sub kegiatan beserta 44 indikator sub kegiatan.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 5.421.497.176	Rp. 720.788.852	8,03%	13,30%
TOTAL					

Sumber data : Monev TW I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pagu APBD sebesar Rp. 5.421.497.176, realisasi s/d Triwulan I sebesar Rp. 720.788.852, kemudian persentase fisik sebesar 8,03% dan Keuangan 13,30%

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran >20%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar >20% didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah >20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan >20 persen persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 6 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 4 program (realisasinya 0 – 10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program (realisasi >10 – 20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 1 program (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 4 kegiatan, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 6 kegiatan, dan kategori tinggi sebanyak 2 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 42 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 21 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 5 sub kegiatan, dan 16 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-4

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	4	1	1	12	4	6	2	42	21	5	16
TOTAL		**6**	**4**	**1**	**1**	**12**	**4**	**6**	**2**	**42**	**21**	**5**	**16**

Sumber data : Monev TW I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 6 program kerja dimana 4 diantaranya kategori Rendah, 1 kategori Sedang dan 1 Kategori Tinggi. Sedangkan kegiatan berjumlah 12 diantaranya 4 kategori Rendah, 6 kategori Sedang dan 2 kategori Tinggi. Pada Sub Kegiatan yang berjumlah 21 Sub terdapat 21 kategori Rendah, 5 kategori Sedang, serta 16 kategori Tinggi.

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran >20%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar >20% didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah >20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja >20 persen persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada level program untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 6 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 4 program (realisasinya 0 – 10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 0 program (realisasi >10 – 20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 2 program (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pada level kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut kegiatan yang realisasi kinerjanya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 5 kegiatan, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 3 kegiatan, dan kategori tinggi sebanyak 4 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 42 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 24 sub kegiatan yang capaian kinerjaya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi kinerja sedang terdapat 4 sub kegiatan, dan 14 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi kinerja tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi kinerja lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-5

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	4	0	2	12	5	3	4	42	24	4	14
TOTAL		**6**	**4**	**0**	**2**	**12**	**5**	**3**	**4**	**42**	**24**	**4**	**14**

Sumber data : Monev TW I Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan terdapat 6 program kerja dimana 4 diantaranya kategori Rendah, 0 kategori Sedang dan 2 Kategori Tinggi. Sedangkan kegiatan berjumlah 12 diantaranya 5 kategori Rendah, 3 kategori Sedang dan 4 kategori Tinggi. Pada Sub Kegiatan yang berjumlah 24 Sub terdapat 4 kategori Rendah, 14 kategori Sedang, serta 16 kategori Tinggi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (IKU)
2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Tabel II-6
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR (2023-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR (2025-2029)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian sampai trw II	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks Demokrasi	68,70%	68 %	Indeks Harmoni Indonesia (IHa)	60	60	65	-	60	65	
2	Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	100%	91,75%	Cakupan Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	70	70	70	0	70	75	
3	Persentase Tingkat Keaktifan FKUB	100%	16,10%	Persentase Pengurangan Konflik SARA (%)	70	70	70	-	75	75	
4	Persentase Kewaspadaan Dini Masyarakat	80%	97,37%	Persentase Organisasi Masyarakat yang Bermitra dengan Pemerintah (%)	70	70	70	28,67%	70	75	
5	Persentase Bela Negara	80%	91,75%								
6	Cakupan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	100%	16,10%								
7	Tingkat Partisispasi Masyarakat Pada Seluruh Jenjang Pemilihan	85,34%	85 %	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	70	70	75	0	70	75	

	Pilpres	85,25%	86 %								
	Pilgub	85%	86 %	Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat pada Badan Kesatuan Politik dan Bangsa (%)	60	65	65	B	65	65	
	Pilbup	85,85%	86 %	Tingkat Literasi Digital ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (%)	60	60	70	95%	60	70	
	Pileg	85,25%	86 %								
8	Indeks Reformasi Birokrasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	73	73								
9	Nilai Sakip Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	C	B								
10											

Sumber Data : Renstra 2023-2026, Renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2024 dan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi mencapai angka 78,93% dari target 68,7%. Nilai tersebut merupakan indeks demokrasi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk nilai khusus wilayah Kab. Takalar belum ada penilaian tersendiri dari BPS. Capaian ini cukup memuaskan yang berarti cukup tingginya partisipasi masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam musyawarah publik. Beberapa aspek yang menjadi variable pengukuran indeks ini yakni Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak–Hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi. Capaian indeks ini merupakan dampak positif dari koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang terkait dengan demokrasi antara lain LSM, Partai Politik, Media Cetak, Media Elektronik
2. Indikator cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan telah terealisasi 91,75% dari target 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana program-program pendidikan wawasan kebangsaan dilaksanakan. Indikator ini dihitung dari jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan dibandingkan dengan jumlah sasaran yang direncanakan. Meskipun belum mencapi target sepenuhnya, namun pencapaian ini terbilang cukup tinggi. Kondisi ini adalah dampak positif dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya kegiatan Pembentukan Paskibraka yang menyasar para pelajar. Namun dengan alokasi pendanaan yang belum proporsional, menyebabkan target indikator tidak tercapai. Selain itu, dibutuhkan pedoman kebijakan teknis yang dapat mengarahkan pelaksanaan program pembinaan nilai-nilai kebangsaan agar lebih sistematis dan terukur yang meliputi analisis kebutuhan, konsultasi dengan pemangku kepentingan, penyusunan rancangan kebijakan serta koordinasi lintas sektor guna memastikan kebijakan yang dihasilkan mendukung penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
3. Indikator Tingkat Keaktifan FKUB yang terealisai 16,10% dari target 100 %. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana FKUB berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar ummat beragama. Ketersediaan data terkait FKUB yang terbatas, menyebabkan evaluasi kebijakan sulit untuk dilakukan. Sehingga penyusunan database FKUB sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan, termasuk dalam memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam pembinaan FKUB di Kabupaten Takalar.

4. Indikator Persentase Tingkat Kewaspadaaan Dini Masyarakat mencapai target 97,37% dari target 80%. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan masyarakat untuk mendeteksi, mencegah dan merespon potensi konflik sosial yang terjadi. Keberhasilan ini karena Kerjasama dan koordinasi yang intens antar pimpinan daerah dengan masyarakat yang menjadi cerminan nyata peran Forum Komunikasi Pimpinan dari setiap level wilayah baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Namun demikian, tingkat kewaspadaan masyarakat tetap harus terjaga melalui kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta penanganan konflik di daerah. Segala kebijakan kewaspadaan dini daerah harus dituangkan dalam dokumen perencanaan program kerja Bidang Kewaspadaan Dini yang disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Dalam dokumen tersebut, perlu juga memuat potensi konflik dalam proses pembangunan Kawasan Industri Takalar yang kembali masuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada RPJMN Tahun 2025-2029.
5. Indikator Persentase Bela Negara mencapai realisasi 91,75% dari target 80%. Indikator ini untuk mengukur efektivitas pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara yang dilakukan oleh pemerintah berdampak pada sejauh mana masyarakat/ kelompok masyarakat memiliki pemahaman, sikap dan partisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung upaya bela negara. Capaian ini tidak terlepas dari keberhasilan pendidikan wawasan kebangsaan yang meningkatkan kesadaran dan rasa nasionalisme masyarakat. Selain itu, media massa dan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik tentang nasionalime.
6. Indikator Cakupan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya terealisasi 16,10% dari target 100%. indikator ini untuk mengukur efektivitas kegiatan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi secara mandiri, menjaga kerukunan sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya. Ketersediaan data sasaran pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang minim, menyebabkan capaian indicator ini sangat rendah. Sehingga perlu dilakukan proses pengumpulan, analisis dan penyusunan bahan strategis yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.
7. Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Seluruh Jenjang hampir mencapai target yakni diangka 85% dari target 85,34 %. Indikator ini dihitung dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu dibandingkan jumlah DPT. Meskipun belum

mencapai target sepenuhnya, namun pencapaian tersebut cukup tinggi. Hal ini tidak lepas dari peran besar partai politik yang mendukung kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai media informasi sehingga berdampak pada peningkatan kesadaran berdemokrasi. Namun dalam prosesnya, pemilihan umum di Indonesia masih ditemukan berbagai praktik kecurangan yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil pemilihan umum. Sehingga meskipun tingkat partisipasi pemilih relative tinggi, namun motivasi partisipasi sebagian besar pemilih bukan pada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, namun sangat dipengaruhi oleh tekanan politik, money politik dan praktek kecurangan lainnya. Dan lebih jauh lagi, pemimpin yang lahir dari proses pemilihan yang curang, akan melahirkan berbagai kebijakan yang tidak berkualitas.

8. Indikator Reformasi Birokrasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah mencapai target yakni di angka 73%. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen pimpinan dan partisipasi para pegawai Badan kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini tentu didukung oleh manajemen kinerja yang baik serta budaya kerja dan integritas aparatur. Penerapan sarana dan prasarana penilaian kinerja berbasis IT (E-RKBMD, E-Planning, E-Budgeting) serta pelaporan kinerja yang tepat waktu turut andil dalam keberhasilan pencapaian target ini.
9. Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat predikat B dari target predikat C. Hasil evaluasi keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s/d 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sebesar 62,08 dengan kategori predikat B, Interprestasi Baik.

Pada Tahun 2025, seluruh kabupaten/ kota di Indonesia melakukan penyusunan dokumen RPJMD tahun 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan lima tahunan yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dan memuat visi, misi dan program strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Dokumen RPJMD ini nantinya akan menjadi dasar hukum dan pedoman penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan memastikan sinkronisasi pembangunan pusat-daerah. Untuk itu, setiap perangkat daerah harus menyesuaikan program kerja masing-masing dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Sebagai bentuk penyesuaian dengan visi, misi dan program kerja Kepala

Daerah terpilih, perangkat daerah juga melakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan masing-masing. Adapun indikator tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan indikator kinerja utama perangkat daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Harmoni Indonesia merupakan indikator untuk mengukur niai tingkat kerukunan, toleransi, keamanan dan stabilitas sosial-politik agar potensi konflik dapat dideteksi sejak dini. Indikator ini diukur oleh Kemendagri dan sampai pada triwulan II 2025 belum ada pengukuran untuk indikator ini.
2. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam menjangkau warga masyarakat, organisasi, lembaga pendidika serta kelompok strategis lainnya dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperkuat pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pancasila dan karakter kebangsaan. Pada triwulan II 2025, belum ada kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan.
3. Persentase pengurangan konflik SARA merupakan indikator yang mencerminkan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencegah, menangani, dan mengurangi jumlah maupun intensitas konflik yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Indikator ini juga menggambarkan efektivitas upaya pembinaan kerukunan, peningkatan toleransi, penguatan kewaspadaan dini, serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial. Sampai pada triwulan II 2025 belum ada konflik yang terselesaikan sepenuhnya. Namun demikian berbagai upaya tetap dilakukan oleh inteligen yang tergabung dalam Tim Reaksi Deteksi Dini untuk mencegah terjadinya letupan konflik dan mencegah perluasan konflik.
4. Persentase organisasi masyarakat yang bermitra dengan pemerintah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam berbagai program, kegiatan, serta kolaborasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Indikator ini juga mencerminkan sejauh mana ormas berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Capaian indikator ini pada triwulan II 2025 yakni 3,44%. Minimnya alokasi pendanaan untuk kegiatan pembinaan ormas menjadi faktor utama rendahnya capaian indikator ini.

5. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik digunakan untuk mengukur sejauh mana partai politik menjalankan fungsi pendidikan politik menjalankan fungsi pendidikan politik. Indicator ini menunjukanna proporsi kader partai politik yang telah mengikuti pendidikan politik dibandingkan dengan jumlah seluruh kader partai politik dalam periode terentu.
6. Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat pada Badan Kesatuan Politik dan Bangsa. Indikator ini menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah menerapkan prinsip akuntabilitas, perencanaan berbasis kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta pengelolaan anggaran yang efisien dan berorientasi hasil (outcome). pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperoleh nilai SAKIP 62,08 (predikat B).
7. Tingkat Literasi Digital ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Indikator ini menggambarkan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara efektif, aman, dan produktif dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Capaian indikator pada triwulan II tahun 2025 berada di angka 95% yang disebabkan masih adanya aparatur yang belum mampu memanfaatkan komputer secara optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat strategis dan menjadi tolok ukur utama dalam menilai pencapaian tujuan serta sasaran organisasi. IKU disusun secara terukur, relevan, dan konsisten dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga mampu menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program maupun kegiatan. Dengan adanya IKU, arah penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat dipantau secara lebih sistematis dan akuntabel, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Indikator Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja Lima tahunan sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari tujuan dan sasaran rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Takalar periode 2025-2029 sesuai dengan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Yaitu : "**Terciptanya Harmonisasi dalam Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Nyaman serta Demokratis berlandaskan Pancasila dan Nilai - nilai Keagaman ",** tujuan tersebut dicapai melalui 3 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, kesadaran politik masyarakat, serta aktualisasi nilai - nilai pancasila di berbagai kelompok masyarakat.
2. Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.1.
Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja
Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Tujuan 1: Meningkatkan Kesatuan Bangsa Dan Kwalitas Demokrasi	Indeks Demokrasi	68,70%	Tujuan : Terciptanya harmonisasi dalam Kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan nyaman serta demokratis berlandaskan pancasila dan nilai-nilai keagaman	Indeks Harmoni (iHa) Kabupaten Takalar	60
Tujuan 1 : Meningkatkan	Cakupan Pendidikan	100%	Sasaran 1 : Meningkatnya	Persentase Pengurangan	70

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Kesatuan Bangsa Dan Kwalitas Demokrasi	Wawasan Kebangsaan		keamanan dan ketertiban masyarakat, kesadaran politik masyarakat, serta aktualisasi nilai - nilai pancasila di berbagai kelompok masyarakat.	Konflik SARA (%)	
	Persentase Tingkat Keaktifan FKUB	100%		Persentase Partisipasi Masyarakat yang Memiliki Hak Pilih dalam Mengikuti Pesta Demokrasi (%)	70
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kesadaran Kebangsaan	Persentase Kewaspadaan Dini Masyarakat	80%		Persentase Organisasi Masyarakat yang Bermitra dengan Pemerintah (%)	70
	Persentase Bela Negara	80%		Cakupan Penguatan ideologi pancasila dan karaktter kebangsaan	70
	Cakupan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	100%	Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola kinerja pada Badan Kesaatuan Bangsa dan Politik	Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat pada Badan Kesatuan Politik dan Bangsa (%)	60
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kesadaran Politik	Tingkat Partisispasi Masyarakat Pada Seluruh Jenjang Pemilihan	85,34%		Tingkat Literasi Digital ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (%)	60
Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pada Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Indeks Reformasi Birokrasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	73			
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Nilai Sakip Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	C			

Sumber Data : Renstra 2022-2026 dan Renstra 2025-2029

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1,	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**410.400.880,00**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		**410.400.880,00**
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	689.280,00
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.231.400,00
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.240.000,00
			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	0,00
			Pembentukan Paskibraka	405.240.200,00
2,	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN**			**1.113.157.000,00**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,		**1.113.157.000,00**
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	1.109.868.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Situasi Politik di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.289.000,00
3.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**1.740.000,00**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		**1.740.000,00**
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	620.000,00
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	620.000,00
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500.000,00
4	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**954.371.870,00**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		**954.371.870,00**
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	171.686.800,00
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	315.000,00
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	560.070,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	781.810.000,00
			JUMLAH	**5.438.312.956,00**

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2025 dengan total pagu *Rp 5.438.312.956 (Lima milya empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.2 RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TAKALAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**5.023.917.479,00**	**5.421.497.176,00**	**5.438.312.956,00**	**414.395.477,00**							**5.554.555.807,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**5.023.917.479,00**	**5.421.497.176,00**	**5.438.312.956,00**	**414.395.477,00**							**5.554.555.807,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5.023.917.479,00**	**5.421.497.176,00**	**5.438.312.956,00**	**414.395.477,00**							**5.554.555.807,00**	
1,	**8,01,01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -**					**-**	**-**	**2.593.501.759,00**	**2.966.824.426,00**	**2.957.166.406,00**	**569.052.448,00**							**3.162.554.207,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -					-	-	19.051.100,00	18.951.100,00	14.744.280,00	-4.306.820,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		13.428.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.395.800,00	4.570.800,00	2.710.800,00	315.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.031.600,00	1.791.600,00	1.779.060,00	-1.252.540,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.865.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.943.700,00	1.843.700,00	1.574.420,00	-3.369.280,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.315.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.968.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.480.000,00	2.685.000,00	1.240.000,00	-1.240.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.660.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.604.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.264.000,00	4.124.000,00	3.504.000,00	1.240.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.415.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.359.595.770,00	2.775.096.386,00	2.773.767.266,00	414.171.496,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.938.457.588,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.355.472.770,00	2.769.629.386,00	2.769.629.996,00	414.157.226,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.935.123.388,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.276.000,00	3.620.000,00	2.888.000,00	612.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.322.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.847.000,00	1.847.000,00	1.249.270,00	-597.730,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.011.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	3.583.000,00	4.203.000,00	3.583.000,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.720.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	815.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.380.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.264.000,00	2.884.000,00	2.264.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.620.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.720.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	6.076.000,00	3.596.000,00	3.006.290,00	-3.069.710,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		25.929.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.606.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	-620.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.429.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.470.000,00	1.610.000,00	1.020.290,00	-2.449.710,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	97.214.370,00	99.203.370,00	97.021.000,00	-193.370,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		52.938.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.728.000,00	2.728.000,00	2.120.000,00	-608.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	900.400,00	900.400,00	881.500,00	-18.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.669.000,00	6.669.000,00	6.368.400,00	-300.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.660.970,00	2.660.970,00	1.406.100,00	-1.254.870,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.838.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-1.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	3.375.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-1.725.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	76.258.000,00	81.072.000,00	81.072.000,00	4.814.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.579.719,00	46.122.770,00	45.392.770,00	-33.186.949,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		78.579.719,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.289.719,00	832.770,00	832.770,00	-32.456.949,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.289.719,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	3.290.000,00	3.290.000,00	2.560.000,00	-730.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.290.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	29.401.800,00	19.651.800,00	19.651.800,00	-9.750.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		31.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	29.401.800,00	19.651.800,00	19.651.800,00	-9.750.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2,	**8,01,02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** -					-	-	**607.750.120,00**	**642.907.150,00**	**410.400.880,00**	**195.035.480,00**							**802.785.600,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan -					-	-	607.750.120,00	642.907.150,00	410.400.880,00	-197.349.240,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		802.785.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				15 Orang	15 Orang	3.332.000,00	702.150,00	689.280,00	-2.642.720,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			47.328.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				15 Orang	15 Orang	2.054.400,00	3.914.400,00	3.231.400,00	1.177.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Laporan	2 Laporan	2.364.000,00	2.364.000,00	1.240.000,00	-1.124.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.921.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				85 Orang	85 Orang	599.999.720,00	635.926.600,00	405.240.200,00	-194.759.520,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3,	**8,01,03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** -					**-**	**-**	**1.104.584.000,00**	**1.116.257.000,00**	**1.113.157.000,00**	**-144.048.000,00**							**960.536.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik -					-	-	1.104.584.000,00	1.116.257.000,00	1.113.157.000,00	8.573.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		960.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			12 Orang	12 Orang	1.103.155.000,00	1.109.868.000,00	1.109.868.000,00	6.713.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			952.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			2 Laporan	2 Laporan	1.429.000,00	6.389.000,00	3.289.000,00	1.860.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4,	**8,01,04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** **-**					**-**	**-**	**3.466.800,00**	**3.466.800,00**	**1.476.800,00**	**9.255.200,00**							**12.722.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan -					-	-	3.466.800,00	3.466.800,00	1.476.800,00	-1.990.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.722.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Orang	12 Orang	1.606.800,00	1.606.800,00	856.800,00	-750.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.836.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.860.000,00	1.860.000,00	620.000,00	-1.240.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.886.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5,	**8,01,05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** **-**					**-**	**-**	**10.754.800,00**	**5.881.800,00**	**1.740.000,00**	**16.203.200,00**							**26.958.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya -					-	-	10.754.800,00	5.881.800,00	1.740.000,00	-9.014.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		26.958.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Orang	12 Orang	7.894.800,00	2.271.800,00	620.000,00	-7.274.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.886.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			12 Orang	12 Orang	1.860.000,00	2.610.000,00	620.000,00	-1.240.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6,	**8,01,06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** -					**-**	**-**	**703.860.000,00**	**686.160.000,00**	**954.371.870,00**	**-114.860.000,00**							**589.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial -					-	-	703.860.000,00	686.160.000,00	954.371.870,00	250.511.870,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		589.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	190.000.000,00	171.686.800,00	-28.313.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			52.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			12 Orang	12 Orang	1.555.000,00	1.685.000,00	315.000,00	-1.240.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			2 Laporan	2 Laporan	2.305.000,00	2.305.000,00	560.070,00	-1.744.930,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	492.170.000,00	781.810.000,00	281.810.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH								**5.023.917.479,00**	**5.421.497.176,00**	**5.438.312.956,00**	**414.395.477,00**							**5.554.555.807,00**	

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa DanPolitik
Kabupaten Takalar,

ZUBAIR. S.Sos. MM
Nip. 19730621 199203 1 005

BAB V
PENUTUP

a. Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksnakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Takalar,

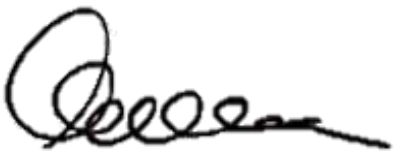

ZUBAIR. S.Sos. MM
Nip. 19730621 199203 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I

DAFTAR TABEL III

DAFTAR GAMBAR IV

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-5

1.3 Maksud dan Tujuan I-7

1.3.1 Maksud I-7

1.3.2 Tujuan I-8

1.4 Sistematika Penulisan I-8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SANROBONE TAHUN 2023 ..... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Sanrobone II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sanrobone II-9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sanrobone II-20

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ..... II-20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SANROBONE III-1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional **Error! Bookmark not defined.**

3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan SANROBONE ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.2.1 Tujuan ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.2.2 Sasaran ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SANROBONE IV-1

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan SANROBONE Tahun 2026 ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP V-1

5.1 Catatan Penting V-1

5.2 Kaidah Pelaksanaan V-1

5.3 Rencana Tindak Lanjut V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sanrobone s/d Tahun 2025 Kabupaten Takalar II-2

Tabel II-2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan II-8

Tabel II-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar..**Error! Bookmark not defined.**

Tabel II-4 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas..... 10

Tabel II-5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Takalar.....II-21

Tabel II-6 Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kabupaten Tahun 2024 Kabupaten Takalar.....II-28

Tabel III-1 Kebijakan Nasional (Prioritas Nasional) Dalam Rkp Tahun 2024.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel III-2 Kebijakan Nasional (Prioritas Daerah Provinsi Sul Sel)..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III-3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar 2026 .....III-5

Tabel 4-1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sanrobone Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Takalar**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4-2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sanrobone Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Takalar.....IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Renja Kecamatan Sanrobone dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator utama (IKU) dalam Renstra Kecamatan Sanrobone Tahun 2023-2026;
2. Kesesuaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
3. Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan Nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Gambar I-1
Hubungan Renja Kecamatan Sanrobone dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

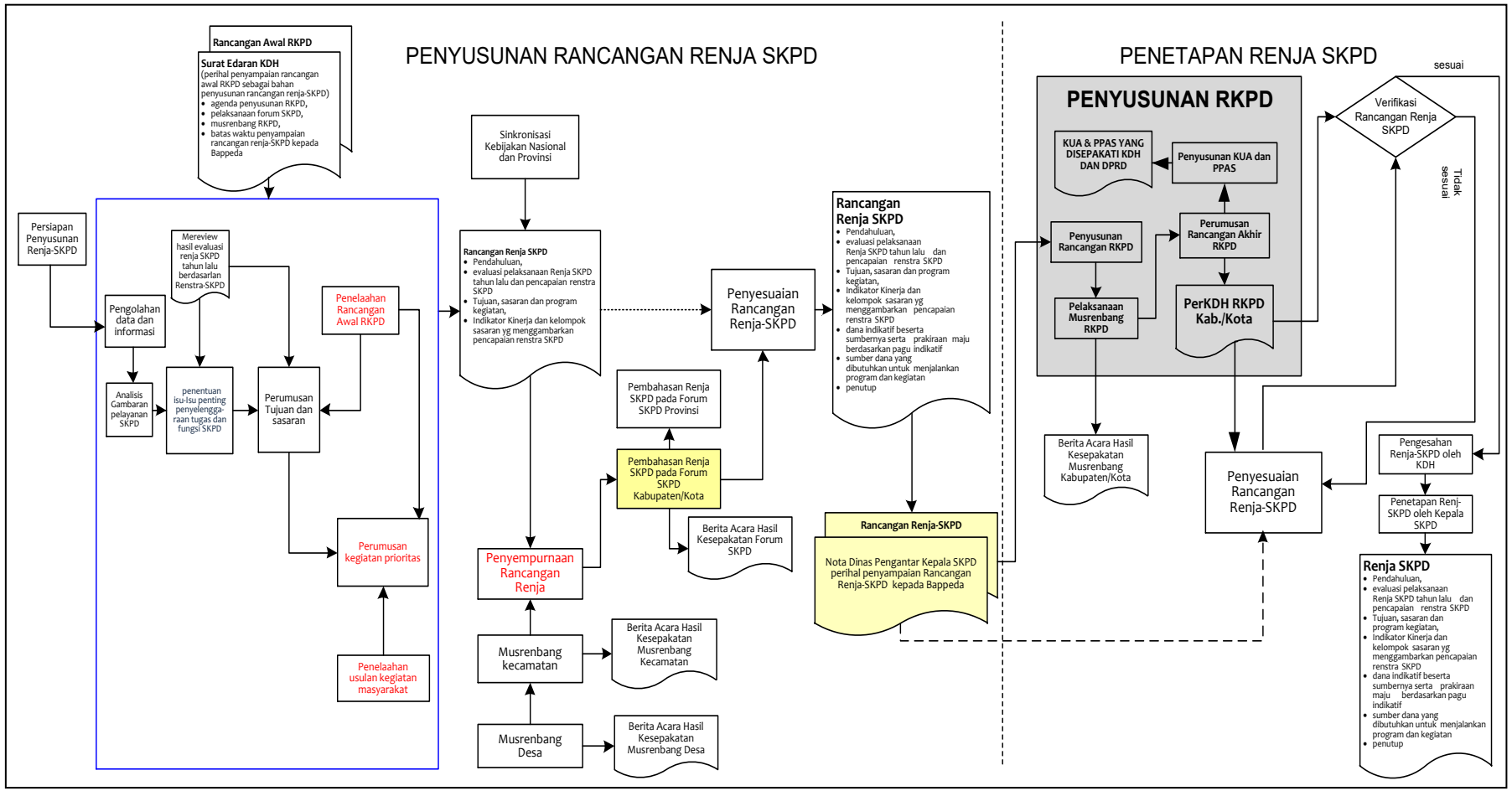

Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone yang disusun ini juga telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki perangkat daerah. Kedudukan Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 dalam Rencana Strategis Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada Renstra.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan pada Bulan Januari yang meliputi penetapan Tim Penyusun dan pengumpulan data teknis;
2. Menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 pada Bulan Januari dengan memperhatikan Rancangan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2026;
3. Melakukan forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan / atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah yang dituangkan dalam berita acara forum konsultasi publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
4. Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi;
5. Berita Acara Forum Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 sebelum diajukan untuk dilakukan verifikasi oleh Bappelitbangda;
6. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026;
7. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
8. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala

Bappelitbangda Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;

9. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2026;
10. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPD Tahun 2023–2026 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi Renja tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone sangat penting bagi pencapaian kinerja Kecamatan Sanrobone secara khusus dan pemerintah daerah secara umum, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPD dan Renstra PD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renja memiliki nilai-nilai strategis, yaitu :

1. Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun;
2. Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Sanrobone Tahun 2026;
3. Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan tahunan Kecamatan Sanrobone;
4. Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja tahunan Camat Sanrobone;
5. Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Kecamatan Sanrobone sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Sosial Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 15).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sanrobone adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra kantor Kecamatan Sanrobone ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi kantor Kecamatan Sanrobone.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) kantor Kecamatan Sanrobone adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan kantor Kecamatan Sanrobone.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026, meliputi :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone Tahun 2024, memuat tentang evaluasi kinerja berdasarkan rencana Kerja yang telah ditetapkan tahun sebelumnya sesuai dengan renstra dan tupoksi Kecamatan Sanrobone, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sanrobone, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Kecamatan Sanrobone, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Sanrobone**,** memuat tentang tujuan, sasaran program dan kegiatan berdasarkan renstra dan tupoksi Kecamatan Sanrobone khusus untuk tahun 2026.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Sanrobone, berisi tentang ringkasan gambaran rencana kerja berdasarkan renstra dan tupoksi Kecamatan Sanrobone khusus untuk Tahun Anggaran 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V Penutup, Bab ini berisikan bahasan tentang ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SANROBONE TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Sanrobone

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Sanrobone. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Sanrobone berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Kecamatan Sanrobone. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Kecamatan Sanrobone sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sanrobone s/d Tahun 2024 Kabupaten Takalar

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu **(2023)**	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi (%)	Target program, kegiatan, dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5	6	7	8=7.6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	29	30
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	01				**KECAMATAN SANROBONE**												
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase keterpenuhan dukungan penyelenggaraan administrasi perkantoran**	**100%**	**Persen**	**41,35%**	**100%**	**76%**	**76,32%**	**45,85%**	**51,40%**	**51,40%**	**Kecamatan Sanrobone**	
7	01	01	2,01		**KEGIATAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	100,00%	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	33,33%	66,67%	66,67%		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang di susun	1	Dokumen	1	1	-	0,00%	1	2	200,00%		
7	1	1	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	4	Dokumen		1	1	100,00%	1	2	50,00%		

7	1	1	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	4	Dokumen		1	1	100,00%	1	2	50,00%		
7	01	01	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah**	**Cakupan Pelaporan Penata Usahaan barang milik daerah**	100,00%	Persen	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	Kecamatan Sanrobone	
7	01	01	2,03	0006	Penata Usahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik daerah	8	Laporan		2	2	100,00%	4	50,00%	0,00%		
7	01	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**	100,00%	Persen	25,00%	100,00%	69,90%	69,90%	9,86%	9,86%	28,50%	Kecamatan Sanrobone	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai Kecamatan yang menerima gaji dan tunjangan	784	Orang	196	144	135	93,75%	132	16,84%	25,13%		
						Jumlah pegawai Kecamatan yang menerima TPP	672	Orang	168	144	66	45,83%	11	1,64%	44,62%		
7	01	01	2,02	0005	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Yang disusun	4			1	1	100,00%	1	25,00%	0,00%		
7	01	01	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan adminstrasi perkantoran**	100,00%	Persen	41,16%	100,00%	46,86%	46,86%	54,74%	54,74%	4,32%	Kecamatan Sanrobone	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/penerangan Kantor yang disediakan	40	Jenis		8	4	50,00%	4	10,00%	0,00%		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64	Paket		8	8	100,00%	10	15,63%	0,55%		
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	Laporan	191	191	85	44,50%	240	66,67%	12,05%		

7	01	01	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**	100,00%	Persen	25,60%	100,00%	76,85%	76,85%	57,14%	57,14%	45,83%	Kecamatan Sanrobone	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Air	48	Rekening	12	12	6	50,00%	12	25,00%	80,61%		
						Belanja Tagihan Listrik	48	Rekening	12	12	8	66,67%	12	25,00%	55,63%		
						BelanjaTagihan Wifi	48	Rekening	12	12	9	75,00%	12	25,00%	47,34%		
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi	24	Orang	7	72	60	83,33%	60	250,00%	44,05%		
7	01	01	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah yang di pelihara**	100,00%	Persen	15,00%	100,00%	64,29%	64,29%	70,00%	70,00%	31,32%	Kecamatan Sanrobone	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	1	12	7	58,33%	12	100,00%	41,17%		
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	2	2	2	100,00%	2	25,00%	15,02%		
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat desa/ Kelurahan yang di berdayakan**	**100%**	**Persen**	**6%**	**100%**	**73,61%**	**73,61%**	**14%**	**13,54%**	**10,21%**	**Kecamatan Sanrobone**	
7	01	03	2,02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan**	100,00%	Persen	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4,17%	4,17%	8,09%		

7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24	Lembaga Kemasyarakatan		6	6	100,00%	1	4,17%	8,09%		
7	01	03	2,03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang**	100,00%	Persen	12,50%	100,00%	47,22%	47,22%	22,92%	22,92%	10,74%		
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	48	Lembaga Kemasyarakatan	6	36	17	47,22%	11	22,92%	10,74%		Sosialisasi dan rembuk Stunting Tingkat kecamatan
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100%**	**Persen**	**0%**	**100%**	**67%**	**66,67%**	**25%**	**25,00%**	**0,00%**	**Kecamatan Sanrobone**	
7	01	04	2,01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum**	**Persentase Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum**	100,00%	Persen	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%	25,00%	25,00%	0,00%		
7	01	04	2,01	0001	Sinergitas dengan Kepolosian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi	12	Kegiatan		3	2	66,67%	3	25,00%	0,00%		

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar sampai Tahun 2024, berdasarkan tabel II.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Realisasi Program yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang direncanakan adalah :
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah yang target kinerja rata-rata adalah 100%. Namun pada Tahun 2024 hanya dapat terealisasi 76,32% karena adanya 2 Sub Kegiatan yang tidak dapat terpenuhi 100%, yaitu Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, hanya tercapai 69,90% dan Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, hanya tercapai 46,86%.
   2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja program adalah Persentase Pelayanan Publik Oleh Pemerintah yang target kinerjanya 100%, dan telah terpenuhi 100%.
   3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator kinerja program adalah Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang target kinerjanya 100%, yang telah terpenuhi 73,61%.
   4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan indikator kinerja program adalah Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa / Kelurahan yang target kinerjanya 100%, yang telah terpenuhi 66,67%.

B. Tidak terdapat Program yang realisasinya melebihi target kinerja yang direncanakan.

C. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan /sub kegiatan :
   - Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dikarenakan adanya keterlambatan dalam proses pencairan Uang Persediaan sehingga mempengaruhi proses pencairan di akhir tahun dan kurangnya Sumber Daya Aparatur yang membuat pelaksanaan Sub Kegiatan belum terealisasi sepenuhnya

- Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan karena adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.
- Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan yaitu tidak ada program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja.

D. Implikasi Terhadap Target Capaian Program Renstra Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar yaitu dengan terlaksananya program/kegiatan secara maksimal tentu dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam hal pelayanan publik karena dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan pelayanan dengan segala sumberdaya yang dimiliki maka dapat tercipta pelayanan prima kepada masyarakat yang akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sehingga dalam hal ini faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan, akan sangat berpengaruh dalam melaksanakan tata kerja sesuai tugas dan fungsi secara berkesinambungan dan terus menerus, efektif dan efisien, sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud.

E. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan yaitu dengan lebih meningkatkan koordinasi di tingkat pimpinan sehingga dapat merencanakan kegiatan yang dikondisikan dengan kemampuan anggaran.

Tabel II-2
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Uraian	Keterangan Kinerja (K)							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1	Program	3	-	3	-	3	-	-	**72,20%**	**97,37%**	S	ST
2	Kegiatan	9	-	9	-	6	3	-	**74,64%**	**93,83%**	S	ST
3	Sub Kegiatan	16	-	16	-	11	7	-	**72,70%**	**86,46%**	S	T

Sumber : Laporan Monev Renja Triwulan IV Tahun 2024

Skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi RPJMD menggunakan kriteria sebagai berikut:

1	91% < 100%	Sangat Tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66% < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Pada tabel II-2 diatas dapat dilihat bahwa skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Sanrobone dapat dikatakan tinggi. Dari 3 program kegiatan Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar hanya memiliki capaian kinerja <100%, dari 9 kegiatan tidak ada kegiatan yang memiliki capaian kinerja 0% dan ada 9 kegiatan yang memiliki capaian kinerja <100% dan dari 16 sub kegiatan, ada 3 kegiatan yang memiliki capaian kinerja 100%, dan 7 sub kegiatan yang memiliki capaian 100%, serta 16 sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja >100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sanrobone

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sanrobone berdasarkan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sanrobone Tahun 2023-2026 yang mendukung Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan di Kelurahan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain pengantar KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sanrobone tahun 2024 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Sanrobone, harus dilakukan survey IKM. Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sanrobone. Kinerja pelayanan didukung oleh sistem yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan. Adapun tabel analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sanrobone sebagai berikut:

Tabel II-3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Triwulan II	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan	70%	87,04%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan	91,21%	92%	93%	Survey belum selesai	92%	93%	
2	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban	90%	72%	Persentase Pelayanan Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	88%	66%	86%	88%	
3	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)	100%	87%	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	84%	85%	90%	75%	85%	90%	
4	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Non Standart Pelayanan Minimal (Non SPM)	100%	85%	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Sanrobone	65%	68%	70%	Belum dilakukan evaluasi penilaian	72%	75%	
5	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kondisi Baik	75%	73%	Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Sanrobone	78%	80%	82%	72%	92%	92%	
6	Angka Kriminalitas	43	25								
7	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,697	0,7033								
8	Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju	30%	50%								
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	85%	75%								
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Belum dilakukan evaluasi penilaian								
11	Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong	B	B (65,58)								

Perubahan indikator kinerja perangkat daerah dipengaruhi oleh adanya perbedaan visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. Pada periode sebelumnya melalui Renstra 2023–2026, arah pembangunan Kecamatan Sanrobone lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan desa, serta peningkatan pelayanan publik yang bersifat fundamental. Sehingga, indikator tahun 2024 masih berfokus pada capaian dasar seperti kepuasan masyarakat, ketertiban umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan pembangunan desa. Namun, memasuki periode Renstra 2025–2029, arah kebijakan berubah mengikuti visi Bupati terpilih yaitu "Takalar Maju Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital". Visi ini mendorong transformasi pembangunan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis digital, dengan orientasi pada peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja tahun 2025 disusun lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi, seperti peningkatan kepuasan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan, penanganan aduan masyarakat, literasi digital ASN, serta penguatan akuntabilitas kinerja (SAKIP).

Dengan demikian, perubahan indikator dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran fokus pembangunan, dari orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas layanan publik, menuju pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Berdasarkan tabel II-5 diatas, pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Adapun penjelasannya yaitu :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan**

   Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian berada pada angka 87,04 poin dari target yang ditetapkan sebesar 70 poin. Capaian ini menggambarkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan sudah berjalan baik dan telah melebihi target yang ditentukan. Penilaian ini diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat yang melibatkan responden dari berbagai kelompok pengguna layanan, sehingga hasilnya mencerminkan persepsi masyarakat secara langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Meskipun secara umum sudah baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya pada aspek kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat dan kecepatan pelayanan. Perbaikan

pada kedua aspek tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kepuasan masyarakat sehingga target IKM pada periode berikutnya dapat tercapai atau bahkan terlampaui.

2. **Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban**
   Berdasarkan data perbandingan angka kriminal di Kecamatan Sanrobone, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 62 kasus dan pada tahun 2024 menurun menjadi 41 kasus, atau terjadi penurunan sebesar 21 kasus. Jika dihitung dalam persentase, maka realisasi penurunan kriminalitas hanya mencapai sekitar 66%. Sementara itu, target penurunan kasus kriminal tahun 2024 ditetapkan sebesar 72%, sehingga capaian tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren positif berupa penurunan kasus, namun hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap strategi pencegahan dan penanganan tindak kriminal yang selama ini dijalankan. Upaya sinergis antara aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, dan partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat agar di tahun mendatang penurunan angka kriminalitas dapat lebih signifikan dan mendekati target yang ditetapkan.
3. **Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)**
   Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 87% dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa pelayanan dasar publik di Kecamatan Sanrobone pada dasarnya sudah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku. Layanan kesehatan mencapai 90%, Layanan pendidikan 89%, Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 80%, Layanan Sosial 86% dan Layanan Pekerjaan Umum 86%. Dari total 467 permohonan pelayanan, sebanyak 408 telah dilaksanakan sesuai SPM, sehingga menghasilkan capaian rata-rata 87%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik, baik dalam hal ketepatan waktu, prosedur yang jelas, maupun kesesuaian hasil layanan dengan standar. Meski demikian, Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat masih dibawah 72%, sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan pada periode berikutnya.
4. **Persentase Pelayanan sesuai Non Standar Pelayanan Minimal (Non SPM)**
   Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Non SPM sebesar 85%, dan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang cukup memadai. Berdasarkan data perhitungan, dari total 185 layanan yang diterima, sebanyak 158

layanan berhasil diselesaikan sesuai Non SPM, sehingga capaian rata-rata adalah 85%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Non SPM di Kecamatan Sanrobone telah terlaksana dengan baik, namun masih memerlukan optimalisasi sistem pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana pendukung agar capaian di tahun berikutnya bisa memenuhi atau melampaui target.

5. **Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kondisi Baik**

   Pada tahun 2024, capaian persentase sarana dan prasarana pelayanan umum dalam kondisi baik di Kecamatan Sanrobone mencapai 73%, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 75%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana prasarana sudah tersedia dan berfungsi dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan untuk mencapai standar optimal. Berdasarkan tabel perhitungan, dari total 52 sarana prasarana yang tersedia, terdapat 43 dalam kondisi baik. Hampir seluruh jenis prasarana seperti kantor, puskesmas, sekolah (SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA), dan pasar telah memenuhi standar ketersediaan. Namun, pada kategori kondisi kantor pelayanan hanya terdapat 14 dari 18 dengan kondisi baik atau sekitar 78%. Kekurangan ini menjadi faktor utama penyebab belum tercapainya target 85%. Dengan demikian, meskipun capaian 73% menunjukkan pelayanan publik sudah ditunjang sarana prasarana yang cukup memadai, tetap diperlukan penambahan dan perbaikan kantor pelayanan agar kualitas layanan masyarakat dapat lebih optimal dan sesuai dengan target.

6. **Angka Kriminalitas**

   Pada tahun 2024, angka kriminalitas di Kecamatan Sanrobone tercatat sebesar 25 kasus per 10.000 penduduk, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 43 kasus per 10.000 penduduk. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di wilayah Kecamatan Sanrobone relative terkendali dan kondisi keamanan masyarakat tergolong cukup kondusif. Berdasarkan data tabel tindak kriminal, jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2024 sebanyak 25 kasus dengan jumlah penduduk sebesar 17.094 jiwa, sehingga hasil perhitungan angka kriminalitas adalah:

   193 /45.047 X 10.000 = 14 kasus per tahun

   Hasil ini membuktikan bahwa meskipun masih terdapat berbagai bentuk tindak kriminal, intensitasnya lebih rendah dibandingkan target, yang berarti efektivitas upaya aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan cukup baik. Namun demikian, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan patroli keamanan, penguatan koordinasi aparat, serta program pembinaan

masyarakat untuk menekan angka kriminalitas lebih rendah lagi di tahun-tahun mendatang.

7. Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan

Daftar IDM Desa Se Kecamatan Sanrobone:

No	Nama Desa	Nilai IDM 2024	Status IDM
1	Sanrobone	0,7189	Maju
2	Banyuanyara	0,7081	Maju
3	Paddinging	0,7113	Maju
4	Tonasa	0,6586	Berkembang
5	Laguruda	0,67	Berkembang
6	Ujung Baji	0,6827	Berkembang

8. Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju

Pada tahun 2024, persentase desa status berkembang menuju status desa maju di Kecamatan Sanrobone belum mencapai target. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang mengalami peningkatan menjadi desa maju sebanyak 3 desa dari 6 desa yang sebelumnya berstatus berkembang. Dengan semakin banyaknya desa berkembang yang naik kelas menuju desa maju, maka kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Sanrobone juga akan semakin meningkat, baik dari sisi akses layanan dasar, peluang ekonomi lokal, maupun pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga konsistensi pembinaan, memperkuat kelembagaan desa, serta meningkatkan sinergi antar-pemangku kepentingan agar seluruh desa dapat mencapai status desa maju bahkan desa mandiri.

9. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2024, persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sanrobone mencapai 75%, dan belum mencapai target yang ditetapkan karena masih terdapat beberapa lembaga seperti Bumdes, Karang Taruna dan Kelompok Tani yang tingkat keaktifannya relative rendah dibandingkan lembaga lain. Jumlah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Sanrobone tahun 2024 sebanyak 64 lembaga, dengan 48 lembaga yang aktif. Perhitungannya yaitu:

64/48 x 100% = 75%

Capaian ini menandakan peran lembaga kemasyarakatan cukup konsisten dalam pemberdayaan masyarakat. Tingkat keaktifan tertinggi ditunjukkan oleh LPM, BPD, dan PKK yang mencapai 100%.

10. **Indeks Reformasi Birokrasi**

    Target yang ditetapkan adalah predikat B, namun pada tahun 2024 belum ada realisasi karena belum dilakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan dalam proses penilaian agar capaian reformasi birokrasi dapat terukur dengan jelas. Evaluasi yang tepat waktu penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Sanrobone.

11. **Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Sanrobone**

    Target nilai B dan realisasi mencapai adalah B (65,58). Capaian ini berhasil melampaui target yang ditetapkan, menandakan adanya peningkatan kualitas dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja di Kecamatan Sanrobone. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar, yang sekaligus menunjukkan komitmen kecamatan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan**

   Pada tahun 2025 ditetapkan target IKM sebesar 91,21. Namun, pada Triwulan II, realisasi capaian belum tersedia karena proses survei kepuasan masyarakat masih berlangsung. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian survei agar dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas layanan.

2. **Persentase Pelayanan Masyarakat yang Selesai Tepat Waktu**

   Target pelayanan tepat waktu pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 85%, sementara hasil realisasi pada triwulan II sudah mencapai 75% dengan jumlah layanan yang masuk sebanyak 225 Layanan dan yang sudah diselesaikan tepat waktu sebanyak 170 Layanan. Pencapaian ini terjadi karena adanya kesadaran dan kompetensi petugas serta dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

3. **Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**
   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 84%, sementara realisasi triwulan II sudah mencapai 6 6 % dengan target aduan dalam setahun sebanyak 12 aduan dan sudah diselesaikan sebanyak 8 aduan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan kecamatan semakin meningkat, karena mayoritas aduan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Meski demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, agar capaian di masa mendatang semakin optimal.
4. **Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Sanrobone**
   Target yang ditetapkan adalah memperoleh nilai B (68,20). Pada Triwulan II tahun 2025, penilaian SAKIP oleh Inspektorat belum dilaksanakan sehingga belum terdapat data realisasi. Oleh karena itu, Kecamatan perlu mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar saat penilaian dilakukan hasilnya dapat sesuai target.
5. **Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Sanrobone**
   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 78%, dan realisasi pada triwulan II juga telah mencapai 72%, sehingga capaian ini hampir memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, dari 11 ASN di Kecamatan Sanrobone, sebanyak 8 ASN mampu mengoperasikan komputer, sehingga menghasilkan tingkat literasi digital sebesar 72%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital sudah cukup baik untuk mendukung tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Namun, peningkatan kapasitas masih tetap diperlukan agar literasi digital ASN semakin optimal dalam menunjang efektivitas, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sanrobone

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Sanrobone melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Belum Optimal pemanfaatan sarana teknologi informasi.
4. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Peran serta masyarakat dalam memelihara Sarana dan Prasarana pelayanan

umum belum optimal.
6. Data terkait sarana dan prasarana pelayanan umum belum tersedia di kecamatan.
7. Belum optimalnya ketahanan sosial, ekonomi, dan ketahanan ekologi di desa yang mengakibatkan masih berstatus desa berkembang.
8. Kurangnya pemahaman pengurus lembaga kemasyarakatan tentang tugas dan fungsinya.
9. Kurangnya komunikasi dan informasi antara lembaga kemasyarakatan dengan masyarakat.

Adapun Rekomendasi untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sanrobone:

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan disosialisasikan kepada masyarakat.
2. Memberikan pelatihan kepada staf kecamatan untuk meningkatkan keterampilan dalam pelayanan publik.
3. Layanan yang lebih cepat, mudah, dan sesuai harapan masyarakat.
4. Melakukan inventarisasi dan evaluasi sarana-prasarana yang ada.
5. Mengajukan anggaran untuk pengadaan dan perbaikan fasilitas yang mendesak.
6. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan sarana-prasarana.
7. Meningkatkan peran camat sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat.
8. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi untuk memotivasi kinerja.
9. Membentuk tim khusus penanganan konflik yang terdiri dari perwakilan masyarakat, aparat kecamatan, dan keamanan.
10. Menjalin komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal.
11. Mengadakan program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kedamaian.
12. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendukung pembangunan.
13. Membuat laporan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi.
14. Menyusun prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan utama masyarakat.

Mengawasi penggunaan anggaran melalui sistem akuntabilitas yang

transparan.Tabel II-3
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
1	Persentase nilai IKM baik terhadap pelayanan Kecamatan	Sesuai		Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas dan fungsi ASN di Kecamatan Informasi pelayanan yang mudah diakses
2	Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan umum yang terpelihara dengan baik	Belum Tercapai	Peran serta masyarakat dalam memelihara Sarana dan Prasarana pelayanan umum belum optimal Data terkait sarana dan prasarana pelayanan umum belum tersedia di Kecamatan	
3	Persentase tingkat pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Sesuai		Berkembangnya lembaga kemasyarakatan yang ada di masyarakat dan kapasitas dalam mengelola lembaga kemasyarakatan di kelurahan cukup memadai
4	Tingkat Angka Kriminalitas	Sesuai		Telah dibentuk satu forum untuk kewaspadaan dini terhadap permasalahan ketentraman dan ketertiban di masyarakat termasuk bencana serta telah eksisnya siskamling sampai ke tingkat lingkungan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sanrobone

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sanrobone melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kondisi kantor kurang memadai;
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana di Kecamatan Sanrobone;
3. Terbatasnya elemen data dan informasi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Belum dilaksanakannya pengukuran terhadap kepuasan masyarakat;
5. Sudah terbentuk satu forum untuk kewaspadaan dini terhadap permasalahan di masyarakat termasuk bencana, namun peranannya masih perlu lebih dioptimalkan;
6. Belum tersedianya database di tingkat Kecamatan yang bisa menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan dasar maupun pelayanan keadministrasian

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II-4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Takalar

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sanrobone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah**	**100%**	**1.817.016.600**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah**	**100%**	**1.817.016.600**	
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kecamatan SANROBONE**	**Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**12.000.000**	**Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan SANROBONE**	**Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**12.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA – SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA – SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kecamatan SANROBONE**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**	**100%**	1.617.016.600	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan SANROBONE**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**	**100%**	1.617.016.600	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	1.617.016.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	1.617.016.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Baik**	**100%**	**3.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Baik**	**100%**	**3.000.000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Adminstrasi Umum yang Baik**	**100%**	**324.785.612**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Adminstrasi Umum yang Baik**	**100%**	**324.785.612**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	45.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	45.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**625.134.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**625.134.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg Dipelihara**	**100%**	**57.780.388**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg Dipelihara**	**100%**	**57.780.388**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.290.388	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.290.388	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang di Pelihara	65 Unit	16.890.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang di Pelihara	65 Unit	16.890.000	
2	**PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Sarana Prasarana Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**53.900.000**	**PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Sarana Prasarana Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**53.900.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** **Persentase Terpenuhinya Koordinasi Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal**	**100%**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** **Persentase Terpenuhinya Koordinasi Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal**	**100%**		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	15.000.000	
	Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan** **Cakupan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan** **Persentase Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	**100%**	**22.300.000**	**Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan** **Cakupan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan** **Persentase Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	**100%**	**22.300.000**	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	7.500.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	7.500.000	
	Fasilitasi Percepatan Standar pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		Fasilitasi Percepatan Standar pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.9800.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.800.000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dengan Kondisi Baik**	**100%**	**9.800.000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dengan Kondisi Baik**	**100%**	**9.800.000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	9.800.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	9.800.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kecamatan SANROBONE**	**Persetase Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan yang Dilaksanakan Kecamatan**	**100%**	**9.800.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persetase Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan yang Dilaksanakan Kecamatan**	**100%**	**9.800.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9.800.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9.800.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100%**	**95.700.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100%**	**95.700.000**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina di Kelurahan**	**100%**	**73.200.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina di Kelurahan**	**100%**	**73.200.000**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10 Lembaga	73.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10 Lembaga	73.200.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan SANROBONE**	**Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan**	**100%**	**5.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan SANROBONE**	**Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan**	**100%**	**5.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Sinergitas Kepolisian Negara,Tentara Nasional Indonesia dan**	**100%**	**5.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Sinergitas Kepolisian Negara,Tentara Nasional Indonesia dan**	**100%**	**5.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ketentraman dan Ketertiban Umum		**Instansi Vertikal di Kecamatan** **Persentase Keterlibatan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Pemenuhan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Instansi Vertikal di Kecamatan** **Persentase Keterlibatan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Pemenuhan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.800.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.800.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	9.800.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	9.800.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom up planning*) berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, assosiasi-assosiasi maupun perguruan tinggi berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Kecamatan Sanrobone Tahun 2026.

Berdasarkan uraian di atas, usulan Musrenbang Kabupaten Takalar Tahun 2026 yang ditujukan kepada Kecamatan Sanrobone untuk Rencana Kerja Tahun 2026 dilihat pada Tabel II-6.

Tabel II-5
Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kabupaten Tahun 2026 Kabupaten Takalar

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
1	2	3	4	5
1	Pembuatan tanggul penahan Abrasi	Ujung Baji	Panjang tanggul beton yang akan dibangun	1000 Meter
2	Pembuatan tanggul penahan banjir air sungai	Ujung Baji	Panjang tanggul beton yang akan dibangun	500 Meter
3	Rehabilitasi Jembatan	Ujung Baji	Panjang jembatan yang akan dibangun	10 Meter
4	Bedah rumah	Ujung Baji	Banyaknya Rumah yang akan di Perbaiki	100 unit
5	Rehab jembatan BT. Panno	Tonasa	Panjang jembatan yang akan direhab	7 meter
6	Perbaikan lapangan/Sarana dan prasarana Olah raga Sanrobone	Sanrobone	Luas lapangan yang akan di perbaiki	70X 100 meter
7	Pegadaan HandTraktor, mesin Pompa air, alat tanam jagung ,bibit, pupuk urea, hansprayer	Tonasa	Jumlah Pegadaan HandTraktor, mesin Pompa air, alat tanam jagung ,bibit, pupuk urea, hansprayer	Unit
8	Perbaikan Jalan Desa	Tonasa	Panjang Jalan Desa yang akan diperbaiki	2.500 Meter
9	Pengadaan lapangan	Tonasa	Jumlah lapangan yang akan diadakan	100 X 100 Meter
10	Pengadaan sapi Indukan	Tonasa	Jumlah sapi yang akan diadakan	100 ekor
11	Perbaikan jalan tani	Sanrobone	Panjang jalan tani yang akan di perbaiki	1000 meter
12	Perbaikan Jalan Desa	banyuanyara	Panjang Jalan Desa yang akan diperbaiki	2.000 Meter
13	Pengadaan itik, kambing	tonasa	Jumlah itik, kambing yang dibutuhkan	5.000 ekor
14	Pengadaan bibit unggas	Sanrobone	Jumlah ungags yang dibutuhkan	5.000 ekor

15	Pemeliharaan situs budaya dan pelaksanaan event budaya	Sanrobone	Jumlah situs yang dipelihara	5 unit
16	Pembuatan Irigasi pertanian	banyuanyara	Panjang irigasi yang akan dibangun	1.500 Meter
17	Pengadaan Handtraktor roda 2	Sanrobone	Jumlah Handtraktor yang akan diadakan	10 unit
18	Pengadaan traktor Roda 4	Sanrobone	Jumlah traktor yang akan diadakan	5 unit
19	Pembuatan sarana dan pasarana olahraga	Pa'dinging	Jumlah sarana yang akan dibangun	4 unit
20	Peningkatan jalan tani Bontopanno	Pa'dinging	Panjang jalan yang akan diperbaiki	1.000 meter
21	Pengadaan lahan pemakaman dusun pa'dinging II	Pa'dinging	Jumlah pemakaman yang akan diadakan	1 hektar
22	Pengadaan lampu jalan dusun bilaya	Pa'dinging	Jumlah lampu yg akan diadakan	30 unit
23	Perbaikan Drainase dusun bontopanno	Pa'dinging	Panjang drainase yang akan diperbaiki	800 meter
24	Pembuatan tanggul penahan ombak	Laguruda	Panjang tanggul yang akan dibuat	1.000 meter
25	Peningkatan jalan tani	Laguruda	Panjang jalan tani yang akan dibuat	1.500 meter
26	Pengadaan alat penangkap ikan	Laguruda	Jumlah alat penangkap ikan	20 unit
27	Pengadaan bibit udang	Laguruda	Jumlah bibit yang akan diadakan	1 juta ekor

Sumber : Usulan Musrenbang Kelurahan di Kecamatan Sanrobone Tahun 2024.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SANROBONE

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 yang dioperasinalisasikan oleh perangkat daerah dalam Rencana Kerja Peranngkat Daerah perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026 yaitu **"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif"**. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi;
2) PDRB per kapita (juta);
3) Kontribusi PDRB Provinsi;
4) Tingkat Kemiskinan;
5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
6) Indeks Rasio Gini;
7) Indeks Modal Manusia;
8) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan
9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan; pemerataan ekonomi, dan
7. **Prioritas Nasional 7**: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel 3.1.
17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya	2. Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	

Sumber data : RKP Tahun 2026

Penetapan tujuan dan sasaran Kecamatan Sanrobone menjadi dasar dalam perumusan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Adapun **Tujuan Renstra** Kecamatan Sanrobone Tahun 2025 – 2029 adalah "Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik", untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
2. Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Pada Kantor Sanrobone

Keselarasan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sanrobone Tahun 2025–2029 terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tujuan RPJMD Tahun 2025 - 2029	Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029	Tujuan/ Sasaran Renstra Kecamatan Sanrobone Tahun 2025 - 2029
T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik	S4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	T. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan di
		S1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
		S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Sanrobone

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Sanrobone											
- Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan (%)	87,04	91,21	92	93	94	95	96	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu (%)	80	85	86	88	90	92	95	
			Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	82	84	85	90	92	94	97	
		Meningkatnya Tata Kelola Pada Kantor Sanrobone	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan (Angka)	62,58	65	68	70	72	74	75	
			Tingkat Literasi Digital ASN Kantor Kecamatan (%)	75	78	80	82	84	85	88	

Sumber : Renstra Kecamatan SANROBONE Tahun 2025-2029; diolah

Tabel III.3.

Tujuan, Sasaran Serta Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(07)*
- Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan (%)	87,04	92
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu (%)	80	86
			Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	82	85
		Meningkatnya Tata Kelola Pada Kantor Sanrobone	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan (Angka)	62,58	68
			Tingkat Literasi Digital ASN Kantor Kecamatan (%)	75	80

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SANROBONE

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone Tahun 2025 dengan total pagu Rp **1.884.394.211** (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Empat Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV-1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SANROBONE						**1.884.394.211,00**							**160.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.884.394.211,00**							**160.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.884.394.211,00**							**160.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.815.610.611,00**						**-**	**126.000.000,00**	
		[Terpenuhinya Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi**	**95**	**90**	**92**	**93**	**1.815.610.611,00**	-	-	-	-	-	-	**126.000.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.589.400,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabe	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE

												l dan inovatif Pemerintah Digital				
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.484.600,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.997.600,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE

												Pemerintah Digital				
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone Tahun 2026 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sanrobone, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan

berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2026.

Takalar, Mei 2025
Camat Sanrobone

ASRARUDDIN MUIS, ST. M.A.P
Pangkat: Pembina TK.I
NIP. 197705082003121015





RENJA PERUBAHAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Telp. (0418) 22291
Fax. (0418) 323499
Email. dlhptakalar@gmail.com

2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2025 – 2029 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2025 menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Takalar, Mei 2025

Kepala Dinas,

Hj. FATMAWATI M, S.STP.,M.Adm.Pemb
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 197511111 199511 2 001

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR i

DAFTAR PUSTAKA ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Landasan Hukum **2**

1.3 Maksud dan Tujuan **3**

1.4 Sistematik Penulisan **3**

BAB II 6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sampai Dengan Triwulan I **6**

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025 yang Terakomodir diAPBD 2025 16

2.1.2 Rekapitulasi Jumlah Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025 17

2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025 17

2.1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025 19

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sampai Dengan Triwulan I **21**

2.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025 21

2.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025 26

2.2.3 IndikatorTujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 30

2.3 *Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025* **30**

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025 sampai dengan Triwulan ke II 30

2.3.2 *Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025 sampai dengan Triwulan ke II* 31

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025 Triwulan selanjutnya 32

BAB III 33

TUJUAN DAN SASARAN 33

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional **33**

BAB IV 34

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 34

BAB V 77

PENUTUPAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 7
Tabel II. 2 16
Tabel II. 3 17
Tabel II. 4 19
Tabel II. 5 21
Tabel II. 6 23

Tabel III. 1 30

Tabel IV. 1 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Perubahan Renja Bappelitbangda dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) DLHP Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan (DPPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang sesuai dengan Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan perundangan lainnya yang mengatur Standar Operasional Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang diacu dalam perencanaan dan penganggaran di Badan/Dinas/Kecamatan sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab.Takalar Tahun 2024 adalah:

1) Untuk menjabarkan program dan kegiatan renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan ke dalam program/kegiatan tahunan.
2) Menyiapkan Acuan Bagi RAPBD.
3) Menyiapkan Kerangka Evaluasi Kinerja Program/kegiatan tahunan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

1.4 Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Perubahan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sampai Triwulan I Tahun 2025

Bab ini berisi Sub Bab tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan pada Triwulan I Tahun 2025 dan Analisis Kinerja Pelayanan Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar.

BAB IV. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

BAB V. Penutup

Bab V berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

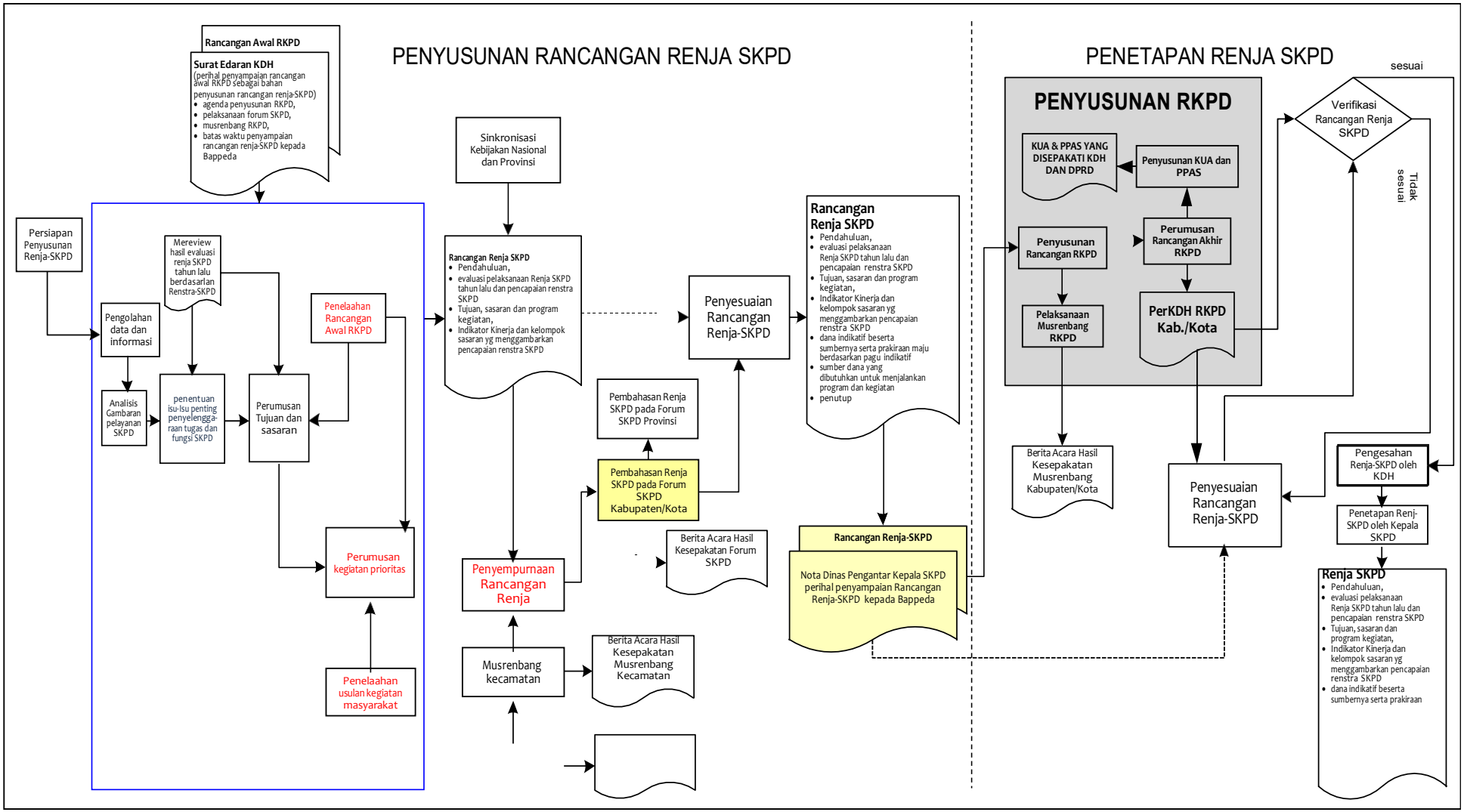
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)
agenda penyusunan RKPD,
pelaksanaan forum SKPD,
musrenbang RKPD,
batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-Isu penting penyelengga-raan tugas dan fungsi SKPD
Perumusan Tujuan dan sasaran
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
sesuai
Tidak sesuai
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
Penetapan Renj-SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sampai Dengan Triwulan I

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini:

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;

Tabel II. 1
FORMULASI EVALUASI HASIL RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yangdievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**100%**	**994.600**	**0,00%**	**439.000**	**0,00%**	**439.000**	**0,00%**	**44,14%**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten**	**Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten**	**100%**	**994.600**	**0,00%**	**439.000**	**0,00%**	**439.000**	**0,00%**	**44,14%**
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perencanaan Perangkat Daerah	1	994.600	-	439.000	-	439.000	0,00%	44,14%
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Jumlah Lokasi yang dibebaskan**	**100%**	**104.877.650**	**100%**	**2.629.860**	**100%**	**2.629.860**	**100%**	**2,51%**
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyelesaian Masalah Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh**	**100%**	**104.877.650**	**100%**	**2.629.860**	**100%**	**2.629.860**	**100%**	**2,51%**

					Kabupaten/Kota	**pemerintah daerah Kabupaten/kota**							
2	10	05	2.01	0002	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen **Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot**	1	104.877.650	1	**2.629.860**	1	**2.629.860**	**100,00%**	2,51%
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase tersedianya tanah objek landreformyang siap di redistribusikan**	**100%**	**990.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
2	**10**	**06**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan hasil penetapan subjek dan objek retribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**990.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
2	10	06	2.01	0004	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen **Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**	1	990.000	**-**	-	**-**	-	**0,00%**	**0,00%**
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Tanah Aset pemerintah Daerah yang bersertifikat**	**100%**	**966.200**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
2	**10**	**08**	**2.02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	**100%**	966.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi	1	966.200	**-**	-	**-**	-	**0,00%**	**0,00%**

2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PersentaseProgram Perencanaan Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**8.170.799.690**	**18%**	**1.385.602.421**	**18%**	**1.385.602.421**	**18,33%**	**16,96%**
2	**11**	**01**	**2.01**		**PERENCANAAN,PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase capaian laporan dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**21.347.690**	**18%**	**7.886.050**	**18,18%**	**7.886.050**	**18,18%**	**36,94%**
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	8.575.700	-	7.274.050	1	7.274.050	50%	85%
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	3.167.990	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	2.819.000	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	1	3.458.000	**1**	612.000	**1**	612.000	**100%**	**18%**
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	1	1.335.000	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	936.000	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**

2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	**1.056.000**	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penganggaran Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4.313.837.970**	**15%**	**819.046.941**	**15%**	**819.046.941**	**15%**	**19%**
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546	4.296.687.630	156	812.039.441	156	812.039.441	29%	26%
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	**1.124.100**	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**12**	**5.447.300**	**3**	-	**3**	-	**25%**	**0,00%**
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	**5.226.740**	1	5.200.250	1	5.200.250	100%	99%
2	11	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah ketersediaan laporan hasil pemeriksaan	**1**	**1.820.300**	**1**	1.807.250	**1**	1.807.250	100%	99%
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran yang disusun	12	2.150.400	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**
2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**12**	**1.381.500**	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**
2	**11**	**01**	**2,03**		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Lap[oran Pengadministrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**2.998.700**	**7%**	**436.800**	**7%**	**436.800**	**7%**	**15%**

2	11	01	2,03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	1	**996.800**	**1**	**436.800**	**1**	**436.800**	**100%**	44%
2	11	01	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**Terlaksananya** Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**1**	999.700	**-**	-	**-**	-	**0,00%**	**0,00%**
2	11	01	2,03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**12**	**992.200**	**-**	-	**-**	-	**0,00%**	**0,00%**
2	**11**	**01**	**2,04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengadministrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.977.500**	**50%**	**326.500**	**50%**	**326.500**	**50%**	**16,51%**
2	11	01	2,04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen rencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	**1**	1.010,000	**1**	326.500	**1**	326.500	**100%**	**33%**
2	11	01	2,04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya data Objek, subjek dan Wajib Retribusi Daerah	**1**	993.000	**-**	-	**-**	-	**0,00%**	**0,00%**
2	**11**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pengadministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**4.049.250**	**25%**	**687.250**	**25%**	**687.250**	**25%**	**17%**
2	11	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan/ data pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun	1	999.250	1	**687.250**	1	**687.250**	**100%**	**69%**
2	11	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mahir dibidangnya	**1**	960.000	**-**	-	**-**	-	**0,00%**	**0,00%**
2	11	01	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	**1.240.000**	**-**	-	**-**	-	**0,00%**	**0,00%**

2	11	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1	850.000	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**
2	**11**	**01**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Cakupan Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**7.090.000**	**20%**	**2.000.000**	**20%**	**2.000.000**	**20%**	**28%**
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	1	**1.010.000**	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pagawai yang difasilitasi	1	1.440.000	-	-	-	-	0,00%	**0,00%**
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlai Biaya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	3.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100%	**67%**
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1.210.000	-	-	-	-	0,00%	**0,00%**
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Frekuensi rapat koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	430.000	-	-	-	-	0,00%	**0,00%**
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**257.307.560**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	0,00%	**0,00%**
2	11	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	**257.307.560**	-	-	-	-	0,00%	**0,00%**
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**3.476.991,020**	**7%**	**551.499.800**	**7%**	**551.499.800**	**7%**	**16%**

2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air yang disediakan	**12**	**17.165.500**	**3**	**3.089.800**	**3**	**3.089.800**	**25%**	**18%**
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umu kantor	12	**159.600.000**	6	4.200.000	6	4.200.000	50%	3%
						Jumlah Tenaga Sopir	**180**	**2.988.300.000**	**28**	**39.750.000**	**28**	**39.750.000**	**16%**	**1%**
						Jumlah Tenaga Keamanan	**24**	**16.800.000**	**4**	**2.800.000**	**4**	**2.800.000**	**17%**	**17%**
						Jumlah tenaga Kebersihan	**2.000**	**245.650.000**	**300**	**501.660.000**	**300**	**501.660.000**	**15%**	**204%**
						Jumlah Tenaga Yang dibayarkan iuran jaminan kesehatan	**3.000**	**49.475.520**	-	-	-	-	0,00%	**0,00%**
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**85.210.000**	**5%**	**3.719.080**	**5%**	**3.719.080**	**5%**	**4%**
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**15**	**82.830.000**	**3**	**3.719.080**	**3**	**3.719.080**	**20%**	**4%**
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	**50**	**2.380.000**	-	-	-	-	0,00%	**0,00%**
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**100%**	**1.036.500**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk yang sesuai standa**	**100%**	**1.036.500**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	**1**	**1.036.500**	-	-	-	-	0,00%	**0,00%**

2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**100%**	**8.321.300**	**50%**	**1.119.700**	**50%**	**1.119.700**	**50,00%**	**13,46%**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup**	**100%**	**7.179.700**	**50%**	**1.119.700**	**50%**	**1.119.700**	**50,00%**	**15,60%**
2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	3.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1.119.700	1	1.119.700	1	1.119.700	100%	100%
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen status lingkungan hidup yang disusun	1	1.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilakukan	1	1.860.000	1	1.860.000	1	1.860.000	100%	100%
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup**	**100%**	**1.141.600**	**100%**	**1.141.600**	**100%**	**1.141.600**	**100%**	**100%**
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan	1	1.141.600	1	1.141.600	1	1.141.600	100%	100%
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Indeks Kwalitas Tutupan Lahan**	**100%**	**156.293.900**	**25%**	**10.156.700**	**25%**	**10.156.700**	**25,00%**	**6,50%**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk yang sesuai standa**	100%	156.293.900	25%	10.156.700	25%	10.156.700	25,00%	6,50%

2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	12	156.293.900	3	10.156.700	3	10.156.700	25%	6%
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**100%**	**936.000**	**100%**	**936.000**	**100%**	**936.000**	**100%**	**100%**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan atau pemenuhan ketentuan persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan**	**100%**	**936.000**	**100%**	**936.000**	**100%**	**936.000**	**100%**	**100%**
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	**Jumlah rekomendasi dan atau pemenuhan ketentuan persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan**	1	**936.000**	1	**936.000**	1	**936.000**	100%	100%
2	**11**	**11**			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Pengelolaan Sampah**	**100%**	**1.619.830.400**	**25%**	**116.393.274**	**25%**	**116.393.274**	**25,00%**	**7,19%**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Jumlah Penurunan Pengelolaan Sampah**	100%	1.619.830.400	25%	116.393.274	25%	116.393.274	25,00%	7,19%
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi** dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	12	227.946.760	3	29.826.250	3	29.826.250	25%	13%
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12	1.391.883.640	3	86.567,024	3	86.567,024	25%	6%

Sumber Data: Laporan Monev TW.I Tahun 2025

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025 yang Terakomodir diAPBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada table sebagai berikut :

Tabel II. 2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	10	19	47	10	19	53
TOTAL		**10**	**19**	**47**	**10**	**19**	**53**

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 10, jumlah kegiatan 19, dan jumlah sub kegiatan 47, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 10, jumlah indikator kegiatan sebanyak 19, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 53

2.1.2 Rekapitulasi Jumlah Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan IIuntuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat padatabel berikut.

Tabel II. 3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Kabupaten Takalar Tahun 2025
Hingga Triwulan I

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	10.065.046.240	1.517.276.955	30,69%	15,07%
TOTAL		**10.065.046.240**	**1.517.276.955**	**30,69%**	**15,07%**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp. 10.065.046.240 Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 15,07 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 30,69 persen.

2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori

Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 50 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 50 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 50 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebanyak 10 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 6 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 2 program (realisasi >10-20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 2 program (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dapat dijelaskan bahwa terdapat 19 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 8 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang (realisasi >10-20 persen) sebanyak 6 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 5 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 47 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 31 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah (realisasi 0-10 persen), sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian

realisasi pendanaan sedang (realisasi >10-20 persen) terdapat 3 sub kegiatan, dan 13 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 4

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 50%		0 - 10%	>10 – 10%	> 20%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	10	6	2	2	19	8	6	5	47	31	3	13
TOTAL		**10**	**6**	**2**	**2**	**19**	**8**	**6**	**5**	**47**	**31**	**3**	**13**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

2.1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** untuk

perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 50 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 50 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 50 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dapat dijelaskan bahwa dari 10 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 10 persen terdapat 4 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 10-20 persen) terdapat 1 program, selebihnya sebanyak 5 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 20 persen pada triwulan II Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 19 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 8 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 10 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang (realisasi >10-20 persen) terdapat 3 kegiatan, selebihnya terdapat 8 kegiatan yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 47 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 26 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang (realisasi >10-20 persen) sebanyak 1 kegiatan, selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 20 sub kegiatan, yaitu pencapaian

lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2025.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II. 5

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10 %	>10 – 20 %	> 20 %		0 - 10 %	>10 – 20 %	> 20 %		0 - 10 %	>10 – 20 %	> 20 %
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	10	4	1	5	19	8	3	8	47	26	1	20
TOTAL		**10**	4	1	5	**19**	8	3	8	**47**	26	1	20

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sampai Dengan Triwulan I

Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Dinas yang meliput pengkoordinasian kegiatan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan.

2.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II. 6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar

	INDIKATOR	**Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026**	**Realisasi Capaian**	**INDIKATOR**	**Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**			**Realisasi Capaian**	**Proyeksi**		**Catatan Analisis**
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,51	60,25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	60,27	60,29	60,30		60,29	60,30	
	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,98	59,06	Indeks Kualitas Air (Indeks)	60,00	60,25	60,25		60,25	60,25	

	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,69	83,79	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	92,60	92,50	92,40		92,50	92,40	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	30,39	31,18	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	32	32	32		32	32	
	Persentase sampah yang dikelola melalui 3R	8,63	50	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	90	92	92		92	92	
	Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100	60	Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (%)	100	100	100		100	100	
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap luas Wilayah Perkotaan		30	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (%)	100	100	100		100	100	

	PersentasePenetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum		60	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (%)	80	80	80		80	80	
	IndeksReformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup danPertanahan	98	99	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (Nilai)	66	67	68		67	68	
	Nilai Sakip Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	CC	B	Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (%)	75	80	80		80	80	

2.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025

NO	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Bidang Pertanahan							
1	Persentase Penetapan tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	25,42%	50%	60%	70%	80%	80 %
2	Jumlah Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Lokasi	15	15	18	20	23	23

3	Persentase penyelesaian maslaah ganti kerugian dan santunan tanah	%	100%	75%	80%	85%	90%	90 %
4	Persentase tanah Untuk Masyarakat	%	0%	30%	35%	40%	45%	45 %
5	Persentase pengajuan hak - hak atas tanah yang diurus	%	60,15%	65%	70%	75%	80%	80 %
6	Persentase tanah yang telah diukur	%	50%	60%	70%	80%	85%	85 %
7	Persentase konflik, sengketa dan perkara tanah yang tertangani	%	50%	55%	60%	62%	65%	65 %
	Urusan Bidang Lingkungan Hidup							
8	Persentase perencanaan bidang lingkungan hidup	%	60	80	80	85	85	
9	Indeks kualitas air	Indeks	69.51	58.95	59.05	59.10	59.14	65, 00

10	Indeks kualitas udara	Indeks	85.69	83.89	83.99	80.99	81.56	84,00
11	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	30.39	31.18	32.24	32.24	32.25	31,50
12	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap luas wiayah perkotaan	%	59,131,75	30%	30%	30%	30%	30%
13	Jumlah limbah B3 yang dikelola	%	0%	30%	35%	40%	45%	45%

14	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100%	50%	60%	70%	80%	80%
15	Persentase pendidikan dan pelatihan masyarakat yang dilaksanakan	%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
17	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	100%	80%	85%	90%	95%	95%
18	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	%	72.13%	75%	80%	85%	90%	90%
	Urusan Pemerintahan Daerah							

19	Persentase pemenuhan urusan penunjang perangkat daerah	%	92.5%	99%	99%	99%	100%	100%

2.2.3 IndikatorTujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar tidak ada.

2.3 *Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025*

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025 sampai dengan Triwulan ke II

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan keduadipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
3. Masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan yang ditimbulkan oleh penggabungan program dan kegiatan yang mengalami peleburan.

4. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
5. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.

Beberapa komponen kegiatan pada sistem aplikasi perencanaan terkait kodefikasi program/kegiatan dan penganggaran mengalami perubahan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan ini berdampak pada kode rekening belanja.

2.3.2 *Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025 sampai dengan Triwulan ke II*

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;

7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2025 Triwulan selanjutnya

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2025 diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memilikisertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel;
3. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
4. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan *e-government* dalam penyelengaraan pelayanan publik dan peningkatan kinerja pembangunan.
6. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
7. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada;

1. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai Renstra dan RPJMD.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan danpenganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yaitu **"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah serta meningktanya tata kelola pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan",** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 5 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan.
2. Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Terpadu
3. Sasaran 3: Meningkatnya penetapan tanah pemda untuk pengembangan fasilitas umum
4. Sasaran : 4 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas lingkungan Hidup dan

Pertanahan

5. Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pad Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III. 1
Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Lingkugan Hidup daerah	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**60,25**	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah serta meningktanya tata kelola pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	
Sasaran 1.1: Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kuaitas Air (IKA)	**59,06**	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	60,27
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	**83,79**		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	60,00

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	**31,18**		Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	92,60
	Persentase sampah yang dikelola melalui 3 R	**50%**	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Terpadu	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	90
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	**60%**	Meningkatnya penetapan tanah pemda untuk pengembangan fasilitas umum	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	80

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
	Pemerintah Daerah				
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap luas Wilayah Perkotaan	**30%**	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas lingkungan Hidup dan Pertanahan	Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (%)	100
Sasaran 1.2: Terpenuhinya Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	**Persentase** Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	**60%**		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (%)	100
Tujuan 2: Meningkatnya Tata Kelola	Indeks Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pad Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Hasil penilaian SAKIP oleh	66

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
pada Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	**99%**		Inspektorat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (Nilai)	
Sasaran 2.1: Meningkatnya Kepatuhan terhadap standar pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Sakip Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	**B**		Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (%)	75

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini : **Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.10.04.2.01.0005Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	257.139.520
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	104.565.650
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	165.000
	2.10.08PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	728.000
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	624.000
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.050.000
			2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan	1.119.700

			kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	1.100.000
			2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	1.860.000
		2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1.141.60
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH	153.943.720
	2.11.0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	936.000
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	619.195.300,
			2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.389.959.700

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dengan rincian 6 (enam) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan, 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan, dengan total pagu Rp 13.194.925.147 (Tiga Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	KPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN							13,194,925,147.00	10,065,046,240.00	10,860,258,550.00	-2,334,666,597.00							12,664,591,987.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13,194,925,147.00	10,065,046,240.00	10,860,258,550.00	-2,334,666,597.00							12,664,591,987.00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAH							2,020,000,000.00	107,828,450.00	362,598,170.00	-1,657,401,830.00							2,565,000,000.00	

		AN BIDANG PERTANAHAN																	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**-**				**-**	**-**	**10,000,000.00**	**994,600.00**	**257,139,520.00**	**40,000,000.00**							**50,000,000.00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10,000,000.00	994,600.00	257,139,520.00	247,139,520.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000.00	994,600.00	257,139,520.00	247,139,520.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hid			50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAN

			Kabupaten/Kota										Kel/Desa			up 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			AHAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**2,000,000,000.00**	**104,877,650.00**	**104,565,650.00**	**500,000,000.00**							**2,500,000,000.00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2,000,000,000.00	104,877,650.00	104,565,650.00	-1,895,434,350.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		2,500,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000,000.00	104,877,650.00	104,565,650.00	-1,895,434,350.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			2,500,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSI**	**-**				**-**	**-**	**5,000,000.00**	**990,000.00**	**165,000.00**	**5,000,000.00**							**10,000,000.00**	

		MUM DAN TANAH ABSENTEE																	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5,000,000.00	990,000.00	165,000.00	-4,835,000.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	990,000.00	165,000.00	-4,835,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelest			10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

			Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													arian Lingkungan Hidup				
4.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**-**				**-**	**-**	**5,000,000.00**	**966,200.00**	**728,000.00**	**0.00**							**5,000,000.00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-				-	-	5,000,000.00	966,200.00	728,000.00	-4,272,000.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000.00	966,200.00	728,000.00	-4,272,000.00	Kab. Takalar, Pattallas	DANA ALOKASI UMU	-	5. Pelestarian			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN

			Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.										sang, Kalabbirang	M (DAU)		Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup				HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**11,174,925,147.00**	**9,957,217,790.00**	**10,497,660,380.00**	**-677,264,767.00**							**10,099,591,987.00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5,996,010,487.00**	**8,170,799,690.00**	**8,326,730,360.00**	**-104,418,500.00**							**5,891,591,987.00**	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perang	-				-	-	70,000,000.00	21,347,690.00	17,259,360.00	-52,740,640.00			-	5. Pelestarian Lingkunga	-		62,500,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

		kat Daerah													n Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup				PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000.00	8,575,700.00	8,575,700.00	-6,424,300.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			20,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Lapora				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	3,167,990.00	2,547,990.00	-7,452,010.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkunga			10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

			n Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										bbirang			n Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup				PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	2,819,000.00	1,144,000.00	-8,856,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Lapora				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	3,458,000.00	2,838,000.00	-7,162,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkunga			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

			n Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD										Semua Kel/ Desa			n Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup				PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	1,335,000.00	312,000.00	-9,688,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000.00	936,000.00	1,248,000.00	-3,752,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkunga			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										Semua Kel/ Desa			n Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup				PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000.00	1,056,000.00	593,670.00	-9,406,330.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			2,500,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5,174,986,487.00	4,313,837,970.00	4,312,732,570.00	-862,253,917.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		5,158,867,987.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan Orang/bulan	12 bulan Orang/bulan	5,109,986,487.00	4,296,687,630.00	4,296,665,530.00	-813,320,957.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5,126,850,187.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	1,124,100.00	981,300.00	-9,018,700.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PADYANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			1,017,800.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000.00	5,447,300.00	4,952,300.00	-47,700.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PADYANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000.00	5,226,740.00	5,226,740.00	-4,773,260.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PADYANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1,820,300.00	1,820,300.00	-3,179,700.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

																Hid up				
	2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000.00	2,150,400.00	2,150,400.00	-17,849,600.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisi				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	1,381,500.00	936,000.00	-14,064,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkunga			1,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

			s Prognosis Realisasi Anggaran										bbirang			n Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			PERTANAHAN
	2.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	3,000,000.00	2,988,700.00	2,907,000.00	-93,000.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		11,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	996,800.00	996,800.00	-3,200.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PADYANG SAH DAN ALOKASI	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAN

														UMUM (DAU)		5. Pelestarian Lingkungan Hidup			AHAN
	2.10.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	999,700.00	918,000.00	-82,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PADYANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000.00	992,200.00	992,200.00	-7,800.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PADYANG SAH DANA ALOKASI	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			1,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAN

			Barang Milik Daerah pada SKPD											UMUM (DAU)		5. Pelestarian Lingkungan Hidup			AHAN
	2.10.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	2,000,000.00	1,977,500.00	1,519,600.00	-480,400.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1,000,000.00	984,500.00	984,500.00	-15,500.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelest			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

															aria n Lin gku nga n Hid up				
	2.10.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1,000,000.00	993,000.00	535,100.00	-464,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	111,000,000.00	4,049,250.00	999,250.00	-110,000,750.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lin	-		115,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

															gkungan Hidup				
	2.10.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	1,000,000.00	999,250.00	999,250.00	-750.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	10,000,000.00	960,000.00	0.00	-10,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lin			10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

															gkungan Hidup				
	2.10.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				55 Orang	55 Orang	50,000,000.00	1,240,000.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-				10 Orang	10 Orang	50,000,000.00	850,000.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lin			50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

			Undangan													gkungan Hidup			
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	129,000,000.00	7,090,000.00	5,880,000.00	-123,120,000.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		132,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,000,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	-990,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkunga			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

															n Hid up				
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100,000,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	-98,560,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			100,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-9,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lin			12,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

															gkungan Hidup				
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000.00	1,210,000.00	0.00	-5,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10,000,000.00	430,000.00	430,000.00	-9,570,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lin			10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

															gkungan Hidup				
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	120,000,000.00	257,307,560.00	256,731,560.00	136,731,560.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	120,000,000.00	257,307,560.00	256,731,560.00	136,731,560.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan			50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

															Hid up				
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	186,024,000.00	3,476,991,020.00	3,476,991,020.00	3,290,967,020.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		152,224,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	127,224,000.00	17,165,500.00	17,165,500.00	-110,058,500.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan			127,224,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

															Hid up				
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	58,800,000.00	3,459,825,520.00	3,459,825,520.00	3,401,025,520.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			25,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	200,000,000.00	85,210,000.00	251,710,000.00	51,710,000.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan	-		200,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

																Hid up				
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	50,000,000.00	82,830,000.00	82,830,000.00	32,830,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak				45 Unit	45 Unit	150,000,000.00	2,380,000.00	168,880,000.00	18,880,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lin			150,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

			dan Perizinannya												gkungan Hidup				
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**20,000,000.00**	**1,036,500.00**	**624,000.00**	**0.00**							**20,000,000.00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	15,000,000.00	1,036,500.00	624,000.00	-14,376,000.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	1,036,500.00	624,000.00	-14,376,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hid			15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAN

			Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota													up 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			AHAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pel			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

			Disusun													estarian Lingkungan Hidup			
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**67,000,000.00**	**8,321,300.00**	**6,271,300.00**	**16,000,000.00**							**83,000,000.00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	62,000,000.00	7,179,700.00	5,129,700.00	-56,870,300.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		73,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		

			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	7,000,000.00	3,100,000.00	1,050,000.00	-5,950,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			7,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualita				5 Lokasi	5 Lokasi	10,000,000.00	1,119,700.00	1,119,700.00	-8,880,300.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan			1,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

			s Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)												Hidup				
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-3,900,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laborat				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	-38,140,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan			60,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PER

			orium lingkungan										bbirang			Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup				TANAHAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	5,000,000.00	1,141,600.00	1,141,600.00	-3,858,400.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000.00	1,141,600.00	1,141,600.00	-3,858,400.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DAN	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5.			10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

			dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan										A BAGI HASIL (DBH) DAN A ALOKASI UMUM (DAU)		Pelestarian Lingkungan Hidup				
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**1,035,000,000.00**	**156,293,900.00**	**153,943,720.00**	**-135,000,000.00**							**900,000,000.00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	1,035,000,000.00	156,293,900.00	153,943,720.00	-881,056,280.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkunga	-		900,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

																n Hid up				
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Ha	75 Ha	1,035,000,000.00	156,293,900.00	153,943,720.00	-881,056,280.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			900,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLI**	**-**				**-**	**-**	**5,000,000.00**	**936,000.00**	**936,000.00**	**0.00**							**5,000,000.00**	

		NDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																		
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5,000,000.00	936,000.00	936,000.00	-4,064,000.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis,				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	936,000.00	936,000.00	-4,064,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAN

			Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan													5. Pelestarian Lingkungan Hidup				AHAN
6.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**4,051,914,660.00**	**1,619,830,400.00**	**2,009,155,000.00**	**-851,914,660.00**							**3,200,000,000.00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	4,051,914,660.00	1,619,830,400.00	2,009,155,000.00	-2,042,759,660.00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		3,200,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000.00	227,946,760.00	619,195,300.00	319,195,300.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			200,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

			Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada																	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				40 Unit	40 Unit	3,751,914,660.00	1,391,883,640.00	1,389,959,700.00	-2,361,954,960.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH INSENTIF FISKAL UNTUK PEN	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			3,000,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

														GHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN						
	JUMLAH								**13,194,925,147.00**	**10,065,046,240.00**	**10,860,258,550.00**	**-20,817,255,718.00**						**12,664,591,987.00**	

BAB V

PENUTUPAN

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja Perubahan dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahanuntuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja Perubahan ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar;
4. Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten

Takalar Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;

5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Bappelitbangda Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Bappelitbangda dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Bappelitbangda Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

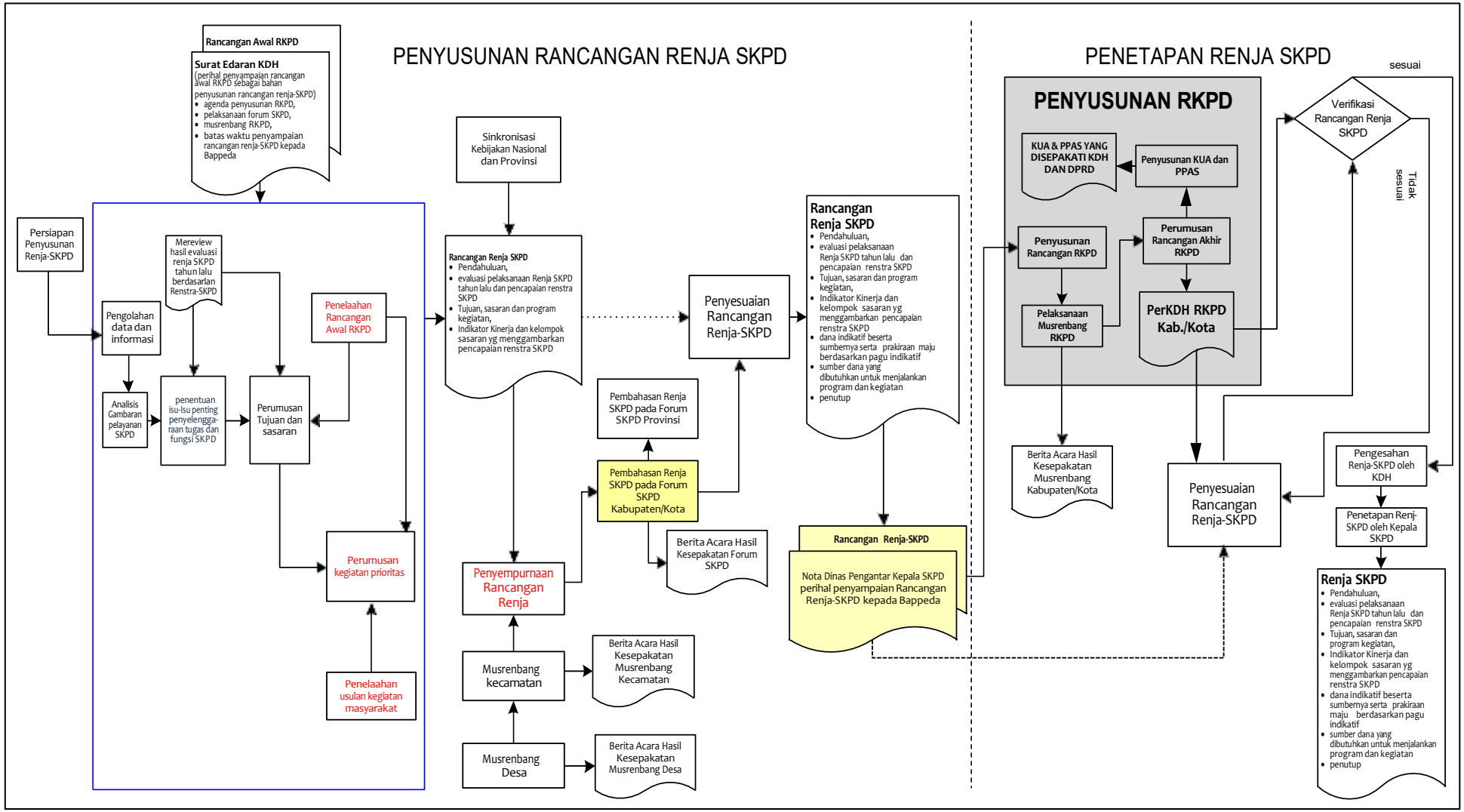
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)
agenda penyusunan RKPD,
pelaksanaan forum SKPD,
musrenbang RKPD,
batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-isu penting penyelengga-raan tugas dan fungsi SKPD
Perumusan Tujuan dan sasaran
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
sesuai
Tidak sesuai
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
Penetapan Renj-SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang sesuai dengan Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan perundangan lainnya yang mengatur Standar Operasional Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran di perangkat daerah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan,Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024, meliputi:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024. **BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2024**, memuat tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan II (Tahun 2024) sesuai dengan renstra dan tupoksi OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, memuat tentang Rencana Program Kegiatan Perubahan Renja dan pendanaan OPD khusus untuk Tahun 2024. **BAB IV Penutup.**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sampai dengan Triwulan I

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Periode Pelaksanaan 2025.

TABEL II-I

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA KABUPATEN AKALAR
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
		5					**BAPPELITBANGDA**							**100 %**	**6.050.995.109**	**784.126.841**			**15%**	**784.126.841**	**14,54%**	**12,96%**		
		5	**01**				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN**							**100 %**	**5.540.995.129**	**777.745.061**			**29%**	**777.745.061**	**29,08%**	**14,04%**		
		5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**		**Persen**		**0,00%**		**100 %**	**4.216.211.119**	**634.389.461**			**9,92 %**	**634.389.461**	**9,92 %**	**15,05%**	**BAPPELITBANGDA**	
		5	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	100,00%	Persen	118.000.000	0,00 %	0	100,00%	61.052.930	10.764.000	0,00 %	-	36,36%	10.764.000	36,36 %	17,63%	SEKRETARIAT	
		5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	8	Dokumen	20.000.000			2	12.999.140	6.951.000	-	-	-	6.951.000	0,00 %	53,47%		

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
								daerah																
		5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dokumen	20.000.000			1	8.790.500	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%		
		5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dokumen	20.000.000			1	6.999.240	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	Dokumen	20.000.000			1	9.819.000	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%		
		5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	8	Dokumen	18.000.000			1	7.000.150	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
								Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																
		5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Dokumen	20.000.000			1	10.000.100	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%		
		5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan	13.310.000			4	5.444.800	3.813.000	-	-	1	3.813.000	25,00%	70,03%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**46,43%**	**17,64%**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
		5	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi perangkat**	100 %	Persen	15.389.875.544	0,00 %	0	100,00%	3.553.306.599	607.593.061	0,00 %	-	5,93 %	607.593.061	5,93 %	17,10%		

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
								daerah																
		5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	1904	Orang	15.257.875.544			392	2.534.222.261	593.605.171	-	-	112	593.605.171	28,57 %	23,42%		
								Jumlah orang yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai	1632	Orang				336	968.423.468	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		
								Jumlah orang yang menerima Objektifitas lainnya						24	10.320.000	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		
		5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4600	Dokumen	40.000.000			1.150	19.527.950	-	-	-	-	-	100,00%	0,00 %		
		5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4	Laporan	72.000.000			1	13.999.890	13.987.890	-	-	1	13.987.890	100,00%	99,91%		

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
								Akhir Tahun SKPD																
		5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	20.000.000			1	6.813.030	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**38,10%**	**20,56%**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
		5	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	100 %	Persen	60.000.000	0,00 %	0	100,00%	24.280.400	1.189.200	0,00 %	-	0,00 %	1.189.200	0,00 %	4,90 %	SEKRETARIAT	
		5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dokumen	20.000.000			2	12.948.100	1.189.200	-	-	-	1.189.200	0,00 %	9,18 %		
		5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan	120	Lapor	40.000.000			30	11.332.300	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
							Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		an														
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					0%	5%		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
		5	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	100 %	Persen	31.310.000	0,00 %	0	100 %	41.141.100	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	0,00 %	SEKRETARIAT	
		5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	17	Unit	18.000.000			30	11.430.000	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		
		5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48	Dokumen	13.310.000			12	29.711.100	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**0,00 %**	**0,00 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
		5	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi**	100 %	Persen	432.000.000	0,00 %	0	100,00%	340.235.500	4.654.000	0,00 %	-	12,54%	4.654.000	12,54 %	1,37 %	SEKRETARIAT	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
								umum perangkat daerah																
		5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket				1	6.530.000	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		
		5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket				4	183.691.500	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		
		5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	200	Dokumen	32.000.000			40	10.000.000	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		
		5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000	Laporan	400.000.000			250	140.014.000	4.654.000	-	-	37	4.654.000	14,80 %	3,32 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**3,70 %**	**0,83 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
		5	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	100 %	Persen	731.525.000	0,00 %	0	100,00%	85.401.810	10.189.200	0,00 %	-	14,58%	10.189.200	14,58 %	11,93%	SEKRETARIAT	
		5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening sumber daya air	48	Rekening	400.000.000			12	18.201.810	389.200	-	-	-	389.200	0,00 %	2,14 %		
		5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa non PNS	336	Orang	331.525.000			84	67.200.000	9.800.000	-	-	14	9.800.000	16,67 %	14,58%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**8,33 %**	**8,36 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
		5	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah**	100,00%	Persen	242.050.000	0,00 %	0	100,00%	110.792.780	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	0,00 %	SEKRETARIAT	
		5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	4	Unit	10.000.000			1	35.980.000	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		
								Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	24	Unit				5		-	-	-	-	-	0,00 %			

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
								Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak kendaraannya	28	Unit				6		-	-	-	-	-	0,00 %			
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	sarana	232.050.000			1	74.812.780	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**0,00 %**	**0,00 %**		
Predikat Kinerja Program																					**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																					**13,79%**	**7,43 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
Faktor pendorong pencapaian kinerja: komitmen untuk menyelesaikan target kinerja sesuai dengan waktu yang ditentukan																								
Faktor penghambat: : Realisasi kinerja masih rendah karena beberapa sub kegiatan jadwal pelaksanaannya pada triwulan berikutnya																								
Faktor penghambat: Realisasi anggaran masih rendah karena menyesuaikan dengan jadwal anggaran kas																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																								
		5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan sesuai kalender perencanaan**	**100 %**	**Persen**	**6.022.750.000**	**0,00%**	**0**	**#########**	**1.039.783.980**	**126.108.400**	**0,00%**	**-**	**53,36%**	**126.108.400**	**53,36%**	**12,13%**	**BAPPELITBANGDA**	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
		5	01	02	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Kesesuaian kegiatan RKPD dengan kegiatan APBD**	100,00%	Persen	2.831.200.000	0,00%	0	100,00%	719.830.780	54.110.800	0,00%	-	97,31%	54.110.800	97,31%	7,52%	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		Dokumen				2	70.948.300	9.420.800	-	-	2	9.420.800	100,00%	13,28%		
		5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah						5	25.310.660	2.539.800	-	-	4	2.539.800	80,00%	10,03%		
		5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	Berita Acara	180.700.000			2	45.578.300	-	-	-	2	-	100,00%	0,00%		
		5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4	Dokumen	227.500.000			1	36.113.100	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
		5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	Berita	815.000.000			2	82.880.340	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		
		5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1873	usulan	209.000.000			468	41.323.980	-	-	-	461	-	98,50 %	0,00 %		
		5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJMD/RKPD Pokok/RKPD Perubahan)	10	Dokumen	1.399.000.000			3	417.676.100	42.150.200	-	-	-	42.150.200	0,00 %	10,09%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**68,36%**	**4,77 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**S**	**SR**		
		5	01	02	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijadikan**	100 %	Persen	637.000.000	0,00 %	0	100 %	191.045.300	37.125.200	0,00 %	-	91%	37.125.200	91,13 %	19,43%	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
								acuan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah																
		5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	20	Dokumen	377.000.000			3	51.944.300	34.155.300	-	-	2	34.155.300	66,67%	65,75%		
		5	1	2	2,02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	140	Orang	260.000.000			200	139.101.000	2.969.900	-	-	183	2.969.900	91,50%	2,14%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**79,08%**	**33,94%**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**T**	**SR**		
		5	01	02	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Capaian SPM pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, PUPR, Perumahan dan Kawasan**	100%	Persen	2.314.550.000	0,00%	0	100,00%	90.918.000	31.422.400	0,00%	-	25,00%	31.422.400	25,00%	34,56%	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
								Permukiman, sosial, dan keamanan ketertiban)																
		5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	16	Laporan	1.254.550.000			4	38.290.080	21.554.800	-	-	1	21.554.800	25,00%	56,29%		
		5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16	Laporan	1.060.000.000			4	52.627.920	9.867.600	-	-	1	9.867.600	25,00%	18,75%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**25,00%**	**37,52%**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
		5	01	02	2.04		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah**	100 %	Persen	240.000.000	0,00 %		100 %	37.989.900	3.450.000	0,00 %	-	0,00 %	3.450.000	0,00 %	9,08 %	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan	4800	Data	240.000.000			440	37.989.900	3.450.000	-	-	-	3.450.000	0,00 %	9,08 %		

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
							Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola																
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**0,00 %**	**9,08 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																					**43,11%**	**21,33%**		
Predikat Kinerja Program																					**SR**	**SR**		
Faktor pendorong pencapaian kinerja: realisasi kinerja sudah mencapai atau diatas 25% karena kegiatan atau kinerja berjalan sesuai kalender perencanaan atau sesuai waktu yang ditargetkan																								
Faktor penghambat: : realisasi keuangan belum mencapai 25% pada triwulan I dikarenakan pencairan anggaran yang terlambat																								
Faktor penghambat:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																								
		5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD**	**100 %**	**Persen**	**500.000.000**	**0,00%**	**0**	**########**	**285.000.030**	**17.247.200**	**0,00%**	**-**	**23,95%**	**17.247.200**	**23,95%**	**6,05 %**	**BAPPELITBANGDA**	
		5	01	03	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia antar Renja OPD dengan RKPD**	100 %	Persen	200.000.000	0,00 %	0	100,00%	114.080.200	6.640.000	0,00 %	-	18,52%	6.640.000	18,52 %	5,82 %	Bidang Pemerintahan,Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	
		5	0	0	2.	0	Koordinasi	Frekuensi/ju	76												15,79	11,1		

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
			1	3	01	4	Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	mlah rapat/pertemuan/fgd Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan		Laporan	100.000.000			19	59.485.000	6.640.000	-	-	3	6.640.000	%	6%		
		5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Frekuensi/jumlah rapat/pertemuan/fgd Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	32	Laporan	100.000.000			8	54.595.200	-	-	-	2	-	25,00 %	0,00 %		Stunting: Rp 12.000.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**20,39%**	**5,58 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
		5	01	03	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) antar Renja**	100 %	Persen	100.000.000	0,00 %	0	100,00%	55.272.000	2.083.200	0,00 %	-	20,00%	2.083.200	20,00 %	3,77 %	Bidang Pemerintahan,Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
								OPD dengan RKPD																
		5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Frekuensi pertemuan/rapat/fgd Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dilaksanakan	20	Laporan	100.000.000			5	55.272.000	2.083.200	-	-	1	2.083.200	20,00 %	3,77 %		Penanggulangan Kemiskinan: Rp 7.900.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**20,00%**	**3,77 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
		5	01	03	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase konsistensi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan antar Renja OPD dengan RKPD**	100 %	Persen	200.000.000	0,00 %	0	100,00%	115.647.830	8.524.000	0,00 %	-	33,33%	8.524.000	33,33 %	7,37 %	Bidang Pemerintahan,Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	
		5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Frekuensi rapat/pertemuan/fgd Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	12	Laporan	100.000.000			3	54.985.700	8.524.000	-	-	1	8.524.000	33,33 %	15,50%		

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
								yang dilaksanakan																
		5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Frekuensi pertemuan/rapat/fgd Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dilaksanakan	12	Laporan	100.000.000			3	60.662.130	-	-	-	1	-	33,33 %	0,00 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**33,33%**	**7,75 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																					**24,58%**	**5,70 %**		
Predikat Kinerja Program																					**SR**	**SR**		
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																								
Faktor penghambat: : Realisasi kinerja masih rendah karena beberapa sub kegiatan jadwal pelaksanaannya pada triwulan berikutnya																								
Faktor penghambat: Realisasi anggaran masih rendah karena menyesuaikan dengan jadwal anggaran kas																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																								
		5	**05**				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**400.000.000**		**-**	**### ###**	**509.999.980**	**6.381.780**		**#REF!**	**0,00 %**	**6.381.780**	**0,00 %**	**1,25 %**		
		5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan**	**100 %**	**Persen**	**400.000.000**	**0,00%**	**-**	**100 %**	**509.999.980**	**6.381.780**	**0%**	**#REF!**	**0%**	**6.381.780**	**0,00 %**	**1,25 %**	**BAPPELITBANGDA**	

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
							pemerintahan dan pengkajian peraturan yang difasilitasi																	
		5	05	2			**Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase peningkatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan**	100 %	Persen	400.000.000	0,00 %	0	100 %	200.000.100	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	0,00 %	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5	05	2	2,02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4	Dokumen	400.000.000			1	200.000.100	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**0,00 %**	**0,00 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
		5	05	02	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	100 %	Persen	-	0,00 %		100 %	200.000.000	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	0,00 %	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen	4	Doku	-			1	200.000.00	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
							Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Hasil Penelitian dan Pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan		men					0									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					**0,00 %**	**0,00 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																					**SR**	**SR**		
		5	05	02	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	100 %	Persen	-	0,00 %	0	100,00%	109.999.880	6.381.780	0,00 %	-	0,00 %	6.381.780	0,00 %	5,80 %	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	4	Laporan	-			1	90.000.080	6.381.780	-	-	-	6.381.780	0,00 %	7,09 %		
		5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil	4	Laporan	-			1	19.999.800	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6			7		8		12	24		25		26 = 25/8 x 100%		29	30
				Kelitbangan																
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	**0,00 %**	**3,55 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																	**SR**	**SR**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																	**0,00 %**	**1,18 %**		
Predikat Kinerja Program																	**SR**	**SR**		
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																				
Faktor penghambat: :Realisasi kinerja masih rendah karena beberapa sub kegiatan jadwal pelaksanaannya pada triwulan berikutnya																				
Faktor penghambat: Realisasi anggaran masih rendah karena menyesuaikan dengan jadwal anggaran kas																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																				

Sumber: *Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I*

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2025 yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	17	44	4	19	48
TOTAL		**4**	**17**	**44**	**4**	**19**	**48**

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 4, jumlah kegiatan 17, dan jumlah sub kegiatan 44, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 4, jumlah indikator kegiatan sebanyak 19, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 48.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi /D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.050.995.109	784.126.841	15%	13%
TOTAL		**6.050.995.109**	**784.126.841**	**15%**	**13%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp.784.126.841,-. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar % dengan capaian realisasi fisik sebesar 15%.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah . Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43% dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 43%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43% didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43%, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 43% dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebanyak 4 program dengan masih mendapatkan kategori rendah.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 17 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 15 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwulan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 1 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 0 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 44 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 32 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 13 sub kegiatan, dan 16 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	2	2	0	17	12	4	1	44	31	7	6
TOTAL		**4**	**2**	**2**	**0**	**17**	**12**	**4**	**1**	**44**	**31**	**7**	**6**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dijelaskan bahwa dari 4 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 20 persen terdapat 3 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 20-43 persen) terdapat 0 program, selebihnya sebanyak 1 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 43 persen pada triwulan I Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 9 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama terdapat 12 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 3 kegiatan, selebihnya terdapat 2 kegiatan yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 44 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama dapat dijelaskan 30 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 5 kegiatan, selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 9 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10%	>10 – 20 %	> 20%		0 - 10%	>10 – 20 %	> 20%		0 - 10%	>10 – 20 %	> 20%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	2	0	2	17	8	3	6	44	21	3	18
TOTAL		**4**	**2**	**0**	**2**	**17**	**8**	**4**	**5**	**44**	**21**	**3**	**18**

Sumber: Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

Capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda berdasarkan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda serta ketentuan peraturan perundang – undangan. Adapun tabel analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda sebagai berikut:

Tabel II-6
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Nilai SAKIP Daerah			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0			
2	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP Daerah	22,9	21,8	Indeks Inovasi Daerah	40	41	42	0			
3	Persentase kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dengan Nomenklatur Program RKPD	100	100	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	100	0			
4	Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dengan Nomenklatur Program KUA/PPAS	100	100	Rata-rata capaian kinerja program prioritas daerah	85	85	90	0			
5	Predikat inovasi daerah	Inovatif	Inovatif	Persentase kebijakan berbasis bukti	25	30	35	0			
6	Persentase Produk Kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan Kebijakan dan Formulasi Program	20	25	Persentase inovasi yang terukur dalam Indeks Inovasi Daerah	10	12	14	0			
7	Nilai SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BB	BB	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Bappelitbangda	71	71,5	72	0			
				Tingkat literasi digital ASN Bappelitbangda	75	75	80	0			

Indikator Renstra 2023-2026:

1. Nilai SAKIP Daerah

   Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah berhasil meraih peningkatan nilai SAKIP dari 70,70 menjadi 73.12 dengan predikat BB. Capaian ini merupakan hasil nyata dari komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, efisien, dan akuntabel.

   Peningkatan nilai SAKIP mencerminkan semakin baiknya kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi, serta penggunaan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan keberhasilan reformasi birokrasi dalam mendorong seluruh perangkat daerah untuk fokus pada pencapaian hasil (outcome) dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

   Strategi utama yang diterapkan untuk mendukung capaian ini antara lain adalah penguatan budaya kinerja berbasis hasil, peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan kinerja, optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-SAKIP, serta pengawasan dan pendampingan secara berkala kepada seluruh perangkat daerah. Dengan capaian ini, Pemerintah Daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja birokrasi secara berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

2. Nilai Capaian Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP Daerah

   Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Terhadap capaian Tahun 2024, Kemenpan RB menyimpulkan secara umum Implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar sudah baik, meskipun masih terdapat beberapa catatan untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Atas dasar hal tersebut diatas nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (AKIP) Kabupaten Takalar Tahun 2024, khususnya pada komponen Perencanaan Kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Bappelitbangda adalah 21,80 naik dibandingkan tahun 2023 dengan hasil evaluasi sebesar 21,59. Belum mencapai target nilai 22,9, akan tetapi mendekati nilai tersebut sebesar 95.19%. Indikator kinerja ini didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

3. Persentase kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dengan Nomenklatur Program RKPD

   Sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas perencanaan di tingkat Kabupaten Takalar, dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan melalui perbaikan mekanisme penyelenggaraan Musrenbang, proses perencanaan baik di tingkat Kabupaten maupun Perangkat Daerah dan penyempurnaan melalui upaya sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang berlaku secara nasional, yang salah satunya diberlakukan dengan tujuan untuk mengintegrasikan perencanaan dengan penganggaran agar dicapai sinergitas yang baik antar perencanaan yang diimplementasikan melalui dukungan anggaran untuk mencapai target tingkat konsistensi perencanaan pembangunan yang baik sesuai yang direncanakan.

4. Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dengan Nomenklatur Program KUA/PPAS

   Rencana pembangunan yang berkualitas terwujud melalui rencana pembangunan yang dikerjakan tepat waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi isi maupun prosesnya, aspiratif yang ditunjukkan dengan adanya penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunannya, terintegrasi, sinkron dan sinergi baik dengan perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan di tingkat Perangkat Daerah dan teraplikasikan dalam perencanaan penganggaran, baik dalam APBD untuk tingkat Kabupaten maupun RKA pada Perangkat Daerah.

   Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah berhasil mencapai persentase kesesuaian 100% antara nomenklatur program yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS). Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh program yang direncanakan dalam RKPD telah disusun secara konsisten dan selaras dengan kerangka kebijakan dan arah pembangunan yang ditetapkan dalam KUA/PPAS.

   Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya koordinasi yang intensif antara perangkat daerah, Bappeda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi juga turut memperkuat akurasi dan konsistensi nomenklatur antar dokumen.

   Dengan kesesuaian nomenklatur yang tinggi, proses penganggaran menjadi lebih

efisien, transparan, dan akuntabel, serta meminimalisir potensi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Hal ini mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

5. Predikat inovasi daerah

   Peraturan Bupati Takalar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar mengedepankan inovasi dalam pembangunan. Kebijakan tentang inovasi ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produktifitas, serta daya saing daerah. Perbup ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; serta peningkatan daya saing daerah. Pada prinsipnya perda tersebut mengatur tentang lingkup Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

   Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kabupaten Takalar kembali memperoleh kategori Kabupaten INOVATIF secara berturut-turut selama 4 tahun dengan capaian urutan 100 Nasional kabupaten, nilai 57,02, predikat INOVATIF. Dan Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Takalar pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2023 yang mendapatkan nilai 49,96.

6. Persentase Produk Kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan Kebijakan dan Formulasi Program

   Menyikapi dinamika litbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah dengan memperkuat kebijakan pemerintah daerah berbasis kelitbangan terapan dan tematik di dalam perencanaan, memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan daerah, mendayagunakan hasil-hasil penelitian untuk mencapai visi misi pembangunan daerah, melibatkan kelitbangan dalam setiap unsur kegiatan pemerintahan yang di ada Kabupaten dengan input penyusunan kebijakan, katalisator pencapaian sasaran dan mengevaluasi setiap kebijakan/program perangkat daerah.

   Pada tahun 2024, capaian sasaran IV ada 4 dokumen kelitbangan yang dihasilkan

antara lain:

- Kajian Ikan Kerapu dan Ekonomi Biru
- Kajian Analisis Potensi dan Pengembangan Produk Wisata Kabupaten Takalar
- Laporan Survei Kinerja Pemerintah Daerah
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Takalar Tahun 2024

Meskipun meleibihi dari target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi perhatian antara lain:

- Belum optimalnya perangkat daerah dalam memanfaatkan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan dan penyusunan program
- Rendahnya kualitas kelitbangan
- Belum adanya pedoman dalam pelaksanaan kelitbangan

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar, maka direkomendasikan beberapa strategi untuk mengatasinya antara lain:

- Perangkat daerah untuk menjadikan hasil kelitbangan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyusunan program
- Perlu penguatan kapasitas building
- Dilakukan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kabupaten Takalar yang disinkronkan dengan dokumen perencanaan

7. Nilai SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pemerintah. Pada dasarnya, penerapan Sistem AKIP bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Artinya, SAKIP merupakan salah satu instrument dalam mewujudkan konsep good governance. Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Bappelitbangda Kabupaten Takalar telah melakukan implementasi atas SAKIP dengan melaksanakan perencanaan strategis, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja serta pengelolaan data kinerja. Pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar telah menerbitkan nilai atas implementasi SAKIP Bappelitbangda Tahun 2024. Berdasarkan penilaian tersebut, Bappelitbangda mendapatkan predikat BB dengan interpretasi Sangat Baik dengan nilai 70,50.

Indikator Renstra 2025-2029

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

   Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan pembangunan di tingkat pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. IPPD menilai sejauh mana dokumen-dokumen perencanaan daerah — seperti RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD — disusun secara konsisten, sinergis, berbasis data, berorientasi hasil (outcome), dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. IPPD bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar menyusun perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, terukur, dan berdampak, sehingga kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

   Komponen yang dinilai antara lain:

   - ✓ Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran
   - ✓ Keterpaduan perencanaan sektoral dan kewilayahan
   - ✓ Penggunaan data dan analisis yang kuat dalam perencanaan
   - ✓ Keterlibatan pemangku kepentingan
   - ✓ Fokus pada hasil dan dampak pembangunan

   Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas proses perencanaan melalui:

   - ✓ Penerapan prinsip evidence-based planning
   - ✓ Pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi
   - ✓ Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan
   - ✓ Peningkatan kapasitas SDM perencana daerah

   Capaian IPPD yang tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah berada pada jalur yang tepat dalam menyusun perencanaan yang efektif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Ke depan, kualitas perencanaan ini akan terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

   Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar belum melaksanakan pengukuran IPPD dan akan dilaksanakan mulai tahun 2025 ini.

2. Indeks Inovasi Daerah

   Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), untuk mendorong daerah lebih kreatif, efisien, dan

adaptif dalam memberikan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan:

- ✓ Mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah
- ✓ Menilai sejauh mana daerah menghasilkan dan menerapkan inovasi
- ✓ Memberikan penghargaan kepada daerah yang inovatif
- ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan

Ruang Lingkup Penilaian:

- ✓ Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
- ✓ Inovasi Pelayanan Publik
- ✓ Inovasi Daerah Lainnya yang Sesuai Urusan Pemerintahan

Kategori Hasil yaitu Sangat Inovatif (65,01-100), Inovatif (45,01-65,00), Kurang Inovatif (kurang dari 45). Nilai Indeks Inovasi Daerah dihitung berdasarkan jumlah dan kualitas inovasi yang dilaporkan dan terverifikasi melalui sistem Indeks Inovasi Daerah (IID). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kabupaten Takalar kembali memperoleh kategori Kabupaten INOVATIF secara berturut-turut selama 4 tahun dengan capaian urutan 100 Nasional kabupaten, nilai 57,02, predikat INOVATIF. Dan Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Takalar pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2023 yang mendapatkan nilai 49,96. Untuk tahun 2025, belum dilakukan penilaian oleh Kemendagri.

3. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD

   Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Takalar berhasil mencapai tingkat keselarasan yang tinggi antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan persentase keselarasan sebesar 100%.

   Capaian ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan tahunan yang dirancang dalam RKPD telah disusun secara konsisten dan berpedoman pada arah kebijakan, visi, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

   Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran strategis perangkat daerah dalam mengintegrasikan target-target RPJMD ke dalam perencanaan tahunan, serta penguatan koordinasi antara Bappelitbangda dan seluruh OPD dalam proses penyusunan dokumen

perencanaan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi turut berkontribusi dalam meningkatkan akurasi dan konsistensi data dan program.

Dengan capaian ini, Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

4. Rata-rata capaian kinerja program prioritas daerah

   Rata-rata capaian kinerja program prioritas daerah adalah indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Program prioritas ini merupakan program strategis yang langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD dan RKPD.

   Komponen Penilaian:

   - ✓ Diukur berdasarkan capaian output dan/atau outcome program prioritas.
   - ✓ Dihitung dengan menjumlahkan capaian masing-masing program prioritas, lalu dirataratakan.
   - ✓ Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase (%) terhadap target yang ditetapkan.

   Tujuan Pengukuran:

   - ✓ Menilai efektivitas pelaksanaan program prioritas.
   - ✓ Mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau percepatan
   - ✓ Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan tahun berikutnya.

   Pada tahun 2025 belum dilakukan perhitungan dikarenakan Rata-rata capaian kinerja program prioritas daerah diukur pada akhir tahun anggaran, tepatnya setelah seluruh program dan kegiatan tahun tersebut selesai dilaksanakan dan dilaporkan.

5. Persentase kebijakan berbasis bukti

   Persentase kebijakan berbasis bukti adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan, program, atau perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah didasarkan pada data, kajian ilmiah, analisis kelitbangan, atau bukti empiris yang valid. Tujuan dilaksanakannya pengukuran yaitu mendorong penggunaan data dan hasil kajian (litbang) dalam proses penyusunan kebijakan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengurangi kebijakan yang bersifat reaktif, spekulatif, atau tidak berdampak nyata serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan terukur.

   Pada tahun 2025 belum dilaksanakan pengukuran dikarenakan perhitungan kebijakan

berbasis bukti biasanya diukur setiap akhir tahun anggaran yang digunakan dalam evaluasi kinerja litbang, laporan kinerja pemerintah daerah, atau laporan inovasi.

6. Persentase inovasi yang terukur dalam Indeks Inovasi Daerah

   Persentase inovasi yang terukur adalah bagian dari indikator dalam Indeks Inovasi Daerah (IID) yang menunjukkan proporsi inovasi yang telah berhasil diidentifikasi, didokumentasikan, dan diverifikasi secara sistematis oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Pengukuran ditujukan untuk mengukur seberapa banyak inovasi yang dapat dibuktikan keberadaannya dan dampaknya berdasarkan data dan dokumentasi yang valid, mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya menciptakan inovasi, tetapi juga mengukur dan melaporkan hasil inovasi tersebut secara terstruktur serta memastikan inovasi yang dilaporkan memang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Persentase ini menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian IID, karena keberhasilan inovasi tidak hanya dilihat dari jumlah, tapi juga dari kualitas dan dampaknya. Pemerintah daerah dengan persentase inovasi terukur yang tinggi menunjukkan pengelolaan inovasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Pada tahun 2025 belum dilakukan perhitungan dikarenakan perhitungan inovasi yang terukur dalam Indeks Inovasi Daerah dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

7. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Bappelitbangda

   Pada tahun [tahun], Inspektorat melakukan penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Bappelitbangda. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Bappelitbangda telah menunjukkan pencapaian yang positif dalam penerapan SAKIP dengan nilai 70.50, yang masuk dalam kategori baik. Penilaian ini mencakup aspek-aspek penting seperti perencanaan kinerja yang selaras dengan visi misi daerah, pengukuran dan pelaporan capaian kinerja, Implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal, evaluasi dan tindak lanjut hasil kinerja.

   Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Bappelitbangda dalam mengelola kinerja secara sistematis dan transparan, serta meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Meskipun demikian, hasil penilaian juga mengidentifikasi beberapa area yang perlu perbaikan dan penguatan, khususnya dalam hal pemantauan capaian indikator kinerja, integrasi data, atau penguatan kapasitas SDM. Sebagai tindak lanjut, Bappelitbangda berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam penerapan SAKIP, agar semakin mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan akuntabel. Pada tahun 2025 belum dilakukan penilaian dikarenakan penilaian dilakukan pada setiap awal tahun berikutnya berdasarkan laporan kinerja perangkat daerah.

8. Tingkat literasi digital ASN Bappelitbangda

   Tingkat literasi digital ASN mengacu pada kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

   Literasi digital mencakup penguasaan dasar penggunaan perangkat teknologi informasi (komputer, smartphone, aplikasi kerja), kemampuan mengelola data dan informasi secara digital, pemahaman tentang keamanan siber dan etika penggunaan teknologi dan adaptasi terhadap inovasi digital yang mendukung efisiensi kerja.

   Tingkat literasi digital yang baik penting untuk mendukung transformasi digital pemerintahan, meningkatkan produktivitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2024 belum dilaksanakan pengukuran dikarenakan belum menjadi indikator utama Bappelitbangda sehingga pada tahun 2025 Bappelitbangda akan terus memperkuat program peningkatan literasi digital ASN guna memastikan semua pegawai mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mampu memaksimalkan pemanfaatannya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.3 Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan

Daerah yaitu **"Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah serta Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah",** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 3 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Terjaganya keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah.
2. Sasaran 2: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
3. Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola kinerja Bappelitbangda

Tujuan dan sasaran Bappelitbangda dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III-1

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026)			Perubahan RenjaTahun 2025 (Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029)		
Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Target 2025**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**
T1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah	Nilai SAKIP Daerah	80	T1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah serta meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	T1.1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	
				T1.2. Indeks Inovasi Daerah	40
S1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Daerah	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP Daerah	23,4	S1. Terjaganya keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daearh	Persentase kkeselarasan RPJMD dengan RKPD	100
	Persentase kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dengan Nomenklatur Program RKPD	100%		Rata-rata capaian kinerja program prioritas daerah	85
S2. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dengan Nomenklatur Program RKPD	100%	S2. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	25
	Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dengan Nomenklatur Program KUA/PPAS	100%		Jumlah inovasi daerah	10
Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam pengembangan inovasi	Predikat inovasi daerah	Inovatif			
Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	Persentase Produk Kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan	20%			

	Kebijakan dan Formulasi Program				
Meningkatnya tatakelola kinerja pada Badan Perencaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BB	S3. Meningkatnya tata kelola kinerja Bappelitbangda	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Bappelitbangda	71
				Tingkat literasi digital ASN Bappelitbangda	75

Sumber : Rancangan Awal Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			4.182.475.219,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60.929.540,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.999.140,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.790.510,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.999.130,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.818.800,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.000.150,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.877.010,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.444.800,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.550.800.849,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.512.976.319,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.515.610,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.999.890,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.309.030,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		20.857.580,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11175260
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.682.320,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		35.929.460,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11.430.000,00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.499.460,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		317.763.200,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.530.000,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.339.200,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.894.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.401.810,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.201.810,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.200.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		110.792.780,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.980.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.812.780,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			**1.356.138.370,00**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		688.666.470,00
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan,	54.577.900,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
		dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	25.310.660,00
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	45.578.300,00
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	19.493.100,00
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	60.220.530,00
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	17.813.980,00
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	465.672.000,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		111.545.300,00
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	51.944.300,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		534.656.700,00
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	28615080
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	506.041.620,00
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		21.269.900,00
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	21.269.900,00
PROGRAM KOORDINASI DAN			**180.445.900,00**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		82.061.400,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	33.885.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48.176.400,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		26.442.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	26.442.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		71.942.500,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	38.045.700,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	33.896.800,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			**852.783.380,00**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		474.846.400,00
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	169.925.100,00
		Penelitian dan Pengembangan	304.921.300,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
		Partisipasi Masyarakat	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		288.877.100,00
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	188.877.700,00
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	99.999.400,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		89.059.880,00
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	70.300.080,00
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	18.759.800,00

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja PD

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 dengan total pagu Rp **5.347.742.258** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Bappelitbangda							**5.215.243.596,00**	**6.028.925.697,00**	**6.571.842.869,00**	**1.356.599.273,00**							**5.347.742.258,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.215.243.596,00**	**6.028.925.697,00**	**6.571.842.869,00**	**1.356.599.273,00**							**5.347.742.258,00**	
	05.01	**PERENCANAAN**							**4.915.245.896,00**	**5.518.925.717,00**	**5.719.059.489,00**	**803.813.593,00**							**5.347.742.258,00**	
01.00	**05.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah**				**100%**	**100%**	**3.842.885.866,00**	**4.194.141.707,00**	**4.182.475.219,00**	**306.856.392,00**							**4.149.742.258,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100%	100%	50.634.500,00	61.052.930,00	60.929.540,00	10.295.040,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		24.200.000,00	Bappelitbangda
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen				2 Doku	2 Doku	11.092.500,00	12.999.140,00	12.999.140,00	1.906.640,00	Semua	PENDAPATAN	-	6. Perbai			0	Bappelitbangda

			Perencanaan Perangkat Daerah				men	men					Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGI HASIL		kan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.372.100,00	8.790.500,00	8.790.510,00	-2.581.590,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.999.600,00	6.999.240,00	6.999.130,00	1.999.530,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.200.000,00	Bappelitbangda
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen				2 Doku	2 Doku	9.992.800,00	9.819.000,00	9.818.800,00	-174.000,00	-	PENDAPATAN	-	6. Perbai			0	Bappelitbangda

			DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD				men	men						BAGI HASIL		kan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.361.700,00	7.000.150,00	7.000.150,00	2.638.450,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.815.800,00	10.000.100,00	9.877.010,00	1.061.210,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0	5.444.800,00	5.444.800,00	5.444.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelaya			0	Bappelitbangda

												a Kel/Desa			nan Publik				
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah*				100%	100%	3.256.583.466,00	3.531.237.187,00	3.550.800.849,00	294.217.383,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		4.125.542.258,00	Bappelitbangda
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.226.697.426,00	3.490.896.317,00	3.512.976.319,00	286.278.893,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.125.542.258,00	Bappelitbangda
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1200	1200	14.406.900,00	19.527.950,00	17.515.610,00	3.108.710,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil				1 Laporan	1 Laporan	11.433.650,00	13.999.890,00	13.999.890,00	2.566.240,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			0	Bappelitbangda

			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									, Semua Kel/Desa			dan Pelayanan Publik				
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.045.490,00	6.813.030,00	6.309.030,00	2.263.540,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah*				100%	100%	39.404.400,00	24.280.400,00	20.857.580,00	-18.546.820,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.679.000,00	12.948.100,00	11.175.260,00	-2.503.740,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			0	Bappelitbangda

															dan Pelayanan Publik				
	5.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.815.000,00	0	0	-7.815.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				30 Laporan	30 Laporan	17.910.400,00	11.332.300,00	9.682.320,00	-8.228.080,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100%	100%	9.391.200,00	41.141.100,00	35.929.460,00	26.538.260,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0	11.430.000,00	11.430.000,00	11.430.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			0	Bappelitbangda

												Kel/Desa			Publik				
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12	12	9.391.200,00	29.711.100,00	24.499.460,00	15.108.260,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100%	100%	248.221.900,00	340.235.500,00	317.763.200,00	69.541.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.530.000,00	6.530.000,00	6.530.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda

	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.946.900,00	183.691.500,00	233.339.200,00	230.392.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40	40	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250	250	228.745.000,00	140.014.000,00	67.894.000,00	-160.851.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda

													esa							
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah*				100%	100%	0	0	0	0			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100%	100%	173.690.400,00	85.401.810,00	85.401.810,00	-88.288.590,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,				36 Laporan	36 Laporan	106.490.400,00	18.201.810,00	18.201.810,00	-88.288.590,00	Kab. Takalar, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			0	Bappelitbangda

			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100%	100%	64.960.000,00	110.792.780,00	110.792.780,00	45.832.780,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	50.340.000,00	35.980.000,00	35.980.000,00	-14.360.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	14.620.000,00	74.812.780,00	74.812.780,00	60.192.780,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			0	Bappelitbangda

			yang Dipelihara/Direhabilitasi									, Semua Kel/Desa			dan Pelayanan Publik				
01.00	**05.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Capaian kinerja Perangkat Daerah** **Capaian kinerja Perangkat Daerah** **%**				**100** **94%** **%**	**100** **94%** **%**	**727.424.330,00**	**1.039.783.980,00**	**1.356.138.370,00**	**470.575.670,00**							**1.198.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Kesesuaian Program / kegiatan / Sub Kegiatan RKPD dengan kegiatan APBD*				100%	100%	525.537.090,00	719.830.780,00	688.666.470,00	163.129.380,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		793.000.000,00	Bappelitbangda
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	3 Dokumen	9.999.720,00	70.948.300,00	54.577.900,00	44.578.180,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.770,00	25.310.660,00	25.310.660,00	15.310.890,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	Bappelitbangda

												esa							
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	34.999.780,00	45.578.300,00	45.578.300,00	10.578.520,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	Bappelitbangda
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	34.999.840,00	36.113.100,00	19.493.100,00	-15.506.740,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	Bappelitbangda
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	85.582.300,00	82.880.340,00	60.220.530,00	-25.361.770,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	Bappelitbangda
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1200	1200	34.999.980,00	41.323.980,00	17.813.980,00	-17.186.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			35.000.000,00	Bappelitbangda

																Publik				
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan				2 Dokumen	3 Dokumen	314.955.700,00	417.676.100,00	465.672.000,00	150.716.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			588.000.000,00	Bappelitbangda
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*persentase ketersediaan dan akses data/informasi perencanaan pembangunan daerah*				100%	100%	105.713.770,00	191.045.300,00	111.545.300,00	5.831.530,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		105.000.000,00	Bappelitbangda
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				5 Dokumen	5 Dokumen	49.999.970,00	51.944.300,00	51.944.300,00	1.944.330,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	Bappelitbangda
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				35 Orang	35 Orang	55.713.800,00	139.101.000,00	59.601.000,00	3.887.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			55.000.000,00	Bappelitbangda

												Semua Kel/Desa			Pelayanan Publik				
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai standar* *Persentase perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang terkordinasi dengan baik*				100%	100%	63.503.570,00	90.918.000,00	534.656.700,00	471.153.130,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		170.000.000,00	Bappelitbangda
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	5 Laporan	29.990.020,00	38.290.080,00	28.615.080,00	-1.374.940,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.000.000,00	Bappelitbangda
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil				5 Laporan	5 Laporan	33.513.550,00	52.627.920,00	506.041.620,00	472.528.070,00	Kab. Takalar,	DANA BAGI HASIL	-	6. Perbaikan			60.000.000,00	Bappelitbangda

			Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Persentase penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah*				100%	100%	32.669.900,00	37.989.900,00	21.269.900,00	-11.400.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		130.000.000,00	Bappelitbangda
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				300	300	32.669.900,00	37.989.900,00	21.269.900,00	-11.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	Bappelitbangda
02.00	**05.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**				**100%**	**100%**	**344.935.700,00**	**285.000.030,00**	**180.445.900,00**	**-344.935.700,00**							**0**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencana	*Persentase dokumen*				100%	100%	114.080.200,00	114.080.200,00	82.061.400,00	-32.018.800,			-	6. Perbai	Perangkat		0	Bappelitbangda

		an Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*perencanaan bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan*								00				kan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Daerah			
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				19	19	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				19 Laporan	19 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang				19 Laporan	19 Laporan	59.485.000,00	59.485.000,00	33.885.000,00	-25.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelaya			0	Bappelitbangda

			Pemerintahan									a Kel/Desa			nan Publik				
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	8 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda

			Bidang Pembangunan Manusia																
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	54.595.200,00	54.595.200,00	48.176.400,00	-6.418.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang terkordinasi dengan baik*				100%	100%	108.623.200,00	55.272.000,00	26.442.000,00	-82.181.200,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan				5 Laporan	5 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan,	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0	Bappelitbangda

			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									Semua Kel/Desa			Pelayanan Publik				
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	55.272.000,00	55.272.000,00	26.442.000,00	-28.830.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.				3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda

			RPJMD dan RKPD)																
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	53.351.200,00	0	0	-53.351.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	*Persentase perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan*				100%	100%	122.232.300,00	115.647.830,00	71.942.500,00	-50.289.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemeri	Perangkat Daerah		0	Bappelitbangda

		an	*yang terkordinasi dengan baik*												ntahan dan Pelayanan Publik				
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda

			Bidang Infrastruktur																
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	54.985.700,00	54.985.700,00	38.045.700,00	-16.940.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
			Jumlah Laporan Hasil				4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar,	-	-	6. Perbaikan			0	Bappelitbangda

			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	67.246.600,00	60.662.130,00	33.896.800,00	-33.349.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	05.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**299.997.700,00**	**509.999.980,00**	**852.783.380,00**	**552.785.680,00**							**0**	
01.00	**05.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan**				**100%**	**100%**	**299.997.700,00**	**509.999.980,00**	**852.783.380,00**	**-299.997.700,00**							**0**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase peningkatan dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan*				20%	20%	0	0	0	0			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Takalar		0	Bappelitbangda

	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																	
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase peningkatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan*				20%	20%	130.000.900,00	200.000.100,00	474.846.400,00	344.845.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Takalar		0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	169.925.100,00	169.925.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda

	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.900,00	200.000.100,00	304.921.300,00	174.920.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang	*Persentase peningkatan penelitian pengembangan*				20%	20%	115.297.600,00	200.000.000,00	288.877.100,00	173.579.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola	Pemerintah Kabupaten Takalar		0	Bappelitbangda

		Ekonomi dan Pembangunan	*ekonomi dan pembangunan*												Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	58.834.900,00	0	0	-58.834.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	56.462.700,00	200.000.000,00	188.877.700,00	132.415.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDID	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda

														IKAN						
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	99.999.400,00	99.999.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi							54.699.200,00	109.999.880,00	89.059.880,00	34.360.680,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Takalar		0	Bappelitbangda
	5.05.02.2	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		

	.04.0001																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	49.999.200,00	90.000.080,00	70.300.080,00	20.300.880,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	
			Jumlah Laporan Hasil				1 Laporan	1 Laporan	4.700.000,00	19.999.800,00	18.759.800,00	14.059.800,00	Kab. Takalar,	DAU YANG DITENT	-	6. Perbaikan			0	Bappelitbangda

			Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	Bappelitbangda
	J U M L A H								**5.215.243.596,00**	**6.028.925.697,00**	**6.571.842.869,00**	**-20.817.255.718,00**							**5.347.742.258,00**	

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2024 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerahdengan Bappelitbangda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah.

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar;
2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah dengan pemangku kepentingan; dan
3. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD-P Kabupaten Takalar Tahun 2024 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025;
4. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, maka

semua pihak yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja Perubahan ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar;

5. Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
6. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Takalar, 2025

Kepala Bappelitbangda,

Drs. ACHMAD RIVAI., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196810121989081001

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025



KECAMATAN SANROBONE

KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan. Renja Perubahan ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Perubahan Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing–masing Bagian/Seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan.

Kami menyadari, Perubahan Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Perubahan Renja ini, semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen, serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar dalam melaksanakan Tugas Sebagai Abdi Negara.

Takalar, 11 Mei 2025

Camat Sanrobone



ASRARUDDIN MUIS, S.T.,M.A.P

NIP. 19770508 200312 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL V

DAFTAR GAMBAR VI

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-3

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.3.1 Maksud I-4

1.3.2 Tujuan I-4

1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SANROBONE SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-1

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Laporan, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Kecamatan Sanrpbone 2025 yang Terakomodir di APBD 2025 ..... II-11

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025 ..... II-11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sanrobone II-13

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) II-14

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) II-17

2.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-17

2.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) II-17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SANROBONE III-1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sanrobone III-2

3.2.1 Tujuan III-2

3.2.2 Sasaran III-2

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SANROBONE.....V-1

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-1

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone..... IV-2

BAB V PENUTUP.....V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR PERIODE PELAKSANAAN : SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... I-2
Tabel II-2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025.....II-11
Tabel II-3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Hingga Triwulan I Tahun 2025.....II-11
Tabel II-4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kec. Sanrobone Kab. Takalar Triwulan I Tahun 2025 .....II-13
Tabel II-6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.....II-15

Tabel III-1 Kebijakan Nasional (Prioritas Nasional) Dalam RKP Tahun 2025.....III-2
Tabel III-3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar III-3
TABEL IV-1 RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2025.....IV-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Renja Kecamatan Sanrobone dengan Dokumen Perencanaan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Sanrobone Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Sanrobone Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Gambar I-1
Hubungan Renja Kecamatan Sanrobone dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

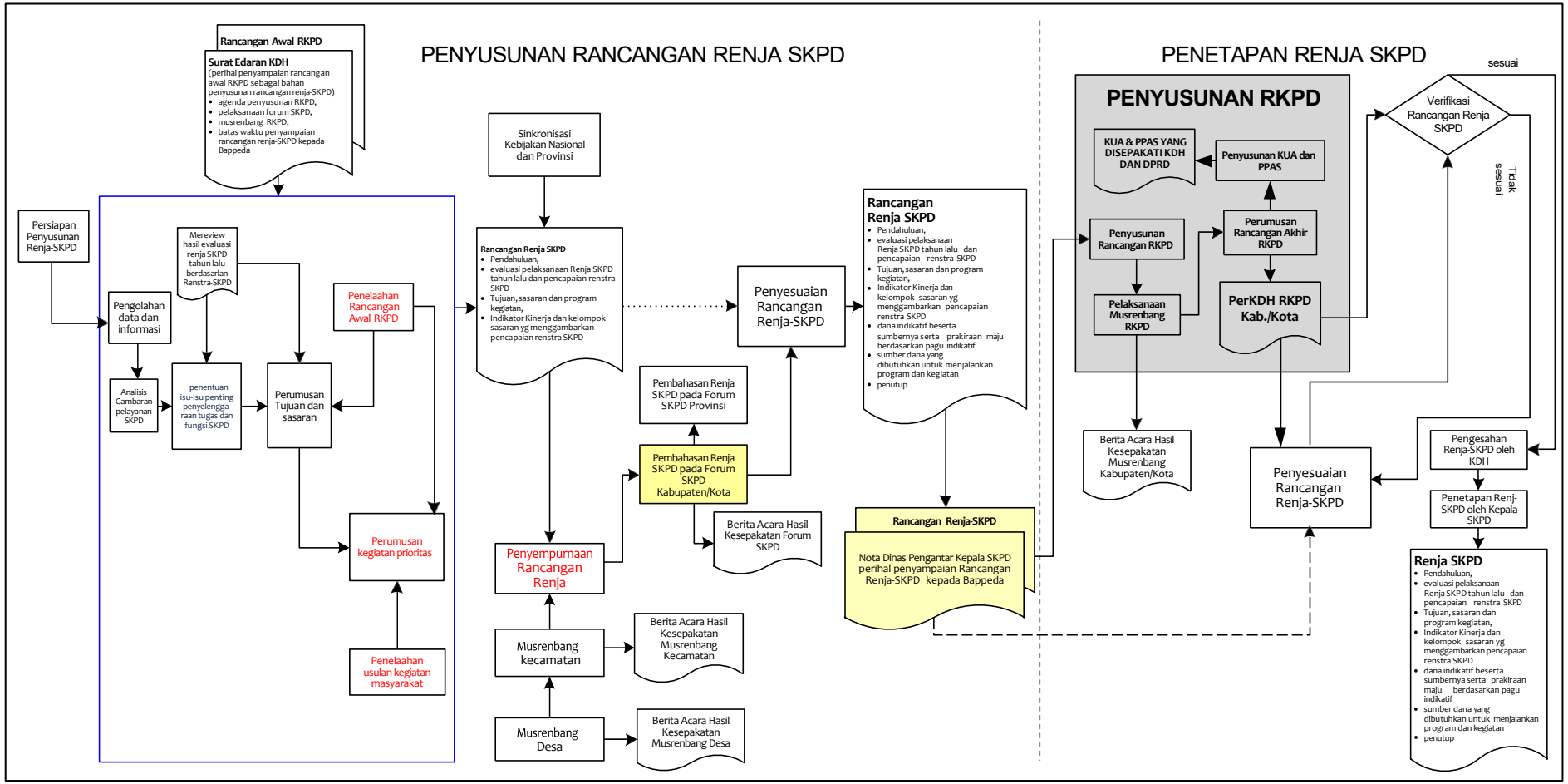

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 1 1).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sanrobone adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra kantor Kecamatan Sanrobone ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi Perubahan APBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Kantor Kecamatan Sanrobone.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sanrobone adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Sanrobone.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone Sampai Triwulan I Tahun 2025, memuat tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan I (Tahun 2025) sesuai dengan renstra dan tupoksi OPD, dan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Sanrobone, memuat tentang tujuan, sasaran program dan kegiatan berdasarkan renstra dan tupoksi Kecamatan Sanrobone khusus untuk tahun 2025.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sanrobone, berisi tentang daftar program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dan dan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan perubahan renja Kecamatan Sanrobone.

BAB V Penutup, Bab ini berisikan bahasan tentang ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SANROBONE SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Kecamatan Sanrobone dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Periode Pelaksanaan 2025.

Tabel II-1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sanrobone s/d Tahun 2025 Kabupaten Takalar

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu **(2023)**	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi (%)	Target program, kegiatan, dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5	6	7	8=7.6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	29	30
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	01				**KECAMATAN SANROBONE**												
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase keterpenuhan dukungan penyelenggaraan administrasi perkantoran**	**100%**	**Persen**	**41,35%**	**100%**	**76%**	**76,32%**	**45,85%**	**51,40%**	**51,40%**	**Kecamatan Sanrobone**	
7	01	01	2,01		**KEGIATAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	100,00%	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	33,33%	66,67%	66,67%		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang di susun	1	Dokumen	1	1	-	0,00%	1	2	200,00%		
7	1	1	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	4	Dokumen		1	1	100,00%	1	2	50,00%		
7	1	1	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	4	Dokumen		1	1	100,00%	1	2	50,00%		

7	01	01	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah**	**Cakupan Pelaporan Penata Usahaan barang milik daerah**	100,00%	Persen	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	Kecamatan Sanrobone	
7	01	01	2,03	0006	Penata Usahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik daerah	8	Laporan		2	2	100,00%	4	50,00%	0,00%		
7	01	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**	100,00%	Persen	25,00%	100,00%	69,90%	69,90%	9,86%	9,86%	28,50%	Kecamatan Sanrobone	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai Kecamatan yang menerima gaji dan tunjangan	784	Orang	196	144	135	93,75%	132	16,84%	25,13%		
						Jumlah pegawai Kecamatan yang menerima TPP	672	Orang	168	144	66	45,83%	11	1,64%	44,62%		
7	01	01	2,02	0005	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Yang disusun	4			1	1	100,00%	1	25,00%	0,00%		
7	01	01	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan adminstrasi perkantoran**	100,00%	Persen	41,16%	100,00%	46,86%	46,86%	54,74%	54,74%	4,32%	Kecamatan Sanrobone	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/penerangan Kantor yang disediakan	40	Jenis		8	4	50,00%	4	10,00%	0,00%		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64	Paket		8	8	100,00%	10	15,63%	0,55%		
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	Laporan	191	191	85	44,50%	240	66,67%	12,05%		
7	01	01	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**	100,00%	Persen	25,60%	100,00%	76,85%	76,85%	57,14%	57,14%	45,83%	Kecamatan Sanrobone	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Air	48	Rekening	12	12	6	50,00%	12	25,00%	80,61%		
						Belanja Tagihan Listrik	48	Rekening	12	12	8	66,67%	12	25,00%	55,63%		

						BelanjaTagihan Wifi	48	Rekening	12	12	9	75,00%	12	25,00%	47,34%		
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi	24	Orang	7	72	60	83,33%	60	250,00%	44,05%		
7	01	01	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah yang di pelihara**	100,00%	Persen	15,00%	100,00%	64,29%	64,29%	70,00%	70,00%	31,32%	Kecamatan Sanrobone	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	1	12	7	58,33%	12	100,00%	41,17%		
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	2	2	2	100,00%	2	25,00%	15,02%		
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat desa/ Kelurahan yang di berdayakan**	**100%**	**Persen**	**6%**	**100%**	**73,61%**	**73,61%**	**14%**	**13,54%**	**10,21%**	**Kecamatan Sanrobone**	
7	01	03	2,02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan**	100,00%	Persen	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4,17%	4,17%	8,09%		
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24	Lembaga Kemasyarakatan		6	6	100,00%	1	4,17%	8,09%		
7	01	03	2,03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang**	100,00%	Persen	12,50%	100,00%	47,22%	47,22%	22,92%	22,92%	10,74%		

7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	48	Lembaga Kemasyarakatan	6	36	17	47,22%	11	22,92%	10,74%		Sosialisasi dan rembuk Stunting Tingkat kecamatan
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100%**	**Persen**	**0%**	**100%**	**67%**	**66,67%**	**25%**	**25,00%**	**0,00%**	**Kecamatan Sanrobone**	
7	01	04	2,01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum**	**Persentase Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum**	100,00%	Persen	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%	25,00%	25,00%	0,00%		
7	01	04	2,01	0001	Sinergitas dengan Kepolosian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi	12	Kegiatan		3	2	66,67%	3	25,00%	0,00%		

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar sampai Tahun 2024, berdasarkan tabel II.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Realisasi Program yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang direncanakan adalah :
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah yang target kinerja rata-rata adalah 100%. Namun pada Tahun 2024 hanya dapat terealisasi 76,32% karena adanya 2 Sub Kegiatan yang tidak dapat terpenuhi 100%, yaitu Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, hanya tercapai 69,90% dan Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, hanya tercapai 46,86%.
   2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja program adalah Persentase Pelayanan Publik Oleh Pemerintah yang target kinerjanya 100%, dan telah terpenuhi 100%.
   3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator kinerja program adalah Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang target kinerjanya 100%, yang telah terpenuhi 73,61%.
   4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan indikator kinerja program adalah Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa / Kelurahan yang target kinerjanya 100%, yang telah terpenuhi 66,67%.

B. Tidak terdapat Program yang realisasinya melebihi target kinerja yang direncanakan.

C. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan /sub kegiatan :
   - Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dikarenakan adanya keterlambatan dalam proses pencairan Uang Persediaan sehingga mempengaruhi proses pencairan di akhir tahun dan kurangnya Sumber Daya Aparatur yang membuat pelaksanaan Sub Kegiatan belum terealisasi sepenuhnya

- Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan karena adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.
- Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan yaitu tidak ada program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja.

D. Implikasi Terhadap Target Capaian Program Renstra Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar yaitu dengan terlaksananya program/kegiatan secara maksimal tentu dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam hal pelayanan publik karena dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan pelayanan dengan segala sumberdaya yang dimiliki maka dapat tercipta pelayanan prima kepada masyarakat yang akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sehingga dalam hal ini faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan, akan sangat berpengaruh dalam melaksanakan tata kerja sesuai tugas dan fungsi secara berkesinambungan dan terus menerus, efektif dan efisien, sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud.

E. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan yaitu dengan lebih meningkatkan koordinasi di tingkat pimpinan sehingga dapat merencanakan kegiatan yang dikondisikan dengan kemampuan anggaran.

Tabel 0-1
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Uraian	Keterangan Kinerja (K)							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1	Program	3	-	3	-	3	-	-	**72,20%**	**97,37%**	S	ST
2	Kegiatan	9	-	9	-	6	3	-	**74,64%**	**93,83%**	S	ST
3	Sub Kegiatan	16	-	16	-	11	7	-	**72,70%**	**86,46%**	S	T

Sumber : Laporan Monev Renja Triwulan IV Tahun 2024

Skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi RPJMD menggunakan kriteria sebagai berikut:

1	91% < 100%	Sangat Tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66% < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Pada tabel II-2 diatas dapat dilihat bahwa skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Sanrobone dapat dikatakan tinggi. Dari 3 program kegiatan Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar hanya memiliki capaian kinerja <100%, dari 9 kegiatan tidak ada kegiatan yang memiliki capaian kinerja 0% dan ada 9 kegiatan yang memiliki capaian kinerja <100% dan dari 16 sub kegiatan, ada 3 kegiatan yang memiliki capaian kinerja 100%, dan 7 sub kegiatan yang memiliki capaian 100%, serta 16 sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja >100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sanrobone

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sanrobone berdasarkan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sanrobone Tahun 2023-2026 yang mendukung Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan di Kelurahan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain pengantar KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sanrobone tahun 2024 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Sanrobone, harus dilakukan survey IKM. Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sanrobone. Kinerja pelayanan didukung oleh sistem yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan. Adapun tabel analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sanrobone sebagai berikut:

Tabel II-3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Triwulan II	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan	70%	87,04%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan	91,21%	92%	93%	Survey belum selesai	92%	93%	
2	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban	90%	72%	Persentase Pelayanan Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	88%	66%	86%	88%	
3	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)	100%	87%	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	84%	85%	90%	75%	85%	90%	
4	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Non Standart Pelayanan Minimal (Non SPM)	100%	85%	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Sanrobone	65%	68%	70%	Belum dilakukan evaluasi penilaian	72%	75%	
5	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kondisi Baik	75%	73%	Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Sanrobone	78%	80%	82%	72%	92%	92%	
6	Angka Kriminalitas	43	25								
7	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,697	0,7033								
8	Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju	30%	50%								
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	85%	75%								
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Belum dilakukan evaluasi penilaian								
11	Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong	B	B (65,58)								

Perubahan indikator kinerja perangkat daerah dipengaruhi oleh adanya perbedaan visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. Pada periode sebelumnya melalui Renstra 2023–2026, arah pembangunan Kecamatan Sanrobone lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan desa, serta peningkatan pelayanan publik yang bersifat fundamental. Sehingga, indikator tahun 2024 masih berfokus pada capaian dasar seperti kepuasan masyarakat, ketertiban umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan pembangunan desa. Namun, memasuki periode Renstra 2025–2029, arah kebijakan berubah mengikuti visi Bupati terpilih yaitu "Takalar Maju Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital". Visi ini mendorong transformasi pembangunan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis digital, dengan orientasi pada peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja tahun 2025 disusun lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi, seperti peningkatan kepuasan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan, penanganan aduan masyarakat, literasi digital ASN, serta penguatan akuntabilitas kinerja (SAKIP).

Dengan demikian, perubahan indikator dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran fokus pembangunan, dari orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas layanan publik, menuju pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Berdasarkan tabel II-5 diatas, pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Adapun penjelasannya yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan

   Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian berada pada angka 87,04 poin dari target yang ditetapkan sebesar 70 poin. Capaian ini menggambarkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan sudah berjalan baik dan telah melebihi target yang ditentukan. Penilaian ini diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat yang melibatkan responden dari berbagai kelompok pengguna layanan, sehingga hasilnya mencerminkan persepsi masyarakat secara langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Meskipun secara umum sudah baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya pada aspek kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat dan kecepatan pelayanan. Perbaikan pada kedua aspek tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kepuasan masyarakat sehingga target IKM pada periode berikutnya dapat tercapai atau bahkan terlampaui.

2. **Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban** Berdasarkan data perbandingan angka kriminal di Kecamatan Sanrobone, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 62 kasus dan pada tahun 2024 menurun menjadi 41 kasus, atau terjadi penurunan sebesar 21 kasus. Jika dihitung dalam persentase, maka realisasi penurunan kriminalitas hanya mencapai sekitar 66%. Sementara itu, target penurunan kasus kriminal tahun 2024 ditetapkan sebesar 72%, sehingga capaian tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren positif berupa penurunan kasus, namun hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap strategi

pencegahan dan penanganan tindak kriminal yang selama ini dijalankan. Upaya sinergis antara aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, dan partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat agar di tahun mendatang penurunan angka kriminalitas dapat lebih signifikan dan mendekati target yang ditetapkan.

3. Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 87% dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa pelayanan dasar publik di Kecamatan Sanrobone pada dasarnya sudah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku. Layanan kesehatan mencapai 90%, Layanan pendidikan 89%, Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 80%, Layanan Sosial 86% dan Layanan Pekerjaan Umum 86%. Dari total 467 permohonan pelayanan, sebanyak 408 telah dilaksanakan sesuai SPM, sehingga menghasilkan capaian rata-rata 87%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik, baik dalam hal ketepatan waktu, prosedur yang jelas, maupun kesesuaian hasil layanan dengan standar. Meski demikian, Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat masih dibawah 72%, sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan pada periode berikutnya.

4. Persentase Pelayanan sesuai Non Standar Pelayanan Minimal (Non SPM)

Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Non SPM sebesar 85%, dan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang cukup memadai. Berdasarkan data perhitungan, dari total 185 layanan yang diterima, sebanyak 158 layanan berhasil diselesaikan sesuai Non SPM, sehingga capaian rata-rata adalah 85%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Non SPM di Kecamatan Sanrobone telah terlaksana dengan baik, namun masih memerlukan optimalisasi sistem pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana pendukung agar capaian di tahun berikutnya bisa memenuhi atau melampaui target.

5. Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kondisi Baik

Pada tahun 2024, capaian persentase sarana dan prasarana pelayanan umum dalam kondisi baik di Kecamatan Sanrobone mencapai 73%, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 75%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana prasarana sudah tersedia dan berfungsi dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan untuk mencapai standar optimal. Berdasarkan tabel perhitungan, dari total 52 sarana prasarana yang tersedia, terdapat 43 dalam kondisi baik. Hampir seluruh jenis prasarana seperti kantor, puskesmas, sekolah (SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA), dan pasar telah memenuhi standar ketersediaan. Namun, pada kategori kondisi kantor pelayanan hanya terdapat 14 dari 18 dengan kondisi baik atau sekitar 78%. Kekurangan ini menjadi faktor utama penyebab belum tercapainya target 85%. Dengan demikian, meskipun capaian 73% menunjukkan pelayanan publik sudah ditunjang sarana prasarana yang cukup memadai, tetap diperlukan penambahan dan perbaikan kantor pelayanan agar kualitas layanan masyarakat dapat lebih optimal dan sesuai dengan target.

6. Angka Kriminalitas

Pada tahun 2024, angka kriminalitas di Kecamatan Sanrobone tercatat sebesar 25 kasus per 10.000 penduduk, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 43 kasus per 10.000 penduduk. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di wilayah Kecamatan Sanrobone relative terkendali dan kondisi keamanan masyarakat tergolong cukup kondusif. Berdasarkan data tabel tindak kriminal, jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2024 sebanyak 25 kasus dengan jumlah penduduk sebesar 17.094 jiwa, sehingga hasil perhitungan angka kriminalitas adalah:

193 /45.047 X 10.000 = 14 kasus per tahun

Hasil ini membuktikan bahwa meskipun masih terdapat berbagai bentuk tindak kriminal, intensitasnya lebih rendah dibandingkan target, yang berarti efektivitas upaya aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan cukup baik. Namun demikian, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan patroli keamanan, penguatan koordinasi aparat, serta program pembinaan masyarakat untuk menekan angka kriminalitas lebih rendah lagi di tahun- tahun mendatang.

7. Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan

Daftar IDM Desa Se Kecamatan Sanrobone:

No	Nama Desa	Nilai IDM 2024	Status IDM
1	Sanrobone	0,7189	Maju
2	Banyuanyara	0,7081	Maju
3	Paddinging	0,7113	Maju
4	Tonasa	0,6586	Berkembang
5	Laguruda	0,67	Berkembang
6	Ujung Baji	0,6827	Berkembang

8. Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju

Pada tahun 2024, persentase desa status berkembang menuju status desa maju di Kecamatan Sanrobone belum mencapai target. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang mengalami peningkatan menjadi desa maju sebanyak 3 desa dari 6 desa yang sebelumnya berstatus berkembang. Dengan semakin banyaknya desa berkembang yang naik kelas menuju desa maju, maka kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Sanrobone juga akan semakin meningkat, baik dari sisi akses layanan dasar, peluang ekonomi lokal, maupun pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga konsistensi pembinaan, memperkuat kelembagaan desa, serta meningkatkan sinergi antar-pemangku kepentingan agar seluruh desa dapat mencapai status desa maju bahkan desa mandiri.

9. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2024, persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sanrobone mencapai 75%, dan belum mencapai target yang ditetapkan karena masih terdapat beberapa lembaga seperti Bumdes, Karang Taruna dan Kelompok Tani yang tingkat keaktifannya relative rendah dibandingkan lembaga lain. Jumlah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Sanrobone tahun 2024 sebanyak 64 lembaga, dengan 48 lembaga yang aktif. Perhitungannya yaitu:

64/48 x 100% = 75%

Capaian ini menandakan peran lembaga kemasyarakatan cukup konsisten dalam pemberdayaan masyarakat. Tingkat keaktifan tertinggi ditunjukkan oleh LPM, BPD, dan PKK yang mencapai 100%.

10. Indeks Reformasi Birokrasi

Target yang ditetapkan adalah predikat B, namun pada tahun 2024 belum ada realisasi karena belum dilakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan dalam proses penilaian agar capaian reformasi birokrasi dapat terukur dengan jelas. Evaluasi yang tepat waktu penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Sanrobone.

11. Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Sanrobone

Target nilai B dan realisasi mencapai adalah B (65,58). Capaian ini berhasil melampaui target yang ditetapkan, menandakan adanya peningkatan kualitas dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja di Kecamatan

Sanrobone. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar, yang sekaligus menunjukkan komitmen kecamatan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan

   Pada tahun 2025 ditetapkan target IKM sebesar 91,21. Namun, pada Triwulan II, realisasi capaian belum tersedia karena proses survei kepuasan masyarakat masih berlangsung. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian survei agar dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas layanan.

2. Persentase Pelayanan Masyarakat yang Selesai Tepat Waktu

   Target pelayanan tepat waktu pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 85%, sementara hasil realisasi pada triwulan II sudah mencapai 75% dengan jumlah layanan yang masuk sebanyak 225 Layanan dan yang sudah diselesaikan tepat waktu sebanyak 170 Layanan. Pencapaian ini terjadi karena adanya kesadaran dan kompetensi petugas serta dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

3. **Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti** Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 84%, sementara realisasi triwulan II sudah mencapai 6 6 % dengan target aduan dalam setahun sebanyak 12 aduan dan sudah diselesaikan sebanyak 8 aduan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan kecamatan semakin meningkat, karena mayoritas aduan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Meski demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, agar capaian di masa mendatang semakin optimal.

4. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Sanrobone

   Target yang ditetapkan adalah memperoleh nilai B (68,20). Pada Triwulan II tahun 2025, penilaian SAKIP oleh Inspektorat belum dilaksanakan sehingga belum terdapat data realisasi. Oleh karena itu, Kecamatan perlu mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar saat penilaian dilakukan hasilnya dapat sesuai target.

5. Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Sanrobone

   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 78%, dan realisasi pada triwulan II juga telah mencapai 72%, sehingga capaian ini hampir memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, dari 11 ASN di Kecamatan Sanrobone, sebanyak 8 ASN mampu mengoperasikan komputer, sehingga menghasilkan tingkat literasi digital sebesar 72%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital sudah cukup baik untuk mendukung tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Namun, peningkatan kapasitas masih tetap diperlukan agar literasi digital ASN semakin optimal dalam menunjang efektivitas, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sanrobone

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Sanrobone melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Belum Optimal pemanfaatan sarana teknologi informasi.
4. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Peran serta masyarakat dalam memelihara Sarana dan Prasarana pelayanan umum belum optimal.
6. Data terkait sarana dan prasarana pelayanan umum belum tersedia di kecamatan.
7. Belum optimalnya ketahanan sosial, ekonomi, dan ketahanan ekologi di desa yang mengakibatkan masih berstatus desa berkembang.
8. Kurangnya pemahaman pengurus lembaga kemasyarakatan tentang tugas dan fungsinya.
9. Kurangnya komunikasi dan informasi antara lembaga kemasyarakatan dengan masyarakat.

Adapun Rekomendasi untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sanrobone:

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan disosialisasikan kepada masyarakat.
2. Memberikan pelatihan kepada staf kecamatan untuk meningkatkan keterampilan dalam pelayanan publik.
3. Layanan yang lebih cepat, mudah, dan sesuai harapan masyarakat.
4. Melakukan inventarisasi dan evaluasi sarana-prasarana yang ada.
5. Mengajukan anggaran untuk pengadaan dan perbaikan fasilitas yang mendesak.
6. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan sarana-prasarana.
7. Meningkatkan peran camat sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat.
8. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi untuk memotivasi kinerja.
9. Membentuk tim khusus penanganan konflik yang terdiri dari perwakilan masyarakat, aparat kecamatan, dan keamanan.
10. Menjalin komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal.
11. Mengadakan program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kedamaian.
12. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendukung pembangunan.
13. Membuat laporan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi.
14. Menyusun prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan utama masyarakat.
15. Mengawasi penggunaan anggaran melalui sistem akuntabilitas yang transparan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut :

Table II-4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Takalar

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sanrobone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah**	**100%**	**1.817.016.600**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah**	**100%**	**1.817.016.600**	
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kecamatan SANROBONE**	**Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**12.000.000**	**Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan SANROBONE**	**Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**12.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA – SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA – SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kecamatan SANROBONE**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**	**100%**	1.617.016.600	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan SANROBONE**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**	**100%**	1.617.016.600	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	1.617.016.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	1.617.016.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Baik**	**100%**	**3.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Baik**	**100%**	**3.000.000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Adminstrasi Umum yang Baik**	**100%**	**324.785.612**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Adminstrasi Umum yang Baik**	**100%**	**324.785.612**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	45.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	45.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**625.134.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**625.134.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg Dipelihara**	**100%**	**57.780.388**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg Dipelihara**	**100%**	**57.780.388**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.290.388	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.290.388	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang di Pelihara	65 Unit	16.890.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang di Pelihara	65 Unit	16.890.000	
2	**PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Sarana Prasarana Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**53.900.000**	**PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Sarana Prasarana Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**53.900.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** **Persentase Terpenuhinya Koordinasi Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal**	**100%**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** **Persentase Terpenuhinya Koordinasi Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal**	**100%**		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	15.000.000	
	Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan** **Cakupan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan** **Persentase Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	**100%**	**22.300.000**	**Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan** **Cakupan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan** **Persentase Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	**100%**	**22.300.000**	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	7.500.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	7.500.000	
	Fasilitasi Percepatan Standar pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		Fasilitasi Percepatan Standar pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.9800.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.800.000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dengan Kondisi Baik**	**100%**	**9.800.000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dengan Kondisi Baik**	**100%**	**9.800.000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	9.800.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	9.800.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kecamatan SANROBONE**	**Persetase Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan yang Dilaksanakan Kecamatan**	**100%**	**9.800.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persetase Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan yang Dilaksanakan Kecamatan**	**100%**	**9.800.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9.800.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9.800.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100%**	**95.700.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100%**	**95.700.000**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina di Kelurahan**	**100%**	**73.200.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina di Kelurahan**	**100%**	**73.200.000**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10 Lembaga	73.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10 Lembaga	73.200.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan SANROBONE**	**Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan**	**100%**	**5.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan SANROBONE**	**Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan**	**100%**	**5.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Sinergitas Kepolisian Negara,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di**	**100%**	**5.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan SANROBONE**	**Persentase Sinergitas Kepolisian Negara,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di**	**100%**	**5.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kecamatan **Persentase Keterlibatan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Pemenuhan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**					**Kecamatan** **Persentase Keterlibatan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Pemenuhan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.800.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.800.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	9.800.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan SANROBONE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	9.800.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom up planning*) berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, assosiasi-assosiasi maupun perguruan tinggi berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Kecamatan Sanrobone Tahun 2026.

Tabel 0-2
Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kabupaten Tahun 2026 Kabupaten Takalar

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
1	2	3	4	5
1	Pembuatan tanggul penahan Abrasi	Ujung Baji	Panjang tanggul beton yang akan dibangun	1000 Meter
2	Pembuatan tanggul penahan banjir air sungai	Ujung Baji	Panjang tanggul beton yang akan dibangun	500 Meter
3	Rehabilitasi Jembatan	Ujung Baji	Panjang jembatan yang akan dibangun	10 Meter
4	Bedah rumah	Ujung Baji	Banyaknya Rumah yang akan di Perbaiki	100 unit
5	Rehab jembatan BT. Panno	Tonasa	Panjang jembatan yang akan direhab	7 meter
6	Perbaikan lapangan/Sarana dan prasarana Olah raga Sanrobone	Sanrobone	Luas lapangan yang akan di perbaiki	70X 100 meter
7	Pegadaan HandTraktor, mesin Pompa air, alat tanam jagung ,bibit, pupuk urea, hansprayer	Tonasa	Jumlah Pegadaan HandTraktor, mesin Pompa air, alat tanam jagung ,bibit, pupuk urea, hansprayer	Unit
8	Perbaikan Jalan Desa	Tonasa	Panjang Jalan Desa yang akan diperbaiki	2.500 Meter
9	Pengadaan lapangan	Tonasa	Jumlah lapangan yang akan diadakan	100 X 100 Meter
10	Pengadaan sapi Indukan	Tonasa	Jumlah sapi yang akan diadakan	100 ekor
11	Perbaikan jalan tani	Sanrobone	Panjang jalan tani yang akan di perbaiki	1000 meter
12	Perbaikan Jalan Desa	banyuanyara	Panjang Jalan Desa yang akan diperbaiki	2.000 Meter
13	Pengadaan itik, kambing	tonasa	Jumlah itik, kambing yang dibutuhkan	5.000 ekor

14	Pengadaan bibit unggas	Sanrobone	Jumlah ungags yang dibutuhkan	5.000 ekor
15	Pemeliharaan situs budaya dan pelaksanaan event budaya	Sanrobone	Jumlah situs yang dipelihara	5 unit
16	Pembuatan Irigasi pertanian	banyuanyara	Panjang irigasi yang akan dibangun	1.500 Meter
17	Pengadaan Handtraktor roda 2	Sanrobone	Jumlah Handtraktor yang akan diadakan	10 unit
18	Pengadaan traktor Roda 4	Sanrobone	Jumlah traktor yang akan diadakan	5 unit
19	Pembuatan sarana dan pasarana olahraga	Pa'dinging	Jumlah sarana yang akan dibangun	4 unit
20	Peningkatan jalan tani Bontopanno	Pa'dinging	Panjang jalan yang akan diperbaiki	1.000 meter
21	Pengadaan lahan pemakaman dusun pa'dinging II	Pa'dinging	Jumlah pemakaman yang akan diadakan	1 hektar
22	Pengadaan lampu jalan dusun bilaya	Pa'dinging	Jumlah lampu yg akan diadakan	30 unit
23	Perbaikan Drainase dusun bontopanno	Pa'dinging	Panjang drainase yang akan diperbaiki	800 meter
24	Pembuatan tanggul penahan ombak	Laguruda	Panjang tanggul yang akan dibuat	1.000 meter
25	Peningkatan jalan tani	Laguruda	Panjang jalan tani yang akan dibuat	1.500 meter
26	Pengadaan alat penangkap ikan	Laguruda	Jumlah alat penangkap ikan	20 unit
27	Pengadaan bibit udang	Laguruda	Jumlah bibit yang akan diadakan	1 juta ekor

Sumber : Usulan Musrenbang Kelurahan di Kecamatan Sanrobone Tahun 2024.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SANROBONE

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.

3.1.3 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Kecamatan Sanrobone yaitu **"Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik",** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
2. Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Pada Kantor Sanrobone

Tujuan dan sasaran Kecamatan Sanrobone dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Kecamatan Sanrobone Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

TABEL III.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sanrobone
Kabupaten Takalar 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Sanrobone											
- Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan (%)	87,04	91,21	92	93	94	95	96	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu (%)	80	85	86	88	90	92	95	
			Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	82	84	85	90	92	94	97	
		Meningkatnya Tata Kelola Pada Kantor Sanrobone	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan (Angka)	62,58	65	68	70	72	74	75	
			Tingkat Literasi Digital ASN Kantor Kecamatan (%)	75	78	80	82	84	85	88	

Sumber : Renstra Kecamatan SANROBONE Tahun 2025-2029; diolah

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SANROBONE

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone Tahun 2025 dengan total pagu Rp **1.884.394.211** (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Empat Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 0-1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SANROBONE						**1.884.394.211,00**							**160.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.884.394.211,00**							**160.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.884.394.211,00**							**160.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.815.610.611,00**						**-**	**126.000.000,00**	
		[Terpenuhinya Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi**	**95**	**90**	**92**	**93**	**1.815.610.611,00**	-	-	-	-	-	-	**126.000.000,00**	-

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.589.400,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.484.600,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.997.600,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

BAB V
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahn Renja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Perubahan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar;
4. Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renja Kecamatan Sanrobone

Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan penyesuaian dan penjabaran terhadap Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Selain itu perubahan Renja ini dimaksudkan untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan OPD. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar mendukung misi Ke enam yakni "Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolah ragaan, dan pemajuan kebudayaan".

Peningkatan pelayanan dalam bidang ketertiban dan keamanan serta pelayananan pencegahan bahaya kebakaran dan peneyelamatan menjadi tujuan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar dengan sasaran tiga (3) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran (Menit).
3. Meningkatnya Tata Kelola kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Perubahan Renja dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan tidak terlepas dari pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 dalam rangka mendukung perwujudan misi dan misi Pemerintah Kabupaten Takalar yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai posisi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Serta Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Perubahan Renja sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan yang telah melalui tahap evaluasi dan merupakan turunan dari Rancangan Awal Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan dasar untuk menyusun perubahan rencana kegiatan dan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Takalar, Mei 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar,

Sirajuddin Saraba, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-6

1.3 Maksud dan Tujuan..... I-9

1.4 Sistematika Penulisan I-9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025 II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sasaran Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan sampai Triwulan I Tahun 2025.....

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 .....

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025 .....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN..... **III-1**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan III-2

3.2.1 Tujuan III-3

3.2.2 Sasaran III-3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENEYELAMATAN..... **IV-1**

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2025 ..... IV-1

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2025 ..... IV-1

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dan Pencapaian Renstra Renja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan s/d Tahun 2025..... I-3

Tabel II-2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan II-23

Tabel II-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Periode 2023-2026 ..... II-24

Tabel II-4 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas II-36

Tabel II-5 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Takalar..... II- 46

Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-4

Tabel IV-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Takalar IV-7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Selanjutnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) B Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan

Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan (DPPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, kondisi Triwulan I dan II ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendali dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar

Tahun 2016 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Takalar nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 27);
19. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

  Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah sebagai berikut:

  a. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra OPD ke dalam program/kegiatan tahunan
  b. Menyiapkan acuan bagi Rancangan Perubahan APBD
  c. Menyiapkan kerangka evaluasi perubahan kinerja program/ kegiatan tahunan bagi OPD.

- **Tujuan**

  Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD

1.4 Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan, Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan dokumen

Renja (Rencana Kerja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar.

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, IKK, SPM dan SDGs, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak dan upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai triwulan I.

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran, review terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, serta rencana program dan kegiatan perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB IV: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan dalam perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB V: PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I Tahun 2025.

Informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah pelaksanaan sampai triwulan I, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah pelaksanaan Renja dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Table 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3					4	5	8		12		25		26 = 25/8 x 100%	
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN									
	1					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
	1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		**100%**	**8.346.233.760**	6,79%	**1.578.935.214**	**7%**	**1.577.129.284**	**6,79%**	**18,90%**
	1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi**	**100%**	**8.212.478.140**	**3,70%**	**1.543.667.794**	**3,70%**	**1.543.667.794**	**3,70%**	**18,80%**

						Daerah Kabupaten/Kota									
	1	05	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Berjalan Lancar**	100%	5.206.290	11,11 %	2.206.390	11,11%	2.206.390	11,11 %	42,38 %
	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	3	568.190	1	460.890	1	460.890	33 %	81 %
	1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA	1	746.400	-	641.800	-	641.800	0%	86 %
	1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	1	719.100	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	563.800	-	-	-	-	0%	0%

	1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusuna Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1.340.700	-	547.700	-	547.700	0%	41 %
	1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD SKPD yang disusun	1	531.800	-	225.000	-	225.000	0%	42 %
	1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	736.300	-	331.000	-	331.000	0%	45 %
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**4,76%**	**42,17 %**
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**

	1	05	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	6.329.633.000	15%	1.228.820.304	15%	1.228.820.304	15%	19%
	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji (70 orang)	980	4.723.589.296	280	1.227.382.304	280	1.227.382.304	29%	26%
							Jumlah ASN yang menerima Tunjangan (TPP)	840	1.589.391.504	-	-	-	-	0%	0%
							Jumlah ASN yang menerima objektifitas Lainnya (2 orang)	24	10.320.000	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	782.000	-	707.000	-	707.000	0%	90%
	1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1	2.569.000	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1.361.000	-	731.000	-	731.000	0%	54%

						Pemeriksaan (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)									
	1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah dokumen Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD yang disusun	4	1.620.200	-	-	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**4,08%**	**24,30 %**
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**

	1	05	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100%	2.134.200	0%	916.800	0%	916.800	0%	43 %
	1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	397.400	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	391.200	-	226.200	-	226.200	0%	58 %
	1	05	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	329.200	-	329.200	-	329.200	0%	100 %
	1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	526.400	-	361.400	-	361.400	0%	69 %
	1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	490.000	-	-	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**45,30 %**

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**
	1	05	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	3.489.400	0%	561.300	0%	561.300	0%	16 %
	1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PDL Beserta Atribut Kelengkapannya	-	762.000	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	630.100	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1.077.300	-	360.300	-	360.300	0%	33 %
	1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev kinerja pegawai yang disusun	1	1.020.000	-	201.000	-	201.000	0%	20 %
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**13,29 %**
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**

	1	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	43.483.190	0%	4.784.200	0%	4.784.200	0%	11%
	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	360.400	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	281.000	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	29.950.000	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	8.220.490	-	3.344.200	-	3.344.200	0%	41%
	1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	-	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	-	-	-	-	-	0%	0%

	1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	-	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	4.320.000	-	1.440.000	-	1.440.000	0%	33 %
	1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	351.300	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	-	-	-	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**7,40%**
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**

	1	05	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	100%	2.824.000	0%	-	0%	-	0%	0%
	1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	2.824.000	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	-	-	-	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**
	1	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	1.792.078.060	3%	287.228.800	3%	287.228.800	0,00%	0,00%
	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	152.100	-	-	-	-	0%	0%

	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayarkan	12	-	-	-	-	-	0%	0%
							Jumlah rekening air yang dibayarkan	12	14.910.000	-	1.628.800	-	1.628.800	0%	11 %
							Jumlah rekening wifi/komunukasi yang dibayarkan	12	-	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan tenaga pendukung non ASN (tenaga administrasi,	12	1.777.015.960	2	285.600.000	2	285.600.000	17 %	16 %
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**3,33%**	**5,40%**
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**
	1	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	33.630.000	0,00%	19.150.000	0,00 %	19.150.000	0%	57 %
	1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan Dua atau Lapangan (Kendaraan dinas Operasional dan Damkar)	1	-	-	-	-	-	0%	0%

						Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)								
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	33.630.000	-	19.150.000	-	19.150.000	0%	57 %
	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	-	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah pemeliharan bangunan pos penjagaan satpol PP dan Damkar	1	-	-	-	-	-	0%	0%

						Bangunan Lainnya									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**14,24%**
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**1,52%**	**19,01%**
Predikat Kinerja Program														**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja:															
Faktor penghambat: : anggaran pelaksanaan kegiatan masih sangat terbatas															
Faktor penghambat: Proses permintaan Dana dan pencairan Dana di BPKAD Lambat															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):Mengoptimalkan kegiatan yang belum dilaksanakan di triwulan berikutny															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): Adanya Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan serta kualitas pelayanan perangkat daerah															
	1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum**	**100%**	**25.730.580**	**16,67%**	**8.646.960**	**16,67%**	**8.646.960**	**16,67%**	**33,61%**

	1	05	02	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Presentasi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang ditangani**	100%	17.389.400	0,00%	5.325.400	0,00%	5.325.400	0,00%	30,62%
	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Patoli Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	12	2.534.000	-	2.200.000	-	2.200.000	0,00%	86,82%

1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Patroli Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1	1.240.000	-	-	-	-	0%	0%
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	-	-	-	-	-	0%	0%
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pos kamling serta Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	8.820.400	-	3.125.400	-	3.125.400	0,00%	35,43%

	1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1	-	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	1	4.795.000	-	-	-	-	0%	0%

	1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum (pengadaan dan perawatan Pakaian anti huru hara,ht dan alat pendukung operasional lapangan)	1	-	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	-	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	-	-	-	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,0**	**13,**

														0%	**58 %**
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**
	1	05	02	2.02		**Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	100%	8.341.180	33,33 %	3.321.560	33,33%	3.321.560	33 %	40 %
	1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	1	2.924.560	1	2.924.560	1	2.924.560	100 %	100 %
	1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1	2.664.860	-	167.000	-	167.000	0%	6%

						Bupati/Walikota									
	1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	1	2.751.760	-	230.000	-	230.000	0%	8%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**33 %**	**38 %**
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**16,67 %**	**25,90 %**
Predikat Kinerja Program														**SR**	**SR**

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Terlambatnya Penerbitan SPD yang mempengaruhi pencairan dan realisasi

Faktor penghambat: Perlunya tambahan personil yang kompoten sehingga pekerjaan dapat terdistribuisi dengan baik dan tidak lagi terjadi penumpukan beban kerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):Perlunya tambahan anggaran kegiatan terutama Kegiatan utama sehingga capaian kinerjanya semakin optimal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): Mengupayakan penataan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada

	1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Penanggulangan bencana kebakaran**	**100%**	**108.025.040**	**0,00%**	**26.620.460**	**0,00%**	**24.814.530**	**0,00%**	**22,97%**
	1	05	04	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran**	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	100%	105.503.380	0%	24.814.530	0,00%	24.814.530	0,00%	23,52%

						dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
	1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1	99.997.400	-	22.270.500	-	22.270.500	0%	22 %
	1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	934.050	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	1.725.000	-	1.480.000	-	1.480.000	0%	86 %
	1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1.855.930	-	1.064.030	-	1.064.030	0%	57 %

						dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan rasarana Pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1	991.000	-	-	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**33,08%**
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**
	1	05	04	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran**	100%	525.730	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%
	1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1	525.730	-	-	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**

Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**
	1	05	04	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	100%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%
	1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah sosialisasi Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap cara-cara pencegahan dini dan pengendalian bahaya kebakaran	1	-	-	-	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0,00%**	**0,00%**
Predikat Kinerja Kegiatan														**SR**	**SR**
	1	05	04	2.05		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya**	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	100%	1.995.930	0%	1.805.930	0%	1.805.930	0,00%	90,48%

						dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
	1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1	1.750.930	-	1.580.930	-	1.580.930	0%	90 %

	1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1	-	-	-	-	-	0%	0%
	1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1	245.000	-	225.000	-	225.000	0%	92 %

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	**0,00%**	**60,71 %**
Predikat Kinerja Kegiatan	**SR**	**R**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**0,00%**	**23,45 %**
Predikat Kinerja Program	**SR**	**SR**
Faktor pendorong pencapaian kinerja:		
Faktor penghambat: : Terlambatnya Penerbitan SPD yang mempengaruhi pencairan dan realisasi		
Faktor penghambat: Tidak terpenuhinya anggaran di beberapa kegiatan utama		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Peningkatan sarana dan prasarana kerja		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): Adanya tambahan anggaran kegiatan, terutama Kegiatan utama sehingga capaian kinerjanya semakin optimal pada tahun akan datang		
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**6,06%**	**22,79 %**
Predikat Kinerja Program	**SR**	**SR**

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025

APBD 2025							
No. Urut	**Perangkat Daerah**	**Jmlh Prog.**	**Jmlh Keg**	**Jmlh Sub Keg.**	**Indikator**		
					Jmlh Prog.	**Jmlh Keg**	**Jmlh Sub Keg.**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	14	62	3	14	66

Sumber : Laporan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 3, jumlah kegiatan 14, dan jumlah sub kegiatan 62, sedangkan jumlah indikator program sebanyak 3, jumlah indikator kegiatan sebanyak 14, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 66.

2.3 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3 **Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar hingga Triwulan I Tahun 2025**

No.	**Program**	**Pagu APBD**	**Realisasi s/d Triwulan I**	**Persentase**	
				Fisik (%)	**Keu (%)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.212.478.140,00	1.543.667.794,00	3,70%	18,80%
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.730.580,00	8.646.960,00	16,67%	33,61%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	108.025.040,00	26.620.460,00	0%	22,97%
	Jumlah	**8.346.233.760,00**	**1.578.935.214,00**	**6,79%**	**18,90%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Tw. I Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar ***Rp. 8.346.233.760,00***. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar ***Rp. 1.578.935.214,00*** atau **6,79%** persen dengan capaian realisasi fisik sebesar **18,90%** . Kondisi ini menunjukkan capaian fisik masih kurang yakni **6,10 %** dari target **25,00** persen yang diharapkan pada triwulan I.

Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar hingga triwulan I masih dalam kategori **Sangat Rendah** yaitu rata- rata >5 persen.

2.4 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Sangat Rendah** untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan realisasi masih di bawah 20%.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar dengan menggunakan kategori tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa program yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar yaitu sebanyak 0 (Nol) program realisasinya masih tergolong kategori **Sangat Rendah**, yakni di bawah 10% , program yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar yaitu sebanyak 1 (Satu) program realisasinya masih tergolong kategori **Rendah** Yakni dibawah 20% program yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar yaitu sebanyak 2 (Dua) program realisasinya masih tergolong kategori **Tinggi** diatas 20% data yang digunakan adalah realisasi triwulan I .

2. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar dapat dijelaskan bahwa terdapat 14 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 4 kegiatan yang **Rendah 10%** 3 (Tiga) kegiatan **Sedang** Dibawah 20 % serta 7 (Tujuh) **Tinggi** diatas 20% atau 22,79 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori sangat rendah yaitu <0 – 20 persen, sedang 3 (T i g a) kategori tinggi dengan capaian realisasi di 43% **sedang** .

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada perangkat daerah pada masing-masing level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 62 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan

<20% yang capaian kinerja pendanaanya masih **rendah**, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan **sedang** terdapat 2 (dua) sub kegiatan atau >20-43 % dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan **tinggi** sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja* Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar *Triwulan I Tahun 2025

Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
		0 - 10% (R)	>10 – 20% (S)	> 20% (T)		0 - 10% (R)	>10 – 20% (S)	> 20% (T)		0 - 10% (R)	>10 – 20% (S)	> 20% (T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	0	1	2	14	4	3	7	62	37	2	23

2.5 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori **Sedang** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi kinerja antara 20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi kinerja di atas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 43 persen, sehingga jika terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian realisasi kinerja lebih dari 43 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada tiap-tiap perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 3 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori **Rendah** atau di bawah 20 persen. Dari 3 program pencapaian kinerjanya masih digolongkan kategori rRendah yaitu di bawah 20 persen pada triwulan I Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan

bahwa dari 13 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama terdapat 10 kegiatan (76,92 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih **Rendah** atau di bawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori **Sedang** terdapat 3 kegiatan (23,08 persen), dan belum ada yang mencapai kategori **Tinggi** pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 83 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih **Rendah** atau di bawah 20 persen terdapat 57 sub kegiatan (68,67 persen), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 23 sub kegiatan (27,71 persen), selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 3 sub kegiatan atau 3,61 persen, yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
		0 - 10% (R)	>10 – 20% (S)	> 20% (T)		0 - 10% (R)	>10 – 20% (S)	> 20% (T)		0 - 10% (R)	>10 – 20% (S)	> 20% (T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	2	1	0	14	11	2	1	62	58	1	3

4. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar sampai Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II-5:

Tabel II-5
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	95	Angka Kriminalitas (%)	13,2	9,21	6,42		9,21	6,42	None
	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	92	Persentase Penegakan Perda (%)	15	15	15	8	15	15	

	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100	81	Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (%)	90	100	100	88	100	100	
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)	15 Menit (100%)	100	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah Layanan Wilayah menejemen Kebakaran (WMK) (Menit) (Menit)	100	100	100	98	100	100	
	Nilai SAKIP Satpol PP	B	B	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	100	100	100	
				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Nilai)	100	100	100	100	100	100	
				Tingkat Literasi Digital ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (%)	98%	98%	98%	98%	98%	98%	

				Angka Kriminalitas (%)	50	100	100	25	100	100	
				Persentase Penegakan Perda (%)	98	98	98	98	98	98	

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja 2024

- Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada pada Tahun 2024 mencapai 98,8%, dimana dari 90 jumlah pelanggaran PERDA, terdapat 89 yang dapat tertangani. Hal ini menandakan bahwa tingkat penegakan perda dan perkada di Kabupaten Takalar telah berjalan cukup efektif
- Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2024 mencapai 98%. Dari Jumlah pelanggaran K3 di Tahun 2023 sebanyak 442 kasus mengalami penurunan di Tahun 2024 menjadi 359 kasus dengan persentase sebesar 23%.
- Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Mencapai 81%, dimana dari 359 kasus yang terjadi di Tahun 2024, 288 kasus berhasil tertangani
- Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit) dari Jumlah kasus kebakaran waktu tindakan <1 jam setelah pengaduan sebanyak 147 kasus dari Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi sebanyak 147 kasus dengan Persentase capaian sebesar 100 %
-

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja 2025

- Angka kriminalitas adalah resiko menjadi korban kejahatan yang diukur dengan membandingkan antara jumlah kasus yang terjadi dalam setahun dengan jumlah total penduduk dikalikan 10.000. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Angka kriminalitas Kabupaten Takalar dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Angka kriminalitas tertinggi terjadi di Tahun 2022 dengan nilai mencapai 30,78 jiwa yang menandakan bahwa dari 10.000 penduduk terdapat 31 jiwa yang beresiko menjadi korban kejahatan di Tahun 2022. Namun dengan upaya yang dilakukan oleh semua pihak, angka kriminalitas berhasil ditekan di Tahun 2023 menjadi 10 jiwa. Namun kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 19 jiwa. Jumlah kasus kriminalitas Tahun 2024 sebanyak 631 kasus meningkat sangat signifikan yakni sebesar 102,89 persen jika dibandingkan degan kondisi tahun sebelumnya. Kasus criminal di TAhun 2024
- Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman adalah melakukan penegakan peraturan daerah atau peratura kepala daerah yang memuat sanksi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada Tahun 2024, Capaian Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi oleh Satpol PP Kabupaten Takalar sebesar 100 persen dimana dari lima belas Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang ada, keseluruhannya dapat ditegakkan. Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah ini secara konsisten dilakukan sejak lima tahun terakhir. Persentase penegakan hukum peraturan daerah yang memuat sanksi di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit) dari Jumlah kasus kebakaran waktu tindakan <1 jam setelah pengaduan belum dapat diukur. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kabupaten Takalar melakukan penanganan terhadap pelanggaran/ gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang

terjadi di masyarakat. Pada Tahun 2024, Satpol PP Kabupaten Takalar menerima laporan 90 pelanggaran/ gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan berhasil ditangani sebanyak 89 kasus (capaian 98,8 persen). Penjaminan ketenteraman dan ketertiban umum melalui regulasi dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi tersebut menjadi salah satu bentuk kepastian yang ditawarkan pemerintah akan kenyamanan berinvestasi kepada para investor.

- Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2025 mencapai 23,11%, dimana Jumlah pelanggaran K3 di Tahun 2023 sebanyak 445 kasus mengalami penurunan di Tahun 2024 menjadi 360 kasus.
- Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah Layanan Wilayah menejemen Kebakaran (WMK) (Menit) dari Jumlah kasus kebakaran waktu tindakan <1 jam setelah pengaduan dapat diukur dari jumlah kasus kebakaran yang terjadi hingga triwulan I tahun 2025 yang sebanyak 10 kasus dan tertangani seluruhnya dengan tingkat tanggap waktu sesuai standar dengan capaian 100%.
- Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mencapai 100%, dimana dari 10 kasus yang terjadi di triwulan I tahun 2025, seluruhnya berhasil tertangani dengan tingkat capaian 100%
- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Nilai) mencapai 89 %
- persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum diukur pada Triwulan I Tahun 2025. Pengukuran indikator ini sifatnya tahunan.
- Tingkat Literasi Digital ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (%) mencapai 32,26%, dimana dari 62 orang ASN yang ada, hanya 20 orang yang mampu mengoperasikan komputer

Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Standart Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar sampai Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II-7 Sebagai Berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2025

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	91,95 %	100 %	100 %	100 %	100 %

- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada mencapai 98,8 %, dimana dari 90 aduan pelanggaran perda yang diterima, 89 aduan dapat ditangani.
- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran pada tahun 2024 mencapai 100 %, dimana dari 147 kasus yang terjadi di tahun 2024, seluruhnya berhasil tertangani.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijkan Nasional

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

3.1.1. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.1.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kabupaten Takalar yaitu **".Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat",** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 3 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Sasaran 2: Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran (Menit)
3. Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

   Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.1.

Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA PD TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025			
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**		**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET TAHUN 2025**
1	2	3	4	5	6	7	8
T1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	98	T1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat		Angka Kriminalitas	13,2
					S1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian pelanggaran K3	98
		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	98%			Persentase Penegakan Perda	100
		Persentase penyelesaian pelanggaran K3	98%				
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen				S2.Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran (Menit)	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah Layanan Wilayah menejemen Kebakaran (WMK) (Menit)	100
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah Layanan Wilayah menejemen Kebakaran (WMK) (Menit) Kebakaran (WMK)	15			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	15

Tujuan: 2 Meningkatkan Tata Kelola pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Indeks Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	CC		S3. Meningkatnya Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	90
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				Tingkat Literasi Digital ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	50

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -6. Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolah ragaan, dan pemajuan kebudayaan** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	Rp8.677.698.550,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp8.677.698.550,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp8.677.698.550,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp8.360.513.400,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp4.652.760,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp523.890,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp641.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp230.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp628.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp1.360.170,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp531.800,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp736.300,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.327.567.050,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.323.318.850,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp707.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp560.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp1.361.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp1.620.200,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp1.702.800,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp228.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp391.200,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp329.200,00

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp526.400,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp228.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp81.993.400,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp80.700.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp504.100,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp423.300,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp366.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp44.606.090,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp360.400,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp281.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp31.570.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp7.723.390,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp4.320.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp351.300,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp45.457.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp45.457.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.800.928.500,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp152.100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp9.710.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.791.066.400,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp53.605.800,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp53.605.800,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp70.732.410,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.793.600,00
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp4.575.000,00
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp0,00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Rp2.218.600,00
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp0,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp63.938.810,00
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp2.924.850,00
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Rp230.000,00
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp60.783.960,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp246.452.740,00
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp244.045.380,00
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp201.731.300,00
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp934.050,00
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp39.225.000,00

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.164.030,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp991.000,00
Investigasi Kejadian Kebakaran	Rp411.430,00
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Rp411.430,00
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rp1.995.930,00
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Rp1.750.930,00
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Rp245.000,00

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja atuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan total pagu Rp 8.677.698.550,00 ***(Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)*** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar terdiri atas 3 Program, 14 kegiatan dan 62 sub kegiatan dengan jumlah dana pagu indikatif adalah sebesar **Rp10.292.423.570,00** ***(Sepuluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah)*** dengan sumber dana berasal dari APBD-P. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel IV-2 berikut:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	KPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**9,262,001,019.00**	**8,346,233,760.00**	**8,478,590,020.00**	**-783,410,999.00**							**12,723,271,750.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9,262,001,019.00**	**8,346,233,760.00**	**8,478,590,020.00**	**-783,410,999.00**							**12,723,271,750.00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9,262,001,019.00**	**8,346,233,760.00**	**8,478,590,020.00**	**-783,410,999.00**							**12,723,271,750.00**	

1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8,421,172,069.00**	**8,212,478,140.00**	**8,322,733,470.00**	**362,099,681.00**							**8,783,271,750.00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40,439,500.00	5,206,290.00	4,299,760.00	-36,139,740.00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		37,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6,323,400.00	568,190.00	465,890.00	-5,857,510.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7.			7,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYEL

																Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor				AMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,540,500.00	746,400.00	641,800.00	-5,898,700.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	7,418,700.00	719,100.00	0.00	-7,418,700.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Sem	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelay			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAK

			Perubahan RKA-SKPD										ua Kel/Desa			anan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				ARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,231,600.00	563,800.00	563,800.00	-4,667,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,853,400.00	1,340,700.00	1,360,170.00	-3,493,230.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,098,600.00	531,800.00	531,800.00	-4,566,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,973,300.00	736,300.00	736,300.00	-4,237,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6,286,815,789.00	6,329,633,000.00	6,326,792,360.00	39,976,571.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6,758,440,150.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	6,256,813,589.00	6,323,300,800.00	6,323,301,160.00	66,487,571.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6,710,940,150.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																Pelayanan Publik				
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,409,000.00	782,000.00	707,000.00	-3,702,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Sem	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelay			,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAK

													ua Kel/Desa			anan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				ARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,899,000.00	2,569,000.00	560,000.00	-10,339,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,061,000.00	1,361,000.00	1,361,000.00	-2,700,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10,633,200.00	1,620,200.00	863,200.00	-9,770,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	19,075,300.00	2,134,200.00	1,639,800.00	-17,435,500.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,408,900.00	397,400.00	228,000.00	-2,180,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,551,500.00	391,200.00	391,200.00	-2,160,300.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																Pelayanan Publik				
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,662,200.00	329,200.00	329,200.00	-2,333,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,630,200.00	0.00	0.00	-2,630,200.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN

													Kel/Desa			Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,439,300.00	526,400.00	526,400.00	-3,912,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,383,200.00	490,000.00	165,000.00	-4,218,200.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	13,475,000.00	3,489,400.00	81,993,400.00	68,518,400.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0.00	762,000.00	80,700,000.00	80,700,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4,388,300.00	630,100.00	504,100.00	-3,884,200.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																Pelayanan Publik				
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4,872,100.00	1,077,300.00	423,300.00	-4,448,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	4,214,600.00	1,020,000.00	366,000.00	-3,848,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN

													Kel/Desa			Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	71,303,900.00	43,483,190.00	42,986,090.00	-28,317,810.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5,100,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,507,400.00	360,400.00	360,400.00	-4,147,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			,600,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																Publik				
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,042,900.00	281,000.00	281,000.00	-1,761,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN

													Kel/Desa			Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	450,000.00	29,950,000.00	29,950,000.00	29,500,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,453,800.00	8,220,490.00	7,723,390.00	-21,730,410.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2,025,000.00	0.00	0.00	-2,025,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																Pelayanan Publik				
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30,750,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	-26,430,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,074,800.00	351,300.00	351,300.00	-1,723,500.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN

													Kel/Desa			Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16,539,000.00	2,824,000.00	40,324,000.00	23,785,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		35,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN

																Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16,539,000.00	2,824,000.00	40,324,000.00	23,785,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																Pelayanan Publik				
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN

													Kel/Desa			Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1,843,723,580.00	1,792,078,060.00	1,786,078,060.00	-57,645,520.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1,750,231,600.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,137,900.00	152,100.00	152,100.00	-985,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN

													Kel/Desa			Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61,019,280.00	14,910,000.00	14,910,000.00	-46,109,280.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			32,531,600.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,056,000.00	0.00	0.00	-1,056,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,780,510,400.00	1,777,015,960.00	1,771,015,960.00	-9,494,440.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,705,200,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	129,800,000.00	33,630,000.00	38,620,000.00	-91,180,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		70,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42,130,000.00	0.00	0.00	-42,130,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	83,290,000.00	33,630,000.00	38,620,000.00	-44,670,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																Pelayanan Publik				
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	4,380,000.00	0.00	0.00	-4,380,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			2,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN

													Kel/Desa			Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**465,447,800.00**	**25,730,580.00**	**9,177,560.00**	**1,159,552,200.00**							**1,625,000,000.00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	199,737,800.00	17,389,400.00	6,793,600.00	-192,944,200.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1,075,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan				1 Dokumen	1 Dokumen	25,011,800.00	0.00	0.00	-25,011,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbai			120,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATA

			Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota													kan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				N
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	24,996,000.00	8,820,400.00	4,575,000.00	-20,421,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang				1 Orang	1 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN

			Ditingkatkan Kapasitasnya										Kel/Desa			Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	4,795,000.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		

			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	74,740,000.00	2,534,000.00	2,218,600.00	-72,521,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	74,990,000.00	1,240,000.00	0.00	-74,990,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			125,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak				1 Laporan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			25,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

			Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani													Pelayanan Publik				
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	99,960,000.00	8,341,180.00	2,383,960.00	-97,576,040.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		350,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN

																6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PENYELAMATAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0.00	2,924,560.00	2,380,000.00	2,380,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			125,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	1 Laporan	49,980,000.00	2,751,760.00	0.00	-49,980,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			125,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	49,980,000.00	2,664,860.00	3,960.00	-49,976,040.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	165,750,000.00	0.00	0.00	-165,750,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		200,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	165,750,000.00	0.00	0.00	-165,750,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**375,381,150.00**	**108,025,040.00**	**146,678,990.00**	**1,939,618,850.00**							**2,315,000,000.00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	355,096,750.00	105,503,380.00	144,372,230.00	-210,724,520.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1,445,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	17,700,000.00	99,997,400.00	139,997,050.00	122,297,050.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	129,009,450.00	934,050.00	934,050.00	-128,075,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			350,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	25,090,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	-23,365,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	14,877,300.00	1,855,930.00	725,130.00	-14,152,170.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																	Pelayanan Publik				
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																			
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis				1 Orang	1 Orang	51,000,000.00	0.00	0.00	-51,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			500,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN

			Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran										Kel/Desa	HASIL		Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	1 Unit	117,420,000.00	991,000.00	991,000.00	-116,429,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				1 Keluarga	1 Keluarga	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																Pelayanan Publik				
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	0.00	525,730.00	411,430.00	411,430.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	525,730.00	411,430.00	411,430.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbai			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

			dan Pengujian													kan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				N
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		150,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap				1 Orang	1 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbai			50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATA

			Tahunnya													kan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				N
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN

			Dukungan Sapras Damkar										Kel/Desa			Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-				-	-	20,284,400.00	1,995,930.00	1,895,330.00	-18,389,070.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		705,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamata				1 Laporan	1 Laporan	20,284,400.00	1,750,930.00	1,650,330.00	-18,634,070.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN

			n Manusia										Kel/Desa			Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		

			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	1 Laporan	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	J U M L A H	**9,262,001,019.00**	**8,346,233,760.00**	**8,478,590,020.00**	**-783,410,999.00**		**12,723,271,750.00**	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2025 merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 tidak terlepas dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar 2025-2029. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar dalam RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, serta peningkatan pelayanan publik dalam dibidang ketertiban dan keamanan serta pelayananan pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Takalar, Juni 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar,

Sirajuddin Saraba, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19750626 199311 1 001

2025

PERUBAHAN RENJA

[KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE]

Perubahan RENJA Kecamatan Kepulaun Tanakeke Tahun 2025 Perubahan RENJA Kecamatan Kepulaun Tanakeke Tahun 2025 Perubahan RENJA Kecamatan Kepulaun Tanakeke Tahun 2025 Perubahan RENJA Kecamatan Kepulaun Tanakeke Tahun 2025 Perubahan RENJA Kecamatan Kepulaun Tanakeke Tahun 2025 Perubahan RENJA Kecamatan Kepulaun Tanakeke Tahun 2025 Perubahan RENJA Kecamatan Kepulaun Tanakeke Tahun 2025 Perubahan RENJA Kecamatan Kepulaun Tanakeke Tahun 2025 Perubahan RENJA Kecamatan Kepulaun Tanakeke Tahun 2025 Perubahan RENJA

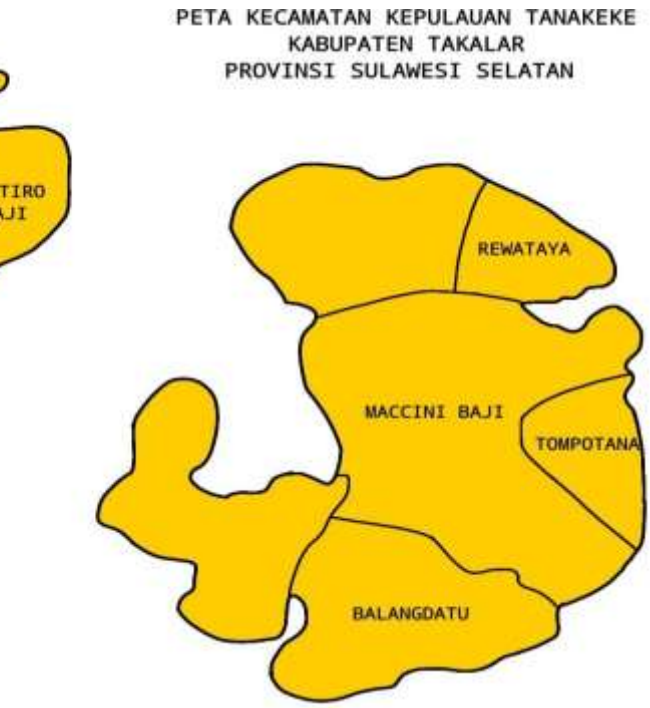
PETA KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
REWATAYA
MACCINI BAJI
TOMPOTANA
BALANGDATU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepulauan Tanakeke disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra

Kecamatan Kepulauan Tanakeke Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Kepulauan Tanakeke Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

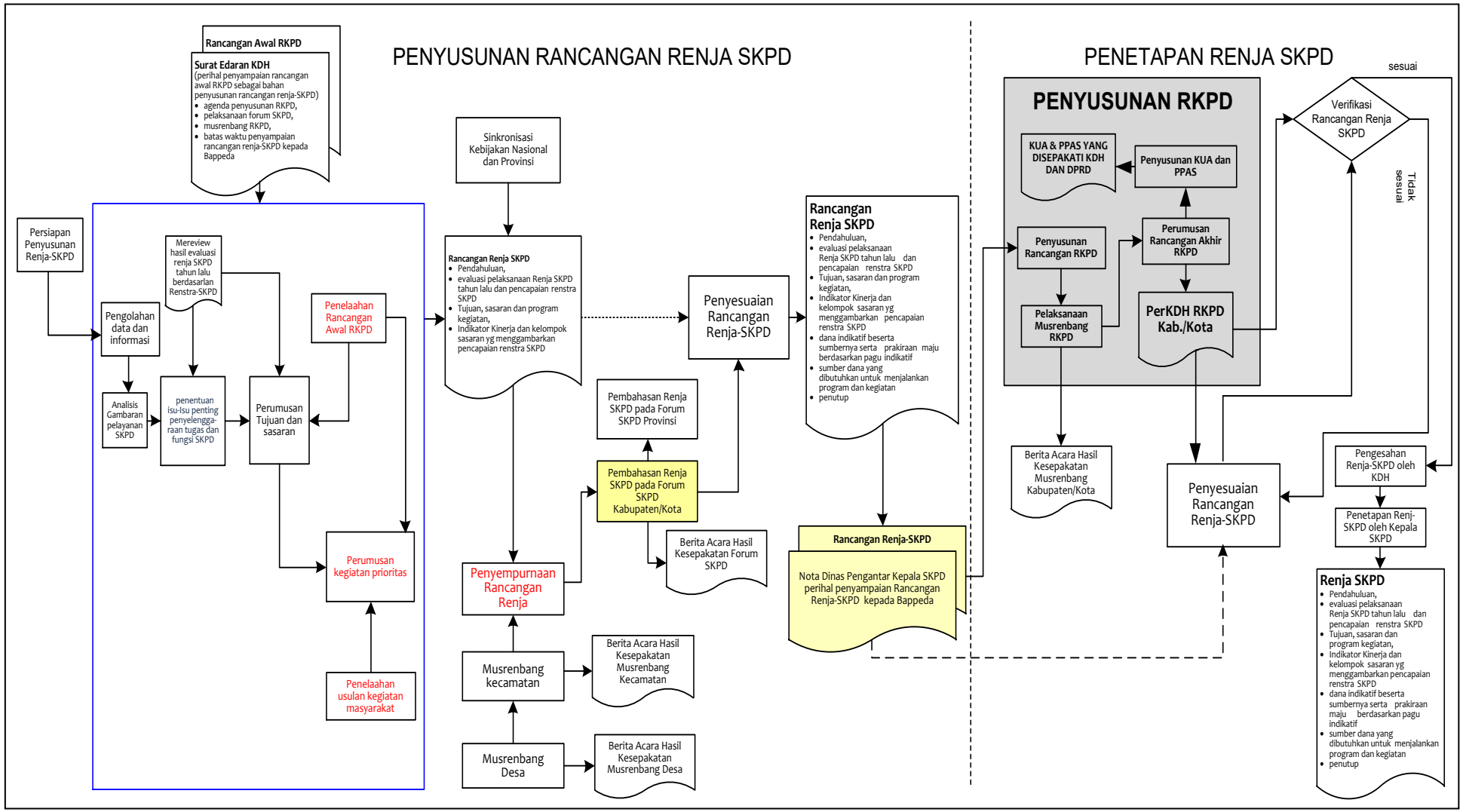
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)
agenda penyusunan RKPD,
pelaksanaan forum SKPD,
musrenbang RKPD,
batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-Isu penting penyelengga-raan tugas dan fungsi SKPD
Perumusan Tujuan dan sasaran
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
sesuai
Tidak sesuai
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
Penetapan Renj-SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang sesuai dengan Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan perundangan lainnya yang mengatur Standar Operasional Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang diacu dalam perencanaan dan penganggaran di Kecamatan Kepulauan Tanakeke sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan,Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke adalah sebagai berikut

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi Perubahan APBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke

Tujuan penyusunan Perubahan Renja kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematik Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I Tahun 2025, memuat tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan I (Tahun 2025) sesuai dengan renstra dan tupoksi OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Pengkat Daerah, memuat tentang tujuan, sasaran program dan kegiatan berdasarkan renstra dan tupoksi Kecamatan Kepulauan Tanakeke untuk Tahun 2025.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke, memuat tentang Rencana Program Kegiatan Perubahan Renja dan pendanaan OPD khusus untuk Tahun 2025.

BAB IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke Sampai dengan Triwulan I

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Kecamatan Kepulauan Tanakeke dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Periode Pelaksanaan 2025.

TABEL II-I

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA
KABUPATEN TAKALAR
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2025** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2025**		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	8		12		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%		29	30
		7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
		7	**01**				**KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE**		100.0 %	**1,393,731, 718**		**218,357, 327**	2.0%	**218,357, 327**	**2.03%**	**15.67 %**		**218,066, 127**				
1		**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**% Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik**	**#### ##**	**1,344,058, 118**	**10.13 %**	**218,066, 127**	**10.13 %**	**218,066, 127**	**10.13 %**	**16.22 %**	**22.89 %**	**218,066, 127**	**22.89 %**	**2.79 %**	**Kecamatan Kepulauan Tanakeke**	
		7	01	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	% jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	100.00 %	21,405,400	40.00 %	8,766,200	40.00 %	8,766,200	40.00 %	40.95 %	7.41%	8,766,200	7.41%	23.07 %		

							Perangkat Daerah.														
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik lingkup Kecamatan	7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	4,745,000	1	4,745,000	1	4,745,000	100.00 %	100.00 %	1	4,745,000	14.29 %	55.82 %		
		7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4,368,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00 %		
		7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3,986,200	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00 %		
		7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	4,285,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00 %		
		7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4,021,200	1	4,021,200	1	4,021,200	100.00 %	100.00 %	1	4,021,200	25.00 %	67.02 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**40.00 %**	**40.00 %**					

Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**					
1		7	01	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan keuangan yang memenuhi Opini BPK**	100.00 %	1,260,552,718	14%	206,199,927	14%	206,199,927	14.24 %	16.36 %	2.82%	206,199,927	2.82%	2.72 %	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	
	Meningkatkan kualitas administrasi Keuangan	7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji	140	843,194,950	40	204,859,927	40	204,859,927	28.57 %	24.30 %	40	204,859,927	5.13%	3.49 %		
								Jumlah ASN yang mendapatkan TPP	140	403,896,768	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00 %		
								Jumlah ASN yang menerima Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24	8,040,000	4	1,340,000	4	1,340,000	16.67 %	16.67 %	4	1,340,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
		7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1	2,755,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	4	2,666,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**9.05%**	**8.19%**					
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**					
1		7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah yang baik**	100.00 %	2,596,000	0.00%	-	0.00%	-	0%	0%	0.00%	-	0.00%	0.00 %	Kecamatan Mangarabombang	

		7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyususnan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan kebutuhan barang milik daerah yang di susun	1	2,596,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00 %		Parsial 3
															0.00%	**0.00%**						
Predikat kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**						
1		7	01	01	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang memperoleh pakaian dinas harian**	100%	4,784,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00 %	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	
		7	01	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sisteim Imformasi kepegawaian	1	4,784,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0.00%**	**0.00%**						
Predikat Kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**						
	Terpenuhinya dukungan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7.01	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	100%	27,330,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00 %		
		7.01	01	2.06		02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1,500,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00 %		
		7.01	01	2.06	002	06	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	1	1,800,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0!		
		7.01	01	2.06	009	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Yang diselenggarakan SKDP	4	**24,030,000**	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0!		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0.00%**	**0.00%**						

Predikat Kinerja														**SR**	**SR**							
1		7	01	01	2,08		**Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**% Jumlah ketersediaan jasa penunjang**	100%	18,600,000	16.67 %	3,100,000	16.67 %	3,100,000	16.67 %	16.67 %	150.00 %	3,100,000	150.00 %	8.86 %	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	
	Meningkatkan mutu pelayanan dan jasa peralatan/ perlengkapan kantor	7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	18,600,000	6	3,100,000	6	3,100,000	16.67 %	16.67 %	6	3,100,000	150.00 %	8.86 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**16.67 %**	**16.67 %**							
Predikat Kinerja														**SR**	**SR**							
		1	01	1	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah barang yang dipelihara**	100.00 %	8,790,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00 %		
		1	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara	1	8,790,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00 %		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														**0.00%**	**0.00%**							
Predikat Kinerja														**SR**	**SR**							
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)														**9.39%**	**9.27%**							
Predikat Kinerja Program														**SR**	**SR**							

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : kurangnya ketersediaan SDM pelaksana pada sub bagian mempengaruhi target pencapaian kinerja tepat waktu

Faktor penghambat: Masih ada sub Kegiatan yang tidak bisa terealisasi Anggarannya, dikarenakan Sub Kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		7	01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Tingkat Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**#####**	**11,244,700**	**0.00 %**	**-**	**0.00 %**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**0.00 %**	**KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE SELATAN**	
		7	01	02.2	01		**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Presentase Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	100.00 %	1,900,000	0.00%	-	0.00%	-	0%	0%	0.00%	-	0.00%	0.00 %		
		7	01	02.2	01	00002	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan yang diselenggarakan tingkat Kecamatan**	1	1,900,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0!		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0.00%**	**0.00%**						
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**						
		7	01	02.2	02		**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN**	**Presentase Penyelenggaran Kegiatan yang tidak dilaksanakan di Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	100.00 %	5,064,700	0.00%	-	0.00%	-	0%	0%	0.00%	-	0.00%	0.00 %		

		7	01	02.2	02	0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Jumlah pelaayanan yang dilaksanakan diwilayah kecamatan**	4	3,160,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0!		
		7	01	02.2	02	0001	**Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan**	**Jumlah Perencanaan Pelayanan Kepada Masyarakat**	1	1,904,700	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0!		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0.00%**	**0.00%**						
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**						
		7	01	02.2	03		**KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM**	**Presentase Pemeliharaan prasarana dan Prasarana Pelayanan Umum**	100.00 %	4,280,000	0.00%	-	0.00%	-	0%	0%	0.00%	-	0.00%	0.00 %		
		7	01	02.2	03	0001	**Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Perangkat Pertikal atau instansi terkait**	1	4,280,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0!		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0.00%**	**0.00%**						
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**0.00%**	**0.00%**						
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**						

		7.01	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan**	**#####**	**18,341,200**	**0.00 %**	**291,200**	**0.00 %**	**291,200**	**0.00%**	**1.59%**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00 %**	**KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE SELATAN**	
		7.01	03	2.01			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan**	**Jumlah Rapat/Desa**	100.00 %	11,688,200	0.00%	291,200	0.00%	291,200	0%	2%	0.00%	-	0.00%	0.00 %		
		7.01	03	2.01	0001		**Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**	**Jumlah Desa yang Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**	1	8,890,200	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0!		
		7.01	03	2.01	0003		**Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilaya Kecamatan**	**Jumlah Rapat/Pertemuan TP-PKK di Desa**	4	2,798,000	-	291,200	-	291,200	0.00%	10.41 %	-	291,200	0.00%	#DIV/0!		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0.00%**	**5.20%**						
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**						
		7.01	03	2.03			**PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN**	**Jumlah Lembaga/Kecamatan**	100.00 %	6,653,000	0.00%	-	0.00%	-	0%	0%	0.00%	-	0.00%	0.00 %		
		7.01	03	2.03	0004		**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**	**Jumlah Lembaga yang di Fasiltasi dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi**	1	6,653,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0!		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0.00%**	**0.00%**						

														Predikat Kinerja				SR	SR				
														Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)				**0.00%**	**2.60%**				
														Predikat Kinerja Program				**SR**	**SR**				

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Faktor penghambat: : kurangnya ketersediaan SDM pelaksana pada sub bagian mempengaruhi target pencapaian kinerja tepat waktu

Faktor penghambat: Masih ada sub Kegiatan yang tidak bisa terealisasi Anggarannya, dikarenakan Sub Kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum**	**#####**	**3,969,500**	**0.00 %**	**-**	**0.00 %**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**0.00 %**		
		7	**01**	**05**	2.01		**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan sesuai Penugasan Kepala DaerahUmum**	100.00 %	3,969,500	0.00%	-	0.00%	-	0%	0%	0.00%	-	0.00%	0.00 %		
		7	**01**	**05**	2.01	0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**Jumlah Penanganan Komplik sosial sesuai Ketentuan Undang undang**	1	3,969,500	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0!		
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)				**0.00%**	**0.00%**				
														Predikat Kinerja				**SR**	**SR**				

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : Faktor penghambat: : kurangnya ketersediaan SDM pelaksana pada sub bagian mempengaruhi target pencapaian kinerja tepat waktu

Faktor penghambat: Masih ada sub Kegiatan yang tidak bisa terealisasi Anggarannya, dikarenakan Sub Kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**	**#####**	**16,118,200**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**		
		7	**01**	**06**	2.01		**Fasiltasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Memfasilitasi Administrasi Desa**	100.00%	16,118,200	0.00%	-	0.00%	-	0%	0%	0.00%	-	0.00%	0.00%		
		7	**01**	**06**	2.01	0002	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang di fasilitasi Tata Pemerintahan Desa**	1	3,766,600	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0!		
		7	**01**	**06**	2.01	0013	**Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif**	**Jumlah desa yang di fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisiptif**	1	4,920,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0!		
		7	**01**	**06**	2.01	0018	**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	**Jumlah desa yang di fasilitasi Pelaksanaaan pembangunan**	4	3,461,600	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0!		

		7	**0 1**	**06**	2.0 1	001 7	**Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**Jumlah desa yang di dampingi diwilayah kecamatan**	1	3,970,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	#DIV/0 !		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															**0.00%**	**0.00%**						
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**						
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																						
Faktor penghambat: : Faktor penghambat: : kurangnya ketersediaan SDM pelaksana pada sub bagian mempengaruhi target pencapaian kinerja tepat waktu																						
Faktor penghambat: Masih ada sub Kegiatan yang tidak bisa terealisasi Anggarannya, dikarenakan Sub Kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																						
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**1.88%**	**2.37%**						
Predikat Kinerja Program															**SR**	**SR**						

Sumber : Data Monev TW I Tahun 2025;

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Kecamatan Kepulauan Tanakeke 2025 yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No. Urut	**Perangkat Daerah**	**Jmlh Prog.**	**Jmlh Keg**	**Jmlh Sub Keg.**	**Indikator**		
					Jmlh Prog.	**Jmlh Keg**	**Jmlh Sub Keg.**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	5	14	27	5	14	29
TOTAL		**5**	**14**	**27**	**5**	**14**	**29**

Sumber : Monev TW I Tahun 2025;

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 5, jumlah kegiatan 14, dan jumlah sub kegiatan 27, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 5, jumlah indikator kegiatan sebanyak 14, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 29.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Kabupaten Takalar Tahun 2025
Hingga Triwulan I

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
1	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	1.393.731.718	218.357.327	2.03%	15.57%
TOTAL		**1.393.731.718**	**218.357.327**	**2.03%**	**15.57%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Kepulauan Tanakeke

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp. 1.393.731.718,-. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 2,03 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 15,57 persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20

persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Kecamatan Kepulauan Tanakeke dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke sebanyak 3 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 1 program (realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program (realisasi >10-20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 1 program (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke dapat dijelaskan bahwa terdapat 10 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 4 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 4 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 2 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 25 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 14 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 3 sub kegiatan, dan 8 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 – 10%	>10 – 20%	> 20%		0 – 10%	>10 – 20%	> 20%		0 – 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	5	4	1	0	14	11	2	1	29	22	2	3
TOTAL		5	4	1	0	14	11	2	1	29	22	2	3

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Kepulauan Tanakeke

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke dapat dijelaskan bahwa dari 5 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 10 persen terdapat 4 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 10-20 persen) terdapat 0 program, selebihnya sebanyak 1 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 20 persen pada triwulan I Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 14 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I terdapat 11 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 10 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 2 kegiatan, selebihnya terdapat 1 kegiatan yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 27 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 22 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 3 sub kegiatan, selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 2 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I
Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 – 10 %	>10 – 20 %	> 20 %		0 – 10 %	>10 – 20 %	> 20 %		0 – 10 %	>10 – 20 %	> 20 %
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	5	4	1	0	14	11	2	1	27	23	1	3
TOTAL		**5**	**4**	**1**	**0**	**14**	**11**	**2**	**1**	**27**	**23**	**1**	**3**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Kecamatan Kepulauan Tanakeke

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepulauan Tanakeke

Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliput pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan di Kelurahan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain pengantar KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke tahun 2025 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke, harus dilakukan survey IKM. Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke. Kinerja pelayanan didukung oleh sistem yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Kepulauan Tanakeke yang mengacu pada RPJMD Kabupaten dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-6

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kepulauan Tanakeke

Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Triwulan I	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan	80	3,20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan	88	90	93	Survey belum selesai	90	93	
2	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban	83%	22%	Persentase Pelayanan Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	94%	35%	92%	94%	
3	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)	90%	87%	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	90%	92%	94%	29%	92%	94%	
4	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Non Standart Pelayanan Minimal (Non SPM)	90%	85%	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke	B (68,33)	B (68,40)	B (68,80)	Belum dilakukan evaluasi penilaian	B (70,10)	B (70,15)	
5	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kondisi Baik	85%	83%	Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke	92%	92%	83%	92%	92%	92%	
6	Angka Kriminalitas	45	43								
7	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,697	0,7033								
8	Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju	70%	37,5%								
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	85%	75%								
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Belum dilakukan evaluasi penilaian								
11	Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke	B	B (68,33)								

Perubahan indikator kinerja perangkat daerah dipengaruhi oleh adanya perbedaan visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. Pada periode sebelumnya melalui Renstra 2023–2026, arah pembangunan Kecamatan Kepulauan Tanakeke lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan desa, serta peningkatan pelayanan publik yang bersifat fundamental. Sehingga, indikator tahun 2024 masih berfokus pada capaian dasar seperti kepuasan masyarakat, ketertiban umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan pembangunan desa. Namun, memasuki periode Renstra 2025–2029, arah kebijakan berubah mengikuti visi Bupati terpilih yaitu "Takalar Maju Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital". Visi ini mendorong transformasi pembangunan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis digital, dengan orientasi pada peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja tahun 2025 disusun lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi, seperti peningkatan kepuasan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan, penanganan aduan masyarakat, literasi digital ASN, serta penguatan akuntabilitas kinerja (SAKIP).

Dengan demikian, perubahan indikator dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran fokus pembangunan, dari orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas layanan publik, menuju pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Berdasarkan tabel II-6 diatas, pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Adapun penjelasannya yaitu :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan**
   Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian berada pada angka 84,07 poin dari target yang ditetapkan sebesar 80 poin. Capaian ini menggambarkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan sudah berjalan baik dan telah melebihi target yang ditentukan. Penilaian ini diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat yang melibatkan responden dari berbagai kelompok pengguna layanan, sehingga hasilnya mencerminkan persepsi masyarakat secara langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Meskipun secara umum sudah baik, masih terdapat ruang untuk

peningkatan, khususnya pada aspek kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat dan kecepatan pelayanan. Perbaikan pada kedua aspek tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kepuasan masyarakat sehingga target IKM pada periode berikutnya dapat tercapai atau bahkan terlampaui.

2. Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban

Berdasarkan data perbandingan angka kriminal di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 12 kasus dan pada tahun 2024 menurun menjadi 4 kasus, atau terjadi penurunan sebesar 8 kasus. Jika dihitung dalam persentase, maka realisasi penurunan kriminalitas hanya mencapai sekitar 66,67%. Sementara itu, target penurunan kasus kriminal tahun 2024 ditetapkan sebesar 90%, sehingga capaian tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren positif berupa penurunan kasus, namun hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap strategi pencegahan dan penanganan tindak kriminal yang selama ini dijalankan. Upaya sinergis antara aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, dan partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat agar di tahun mendatang penurunan angka kriminalitas dapat lebih signifikan dan mendekati target yang ditetapkan.

3. Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 80% dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%. Hal ini menandakan bahwa pelayanan dasar publik di Kecamatan Kepulauan Tanakeke telah pada dasarnya sudah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku. Layanan kesehatan mencapai 85%, Layanan pendidikan 88%, Layanan Perumahan Rakyat 80%, Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 80%, Layanan Sosial 87% dan Layanan Pekerjaan Umum 85%. Dari total 88 permohonan pelayanan, sebanyak 68 telah dilaksanakan sesuai SPM, sehingga menghasilkan capaian rata-rata 87%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik, baik dalam hal ketepatan waktu, prosedur yang jelas, maupun kesesuaian hasil layanan dengan standar. Meski demikian, Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat masih dibawah 85%, sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan pada periode berikutnya.

4. Persentase Pelayanan sesuai Non Standar Pelayanan Minimal (Non SPM)

Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Non SPM sebesar 80%, dan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 90%. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang cukup memadai. Berdasarkan data perhitungan, dari total 37

layanan yang diterima, sebanyak 30 layanan berhasil diselesaikan sesuai Non SPM, sehingga capaian rata-rata adalah 85%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Non SPM di Kecamatan Kepulauan Tanakeke telah terlaksana dengan baik, namun masih

memerlukan optimalisasi sistem pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana pendukung agar capaian di tahun berikutnya bisa memenuhi atau melampaui target.

5. **Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kondisi Baik**

   Pada tahun 2024, capaian persentase sarana dan prasarana pelayanan umum dalam kondisi baik di Kecamatan Kepulauan Tanakeke mencapai 70%, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 80%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana prasarana sudah tersedia dan berfungsi dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan untuk mencapai standar optimal. Berdasarkan tabel perhitungan, dari total 94 sarana prasarana yang tersedia, terdapat 78 dalam kondisi baik. Hampir seluruh jenis prasarana seperti kantor, puskesmas, sekolah (SD, SMP, SMA),telah memenuhi standar ketersediaan adapun pasar yang sudah dibangun belum digunakan sebagaimana mestinya sementara untuk kantor Kecamatan sebagai Pusat pelayanan Publik belum tersedia dan masih ada Desa yang belum memiliki Kantor serta beberapa desa yang belum meliki jaringan Listrik Berbayar. Namun, pada kategori kondisi kantor pelayanan hanya terdapat 7 dari 18 dengan kondisi baik atau sekitar 78%. Kekurangan ini menjadi faktor utama penyebab belum tercapainya target 85%. Dengan demikian, meskipun capaian 83% menunjukkan pelayanan publik sudah ditunjang sarana prasarana yang cukup memadai, tetap diperlukan penambahan dan perbaikan kantor pelayanan agar kualitas layanan masyarakat dapat lebih optimal dan sesuai dengan target.

6. **Angka Kriminalitas**

   Pada tahun 2024, angka kriminalitas di Kecamatan Kepulauan Tanakeke tercatat sebesar 4 kasus per 6.000 penduduk, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 12 kasus per 6.000 penduduk. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke relative terkendali dan kondisi keamanan masyarakat tergolong cukup kondusif. Berdasarkan data tabel tindak kriminal, jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2024 sebanyak 12 kasus dengan jumlah penduduk sebesar 6.000 jiwa, sehingga hasil perhitungan angka kriminalitas adalah:

   12 /6.000 X 6 = 4 kasus per tahun

   Hasil ini membuktikan bahwa meskipun masih terdapat berbagai bentuk tindak kriminal, intensitasnya lebih rendah dibandingkan target, yang berarti efektivitas upaya aparat dan masyarakat dalam

menjaga keamanan cukup baik. Namun demikian, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan patrol keamanan, penguatan koordinasi aparat, serta program pembinaan masyarakat untuk menekan angka kriminalitas lebih rendah lagi di tahun- tahun mendatang.

7. **Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan**
   Pada tahun 2024, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Kepulauan Tanakeke mencapai 0,70 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 0,697. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian desa di wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Indeks Desa Membangun merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa melalui tiga dimensi utama, yaitu Indeks Sosial (pendidikan, kesehatan, dan modal sosial), Indeks Ekonomi (keragaman produksi desa, akses ke pusat perdagangan, serta keterhubungan infrastruktur), dan Indeks Ekologi/Lingkungan (kualitas lingkungan dan mitigasi bencana). Capaian 0,7033 menunjukkan IDM Kecamatan Kepulauan Tanakeke dengan status berkembang. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses infrastruktur dasar, serta dukungan pemerintah dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pembangunan desa Di Kecamatan Kepulauan Tanakeke berjalan efektif dan mampu meningkatkan kemandirian desa di atas target yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan langkah berkelanjutan berupa penguatan perekonomian lokal, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar seluruh desa dapat mencapai status desa mandiri secara menyeluruh.
8. **Persentase Desa Status Berkembang menuju Status Desa Maju**
   Pada tahun 2024, persentase desa status berkembang menuju status desa maju di Kecamatan Kepulauan Tanakeke belum mencapai target. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang mengalami peningkatan menjadi desa maju sebanyak 3 desa dari 8 desa yang sebelumnya berstatus berkembang. Dengan semakin banyaknya desa berkembang yang naik kelas menuju desa maju, maka kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Kepulauan Tanakeke juga akan semakin meningkat, baik dari sisi akses layanan dasar, peluang ekonomi lokal, maupun pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga konsistensi pembinaan, memperkuat kelembagaan desa, serta meningkatkan sinergi antar- pemangku kepentingan agar seluruh desa dapat mencapai status desa maju bahkan desa mandiri.
9. **Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Pada tahun 2024, persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Kepulauan Tanakeke mencapai 75%, dan belum mencapai target yang ditetapkan karena masih terdapat beberapa lembaga seperti Bumdes, Karang Taruna dan Kelompok Tani yang tingkat keaktifannya relative rendah

dibandingkan lembaga lain. Jumlah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Kepulauan Tanakeke tahun 2024 sebanyak 18 lembaga, dengan 12 lembaga yang aktif. Perhitungannya yaitu:

18/18 x 100% = 100%

Capaian ini menandakan peran lembaga kemasyarakatan cukup konsisten dalam pemberdayaan masyarakat. Tingkat keaktifan tertinggi ditunjukkan oleh LPM, BPD, dan PKK yang mencapai 100%.

10. **Indeks Reformasi Birokrasi**

    Target yang ditetapkan adalah predikat B, namun pada tahun 2024 belum ada realisasi karena belum dilakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan dalam proses penilaian agar capaian reformasi birokrasi dapat terukur dengan jelas. Evaluasi yang tepat waktu penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

11. **Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke**

    Target nilai B dan realisasi mencapai B (68,33). Capaian ini sesuai target yang ditetapkan, menandakan adanya peningkatan kualitas dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja di Kecamatan Kepulauan Tanakeke. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar, yang sekaligus menunjukkan komitmen kecamatan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan**

   Pada tahun 2025 ditetapkan target IKM sebesar 88. Namun, pada Triwulan I, realisasi capaian belum tersedia karena proses survei kepuasan masyarakat masih berlangsung. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian survei agar dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas layanan.

2. **Persentase Pelayanan Masyarakat yang Selesai Tepat Waktu**

   Target pelayanan tepat waktu pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 90%, sementara hasil realisasi pada triwulan I sudah mencapai 35% dengan jumlah layanan yang masuk sebanyak 450 Layanan dan yang sudah diselesaikan tepat waktu sebanyak 158 Layanan.

Pencapaian ini terjadi karena adanya kesadaran dan kompetensi petugas serta dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

3. **Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**
   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 90%, sementara realisasi triwulan I sudah mencapai 29% dengan target aduan dalam setahun sebanyak 24 aduan dan sudah diselesaikan sebanyak 6 aduan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan kecamatan semakin meningkat, karena mayoritas aduan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Meski demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, agar capaian di masa mendatang semakin optimal.
4. **Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke**
   Target yang ditetapkan adalah memperoleh nilai B (68,33). Pada Triwulan I tahun 2025, penilaian SAKIP oleh Inspektorat belum dilaksanakan sehingga belum terdapat data realisasi. Oleh karena itu, Kecamatan perlu mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar saat penilaian dilakukan hasilnya dapat sesuai target.
5. **Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke**
   Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 92%, dan realisasi pada triwulan I juga telah mencapai 83%, sehingga capaian ini hampir memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, dari 10 ASN di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, sebanyak 9 ASN mampu mengoperasikan komputer, sehingga menghasilkan tingkat literasi digital sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital sudah cukup baik untuk mendukung tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Namun, peningkatan kapasitas masih tetap diperlukan agar literasi digital ASN semakin optimal dalam menunjang efektivitas, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023–2026

sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. Untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 maka dirumuskanlah tujuan Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke yaitu **"Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan",** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Kepulauan Tanakeke dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Kecamatan Kepulauan Tanakeke Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III-1

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, SERTA TARGET KINERJA KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2025

RENJA TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
T.1 : Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	*Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan di Kecamatan*	*81.25*	*T1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan*	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan	*3,25*
	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	*93.50%*	S1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu	80%
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SPM)	100%		Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	80%
	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (Non Standar Pelayanan Minimal)	100%	S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke	B (70,55)
Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	80%		Tingkat Literasi Digital ASN Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke	80%
Sasaran 3 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	12			

RENJA TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
Sasaran 4 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	88.89%		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan	
Tujuan 2: Meningkatkan Tata Kelolah pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke	*Indeks Reformasi Birokrasi*	*B*		Persentase Pelayanan Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	
Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelolah Kinerja pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke	Nilai SAKIP pada kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke	B		Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	
				Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke	
				Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke	

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kepulauan Tanakeke yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL IV-1

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**8.550.000**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1.900.000
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.900.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah		2.850.000

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
		Yang Ada Di Kecamatan		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	950.000
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.900.000
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum		3.800.000
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.800.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**11.149.800**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		10.288.200
			Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8,890,200
			Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilaya Kecamatan	1.398.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		861.600
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	861.600
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN			**00**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	PEMERINTAHAN UMUM			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		00
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**907.160**
		Fasiltasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**907.160**
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	00
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	00
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	463.860
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	00
	TOTAL PAGU			**1.345.381.318**

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke Tahun 2025 dengan total pagu Rp **1.345.381.318,00**,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dealapan Belas Ribu Rupuiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL IV-2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE							**1.496.056.244,00**	**1.393.731.718,00**	**1.345.381.318,00**	**-150.674.926,00**							**1.740.550.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.496.056.244,00**	**1.393.731.718,00**	**1.345.381.318,00**	**-150.674.926,00**							**1.740.550.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.496.056.244,00**	**1.393.731.718,00**	**1.345.381.318,00**	**-150.674.926,00**							**1.740.550.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.404.061.244,00**	**1.344.058.118,00**	**1.324.774.358,00**	**273.988.756,00**							**1.678.050.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	11.215.000,00	21.405.400,00	20.496.400,00	9.281.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		17.250.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	4.745.000,00	3.836.000,00	1.536.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakekе, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.300.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000,00	4.368.000,00	4.368.000,00	2.418.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakekе, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.200.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	2.200.000,00	4.285.000,00	4.285.000,00	2.085.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakekе, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.700.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.365.000,00	3.986.200,00	3.986.200,00	1.621.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.300.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	4.021.200,00	4.021.200,00	1.621.200,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.750.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.357.450.620,00	1.260.552.718,00	1.257.239.958,00	-100.210.662,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.606.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.352.360.620,00	1.255.131.718,00	1.255.134.958,00	-97.225.662,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.600.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	2.755.000,00	2.105.000,00	-295.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			3.200.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

																Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.690.000,00	2.666.000,00	0,00	-2.690.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.300.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	2.200.000,00	2.596.000,00	392.000,00	-1.808.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.750.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00	2.596.000,00	392.000,00	-1.808.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.750.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

Sumber : SIPD-RI 2025

BAB V
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja Perubahan ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar;
4. Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;

5. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renja Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Takalar, 2025

Camat Kepulauan Tanakeke,

MUHAMMAD ARIF, S.E.,M.A.P.
Pangkat : Pembina
NIP. 197604052008011028

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Disusun Oleh:

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimanan diamanatkan dalam UU No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa OPD menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) OPD. Renja Kerja Perubahan OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 6 (Enam) bulan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar yang berisi program dan kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Semoga Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama dibidang Keuangan terkhusus Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar pada masa sekarang dan yang akan datang.

Semoga Perubahan Renja ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar selama Tahun 2025 dalam memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut agar mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja pemerintah Kabupaten Takalar.

Takalar, 2025

Kepala Badan,

RUSDI, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19731220 200003 1 009

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.2 Maksud dan Tujuan 6

1.3 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Hingga Triwulan II Tahun Tahun 2025 7

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR 31

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah 33

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 36

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Priorita Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 36

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahana Renja Badan Pendapatan Daerah 40

BAB V PENUTUP 60

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Renja yang mengacu pada Renstra, Rancangan RKPD Kota/Kabupaten, dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya, serta menyusun Renja Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Dearah untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan merupakan penjabaran program/kegiatan yang ada pada Renja Bapenda Kabupaten Takalar. Renja Bapenda Kabupaten Takalar memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Bapenda Kabupaten Takalar dalam melaksanakan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II pada Tahun 2025, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Bapenda Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuai pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan aalternatif serta penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Renja Bapenda Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Bapenda Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Adapun dokumen Renja Bapenda Kabupaten Takalar Tahun 2025 memuat perubahan dan pergeseran anggaran antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, serta perubahan output sub kegiatan yang diampu. Dalam hal ini perubahan juga dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan perkembangan kondisi yang terjadi dan mampu mendukung pencapaian target Bapenda Kabupaten Takalar.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

3. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Daerah Kabupten Takalar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kbaupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Air Tanah;

14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar 38 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pelaporan data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 41 Tahun 2024 Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 07);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Maksud

  Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

  a. Pedoman dan arah dalam pelaksanaan Program/Kegiatan selama masa tahunan
  b. Sebagai penyesuai perubahan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan dan Perubahan RKA bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

- Tujuan

  Adapun tujuan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar adalah :

a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Bapenda Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang dirumuskan dalam dokumen perubahan Renja Bapenda Kabupaten Takalar;
b. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dengan perencanaan;
c. Membuat acuan berkelanjutan perencanaan Bapenda Tahun 2025 yang memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bapenda sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dan perubahan berkelanjutan target kinerja Bapenda Kabupaten Takalar.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan**.**

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PADA TRIWULAN I TAHUN 2025, bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja hingga triwulan I Tahun 2025 serta analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR, bab ini memuat tentang telaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR, bab ini memuat tentang daftar program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, serta memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan perubahan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Hingga Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian relaisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 2 (dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan, dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang/pendukung dengan 8 (delapan) kegiatan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, dan 1 (satu) program prioritas dengan 1 (satu) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Periode s/d Triwulan I Tahun 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)	
							K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	5	3			4		5		6		7		8 = 7/5 x 100%	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**		**100%**		**57.889.749.997**	**100,00%**	**7.963.882.027**	**100%**	**10.911.032.803**	**18,17%**	**1.269.934.475**	**18,17%**	**1.269.934.475**	**18,17%**	**11,64%**
5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA**	**100%**	**Persen**	**40.505.031.727**	**19%**	**5.693.344.467**	**100%**	**8.041.059.903**	**12,30%**	**1.028.411.303**	**12,30%**	**1.028.411.303**	**12,30%**	**12,79%**
5	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	Persen	1.384.424.400	20%	201.807.100	100%	163.873.260	41,38%	24.348.790	41,38%	24.348.790	41,38%	14,86%
5	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja beserta Perubahannya	9	Dokumen	194.910.700	2	50.754.000	3	62.033.400	1	7.381.390	1	7.381.390	33%	12%

5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	180.574.300	1	6.280.000	1	11.155.400	0	-	-	-	0%	0%
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	Dokumen	154.843.300	3	15.380.700	4	18.279.000	2	3.352.700	2	3.352.700	50%	18%
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	4	Dokumen	154.843.300	1	6.000.000	1	5.326.500	1	1.681.200	1	1.681.200	100%	32%
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	8	Dokumen	181.164.400	3	5.000.000	4	5.439.990	2	1.297.540	2	1.297.540	50%	24%
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (SAKIP dan LPPD)	96	Laporan	267.920.800	14	94.806.200	10	37.484.370	5	5.836.750	5	5.836.750	50%	16%
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja (Triwulan dan Semesteran)	24	Laporan	250.167.600	6	23.586.200	6	24.154.600	1	4.799.210	1	4.799.210	17%	20%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**42,86 %**	**17,30%**
Predikat Kinerja Kegiatan																		**SR**	**SR**
5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD**	100%	Persen	32.193.206.648	20,45%	4.591.419.432	100%	6.056.237.003	12,03%	928.919.933	12,03%	928.919.933	12,03%	15,34%
	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan	2800	Orang/ Bulan	13.844.461.248	539	2.292.105.266	700	3.319.805.654	164	888.427.833	164	888.427.833	23%	27%
						Jumlah ASN yang Menerima TPP	2400	Orang/ Bulan	5.325.211.200	492	1.132.294.329	-	-	0	-	-	-	0%	0%

						Jumlah ASN yang menerima honorarium penganggungjawab pengelola keuangan	0	Orang/ Bulan	-	0	-	36	22.380.000	0	-	-	-	0%	0%
						Jumlah KDH/WKDH yang Menerima Insentif	48	Orang/ Bulan	1.088.100.000	4	54.576.356	24	276.998.698	0	-	-	-	0%	0%
						Jumlah ASN yang menerima Instentif	2400	Orang/ Bulan	11.236.520.000	520	969.935.296	600	2.277.984.751	0	-	-	-	0%	0%
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48	Dokumen	148.841.200	12	35.301.800	12	51.059.000	2	14.940.700	2	14.940.700	17%	29%
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48	Dokumen	125.318.400	11	28.385.500	12	36.939.300	0	315.000	-	315.000	0%	1%
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	135.756.600	1	19.857.000	1	27.283.400	1	19.068.400	1	19.068.400	100%	70%
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	48	Laporan	140.008.000	12	15.576.000	2	22.443.400	1	4.707.800	1	4.707.800	50%	21%
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	64	Laporan	148.990.000	16	43.387.885	18	21.342.800	1	1.460.200	1	1.460.200	6%	7%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**19,57 %**	**15,46%**
Predikat Kinerja Kegiatan																		**SR**	**SR**

5	02	01	2.03		**Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100%	Persen	381.182.000	25,00%	18.994.100	100%	23.110.590	16,67%	4.061.600	16,67%	4.061.600	16,67%	17,57%
5	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	4	Laporan	108.511.200	1	7.252.200	2	4.928.100	0	-	-	-	0%	0%
5	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD pada SKPD	8	Laporan	114.332.000	2	5.461.200	2	5.360.200	1	1.257.800	1	1.257.800	50%	23%
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi Penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	4	Dokumen	93.429.200	1	4.593.300	4	4.754.400	0	801.100	-	801.100	0%	17%
5	02	01	2.03	06	penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	48	Laporan	64.909.600	12	1.687.400	4	8.067.890	1	2.002.700	1	2.002.700	25%	25%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**18,75%**	**16,28%**
Predikat Kinerja Kegiatan																		**SR**	**SR**
5	02	01	2.05		**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	Persen	420.048.000	15,29%	79.676.700	100%	91.405.300	5,41%	8.126.800	5,41%	8.126.800	5,41%	8,89%
5	02	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah ASN yang diberi fasilitas pakaian dinas beserta kelengkapannya	400	Pasang	153.100.000	50	20.900.000	50	39.150.000	0	-	-	-	0%	0%
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Hasil Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	Dokumen	105.000.000	12	16.237.800	12	26.346.300	2	5.885.000	2	5.885.000	17%	22%

5	02	01	2.05	05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	Dokumen	161.948.000	12	42.538.900	12	25.909.000	2	2.241.800	2	2.241.800	17%	9%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**11,11 %**	**10,33%**
Predikat Kinerja Kegiatan																		**SR**	**SR**
5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	Persen	3.003.660.679	18,01%	365.401.045	100%	1.106.870.750	10,91%	12.554.180	10,91%	12.554.180	10,91%	1,13%
5	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	4	Paket	67.338.000	1	2.654.400	1	3.028.700	0	-	-	-	0%	0%
5	02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22	Paket	999.713.599	3	143.310.000	5	707.879.050	0	-	-	-	0%	0%
5	02	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	38.409.080	1	2.039.000	2	3.825.700	0	-	-	-	0%	0%
5	02	01	02.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0	-	3	5.742.400	0	-	-	-	0%	0%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	196	Dokumen	162.200.000	38	3.800.000	70	10.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	14%	10%
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	240	Kali	136.000.000	59	16.321.100	24	4.056.900	2	998.200	2	998.200	8%	25%

5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	Laporan	1.600.000.000	90	197.276.545	60	372.338.000	6	10.555.980	6	10.555.980	10%	3%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**4,66%**	**5,35 %**
Predikat Kinerja Kegiatan																		**SR**	**SR**
5	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelaksaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat daerah**	100%	Persen	680.000.000	20,00%	79.450.000	100%	22.295.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00 %
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	20	Unit	680.000.000	4	79.450.000	5	22.295.000	-	-	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**0,00%**	**0,00 %**
Predikat Kinerja Kegiatan																		**SR**	**SR**
5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentasi Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	100%	Persen	2.016.000.000	15,07%	310.800.000	100%	512.400.000	12,00%	50.400.000	12,00%	50.400.000	12,00%	9,84 %
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	96	Laporan	503.968.992	33	70.749.353	0%	-	0,00%	-				

5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2880	Laporan	2.016.000.000	434	310.800.000	600	512.400.000	72	50.400.000	72	50.400.000	12%	10%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**12,00 %**	**9,84 %**
Predikat Kinerja Kegiatan																		**SR**	**SR**
5	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	Persen	426.510.000	20,83%	45.796.090	100%	64.868.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00 %
5	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya'	72	Unit	426.510.000	15	45.796.090	11	40.938.000	-	-	-	-	0%	0%
5	02	01	02.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	0	Unit	-	0	-	4	23.930.000	-	-	-	-	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**0,00%**	**0,00 %**
Predikat Kinerja Kegiatan																		**SR**	**SR**
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																		**13,62 %**	**9,32 %**
Predikat Kinerja Program																		**SR**	**SR**
5	02	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**PERSENTASE TINGKAT PENERIMAAN PAJAK DAERAH (TARGET/ REALISASI)**	**100%**	**Persen**	**17.384.718.270**	**13,57%**	**2.270.537.560**	**100%**	**2.869.972.900**	**24,05%**	**241.523.172**	**24,05%**	**241.523.172**	**24,05 %**	**8,42 %**

5	02	04	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	100%	Persen	17.384.718.270	13,57%	2.270.537.560	100%	2.869.972.900	24,05%	241.523.172	24,05%	241.523.172	24,05%	8,42%
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	36	Dokumen	732.918.300	8	117.496.405	8	100.479.700	1	7.486.000	1	7.486.000	13%	7%
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	32	Laporan	1.538.733.670	8	228.856.215	8	144.050.600	1	21.872.872	1	21.872.872	13%	15%
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	48	Laporan	605.794.100	12	86.435.500	12	132.387.700	1	3.703.900	1	3.703.900	8%	3%
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	20	Paket	5.509.990.000	5	117.296.000	5	214.100.000	0	-	-	-	0%	0%
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	13500	Laporan	1.175.038.000	1500	79.256.600	4.000	188.646.100	300	19.166.000	300	19.166.000	8%	10%
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	48	Dokumen	675.581.600	11	31.105.400	12	40.000.000	1	9.791.100	1	9.791.100	8%	24%

5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	8.000	Objek Pajak	572.052.900	2000	99.669.100	2.000	64.918.300	100	6.186.900	100	6.186.900	5%	10%
5	02	04	2.01	08	Penetapan wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	264.000	Dokumen	1.070.694.900	60000	320.324.020	4.000	396.445.600	400	44.073.400	400	44.073.400	10%	11%
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1200	Laporan	356.706.200	3010	29.421.800	36	106.905.000	10	12.073.000	10	12.073.000	28%	11%
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data dan Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2220	Dokumen	711.864.100	530	65.003.300	12	122.832.000	1	19.119.700	1	19.119.700	8%	16%
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	210.000	Dokumen	2.784.299.200	600	794.836.780	12.000	1.026.935.000	4500	73.155.600	4.500	73.155.600	38%	7%
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	48	Dokumen	349.399.500	12	13.001.100	12	10.000.000	1	2.499.400	1	2.499.400	8%	25%
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	48	Laporan	271.091.200	12	97.085.400	12	149.115.900	2	6.488.700	2	6.488.700	17%	4%
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah	48	Laporan	497.255.300	12	111.175.500	12	37.000.000	3	6.839.000	3	6.839.000	25%	18%
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	48	Laporan	533.299.300	12	79.574.440	12	136.157.000	3	9.067.600	3	9.067.600	25%	7%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**14,19 %**	**11,28%**

Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	14,19 %	11,2 8%
Predikat Kinerja Program	SR	SR

Sumber Data : Laporan Evaluasi Terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Adapun penjelasan dari table di atas adalah :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
   A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target kinerja dengan hasil sebanyak 12,53%, program ini terdiri dari 8 kegiatan sedangkan yang tidak memenuhi target sebanyak 6 kegiatan. Adapun kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :
      - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebanyak 13%;
      - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebanyak 3%;
      - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebanyak 10%;
      - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sebanyak 0%, hal ini disebabkan kegiatan tersebut dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025;
      - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja sebanyak 18%;
      - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja sebanyak 0%.
   B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak memenuhi target kinerja dengan hasil sebanyak 24,05%, program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Ada 11 sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja dan diantaranya 2 sub kegiatan yang belum terealisasi sama sekali.
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu : tidak ada
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu : tidak ada
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :

A. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah karena kegiatan dilaksanakan pada triwulan-triwulan selanjutnya serta terbatasnya dengan pembagian angkas;

B. Faktor pendorong terpenuhinya target kinerja adalah tersedianya anggaran dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan, serta adanya dukungan penuh dari pimpinan;

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Ada Dalam APBD 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Bapenda	2	9	46	2	9	50
Total		**2**	**9**	**46**	**2**	**9**	**50**

Sumber : Laporan Evaluasi Terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 2, jumlah kegiatan sebanyak 9, sub kegiatan sebanyak 46 dan jumlah indikator program sebanyak 2, kegiatan 9 dan sub kegiatan sebanyak 50.

2.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar hingga Triwulan I Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	KEUANGAN	10.911.032.803	1.269.934.475,-	18,17%	11,64%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.041.059.903	1.028.411.303,-	12,30%	12,79%
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.869.972.900	241.523.172	24,05%	8,42%

Sumber Data : Laporan Monev Hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah total anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Badan Pendapatan Dearah Tahun 2025 sebesar Rp. 10.911.032.803,- dan yang terealisasi hingga triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 1.269.934.475,-, anggaran tersebut digunakan dalam 2 program. Serapan realisasi anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 11,64% dengan capaian realisasi fisik yang belum maksimal karena pelaksanaan kegiatan baru berjalan 3 bulan. Dari 2 program yang ada terdapat 8 kegiatan dan belum ada yang memenuhi target realisasi kinerja yakni <25%, sehingga pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah dikategorikan kinerja rendah.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sampai Triwulan I

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Badan Pendapatan Daerah dimulai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0-10 persen, kategori **Sedang** untuk realisasi anggaran lebih besar dari >10-20 persen dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 20%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 25 persen, sehingga jika terdapat realiasasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 25 persen dianggap melebihi target dan berada pada kategori **Tinggi.**

Tabel II.4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah
Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Bapenda	2	1	1	0	9	6	3	0	46	23	11	12
TOTAL		**2**	**1**	**1**	**0**	**9**	**6**	**3**	**20**	**46**	**23**	**11**	**12**

Sumber Data : Laporan Monev Hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Keterang :
0-10 : Rendah
>10-20% : Sedang
>20% : Tinggi

Evaluasi hasil capaian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 samapi dengan Triwulan I sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pendanaan pada level program, anggaran pada Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah terdapat 2 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori sedang capaian realisasi kinerja 0-10% sebanyak 1 program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 1 program yang capaian memperoleh capaian kinerja 10-20% yaitu program pengelolaan pendapatan daerah.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pendanaan pada level kegiatan dapat dijelaskan bahwa terdapat 9 kegiatan hingga triwulan I Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan terdapat 6 kegiatan yang realisasi capaian kinerja 0-10% yang kategori Rendah, 3 kegiatan kategori Sedang (>10-20%) dan 0 kegiatan (>20%) yang kategori Tinggi.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Sub Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pendanaan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa terdapat 46 kegiatan hingga triwulan I Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan terdapat 23 kegiatan yang realisasi capaian kinerja 0-10% yang kategori Rendah, 11 kegiatan kategori Sedang (>10-20%) dan 12 kegiatan (>20%) yang kategori Tinggi.

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Kegiatan evalausi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar serta pencapaian relaisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh kemampuan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi

Tabel II.5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%		0 -10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Bapenda	2	0	1	1	9	3	4	2	46	23	9	14
TOTAL		**2**	**0**	**1**	**1**	**9**	**3**	**4**	**2**	**46**	**23**	**9**	**14**

Sumber Data : Laporan Monev Hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Keterang :
0-10 : Rendah
>10-20% : Sedang
>20% : Tinggi

Evaluasi hasil capaian kinerja fisik program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 samapi dengan Triwulan I sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian Kinerja Fisik pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja fisik pada level program, anggaran pada Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah terdapat 2 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori sedang realisasi 10-20% sebanyak 1 program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program pengelolaan pendapatan daerah dan 1 kegiatan yang realisasi capaian kinerja >20% yaitu program pengelolaan pendapatan daerah.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Fisik pada Level Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja fisik pada level kegiatan dapat dijelaskan bahwa terdapat 9 kegiatan hingga triwulan I Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan terdapat 3 kegiatan yang realisasi capaian kinerja 0-10% yang kategori Rendah, 4 kegiatan kategori Sedang (>10-20%) dan 2 kegiatan (>20%) yang kategori Tinggi.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Fisik pada Level Sub Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja fisik pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa terdapat 46 kegiatan hingga triwulan I Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan terdapat 23 kegiatan yang realisasi capaian kinerja 0-10% yang kategori Rendah, 9 kegiatan kategori Sedang (>10-20%) dan 13 kegiatan (>20%) yang kategori Tinggi.

2.2 Analisis Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar adalah untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluiasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta

untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Analisa kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan) sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arak kebijakan organisasi.

Tabel II.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Rasio Efesiensi PAD	9%	7,24%	Rasio Kemandirian Fiskal	10%	10,50%	20%	5,43%	10,50%	20%	
2	Kontribusi PAD terhadap Total APBD	13%	12,12%	Tingkat Capaian PAD	12%	13%	14%	3,96%	13%	14%	
3	Persentase Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang Memenuhi Kewajibannya Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	60%	66%	Persentase Peningkatan PAD	5%	13%	15%	7,66%	13%	15%	
4	Persentase Peningkatan PAD	20%	24%	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Badan Pendapatan Daerah	70 BB	70,5 BB	70,7 BB	70,35 BB	70,5 BB	70,7 BB	
5	Indeks Reformasi Birokrasi	70	68,67	Tingkat Literasi Digital ASN pada Badan Pendapatan Daerah	95%	1000%	100%	95%	100%	100%	
6	Nilai SAKIP	BB	B								

Sumber Data : Laporan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Takalar

Penjelasan Tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Fiskal

   Rasio kemandirian fiskal adalah ukuran tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya. Semakin tinggi rasio ini , semakin besar kemandrian dan kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhan sendiri. Cara menghitung rasio kemandirian fiskal adalah membandingkan Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Realisasi APBD dikali 100%. Nilai realisasi PAD hingga triwulan I Tahun 2025 sebesar nilai Rp. 8.684.756.341,35 Realisasi Belanja dalam APBD hingga triwulan I Tahun 2025 Rp. 159.940.087.344,- sehingga didapatkan nilai persentase kemandirian fiskal hingga triwulan I Tahun 2025 sebesar 5,43%. Nilai yang diperoleh belum memenuhi target dikarenakan perhitungan baru triwulan I. Faktor pendorong pelaksanaan pengelolaan PAD yakni adanya regulasi yang kuat tentang pengelolaan PAD, pengoptimalan pendataan dan pendaftaran wajib pajak serta pelaksanaan sosialisasi kepatuhan pajak daerah. Sedangkan factor penghambat yakni masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, serta belum tim teknis Juru Sita, Juru Pemeriksa dan Juru Penilai Zona Nilai Tanah yang kompoten, sehingga wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum bisa diberi sanksi berat.

2. Tingkat Capaian PAD

   Peningkatan PAD merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Cara perhitangan persentase capaian PAD adalah membandingkan nilai realisasi PAD dengan target PAD dikalikan 100 persen. Nilai Realisasi PAD Triwulan I Thaun 2025 sebesar Rp. 8.684.756.341,35 sedangkan target PAD sebesar Rp. 219.248.884.957,- jadi diperoleh capaian kinerja hingga triwulan I Tahun 2025 sebesar 3,96%.

3. Persentase Peningkatan PAD

   Persentase Peningkatan PAD adalah Persentase perubahan realisasi PAD suatu daerah dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, yang mengatur perkembangan

kemampuan keuangan daerah dari sumber daya lokal. Cara menghitung pertumbuhan PAD Pertahun adalah Selisih PAD tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, lalu dibagikan dengan PAD tahun sebelumnya dikalikan 100% . Nilai Realisasi PAD Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 6.527.528.095,- dan perolehan nilai realisasi PAD hingga triwulan I Tahun 2025 sebesar nilai Rp. 7.027.249.805,-, nilai realisasi capaian yang diperoleh hingga triwulan I Tahun 2025 sebesar 7,66%. Tahun 2025 ada penambahan jenis mata pajak sehingga mengalami pertumbuhan dar tahun sbelumnya serta penentuan target sudah rasional sesuai dengan potensi Badan Pendapatan Daerah dan potensi Kabupaten Takalar.

4. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Bapenda

   Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat adalah sebuah laporan hasil evaluasi (LHE) yang berisi nilai dan predikat kinerja suatu instansi pemerintah berdasarkan evaluasi terhadap lima komponen utama SAKIP : perencanaan, pengukuran, pelaporan evaluasi internal, dan capaian kinerja. LHE bertujuan memberikan umpan balik positif dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja instansi, serta menjadi dasar bagi satuan kerja untuk meningkatkan kualitasnya yang lebih baik di masa mendatang. Hasil penilaian SAKIP oleh Tim APIP pada tahun 2025 yakni 70,35 dengan predikat BB dikategorikan mencapai target capaian kinerja. Hal ini karena adanya dukungan penuh dari pimpinan dan seluruh teman-teman sebagai tim penyusun Dokumen SAKIP serta kelengkapan dan kualitas dari dokumen itu sendiri.

5. Tingkat Literasi Digital ASN

   Tingkat Literasi Digital ASN adalah kesadaran, sikap dan keampuan ASN dalam menggunakan teknologi dan informasi digital secara tepat, produktif dan bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Ini mencakup kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, mengolah dan memproduksi informasi digital, serta memiliki etika dan keamanan digital yang baik dalam menggunakan media digital dan data. Tingkat literasi digitalisasi ASN Badan Pendapatan Daerah mencapai nilai 95% hingga triwulan I Tahun 2025 karena masih

adanya beberapa ASN yang berusia mendekati masa pensiun, secara absensi presensi sudah mampu dioperasikan namun penyususnan SKP masih belum optimal.

Tabel II.7

Sedangkan pencapaian Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.9
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
A	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**219.248.884.957,-**	**8.684.756.341,35,-**
I	Pajak Daerah	48.186.474.957,-	**7.027.246.805**,-
1	Pajak Reklame	386.200.000,-	24.079.297,-
2	Pajak Air Tanah	500.000.000,-	65.737.600,-
3	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,-	0,-
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000,-	0,-
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	6.115.674.957,-	161.282.424,-
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,-	1.819.946.511,-
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	15.029.600.000,-	2.527.874.067,-
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.000.000.000,-	1.384.197.782,-
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	11.100.000.000,-	1.044.129.124,-
11	Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	447.000.000.000,-	83.511.020,-
12	Retriibusi Pelayanan Persampahan	197.406.000,-	22.200.000,-
13	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Umum	87.600.000,-	36.300.000,-
14	Retribusi Pelayanan	706.154.000,-	0,-
15	Retribusi Pemakaian Kendaraan Daerah	35.400.000,-	300.000,-
16	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	250.000.000,-	0,-
17	Retribusi Tempat Khusus Parkir	144.000.000,-	24.000.000,-
18	Retribusi Tempat Penginapan/Pasangrahan/Vila	105.150.000,-	0,-
19	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,-	4.480.000,-
20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.500.000,-	0,-
21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	37.000.000,-	3.000.000,-

22	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan	207.000.000,-	19.500.000,-
23	Retribusi Persetujuan Bangunan gedung	500.000.000	281.462.206
24	Deviden atas penyertaan modal pada BUMD	14.000.000.000,-	0,-
25	Lain-Lain PAD yang Sah	154.149.200.000,-	1.175.756.310,35,-

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar per 31 Maret 2025 dengan target PAD sebesar Rp. 219.248.884.957,- dengan realisasi capaiaan kinerja hingga triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 8.684.756.341,35 dan untuk target Pajak Daerah Rp. 48.186.474.957,- dengan realisasi capaian kinerja Pajak daerah hingga triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 7.027.246.805,- atau 14,58%, yang mana capaian terbesar pada mata pajak PBJT-Tenaga listrik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, serta Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Pembangunan jangka Panjang nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai berikut :

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023–2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025–2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 maka

dirumuskanlah tujuan Badan Pendapatan Daerah yaitu **"Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah",** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah dalam perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan target pada Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
T1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Efesiensi PAD	8%	T1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	10%
S1. Meningkatnya Efektifitas Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Kontribusi APD terhadap Total APBD	15%	S1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Capaian PAD	13%
	Persentase Peningkatan PAD	25%		Persentase Peningkatan PAD	13%
	Persentase Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang Memenuhi Kewajibannya Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	70%	S2. Meningkatnya tata Kelola Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inpektorat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar	72 BB
S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	72 BB		Tingkat Literasi Digital ASN	95%

Sumber Data : Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Bab ini memuat Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah serta Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Priorita Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program adalah instrument kebijakan berisi salah satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu juga program berarti kumpulan kegiatan yang sistemis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar pada tahun 2025 sebanyak 2 (Dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan adalah perwujudan dari program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar sebagai bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pengertian ‘bersifat indikatif’ dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan sebagai masukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku (fleksibel). Lebih lanjut bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar tentunya.

Mengacu pada regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah IV.50 beberapa kali te rakhir dengan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622. Program Prioritas Badan Pendapatan Daerah yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 15 Sub-Kegiatan.

Untuk rencana program dan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	Takalar Unggul Peningkatan PAD					Rp. 2.269.806.140
	Penambahan Alat Bayar Digital (Cashless) pada OPD Pengelola PAD	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 40.385.300
					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 133.220.200
	Pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan PAD melalui pemanfaatan asset yang tepat dan efesien	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 49.628.800
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 212.690.000
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 129.862.670
					Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 29.016.700
					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 64.918.300

					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 347.098.400
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 61.582.700
					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp. 94.606.400
					Penagihan Pajak Daerah	Rp. 862.533.900
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp. 10.000.000
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 125.213.070
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 30.126.900
					Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Rp. 78.922.800

Sumber Data : SIPD Kemendagri RI. 2025

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahana Renja Badan Pendapatan Daerah

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah adanya perubahan dalam rencana kerja, yang diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Di dalam Perubahan Renja Tahun 2025 ini terdapat rumusan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, dimana di dalammya terdapat 2 Program, 9 Kegiatan serta 46 Sub Kegiatan, dimana untuk penyebaran kegiatannya adalah untuk kegiatan rutin berlokasi di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, sedangkan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada kecamatan dan desa/kelurahan, dan kegiatan yang sifatnya koordinasi selain berlokasi pada daerah setempat yakni pada pemerintah daerah Kabupaten Takalar serta ada juga yang berlokasi di luar provinsi.

Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2025 beserta pendanaan yang diharapkan dapat terlaksananya tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel IV. 2 berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**8.579.994.825,00**	**10.911.032.803,00**	**10.039.300.193,00**	**1.459.305.368,00**					
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.579.994.825,00**	**10.911.032.803,00**	**10.039.300.193,00**	**1.459.305.368,00**					
	5.02	**KEUANGAN**							**8.579.994.825,00**	**10.911.032.803,00**	**10.039.300.193,00**	**1.459.305.368,00**					
1,	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**6.051.792.325,00**	**8.285.319.903,00**	**7.769.494.053,00**	**-6.051.792.325,00**					
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*PERSENTASE PEMENUHAN KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH*				100 %	100 %	171.090.140,00	140.569.260,00	129.021.320,00	-42.068.820,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	42.045.840,00	38.729.400,00	28.380.320,00	-13.665.520,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.310.000,00	11.155.400,00	10.086.000,00	-17.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	25.904.000,00	18.279.000,00	17.821.800,00	-8.082.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.010,00	5.326.500,00	4.834.500,00	-165.510,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	7.276.800,00	5.439.990,00	4.218.380,00	-3.058.420,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan																

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	14 Laporan	36.651.500,00	37.484.370,00	31.743.840,00	-4.907.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	26.901.990,00	24.154.600,00	31.936.480,00	5.034.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				98 %	98 %	3.927.215.393,00	5.998.274.003,00	6.118.537.033,00	2.191.321.640,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				700 Orang/ bulan	700 Orang/ bulan	3.786.709.833,00	5.891.176.103,00	5.965.010.933,00	2.178.301.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	20.138.300,00	22.128.000,00	51.800.000,00	31.661.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12Dokumen	12Dokumen	20.000.040,00	13.900.300,00	32.580.400,00	12.580.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	1 Laporan	31.027.670,00	27.283.400,00	27.283.400,00	-3.744.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.654.050,00	22.443.400,00	25.190.300,00	-5.463.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	20 Laporan	38.685.500,00	21.342.800,00	16.672.000,00	-22.013.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				90 %	90 %	25.719.670,00	23.110.590,00	22.949.700,00	-2.769.970,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.03 .0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD															
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.601.000,00	4.928.100,00	4.163.000,00	-3.438.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.03 .0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.998.670,00	5.360.200,00	5.173.700,00	-824.970,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.03 .0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	4.754.400,00	4.516.800,00	-4.483.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.03 .0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.120.000,00	8.067.890,00	9.096.200,00	5.976.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				90 %	90 %	67.451.000,00	91.405.300,00	96.069.250,00	28.618.250,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	2 Paket	38.100.000,00	39.150.000,00	39.150.000,00	1.050.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.05 .0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	10.055.000,00	26.346.300,00	34.009.400,00	23.954.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	19.296.000,00	25.909.000,00	22.909.850,00	3.613.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				96 %	96 %	458.062.000,00	1.106.870.750,00	988.153.750,00	530.091.750,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.403.000,00	3.028.700,00	3.028.700,00	-374.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.269.000,00	707.879.050,00	707.879.050,00	682.610.050,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.671.000,00	3.825.700,00	3.825.700,00	1.154.700,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	10.023.000,00	5.742.400,00	5.742.400,00	-4.280.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	100 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	60 Laporan	9.153.000,00	4.056.900,00	4.056.900,00	-5.096.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	397.543.000,00	372.338.000,00	253.621.000,00	-143.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Penyediaan Mebel*				5 Paket	5 Paket	5.100.000,00	22.295.000,00	22.295.000,00	17.195.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	5.100.000,00	22.295.000,00	22.295.000,00	17.195.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				60 Laporan	60 Laporan	947.078.522,00	837.927.000,00	327.600.000,00	-619.478.522,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	109.151.522,00	0,00	0,00	-109.151.522,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	48 Laporan	837.927.000,00	837.927.000,00	327.600.000,00	-510.327.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				24 Laporan	24 Laporan	450.075.600,00	64.868.000,00	64.868.000,00	-385.207.600,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	399.999.600,00	40.938.000,00	40.938.000,00	-359.061.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	16 Unit	50.076.000,00	23.930.000,00	23.930.000,00	-26.146.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2,	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-				**100 %**	-	**2.528.202.500,00**	**2.625.712.900,00**	**2.269.806.140,00**	**-2.528.202.500,00**					
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah*				98 %	98 %	2.528.202.500,00	2.625.712.900,00	2.269.806.140,00	-258.396.360,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak, Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Subjek Pajak
	5.02.04.2.01 .0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	90.000.000,00	100.479.700,00	40.385.300,00	-49.614.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.04.2.01 .0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta															

		Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	48.283.500,00	144.050.600,00	133.220.200,00	84.936.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.04.2.01 .0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	132.387.700,00	49.628.800,00	-30.371.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.04.2.01 .0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				50 Unit	50 Unit	650.000.000,00	214.100.000,00	212.690.000,00	-437.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.04.2.01 .0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				60000 Laporan	60000 Laporan	80.000.000,00	188.646.100,00	129.862.670,00	49.862.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.04.2.01 .0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan															

		Pelaporan Basis Data Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	40.000.000,00	29.016.700,00	-50.983.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)															
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2000 Obyek Pajak	2000 Obyek Pajak	75.000.000,00	64.918.300,00	64.918.300,00	-10.081.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				60000 Dokumen	60000 Dokumen	210.000.900,00	396.445.600,00	347.098.400,00	137.097.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah															
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3000 Layanan	3000 Layanan	35.000.000,00	69.000.000,00	61.582.700,00	26.582.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah															
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				500 Dokumen	500 Dokumen	85.000.000,00	122.832.000,00	94.606.400,00	9.606.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				170000 Dokumen	170000 Dokumen	769.917.000,00	851.507.000,00	862.533.900,00	92.616.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.200,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12Dokumen	12Dokumen	45.000.000,00	118.188.900,00	125.213.070,00	80.213.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	145.000.900,00	37.000.000,00	30.126.900,00	-114.874.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah															
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	136.157.000,00	78.922.800,00	-21.077.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	J U M L A H								**8.579.994.825,00**	**10.911.032.803,00**	**10.039.300.193,00**	**-20.817.255.718,00**					

Sumber Data : SPJ Fungsional Triwulan I Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pendanaan karena adanya pergeseran, penambahan, maupun pengurangan anggaran karena adanya efesiensi anggaran. Terdapat 2 Program, 9 Kegiatan, dan 46 Sub Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 8,041,059,903,- dan setelah perubahan menjadi Rp**.** 7,413,566,053,- pada program ini terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 39,735,590,-. Hal ini terjadi karena terdapat kegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran meskipun adanya beberapa kegiatan pada program ini yang mengalami efesiensi. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah :
    1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 163,873,260,- dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 213,865,900. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 49,992,640,- pada kegiatan ini terjadi penambahan dan pengurangan pada 4 sub kegiatan yaitu :
        - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD dengan anggaran pokok sebesar Rp. 18,279,000,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 20,279,000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 2,000,000,-.
        - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 5,439,990,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 10,432,000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 4,992,010,-
        - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja pada SKPD, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 37,484,370,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 50,485,000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 13,000,630,-
        - Evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 24,154,600,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 54,154,600,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 30,000,000,-

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 91,405,300,- dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 101,405,300,-. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 10,000,000,- pada kegiatan ini terjadi penambahan dan pengurangan pada 1 sub kegiatan yaitu :

   - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 25,909,000,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 35,909,000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 10,000,000,-

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 1,106,870,750,- dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 1,086,613,700,-. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 20,257,050,- pada kegiatan ini terjadi penambahan dan pengurangan pada 1 sub kegiatan yaitu :

   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 707,879,050,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 687,622,000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 20,257,050,-.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 2,869,972,900,- dan setelah perubahan menjadi Rp**.** 2,303,137,290,- pada program ini terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 566,835,610,-. Hal ini terjadi karena terdapat kegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran meskipun adanya beberapa kegiatan pada program ini yang mengalami efesiensi. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah :

   1) Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 2,869,972,900,- dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 2,303,137,290. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 566,835,610,- pada kegiatan ini terjadi penambahan dan pengurangan pada 13 sub kegiatan yaitu :

      - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 100,479,700,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 42,578,700,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 57,901,000,-.

- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 144,050,600,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 134,510,600,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 9,540,000,-.
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 132,387,700,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 60,793,600,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 71,594,100,-.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 214,100,000,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 42,578,700,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 212,690,000,-.
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 188,646,100,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 131,419,970,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 57,226,130,-.
- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 40,000,000,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 37,642,610,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 2,357,390,-.
- Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 396,445,600,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 347,098,400,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 49,347,200,-.
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 106,905,000,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 63,101,000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 43,804,000,-.
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 122,832,000,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 94,606,400,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 28,225,600,-
- Penagihan Pajak Daerah, Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 1,026,935,000,- dan setelah mengalami perubahan

anggaran menjadi Rp. 864,585,000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 162,350,000,-

- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 149,115,900,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 125,565,970,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 23,549,930,-
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 37,000,000,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 31,140,000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 5,860,000,-
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 136,157,000,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 82,486,740,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 53,670,260,-

BAB V
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini menjadi instrumen utama bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana kegiatan dan Anggaran Perubahan Tahun 2025 yang dapat dimanfaatkan oleh yang berkepentingan serta dapat menjadi pedoman sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2025 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dengan Bappelitbangda Kabupaten Takalar dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar;

2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Badan pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dengan pemangku kepentingan; dan
3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dengan pemangku kepentingan Kebijakan umum anggaran dan Perubahan Prioritas plafon anggaran sementara.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar telah berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJMN serta RPJP dan RPJMD, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Takalar, RKPD, Renstra, Renja, DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2026 yang akan datang.

Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Takalar yaitu takalar maju dan Berdaya Saing Ekonomi Digital**.**

Badan Pendapatan Daerah diamanahkan pemerintah daerah sebagai salah satu program prioritas Bupati terpilih, yakni Takalar Unggul Peningkatan PAD. Badan pendapatan Daerah Kabupaten Takalar diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. .

Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Aamiin.

Takalar, 12 Juni 2025
Kepala Badan,

RUSDI, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197312 200003 1 009

RENJA
PERUBAHAN
TAHUN 2025



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Dinas Kesehatan Kab. Takalar Tahun 2025

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah dinas kesehatan kabupaten takalar tahun 2025.

Dokumen ini merupakan suatu dokumen perubahan rencana kerja di bidang kesehatan yang merumuskan tentang perubahan kegiatan yang tidak dianggarakan namun dibutuhkan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan.

Dalam penyusunan dokumen ini disadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik itu dalam hal penyajian data maupun analisisnya. Oleh karena itu segala bentuk saran dan tanggapan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan dokumen rencana kerja perangkat daerah di masa yang akan datang.

Tidak lupa diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yangtelah menyumbangkan segala bentuk pemikirandan tenaga dalam penyusunan Dokumen perubahan rencana kerja perangkat daerah Dinas Kesehatan ini.Mudah-mudahan dengan adanya dokumen ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan rencana kerja Dinas Kesehatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Takalar.

Takalar, 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Takalar

dr. Hj.Nilal Fauziah,M.Kes
Pangkat :Pembina Utama Muda
Nip.197608212003122006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar isi iii

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 SistematikaPenulisan 7

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Pd Triwulan I 10

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas kesehatan Sampai Dengan Triwulan I 2025 . 10

2.1.1 Evaluasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025 21

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan Dan Kinerja 22

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pendanaan 23

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja 24

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 26

2.2.1. Indikator Kinerja Utama 26

2.2.2. Indikator Kinerja SPM 39

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja 44

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan 44

2.3.2 Upaya Pencapaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan 44

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan 44

BAB III Tujuan Dan Sasaran 45

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 45

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025 45

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025 45

3.1.2.1Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 45

3.2. Tujuan dan Sasaran 46

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda 51

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 51

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja 56

BAB V Penutup 158

5.1CatatanPenting 158

5.2Kaidah Pelaksanaan 158

5.3Rencana Tindak Lanjut 158

BABI
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (limatahunan)dalambentukRencanaStrategis(Renstra)maupunjangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan RencanaKerjaBadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah(Bappelitbangda) disusun berpedomanpada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2025; danmengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.Dokumen Perubahan Renja BappelitbangdaTahun 2025 merupakansatu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah DaerahKabupaten TakalarTahun2025,danmengacupadaRancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 danRancangan Awal Renstra BappelitbangdaTahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Bappelitbangdadijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Bappelitbangda Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalamKebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

1.2 LandasanHukum

LandasanPenyusunanLaporanEvaluasiHasilRenjaPemerintahDaerah Dinas KesehatanKabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, kondisi Triwulan I dan II ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendali dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 1447);
9. Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang standar teknis pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor07Tahun2016tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas KesehatanKabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11);

1.3 Maksuddanujuan

- Maksud

  Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah sebagai berikut:

a. UntukmenjabarkanprogramdankegiatanRenstraOPDke dalamprogram/kegiatan tahunan

b. MenyiapkanacuanbagiRancanganPerubahanAPBD

c. Menyiapkankerangkaevaluasiperubahankinerjaprogram/ kegiatantahunan bagi

OPD.

- Tujuan

  Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD

1.4 SistematikaPenulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas KesehatanberdasarkanPermendagri Nomor 86Tahun2017adalah sebagai berikut:

BABI:PENDAHULUAN

Pendahuluan,Berisilatarbelakangpenyusunan,landasanhukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan dokumen Renja (Rencana Kerja) Dinas KesehatanKabupaten Takalar.

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, IKK, SPM dan SDGs, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak dan upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai triwulan I

BABIII:TUJUANDANSASARANPERANGKATDAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran, review terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, serta Telaahan Kebijakan Nasional rencana program dan kegiatan perubahan Renja Dinas KesehatanTahun 2025

BABIV:RENCANAPROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH

Pada Bab iniDaftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas DalamMendukungProgramPrioritasdalammendukungprogramprioritas pemerintah daerah serta rencana perubahan kegiatan dan pendanaan

BABV:PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BABII

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas kesehatan Sampai DenganTriwulan I 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja PD sampai saat tahun 2025 terdriri atas program, Kegiatan dan sub kegiatan Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I. Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tahun 2025 sampai pada Triwulan I belum dapat menunjukkan capaian kinerja secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target program pencapaian Pendanaan dari 4 Program yang dilaksanakan 3 Program diantaranya capaiannya 0-10% dan baru 1 Program yang capaiannya diatas 20%. untuk penyerapan dana untuk kegiatan baru 2 kegiatan yang capainnya diatan 20% dan 12 kegaiatan capaiannya 0-10% serta 2 kegoatan yang capainnya 10-20%. Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar. Kegiatan evaluasi Renja Dinas Dinas Kesehatan dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatansampai dengan Triwulan I Tahun 2025;

Tabel.2-1

EvaluasiTerhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Takalar RenjaPerangkat Daerah Kabupaten Takalar

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)	
							K	**Satuan**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	02				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**66,469,105,240**		**-**	**100%**	**119,413,720,524**	**6.0%**	**17,846,296,146**	**5%**	**17,846,296,146**	**4.60%**	**14.94%**
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**100%**	Persen	**211,860,413,592**	**0.00%**	**0**	**100%**	**60,745,797,942**	**15%**	**14,097,327,640**	**9%**	**14,097,327,640**	**9.04%**	**23.21%**
1	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan/Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	100%	Persen	1,792,000,000	0.00%	-	100%	155,000,840	13%	-	13.33%	-	13.33%	0.00%
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja/Perubahan Renja (Dokumen)	8	Dokumen	50,000,000			2	50,000,060	-	-	-	-	0%	0%
1	02	01	2.01	02	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	Dokumen	90,000,000			1	10,000,060	-	-	-	-	0%	0%

1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	Dokumen	90,000,000			3	9,999,760	-	-	-	-	0%	0%
1	02	01	2.01	04	Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	Dokumen	50,000,000			1	15,000,220	-	-	-	-	0%	0%
1	02	01	2.01	05	Koordinasi & penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	12	Dokumen	90,000,000			3	15,000,000	1	-	1	-	33%	0%
1	02	01	2.01	06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Eksemplar)	4	Eksemplar	22,000,000			1	35,000,160	1	-	1	-	100%	0%
1	02	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Frekuensi Pelaksanaan Evaluasi kinerja perangkat daerah (Kali)	8	Kali	1,400,000,000			4	20,000,580	-	-	-	-	0%	0%
																		19.05%	**0.00%**
																		SR	**SR**
1	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	Persen	205,083,930,352	0.00%	-	100%	59,163,844,865	23%	13,830,715,553	23.27%	13,830,715,553	23.27%	23.38%
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN (14 Bln)	10512	Orang	204,337,930,352			9,500	54,171,670,751	2,617	13,820,715,673	2,617	13,820,715,673	28%	26%
						Jumlah ASN yang mendapatkan TPP	5904	Orang				1,750	4,822,152,384	-	-	-	-	0%	0%
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran yang tatausahaan dan diverifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	4	Dokumen	96,000,000			1	120,022,170	-	-	-	-	0%	0%
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen				1	4,999,960	1	4,999,960	1	4,999,960	100%	100%

1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Eksemplar/Dokumen)	4	Dokumen	600,000,000			1	19,999,840	-	-	-	-	0%	0%
1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen				1	4,999,920	1	4,999,920	1	4,999,920	100%	100%
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Eksemplar/Dokumen)	4	Dokumen	50,000,000			1	14,999,920	-	-	-	-	0%	0%
1	02	01	2.02	07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen				1	4,999,920	-	-	-	-	0%	0%
																		28.44%	**28.19%**
																		SR	**SR**
1	02	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100%	Persen	-	0.00%	-	100%	79,913,650	50%	34,793,650	0%	34,793,650	0.00%	43.54%
1	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	Laporan				1	49,993,650	1	34,793,650	1	34,793,650	100%	70%
1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	Laporan				1	29,920,000	-	-	-	-	0%	0%
																		50.00%	**34.80%**
																		SR	**SR**

1	02	01	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	100%	Persen	90,000,000	0%	-	100%	9,999,790	0%	-	0%	-	0.00%	0.00%
1	02	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	Laporan				1	4,999,820	-	-	-	-	0%	0%
1	02	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	4	Dokumen	90,000,000			1	4,999,970	-	-	-	-	0%	0%
																		0%	**0%**
																		SR	**SR**
1	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	Persen	600,000,000	0.00%	-	100%	59,999,640	0%	-	0%	-	0.00%	0.00%
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	Dokumen	600,000,000			1	29,999,750	-	-	-	-	0%	0%
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)	2	Orang				3	29,999,890	-	-	-	-	0%	0%
																		0.00%	**0.00%**
																		SR	**SR**
1	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	Persen	2,200,000,000	0.00%	-	100%	435,406,350	18%	53,446,110	17.86%	53,446,110	17.86%	12.27%
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan RT	Jumlah Peralatan RT yang diadakan	4	Paket	200,000,000			4	15,000,500	-	-	-	-	0%	0%
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	4	Unit	200,000,000			4	30,000,100	1	4,900,000	1	4,900,000	25%	16%

1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						4	20,008,800	-	-	-	-	0%	0%
1	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	4	Dokumen	200,000,000			4	50,400,000	1	26,160,000	1	26,160,000	25%	52%
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	200,000,000			4	69,997,000	1	11,665,400	1	11,665,400	0%	17%
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi (kali)	4	Laporan	1,400,000,000			8	249,999,950	2	10,720,710	2	10,720,710	25%	4%
																		12.50%	**14.87%**
																		SR	**SR**
1	02	01	2.07		**Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	Persen	275,000,000	0.00%	-	100%	66,870,000	0%	-	0%	-	0.00%	0.00%
1	02	02	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun (unit)	20	Unit	275,000,000			1	66,870,000	-	-	-	-	0%	0%
																		0.00%	**0.00%**
																		SR	**SR**
1	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	Persen	-	0.00%	-	100%	465,157,104	26.92%	53,200,000	26.92%	53,200,000	0.00%	0.00%
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan air yang disediakan	20	Laporan				12	78,354,744	3	-	3	-	25%	0%
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6	Paket				2	66,810,000	1	-	1	-	50%	0%

1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan				12	319,992,360	3	53,200,000	3	53,200,000	25%	17%
																		33.33%	**5.54%**
																		SR	**SR**
1	02	01	2.09		**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	Persen	1,819,483,240	0.00%	-	100%	309,605,703	0.00%	125,172,327	0.00%	125,172,327	0.00%	0.00%
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan yang terpelihara (unit)	60	Unit	190,000,000			25	59,934,000	-	-	-	-	0%	0%
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	8	Unit	1,027,317,360			1	175,031,103	-	125,172,327	-	125,172,327	0%	72%
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	20	Unit	602,165,880			1	74,640,600	-	-	-	-	0%	0%
																		0.00%	**23.84%**
																		SR	**SR**
																		15.92%	**11.91%**
																		SR	**SR**

1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**100%**	**Persen**	**251,956,691,648**	**0.00%**	**0**	**100%**	**57,383,653,042**	**9%**	**3,748,768,506**	**9%**	**3,748,768,506**	**9.35%**	**6.53%**
1	02	02	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota**	100%	Persen	11,221,783,312	0.00%	0	100%	11,275,028,036	0%	539,961,866	0%	539,961,866	0.00%	0.00%
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang dikembangkan (unit)						1	129,000,000	-	20,426,000	-	20,426,000	0.00%	15.83%
1	02	01	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan (unit/paket)	1	Paket	7,071,783,312			1	1,439,002,880	-	-	-	-	0.00%	0.00%
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35	Kali	800,000,000			1	148,096,010	-	-	-	-	0.00%	0.00%
1	02	02	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	30	Paket	3,250,000,000			1	9,435,821,146	-	519,535,866	-	519,535,866	0.00%	5.51%
1	02	02	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	20	Paket	100,000,000			19	123,108,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%

																		0.00%	**4.27%**
																		SR	**SR**
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kab/Kota**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kab/Kota**	100%	Persen	239,734,908,336	0.00%	0	100%	46,049,312,606	28%	3,201,854,240	28%	3,201,854,240	0.00%	0.00%
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil terlayani (orang)	25,712	Orang	4,000,000,000			5,508	109,999,700	557	-	557	-	10.11%	0.00%
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang terlayani (orang)	24,544	Orang	1,059,632,000			5,833	608,660,040	1,087	-	1,087	-	18.64%	0.00%
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir terlayani (orang)	23,376	Orang	800,000,000			5,508	9,999,500	1,071	-	1,071	-	19.44%	0.00%
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang terlayani (orang)	128,912	Orang	1,000,000,000			25,285	10,001,000	13,713	-	13,713	-	54.23%	0.00%
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang terlayani (orang)	169,756	Orang	800,000,000			48,885	159,999,880	12,767	-	12,767	-	26.12%	0.00%
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif	Jumlah usia produktif yang terlayani (orang)	784,684	Orang	800,000,000			204,417	144,656,000	39,566	137,676,000	39,566	137,676,000	19.36%	95.17%
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	Jumlah usia lanjut yang terlayani (orang)	143,048	Orang	800,000,000			37,105	60,010,000	8,016	-	8,016	-	22%	0.00%
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang terlayani (orang)	269,796	Orang	800,000,000			68,210	10,000,000	8,119	-	8,119	-	12%	0.00%
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DM	Jumlah Penderita DM yang terlayani (orang)	21,548	Orang	800,000,000			5,431	10,000,000	1,824	-	1,824	-	34%	0.00%

1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Penemuan Kasus Baru dan Penderita ODGJ yang terlayani (orang)	2,940	Orang	600,000,000			739	10,000,000	308	-	308	-	42%	0%
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Jumlah Penemuan Terduga TB dan Penderita TB yang terlayani (orang)	45,640	Orang	600,000,000			6,669	9,999,720	1,681	9,999,720	1,681	9,999,720	25%	100%
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	250	orang				11,456	10,000,000	1,358	-	1,358	-	12%	0%
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (orang)	-	Orang	200,000,000			1	21,040,000	1	21,040,000	1	21,040,000	100%	100%
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	68	Dokumen	2,900,000,000			1	138,159,760	-	38,160,000	-	38,160,000	0%	27.62%
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja & Olahraga	Jumlah Pos UKK (Puskesmas)	72	Puskesmas	600,000,000			17	25,192,000	-	-	-	-	0%	0%
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa/Kelurahan yang ODF (Desa/Kelurahan)	400	Desa/Kelurahan	2,220,000,000			100	399,999,880	23	-	23	-	23%	0.00%
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	Dokumen	600,000,000			1	247,799,450	-	-	-	-	0%	0.00%
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	Dokumen	500,000,000			1	36,900,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan PM dan PTM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8	Dokumen	1,600,000,000			2	245,414,990	-	-	-	-	0%	0%
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang terlayani oleh BPJS (Peserta)	########	Peserta	209,405,276,336			332,863	17,882,476,814	122,590	2,361,882,500	122,590	2,361,882,500	36.83%	13.21%

1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	40	Paket	400,000,000			2	5,000,000	-	-	-	-	0%	0%
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Kegiatan	250,000,000			1	324,999,850	-	-	-	-	0%	0%
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	Dokumen	5,000,000,000			3	24,944,310,492	1	574,756,200	1	574,756,200	33%	2%
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah belanja operasional pada Pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	20	Puskesmas/RS/Labkesda	2,000,000,000			15	190,317,230	1	19,099,820	1	19,099,820	7%	10%
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini & Respon Wabah	Jumlah Masyarakat yang terlayani saat terjadi wabah (orang)	4	Dokumen	1,000,000,000			1	21,040,000	1	21,040,000	1	21,040,000	100%	100.00%
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Centre (PSC) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Sati Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4	Unit	1,000,000,000			1	413,336,300	-	18,200,000	-	18,200,000	0%	4%
																		22.83%	**17.41%**
																		SR	**SR**
1	02	02	2.04		**Penerbitan Izin RS Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Persentase Penerbitan Izin RS Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	100%	Persen	1,000,000,000	0.00%	0	100%	59,312,400	0%	6,952,400	0%	6,952,400	0.00%	11.72%
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Faskes	Jumlah Fasyankes yang meningkat mutu pelayanan kesehatannya (Puskesmas/RS/Labkesda)	72	Puskesmas/RS/Labkesda	1,000,000,000			2	59,312,400	-	6,952,400	-	6,952,400	0%	12%

																		0.00%	**11.72%**
																		SR	**SR**
																		7.61%	**11.13%**
																		SR	**SR**
1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas SDMK**	**0%**	**Persen**	**2,630,000,000**	**0.00%**	**0**	**100%**	**1,233,226,760**	**0%**	**200,000**	**0%**	**200,000**	**0.00%**	**0.02%**
1	02	03	2.01		**Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**Persentase Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota yang diterbitkan**	0%	Persen	250,000,000	0.00%	0	100%	3,500,000	0%	200,000	0%	200,000	0.00%	5.71%
1	02	03	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2	Dokumen	250,000,000			1	3,500,000	-	200,000	-	200,000	0%	6%
																		0.00%	**5.71%**
																		SR	**SR**
1	02	03	2.02		**Perencanaan Kebutuhan & Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan & Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota**	100%	Persen	2,380,000,000	0.00%	0	100%	122,342,000	0%	-	0%	-	0.00%	0.00%
1	02	02	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	Dokumen	150,000,000			1	16,500,000	-	-	-	-	0%	0%
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	Dokumen	2,380,000,000			1	105,842,000	-	-	-	-	0%	0%

																		0.00%	**0.00%**
																		SR	**SR**
1	02	03	2.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	0%	Persen	-	0.00%	0	100%	1,107,384,760	0%	-	0%	-	0.00%	0.00%
1	02	03	2.02	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3	1,107,384,760	-	-	-	-	0%	0%
																		0.00%	**0.00%**
																		SR	**SR**
																		0.00%	**1.90%**
																		SR	**SR**
1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan**	**100%**	**Persen**	**22,000,000**	**0.00%**	**-**	**100%**	**51,042,780**	**0%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**
1	02	05	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	100%	Persen	22,000,000	0.00%	-	100%	51,042,780	0%	-	0%	-	0.00%	0.00%

1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	Dokumen	22,000,000			1	51,042,780	-	-	-	-	0%	0%
																		0.00%	**0.00%**
																		SR	**SR**
																		0.00%	**0.00%**
																		SR	**SR**
																		5.88%	**6.24%**
																		SR	**SR**

Sumber Data :Laporan Monev Triwulan I 2025

2.1.1 Evaluasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang dilaksanakan di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD Tahun 2025

APBD 2025							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
	Dinas Kesehatan	4	16	70	4	16	71
TOTAL							

Sumber data Laporan Monev TW I tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 4, jumlah kegiatan 16, dan jumlah sub kegiatan 70, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 4, jumlah indikator kegiatan sebanyak 16, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 71.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan Dan Kinerja

Perndanaan Program ,pada Dinas Kesehatan pada tahun 2025 terdapat 4 program yang mendapat pendanaan Jika dibandingkan tahun 2024 maka jumlah program yang mendapat pendaan sebanyak 5 program , berkurang satu program. Dimana jumlah dana yang dikelola pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini :

Tabel II.3

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Dinas Kesehatan**	**119.413.720.524.-**	**17.846.290.146.-**	**4,60**	**14,94**
TOTAL					

Sumber data Laporan Monev TW I tahun 2025

Berdasarkan tabel II,3 diatas menunjukkan bahwa Jumlah dana yang dikelola dinas kesehatan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 capaian fisiknya baru mencapai 4,60% dan masuk kategori capaian rendah begitu juga capaian keuangan baru mencapai 14,94% capainnya baru mencapaikategori sedang.Penyerapan anggaran pada dinas kesehatan sampai saat ini belum maksimal hal ini program dan kegiatan tersebut baru berjalan satu triwulan.**U**ntuk capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Kabupaten Takalar triwulan 1 dapat dilihat pada tabel II.4 berikut ini

Tabel: II-4

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10-20%	>20 %		0 - 10%	>10-20%	>20 %		0 - 10 %	>10 - 20 %	>20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Dinas Kesehatan	4	3	0	1	16	12	2	2	70	52	7	11
TOTAL													

Sumber data laporan monev triwulan 1 tahun 202

2.1.2.1. Evaluasi CapaianKinerja Pendanaan

Gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kesehatan . Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk realisasi 0 – 10%, Kategori Sedang Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori Tinggi untuk realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Sebagai berikut:

1. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Program**

   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada program, anggaran pada Dinas Kesehatan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan terdapat 4 program dengandimana 3 program kategori Rendah, dan 1 Program KategoriTinggi

2. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Kegiatan**

   Capaian pelaksanaan pada tingkat kegiatan menunjukkan bahwa capaiannya bervariasi dari 16 Kegiatan terdapat 12 Kegiatan dengan kategori rendah , 2 kegiatan dengan kategori sedang dan 2 kegiatan dengan kategori tinggi

3. **Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Sub Kegiatan**

   Capaian pelaksanaan pada sub kegiatan sebanyak 70 sub kegiatan menunjukkan bahwa capaiannya bervariasi dimana jumlah sub kegiatan dangan capaian rendah berdasarkan skala pengukuran capaian menunjukkan bahwa ada 52 kegiatan dengan capaian rendah , capaian sub kegiatan dengan kategori sedang sebanyak 7 kegiatan dan capaian kegiatan dengan kategori tinggi sebanyak 11

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja

Pelaksanaan program, Kegiatan dan sub kegiatan memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat Dinas Dinas Kesehatan. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori Sedang untuk realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen dan kategori Tinggi dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan kategori tersebutn dapat memebrikan gambaran besarnya capaian dari masing masing prgoram, kegiatan maupun sub kegiatan .batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi. Kegiatan evaluasi Renja Dinas Kesehatan serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. **Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Program**

   Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program

pada Dinas Kesehatan dapat dijelaskan bahwa dari Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I capaian program masih dikategori rendah sebanyak 4 program atau sebesar 100%

2. **Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Kegiatan**

   Pelaksanaan kegiatan sampai dengan trwulan I pada dinas kesehatan adalah dari 16 kegiatan yang dilaksanakan capaiannya terdiri atas 3 kategori , dimana kategori yang paling tinggi sebanyak 1 kegaitan atau sebesar 6,25% dari jumlah kegiatan, capaian kinerja sedang sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 12,5% dari jumlah kegiatan yang ada dan capain rendah sebanyak 13 kegiatan atau sebesar

   81,25%

3. **Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Sub Kegiatan**

   Pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 70 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 41 sub kegiatan (58,57%), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 6 kegiatan (8,57%), selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 23 sub kegiatan (32,85%), yaitu pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025. Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut:

   Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan bahwa dari 5 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua tidak terdapat capaian kinerja atau 0% program yang masuk pada kategori rendah atau dibawah 10 persen, begitupun pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 10-20 persen) tidak ada program atau 0% program yang msuk kategori sedang, semua program

Tabel II.5

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10%	>10-20%	>20 %		0 - 10%	>10-20%	>20 %		0 - 10%	>10-20%	>20 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Kesehatan	4	4	-	-	16	13	2	1	70	41	6	23
TOTAL													

Sumber data laporan monev triwulan 1 tahun 2025

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja pelayanan merupakan gambaran capaian kinerja SKPD pada periode Renstra sebelumnya yaitu capaian Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Indikator SPM, Indikator *SDG' s*elama tahun 2020-2024.Tolak ukur kinerja pelayanan dilihat dari capaian kinerja berdasarkan indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) pelayanan pada Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/S*ustainable Development Goals (SDG's)* pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah (impact based) yang diturunkan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Takalar Periode 2017-2022 dan pada masa peralihan 2023-2026. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan pada tabel berikut :

Tabel. II-6

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Kesehatan/Kabupaten TakalarTriwulan 1 Tahun 2025

NO	INDIKATOR (2023-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR (2025-2029)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian TW 1	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	**2025**	2026	2027	
(1))	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	**(9)**	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kesehatan	73,69	N/A	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,52	73,66	73,78	N/A	73.66	73.78	
2	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kab/Kota yang memenuhi Sarana dan Prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai satndar	4	2	Persentase Kematian Ibu dari jumlah seluruh kelahiran hidup	100	94,5	88,22	**5,81**	94,5	88,22	
3	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang Terakreditasi	75	75	Angka Kematian Balita	0	0	0	**0**	0	0	
4	Jumlah Rumah Sakit yang di Bina dan dipersiapkan akreditasi	2	2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	23,9	13	12,5	5,81	13	12,5	
5	RasioTenaga Kesehatan:			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	90	95	95	85,27	95	95	
	a.Dokter / Dokter Gigi	0,12	N/A	Cakupan imunisasi bayi lengkap	90	93	95	N/A	93	95	
	b. Dokter Spesialis / Spesialis Gigi	0,12		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	99	99	99	**97**	100	100	
	c. Bidan	0.72		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	90	90	90	**26,01**	90	90	
	d. Perawat	1,42		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	55	55	60	29,84	55	60	

				standard							
	e. Sanitarian	0,18		Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Kesehatan	100	100	100	**35,8**	100	100	
				Persentase Peningkatan Pendapatan Asli daerah	12,6	25,2	25,2	**1,9**	25.2	25,2	
	f. Tenaga Gizi	0,16	N/A	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Kesehatan	80	80	80	0	80	80	
	g. Tenaga Kefarmasian	0,18	N/A	Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Kesehatan	100	100	100	99	100	100	
	h. Laboran	0,09	N/A								
	i. TenagaKes. Masyarakat	0,20	N/A								
6	Indek Terhadap SPM	100	66.04								
7	IPKM	70,49	72,06								
8	Persentase Terhadap Rumah tangga ber PHBS	87	84,63								
9	Persentase Institusi Pendidikan ber PHBS	60	72,31								
10	Persentase Tempat Kerja ber PHBS	30	77,13								
11	Persentse Tempat Tempat Umum ber PHBS	47	83,16								
12	Persentase Fasilitas Kesehatan ber PHBS	85	100								
13	Persentase Penyelengara Kabupaten Sehat ber PHBS	Swasti Saba Wistara	Swasti Saba Wistara								
14	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B								
15	Nilai SAKIP	BB	BB								

Sumber data Laporan Monev TW Itahun 2025

Analisa IKU

a. Angka Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator utama yang mencerminkan hasil pembangunan di bidang kesehatan dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan. Angka UmurHarapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Umur Harapan Hidup (UHH) merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang terus meningkat. Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, selama periode 2020 hingga 2024, UHH di Kabupaten Takalar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,27% per tahun.Pada tahun 2020, UHH di Kabupaten Takalar tercatat sebesar 72,69 tahun, dan terus mengalami peningkatan setiap tahun, hingga mencapai 73,69 tahun pada tahun 2024. Dengan capaian ini, UHH Kabupaten Takalar telah melampaui rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada tahun 2024 berada di angka 71,43 tahun.Peningkatan UHH ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan intervensi pembangunan kesehatan, antara lain:Penurunan angka kematian bayi dan balita,Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,Pelaksanaan integrasi layanan primer melalui transformasi sistem kesehatan,Pengendalian penyakit menular dan tidak menular secara efektif,Perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan sistem pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan maternal.AKI dihitung berdasarkan jumlah kematian ibu akibat kehamilan, persalinan, dan nifas per 100.000 kelahiran hidup.Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global yaitu dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Tabel II-9
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Takalar Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Kematian Ibu	Kelahiran Hidup	AKI (per 100.000 KH)
2020	6	5.817	103,1
2021	11	5.778	190,3
2022	4	5.838	68,5
2023	8	5.622	142,3
2024	5	5.241	95,4

Sumber :*Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2024*

Berdasarkan data diatas, tren AKI dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan.Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 6 kasus kematian ibu dari 5.817 kelahiran hidup, sehingga menghasilkan AKI sebesar 103,1 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini melonjak drastis pada tahun 2021 menjadi 190,3, seiring dengan meningkatnya jumlah kematian ibu menjadi 11 kasus dari 5.778 kelahiran hidup. Kenaikan ini diduga berkaitan dengan terganggunya akses layanan kesehatan selama masa pandemi COVID-19, yang menyebabkan keterlambatan penanganan kasus komplikasi kehamilan.

Tahun 2022 menunjukkan perbaikan signifikan, dengan penurunan angka kematian ibu menjadi 4 kasus dan AKI sebesar 68,5. Namun, peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023, dengan 8 kasus kematian ibu dari 5.622 kelahiran hidup, menghasilkan AKI sebesar 142,3. Pada tahun 2024, angka tersebut menurun menjadi 95,4, dengan 5 kematian ibu dari 5.241 kelahiran hidup. Fluktuasi AKI ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan, sistem layanan kesehatan ibu di Kabupaten Takalar masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam deteksi dini faktor risiko, rujukan tepat waktu, dan penyediaan fasilitas pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan komprehensif (PONEK). Kematian ibu masih dapat dicegah apabila sistem pemantauan dan intervensi berbasis risiko diperkuat, serta dilakukan peningkatan kapasitas tenaga

kesehatan dan optimalisasi pelayanan kesehatan ibu di seluruh jenjang layanan.Salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu adalah terletak pada kendala teknis pada sistem rujukan yang sudah menggunakan sistem online. Dalam melakukan rujukan ke rumah sakit provinsi, rujukan dari kabupaten harus telah mendapat jawaban dari rumah sakit yang dituju untuk selanjutnya pasienbaru bisa dibawa untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut pada rumah sakit tujuan. Sehingga kematian ibu hamil, bersalin dan nifas di kabupaten takalar rata-rata meninggal di fasyankes rujukan kabupaten dengan penyebab yang dominan adalah eklampsi, pada tahun 2025 sampai dengan TW I Jumlah kematian 0

c. Angka Kematian Anak Balita

Angka Kematian Balita (AKBA) merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan pada anak usia 0 hingga 59 bulan serta efektivitas program kesehatan masyarakat, termasuk gizi, imunisasi, dan sanitasi lingkungan.

Tabel II-8
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Tahun	Jumlah Kematian Balita	Kelahiran Hidup	AKBA (per 1.000 KH)
2020	1	5.817	0,17
2021	1	5.778	0,17
2022	1	5.838	0,17
2023	0	5.622	0
2024	0	5.241	0

Sumber:tahun 2024 Kesehatan Masyarakat

Selama periode 2020 hingga 2025, Kabupaten Takalar mencatat jumlah kematian balita yang sangat rendah.Dalam tiga tahun pertama (2020–2022), hanya tercatat masing-masing 1 kasus kematian balita per tahun. Pada tahun 2023 dan 2024, tidak terdapat kasus kematian balita sama sekali.Angka tersebut **j**auh berada di

bawah standar nasional**,** yaitu maksimal 25 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup.Capaian ini menandakan bahwaupaya promotif, preventif, dan kuratif dalam pelayanan kesehatan anak telah berjalan dengan sangat baikdiKabupaten Takalar.Walaupun tren menunjukkan hasil yang positif, beberapa upaya perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan antara lain Monitoring pertumbuhan balita melalui Posyandu dan kunjungan rumahsecara aktif,Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkapserta edukasi keluarga tentangtanda bahaya,Pencegahan gizi burukdan penguatan intervensi spesifik serta sensitif terhadap stunting, danPenguatan kapasitas kader dan tenaga kesehatandi tingkat layanan primer agar deteksi dini dan penanganan kasus balita sakit tetap optimal.

d. Prevalensi Stunting

Pelaksanaan SSGI 2024 sendiri merupakan hasil kolaborasi erat antara berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah. Apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Tim Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI), lembaga survei, para pakar, enumerator, dan semua pihak yang telah mendukung kelancaran survei ini. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. II.10

Angka Stunting Kabupaten Takalar Tahun 2024 – 2025

No	Tingkat	Angka Stunting (Tahun)	
		2024	2025
1	Nasional	19,8	20,1
2	Kab. Takalar	34,5	24

Dari tabel II.7 diatas menunjukkan bahwa) Hasil SSGI 2024 menunjukkan penurunan signifikan pada prevalensi *stunting* secara nasional menjadi 19,8%, melampaui proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan sebesar 20,1%, di Kabupaten Takalar menurut SSGI angka stunting pada tahun 2024 sebesar 34,5% fdan pada tahun 2025 turun menjadi 24%, jika dibandingkan dengan angka stunting secara nasional angka stunting masih tinggi dibandinagkan dengan angka angka stuntui nasional pada tahun 2024 dan jika dibandingkan hasil SSGI 2025

secara nasional angka stunting sebesar 20,1% dan jika dibandingkan dengan angka stunting dikabuoaten Takalar pada tahun yang sama angka stunting dikabupaten taklar masih diatas angka stunting nasional yaitu 24%

e. Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Pemeriksaan Kesehatan Gartis (PKG) merupakan kebijakan Nasional Anak Sekolah. Mulai tahun ajaran baru Juli 2025, pemerintah resmi meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di seluruh sekolah Indonesia. Program ini ditujukan untuk anak usia 7-17 tahun, dan dilakukan langsung di sekolah masing-masing.

Siswa SD (usia 7-12 tahun): Pemeriksaan meliputi status gizi, tekanan darah, gula darah, telinga, mata, gigi, TBC, Hepatitis B, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi (untuk kelas 4-6), deteksi dini merokok (kelas 5-6), aktivitas fisik (kelas 4-6), dan riwayat imunisasi (kelas 1).25 Agt 2025, Capaian pemeriksaan Gratit (di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : II-11

Hasil Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kab. Takalar Tahun 2025

No	Pemeriksaan Kes. Gratis	Target 2024	Target 2025	Capaian 2024	Capaian 2025	Persentase
		-	85,68	-	82,2	99,44%

Siswa SD (usia 7-12 tahun): Pemeriksaan meliputi status gizi, tekanan darah, gula darah, telinga, mata, gigi, TBC, Hepatitis B, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi (untuk kelas 4-6), deteksi dini merokok (kelas 5-6), aktivitas fisik (kelas 4-6), dan riwayat imunisasi (kelas 1).25 Agt 2025, Pemeriksaan kesehatan gratis sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/33,/ 2025 tanggal 21 Januari 2025

f. Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap

Pemberian imunisasi dilakukan untukProgram imunisasi merupakan langkah untuk mencegah penyakit menular dengan cara memberikan vaksin pada seseorang sehingga tubuhnya resisten terhadap penyakit tertentu. Tujuan pemberian imunisasi adalah membentuk kekebalan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus penyebab penyakit. Pemberian imunisasi pada bayi sesui dengan

permenkes Nomor: 12 Tahun 2017, sampai saat ini hasil imunisasi lengkap pada tahun 2025 belum dirilis

g. Cakupan Kepesertaan JKN

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu kebijakan stratenis pemerintah Indonesia dibidang kesehatan yang bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan merata tanpa hambatan finansial serta biaya pengobatan. Program ini merupakan asuransi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia langsung dalam melindungi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

JKN sendiri merupakan bagian dari implementasi **Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)** yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Tujuan utama dari program ini adalah:

- Menjamin seluruh penduduk Indonesia memperoleh perlindungan kesehatan,
- Mengurangi beban pembiayaan kesehatan masyarakat,
- Meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk melalui akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.

Adapun cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Maret 2025 adalah 279,5 juta jiwa atau sekitar 98,3% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 284,4 juta jiwa penduduk Indonesia. Dari total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut, sejumlah 222,7 juta penduduk Indonesia atau 79,7% penduduk Indonesia merupakan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih rutin melakukan pembayaran tagihan di setiap bulannya.

Dari total 222,7 juta penduduk yang masih menjadi peserta aktif terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yang terdiri dari:

- Penerima Bantuan Iuran JKN sejumlah 96,7 juta orang penduduk yang ditujukan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang mendapatkan jaminan kesehatan dengan iuran dibayarkan oleh pemerintah
- Non Penerima Bantuan Iuran JKN sejumlah 125,9 juta penduduk yang membayar iuran JKN secara mandiri. Peserta ini terdiri dari pekerja yang menerima upah (PPU), pekerja bukan penerima upah (PBPU), dan bukan

pekerja, termasuk PNS, karyawan swasta, wiraswasta, dan masyarakat umum yang mampu membayar iuran.

Di Kabupaten Takalar sampai saat ini warga yang menerima mamfaat kepesrtaan aktif JKN sudah mencapai 99%

Tabel. II-12

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan sampai dengan Tahun 2025

No	Cakupan Kepesertaan Aktif JKN	Tahun		
		Target 2025	Realisasi 2025	
1		95,9	99	

Tabel terseut diatas menunjukkan bahwa kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kabuoaten Takalar mencapai 99% hal ini kalau diandingkan dengan target telah melewati sebesar 4% dari target yang telah ditentukan

h. Angka Keberhasilan Pengobatan TB

Angka keberhasilan pengobatan TBPada 2024, Indonesia telah mencatatkan 889 ribu notifikasi kasus TBC. Namun, pencapaian inisiasi pengobatan TBC sensitif obat (SO) masih berada di angka 81%, di bawah target 90%. Sementara itu, keberhasilan pengobatan TBC resisten obat (RO) baru mencapai 58%, jauh dari target 80%.25 Mar 2025,

Tabel : II – 13

Cakupan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Kab. Takalar

No	Kabupaten	Angka Keberahsilan Pengobatan TB	
		Target	2025
1	Takalar	84,4	85,27

i. Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan sesuai standar

Penderita hipertensi di Indonesia saat ini mencapai angka mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebanyak 34,11% masyarakat Indonesia mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi. Angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat kelima dunia sebagai negara dengan jumlah penderita hipertensi terbanyak. Dikabupaten Takalar penderita hipertensi sampai dengan triwulan I penderita hipertensi yang mendapat pelayanan baru mencapai 29,84% hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksanan kesehatannya ke sarana kesehatan

j. Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Kesehatan

Tabel II - 14

Persentase Peningkatan Pendapatan PAD Dinas Kesehatan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4
2023	44.770.000.000	22.014.769.809	49,17
2024	75.375.000.000.-	25,500.222.039,-	33,83
2025	57.724.200.000'-	20.644.656.642,-	35,8

Catatan :
Untuk Tahun 2025 capaiannya sampai dengan bulan September 2025

Pada table II- 15 diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp 25.500.222.039 atau sebesar 33,83% jika dibandingkan persentase capainnya Pendapatan Asli Daerah dengan Tahun 2025 sebesar Rp. 20.644.656.642 atau sebesar 35,8% , adanya perbedaan realisasi keuangan disebabkan karena adanya perbedaan besarnya target sebesar Rp.17.650.800.000,-

k. Persentase peningkatan Pendapatan ASLI Daerah

Tabel II - 15

Realisasi pajak/retribusi tahun 20 s/d 2024 dan triwulan II tahun 2025

Tahun	Target	Nilai Potensi	Realiasasi	Persentase Capaian
1	2	3	5	
2023	44,770,000,000	44,770,000,000	22,014,769,809	49,17
2024	75,440,000,000	75,440,000,000	25,500.222.039,-	33,83
2025	57.724.200.000	57.724.200.000	20.644.656.642,-	35.8
Peningkatan PAD				**1,9**

Sumber data Keuangan TW.I tahun 2025

Dari tabel II – 14 tersebut diatas terlihat bahwa peningkatan pendapatan Asli Daerah berpluktuasi pada Dinas Kesehatan pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2023 dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 49,17% dan ditahun 2024 sebesar 33,83% dimana pada tahun 2023 penerimaan PAD sebesar Rp . 22,014.769.809 dan tahun 2024 penerimaan keuangan sebesar 25,500.222.039 sehingga terjadi peningkatan penerimaan PAD sebesar Rp. 3.485.452.230- sedang pada tahun 2025 baru sebesar Rp. 20,644,656.642 atau sebesar 35,8% , capaian tersebut ditahun 2025 baru sampai belan September 2025 adapun besaran peningkatan PAD antara 2024 dan 2025 sebesar 1,9%

l. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sintem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai Kabupaten Takalar Dapat dilihat Pada Tabel berikut ini:

Tabel II – 16

Tabel Nialai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Takalar

No	Nilai (Kategori) SAKIP Tahun		
	Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**
1	**BB**	**B**	**BB**

Jika Dilihat kategori tersebut diatas kategori berpluktuasi Evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilakukan berdasarkan lima komponen utama,

yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

m. Literasi Digital ASN

Transformasi digital tidak hanya sekadar proses adopsi teknologi, tetapi juga mencakup perubahan yang lebih luas pada pola pikir, cara kerja, dan interaksi Masyarakat. Transformasi digital telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan di berbagai aspek kehidupan, dari ekonomi, pendidikan, hingga layanan publik. Sebagai bangsa yang tengah beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0, Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk mempersiapkan diri menuju Visi Indonesia Digital 2045, yang berfokus pada pembangunan masyarakat digital yang berdaya dan berbudaya. Sebagai bagian dari cita-cita Visi Indonesia Emas, transformasi digital berperan penting dalam mewujudkan negara yang berdaya saing global dengan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, masyarakat digital menjadi aktor utama yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menciptakan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses ke peluang.

Keberhasilan transformasi digital memerlukan pengukuran yang tepat untuk memahami kondisi masyarakat digital secara menyeluruh. Indeks Masyarakat Digital Indonesia hadir sebagai instrumen strategis untuk memetakan tingkat adopsi teknologi***, literasi digital***, pemberdayaan ekonomi digital serta kesenjangan yang masih ada. Indeks ini tidak hanya menggambarkan pencapaian, tetapi juga memberikan arahan bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengidentifikasi tantangan serta peluang. Dengan memahami posisi Indonesia dalam lanskap digital global, kita dapat merumuskan kebijakan yang terukur dan efektif untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan merata, sejalan dengan visi besar Indonesia di tahun 2045

Di Kabupaten Takalar khususnya Dinas Kesehatan penggunaan digitalisasi 100% sampai ke Tingkat Puskesmas dalam melaksankan pelayanan

2.2.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan kewajiban daerah yang harus dicapai dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, terdapat 12 indikator layanan esensial yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Kesehatan yang terdiri dari :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Analisis terhadap capaian SPM Kabupaten Takalar selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan pada sebagian besar indicatorsebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel II-7
Evaluasi Indikator SPM
Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Triwulan I	
Kesehatan					
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen		9,44	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					

2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen		18,47	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen		19,44	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan balita					
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen		48	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen		25,89	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia produktif,					
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen		19,02	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;					
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen		21,6	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi					
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen		13,06	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus					

9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen		32,69	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen		41,6	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis					
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen		24,1	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus)					
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficienc y Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen		11,85	Dinas Kesehatan

Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Secara umum, capaian indikator layanan SPM menunjukkan tren positif. Beberapa indikator seperti pelayanan kesehatan bayi baru lahir, ibu hamil, usia pendidikan dasar, serta penderita diabetes melitus telah menunjukkan capaian mendekati atau melebihi 90% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program pelayanan dasar yang menyasar kelompok prioritas telah berjalan dengan relatif baik.

Namun demikian, beberapa indikator lainnya masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi dan HIV, serta pelayanan pada kelompok usia produktif masih berada di bawah target nasional (100%). Sebagai contoh, capaian pelayanan hipertensi pada tahun 2024 baru mencapai 54,49%, sementara pelayanan kesehatan bagi usia produktif mencapai 79,81%. Pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV juga mengalami penurunan capaian pada tahun terakhir (75,56%), setelah sebelumnya 94,12% di tahun 2023.

Capaian pelayanan untuk balita, usia lanjut, dan tuberkulosis (TBC) menunjukkan perbaikan yang signifikan, meskipun sempat mengalami fluktuasi selama masa pandemi COVID-19. Kinerja capaian pada indikator gangguan jiwa berat (ODGJ) dan TBC juga menunjukkan tren perbaikan, walaupun membutuhkan penguatan aspek pemantauan, pendampingan keluarga, dan kesinambungan pengobatan.Beberapa faktor yang memengaruhi capaian SPM antara lain:

- Belum meratanya akses masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan dasar.
- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam layanan deteksi dini dan pengobatan penyakit tidak menular.
- Keterbatasan sistem pelaporan dan pencatatan berbasis data real-time di tingkat Puskesmas.

  Dalam rangka meningkatkan pencapaian SPM bidang kesehatan secara merata dan berkelanjutan, diperlukan sejumlah upaya strategis, antara lain:

- Penguatan kapasitas SDM dan sarana prasarana Puskesmas, termasuk pemanfaatan telemedisin dan pelayanan jemput bola.
- Meningkatkan kolaborasi lintas sektor (pendidikan, sosial, desa) untuk menjangkau kelompok sasaran usia sekolah, usia produktif, dan lansia.
- Memperluas skrining dan deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) secara massif di masyarakat.
- Optimalisasi sistem informasi kesehatan untuk mendukung pelaporan capaian SPM secara akurat dan real time.

Dari Tabel II.7. diatas menunjukkan rekapan target dan indikator yang akan dicapai dan realisasi yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan Kab. Takalar selama 4 (empat) tahun. Untuk pelayanan kesehatan ada 12 (dua belas) indikator SPM sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 masing-masing adalah 100%. Pencapaian Kinerja Pelayanan (12 SPM) Dinas Kesehatan Kab. Takalar Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan (17 Puskesmas) yang didanai dari DAK Non Fisik (BOK), dapat dilihat di bawah ini :

1. **Pelayanan kesehatan Ibu Hamil**, capaian kinerjanya adalah sebesar 18,47 % atau sebanyak 557 orang yang terlayani dari total target satu tahun (5.901 orang) yang akan dicapai. Kegiatan ini bersumber dari Dana BOK Puskesmas.

2. **Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin**, target yang akan dicapai pada pelayanan kesehatan ibu Bersalin adalah 5.833 orang dan sudah melayani 1.087 ibu bersalin atau sekitar 18,47 %.

3. **Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**, sebanyak 1.071 bayi baru lahir yang terlayani selama Triwulan I di tahun 2025 dari total target 5.508 bayi dan persentase capaian kinerja sebesar 19,44 %.

4. **Pelayanan kesehatan balita**, jumlah target pada tahun 2025 adalah 25.285 balita yang akan dilayani, dan sekitar 12,138 balita yang terlayani selama semester I di tahun 2025, dan capaian kinerja sebesar 48 %.

5. **Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**, target yang telah tercapai pada indikator ini adalah 12,767 orang (siswa) yang terlayani atau sekitar 25,89 % dari total target 49.330. orang (siswa).

6. **Pelayanan kesehatan pada usia produktif**, target yang akan dicapai pada indikator ini adalah 207.925 orang selama tahun 2025 dan yang terlayani sampai dengan tyriwulan I sebanyak 39,566 orang atau sekitar 19,02 %.

7. **Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**, target yang akan dilayani pada indikator ini adalah 37.105 orang selama tahun 2025 ini, dan sekitar 21,6 % (8,016 orang) yang sudah terlayani selama triwulan I

8. **Pelayanan kesehatan penderita DM (Diabetes Mellitus)**untuk pelayanan kesehatan penderita DM, realisasinya telah mencapai 32,69 % atau 1,824 orang yang sudah terlayani dari total target 5.,679 orang penderita DM.

9. **Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi**, pada indikator ini capaiannya telah mencapai 32,69 % (8.119 orang) dari total target yang akan dilayani 62.155 orang selama tahun 2025.

10. **Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat**, jumlah orang dengan gangguan jiwa yang sudah dilayani sampai pada triwulan I di Tahun 2025 ini adalah sebanyak 308 orang (32,69%) dari total target 739 orang.

11. **Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis**, kegiatan pelayanan kesehatan orang terduga penderita TB dan suspek TB sebanyak 1,681 orang (24,1%) yang telah dilayani dari total target 6.969 orang

12. **Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus),** persentase pelayanan yang telah dilakukan pada indikator ini sebesar 11,85% atau sebanyak 1.358 orang selama Triwulan I di tahun 2025 dari total target 11.456 orang.

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja

2.3.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan

Didalam Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan anatara lain:

1. Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan tdk bisa dilaksanakan
2. Kurangnya Tenaga Kesehata serta penyebarn yang tidak merata
3. Pecairan keuangan yang sering terlambat
4. Saranaan Prasarana yang tidak mencukupi
5. Pencatatan dan Pelaporan yang tdk tepat waktu

2.3.2 Upaya Pencapaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan:

1. Penyediaan angaraan yang memadai
2. Penambahan Tenaga kesehatan baik ASN maupun Non ASN
3. Mempercepat proses pencairan keuangan
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk pelayanan kesehatan

2.3.3. Rekomendasi Pelaksanaan

1. Perlu adanya tenaga pengelola yang kompeten
2. Meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor
3. Perlu peningkatan kapasitas pengelola program baik pencatatan maupun pelaporan berbasis website
4. Perlunya ketersediaan data yang baik dan bernar dan kemudahan mengakses data untuk penyusunan renja berikutnya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Dinas Kesehatan yaitu :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat

Untuk menwujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 (Dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kesehatan Prima yang merata:

2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Pemerintah Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan padatabel berikut ini:

Tabel III.1.
Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target KinerjaDinas KesehatanKabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
T.1: Meningkatnya DerajatKesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	73,51	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,52
Sasaran 1.1: Menimnvkatnya Sarana ,Prasarana dan SDMK	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi		Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	Persentase Kematian Ibu dari jumlah seluruh kelahiran hidup (%)	100
	-Rumah Sakit	100		Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	0
	-Puskesmas	100		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	23,9
	RasioTenaga Medis dan Non Medis:			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	90

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
	Dokter/ Dokter Gigi	0,18		Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	90
	Dokter spesialis / Dokter spesialis Gigi	0,12		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	99
	Bidan	0,73		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	90
	Perawat	1,42		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	55
	Sanitarian	0,18	Meningkatnya PAD pada Dinas Kesehatan	Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Kesehatan (%)	100
	Tenaga Gizi	0,16		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Kesehatan (%)	25,2

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
	Tenaga Kefarmasian	0,19	Meningkatnya tata kelola Kinerja pada Dinas Kesehatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Kesehatan (Nilai)	80
	Laboran	0,10		Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Kesehatan (%)	100
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	0,21			
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berbasis SPM dan Non SPM	Indeks Kebutuhan terhadap standard pelayanan kesehatan (SPM)	100			
	IPKM	72,87			
Sasaran 1.3: Meningktnya Unit Tatanan yang menerpkan PHBS	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	89			
	Persentase Institusi Pendidikan ber PHBS	80			
	Persentase Tempat Kerja	40			

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
	ber PHBS				
	Persentase Tempat Tempat Umum ber PHBS	49			
	Persentase Fasilitas Kesehatan ber PHBS	90			
	Persentase Penyelenggaraan Kebupaten Sehat ber PHBS	Swastisaba wistara			
Tuujuan 2: Meningkatnya Tata Kelola pada dinas kesehtan	Indeks Reformasi Birokrasi				
Sasaran 2.1: Meningkatnya Tata kelola Dinas Kesehatan	Nilai Sakip	B			

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digitaldapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**54,095,357,215.07**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		11,375,510,212.00
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	129,000,000.00
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,439,002,880.00
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	148,096,010.00
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9,435,821,146.00
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	223,590,176.00
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		42,581,634,603.07
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36,719,700.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	608,660,040.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	649,500.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	821,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	158,829,880.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	141,911,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	60,010,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7,255,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7,255,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7,255,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9,999,720.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7,520,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	27,340,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	57,929,760.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25,192,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	399,999,880.00
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	247,799,450.00
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36,900,000.00
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	245,414,990.00
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25,882,486,860.00
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5,000,000.00
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	229,351,850.00
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	13,899,312,443.07

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	179,777,230.00
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	21,040,000.00
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	277,204,300.00
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		138,212,400.00
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	38,212,400.00
2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**1,130,458,760.00**
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		3,500,000.00
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3,500,000.00
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		106,142,000.00
			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	300,000.00
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	105,842,000.00
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,020,816,760.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,020,816,760.00
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**51,042,780.00**
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		51,042,780.00
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	51,042,780.00
				55.276.858.755

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) program, 22 (dua puluh dua) Kegiatan, dan 70 (tujuh puluh) Subkegiatan dengan total pagu Rp**116,192,983,697.07** (Seratus Enam Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**146,632,011,114.00**	**127,864,269,951.00**	**116,192,983,697.07**	**-30,439,027,416.93**							**142,927,195,553.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**146,632,011,114.00**	**127,864,269,951.00**	**116,192,983,697.07**	**-30,439,027,416.93**							**142,927,195,553.00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**146,632,011,114.00**	**127,864,269,951.00**	**116,192,983,697.07**	**-30,439,027,416.93**							**142,927,195,553.00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**100 %**	**100 %**	**60,784,409,690.00**	**60,620,625,615.00**	**60,916,124,942.00**	**-1,567,462,247.00**							**59,216,947,443.00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	149,999,330.00	155,000,840.00	155,000,840.00	5,001,510.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelo	Kinerja Perangkat Daerah		150,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	28,547,330.00	50,000,060.00	50,000,060.00	21,452,730.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14,999,840.00	10,000,060.00	10,000,060.00	-4,999,780.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalab	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPAT	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			15,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
													birang	AN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	14,999,450.00	9,999,760.00	9,999,760.00	-4,999,690.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		15,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,999,040.00	15,000,220.00	15,000,220.00	-998,820.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	15,454,580.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-454,580.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJA	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			20,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
														KROKOK		an Publik				
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,999,810.00	35,000,160.00	35,000,160.00	25,000,350.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	49,999,280.00	20,000,580.00	20,000,580.00	-29,998,700.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	56,791,611,890.00	59,163,844,865.00	59,146,444,865.00	2,354,832,975.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		54,907,774,558.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				700 Orang / bulan	700 Orang / bulan	56,646,236,290.00	58,993,823,135.00	58,993,823,135.00	2,347,586,845.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			54,737,974,558.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalab	DANA ALOKASI UMUM (DAU	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			86,800,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
													birang	)		dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	110,376,800.00	120,022,170.00	102,622,170.00	-7,754,630.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	4,999,960.00	4,999,960.00	4,999,960.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19,999,000.00	19,999,840.00	19,999,840.00	840.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			11,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	4,999,920.00	4,999,920.00	4,999,920.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana				2 Laporan	2 Laporan	14,999,800.00	14,999,920.00	14,999,920.00	120.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			12,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
			n/Semesteran SKPD											OK		an Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	4,999,920.00	4,999,920.00	4,999,920.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	205,421,800.00	79,913,650.00	63,933,650.00	-141,488,150.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		250,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50,003,800.00	49,993,650.00	49,993,650.00	-10,150.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalab	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
													birang			an Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0.00	29,920,000.00	13,940,000.00	13,940,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150,415,000.00	0.00	0.00	-150,415,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,003,000.00	0.00	0.00	-5,003,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				5,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	14,999,550.00	9,999,790.00	9,999,790.00	-4,999,760.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan	Perangkat Daerah		25,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4,999,760.00	4,999,820.00	4,999,820.00	60.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4,999,940.00	0.00	0.00	-4,999,940.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalab	DANA BAGI HASIL (DBH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
													birang	)		dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4,999,850.00	4,999,970.00	4,999,970.00	120.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	232,120,070.00	59,999,640.00	48,219,640.00	-183,900,430.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		80,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	1 Dokumen	232,120,070.00	29,999,750.00	18,219,750.00	-213,900,320.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan an			30,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
														OK		Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	0.00	29,999,890.00	29,999,890.00	29,999,890.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			10,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	488,995,750.00	435,406,350.00	443,896,350.00	-45,099,400.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		505,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72,481,200.00	0.00	0.00	-72,481,200.00	Kab. Takalar, Pattallassang,	DANA BAGI HASIL (DBH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			40,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
													Kalabirang	)		tahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0.00	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	.06.0003																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,998,200.00	15,000,500.00	17,740,500.00	-3,257,700.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,999,950.00	30,000,100.00	30,000,100.00	-19,999,850.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																tahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,040,000.00	20,008,800.00	20,008,800.00	14,968,800.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,520,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00	19,880,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallan	RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			30,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
													tikang	HASIL PAJAK ROKOK		an Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,002,200.00	0.00	0.00	-5,002,200.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	49,998,200.00	69,997,000.00	69,997,000.00	19,998,800.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	249,956,000.00	249,999,950.00	249,999,950.00	43,950.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			250,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	400,000,000.00	66,870,000.00	273,867,000.00	-126,133,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		825,060,085.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			100,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	206,997,000.00	206,997,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			100,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	150,000,000.00	66,870,000.00	66,870,000.00	-83,130,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			70,060,085.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	150,000,000.00	0.00	0.00	-150,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	834,385,800.00	465,157,104.00	465,157,104.00	-369,228,696.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.	Perangkat Daerah		809,112,800.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4,999,800.00	0.00	0.00	-4,999,800.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	654,726,000.00	78,354,744.00	78,354,744.00	-576,371,256.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			654,112,800.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	149,660,000.00	66,810,000.00	66,810,000.00	-82,850,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			150,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	25,000,000.00	319,992,360.00	319,992,360.00	294,992,360.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1,166,875,500.00	184,433,376.00	309,605,703.00	-857,269,797.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1,165,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	10 Unit	51,880,000.00	59,934,000.00	59,934,000.00	8,054,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	19,997,700.00	0.00	0.00	-19,997,700.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	29,998,200.00	0.00	0.00	-29,998,200.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	14,999,600.00	0.00	0.00	-14,999,600.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			15,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
																Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	500,000,000.00	49,858,776.00	175,031,103.00	-324,968,897.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
														PAJAK ROKOK						
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	500,000,000.00	74,640,600.00	74,640,600.00	-425,359,400.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD Fasyankes				100 %	100 %	500,000,000.00	0.00	0.00	-500,000,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan	Fasyankes		500,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	500,000,000.00	0.00	0.00	-500,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**				**100 %**	**100 %**	**82,925,838,244.00**	**65,959,374,796.00**	**54,095,357,215.07**	**-1,220,590,134.00**							**81,705,248,110.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
			MASYARAKAT																	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan penyediaan fasilitas upaya pemenuhan upaya kesehatan perorang dan upaya kesehatan masyarakat				3825 KK	3825 KK	21,277,827,938.00	9,240,755,290.00	11,375,510,212.00	-9,902,317,726.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	asyarakat		19,985,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	4,999,999,838.00	0.00	0.00	-4,999,999,838.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			0.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																tahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	3,325,280,980.00	0.00	0.00	-3,325,280,980.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	499,999,820.00	0.00	0.00	-499,999,820.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALO	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan an			0.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
														KASI KHUSUS FISIK		Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	35,071,254.00	129,000,000.00	129,000,000.00	93,928,746.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				3 Unit	3 Unit	499,999,929.00	0.00	0.00	-499,999,929.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				0 Unit	0 Unit	1,249,999,872.00	0.00	0.00	-1,249,999,872.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			1,250,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	5 Unit	999,998,184.00	0.00	0.00	-999,998,184.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	499,999,476.00	0.00	0.00	-499,999,476.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
																an Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	251,928,000.00	0.00	1,439,002,880.00	1,187,074,880.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK - BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	.01.0015																			
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	99,998,900.00	0.00	0.00	-99,998,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				17 Unit	17 Unit	450,000,150.00	148,096,010.00	148,096,010.00	-301,904,140.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB- BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			450,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
														OK		tahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				2 Unit	2 Unit	500,000,000.00	0.00	0.00	-500,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				5 Paket	10 Paket	7,765,551,535.00	8,840,551,280.00	9,435,821,146.00	1,670,269,611.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				101215 Keluarga	101215 Keluarga	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				17 Paket	17 Paket	100,000,000.00	123,108,000.00	223,590,176.00	123,590,176.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			100,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan upaya pemenuhan upaya kesehatan perorang dan upaya kesehatan masyarakat				100 %	100 %	60,515,326,716.00	56,659,307,106.00	42,581,634,603.07	-17,933,692,112.93			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	asyarakat		61,470,248,110.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6428 Orang	6428 Orang	799,999,980.00	109,999,700.00	36,719,700.00	-763,280,280.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJA	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.			800,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
														KROKOK		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6133 Orang	6133 Orang	799,999,970.00	608,660,040.00	608,660,040.00	-191,339,930.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			800,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5844 Orang	5844 Orang	699,999,870.00	9,999,500.00	649,500.00	-699,350,370.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			700,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	349,999,740.00	10,001,000.00	821,000.00	-349,178,740.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			350,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
																an Publik			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	299,999,840.00	159,999,880.00	158,829,880.00	-141,169,960.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6133 Orang	6133 Orang	311,553,100.00	10,000,000.00	141,911,000.00	-169,642,100.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				655 Orang	655 Orang	699,999,930.00	60,010,000.00	60,010,000.00	-639,989,930.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalab	DAK NON FISIK - BOK KB-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			700,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
													birang	BOK		Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	173,960,400.00	10,000,000.00	7,255,000.00	-166,705,400.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				125 Orang	125 Orang	171,496,900.00	10,000,000.00	7,255,000.00	-164,241,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	130,449,860.00	10,000,000.00	7,255,000.00	-123,194,860.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			100,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				255 Orang	255 Orang	500,000,000.00	9,999,720.00	9,999,720.00	-490,000,280.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	499,999,900.00	10,000,000.00	7,520,000.00	-492,479,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
														OK		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000.00	0.00	27,340,000.00	-72,660,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATA	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
														N						
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	49,999,930.00	0.00	0.00	-49,999,930.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	999,999,750.00	99,999,760.00	57,929,760.00	-942,069,990.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	149,999,860.00	25,192,000.00	25,192,000.00	-124,807,860.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	99,999,730.00	399,999,880.00	399,999,880.00	300,000,150.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	499,999,680.00	247,799,450.00	247,799,450.00	-252,200,230.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			247,800,110.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	149,499,900.00	0.00	0.00	-149,499,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			150,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	36,900,000.00	36,900,000.00	-63,100,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26,100,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				35 Orang	35 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			0.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				250 Orang	250 Orang	85,499,790.00	0.00	0.00	-85,499,790.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	49,999,970.00	0.00	0.00	-49,999,970.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	980,699,460.00	245,414,990.00	245,414,990.00	-735,284,470.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			1,200,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	31,272,931,200.00	28,937,716,814.00	25,882,486,860.00	-5,390,444,340.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH BANTUAN KEUANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31,272,948,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
														YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK						
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				350 Orang	350 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																tahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	50,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-45,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	499,999,940.00	324,999,850.00	229,351,850.00	-270,648,090.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan an			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
														PAJAK ROKOK		Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				17 Unit	17 Unit	12,410,000.00	0.00	0.00	-12,410,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan				3 Doku	3 Doku	18,599,343,676.00	24,713,960,992.00	13,899,312,443.07	-4,700,031,232.93	Kab. Takalar,	LAIN-LAIN	-	6. Perbaikan			18,000,000,000.00	DINAS KESEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Rumah Sakit				men	men					Pattallassang, Kalabirang	PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROK		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
														OK						
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	362,191,200.00	190,317,230.00	179,777,230.00	-182,413,970.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaik			1,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
														PAJAK ROKOK		an Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				15 Unit	15 Unit	270,000,000.00	0.00	0.00	-270,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	199,925,300.00	0.00	0.00	-199,925,300.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	0.00	21,040,000.00	6,040,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTU	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			15,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
														KAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN		an Publik			
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				5 Unit	5 Unit	500,000,000.00	413,336,300.00	277,204,300.00	-222,795,700.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			218,400,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	20,430,000.00	0.00	0.00	-20,430,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			20,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	9,937,840.00	0.00	0.00	-9,937,840.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	79,419,990.00	0.00	0.00	-79,419,990.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	79,419,990.00	0.00	0.00	-79,419,990.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1,053,263,600.00	59,312,400.00	138,212,400.00	-915,051,200.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Fasyankes		200,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				5 Unit	5 Unit	919,182,200.00	59,312,400.00	38,212,400.00	-880,969,800.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
														OK		an Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	134,081,400.00	0.00	0.00	-134,081,400.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS**				**100 %**	**100 %**	**1,846,763,700.00**	**1,233,226,760.00**	**1,130,458,760.00**	**-1,441,763,700.00**							**405,000,000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
		KESEHATAN	**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**																	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota				100 %	100 %	100,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-96,500,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tenaga Kesehatan		80,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelo			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-46,500,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 %	100 %	75,000,000.00	122,342,000.00	106,142,000.00	31,142,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sumber Daya Manusia Kesehatan		75,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000.00	16,500,000.00	300,000.00	-19,700,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				25 Orang	25 Orang	20,000,000.00	0.00	0.00	-20,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000.00	105,842,000.00	105,842,000.00	70,842,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan			35,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
																an Publik				
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Persentase pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya manusia kesehatan				100 %	100 %	1,671,763,700.00	1,107,384,760.00	1,020,816,760.00	-650,946,940.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sumber Daya Manusia Kesehatan		250,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				55 Orang	55 Orang	1,671,763,700.00	1,107,384,760.00	1,020,816,760.00	-650,946,940.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaik			250,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**				**100 %**	**100 %**	**424,999,900.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,100.00**							**450,000,000.00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pelaksanaan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optkal, usaha mikro obat tradisional				100 %	100 %	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase pelaksanaan pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan, RT Kelas I tertentu perusahaan RT				100 %	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			25,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase pelaksanaan pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan, RT Kelas I tertentu perusahaan RT				100 %	100 %	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayan	Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT		50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																an Publik				
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase pelaksanaan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(DAM)				100 %	100 %	249,999,960.00	0.00	0.00	-249,999,960.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		250,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	249,999,960.00	0.00	0.00	-249,999,960.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan				100 %	100 %	49,999,940.00	0.00	0.00	-49,999,940.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.	Makanan Jajanan		50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	49,999,940.00	0.00	0.00	-49,999,940.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri	Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri RT				100 %	100 %	25,000,000.00	0.00	0.00	-25,000,000.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	Industri Rumah Tangga		25,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
		Rumah Tangga														Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Unit	1 Unit	25,000,000.00	0.00	0.00	-25,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25,000,000.00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN**				**100 %**	**100 %**	**649,999,580.00**	**51,042,780.00**	**51,042,780.00**	**500,000,420.00**							**1,150,000,000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
		BIDANG KESEHATAN	**MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**																	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah				100 %	100 %	49,999,900.00	0.00	0.00	-49,999,900.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan lintas sektor		50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	49,999,900.00	0.00	0.00	-49,999,900.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelo			50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten				100 %	100 %	499,999,890.00	0.00	0.00	-499,999,890.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	asyarakat		1,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	499,999,890.00	0.00	0.00	-499,999,890.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
																6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				2155 Keluarga	2155 Keluarga	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat				100 %	100 %	99,999,790.00	51,042,780.00	51,042,780.00	-48,957,010.00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan	asyarakat		100,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
		Kabupaten/Kota	Kabupaten													dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	99,999,790.00	51,042,780.00	51,042,780.00	-48,957,010.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabirang	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**146,632,011,114.00**	**127,864,269,951.00**	**116,192,983,697.07**	**-30,439,027,416.93**							**142,927,195,553.00**	

BAB V
PENUTUP

5.1 CatatanPenting

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 terdapat perubahan sub kegiatansebanyak 4 sub kegiatan yang telah disesuaikan dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2025selanjutnya menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

5.2 KaidahPelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawabuntuk :
   a. Melaksanakan Renja Perubhan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannyaakandilakukanpemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana TindakLanjut

Untuk mencapai target sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar yang telah ditetapkan pada tahun maka perlu didukung dengan program dan kegiatanSupaya Program dan Kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait dalam rangka sinergitas.

Takalar, 2025
KepalaDinasKesehatan
Kab. Takalar

dr. Hj. Nilal Fauziah, M.Kes
Pangkat :Pembina UtamaMuda
NIP. 197608212003122009

TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERUBAHAN RENJA DISDUKCAPIL 2025 KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2025 – 2029 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Takalar, 2025

Kepala Dinas,

H. ABDUL WAHAB, S.Sos., MSi
NIP.196712311988031076

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 11

TABEL II.2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025..... 19

TABEL II.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan1 20

TABEL II.4 Rekapitulasi Capaian Anggaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 24

TABEL II.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 28

TABEL II.6 Capaian Indikator Kinerja Utama 2024, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2026..... 31

TABEL III.1 Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025..... 42

TABEL IV.1 Daftar Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 44

TABEL IV.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 47

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR TABEL 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan ....., 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai dengan Triwulan I..... 10

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 yang terakomodir di APBD 2025..... 19

2.1.2 Evaluasi program kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025.....

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 30

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 37

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025..... 43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 43

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 45

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor ……. Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara 2018 Nomor 184);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara 2019 Nomor 1789;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan RencanaKerjaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Bupati Takalar Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kalender Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang karena adanya beberapa perubahan dari rencana kerja sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah akibat terjadinya efesiensi anggaran.
- Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

b. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tidak lain adalah:

- Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil sampai triwulan 1 dan dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
- Mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedalam suatu strategi program/kegiatan.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Perubahan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai Triwulan I Tahun 2025, pada Bab ini berisi Sub Bab tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Triwulan I Tahun 2025 dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

BAB IV. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB V. Penutup, Bab ini berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai Dengan Triwulan I

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I.

Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sampai pada Triwulan I belum dapat menunjukkan capaian kinerja secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata mencapai 19,37% untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai 23,65% untuk kinerja *output* dan *outcome* kegiatan.

Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Takalar sampai pada Triwulan I Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Disdukcapil 2023-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja TW 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**14.760.370.900**	**81%**	**3.074.766.134**	**100%**	**3.698.671.531**	**21%**	**592.074.387**	**21%**	**592.074.387**	**20,80%**	**16,01%**
2	**12**	**01**	**2.01**		**PERENCANAAN,PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase capaian laporan dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**62.000.000**	**100%**	**43.326.500**	**100%**	**60.197.000**	**27,27%**	**10.890.600**	**27%**	**10.890.600**	**27%**	**18%**
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	12,285,000	3 Dokumen	19.197.000	1 Dokumen	1.968.000	1 Dokumen	1.968.000	33%	10%
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	12,941,500	1 Dokumen	10.000.000	0	1.931.600	0	1.931.600	0%	19%
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.100.000	1 Dokumen	12.000.000	0	0	0	0	0%	0%

2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	0	-	-	1 Dokumen	3.500.000	0	0	0	100%	0%	0%
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	0	-	-	1 Dokumen	2.500.000	0	0	1 Dokumen	0	0%	0%
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja	4 Laporan	10.000.000	1 Laporan	5.000.000	4 Laporan	13.000.000	2 Laporan	6.991.000	2 Laporan	8.846.000	50%	54%
2	**12**	**01**	**2.02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**14.183.970.900**	**68,37%**	**2.471.491.092**	**100%**	**2.932.733.531**	**13,58%**	**476.490.587**	**13,58%**	**476.490.587**	**13,58%**	**16,25%**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.592 Orang	14.173.970.900	574 Orang	2.464.137.092	648 Orang	2.917.733.531	92 Orang	474.650.587	92 Orang	474.650.587	22%	24%
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	10.000.000	1 Laporan	7.354.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	1.840.000	1 Laporan	1.840.000	100%	12%
2	**12**	**01**	**2,03**		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase capaian kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**7.400.000**	**100%**	**15.000.000**	**22%**	**0**	**22%**	**0**	**22%**	**0%**
2	12	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	2.000.000	1 Dokumen	2.400.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	100%	0%

2	12	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32 Laporan	8.000.000	8 Laporan	5.000.000	8 Laporan	10.000.000	1 Laporan	0	4 Laporan	0	13%	0%
2	**12**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**16.000.000**	**-**	**-**	**100%**	**7.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0%**
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	16.000.000	-	-	2	7.500.000	-	-	-	-	0%	0%
2	**12**	**01**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase pemenuhan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**118.000.000**	**100%**	**180.789.615**	**100%**	**390.538.000**	**7,5%**	**37.552.600**	**7,50%**	**37.552.600**	**8%**	**9,62%**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	40 Paket	4.000.000	10 Paket	1.988.300	10 Paket	4.000.000	0	1.979.500	10 Paket	1.979.500	0%	49%
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	40 Paket	26.000.000	7 Paket	32.300.200	7 Paket	67.692.700	0	-	0	-	0%	0%
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis logistik yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	36.000.000	20 Paket	99.862.600	20 Paket	238.382.300	2 Paket	1.990.800	20 Paket	1.990.800	10%	1%

2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaandan Peraturan Perundang- Undangan	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2.400.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0%	42%
2	12	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	48.000.000	2 Laporan	44,138,515	2 Laporan	78.063.000	1 Laporan	32.582.300	1 Laporan	32.582.300	50%	42%
2	**12**	**01**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**266.650.000**	**100%**	**334.272.747**	**100%**	**266.650.000**	**25%**	**41.800.000**	**25%**	**41.800.000**	**25%**	**17,44%**
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik yang Disediakan	96 Laporan	27	24 Laporan	94.222.747	0	0	0	0	0	0	**0%**	**0%**
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	8.000.000	1 Laporan	3,650,000	1 Laporan	3.250.000	0	0	0	0	0%	0%
2	12	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	302.400.000	3 Laporan	236,400,000	3 Laporan	236.400.000	1 Laporan	41.800.000	1 Laporan	41.800.000	33%	18%
2	**12**	**01**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**60.000.000**	**100%**	**37,486,180**	**100%**	**53.053.000**	**50%**	**25.340.600**	**50%**	**25.340.600**	**50%**	**48%**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkanPajaknya	16 Unit	60.000.000	4 Unit	37,486,180	4 Unit	44.550.000	1 Unit	17.353.000	3 Unit	17.353.000	33%	39%

2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	8.503.000	-	-	1 Unit	8.503.000	1 Unit	7.987.600	1 Unit	8.503.000	100%	94%
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Perekaman KTP el, Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP elektronik, Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK, Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari**	**100%**	**677.569.800**	**100%**	**698,067,070**	**100%**	**677.569.800**	**4,17%**	**7.200.000**	**70,83%**	**7.200.000**	**4,17%**	**0,95%**
2	**12**	**02**	**2.01**		**PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk yang sesuai standar**	**100%**	**34.000.000**	**100%**	**652,380,300**	**100%**	**735.028.000**	**8,33%**	**4.720.000**	**8%**	**4.720.000**	**8%**	**1%**
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	36 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	632,385,300	9 Dokumen	660.028.000	1 Dokumen	1.498.800	1	1.498.800	11%	0%
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12.000.000	3 Laporan	19,995,000	3 Laporan	75.000.000	0	3.221.200	-	3.221.200	4,17%	0,95%
2	**12**	**02**	**2.03**		**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi kependudukan**	**100%**	**12.000.000**	**100%**	**24,886,770**	**100%**	**24.921.000**	**0**	**2.480.000**	**100**	**2.480.000**	**0%**	**10%**
2	12	02	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	12.000.000	1 Laporan	24,886,770	1 Laporan	24.921.000	0	2.480.000	1 Laporan	2.480.000	0%	10%

2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 -18 tahun, Persentase kepemilikan akta kematian pada semua individu yang kematiannya dilaporkan, Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan, Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan**	**100%**	**42.000.000**	**100%**	**295,496,718**	**100%**	**25.000.000**	**41,67%**	**8.480.800**	**66,67%**	**13.597.200**	**41,67%**	**33,92%**
2	**12**	**03**	**2.01**		**PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**	**Persentase pemenuhan pelayanan pencatatan sipil yang sesuai dengan standar pelayanan**	**100%**	**30.000.000**	**100%**	**285,611,000**	**100%**	**15.000.000**	**33%**	**3.740.800**	**83%**	**8.857.200**	**33%**	**25%**
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	52 Dokumen	14.000.000	13 Dokumen	5,000,000	13 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	3.740.800	3 Dokumen	4.987.200	67%	75%
2	12	03	2.01	02	Peningkatan Pelayanan dalam Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan pencatatan Sipil yang ditingkatkan	12 Layanan	16.000.000	3 Layanan	280,611,000	3 Layanan	10.000.000	0	0	2 Layanan	3.870.000	0%	0%
2	**12**	**03**	**2.02**		**PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL**	**Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi**	**100%**	12.000.000	**100%**	**9,885,718**	**100%**	10.000.000	**50%**	**4.740.000**	**50%**	**4.740.000**	**50%**	**47%**

2	12	03	2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	4 Laporan	12.000.000	1 Laporan	9,885,718	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	4.740.000	1 Laporan	4.740.000	50%	47%
2	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase pemanfaatan data kependudukan, Persentase Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun**	**100%**	**32.000.000**	**92,86%**	**33,980,600**	**100%**	**27.971.000**	**7%**	**15.605.300**	**7,14%**	**15.605.300**	**7,14%**	**46,71%**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan**	**Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang tersedia**	**100%**	**20.000.000**	**86%**	**24,030,600**	**100%**	**33.411.000**	**14%**	**15.605.300**	**14%**	**15.605.300**	**14%**	**67%**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah laporan bulanan yang disediakan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	8 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	9,840,600	2 Dokumen	23.411.000	1 Dokumen	13.411.000	1 Dokumen	13.411.000	50%	100%
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	16 Dokumen	8.000.000	4 Dokumen	14,190,000	3 Dokumen	13.411.000	0	2.194.300	**7,14%**	**15.605.300**	0%	22%
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan**	**Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang berkualitas**	**100%**	12.000.000	**100%**	**9,950,000**	**100%**	10.000.000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0%	0%

2	12	04	2.03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 Laporan	12.000.000	2 Laporan	9,950,000	2 Laporan	10.000.000	0	0	0	0	0%	0%
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama**	**100%**	**8.000.000**	**100%**	**11,660,000**	**100%**	**11.640.000**	**33%**	**0**	**100%**	**0**	**33%**	**0%**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase capaian Penyusunan Buku Profil kependudukan**	**100%**	**8.000.000**	**100%**	**11,660,000**	**100%**	**11.640.000**	**33%**	**0**	**100%**	**0**	33%	0%
2	12	05	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	11,660,000	3 Dokumen	11.640.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	33%	0%

Sumber : Laporan Monev Renja Triwulan I tahun 2025

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	30	5	14	30

Sumber: Renja Pokok 2025 dan SIPD 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 5, jumlah kegiatan 14, dan jumlah sub kegiatan 30, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 5, jumlah indikator kegiatan sebanyak 14, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 30.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel II.3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar Tahun 2025
Sampai Triwulan I

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	*(Rp)*	*Fisik*	*Keu*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	3.698.671.531	592.074.387	20,80	16,01
2	Pendaftaran Penduduk	759.949.000	7.200.00	4,17	0,95
3	Pencatatan Sipil	25.000.000	8.480.800	41,67	33,92
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	33.411.000	15.605.300	7,14	46,71
5	Pengelolaan Profil Kependudukan	11.640.000	0	33%	0%
	Total	**4.528.671.531**	**623.360.487**	**21,42%**	**13,76%**

Sumber : Monev Renja Disdukcapil Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 623.360.487, anggaran tersebut digunakan dalam 5 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 13,76 % dengan capaian realisasi fisik sebesar 21,42 %. Kondisi ini menunjukkan rata-rata capaian realisasi fisik yang belum maksimal karena pelaksanaan kegiatan baru berjalan 3 bulan. Dari 5 program yang ada, terdapat 2 program yang telah mecapai realisasi kinerja di atas 25% dapat dikategorikan memiliki kinerja baik yaitu program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga triwulan I dalam kategori sedang yaitu >10 - <20persen sebanyak 2 (Dua) Program atau 40 persen dari jumlah keseluruhan Program, selebihnya sebanyak 3(Tiga) Program atau 60 persen dari jumlah keseluruhan Program dengan realisasi anggaran yang tergolong masih rendah dengan serapan anggaran kurang dari <10 persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sampai pada Triwulan I

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas

tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 25 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 25 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program, anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 5 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah atau 0% (realisasinya 0-10 persen) sebanyak 2 program yaitu Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program atau 20 persen (realisasi >10-20 persen) yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota, dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 2 program atau 40 persen (realisasi diatas 20 persen), yaitu Program Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 14 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 7 kegiatan atau 50 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 4 kegiatan atau 29 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 3 kegiatan atau 21 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 31 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 17 sub kegiatan atau 57 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 4 sub kegiatan atau 13 persen, dan 9 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau 30 persen sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 25 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

TABEL II.4
REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan		
		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	5	2	1	2	14	7	3	4	30	15	4	11

Sumber : Monev Renja Disdukcapil Triwulan I Tahun 2025

Keterangan:

0-10 Rendah
>10-20 Sedang
>20 Tinggi

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** untuk realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan bahwa dari 5 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua tidak terdapat capaian kinerja atau 0% program yang masuk pada kategori rendah atau dibawah 10 persen, begitupun pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 10-20 persen) tidak ada program atau 0% program yang msuk kategori sedang, semua program

atau 100% yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 20 persen pada triwulan I Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 15 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 0 kegiatan (0 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 3 kegiatan (20 persen), selebihnya terdapat 12 kegiatan (80 persen) yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 31 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 5 sub kegiatan (16,13 persen), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 3 kegiatan (9,68 persen), selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 23 sub kegiatan (74,19 persen), yaitu pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.5
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome		
		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	5	2	0	3	14	5	2	7	30	15	2	13

Sumber : *Monev Renja Disdukcapil Triwulan I Tahun 2025*

Keterangan:

0-10 Rendah
>10-20 Sedang
>20 Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metedologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, yakni 1) Sederhana, 2) Partisipatif, 3). Akuntabel, 4) Berkelanjutan, 5) Transparansi dan 6) Keadilan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seperti pelayanan pendaftaran penduduk, diantaranya untuk pengurusan KTP- EL, KK, KIA, Pindah Datang Penduduk, serta pelayanan pencatatan sipil yang diantaranya berupa pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan pengakuan anak, dan lainnya.

Agar sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dapat tercapai , maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Ada beberapa indikator kinerja yang dapat diukur untuk melihat capaian pelayanan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Kepala Dinas. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Organisasi. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RENSTRA yang digariskan pada Tahun 2025. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Penetapan Target indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini;

TABEL II.6
Capaian Indikator Kinerja Utama 2024, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2026

No	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Indeks kepuasan Masyarakat atas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	83,75	93,80	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	93,90	93,95	94,00		93,95	94,00	
2	Persentase Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rata-rata capaian KTP EL+ KK + KIA+AKTA LAHIR +AKTA KEMATIAN+ AKTA NIKAH+Akta Cerai)	90%	85%	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	70%	73%	73%		73%	73%	

3	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama	65%	43%	Persentase peningkatan pelayanan berdasarkan standar pelayanan	100%	100%	100%		100%	100%	
4	Persentase Penyajian Data Base Kependudukan yang akurat	100%	100%	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	43%	50%	50%		50%	50%	
5	Nilai SAKIP Disdukcapil	72 (BB)	71,61(BB)	Persentase Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun	100%	100%	100%		100%	100%	
6	Indeks Reformasi Birokrasi	73	N/A	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,00	72,15	72,35		72,15	72,35	
7				Tingkat literasi digital ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75%	77%	80%		77%	80%	

Sumber: Renstra 2023-2026, Monev Renja Disdukcapil Tahun 2024

Pada tabel di atas menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024. Untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat capaian kinerja telah melampaui target yakni telah mencapai nilai 93,80 dari nilai 83,75 yang telah ditargetkan untuk tahun 2024. Hal ini karena beberapa catatan yang diberikan oleh tim Survei Kepuasan Masyarakat telah ditindak lanjuti.

Untuk indikator Persentase Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rata-rata capaian KTP EL+ KK + KIA+AKTA LAHIR +AKTA KEMATIAN+ AKTA NIKAH+AKTA CERAI), Pada tahun 2024 diperoleh capaian 85% yaitu rata-rata untuk persentase dari kepemilikan KTP-el 98,82% yakni terdapat 231.518 jiwa yang telah memiliki KTP-el dari 234.283 jiwa penduduk wajib KTP, persentase dari kepemilikan Kartu Keluarga 97% yakni terdapat 101.332 kepala keluarga yang telah memiliki KK dari 104.467 kepala keluarga, persentase dari kepemilikan KIA 34,83% yakni terdapat 26.076 penduduk usia wajib KIA yang telah memiliki KIA dari 96.317 penduduk usia wajib KIA, persentase dari kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun 97% yakni 95.430 penduduk usia 0-18 tahun yang telah memiliki Akta Lahir dari 98,310 anak usia 0-18 tahun. Persentase Akta Kematian 100% karena semua pelaporan kematian akan diterbitkan akta kematiannya, jumlah pelaporan kematian yang diterbitkan Akta Kematiannya pada tahun 2024 sebanyak 1622. Pada 2024 tidak ada penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian karena tidak ada pasangan non muslim yang melaporkan dan mencatatkan pernikahannya maupun perceraiannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini disebabkan karena 99% penduduk Kabupaten Takalar beragama Islam.

Untuk indikator Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pada Tahun 2024 capaian kinerja 43% dari target kinerja 60% yaitu pada tahun 2024 yang melakukan perjanjian kerjasama adalah 7 OPD dan 1 Instansi Vertikal , namun pada semester 1 tahun 2024 hanya perpanjangan izin akses bagi 3 OPD yang telah mendapatkan izin akses tahun sebelumnya. Pada

tahun 2024 OPD yang telah menandatangani MOU Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan belum mendapatkan *user id* dari Kemendagri hal ini terjadi karena dalam penerapan standar keamanan informasi pemanfaatan data kependudukan maka calon lembaga pengguna diwajibkan memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001.

Untuk indikator Persentase Penyajian Data Base Kependudukan yang akurat diperoleh capaian 100%, karena karena semua buku agregat kependudukan diterbitkan persemester.

Untuk indikator Nilai SAKIP Disdukcapil pada tahun 2024 diperoleh nilai BB (71,05), capaian kinerja sudah sangat baik karena setiap rekomendasi untuk perbaikan kekurangan dari dokumen yang direviu telah ditindaklanjuti meskipun masih diperlukan perbaikan dokumen dengan lebih memperhatikan kualitas dokumen yang disusun.

2.2 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada triwulan 1 dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses pengajuan kontrak ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya;
3. Jaringan VPN dan perangkat M2M dinonaktifkan oleh Kementrian Dalam Negeri karena adanya efesiensi anggaran sehingga menghambat pelayanan keliling adminduk;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan seperti alat cetak KTP-El, komputer, printer, scanner masih kurang memadai sehingga menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat;

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan ke 1, program/kegiatan yang dilaksanakan tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja :

1. Adanya komitmen pimpinan dan Koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
3. Data Kependudukan Bersih (DKB) dari Kementrian Dalam Negeri dirilis tepat waktu ;
4. SDM pada Dinas Dukcapil memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.

2.3.3 Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sampai dengan Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan uraian di atas terkait faktor penghambat pencapaian kinerja, serta upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pengendalian dan evaluasi internal yang dilakukan secara terus menerus;
2. Perlunya Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan;

3. Peran aktif Kepala Dinas selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Menyediakan informasi kependudukan dalam rangka perencanaan pembangunan dan kepentingan publik;
9. Perlunya melakukan penyusunan Renstra Disdukcapil yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
11. Adanya Kesesuaian Renstra dan RPJMD dalam pelaksanaan kegiatan;
12. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Tema Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda Pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan Pembangunan, hasil evaluasi kinerja Pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi public, ditetapkan tema pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKT Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrim, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut;

3.1.2.1 Prioritas Pembangunan

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut;

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Berikut Prioritas Nasional yang terkait dengan urusan adminstrasi kependudukan:

Prioritas 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

Prioritas 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

Prioritas 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Salah satu elemen utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah pemerintahan yang efektif dan transparan dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam peningkatan kapasitas riset dan inovasi untuk pencapaian daya saing Indonesia pada tataran global, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar harus mampu menciptakan suatu inovasi pelayanan publik untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Kebijakan Nasional dan Program Prioritas dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai wujud implementasi dari Prioritas Nasional yang merupakan misi dari presiden maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Serta mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, sehingga melalui Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sebagai Instansi pelaksana urusan Pemerintahan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat daerah, berupa pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, serta penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota diharapkan dapat tercapai pelayanan maksimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu "Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien", Untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 3 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Tata kelola kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar

Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra Disdukcapil 2023-2026)			Perubahan Renja Tahun 2025 (Renstra Disdukcapil 2025-2029)		
Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Target 2025**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**
Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan Masyarakat atas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	94	**Tujuan:** Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	93,90
				2. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	73%
Sasaran 1.1 : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rata-rata capaian KTP EL+ KK + KIA+AKTA LAHIR +AKTA KEMATIAN+ AKTA NIKAH+Akta Cerai)	92	**Sasaran 1 :** Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan pelayanan berdasarkan standar pelayanan	100%

Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan Informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama	70%	**Sasaran 2 :** Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	43%
	2. Persentase Penyajian Database Kependudukan yang akurat	100%		2. Persentase Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun	100%
Tujuan 2: Meningkatkan Tata Kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75	**Sasaran 3 :** Meningkatnya Tata kelola kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,00
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Tata kelola Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Disdukcapil	73 (BB)		2. Tingkat literasi digital ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75%

Sumber: Renstra Disdukcapil 2023-2026, Renstra Disdukcapil 2025-2029

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas yang mendukung Pembangunan daerah dalam administrasi kependudukan adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dalam hal administrasi kependudukan. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan serta peningkatan kualitas data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan dalam mengatasi kemiskinan ekstrim.

Dengan adanya program-program prioritas ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan meningkatkan efesiensi pengelolaan data dan memanfaatkan data kependudukan secara efektif untuk mendukung Pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -6 " Takalar Unggul Pelayanan Publik "**dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. IV.1
Daftar Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Takalar Unggul Pelayanan Publik				
1	PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendafatran Penduduk	72,103,900
2	PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	9,464,000
3	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	18,810,000

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah adanya perubahan dalam rencana kerja, yang diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang baru untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar.

Di dalam Perubahan Renja Tahun 2025 ini terdapat rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, dimana di dalammya terdapat 5 Program, 14 Kegiatan serta 30 Sub Kegiatan, dimana untuk penyebaran kegiatannya adalah untuk kegiatan rutin berlokasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, sedangkan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada kecamatan ataupun desa/kelurahan, dan kegiatan yang sifatnya koordinasi selain berlokasi pada daerah setempat yakni pada pemerintah daerah Kabupaten Takalar serta ada juga yang berlokasi di luar daerah.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan total pagu **Rp. 4,563,936,467** (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3.941.792.868,00	4.374.854.888,00	4.563.936.467,00	622.143.599,00							5.134.901.100,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.941.792.868,00	4.374.854.888,00	4.563.936.467,00	622.143.599,00							5.134.901.100,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3.941.792.868,00	4.374.854.888,00	4.563.936.467,00	622.143.599,00							5.134.901.100,00	
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				93 %	93 %	3.341.792.868,00	3.544.854.888,00	3.785.700.767,00	925.508.232,00							4.267.301.100,00	

	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu*				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	36.000.000,00	56.000.000,00	52.052.000,00	16.052.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Disdukcapil		33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	15.000.000,00	17.667.000,00	7.667.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.983.600,00	-16.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	12.000.000,00	5.401.400,00	3.401.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.201.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-		1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.201.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.201.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	2.813.933.900,00	2.943.454.888,00	2.928.214.667,00	114.280.767,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Disdukcapil		3.752.744.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12 01 2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan	2.803.933.900,00	2.928.454.888,00	2.917.734.667,00	113.800.767,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.735.744.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12 01 2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	10.480.000,00	480.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	13.000.000,00	15.000.000,00	13.107.100,00	107.100,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Disdukcapil		13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01. 2.03 .0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01. 2.03 .0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	8 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.107.100,00	-1.892.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah				95 % 95 Persen	95 % 95 Persen	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Disdukcapil		41.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01,2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12. 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan umum kantor				95 Persen	95 Persen	88.660.000,00	230.197.000,00	430.109.000,00	341.449.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Disdukcapil		149.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12. 01 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12. 01 2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	23.203.000,00	57.692.700,00	137.590.700,00	114.387.700,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12. 01 2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	28.880.000,00	88.041.300,00	238.382.300,00	209.502.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12. 01 2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12. 01 2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.177.000,00	78.063.000,00	47.736.000,00	17.559.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12. 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah				85 Persen	85 Persen	331.109.068,00	239.650.000,00	289.740.000,00	-41.369.068,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		209.966.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12. 01 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91.459.068,00	0,00	27.000.000,00	-64.459.068,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			129.366.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12. 01 2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.250.000,00	3.250.000,00	11.940.000,00	8.690.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12. 01 2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	236.400.000,00	236.400.000,00	250.800.000,00	14.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12. 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD				95 %	95 %	51.589.900,00	53.053.000,00	72.478.000,00	20.888.100,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Disdukcapil		66.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12. 01 2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	5 Unit	46.590.000,00	44.550.000,00	63.975.000,00	17.385.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			46.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12. 01 2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.999.900,00	8.503.000,00	8.503.000,00	3.503.100,00	Kab. Takalar Pattallassang, Kalabbirang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Perekaman KTP-el, Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA, Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK,**				**97 % 98 % 93 % 60 %**	**97 % 98 % 93 % 60 %**	**530.000.000,00**	**759.949.000,00**	**705.432.700,00**	**201.600.000,00**							**731.600.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk yang sesuai standar pelayanan				100 %	100 %	505.048.000,00	735.028.000,00	695.432.700,00	190.384.700,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		625.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				9 Dokumen	9 Dokumen	480.048.000,00	660.028.000,00	623.328.800,00	143.280.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	75.000.000,00	72.103.900,00	47.103.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi kependudukan				100 %	100 %	24.952.000,00	24.921.000,00	10.000.000,00	-14.952.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN Disdukcapil		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.02.2.03.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	24.952.000,00	24.921.000,00	10.000.000,00	-14.952.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian Persentase kepemilikan akta kematian Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan**				**98 % 100 % 99 %**	**98 % 100 % 99 %**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**20.744.000,00**	**34.000.000,00**							**59.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan pelayanan pencatatan sipil yang sesuai dengan standar pelayanan				95 %	95 %	15.000.000,00	15.000.000,00	14.464.000,00	-536.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.464.000,00	-536.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	6.280.000,00	-3.720.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN Disdukcapil		27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.03.2.02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.280.000,00	-3.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun, Persentase Pemanfaatan data kependudukan**				**100 % 98 % 99 %**	**100 % 98 % 99 %**	**33.360.000,00**	**33.411.000,00**	**37.291.000,00**	**23.640.000,00**							**57.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang tersedia				100 %	100 %	23.360.000,00	23.411.000,00	32.221.000,00	8.861.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Disdukcapil dan OPD/Instansi terkait		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	13.360.000,00	13.411.000,00	13.411.000,00	51.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	18.810.000,00	8.810.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n yang berkualitas Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang berkualitas				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.070.000,00	-4.930.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN Disdukcapil		17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.04.2.03 .0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.070.000,00	-4.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama**				**98 % 100 %**	**98 % 100 %**	**11.640.000,00**	**11.640.000,00**	**14.768.000,00**	**8.360.000,00**							**20.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase capaian Penyusunan Buku Profil kependudukan				100%	100%	11.640.000,00	11.640.000,00	14.768.000,00	3.128.000,00			-	- -	ASN Disdukcapil, OPD/Instansi terkait, Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	11.640.000,00	11.640.000,00	14.768.000,00	3.128.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	JUMLAH								**3.941.792.868,00**	**4.374.854.888,00**	**4.563.936.467,00**	**-20.817.255.718,00**							**5.134.901.100,00**	

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pendanaan karena adanya pergeseran, penambahan, maupun pengurangan anggaran karena adanya efesiensi anggaran. Terdapat 4 Program, 11 Kegiatan, dan 17 Sub Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pendanaan adalah sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 3.854.548.148 dan setelah perubahan menjadi Rp. 3.785.699.631, pada program ini terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 68.848.517. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa kegiatan pada program ini yang mengalami efesiensi. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah :
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 56.000.000 dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 52.052.000. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 3.948.000, pada kegiatan ini terjadi penambahan dan pengurangan pada 3 sub kegiatan yaitu :
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran pokok sebesar Rp. 15.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 17.667.000, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 2.667.000. Rincian Belanja yang mengalami penambahan adalah belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 61.000, belanja kertas sebesar Rp. 1.271.000, belanja bahan komputer sebesar Rp. 615.000, belanja makan minum rapat sebesar Rp. 1.810.000. Namun selain penambahan ada rincian belanja yang mengalami pengurangan, yaitu pada belanja perjalanan dinas biasa, terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.090.000.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 10.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran pada parsial 2 menjadi Rp. 5.260.000, terjadi pengurangan sebesar Rp. 4.740.000, dan pada perubahan anggaran menjadi 9.983.600 ada penambahan sebesar 4.363.600. Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja perjalanan dinas biasa dan yang mendapat penambahan Adalah belanja lembur.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 12.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 5.401.400, terjadi pengurangan sebesar Rp. 6.598.600. Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 4.740.000, belanja benda pos sebesar Rp. 542.000, belanja bahan komputer sebesar Rp. 984.000, belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 332.600.

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 2.943.454.888 dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 2.928.213.531. Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 4.520.000, pengurangan terjadi pada 2 sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran pokok sebesar Rp. 2.928.454.888 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.917.733.531, terjadi pengurangan sebesar Rp. 10.721.357. Rincian belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD , anggaran pokok sebesar Rp. 15.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 10.480.000. terjadi pengurangan

sebesar Rp. 4.520.000. Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja perjalanan dinas biasa.

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 15.000.000 dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 13.107.100. Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 4.520.000, pengurangan terjadi pada 1 sub kegiatan yaitu :
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 10.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 8,107,100, terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.892.900. Rincian belanja yang mengalami mengurangan adalah belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 1.240.000, belanja bahan komputer sebesar Rp. 652.900 .
- Administrasi Umum Perangkat Daerah , dengan anggaran pokok sebesar Rp. 230.197.000 dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 430.109.000. Kegiatan ini mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 199.912.000, perubahan anggaran terjadi pada 3 sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran pokok sebesar Rp. 57.692.700 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 137.590.700, terjadi penambahan sebesar Rp. 79.898.000. Rincian belanja yang mengalami penambahan adalah belanja modal peralatan personal komputer yaitu belanja alat cetak KTP-El dan belanja modal alat kantor lainnya yaitu belanja CCTV, serta Apar.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran pokok sebesar Rp. 88.041.300 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 238.382.300, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 150.341.00. Rincian belanja yang mengalami penambahan adalah belanja alat tulis

kantor, belanja bahan komputer, belanja bahan cetak, belanja kertas, belanja benda pos dan belanja alat/bahan perabot Kantor.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran pokok sebesar Rp. 78,063,000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 47,736,000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 30.327.000. Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dalam kota.

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 239.650.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 289.740.000, Kegiatan ini mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 50.090.000, penambahan anggaran terjadi pada 3 sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran pada awalnya Rp. 0 namun setelah adanya penambahan untuk sewa jaringan VPN bertambah menjadi Rp. 27.000.000.
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran pokok sebesar Rp. 3.250.000 menjadi Rp. 11.940.000.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran pokok Rp. 236,400.00 menjadi 250.800.000.

2. Program Pendaftaran Penduduk, mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 759.949.000 dan setelah perubahan menjadi Rp**.** 705.432.700, pada program ini terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 54.516.300. Hal ini terjadi karena kegiatan pada program ini yang mengalami efesiensi. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah :
   - Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 735.028.000 dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi

Rp. 695.432.700. Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 39.595.300, pengurangan anggaran terjadi pada 2 sub kegiatan yaitu :

- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, anggaran pokok sebesar Rp. 660.028.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 623.328.800, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 36.699.200. Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja bahan komputer.
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, anggaran pokok sebesar Rp. 75.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran pada parsial 2 menjadi Rp. 44.241.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 30.759.000, dan pada perubahan anggaran bertambah menjadi Rp. 72.103.900 Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja perjalanan dinas dalam kota, ada penambahan pada belanja makan minum rapat.

- Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 24,921,000 dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 10.000.000. Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 14.921.000, pengurangan anggaran terjadi pada 1 sub kegiatan yaitu:
  - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk, anggaran pokok sebesar Rp. 24,921,000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 10.000.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 14.921.000. Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja perjalanan dinas biasa.

3. Program Pencatatan Sipil, mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 25.000.000 dan setelah perubahan menjadi Rp. 17.780.000 , pada program ini terjadi pengurangan anggaran sebesar

Rp. 7.220.000. Hal ini terjadi karena kegiatan pada program ini yang mengalami efesiensi. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah:

- Pelayanan Pencatatan Sipil, anggaran pokok sebesar Rp. 15.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 11.500.000, Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 3.500.000, pengurangan anggaran terjadi pada 1 sub kegiatan yaitu :
  - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, anggaran pokok sebesar Rp. 10.000.000 dan pada parsial 3 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 6.500.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 3.500.000, dan pada anggaran perubahan bertambah lagi menjadi 14.464.000. Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja perjalanan dinas dalam kota, dan ada penambahan pada belanja lembur.
- Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, anggaran pokok sebesar Rp. 10.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 6.280.000, Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 3.720.000, pengurangan anggaran terjadi pada 1 sub kegiatan yaitu:
  - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil, anggaran pokok sebesar Rp. 10.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 6.280.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 3.720.000. Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja perjalanan dinas biasa.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 33.411.000 dan parsial 3 mengalami perubahan menjadi Rp. 27.971.000, pada program ini terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 5.440.000 dan pada perubahan anggaran bertambah menjadi Rp. 37.291.000. Hal ini terjadi karena kegiatan

pada program ini yang mengalami efesiensi. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah:

- Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, anggaran pokok sebesar Rp. 23.411.000 dan pada parsial 3 anggaran menjadi Rp. 22.901.000, Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 510.000, dan pada perubahan anggaran bertambah menjadi Rp. 32.221.000 pengurangan dan penambahan anggaran terjadi pada 1 sub kegiatan yaitu:
  - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, anggaran pokok sebesar Rp. 10.000.000 dan pada parsial anggaran menjadi Rp. 9.490.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 510.000. Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja perjalanan dinas dalam kota, kemudian pada perubahan anggaran bertambah menjadi Rp.18.810.000, yakni bertambah sebesar Rp. 9.320.000. Penambahan anggaran terdapat pada belanja makan minum rapat dan belanja lembur.
- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, anggaran pokok sebesar Rp. 10.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 5.070.000, Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 4.930.000, pengurangan anggaran terjadi pada 1 sub kegiatan yaitu:
  - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, anggaran pokok sebesar Rp. 10.000.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 5.070.000, Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 4.930.000. Rincian Belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan anggaran pokok sebesar Rp. 11.640.000, pada perubahan anggaran bertambah menjadi Rp. 14.768.000, hal ini terjadi karena pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, dengan sub kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 3.128.000. Penambahan anggaran ini terdapat pada belanja lembur.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini menjadi instrumen utama bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi kependudukan, peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada Masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tahun 2025 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bappelitbangda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemerintah Daerah dengan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;

2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pemangku kepentingan; dan
3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pemangku kepentingan

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar telah berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Takalar, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai**.**

Takalar, 2025

Kepala Dinas,

H. ABDUL WAHAB, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.196712311988031076

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 KECAMATAN MANGARABOMBANG



KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga seluruh rangkaian proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini merupakan manifestasi pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangarabombang ini juga tetap mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah. Secara substantif, Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil evaluasi dan refleksi atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mangarabombang selama 6 bulan berjalan, dengan tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2022-2026.

Disadari bahwa Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 ini masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, saran serta kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam upaya perbaikan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun berikutnya.

Mangadu,
Camat Mangarabombang



SUDIRMAN, S.Sos

Pangkat : Pembina
NIP.19840824 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.3.1 Maksud 6
1.3.2 Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MANGARABOMBANG TAHUN 2025 TRIWULAN I 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 Triwulan I 8
2.1.1 rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025 yang terakomodir di APBD 2025 16
2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaaan dan Kinerja APBD Triwulan 1 Tahun 2025 16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mangarabombang 25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MANGARABOMBANG 28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28
3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Mangarabombang 29
3.2.1 Tujuan 29
3.2.2 Sasaran 29
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN KECAMATAN MANGARABOMBANG 32
4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 32
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 36
BAB V PENUTUP 50
5.1 Catatan Penting 50
5.2 Kaidah Pelaksanaan 50
5.3 Rencana Tindak Lanjut 50

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mangarabombang Semester I Kabupaten Takalar.....9

Tabel II-2 Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan kecamatan mangarabombnag yang ada dalam APBD 2025.....16

Tabel II-3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan pada APBD..... 17

Tabel II-4 Rekapitulasi capaian anggaran Program/Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Mangaeabombang..... 21

Tabel II-5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan 24

Tabel II-6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.....26

Tabel III-1 Kebijakan Nasional (Prioritas Nasional) Dalam RKP Tahun 2025 29

Tabel III-2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar 2025..... 30

Tabel IV-1 Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan penurunan stanting kecamatan Mangarabombang Tahun 2025.....33

Tabel IV-2 Pendanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 34

Tabel IV-3 Pendanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Mandatory Spending Pendidikan 34

Tabel IV-4 Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Mandotory Sepnding Infrastruktur pelayananpublik..... 35

Tabel IV-5 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sumber Pendanaan 36

Tabel IV-6 Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025..... 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Renja Kecamatan Mangarabombang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Mappakasunggu dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenanganmasing-masing. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang yang disusun ini juga telah dilksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPD dan Renstra sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat.

Gambar I-1

Keterkaitan Renja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

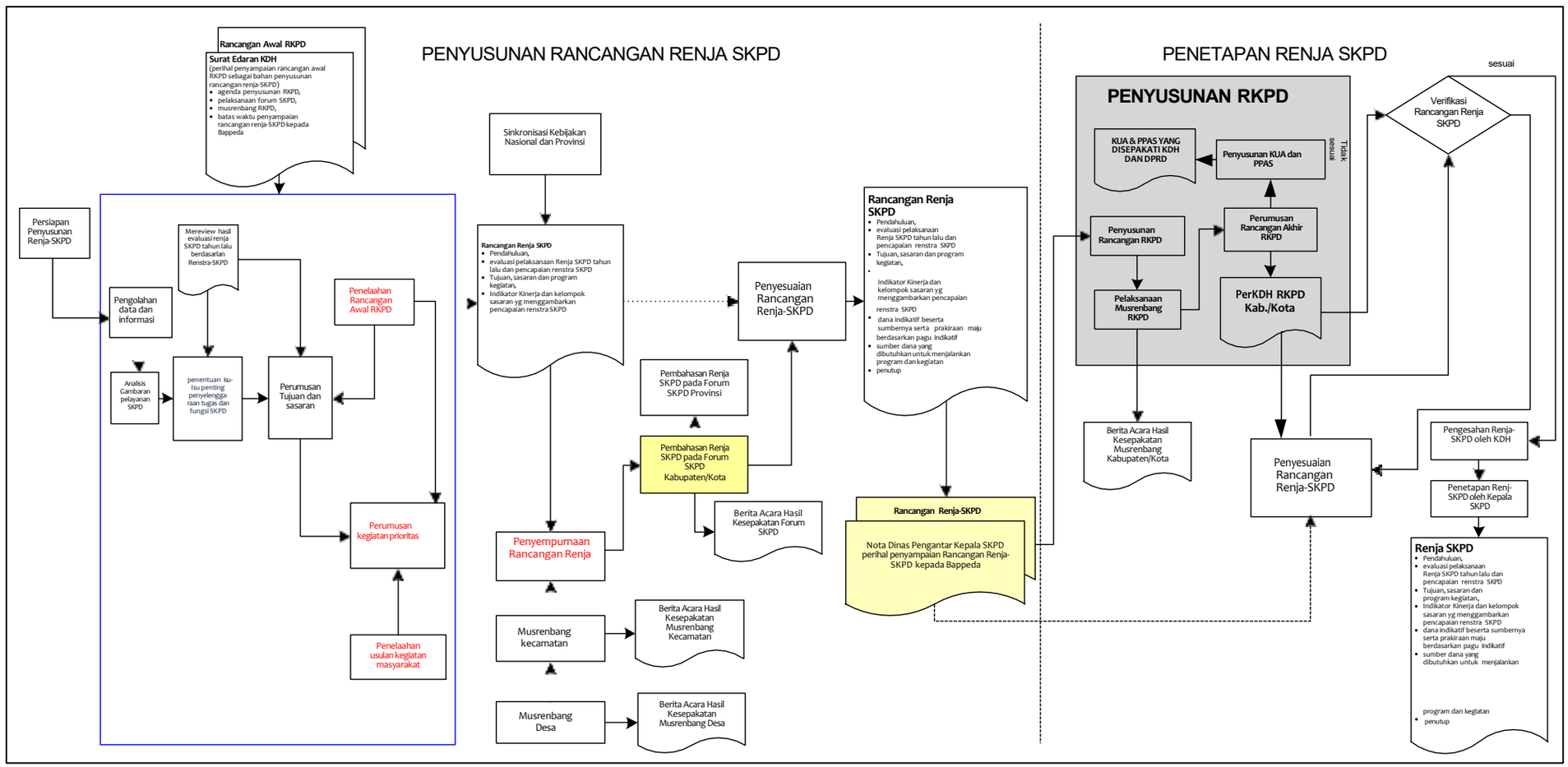

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaanpembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renja memiliki nilai- nilai strategis, yaitu :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan Kecamatan Mangarabombang;
2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Mangarabombang selama 6 (Enam) Bulan;
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Kecamatan Mangarabombang sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan maksud :

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi Perubahan APBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 terdiri dalam 5 (Lima) BAB sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2024 Semester II.

Pada Bab ini berisi empat hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 Triwulan I dan Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.

Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.

Bab IV Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi

bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penyajian Tabel rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Renja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN MANGARABOMBANG TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 Triwulan I.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 Semester I, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Mangarabombang.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Mangarabombang sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II-1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 Triwulan I

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2025**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2025**) yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	8		12		25		26 = 25/8 x 100%		29
		7					**UNSUR KEWILAYAHAN**										
		7	**01**				**KECAMATAN MANGARABOMBANG**		**100,0%**	**3.372.273.817**	**0,76%**	**619.305.065**	**0,8%**	**619.305.065**	0,76%	18,36%	
1		**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**3.202.172.249**	**3%**	**615.854.575**	**3%**	**615.854.575**	**3,04%**	**19,23%**	**Kecamatan Mangarabombang**
		7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah**	100,00%	8.668.600	0,00%	1.220.271	0,00%	1.220.271	0,00%	14,08%	
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2	**1.377.100**	-	294.271	-	294.271	0,00%	21,37%	
		7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.428.000	-	393.000	-	393.000	0,00%	27,52%	
		7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	1.554.400	-	186.000	-	186.000	0,00%	11,97%	
		7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1.353.500	-	90.700	-	90.700	0,00%	6,70%	

		7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	1.076.600	-	193.300	-	193.300	0,00%	17,95%	
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1.879.000	-	63.000	-	63.000	0,00%	3,35%	
								Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)							**0,00%**	**14,81%**	
								Predikat kinerja Kegiatan							**SR**	**SR**	
1		7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**	100,00%	2.974.289.649	11,12%	592.832.970	11,12%	592.832.970	11,12%	19,93%	Kecamatan Mangarabombang
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji	420	2281621547	90	592.505.065	90	592.505.065	21,43%	25,97%	
								Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan (TPP)	360	680.033.203	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
								Jumlah pegawai yang menerima Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24	9.240.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	2.024.799	-	264.905	-	264.905	0,00%	13,08%	
		7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan hasil penyiusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	1.370.100	-	63.000	-	63.000	0,00%	4,60%	
								Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)							**4,29%**	**8,73%**	
								Predikat kinerja Kegiatan							**SR**	**SR**	
1		7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah yang baik**	100,00%	2.808.600	0,00%	327.402	0,00%	327.402	0%	12%	Kecamatan Mangarabombang
		7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	962.400	-	90.802	-	90.802	0,00%	9,43%	

		7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	844.200	-	173.600	-	173.600	0,00%	20,56%	
		7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.002.000	-	63.000	-	63.000	0,00%	6,29%	
								Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)							**0,00%**	**12,10%**	
								Predikat kinerja Kegiatan							**SR**	**SR**	
1		7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	100,00%	72.361.000	0,00%	3.755.020	0,00%	3.755.020	0,00%	5,19%	Kecamatan Mangarabombang
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yang di sediakan	10	1.793.000	-	538.200	-	538.200	0,00%	30,02%	
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	5	38.469.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		7	01	01	02.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	12.952.000	-	944.766	-	944.766	0,00%	7,29%	
		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	5	1.181.000	-	246.200	-	246.200	0,00%	20,85%	
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	2	1.452.000	-	325.854	-	325.854	0,00%	22,44%	
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan yang di sediakan	5	1.800.000	-	450.000	-	450.000	0,00%	25,00%	
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat-rapat koordinasi yang diikuti	30	14.714.000	-	1.250.000	-	1.250.000	0,00%	8,50%	
								Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)							**0,00%**	**16,30%**	
								Predikat kinerja Kegiatan							**SR**	**SR**	
1		7	01	01	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**		100,00%	7.700.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Mangarabombang
		7	01	01	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	50	7.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	

							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)									**0,00%**	**0,00%**	
							Predikat kinerja Kegiatan									**SR**	**SR**	
1		7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**	100,00%	88.914.400	7,14%	17.718.912	7,14%	17.718.912	7,14%	19,93%	Kecamatan Mangarabombang
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening PDAM yang di bayar	12	4.426.400	-	737.732	-	737.732	0,00%	16,67%	
								Jumlah rekening Wifi Internet yang di bayar	4	1.738.000	-	181.180	-	181.180	0,00%	10,42%	
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor	12	82.750.000	2	16.800.000	2	16.800.000	16,67%	20,30%	
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)									**5,56%**	**18,48%**	
							Predikat kinerja Kegiatan									**SR**	**SR**	
1		7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah**	100,00%	47.430.000	0,00%	-	0,00%	-	0%	0,00%	Kecamatan Mangarabombang
		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara (Bensin)	1	33.630.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
								Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara (Pajak)	3	2.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2	11.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)									**0,00%**	**0,00%**	
							Predikat kinerja Kegiatan									**SR**	**SR**	
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)									**1,41%**	**10,06%**	
							Predikat kinerja									**SR**	**SR**	
1		7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan publik oleh Pemerintah**	**100%**	**5.404.000**	**0,00%**	**226.000**	**0,00%**	**226.000**	**0,00%**	**4,18%**	**Kecamatan Mangarabombang**

		7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan**	100,00%	1.989.000	0,00%	147.250	0,00%	147.250	0,00%	7,40%	
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan di tingkat kecamatan	1	1.989.000	-	147.250	-	147.250	0,00%	7,40%	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**7,40%**	
Predikat kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
1		7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan pencapaian standart pelayanan minimal (SPM) di Kecamatan**	100,00%	3.415.000	0,00%	78.750	0%	78.750	0,00%	2%	Kecamatan Mangarabombang
		7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	1	1.515.000	-	78.750	-	78.750	0,00%	5,20%	
		7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	1	1.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**2,60%**	
Predikat kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)															**0,00%**	**5,00%**	
Predikat kinerja															**SR**	**SR**	
1		7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat desa/ Kelurahan yang di berdayakan**	**100%**	**162.497.568**	**0,00%**	**2.124.490**	**0,00%**	**2.124.490**	**0,00%**	**1,31%**	**Kecamatan Mangarabombang**
1		7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan**	100,00%	159.472.568	0,00%	1.299.490	0%	1.299.490	0,00%	0,81%	Kecamatan Mangarabombang
		7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1	106.643.968	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	52.828.600	-	1.299.490	-	1.299.490	0,00%	2,46%	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**1,23%**	
Predikat kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	

1		7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang**	100,00%	1.650.000	0,00%	825.000	0%	825.000	0,00%	50,00%	Kecamatan Mangarabombang
		7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	2	1.650.000	-	825.000	-	825.000	0,00%	50,00%	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**50,00%**	
Predikat kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
		7	01	03	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**	100,00%	1.375.000	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%	
		7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	3	1.375.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**0,00%**	
Predikat kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)															**0,00%**	**25,61%**	
Predikat kinerja															**SR**	**SR**	
1		**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Desa dan kelurahan**	**100%**	**2.200.000**	**0,00%**	**1.100.000**	**0,00%**	**1.100.000**	**0,00%**	**50,00%**	**Kecamatan Mangarabombang**
		7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase sinergitas Kepolisian ,tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan**	100,00%	2.200.000	0,00%	1.100.000	0,00%	1.100.000	0%	50%	
		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	2.200.000	-	1.100.000	-	1.100.000	0,00%	50,00%	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)															**0,00%**	**50,00%**	
Predikat kinerja Kegiatan															**SR**	**SR**	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)															**0,00%**	**50,00%**	
Predikat kinerja															**SR**	**SR**	

Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**0,28%**	**18,14%**
Predikat Kinerja Program	**SR**	**SR**

Sumber data: Monev triwulan I 2025

Pada tabel II-1 menjelaskan bahwa pada program tidak ada kegiatan yang memenuhi target 25% pada Triwulan ! tahun 2025 Penyebabnya dapat dilihat pada Faktor yaitu:

Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja sampai Triwulan 1Tahun 2025

- Faktor Penghambat

1. Kurangnya ketersediaan SDM pelaksanaan pada sub bagian mempengaruhi target pencapaian kinerja tepat waktu
2. Masih ada sub kegiatan yang tidak bisa terealisasi anggarannya, diakrenakan sub kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 yang terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mangarabomang Tahun 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran sseberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan mangarabombang pada tahun 2025, adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Table II-2

Tabel Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kecamatan Managarabombang yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	Kecamatan managarabombang	4	13	32	4	13	36

Sumber: Renja Pokok 2025, SIPD 2025 dan MONEV TW 1

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 4, jumlah kegiatan 13, dan jumlah sub kegiatan 32, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 4, jumlah indikator kegiatan sebanyak 13 dan Jumlah Indikator sub kegiatan 36.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel II.3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar Tahun 2025 Sampai Triwulan I

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	*(Rp)*	*Fisik*	*Keu*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.202.172.249,00	615.854.575,00	3,04%	19,23
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	5.404.000,00	226.000,00	0,00%	4,18
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	162.497.568,00	2.124.490,00	0,00%	1.31
4	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	2.200.000,00	1.100.000,00	0,00%	50
	Total	**3.372.273.817**	**619.305.065**	**0,76%**	**18,36 %**

Sumber : Laporan Monev Renja Diskominfo Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Kecamatan mangarabombang Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 619.305.065, anggaran tersebut digunakan dalam 4 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 18,36% dengan capaian realisasi fisik sebesar 0,76%. Kondisi ini menunjukkan rata-rata capaian realisasi fisik yang belum maksimal karena pelaksanaan kegiatan baru berjalan 3 bulan. Dari 4 program yang ada, hanya satu program yang telah mencapai realisasi kinerja yaitu sebesar 50%.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 sampai pada Triwulan I

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Kecamatan Mangarabombang dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kecamatan Mangarabombang. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >10– 20% dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 20% . Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program, anggaran pada Kecamatan Mangarabombang dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan untuk penggunaan anggaran pada Kecamatan Mangarabombang terdapat 4 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah sebanyak 2 program atau 20 Persen (realisasinya 0-10persen) yaitu program penyelenggaraan pemerintah daerah dan program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, untuk capaian >10– 20% terdapat 1 program yaitu Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota, Untuk capaian kinerja kategori bagus sebanyak 1 program atau 50 persen yaitu program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 13 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 7 kegiatan atau di bawah 20 persen yang realisasi pendanaannya rendah triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 4 kegiatan atau 10-20 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 2 kegiatan atau 50 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kecamatan Mangarabombang pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 32 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 17 sub kegiatan atau 0-10 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 4 sub kegiatan atau persen, dan 11 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau >20 persen sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

TABEL II.4
REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KECAMATAN MANGARABOMBANG

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan		
		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	4	2	1	1	13	7	4	2	32	17	4	11

Sumber : *Laporan Realisasi Renja Tahun 2025 Triwulan I*

Keterangan:

0-10	Rendah
>10-20	Sedang
>20	Tinggi

2.1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Kecamatan Mangarabombang 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat kecamatan mangarabombang. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** untuk realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.Kegiatan evaluasi Renja Kecamatan Mangarabombang serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Mangarabombang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut; untuk pencapaian target kinerja program pada Kecamatan Mangarabombang dapat dijelaskan bahwa dari 4 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I, terdapat 4 Program termasuk kategori rendah atau dibawah 10 persen yaitu Program Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, Program Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 13 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I terdapat 12 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 10 persen, terdapat14 kegiatan yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian 10-20 persen batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 32 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 30 sub kegiatan, dan capaian kinerja masuk dalam kategori sedang sebanyak 1 sub kegiatan , dan capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi terdapat 1 sub kegiatan yaitu pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Kecamatan Mangarabombang Takalar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL II.5
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome		
			0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%		0-10%	>10-20%	>20%
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Kecamatan Mangarabombang	4	4	0	0	13	12	1	0	32	30	1	1

Sumber : Laporan Monev Renja Kecamatan Mangarabombang Triwulan I Tahun 2025

Keterangan:

0-10	Rendah
>10-20	Sedang
>20	Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mangarabombang

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mangarabombang berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berdasarkan tungas dan fungsi Kecamatan Mangarabombang serta ketentuan peraturan perundang – undangan. Adapun tabel analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mangarabombang sebagai berikut:

Tabel II-6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR (berdasarkan Renstra 2023-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR (Renstra 2025-2029)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan	75	75	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	3,30	3,4	3,5				
2	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	85%	9,42%	Presentase peningkatan pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar	80	85	85		85	85	
3	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM)	100%	100%	Presentase pelayanan kepada Masyarakat yang selesai tepat waktu	80	85	90		85	90	
4	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (Non Standar Pelayanan Minimal)	100%	100%	Persentase peningkatan aduan masyrakat yang ditindaklanjuti	75	80	85		80	85	
5	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	75%	80%	Hasil penilaian sakip oleh Inspektorat pada kantor kecamatan	65	70	75		70	75	
6	Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk	25	2	Tingkat literasi digital ASN Kantor Kecamatan	75	80	80	90	80	80	
7	Presentase lambaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	80%	100%								
8	Indeks reformasi birokrasi	B	Belum di lakukan evaluasi penilaian								
9	Nilai SAKIP pada kantor Kecamatan Mangarabombang	B	B								

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024. Untuk nilai indeks kepuasan masayrakat masyarakat (IKM) pelayanan di kecamatancapaian kinerja telah memenuhi target yakni telah mencapai nilai 75% dari nilai 75% yang telah ditargetkan untuk tahun 2024. Hal ini karena beberapa catatan yang diberikan oleh tim survey kepuasan masyrakat telah ditindak lanjuti.

Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban diukur dari tindak criminal yang terjadi dalam suatu wilayah. Jumlah tindak kriminal di Kecamatan Mangarabombang, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2024 menurun menjadi 1 kasus, atau terjadi penurunan sebesar 4 kasus atau sebesar 80%. Jika dihitung dalam indicator angka kriminalitas per 10.000 penduduk, maka dari 42.346 jiwa penduduk MAngarabombang pada tahun 2024, angka kriminalitas mencapai 0,24 per 10.000 penduduk. Sementara itu, target penurunan kasus kriminal tahun 2024 ditetapkan sebesar 25, sehingga capaian tersebut telah jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa evaluasi telah dilakukan secara mendalam terhadap strategi pencegahan dan penanganan tindak kriminal yang selama ini dijalankan. Upaya sinergis antara aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, dan partisipasi masyarakat yang terus diperkuat dari tahun ke tahun telah berhasil menurunkan angka kriminalitas secara signifikan dan jauh melampaui target yang ditetapkan.

Untuk indikator presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM) dengan capaian kinerja telah mencapai target 100% dari nilain 100% yang ditargetkan untuk tahun 2024. Hal ini disebabkan karena peningkatan kompetensi pegawai dalam menerapkan standar pelayanan kepada masyarakat dan memberikan saranan dan prasarana memadai seperti loket, ruang tunggu, dan fasilitas umum sesuai standar, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik.

Untuk indikator presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan(Non SPM) dengan capaian kinerja telah mencapai target 100% dari nilai 100% yang ditargetkan pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan target presentase bisa tercapai karena indikator lebih menekankan kuantitas atau akses layanan kepada masyarakat.

Untuk indikator presentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik dengan capaian kinerja 80% dari nilai 75% yang ditargetkan uantuk tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana prasarana sudah tersedia dan berfungsi dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan untuk mencapai standar optimal. Berdasarkan tabel perhitungan, dari total 75 sarana prasarana yang tersedia, terdapat 60 dalam kondisi baik. Hampir seluruh jenis prasarana seperti kantor, puskesmas, sekolah (SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA), dan pasar telah memenuhi standar ketersediaan. Namun, pada kategori kondisi kantor pelayanan hanya terdapat sekitar 80%. Dengan demikian, menunjukkan pelayanan publik sudah ditunjang sarana prasarana yang cukup memadai, tetap diperlukan penambahan dan perbaikan kantor pelayanan agar kualitas layanan masyarakat dapat lebih optimal dan sesuai dengan target.

Untuk indikator angka kriminalitas pe 10.000 penduduk dengan capaian kinerja 2 dari target 25 yang ditetapkan pada tahun 2024. Dimana angka kriminalitas yang dicapai pada tahun 2024

sebesar 0,47 atau kurang lebih 1 orang warga yang mendapatkan kasus kriminal hal ini termasuk bagus dalam indikator angka kriminaliitas.

Untuk indikator presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan massyarakat mencapai realisasi kinerja dengan 100% hal ini sudah melebihi target yang ditetapkan karena semua lembaga aktif di Kecamatan Mangarabombang. Jumlah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Mangarabombang Tahun 2024 sebanyak 38 lembaga dan lembaga tersebut aktif di Kecamatan, perhitungannya yaitu:

38/38 x 100% = 100%

Untuk indikator indeks reformasi birokrasi pada tahun 2024 belum dilakukan evaluasi penilaian pada kecamatan mangarabombang.

Untuk indikator nilai SAKIP pada kantor kecamatan mangarabombang capaian kinerja sudah sangat baik karena setiap rekomendasi untuk perbaikan kekurangan dari dokumen yang direviu telah ditindaklanjuti meskipun masih diperlukan perbaikan dokumen dengan lebih memperhatikan kualitas dokumen yang disusun.

Penvapaian kinerjaKecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di Kecamatan

Pada tahun 2025 ditetapkan target IKM sebesar 3.30. Namun, pada Triwulan I, realisasi capaian belum tersedia karena proses survei kepuasan masyarakat masih berlangsung. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian survei agar dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas layanan.

2. Presentase peningkatan pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar

Pelayanan kepada Masyarakat pada kantor kecamatan mangarabombang diupayakan dilaksanakan sesuai standar. Hingga triwulan 1 tahun 2025, kami telah menerima permohonan layanan Masyarakat sebanyak 350 Layanan. Dari jumlah tersebut, telah terlayani sesuai standar pelayanan sebanyak 112 Layanan atau mencapai 32%.

3. Persentase Pelayanan Masyarakat yang Selesai Tepat Waktu

Target pelayanan tepat waktu pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%, sementara hasil realisasi pada triwulan I sudah mencapai 32% dengan jumlah layanan yang masuk sebanyak 350 Layanan dan yang sudah diselesaikan tepat waktu sebanyak 112 Layanan. Pencapaian ini terjadi karena adanya kesadaran dan kompetensi petugas serta dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

4. Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 75%, sementara realisasi triwulan I sudah mencapai 27.3% dengan target aduan dalam setahun sebanyak 22 aduan dan sudah diselesaikan sebanyak 6 aduan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan kecamatan semakin meningkat, karena mayoritas aduan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Meski demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, agar capaian di masa mendatang semakin optimal.

5. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan

Target yang ditetapkan adalah memperoleh nilai 65 Pada Triwulan I tahun 2025, penilaian SAKIP oleh Inspektorat belum dilaksanakan sehingga belum terdapat data realisasi. Oleh karena itu, Kecamatan perlu mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar saat penilaian dilakukan hasilnya dapat sesuai target.

6. Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Kecamatan

Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 75%, dan realisasi pada triwulan I juga telah mencapai 67%, sehingga capaian ini hamper memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, dari 30 ASN di Kecamatan Mangarabombang, sebanyak 20 ASN mampu mengoperasikan komputer, sehingga menghasilkan tingkat literasi digital sebesar 67%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital sudah cukup baik untuk mendukung tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Namun, peningkatan kapasitas masih tetap diperlukan agar literasi digital ASN semakin optimal dalam menunjang efektivitas, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN MANGARABOMBANG

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Mangarabombang selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mangarabombang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025-2029, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kebijakan Nasional Dalam RPJMN/RKP

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Perubahan Pemeintah (RKP) Tahun 2025, sebagai berikut :

- **Tema Pembangunan**

  Tema Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

- **Prioritas Nasional**

  Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (RKP) Tahun 2025 menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. "Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi window opportunity bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2025 adalah:

- PN 1 : Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;

- ❖ PN 2 : Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
- ❖ PN 3 : Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu Menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangarabombang

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Kecamatan Mangarabombang yaitu **"Meningkatkanya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan",** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik.
2. Sasaran 2: Meningkatnya tata kelola kinerja pada kantor kecamatan mangarabombang

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Kecamatan Mangarabombang dapat dilihat pada Tabel III.2 di bawah ini :

Tabel III.2

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025-2029

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
T1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan	81,25	T1. Meningkatkanya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	3,30
	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	90		Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar (%)	80
Sasaran1.1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM)	100%	S. 1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu (%)	80
	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (Non Standar Pelayanan Minimal)	100%		Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	75

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Saran1.2: Meningkatnya koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	80%	S 1.2. Meningkatnya tata kelola kinerja pada kantor kecamatan mangarabombang	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan (Angka)	65
Sasaran.1.3: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk	20		Tingkat Literasi Digital ASN Kantor Kecamatan (Nilai)	75
Tujuan 2: Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa status berkembang menuju status Desa maju	0			
Sasaran2.1: Meningkatnya status desa	Jumlah desa status berkembang menuju Desa maju	9 Desa Maju			
Sasaran2.2: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	83%			
Tujuan 3: Meningkatkan tata kelola pada kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	B			

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Kecamatan Mangarabombang					

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mangarabombang yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	Program Penyelenggaraan pemerintan dan pelayanan publik			4.704.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan		1.989.000
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.989.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		3.415.000
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	815.000

			di Kecamatan	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.900.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			162.497.568
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		159.472.568
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	116.393.968
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	43.078.600
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1.650.000
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.650.000
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		1.375.000
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1.375.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2.200.000
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan		2.200.000

		Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.200.000

4.2 Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 pada tabel dibawah ini:

Tabel . 4.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Polongbangkeng Selatan Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Mangarabombang							3.182.648.504,00	3.359.622.726,00	3.359.854.056,00							4.115.448.512,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.182.648.504,00	3.359.622.726,00	3.359.854.056,00							4.115.448.512,00	
	7	01				KECAMATAN							3.182.648.504,00	3.359.622.726,00	3.359.854.056,00							4.115.448.512,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	3.019.976.008,00	3.189.521.158,00	3.190.452.488,00							3.879.848.512,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.161.800,00	8.668.600,00	8.668.600,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

		1	1	01	01																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.050.000,00	1.377.100,00	968.919,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.071.500,00	1.428.000,00	936.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.214.200,00	1.554.400,00	1.119.400,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.348.600,00	1.353.500,00	609.100,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.305.400,00	1.076.600,00	890.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.172.100,00	1.879.000,00	1.564.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.762.601.508,00	2.961.638.558,00	2.961.638.558,00			-	6. Perbaikan Tatake	-		3.603.598.512,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

																			lola Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan	2.760.217.108,00	2.958.243.659,00	2.970.894.750,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.598.098.512,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.243.900,00	2.024.799,00	1.077.519,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.140.500,00	1.370.100,00	1.244.100,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.788.900,00	2.808.600,00	2.808.600,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	636.200,00	962.400,00	731.200,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	

							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	842.400,00	844.200,00	422.100,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.310.300,00	1.002.000,00	552.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	97.433.500,00	72.361.000,00	72.361.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		108.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				12 Paket	10 Paket	2.100.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			3.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

							Kantor yang Disediakan									Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	29.338.000,00	38.469.000,00	38.469.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	1.133.600,00	1.181.000,00	1.181.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	33.000.000,00	12.952.000,00	10.642.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			33.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

																			dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.961.900,00	1.452.000,00	1.452.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	30 Laporan	27.500.000,00	14.714.000,00	10.062.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelaya			25.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

																			nan Publik				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	50 Unit	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	121.848.700,00	88.914.400,00	88.914.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		90.750.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	12 Laporan	39.098.700,00	6.164.400,00	6.164.400,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	12 Laporan	82.750.000,00	82.750.000,00	82.750.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			82.750.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	26.141.600,00	47.430.000,00	47.430.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		47.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				3 Unit	3 Unit	18.541.600,00	36.430.000,00	36.430.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			35.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

							Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	7.600.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			12.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik				100 %	100 %	8.610.799,00	5.404.000,00	4.704.000,00							7.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	-			100 %	100 %	2.534.799,00	1.989.000,00	1.989.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.534.799,00	1.989.000,00	1.989.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			2.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

							Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	-			100 % 12 Laporan	100 % 12 Laporan	6.076.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	KECAMATAN MANGARA BOMBANG
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	1.515.000,00	815.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARA BOMBANG
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.776.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan				95 %	95 %	154.061.697,00	162.497.568,00	162.497.568,00							215.800.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Persentase ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan di desa	-			100 % 12 Lembaga Kemasyarakatan	100 % 12 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		7.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			7.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

																			Publik				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di kelurahan	-			0 %	0 %	147.582.697,00	159.472.568,00	159.472.568,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		195.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	1 Unit	132.454.200,00	106.643.968,00	116.393.968,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	15.128.497,00	52.828.600,00	43.078.600,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang	-			100 % 12 TP.PKK 1 Laporan	100 % 12 TP.PKK 1 Laporan	4.229.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.300.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	4.229.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	

		1	3	0 3	04																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangara bombang , Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	4. Penur unan Kesenj angan Sosial Ekono mi			3.300.00 0,00	KECAMAT AN MANGARA BOMBANG
	7	0 1	0 3	2. 0 6		Pemberdayaa n dan Kesejahteraa n Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	-			100 % 50 KK	100 % 50 KK	2.250.00 0,00	1.375.00 0,00	1.375.00 0,00			-	6. Perbai kan Tatake lola Pemeri ntahan dan Pelaya nan Publik	-		5.000.00 0,00	KECAMAT AN MANGARA BOMBANG
	7	0 1	0 3	2. 0 6	00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				3 Keluarg a	3 Keluarg a	2.250.00 0,00	1.375.00 0,00	1.375.00 0,00	Kab. Takalar, Mangara bombang , Semua Kel/Desa	Dana Alokas i Umum (DAU)	-	6. Perbai kan Tatake lola Pemeri ntahan dan Pelaya nan Publik			5.000.00 0,00	KECAMAT AN MANGARA BOMBANG

4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Jumlah pelanggaran perda dan perbup di kecamatan				1 20 Kasus %	1 20 Kasus %	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00							7.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-			0 1 Laporan	0 1 Laporan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		2.500.000,00	KECAMATAN MANGARA BOMBANG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Takalar, Mangara bombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARA BOMBANG

	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.500.000,00	KECAMATAN MANGARA BOMBANG
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000,00	KECAMATAN MANGARA BOMBANG
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00							5.800.000,00	

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Persentase peraturan desa dan peraturan kepala desa yang di susun	-			100 % 11 Dokumen 1 Dokumen	100 % 11 Dokumen 1 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.800.000,00	KECAMATAN MANGARA BOMBANG
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARA BOMBANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemeri			3.300.000,00	KECAMATAN MANGARA BOMBANG

							dan Pendayagunaan Aset Desa												ntahan dan Pelaya nan Publik					
	J U M L A H											**3.182.64 8.504,00**	**3.359.62 2.726,00**	**3.359.85 4.056,00**							**4.115.44 8.512,00**		

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pendanaan karena adanya pergeseran, penambahan, maupun pengurangan anggaran karena adanya efesiensi anggaran. Terdapat 4 Program, 13 Kegiatan, dan 36 Sub Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pendanaan adalah sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota mengalami perubahan anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 3.189.521.158 dan setelah perubahan menjadi Rp. 3.190.452.488, pada program ini terjadi penggurangan anggaran sebesar Rp. 931.330. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa kegiatan pada program ini mengalami pengurangan dan penambahan anggaran. Pada Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah :
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 8.668.600 dan setelah mengalami perubahan, anggaran menjadi Rp. 6.087.419. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 2.581.181, pada kegiatan ini terjadi pengurangan pada 6 sub kegiatan yaitu :
        i) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran pokok sebesar Rp. 1.377.100 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 968.919, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 408.181.
        ii) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan anggrana pokok sebesar Rp. 1.428.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 936.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 492.000.
        iii) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan anggran pokok Rp. 1.554.400 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.119.400, terjadi pengurangan anggrana sebesar Rp. 435.000.
        iv) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan anggrana pokok Rp. 1.353.500 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 609.100, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 744.400.
        v) Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dengan anggaran pokok Rp. 1.076.600 dan setelah mengalami perubahan anggrana menjadi Rp. 890.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 186.600.
        vi) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran pokok Rp. 1.879.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.564.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 315.000.
    2. Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan anggaran pokok Rp. 2.961.638.558 dan setelah mengalami perubahan anggran menjadi Rp. 2.973.216.369, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 11.577.811. pada kegiatan ini terjadi penambahan dan pengurangan pada 3 sub kegiatan yaitu :
        i) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran pokok Rp. 2.958.243.659 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.970.894.750, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 12.651.091, dimana terdapat ASN di kantor

kecamatan Mangarabombang 30 orang.

ii) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dengan anggaran pokok Rp. 2.024.799 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.077.519, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 947.280.

iii) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, dengan anggaran pokok Rp. 1.370.100 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.244.100, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 126.000.

3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan anggaran pokok Rp. 2.808.600 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.705.300, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.103.300. pada kegiatan ini terjadi pengurangan anggaran pada 3 sub kegiatan yaitu:

   i) Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD, dengan anggaran pokok Rp. 962.400 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 731.200, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 231.200.

   ii) Pengamanan barang milik daerah SKPD, dengan anggaran pokok Rp. 844.200 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 422.100, terjadi pengurangan anggaran anggaran sebesar Rp. 422.100.

   iii) Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD, dengan anggaran pokok Rp. 1.002.000 setelah mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 552.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 450.000.

4. Administrasi umum perangkat daerah, dengan anggaran pokok Rp. 72.361.000 dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 65.399.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.962.000. pada kegiatan ini terjadi pengurangan anggaran pada 7 sub kegiatan yaitu:

   i) Penyediaan komponene instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor, dengan anggaran pokok Rp. 1.793.000 setelah mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 1.793.000, sub kegiatan tersebut tidak mengalami peningkatan atau penguranangan anggaran.

   ii) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan anggaran pokok Rp. 38.469.000 setelah mengalami perubahan sub kegiatan tersebut tidak mengalami peningkatan atau pengurangan anggaran.

   iii) Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan anggaran pokok Rp. 1.181.000 setelah mengalami perubahan anggaran sub kegiatan tersebut tidak terjadi peningkatan atau pengurangan anggaran.

   iv) Penyediaan bahan logistic kantor, dengan anggaran pokok Rp. 12.952.000 setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 10.642.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 8.690.000.

   v) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan anggaran pokok Rp. 1.452.000 setelah mengalami perubahan anggaran sub kegiatan tersebut tidak terjadi penambahan atau pengurangan anggaran.

   vi) Penyediaan bahan bacaan dan peralatan undang-undangan, dengan anggaran pokok

Rp. 1.800.000 setelah mengalami perubahan anggaran sub kegiatan tersebut tidak terjadi penambahan atau pengurangan anggaran.

vii) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan anggaran pokok Rp. 14.714.000 setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 10.062.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 4.652.000.

5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan anggaran pokok Rp. 7.700.000 setelah mengalami perubahan anggaran kegiatan tersebut tidak terjadi penambahan atauopun pengurangan anggaran. Rincian belanja dapat diliahat pada 1 sub kegiatan yaitu:
   i) Pengadaan mebel, dengangan anggaran pokok Rp. 7.700.000 setelah mengalami perubahan anggaran sub kegiatan ini tiding mengalami penambahan atau pengurangan anggaran.
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran pokok Rp. 88.914.400 kegiatan tersebut tidak terjadi penambahan atau pengurangan anggaran setelah mengalami perubahan anggaran, dapat dilihat pada 2 sub kegiatan yaitu:
   i) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik, dengangan anggaran pokok Rp. 6.164.400 sub kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan anggaran.
   ii) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan anggaran pokok Rp. 82.750.000 sub kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan anggaran.
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran pokok Rp. 47.430.000 kegiatan tersebut tidak mengalami penambahan atau pengurangan anggaran setelah terjadinya perubahan anggaran, dapat dilihat pada 2 sub kegiatan yaitu:
   i) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabata, dengan anggaran pokok Rp. 36.430.000 sub kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan anggaran Dimana terdapat kendaraan dinas 3 unit.
   ii) Pemeliharaan/rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan anggaran pokok Rp. 11.000.000 sub kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan anggaran.

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public, dengan anggaran pokok Rp. 5.404.000 setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 4.704.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 700.000. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa kegiatan pada program ini mengalami pengurangan anggaran. Pada Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran Adalah
   1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan, dengan anggaran pokok Rp. 1.989.000 kegiatan tersebut tidak mengalami penambahan atau pengurangan anggaran, dapat di lihat pada 1 sub kegiatan yaitu:
      i) Peniingkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan, dengan anggaran pokok Rp. 1.989.000 sub kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan anggaran.
   2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat

daerah yang ada di kecamatan, dengan anggaran pokok Rp. 3.415.000 setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.715.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 430.000. pada kegiatan ini terjadi penguranag pada 2 sub kegiatan yaitu:

i) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan, dengan anggaran pokok Rp. 1.515.000 setelah mengalami perubahan anggaran menjadi rp. 815.000, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 700.000.
ii) Fasilitas percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, dengan anggaran pokok Rp. 1.900.000 sub kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan anggaran.

3. Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan, dengan anggaran pokok Rp. 154.061.697 setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 162.497.568, terjadi penambahan anggaran sebesar 61.738.303. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa kegiatan pada program ini mengalami pengurangan dan penambahan anggaran yaitu:
    1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dengan anggaran pokok Rp. 0 dimana kegiatan tersebut tidak terlaksana pada kecamatan mangarabombang dapat dilihat pada 1 sub kegiatan yaitu:
        i) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan, dengan anggaran pokok Rp. 0 dimana sub kegiatan ini tidak terlaksana pembedayaan Masyarakat di wilayah kecamatan.
    2. Kegiatan pemberdayaan kelurahan, dengan anggaran pokok Rp. 147.582.697 setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 159.472.568, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 11. 889.87. hal ini terjadi karena terdapat beberapa kegiatan pada program ini mengalami penambahan dan pengurangan anggaran. Dapat dilihat pada 2 sub kegiatan yaitu:
        i) Pembangunan sarana dan prasarana keluraha, dengan anggaran pokok Rp. 106.643.968 setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 116.393.968, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 9.750.000.
        ii) Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, dengan anggaran pokok Rp. 52.828.600 setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 43.078.600, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 9.750.000.
    3. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan, dengan anggaran pokok Rp. 1.650.000 kegiatan tersebut tidak mengalami penambahan atau pengurangan anggaran setelah adanya perubahan anggaran, dapat dilihat pada 2 sub kegiatan yaitu:
        i) Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan, dengan anggaran pokok Rp. 1.650.000 sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran.
        ii) Fasilitas pengembangan usaha ekonomi Masyarakat Dimana kegiatan ini tidak terlaksanan karena tidak adanya anggaran pokok yang tersedia.
    4. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan anggaran pokok Rp. 1.375.000, dimana kegiatan ini tidak mengalammi perubahan anggaran dapat dilihat pada 1 sub kegiatan yaitu:
        i) Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni

serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah, dengan anggaran pokok Rp. 1.375.000, pada sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran.

4. program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, dengan anggaran pokok Rp. 2.200.000, program ini tidak mengalami perubahan anggaran. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa kegiatan pada program ini tidak mengalami pengurangan dan penambahan anggaran. Dapat dilihat pada 2 kegiatan yaitu:
    1. Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dengan anggaran pokok Rp. 2.200.000, kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran baik penambahan atau pengurangan anggaran, dapat dilihat pada 1 sub kegiatan yaitu:
        i) Sinergitas dengan kepolisian negara repoblik Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan, dengan anggaran pokok Rp. 2.200.000. sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran
    2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dimana kegiatan tidak terlaksanan disebabkan tidak adanya anggaran, dapat di lihat pada 1 sub kegiatan yaitu:
        i) Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara repoblik Indonesia, sub kegiatan ini belum terlaksana disebabkan tidak adanya anggaran.

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Mangarabombang Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mangrabombang Kabupaten Takalar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mangrabombang, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi, Lurah dan seluruh staf Kecamatan Mangrabombang Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Mangadu,
Camat Mangarabombang



SUDIRMAN, S.Sos

Pangkat : Pembina
NIP.19840824 200502 1 001



PERUBAHAN
RENCANA KERJA 2025
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Perubahan Renja ini merupakan penyesuaian atas dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya, sebagai tindak lanjut dari perubahan kebijakan, kondisi strategis, dan dinamika pembangunan daerah yang terjadi dalam tahun berjalan. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025–2029 dan tetap mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, serta akuntabel.

Perubahan Renja ini memuat penyesuaian target kinerja, program dan kegiatan prioritas, serta kebutuhan anggaran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program Dinas Perikanan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara efektif.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik melalui saran, masukan, maupun keterlibatan aktif dalam berbagai tahapan perencanaan.

Akhirnya, kami berharap dokumen Perubahan Renja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Takalar demi terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Takalar, 2025
Kepala Dinas,

H. BASO, S.Pd., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19661231 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iii
DAFTAR GAMBAR..... iv
BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1. Latar Belakang..... I-1
1.2. Landasan Hukum..... I-3
1.3. Maksud dan Tujuan..... I-5
1.4. Sistematika Penulisan..... I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025..... II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025..... II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar (Indikator Kinerja Utama)..... II-12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR..... III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar..... III-3
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR..... IV-1
4.1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-1
4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar..... IV-5
BAB V PENUTUP..... V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025…… II-2

Tabel II.2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan…… II-8

Tabel II.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I…… II-9

Tabel II.4 Rekapitulasi Capaian Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025…… II-10

Tabel II.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025…… II-11

Tabel II.6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025…… II-12

Tabel II.7 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Takalar…… II-14

Tabel III.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Takalar…… III-5

Tabel IV.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah…… IV-2

Tabel IV.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025…… IV-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Keterkaitan antara Renja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya…… I-2

Gambar II.1 Prioritas Nasional Tahun 2025…… III-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Renja juga merupakan instrumen penting dalam proses integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, perkembangan kebijakan nasional maupun daerah, serta adanya perubahan asumsi dan prioritas dalam pelaksanaan program, maka diperlukan penyesuaian terhadap dokumen Renja yang telah disusun. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya, perubahan alokasi anggaran, serta kebutuhan mendesak yang muncul di luar rencana awal.

Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perikanan, memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan nelayan, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk respons adaptif terhadap kondisi aktual dan kebijakan terbaru, agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya pelaku utama sektor perikanan. Dengan demikian, Perubahan Renja Tahun 2025 ini diharapkan mampu memberikan arah dan kejelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Gambar I.1

Keterkaitan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

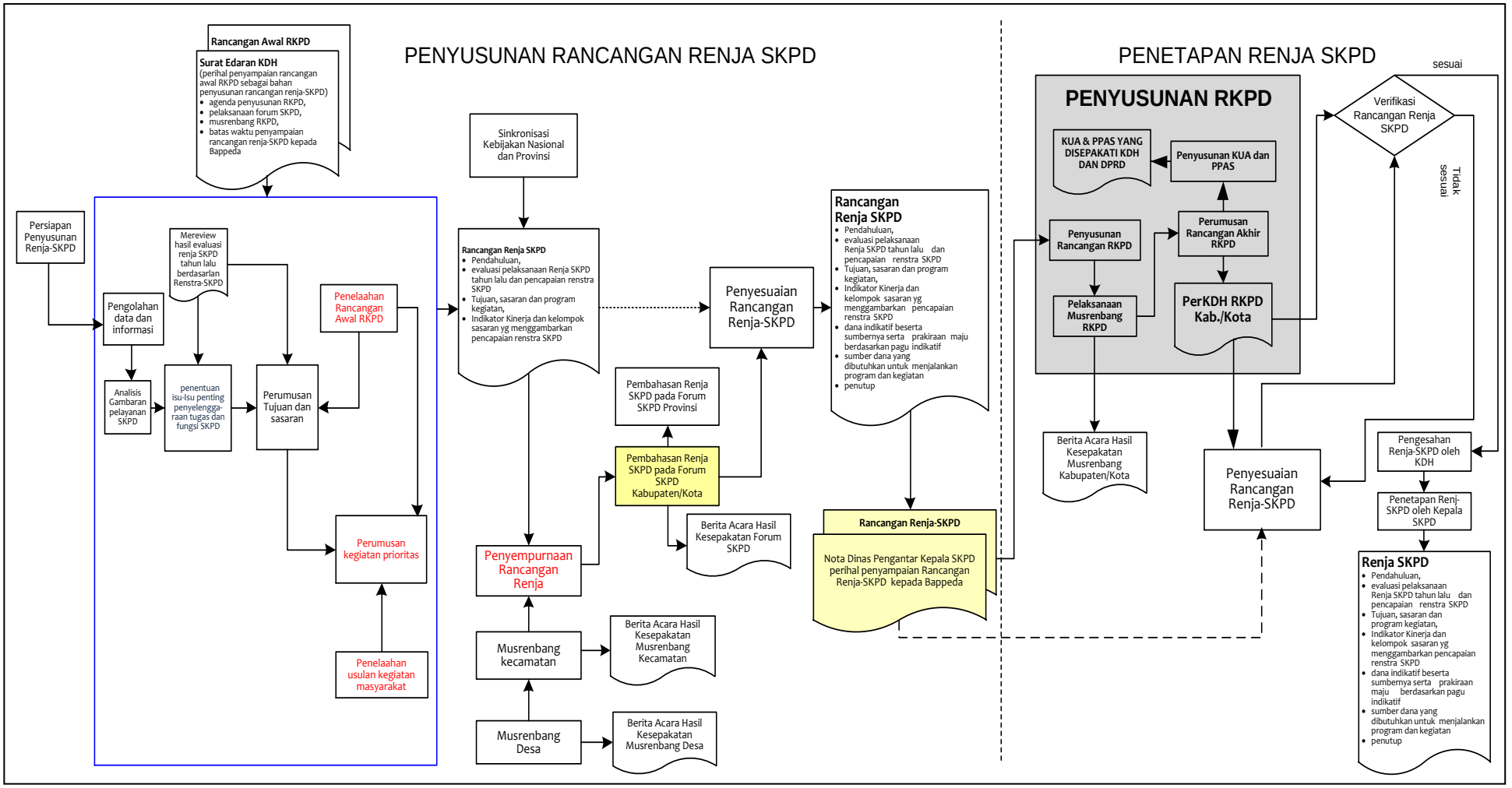

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Takalar. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada Rencana Strategis.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi Rencana Kerja (Renja) periode triwulan I tahun 2025. Mengingat Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sangat penting bagi pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar secara khusus dan pemerintah daerah secara umum, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan forum Dinas Perikanan Kabupaten Takalar rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik IndonesianTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Takalar Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;

14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar yaitu:

1. Menyesuaikan perencanaan program dan kegiatan tahun berjalan dengan perkembangan aktual yang terjadi, baik dari aspek kebijakan, kebutuhan daerah, maupun ketersediaan sumber daya.
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya, termasuk kendala yang ditemui dan pencapaian kinerja yang belum optimal.
3. Mengakomodasi adanya perubahan prioritas nasional, provinsi, dan/atau hasil musrenbang, serta kondisi darurat atau luar biasa (force majeure) seperti bencana alam, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan.
4. Menyelaraskan kembali rencana kerja perangkat daerah dengan Pagu Indikatif/APBD Perubahan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar yaitu:

1. Menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dengan kondisi aktual, agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
2. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja tahunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.
3. Memastikan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, sebagai bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Menyediakan dasar bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan APBD Perubahan, sehingga seluruh proses perencanaan dan penganggaran tetap sinergis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR TRIWULAN I TAHUN 2025. Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sampai triwulan I tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR. Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Takalar.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025, Bab ini memuat tentang daftar program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, serta memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten Takalar.

BAB V. PENUTUP. Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Renja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pembangunan daerah, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan, senantiasa berupaya memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renja dilaksanakan sesuai dengan sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran awal mengenai capaian kinerja Dinas Perikanan baik dari sisi kinerja maupun keuangan. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan di triwulan-triwulan berikutnya, guna memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan sektor perikanan dapat mendukung pencapaian program pembangunan daerah Kabupaten Takalar secara keseluruhan. Hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Takalar
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*		*9*	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		**100%**	**15.152.248.578**	**80,38%**	**5.706.154.800**	**100%**	**6.526.814.256**	**22,18%**	**920.527.280**	**22,18%**	**920.527.280**	**22,18%**	**14,10%**
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**100%**	**15.152.248.578**	**80,38%**	**5.706.154.800**	**100%**	**6.526.814.256**	**22,18%**	**920.527.280**	**22,18%**	**920.527.280**	**22,18%**	**14,10%**
3	**25**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**6.294.172.423**	**99%**	**4.387.980.055**	**100%**	**4.620.813.996**	**10%**	**875.096.050**	**10%**	**875.096.050**	**9,98%**	**18,94%**
3	**25**	**1**	**2.01**		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU**	**100%**	**89.816.780**	**100%**	**5.037.900**	**100%**	**4.000.000**	**0%**	**652.410**	**0%**	**652.410**	**0,00%**	**16,31%**
3	25	1	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	2	11.539.830	2	2.037.900	2	1.000.000	0	163.350	0	163.350	0%	16%
3	25	1	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun	2	11.539.830	0	0	1	500.000	0	81.510	0	81.510	0%	16%
3	25	1	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Perubahan yang Disusun	1	6.319.850	0	0	1	500.000	0	81.510	0	81.510	0%	16%
3	25	1	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Disusun	1	6.619.960	0	0	1	500.000	0	81.510	0	81.510	0%	16%
3	25	1	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun	1	6.319.850	0	0	1	500.000	0	81.510	0	81.510	0%	16%
3	25	1	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang Disusun	1	6.619.960	1	1.500.000	1	500.000	0	81.510	0	81.510	0%	16%
3	25	1	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	40.857.500	1	1.500.000	12	500.000	0	81.510	0	81.510	0%	16%
3	**25**	**1**	**2.02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU**	**100%**	**5.092.162.678**	**94%**	**4.017.984.129**	**100%**	**4.380.506.256**	**15%**	**858.150.420**	**15%**	**858.150.420**	**14,67%**	**19,59%**
3	25	1	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji	720	3.903.444.198	589	2.956.264.864	588	3.232.523.340	168	857.661.360	168	857.661.360	29%	27%
						Jumlah Pegawai yang menerima TPP	720	1.158.719.265	462	1.058.719.265	504	1.134.242.916	0	0	0	0	0%	0%
						Jumlah Pegawai yang menerima Honor Pengelola Keuangan	0	0	0	0	36	12.240.000	0	0	0	0	0%	0%
3	25	1	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	12	9.999.695	12	1.500.000	12	500.000	0	163.020	0	163.020	0%	33%

3	25	1	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	9.999.780	1	1.500.000	1	500.000	0	163.020	0	163.020	0%	33%
3	25	1	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Semsteran	4	9.999.740	0	0	4	500.000	0	163.020	0	163.020	0%	33%
3	**25**	**1**	**2.03**		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE KEGIATAN ADMINISTRASI BMD**	**100%**	**32.267.320**	**100%**	**1.500.000**	**100%**	**1.284.840**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	25	1	2.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Yang Disusun	1	7.680.500	0	0	1	284.840	0	0	0	0	0%	0%
3	25	1	2.03	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12.301.470	12	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25	1	2.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekon Barang Milik Daerah yang Disusun	2	7.423.100	0	0	2	500.000	0	0	0	0	0%	0%
3	25	1	2.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	12	4.862.250	0	0	12	500.000	0	0	0	0	0%	0%
3	**25**	**1**	**2.04**		**ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PENYUSUNAN LAPORAN PAD YANG DIKELOLA**	**100%**	**59.596.520**	**100%**	**17.865.000**	**100%**	**1.000.000**	**0%**	**163.020**	**0%**	**163.020**	**0,00%**	**16,30%**
3	25	1	2.04	005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Penyediuaan Pengolahan Data Retribusi Daerah	12	29.798.260	0	0	12	500.000	0	81.510	0	81.510	0%	16%
3	25	1	2.04	007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	29.798.260	12	17.865.000	12	500.000	0	81.510	0	81.510	0%	16%
3	**25**	**1**	**2.05**		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**97.334.025**	**100%**	**1.500.000**	**100%**	**2.000.000**	**8%**	**326.700**	**8%**	**326.700**	**8,33%**	**16,34%**
3	25	1	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan Administrasi Kepegawaian yang dikelola	60	30.000.000	60	1.500.000	12	1.000.000	1	163.350	1	163.350	8%	16%
3	25	1	2.05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	20.724.025	0	0	12	1.000.000	1	163.350	1	163.350	8%	16%
3	25	1	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan dan pelatihan	2	46.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	**25**	**1**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**478.383.100**	**98%**	**206.897.267**	**100%**	**127.102.000**	**20%**	**9.084.400**	**20%**	**9.084.400**	**20,45%**	**7,15%**
3	25	1	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Instalasi Yang disediakan	1	7.500.000	-	-	1	855.000	-	326.000	-	326.000	0%	38%
3	25	1	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor Yang Disediakan	1	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	25	1	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1	5.206.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	25	1	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	1300	10.500.000	1300	1.506.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	25	1	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan	12	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	25	1	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	75	237.845.000	75	3.667.000	75	2.822.000	18	698.400	18	698.400	24%	25%
3	25	1	2.06	009	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	7.500.000	271	201.724.267	12	123.425.000	-	8.060.000	-	8.060.000	0%	7%
3	**25**	**1**	**2.07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**93.666.050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3	25	1	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	93.666.050	0	-	0	0						

3	**25**	**1**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**100%**	**240.000.000**	**1**	**114.600.859**	**100%**	**78.488.900**	**13%**	**419.100**	**13%**	**419.100**	**12,50%**	**0,53%**
3	25	1	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	48.000.000	12	39.000.859	12	2.188.900	3	419.100	3	419.100	25%	19%
3	25	1	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	192.000.000	12	75.600.000	12	76.300.000	-	-	-	-	0%	0%
3	**25**	**1**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG LAYAK FUNGSI**	**100%**	**204.612.000**	**100%**	**22.594.900**	**100%**	**26.432.000**	**24%**	**6.300.000**	**24%**	**6.300.000**	**23,86%**	**23,83%**
3	25	1	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	24	181.029.000	0	16.299.000	24	26.432.000	6	6.300.000	6	6.300.000	25%	24%
						Jumlah BBM (Pertamax/Solar dan Oli)	8961		806		1.648		393		393		24%	
3	25	01	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	0	-	4	1.420.000	0	0						
3	25	01	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	5.400.000	2	4.875.900	0	0						
3	25	01	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	18.183.000	0	-	0	0						
3	**25**	**3**			**PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**100%**	**7.108.077.000**	**83%**	**1.037.369.700**	**100%**	**1.586.000.200**	**7%**	**38.650.430**	**7%**	**38.650.430**	**7,30%**	**2,44%**
3	**25**	**3**	**2.01**		**PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (Satu) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**7.008.077.000**	**48%**	**914.642.700**	**100%**	**1.375.956.430**	**7%**	**3.150.430**	**7%**	**3.150.430**	**6,90%**	**0,23%**
3	25	3	2.01	001	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12	50.000.000	1	1.227.700	12	8.362.430	2	3.150.430	2	3.150.430	17%	38%
3	25	3	2.01	002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap	17	352.050.000	13	913.415.000	17	1.367.594.000	-	-	-	-	0%	0%
3	25	3	2.01	003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Ketersediaan sarana Penangkapan Ikan	57	6.606.027.000	0	-	0	0						
3	**25**	**3**	**2.02**		**PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**117.727.000**	**100%**	**205.043.630**	**15%**	**35.500.000**	**15%**	**35.500.000**	**15,00%**	**17,31%**
3	25	3	2.02	001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20	50.000.000	20	117.727.000	20	205.043.630	3	35.500.000	3	35.500.000	15%	17%
3	**25**	**3**	**2.03**		**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPi)**	**Persentase Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**5.000.000**	**100%**	**5.000.140**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
3	25	3	2.03	002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terselenggaranya Pelayanan Pelelangan Ikan	4 TPI	50.000.000	3	5.000.000	4	5.000.140	-	-	-	-	0%	0%
3	**25**	**4**			**PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**100%**	**1.300.000.000**	**70,83%**	**87.705.745**	**100,00%**	**310.000.060**	**21,38%**	**3.274.200**	**21,38%**	**3.274.200**	**21,38%**	**1,06%**
3	**25**	**4**	**2.02**		**PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL**	**Persentase Cakupan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**100%**	**200.000.000**	**100%**	**78.704.845**	**100%**	**5.000.020**	**24%**	**1.330.200**	**24%**	**1.330.200**	**24,00%**	**26,60%**

3	25	4	2.02	004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	35	200.000.000	15	78.704.845	25	5.000.020	6	1.330.200	6	1.330.200	24%	27%
3	**25**	**4**	**2.04**		**PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN**	**Persentase Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**100%**	**1.100.000.000**	**42%**	**9.000.900**	**100%**	**305.000.040**	**19%**	**1.944.000**	**19%**	**1.944.000**	**18,75%**	**0,64%**
3	25	4	2.04	001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	37.258.000	4	4.246.900	12	5.100.040	3	1.944.000	3	1.944.000	25%	38%
3	25	4	2.04	002	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Dearah kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	562.742.000	1	4.754.000	4	299.900.000	-	-	-	-	0%	0%
3	25	4	2.04	003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan sarana Pembudidayaan Ikan	8	500.000.000	0	-	0	0						
3	**25**	**6**			**PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase poklahsar yang meningkat kelasnya**	**100%**	**449.999.155**	**69%**	**193.099.300**	**100%**	**10.000.000**	**50%**	**3.506.600**	**50%**	**3.506.600**	**50,07%**	**35,07%**
3	**25**	**6**	**2.01**		**PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL**	**Persentase Cakupan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**100%**	**49.999.489**	**100%**	**3.382.100**	**100%**	**2.424.200**	**100%**	**2.040.000**	**100%**	**2.040.000**	**100,00%**	**84,15%**
3	25	6	2.01	005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan	12	49.999.489	3	3.382.100	12	2.424.200	12	2.040.000	12	2.040.000	100%	84%
3	**25**	**6**	**2.02**		**PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL**	**Persentase Cakupan Kegiatan Pembinaan mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**100%**	**249.999.926**	**90%**	**182.916.800**	**100%**	**2.940.000**	**50%**	**1.100.000**	**50%**	**1.100.000**	**50,00%**	**37,41%**
3	25	6	2.02	001	Pelaksanaan Bimbingan dan PenerapanPersyaratanatauStandartpadaUsaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	JumlahKelompok UMKM yang Dibina dan Dibimbing	10	249.999.926	9	182.916.800	0	0						
3	25	6	2.02	002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	0	-	0	-	10	2.940.000	5	1.100.000	5	1.100.000	50%	37%
3	**25**	**6**	**2.03**		**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota**	**100%**	**149.999.740**	**17%**	**6.800.400**	**100%**	**4.635.800**	**0%**	**366.600**	**0%**	**366.600**	**0,20%**	**7,91%**
3	25	6	2.03	001	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1500	100.000.000	1	860.000	1.000	1.689.200	-	-	-	-	0%	0%
3	25	6	2.03	002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20	49.999.740	0	5.940.400	20	2.946.600	2	366.600	2	366.600	10%	12%

Sumber: *Data target dan realisasi capaian laporan monitoring evaluasi Triwulan I Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Takalar*

Tabel di atas memuat hasil evaluasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar periode triwulan I tahun 2025. Dari tabel tersebut, dapat dijabarkan hasil evaluasi realisasi program dan kegiatan yang belum mencapai target pada periode triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target anggaran Rp. 4.620.813.996, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 875.096.050 dan Capaian Kinerja adalah 10,00% yang terdiri atas:

a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target anggaran Rp. 4.000.000, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 652.410 dan capaian kinerja masih 0,00%.
b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan target anggaran Rp. 4.380.506.256, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 858.150.420 dan capaian kinerja 15,00%.
c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan target anggaran Rp. 1.284.840, belum ada realisasi anggaran sehingga capaian kinerja masih 0,00%.
d. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan target anggaran Rp. 1.000.000, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 163.020 dan capaian kinerja masih 0,00%
e. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target anggaran Rp. 2.000.000, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 326.700 dan capaian kinerja 8,00%.
f. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan target anggaran Rp. 127.102.000, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 9.084.400 dan capaian kinerja 20,00%.
g. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target anggaran Rp. 78.488.900, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 419.100 dan capaian kinerja 13,00%.
h. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target anggaran Rp. 26.432.000, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 6.300.000 dan capaian kinerja 24,00%.

2. Program pengelolaan perikanan tangkap dengan target anggaran 1.586.000.200, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 38.650.430 dan capaian kinerja 7,00% yang terdiri atas:

a. Kegiatan pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran Rp.

1.375.956.430, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 3.150.430 dan capaian kinerja 7,00%.

b. Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota dengan target anggaran Rp. 205.043.630, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 35.500.000 dan capaian kinerja 15,00%.

c. Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dengan target anggaran Rp. 5.000.140, belum ada realisasi sehingga capaian kinerja 0,00%.

3. Program pengelolaan perikanan budidaya dengan target anggaran Rp. 310.000.000, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 3.274.200 dan capaian kinerja 21,38% yang terdiri atas:

a. Kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan dengan target anggaran Rp. 5.000.020, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 1.330.200 dan capaian kinerja 24,00%.

b. Kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan dengan target anggaran Rp. 305.000.020, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 1.994.000 dan capaian kinerja 19,00%.

Ketiga program tersebut, belum mencapai target pada periode triwulan I karena alokasi dan proyeksi anggaran kas yang belum sesuai waktu dan kebutuhan.

Namun demikian, selain dari ketiga program tersebut terdapat program yang mencapai target pada triwulan I yaitu:

1. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan dengan target anggaran Rp. 10.000.000, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 3.506.600 dan capaian kinerja 50,00% yang terdiri atas:

a. Kegiatan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil dengan target anggaran Rp. 2.424.200, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 2.040.000 dan capaian kinerja 100,00%.

b. Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasarana skala mikro dan kecil dengan target anggaran Rp. 2.940.000, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000 dan capaian kinerja 50,00%.

c. Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target anggaran Rp. 4.635.800, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 366.600 dan capaian kinerja masih 0,00%.

Program ini sudah mencapai target pada periode triwulan I karena pemberian proyeksi dan alokasi anggaran kas yang sudah sesuai waktu dan kebutuhan.

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Ada Dalam APBD Tahun 2025

Rekapitulasi jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 mencerminkan komitmen dalam mendukung sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Dalam APBD Tahun 2025, Dinas Perikanan mengalokasikan sejumlah program strategis yang terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan, memberdayakan nelayan dan pembudidaya, serta memperkuat infrastruktur dan kelembagaan sektor perikanan. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Ada Dalam APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Yang Ada Dalam APBD 2025

APBD 2025							
No.	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1.	Dinas Perikanan	4	16	35	4	16	38
TOTAL		**4**	**16**	**35**	**4**	**16**	**38**

Sumber: *Data dari laporan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025*

Dari tabel di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar melaksanakan 4 program dengan 4 indikator program, 16 kegiatan dengan 16 indikator kegiatan dan 35 indikator kegiatan dengan 38 indikator sub kegiatan.

2.1.2. Evaluasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

Evaluasi anggaran pelaksanaan kegiatan pada APBD Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 hingga Triwulan I bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran dalam mendukung program dan kegiatan strategis sektor perikanan. Hingga akhir Triwulan I, capaian realisasi anggaran menunjukkan tren pelaksanaan yang perlu mendapatkan perhatian, baik dari sisi penyerapan anggaran maupun output kegiatan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan, percepatan pelaksanaan program, serta optimalisasi penggunaan anggaran pada triwulan-triwulan berikutnya. Evaluasi anggaran pelaksanaan kegiatan

pada APBD Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 hingga Triwulan I, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No.	Perangkat Daerah	Pagu APBD Rp.	Realisasi s/d Triwulan I Rp.	Persentase	
				Fisik	Keuangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Dinas Perikanan	6.526.814.256	920.527.280	22,18%	14,10%
Total		**6.526.814.256**	**1.526.787.021**	**22,18%**	**14,10%**

Sumber: *Data laporan moitoring dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2025*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pagu anggaran pokok Dinas Perikanan Kabupaten Takalar tahun 2025 sebesar Rp. 6.526.814.256, sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp. 920.527.280 atau 14,10% dan capaian kinerja adalah 22,18%.

2.1.2.1. Evaluasi Capaian Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar telah melaksanakan evaluasi terhadap capaian pendanaan yang dialokasikan berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana realisasi anggaran sejalan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Secara umum, capaian pendanaan menunjukkan tren positif pada beberapa program prioritas meskipun terdapat beberapa sub kegiatan yang masih mengalami hambatan dalam penyerapan anggaran. Faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut antara lain adalah kesiapan administrasi, proses pengadaan, serta kondisi teknis di lapangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan kinerja pelaksanaan program pada triwulan berikutnya, guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Takalar. Evaluasi Capaian Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
Rekapitulasi Capaian Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	Dinas Perikanan	4	2	1	1	16	7	5	4	35	9	14	12
TOTAL		4	2	1	1	16	7	5	4	35	9	14	12

Sumber: *Data dari laporan monitoring dan evaluasi Triwulan I Tahun 2025*

Berdasarkan data rekapitulasi capaian pendanaan triwulan I tahun 2025 pada tabel di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar melaksanakan 4 program, 16 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Berdasarkan capaian pendanaan program, terdapat 2 program berada pada tingkat capaian 0–10%, 1 program berada pada tingkat >10–20%, dan 1 program lainnya memiliki capaian lebih dari 20%.

Untuk level kegiatan, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar melaksanakan 16 kegiatan, dengan rincian capaian yaitu 7 kegiatan dengan capaian 0–10%, 5 kegiatan dengan capaian >10–20%, dan 4 kegiatan dengan capaian >20%.

Sementara itu, pada level sub kegiatan, terdapat 35 sub kegiatan. Dari jumlah tersebut, 9 sub kegiatan memiliki capaian 0–10%, 14 sub kegiatan dengan capaian >10–20%, dan 12 sub kegiatan yang mencapai lebih dari 20%.

Secara keseluruhan, capaian pendanaan pada berbagai level perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, cenderung sebagian besar program dan kegiatan masih berada pada tingkat capaian rendah dan hanya sebagian yang telah mencapai capaian kinerja di atas 20%.

2.1.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar telah melaksanakan evaluasi capaian kinerja berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam realisasi kegiatan. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan progres yang cukup positif, dengan sebagian besar program telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat pencapaian target triwulan

berikutnya. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perbaikan pelaksanaan program pada periode selanjutnya untuk mendukung pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Takalar. Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

NO.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	Dinas Perikanan	4	2	0	2	16	7	4	5	35	25	2	8
TOTAL		**4**	**2**	**0**	**2**	**16**	**7**	**4**	**5**	**35**	**25**	**2**	**8**

Sumber: *Data dari laporan monitoring dan evaluasi Triwulan I Tahun 2025*

Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja triwulan I tahun 2025 pada tabel di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar melaksanakan 4 program. Dari jumlah tersebut, capaian kinerja menunjukkan bahwa 2 program berada pada tingkat capaian 0–10%, tidak ada program pada tingkat capaian >10–20%, dan 2 program berada pada tingkat capaian >20%.

Selanjutnya, terdapat 16 kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Perikanan, dengan rincian tingkat capaian kinerja sebagai berikut 7 kegiatan memiliki capaian 0–10%, 4 kegiatan memiliki capaian >10–20%, dan 5 kegiatan mencapai capaian >20%.

Sementara itu, pada level sub kegiatan, tercatat sebanyak 35 sub kegiatan, dengan distribusi capaian kinerja 25 sub kegiatan dengan capaian 0–10%, 2 sub kegiatan dengan capaian >10–20%, dan 8 sub kegiatan yang mencapai >20%.

2.1.3. Evaluasi Capaian Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi capaian realisasi pendapatan merupakan bagian penting dalam rangka mengukur kinerja pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sebagai salah satu OPD penghasil, memiliki peran dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi perikanan yang ada.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Dinas Perikanan telah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui berbagai sumber pendapatan yaitu retribusi pemanfaatan sarana perikanan

(Tempat Pelelangan Ikan). Evaluasi ini disusun untuk menilai sejauh mana target pendapatan dapat direalisasikan dalam tiga bulan pertama tahun anggaran berjalan.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat pencapaian, hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutan, serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan di sektor perikanan pada triwulan berikutnya dan sepanjang tahun 2025. Evaluasi capaian realisasi pendapatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.6
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1.	Retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan ikan	106.000.000	18.500.000	17,45%
Total		**106.000.000**	**18.500.000**	**17,45%**

Sumber: *Data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025*

Pada tahun berjalan, target penerimaan dari retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan ikan ditetapkan sebesar Rp106.000.000. Namun, hingga saat ini, realisasi yang berhasil dicapai baru sebesar Rp18.500.000, atau sekitar 17,45% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian masih jauh dari yang direncanakan dan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan penerimaan dari sumber retribusi tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dilakukan dengan membandingkan target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023–2026 dengan Renstra tahun 2025–2029. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan konsistensi kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam sektor perikanan.

Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan strategi dan prioritas kinerja yang tercermin dari penyesuaian target IKU di periode 2025–2029. Dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya (2023–2026), beberapa indikator menunjukkan peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Namun, terdapat pula indikator yang perlu mendapat perhatian lebih, karena capaian sebelumnya belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.

Secara umum, analisis ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap pencapaian kinerja dan menjadi dasar penting dalam perencanaan peningkatan pelayanan pada periode mendatang, agar Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dapat lebih responsif, efisien, dan berkelanjutan dalam menjalankan fungsinya. Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7
Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Triwulan I	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	11,30%	6,00%	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	6,00%	6,00%	6,00%	7,01%	6,00%	6,00%	
2.	Persentase Peningkatan produksi Perikanan Budidaya	10,80%	0,40%	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,00%	3,00%	3,00%	3,46%	3,00%	3,00%	
3.	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	8,20%	4,90%	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4,97%	4,97%	4,97%	5,84%	4,97%	4,97%	
4.	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan	B	B	Nilai SAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	68,58	69,10	69,45	-	69,10	69,45	
5.	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	B	B	Persentase Literasi Digital Pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	90,48%	92,86%	95,24%	88,10%	92,86%	95,24%	
6.				Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	100%	100%	100%	17,45%	100%	100%	
7.				Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	4,95	5,66	6,25	17,35%	5,66	6,25	

Sumber: *Data dari target dan capaian realisasi kinerja Renstra Tahun 2023-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.*

Berdasarkan target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023–2026, Dinas Perikanan telah menetapkan sejumlah indikator kinerja utama untuk tahun 2024. Dari lima indikator yang ditetapkan, tiga indikator berkaitan dengan peningkatan produksi di sektor perikanan, sementara dua lainnya berkaitan dengan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi. Dari tabel tersebut, dapat diuraikan bahwa:

1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**,** hanya meningkat sebesar 6% dari target peningkatan 11,3%. Artinya, capaian baru sekitar 53,10% dari target. Ini menunjukkan bahwa target belum tercapai dan perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi atau kendala yang terjadi di lapangan.
2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, menunjukkan capaian terendah. Dari target sebesar 10,80%, realisasi yang dicapai hanya sebesar 0,40%. Capaian sangat jauh dari target (hanya sekitar 3,7% dari target). Ini menunjukkan adanya kendala besar, bisa dari sisi teknis (misal: gagal panen, penyakit ikan), cuaca, atau kurangnya dukungan sarana/prasarana.
3. Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan, ditargetkan sebesar 8,20%, dengan realisasi sebesar 4,90%. Walaupun belum mencapai target, capaian ini lebih tinggi dibanding indikator lainnya dalam sektor produksi, dan mencerminkan adanya potensi yang bisa lebih dimaksimalkan di subsektor pengolahan hasil perikanan.
4. Untuk indikator tata kelola birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan menunjukkan nilai “B”, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa kinerja birokrasi Dinas Perikanan telah berada pada level yang baik.
5. Begitu pula dengan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar yang mencapai predikat “B” dengan nilai 68,58 sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaporan kinerja telah berjalan sesuai mekanisme yang diharapkan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan relevansi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, terdapat beberapa penyesuaian indikator kinerja utama dari tahun 2024 ke tahun 2025. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan sektor perikanan serta fokus strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas, kapasitas pengelolaan, dan kualitas layanan publik.

Pada tahun 2024, indikator utama lebih menitikberatkan pada peningkatan produksi di sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan secara kuantitatif, serta pengukuran kinerja birokrasi melalui Indeks Reformasi Birokrasi dan nilai SAKIP. Sementara pada tahun 2025, indikator kinerja mengalami perluasan dan pendalaman dengan menambahkan aspek peningkatan kapasitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Selain itu, terdapat penambahan indikator yang fokus pada digitalisasi dengan mengukur persentase literasi digital di lingkungan Dinas Perikanan, sebagai respons terhadap pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selanjutnya, indikator terkait pencapaian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perikanan juga dimasukkan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Dengan demikian, perubahan indikator kinerja utama ini mencerminkan komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Takalar untuk tidak hanya meningkatkan kuantitas produksi, tetapi juga memperkuat aspek kualitas pengelolaan, inovasi digital, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Dinas Perikanan Kabupaten Takalar telah menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 untuk mendorong peningkatan sektor perikanan, baik dari sisi produksi, pengolahan, pemasaran, hingga tata kelola kelembagaan. Evaluasi terhadap capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator masih berada di bawah target tahunan yang ditetapkan, mengindikasikan perlunya percepatan dan optimalisasi pelaksanaan program di triwulan berikutnya. Pada tabel II.6, capaian dari perubahan indikator kinerja utama periode triwulan I pada tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap;
   Pada Triwulan I Tahun 2024, produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 5,56 ton. Sementara pada Triwulan I Tahun 2025 meningkat menjadi 5,95 ton. Hal ini menunjukkan adanya perbandingan peningkatan produksi sebesar 0,39 ton atau setara dengan realisasi capaian sebesar 7,01%, yang juga melampaui target renstra tahun 2025 sebesar 6,00%.
2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya;
   Realisasi produksi perikanan budidaya pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 195.270,18 ton, meningkat menjadi 202.018,40 ton pada Triwulan I Tahun 2025. Perbandingan peningkatan tersebut setara dengan 6.748,22 ton, atau mencapai 3,46%, melebihi target yang ditetapkan dalam renstra tahun 2025 sebesar 3,00%.
3. Persentase Peningkatan Kapasitas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
   Kapasitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mengalami perbandingan peningkatan dari 75,19 ton pada Triwulan I Tahun 2024 menjadi 79,58 ton pada Triwulan I Tahun 2025. Peningkatan sebesar 4,39 ton ini setara dengan capaian 5,84%, melampaui target renstra tahun 2025 sebesar 4,97%.

4. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar;
   Dinas Perikanan Kabupaten Takalar menargetkan nilai SAKIP sebesar 68,58. Namun pada Triwulan I tahun 2025, data realisasi belum tersedia karena belum ada penilaian dari pihak berwenang pada periode triwulan I tahun 2025.
5. Persentase Literasi Digital pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar;
   Jumlah pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Takalar adalah 42 orang. Pada triwulan I tahun 2025, capaian persentase literasi digital (melek digital) mencapai 88,10% (37 orang pegawai) dari target tahun 2025 yaitu 90,48% (38 orang pegawai). Meskipun belum mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Perikanan sudah mulai menguasai literasi digital.
6. Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar;
   Pada periode triwulan I tahun 2025 tercatat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sebesar Rp.18.500.000, dengan realisasi capaian 17,45% dari target tahunan. Rp.106.000.000. Data ini mencerminkan awal yang cukup baik, namun masih memerlukan upaya peningkatan untuk mencapai target tahunan sepenuhnya.
7. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar;
   Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp.15.765.000 pada Triwulan I Tahun 2024 menjadi Rp.18.500.000 pada Triwulan I Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan sebesar Rp.2.735.000, atau realisasi capaian sebesar 17,35%, jauh melampaui target renstra tahun 2025 sebesar 4,95%.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar pada Triwulan I Tahun 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029. Hal ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi mendalam, perbaikan strategi, serta percepatan pelaksanaan program kerja guna mencapai sisa target tahun berjalan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan, serta menyesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional yang terus berkembang, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Perubahan Renja ini didasarkan pada telaahan mendalam terhadap kebijakan-kebijakan strategis nasional yang relevan dengan sektor perikanan, termasuk arahan pembangunan pemerintah pusat, regulasi baru, serta program prioritas nasional yang berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.

Sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah, perikanan memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, serta pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan. Oleh karena itu, penyesuaian Renja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar tahun 2025 dilakukan untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan dengan kebijakan nasional, sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perubahan Renja ini juga merupakan bentuk respon cepat terhadap perubahan konteks eksternal, khususnya kebijakan nasional yang mengatur pemanfaatan, konservasi, dan pengembangan sektor perikanan. Dengan demikian, diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya secara efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan perikanan yang telah ditetapkan secara nasional dan daerah.

3.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

3.1.2 Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar

Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut;

3.1.2.1 Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Gambar III.1
Prioritas Nasional Tahun 2025



RPJMN 2025-2029 mengusung tema pembangunan nasional yang fokus pada percepatan pemulihan ekonomi yang inklusif dan penguatan ketahanan nasional secara berkelanjutan. Tema ini selaras dengan ASTA CITA, delapan cita-cita pembangunan yang menjadi landasan strategis dalam mencapai visi Indonesia maju.

Prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, percepatan transformasi digital, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, peningkatan ketahanan infrastruktur dan konektivitas,

pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan ketahanan sosial budaya, serta pelestarian lingkungan hidup.

Prioritas ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua daerah, termasuk sektor perikanan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional secara efektif dan berkelanjutan. ASTA CITA yang relevan dengan bidang urusan sektor perikanan adalah:

ASTA CITA 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Relevansi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar:

1. Mendukung ekonomi biru (blue economy) yang meliputi perikanan tangkap, budidaya laut, dan industri pengolahan hasil laut.
2. Peluang pengembangan sentra perikanan terpadu di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Dukungan teknologi digital dan logistik untuk peningkatan hasil perikanan.

ASTA CITA 3, Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Relevansi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar:

1. Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan (misalnya pengolahan ikan asin, abon, bakso ikan, dll).
2. Fasilitasi kewirausahaan pemuda dan perempuan di sektor perikanan.
3. Pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan, cold storage, TPI (tempat pelelangan ikan), dan akses transportasi laut.

ASTA CITA 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Relevansi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar:

1. Pengembangan desa pesisir berbasis potensi laut dan perikanan.
2. Program pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
3. Peningkatan akses ke modal, pasar serta teknologi bagi kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025–2029 dan RPJMD Tahun 2025–2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023–2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025–2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 maka dirumuskanlah tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar yaitu:

"Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan".

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Dinas Perikanan Kabupaten Takalar menetapkan sejumlah sasaran strategis yang dirancang untuk menjawab isu-isu utama sektor perikanan serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Sasaran ini difokuskan pada pencapaian hasil yang terukur, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Melalui penetapan sasaran yang tepat, Dinas Perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor perikanan.

Sasaran-sasaran tersebut menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan selama periode pelaksanaan rencana kerja. Adapun sasaran yang ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap;
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya;
3. Meningkatnya kapasitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan
5. Meningkatnya tata kelola kinerja dinas perikanan kabupaten takalar.

Hubungan antara tujuan dan sasaran bersifat hierarkis dan fungsional, di mana pencapaian sasaran secara konsisten dan terukur akan mengarah pada terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025

RENJA POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perikanan**	**13,5**	**Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan**	**Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan**	**13,97%**
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	13,3	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	6,00%
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan produksi Perikanan Budidaya	12,3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,00%
Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	9,52	Meningkatnya Kapasitas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4,97%
Meningkatkan Tata Kelola Dinas Perikanan	**Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan**	**B**	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan	Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	100%
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	B		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	4,95%
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Nilai SAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	68,58
				Persentase Literasi Digital Pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	80%

Sumber: *Rencana Kerja (Renja) Pokok Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029*

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR

4.1. Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program merupakan kumpulan kegiatan yang saling terkait dan mendukung pencapaian tujuan tertentu dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan adalah bagian dari program yang memiliki keluaran spesifik, sedangkan sub kegiatan merupakan unit terkecil dari pelaksanaan anggaran yang langsung menyentuh pada output layanan kepada masyarakat.

Melalui penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terencana dengan baik, diharapkan efektivitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dapat ditingkatkan, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dapat terwujud.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang mendukung program prioritas pembangunan daerah:

PPD. 3 Takalar Unggul Produksi Hasil Laut dan Budidaya Perikanan.

Prioritas Daerah -2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**1.586.000.200**
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		1.375.956.430
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	8.362.430
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.367.594.000
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		205.043.630
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	205.043.630
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		5.000.140
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5.000.140
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**310.000.060**
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		5.000.020
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5.000.020

		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		305.000.040
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.100.040
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.900.000
3.	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**10.000.000**
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		2.424.200
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	2.424.200
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		2.940.000
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2.940.000
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		4.635.800

			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.689.200
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.946.600

Sumber: *Data inputan SIPD Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perikanan Kabupaten Takalar*

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Dalam rangka mewujudkan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar melakukan penyusunan dan penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian ini dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagai tindak lanjut dari dinamika kebutuhan pembangunan, perubahan arah kebijakan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya.

Perubahan ini mencakup penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta pengalokasian ulang pendanaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi capaian sasaran strategis dinas. Dalam konteks ini, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khusunya nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar hasil perikanan melalui pendekatan partisipatif dan terintegrasi.

Dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi daerah, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, dokumen perubahan ini menjadi landasan penting dalam mendukung tercapainya target program prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Bupati Takalar serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan tahun 2025 yang dievaluasi terdiri dari 4 program, 16 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pagu anggaran pendanaan sebesar **Rp.** ***6.526.814.256*** **(*Enam miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*)**. Sumber dana pagu anggaran pendanaan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH). Rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PERIKANAN							6.844.037.398,00	6.526.814.256,00	7.394.591.446,00							6.456.905.272,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.844.037.398,00	6.526.814.256,00	7.394.591.446,00							6.456.905.272,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							6.844.037.398,00	6.526.814.256,00	7.394.591.446,00							6.456.905.272,00	
1	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.681.590.878,00	4.620.813.996,00	4.546.055.256,00							4.904.856.117,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	26.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		89.816.780,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	1.000.000,00	950.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.539.830,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.539.830,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.319.850,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.619.960,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.319.850,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.619.960,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	8.100.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.857.500,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.056.024.940,00	4.380.506.256,00	4.380.506.256,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.092.162.678,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	4.046.557.580,00	4.379.006.256,00	4.379.006.456,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.062.163.463,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	475.250,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.999.695,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.467.360,00	500.000,00	462.710,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.999.780,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	500.000,00	475.250,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.999.740,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	1.284.840,00	1.284.840,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		32.267.320,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	284.840,00	173.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.301.470,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.680.500,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	500.000,00	450.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.423.100,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	500.000,00	450.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.862.250,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		59.596.520,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29.798.260,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29.798.260,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		97.334.025,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	1.000.000,00	950.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	1.000.000,00	925.750,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.724.025,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			46.610.000,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	244.815.500,00	127.102.000,00	127.102.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		158.551.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.542.000,00	855.000,00	855.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.505.500,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.206.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.512.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				75 Laporan	75 Laporan	5.457.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.845.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	228.799.000,00	123.425.000,00	49.337.280,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	89.471.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		93.666.050,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	89.471.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			93.666.050,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	121.772.438,00	78.488.900,00	78.488.900,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		152.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.172.438,00	2.188.900,00	2.188.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.600.000,00	76.300.000,00	76.300.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			92.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	125.407.000,00	26.432.000,00	26.432.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		129.461.744,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	120.182.000,00	26.432.000,00	26.432.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81.029.000,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.225.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.249.744,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.183.000,00	DINAS PERIKANAN
2	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	614.190.000,00	1.586.000.200,00	2.528.764.030,00							302.050.000,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	514.190.000,00	1.375.956.430,00	1.375.956.430,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		202.050.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	39.190.000,00	8.362.430,00	7.780.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																

							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				17 Unit	17 Unit	475.000.000,00	1.367.594.000,00	1.367.594.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			152.050.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	50.000.000,00	205.043.630,00	205.043.630,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																	
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	205.043.630,00	148.474.230,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-			-	-	50.000.000,00	5.000.140,00	5.000.140,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																	
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				4 Layanan	4 Layanan	50.000.000,00	5.000.140,00	1.004.915.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN

3	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	712.258.000,00	310.000.060,00	309.865.460,00						800.000.000,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	-	200.000.000,00	5.000.020,00	5.000.020,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				25 Kelompok	25 Kelompok	200.000.000,00	5.000.020,00	4.865.420,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	-	512.258.000,00	305.000.040,00	305.000.040,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		700.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	37.258.000,00	5.100.040,00	5.100.040,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			37.258.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	475.000.000,00	299.900.000,00	299.900.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			162.742.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	835.998.520,00	10.000.000,00	9.906.700,00							449.999.155,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	-	49.999.330,00	2.424.200,00	2.424.200,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		49.999.489,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																	
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				12 Dokumen	12 Dokumen	49.999.330,00	2.424.200,00	2.424.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			49.999.489,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	-	249.999.400,00	2.940.000,00	2.940.000,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		249.999.926,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	249.999.400,00	2.940.000,00	2.846.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			249.999.926,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	535.999.790,00	4.635.800,00	4.635.800,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		149.999.740,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.000 Ton	1.000 Ton	99.999.740,00	1.689.200,00	1.689.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	436.000.050,00	2.946.600,00	2.946.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			49.999.740,00	DINAS PERIKANAN
												J U M L A H	**6.844.037.398,00**	**6.526.814.256,00**	**7.394.591.446,00**							**6.456.905.272,00**	

Sumber: *Data inputan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada aplikasi SIPD*

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan pendanaan karena adanya penambahan maupun pengurangan anggaran. Secara umum, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan tidak mengalami perubahan dari Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar ke hasil analisis kebutuhan. Namun demikian, terdapat penyesuaian anggaran total pada level program, kegiatan dan sub kegiatan.

1. Level Program

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengalami perubahan dari anggaran pokok Rp. 4.620.813.996 menjadi Rp. 4.551.930.586. Pada program ini terjadi pengurangan anggran sebesar Rp. 68.883.410. Perubahan anggaran tersebut terjadi karena adanya efisiensi/pengurangan anggaran.
b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap mengalami kenaikan signifikan dari Rp 1.586.000.200 menjadi Rp 2.529.430.800, menyesuaikan dengan peningkatan kebutuhan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan nelayan.

2. Level Kegiatan

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami penurunan anggaran dari Rp 127.102.000 menjadi Rp 58.218.590. Perubahan ini terjadi karena adanya efisiensi (penguranagan) anggaran belanja.
b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan anggaran dari Rp 205.043.630 menjadi Rp 148.474.230. Hal ini juga terjadi karena adanya efisiensi (penguranagan) anggaran belanja.
c. Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) mengalami perubahan dari anggaran pokok Rp. 5.000.140 menjadi Rp. 1.005.000.140.

3. Level Sub Kegiatan

a. Sub Kegiatan penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mengalami perubahan dari anggaran pokok Rp. 123.425.000 menjadi Rp. 54.541.590. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 68.883.410.
b. Sub Kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil mengalami perubahan dari anggaran pokok Rp. 205.043.630 menjadi Rp. 148.474.230. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 56.569.400.
c. Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang meningkat dari Rp 5.000.140 menjadi Rp 1.005.000.140, sebagai bagian dari program revitalisasi TPI. Pada sub kegiatan ini terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000. Penambahan anggaran ini bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi.

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, baik yang disebabkan oleh perubahan kebijakan nasional dan daerah, penyesuaian terhadap kemampuan riil anggaran, maupun kondisi obyektif di lapangan yang memerlukan respons cepat dan tepat.

Perubahan Renja ini menjadi instrumen penting dalam memastikan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor perikanan, serta tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025–2029.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha perikanan lainnya. Perubahan ini juga mencerminkan komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2025 secara terarah dan akuntabel.

"***Organisasi yang hebat bukan dibangun oleh satu orang yang luar biasa, tapi oleh tim yang solid dengan tujuan yang sama***".

Semoga ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap langkah kita. ***Aamiin...***

Takalar, 2025

Kepala Dinas,

H. BASO, S.Pd., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19661231 198903 1 009

PERUBAHAN RENJA
TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 tidak terlepas dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar 2025-2029. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Serta peningkatan perencanaan pembangunan dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 mendatang.

Takalar, 2025

KEPALA DISPERINDAG KAB.TAKALAR



NASRUDDIN A., ST,M.Si
Pangkat :Pembina Tk.I
NIP. 19710724 200212 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.3.1. Maksud 5

1.3.2. Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **7**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Triwulan I 7

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2025 yang Terakomodir di APBD 2025 13

2.1.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025 13

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 14

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (IKU) 17

2.2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Indikator Kunci Utama (IKU) 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN **19**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 19

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025 20

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025 20

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 20

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 21

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 25

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 25

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja 25

BAB V PENUTUP 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Keterkaitan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3
Gambar III-1 Prioritas Nasional Tahun 2025 21

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Takalar Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2025 8

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-2 ..... Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Yang Ada Dalam APBD 2025 13

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-3 ..... Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I 13

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-4 ..... Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 15

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-5 ..... Rekapitulasi Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 17

Tabel II-6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar 17

Tabel III-1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 23

Tabel IV.1 Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah 25

Tabel Iv-2 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1./1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; ; dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di jadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tahun 2025, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dan kemudian berubah menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Takalar.

Gambar I-1

Keterkaitan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

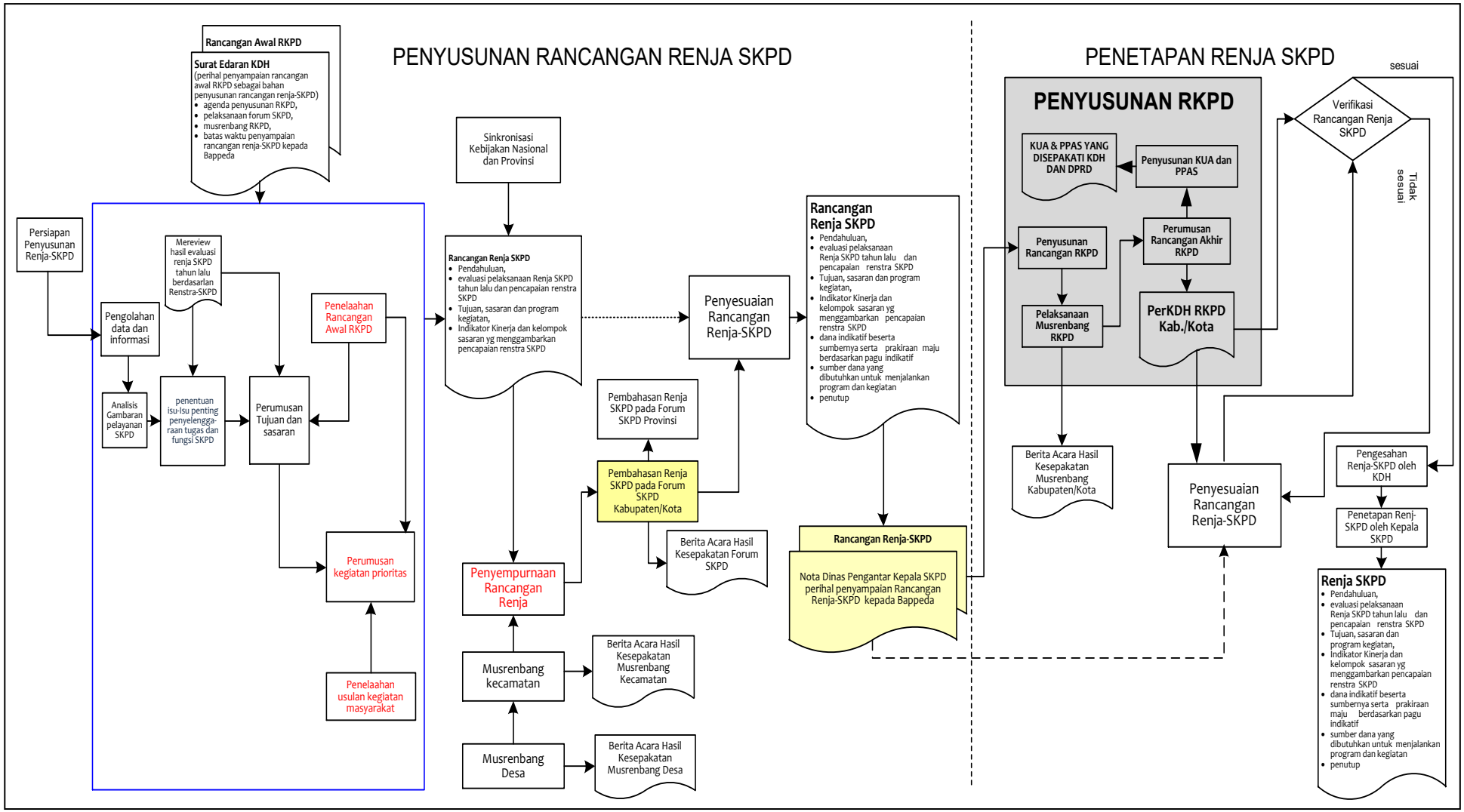

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan peruabahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahn Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 11);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan maksud:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar kedalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi Perubahan APBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Peruabahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BAB II Hasil Evaluasi Perubahan Renja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024. Pada Bab ini berisi empat hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024, Analisis

Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar. Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025. Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta sub kegiatan.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan uraian perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Triwulan I

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Periode Pelaksanaan 2025.

Tabel II-1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Takalar

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar

Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

Kodse					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN															
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		**100%**	**Persen**	**15.485.059.344**	**100%**	**3.568.476.087**	**100%**	**4.050.922.795**		**706.726.716**	**26%**	**706.726.716**	**25,92%**	**17,45%**
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**		**100%**	**Persen**	**15.435.059.344**	**100%**	**3.553.544.087**	**100%**	**4.030.922.795**	**26,80%**	**701.612.516**	**27%**	**701.612.516**	**26,85%**	**17,41%**
3	30	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persen**	**15.150.059.344**	**77%**	**3.456.863.887**	**100%**	**3.995.922.795**	**32,40%**	**695.750.416**	**32,40%**	**695.750.416**	**32,40%**	**17,41%**
3	30	1	2,01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Dokumen Perencanaan**	100,00%	Persen	152.596.700	100%	31.814.000	100%	28.192.300	32%	3.369.400	32%	3.369.400	32%	12%
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja serta perubahannya yang disusun	8	Dokumen	30.800.000	2	12.368.000	2	8.112.700	1	2.055.900	1	2.055.900	50%	25%
3	30	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	8.943.700	1	6603700	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3	30	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16	Dokumen	37.085.600	1	5.244.500	4	6.335.900	-	-	-	-	0%	0%
3	30	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	23.496.800	1	1.550.000	1	3.635.000	1	450.000	1	450.000	100%	12%
3	30	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.089.000	1	1089000	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat	24	Laporan	12.936.000	1	3.809.000	6	5.975.000	3	633.600	3	633.600	50%	11%

Kodse					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	I					
														K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Daerah yang disusun (Sakip : LPJ, LPPD)													
3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Triwulanan)	48	Laporan	38.245.600	1	1.149.800	12	4.133.700	3	229.900	3	229.900	25%	6%
3	30	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**	100,00%	Persen	14.273.296.944	100,00%	3.130.332.613	100,00%	3.683.292.995	13,59%	665.676.616	13,59%	665.676.616	14%	18%
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN	1.792	Orang	10.073.439.104	448	2.263.484.864	448	2.604.010.658	128	664.929.116	128	664.929.116	29%	26%
						Jumlah ASN yang mendapatkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja (TPP)	1.536	Orang	3.693.402.240	384	864.424.949	384	1.059.239.337	-	-	0	-	0%	0%
						Jumlah ASN yang mendapatkan Objektifitas Lainnya	480	Orang	495.840.000	0	0	120	12.660.000	-	-	0	-	0%	0%
3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	4	Laporan	9.615.600	1	1.612.800	1	3.200.200	-	-	0	-	0%	0%
3	30	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	1.000.000	6	810.000	18	4.182.800	4	747.500	4	747.500	22%	18%
3	30	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersedia**	100%	Persen	7.200.000	50%	1.182.600	100%	2.101.800	25,00%	157.200	25%	157.200	25%	7%
3	30	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	48	Laporan	3.600.000	1	682.600	12	1.298.900	3	157.200	3	157.200	25%	12%
3	30	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	3.600.000	1	500.000	12	802.900	3	-	3	-	25%	0%
3	30	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mendapatkan pakaian dinas dan ikut pelatihan**	100,00%	Persen	19.960.800	75,00%	561.700	100,00%	2.667.600	25,00%	-	25%	-	25%	0%

Kodse					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	30	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	Dokumen	19.960.800	3	561.700	12	2.667.600	3	-	3	-	25%	0%
3	30	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100,00%	Persen	296.289.700	92,31%	75.842.888	100,00%	64.935.300	15,38%	8.181.000	15%	8.181.000	15%	13%
3	30	1	2.06	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	Paket	75.204.000	1	1.182.100	2	16.267.000	-	121.000	0	121.000	0%	1%
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.189.700	1	1.000.000	1	1.002.300	-	-	-	-	0%	0%
3	30	1	2.02	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	219.896.000	10	73.660.788	10	47.666.000	2	8.060.000	2	8.060.000	20%	17%
3	30	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	Persen	241.004.800	100,00%	187.880.086	100,00%	181.102.800	15,79%	11.166.200	15,79%	11.166.200	16%	6%
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air)	48	Laporan	24.004.800	12	16.870.086	12	4.612.800	3	376.200	3	376.200	25%	8%
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.000.000	1	610.000	2	6.090.000	-	990.000	-	990.000	0%	16%
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	Laporan	216.000.000	446	170.400.000	24	170.400.000	3	9.800.000	3	9.800.000	13%	6%
3	30	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Persen	159.710.400	100,00%	29.250.000	100,00%	33.630.000	100,00%	7.200.000	100,00%	7.200.000	100%	21%
3	30	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	4	Unit	159.710.400	2	29.250.000	1	33.630.000	1	7.200.000	1	7.200.000	100%	21%
3	30	3			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**PERSENTASE PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**				**100%**	**59.400**								
3	30	3	2.01		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar**	**Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar**				100%	59.400								

Kodse					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**													
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1	59.400								
3	30	3			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**100%**	**Persen**	**230.000.000**	**67%**	**25.658.000**	**100%**	**10.000.000**	**16,67%**	**-**	**17%**	-	**8%**	**0%**
3	30	3	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	100%	Persen	230.000.000	67%	25.658.000	100%	10.000.000	16,67%	-	17%	-	17%	0%
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3	Unit	230.000.000	2	25.658.000	6	10.000.000	1	-	1	-	17%	0%
3	30	4			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**100%**	**Persen**	**40.000.000**	**100%**	**64.117.000**	**100%**	**15.000.000**	**33,33%**	**3.732.100**	**33%**	3.732.100	**33%**	**25%**
3	30	4	2.01		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok**	100%	Persen	40.000.000	100%	64.117.000	100%	15.000.000	33,33%	3.732.100	33%	3.732.100	33%	25%
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	40.000.000	2	64.117.000	3	15.000.000	1	3.732.100	1	3.732.100	33%	25%
3	30	6			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang**	**100%**	**Persen**	**15.000.000**	**100%**	**6.845.800**	**100%**	**10.000.000**	**25,00%**	**2.130.000**	**25%**	**2.130.000**	**25%**	**21%**
3	30	6	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Frekwensi Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang**	100%	Persen	15.000.000	100%	6.845.800	100%	10.000.000	25,00%	2.130.000	25%	2.130.000	25%	21%

Kodse					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi (%)	
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	16	Dokumen	15.000.000	1	6.845.800	4	10.000.000	1	2.130.000	1	2.130.000	25%	21%
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**50.000.000**		**14.932.000**	**100%**	**20.000.000**	**25,00%**	**5.114.200**	**25%**	**5.114.200**	**25,00%**	**25,57%**
3	31	2			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**PERSENTASE PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**100%**	**Persen**	**10.000.000**	**100%**	**4.972.000**	**100%**	**10.000.000**	**25,00%**	**2.614.200**	**25,00%**	2.614.200	**25,00%**	**26,14%**
3	31	2	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat**	100%	Persen	10.000.000	100%	4.972.000	100%	10.000.000	25%	2.614.200	25%	2.614.200	25%	26%
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	10.000.000	1	63.000	4	10.000.000	1	2.614.200	1	2.614.200	25%	26%
3	31	3			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Pelaksanaan Pertemuan/rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri**	**100%**	**Persen**	**40.000.000**	**100%**	**9.960.000**	**100%**	**10.000.000**	**25,00%**	**2.500.000**	**25%**	**2.500.000**	**25,00%**	**25,00%**
3	31	3	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Pertemuan/rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri**	100%	Persen	40.000.000	100%	9.960.000	100%	10.000.000	25,00%	2.500.000	25%	2.500.000	25%	25%
3	31	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkornisasi Pengawasan Perizinan	1	Dokumen	40.000.000	1	9.960.000	4	10.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	25%	25%

Sumber Data : *Laporan Monev Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Dinas Perindustruan adan Perdagangan*

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2025 yang Terakomodir di APBD 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RPJMD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Error! No text of specified style in document.**-2**

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

APBD 2025							
No. Urut	**Perangkat Daerah**	**Jmlh Prog.**	**Jmlh Keg**	**Jmlh Sub Keg.**	**Indikator**		
					Jmlh Prog.	**Jmlh Keg**	**Jmlh Sub Keg.**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	12	25	6	12	27
TOTAL		**6**	**12**	**25**	**6**	**12**	**27**

Sumber Data : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Dinas Perindustruan adan Perdagangan

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 6, jumlah kegiatan 12, dan jumlah sub kegiatan 25, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 6, jumlah indikator kegiatan sebanyak 12, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 27.

2.1.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Error! No text of specified style in document.**-3**

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.050.922.795	706.726.716	25,92%	17,45%
TOTAL		**4.050.922.795**	**706.726.716**	**25,92%**	**17,45%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Dinas Perindustruan adan Perdagangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp. 4.050.922.795,-. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 17,45% persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 26,92% persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20% dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 6. Program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada 1 (realisasinya 0-10 persen), Untuk tingkat Capaian Pendanaan kategori sedang sebanyak 1

program (realisasi >10-20 persen), dan Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan kategori tinggi sebanyak 4 program (realisasi diatas >20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 5 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang >10-20 sebanyak 2 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi pendanaannya >20 persen sebanyak 5 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 25 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah terdapat 13 sub kegiatan, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 5 sub kegiatan, dan 7 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan >20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Error! No text of specified style in document.**-4**
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Perindustruan adan Perdagangan	6	1	1	4	12	4	3	5	25	12	6	7
TOTAL		**6**	**1**	**1**	**4**	**12**	**5**	**2**	**5**	**25**	**13**	**5**	**7**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Dinas Perindustruan adan Perdagangan

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian berdasarkan kinerja pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan kinerja 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan kinerja lebih besar dari >10 – 20% dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 20 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 20 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada level program untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 6. Program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori **rendah** ada 1 (realisasinya 0-10 persen), Untuk tingkat Capaian kinerja kategori **sedang** sebanyak 0 program (realisasi >10-20 persen), dan Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian kinerja kategori **tinggi** sebanyak 5 program (realisasi diatas >20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pada level kegiatan pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 0 kegiatan yang realisasi kinerja hingga triwuan I masih dalam kategori **rendah** yaitu 0 – 10 persen, sedang yang berada dalam kategori **sedang** >10-20 sebanyak 4 kegiatan, dan kategori **tinggi** dengan capaian realisasi kinerja >20 persen sebanyak 8 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 25 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat sub kegiatan yang capaian kinerja masih **rendah**

terdapat 7 sub kegiatan, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi kinerja **sedang** terdapat 3 sub kegiatan, dan 15 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi kinerja **tinggi** sebab telah dapat mencapai realisasi kinerja >20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Error! No text of specified style in document.**-5**
Rekapitulasi Capaian Kinerja berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%		0 - 10%	>10-20%	>20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Perindustruan adan Perdagangan	6	1	0	5	12	0	4	8	25	7	3	15
TOTAL		**6**	**1**	**0**	**5**	**12**	**0**	**4**	**8**	**25**	**7**	**3**	**15**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Dinas Perindustruan adan Perdagangan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (IKU)

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Nilai PDRB Sektor Industri laju pertumbuhan ekonomi sub sektor industri pengolahan	5,00%	5,11%	T.1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,22 %	13,62 %	14,04 %	-	13,62%	14,04 %	
	Persentase Pertumbuhan Jumlah industri pengolahan dan manufaktur	3,3 %	3.2%	T.2. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	5,23%	5,26%	5,28%	-	5,26%	5,28%	
	Nilai PDRB Sub Sektor Jasa	12,83%	13,83%	S1 Persentase Peningkatan Volume Perdagangan dalam Daerah	6,30%	6,80%	7,30%	6,30%	6,30%	6,80%	
	Persentase koefisien variasi harga barang pokok dan penting antar waktu	5,34%	5,49%	S2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Pengolahan dan Manufaktur	3,4%	3,5%	3,6%	3,4%	3,5%	3,6%	
	Persentase peningkatan volume perdagangan dalam daerah	5.8%	1,132.75 T	S3.1. Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BB (70-71)	BB (72)	BB (73-75)	BB (70,17)	BB (70-71)	BB (72)	
	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas perindustrian dan Perdagangan	B	BB (70,38)	S3.2. Tingkat Capaian Literasi Digital ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46,88 %	50,00 %	91,18 %	44,12%	50,00%	91,18 %	
	Nilai sakip Dinas Perindustrian dan Perdagangan	B	BB (70,38)	S4.1. Persentase Peningkatan PAD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13%	14,40 %	15,80 %	13%	14,40%	15,80 %	
				S4.2. Tingkat Capaian PAD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	956.154.000	1.000.000.000	1.000.000.000	

Sektor perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang berfokus pada jual beli barang dan jasa untuk mendistribusikannya dari produsen kepada konsumen, baik di dalam negeri (domestik) maupun antar negara (internasional). Sektor ini berperan penting dalam perekonomian karena memfasilitasi pergerakan barang, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi. Sektor perdagangan menjadi kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB di kabupaten takalar setelah sektor pertanian, Perkebunan dan perikanan dengan PDRB sebesar 1.722,77 milyar rupiah, sektor perdagangan berkontribusi sebesar 12,83 persen terhadap total PDRB ADHB Kabupaten Takalar yang sebesar 13.428,09 Milyar Rupiah. Pada tahun 2025, Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 13,22 persen. pada tahun 2026, Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB meningkat 13,62 persen. Selanjutnya pada tahun 2027 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB kembali mengalami peningkatan sebesar 14,04 persen.

Peningkatan kontribusi sektor industry terhadap PDRB dalam beberapa tahun terakhir di Kab. Takalar menunjukkan perkembangan yang cukup positif, peningkatan ini tidak hanya mencerminkan bertambahnya jumlah unit usaha industry tetapi juga menandakan peningkatan produktifitas dan nilai tambah yang dihasilkan. Peningkatan ini disebabkan Pemerintah Kab. Takalar terus mendorong sektor industry melalui Kawasan industry, peningkatan konektivutas infrastruktur serta pembagian dukungan bagi pelaku usaha kecil menengah, Upaya tersebut mampu mendorong tumbuhnya sentra-sentra priduksi baru terutama pada sektor industry pengolahan berbasis hasil pertanian, perikananserta industry makanan dan minuman yang menjadi andalan Daerah.

Target Pada periode 2025-2027, Persentase Peningkatan Volume Perdagangan dalam Daerah Pada tahun 2025, Persentase Peningkatan Volume Perdagangan dalam Daerah yakni 6,30 persen. Pada tahun 2026, Persentase Peningkatan Volume Perdagangan dalam Daerah meningkat 0,5. Selanjutnya pada tahun 2027 Persentase Peningkatan Volume Perdagangan dalam Daerah kembali dengan kenaikan sama tiap tahunnya sebesar 0,5 persen.

Target Pada periode 2025-2027, Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Pengolahan dan Manufaktur Pada tahun 2025, Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Pengolahan dan Manufaktur yakni 3,5 persen. Pada tahun 2026, Persentase Peningkatan Volume Perdagangan dalam Daerah meningkat 0,2. Selanjutnya pada tahun 2027 Persentase Peningkatan Volume Perdagangan dalam Daerah kembali dengan kenaikan sama tiap tahunnya sebesar 0,2 persen dari hasil Jumlah industri tahun ini -tahun lalu/ tahun lalu*100.

Target Pada periode 2025-2027, Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pada tahun 2025, Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni BB (70-71) di tahun 2025 hasil penilainnya dengan bobot 70,17 predikat BB. Pada tahun 2026, Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan meningkat dengan bobot dan predikat (BB/72). Selanjutnya pada tahun 2027 Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali dengan kenaikan dengan bobot dan predikat (BB/73-75).

Target Pada periode 2025-2027, Tingkat Capaian Literasi Digital ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pada tahun 2025, Tingkat Capaian Literasi Digital ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni 46,88 persen dari 32 jumlah ASN di bagi 15 jumlah ASN terhadap Tingkat literasi digital. Pada tahun 2026, Tingkat Capaian Literasi Digital ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan meningkat 3,12 Persen, Selanjutnya pada tahun 2027 Persentase Tingkat Capaian Literasi Digital ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali dengan kenaikannya sangat tinggi sebesar 41,18 persen.

Target Pada periode 2025-2027, Persentase Peningkatan PAD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pada tahun 2025, di targetkan tercapai 100% (Persen) disetiap tahunnya dengan Tingkat pertumbuhan PAD ditargetkan terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2025 pertumbuhan PAD ditargetkan 13%, kemudian di tahun 2026 ditargetkan tumbuh menjadi 14,4% dan 15,8% di tahun 2027.

Target Pada periode 2025-2027, Tingkat Capaian Realisasi PAD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pada tahun 2025, Tingkat Capaian PAD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni 1 Milyar Rupiah. Pada tahun 2026, Tingkat Capaian PAD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sma tiap tahunnya 1 Milyar Rupiah sampai tahun periode 2025-2027

Adapun yang menjadi factor tidak tercapainya terkait indicator pada dinas Perindustrian dan perdagangan ialah diantaranya :

1. Kembalian uang relatif berkurang karena sebagian tdk mengembalikan sisa uangnya (pedagang Lods)
2. Lebih dari separuh dari jumlah pedagang Lods adalah pedagang tdk tetap (musiman) sehingga penarikan Retribusi tdk efektif.
3. Rata-rata pedagang Kios melakukan pembayaran pada akhir tahun (November - Desember)
4. Pengunjung Pasar hanya ramai pada bulan tertentu (jelang Idul Fitri, Idul Adha & Maulid) yg sangat berpengaruh pada keaktifan pedagang ke pasar.

Dengan banyaknya Sarana (Ruko, Kios dan Lods) yang tidak terisi/kosong di sejumlah Pasar maka diharapkan :

1. Setiap tahunnya ada peningkatan Pedagang (Pelaku Distribusi) yang aktif menggunakan sarana yang ada.
2. Penarikan Retribusi dengan Sistem Digital (QRIS) diharapkan akan memaksimalkan PAD

Peningkatan Pertumbuhan sektor industry meningkat dikarenakan pemerintah daerah mulai melakukan pendataan pelaku industry secara sistematis dan menyeluruh terutama melalui digitalisasi data serta mulai diberlakukan kebijakan bagi pelaku usahan memiliki NIB terutama setelah implementasi system OSS meningkatkan jumlah usaha industry yang terdata resmi sehingga menambah kontribusi terhadap pertumbuhan industry daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemeintah (RKP) Tahun 2025, sebagai berikut: Visi Presiden dalam 5 tahun kedepan yaitu adalah maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Prioritas Kementerian Perindustrian

1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
2. Penguatan implementasi making Indonesia 4.0
3. Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri
4. Meningkatnya penguasaan pasar industri
5. Meningkatnya persebaran industri
6. Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif

Sasaran yang ingin dicapai dalam renstra kementerian Perindustrian selaras dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar yaitu meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan.

Prioritas Kementerian Perdagangan

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa. Sasaran startegis yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:
   a) Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang

b) Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;

c) Meningkatnya pasar produk dalam negeri; dan

d) Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

3.1.1. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

3.1.2. Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut

3.1.2.1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Periode 2025 – 2029 dan RPJMD Tahun 2025 -2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. untuk menunjang keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka dirumuskanlah tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu “Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap Perekonomian” untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 4 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya volume perdagangan.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Jumlah Industri Pengolahan dan Manufaktur
3. Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Sasaran 4: Meningkatnya PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan dan sasaran Bappelitbangda dalam Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan target pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III-2
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar
Tahun 2025-2029

Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra PD 2023-2026			Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra PD 2023-2026		
Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Target 2025**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**
TUJUAN: 1 Meningkatkan Laju pertumbuhan nilai ekonomi dari sektor perindustrian	Nilai PDRB Sektor Industri laju pertumbu han ekonomi sub sektor industri pengolahan	580 Juta	T. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadapa Perekonomian	T.1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,81%
Sasaran : 1 Meningkatnya Jumlah industri Pengolahan dan manufaktur	Persentase Pertumbuhan Jumlah industri pengolahan dan manufaktur	3.5 %		T.2. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	5,23%
TUJUAN. 2 Meningkatkan Volume dan Nilai Perdagangan Daerah	Nilai PDRB Sub Sektor Jasa	1,695 T	S1. Meningkatnya volume perdagangan	S1 Persentase Peningkatan Volume Perdagangan dalam Daerah	6,30%
Sasaran: 1 Terjaminnya ketersediaan barang pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga barang pokok dan penting antar waktu	1.5 %	S2. Meningkatnya Jumlah Industri Pengolahan dan Manufaktur	S2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Pengolahan dan Manufaktur	3,4%
	Persentase peningkata n volume perdaganga n dalam daerah	6.3%	S3. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	S3.1. Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BB (70-71)
TUJUAN : 3 Meningkatkan tata kelola pada Dinas Perindustria dan Perdagangan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas perindustr ian dan Perdagangan	B		S3.2. Tingkat Capaian Literasi Digital ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46,88%

Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra PD 2023-2026			Renja Pokok Tahun 2025 (Renstra PD 2023-2026		
Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Target 2025**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**
Sasaran : 1 Meningkatnya tata kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai sakip Dinas Perindustri an dan Perdagangan	B	S4. Meningkatnya PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan	S4.1. Persentase Peningkatan PAD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13%
				S4.2. Tingkat Capaian PAD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.000.000.000

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029; diolah

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang disukung peran BUMD, BUMDes, IMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan industry kabupaten/kota	Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100.000.000,00

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 dengan total pagu Rp4.251.467.895,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh RIbu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV-2

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**3.619.694.184,00**	**4.061.320.822,00**	**4.251.467.895,00**	**631.773.711,00**							**5.440.895.280,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.619.694.184,00**	**4.061.320.822,00**	**4.251.467.895,00**	**631.773.711,00**							**5.440.895.280,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**3.599.694.184,00**	**4.041.320.822,00**	**4.139.707.895,00**	**540.013.711,00**							**5.065.895.280,00**	
1,	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**PERSENTASE PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perlengkapan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**				**100 94 % %**	**100 94 % %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Cakupan Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan, dan Izin usaha Toko Swalayan*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
2,	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI**				**80 %**	**80 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**5.890.000,00**	**215.000.000,00**							**225.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.890.000,00	-4.110.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				48 Unit	6 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	5.890.000,00	-4.110.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		170.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok**				**1,5 %**	**1,5 %**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**10.946.750,00**	**85.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Cakupan Perumusan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	10.946.750,00	-4.053.250,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.946.750,00	-4.053.250,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4,	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN EKSPOR**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				30 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				30 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5,	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku**				**60 %**	**60 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**5.890.000,00**	**90.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.890.000,00	-4.110.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				600 Unit	4 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	5.890.000,00	-4.110.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				3 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6,	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran**				**30 %**	**30 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**							**25.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Cakupan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				25 UMKM	0 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7,	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**3.564.694.184,00**	**4.006.320.822,00**	**4.116.981.145,00**	**901.201.096,00**							**4.465.895.280,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	31.817.300,00	28.192.300,00	16.236.350,00	-15.580.950,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		48.146.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.782.700,00	8.112.700,00	5.026.500,00	-4.756.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.271.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dokumen RKA-SKPD										Pattallassang			6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4 Dokumen	6.335.900,00	6.335.900,00	3.375.900,00	-2.960.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.271.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.070.000,00	3.635.000,00	1.930.000,00	-2.140.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.874.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.234.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	6 Laporan	6.895.000,00	5.975.000,00	3.468.400,00	-3.426.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.234.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	4.733.700,00	4.133.700,00	2.435.550,00	-2.298.150,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.561.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.218.995.280,00	3.693.691.022,00	3.678.813.095,00	459.817.815,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		3.666.975.080,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				456 Orang/bulan	448 Orang/bulan	3.211.042.280,00	3.686.308.022,00	3.675.909.995,00	464.867.715,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.658.359.480,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.200.200,00	3.200.200,00	1.109.000,00	-2.091.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				6 Laporan	18 Laporan	4.752.800,00	4.182.800,00	1.794.100,00	-2.958.700,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.615.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.153.800,00	2.101.800,00	1.783.000,00	-370.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		1.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.358.900,00	1.298.900,00	1.289.000,00	-69.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			900.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12 Laporan	794.900,00	802.900,00	494.000,00	-300.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			900.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.747.600,00	2.667.600,00	2.459.600,00	-288.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		89.990.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	2.747.600,00	2.667.600,00	2.459.600,00	-288.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.990.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				38 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	57.468.300,00	64.935.300,00	36.456.300,00	-21.012.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		83.475.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	16.267.000,00	16.267.000,00	15.615.000,00	-652.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.801.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.002.300,00	1.002.300,00	1.002.300,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10 Laporan	40.199.000,00	47.666.000,00	19.839.000,00	-20.360.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			54.974.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		91.660.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.830.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.830.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	214.741.904,00	181.102.800,00	181.102.800,00	-33.639.104,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		117.420.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38.251.904,00	4.612.800,00	4.612.800,00	-33.639.104,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			53.420.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2 Laporan	6.090.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	24 Laporan	170.400.000,00	170.400.000,00	170.400.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			54.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	36.770.000,00	33.630.000,00	200.130.000,00	163.360.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		366.427.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	36.770.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	-3.140.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39.927.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	10 Unit	0,00	0,00	166.500.000,00	166.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			166.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**111.760.000,00**	**91.760.000,00**							**375.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah Persentase cakupan pengembangan sentra industri**				**50 40 30 % % %**	**50 40 30 % % %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**105.890.000,00**	**165.000.000,00**							**175.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	105.890.000,00	95.890.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Jumlah Industri Pengolahan dan Manufaktur		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	105.890.000,00	95.890.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				70 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2,	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota**				**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**5.870.000,00**	**165.000.000,00**							**175.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.870.000,00	-4.130.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Jumlah Industri Pengolahan dan Manufaktur		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				12 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.870.000,00	-4.130.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3,	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Informasi Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN)**				**25 %**	**25 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**							**25.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Jumlah Industri Pengolahan dan Manufaktur		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	JUMLAH								**3.619.694.184,00**	**4.061.320.822,00**	**4.251.467.895,00**	**20.817.255.718,00**							**5.440.895.280,00**	

Takalar, 2025

KEPALA DISPERINDAG KAB.TAKALAR

NASRUDDIN A., ST,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025;
3. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja Perubahan ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar;
4. Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;

Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Takalar, 2025

KEPALA DISPERINDAG KAB.TAKALAR

NASRUDDIN A., ST,M.Si
Pangkat :Pembina Tk.I
NIP. 19710724 200212 1 001